RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman

pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

DOKUMEN RPJM DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
   b. dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah;
   c. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah; dan
   d. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.

(4) RPJM Daerah wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku Pembangunan nonpemerintah.

Pasal 3

(1) RPJM Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika terdiri atas:
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Gambaran Umum Daerah;
   c. BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. BAB V Penutup.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM DAERAH

Pasal 4

(1) Pelaksanaan program RPJM Daerah oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

(2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah wajib berkonsultasi, berkoordinasi, dan mendapat persetujuan Wali Kota melalui Kepala Bapperida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Wali Kota melalui Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang sesuai dengan prinsip kebijakan satu data Indonesia, dan dengan menerapkan manajemen risiko Pembangunan Daerah.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah.

(5) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Bapperida kepada Wali Kota.

Pasal 6

(1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Daerah bersifat indikatif.

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala Bapperida kepada Wali Kota untuk mendapatkan keputusan.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKP Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:

a. hasil hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan;

b. b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.72/36/6/2025.

DAFTAR ISI

			Halaman
DAFTAR ISI			**i**
DAFTAR TABEL			**iii**
DAFTAR GAMBAR			**x**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**I-1**
	1.1	Latar Belakang	I-1
	1.2	Dasar Hukum	I-3
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-6
	1.4	Maksud dan Tujuan	I-10
	1.5	Sistematika Penulisan	I-11
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH**		**II-1**
	2.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
		2.1.1 Posisi dan Peran Strategi Daerah	II-1
		2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	II-19
		2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-26
		2.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	II-53
		2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	II-64
		2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-69
		2.1.7. Demografi	
	2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-87
		2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-87
		2.2.2. Kesehatan Untuk Semua	II-108
		2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-117
		2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-126
		2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-127
		2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-130
	2.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II-137
		2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-137
		2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-139
		2.3.3. Transformasi Digital	II-147
		2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-149
		2.3.5. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pertumbuhan Ekonomi	II-150
		2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro	II-167
	2.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-169
		2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-169
		2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-177

	2.4.3.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-181
	2.4.4.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-184
2.5	Gambaran Keuangan Daerah		II-249
	2.5.1.	Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir	II-249
	2.5.2.	Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan	II-277
	2.5.3.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	II-277
	2.5.4.	Proyeksi Pembiayaan Daerah	II-284
	2.5.5.	Perhitungan Kerangka Pendanaan	II-286
2.6	Permasalahan dan Isu Strategis		II-292
	2.6.1	Permasalahan	II-292
	2.6.2.	Permasalahan Utama Pembangunan	II-293
	2.6.3.	Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	II-303
	2.6.4.	Isu Strategis Daerah	II-334
	2.6.5.	Penelaahan Isu/Kebijakan Nasional	II-335
	2.6.6.	Penelaahan Isu/Kebijakan Provinsi	II-347
	2.6.7.	Penelaahan Isu/Kebijakan Kota Samarinda	II-349
	2.6.8.	Isu Ekonomis	II-369
	2.6.9.	Isu Sosial	II-379
BAB III	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**		III-1
3.1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran		III-1
	3.1.1.	Visi dan Misi	III-1
	3.1.2.	Tujuan dan Sasaran	III-14
	3.1.3.	Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	III-19
3.2.	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah		III-19
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**IV-1**
4.1	Program Perangkat Daerah		IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		IV-1
BAB V	**PENUTUP**		**V-1**
5.1	Kaidah pelaksanaan		V-1
5.2	Pedoman Transisi		V-3

DAFTAR tabel

Tabel		Halaman
2.1.	Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan di Kota Samarinda Tahun 2024	II-2
2.2.	Kondisi Topografi di Kota Samarinda	II-6
2.3.	Kondisi Fisiografi Kota Samarinda	II-7
2.4.	Luas Bentuk Lahan di Kota Samarinda	II-9
2.5.	Kondisi Geologi di Kota Samarinda	II-13
2.6.	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan di Kota Samarinda Tahun 2024	II-15
2.7.	Jenis Tanah Kota Samarinda	II-17
2.8.	Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024 Kota Samarinda (ton)	II-19
2.9.	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 Kota Samarinda (Ton)	II-20
2.10.	Luas Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 Kota Samarinda (Ha)	II-21
2.11.	Data Produksi Perkebunan Tahun 2020-2024 Kota Samarinda	II-22
2.12.	Produksi Unggulan Hortikultura Di Kota Samarinda	II-23
2.13.	Data Populasi Ternak Tahun 2020-2024 Kota Samarinda	II-24
2.14.	Data Produksi Daging Tahun 2020-2024 Kota Samarinda	II-25
2.15.	Data Produksi Telur Tahun 2020-2024 Kota Samarinda	II-26
2.16.	Status Daya Dukung Pangan Kota Samarinda	II-29
2.17.	Status Daya Dukung Air Kota Samarinda	II-32
2.18.	Kelas Bahaya Dominan di Kota Samarinda	II-34
2.19.	Risiko Bencana di Kota Samarinda	II-35
2.20.	Klasifikasi Jasa Lingkungan	II-39
2.21.	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kota Samarinda	II-40
2.22.	Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kota Samarinda	II-42
2.23.	Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kota Samarinda	II-43
2.24.	Ambang Batas Air Kota Samarinda	II-44
2.25.	Ambang Batas Pangan Kota Samarinda	II-45

Tabel		Halaman
2.26.	Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kota Samarinda	II-46
2.27.	Jasa Lingkungan Pendukung Kehati Kota Samarinda	II-50
2.28.	Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2019-2024 Kota Samarinda	II-54
2.29.	Data Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2019-2024	II-55
2.30.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019-2024 Kota Samarinda	II-57
2.31.	Tren IKP Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2024	II-60
2.32.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-63
2.33.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-65
2.34.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-68
2.35.	Jenis dan Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-69
2.36.	Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kalimantan Timur	II-71
2.37.	Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda	II-72
2.38.	Luas Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Samarinda	II-73
2.39.	Penanganan Banjir Tahun 2020-2024 Kota Samarinda	ll-76
2.40.	Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir di Kota Samarinda	II-78
2.41.	Luas Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Samarinda	II-79
2.42.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda Tahun 2024	II-81
2.43.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024 Kota Samarinda	II-83
2.44.	Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2024	II-84
2.45.	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	II-84
2.46.	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia	II-85
2.47.	Persentase Penduduk Miskin Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-88
2.48.	Kondisi Kemiskinan per Kecamatan di Kota Samarinda Pada Tahun 2024	II-90
2.49.	Jumlah Penyandang Disabilitas per Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-95

Tabel		Halaman
2.50.	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas per Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2024	II-96
2.51.	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-97
2.52.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024	II-99
2.53.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024	II-100
2.54.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (%)	II-101
2.55.	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (%)	II-102
2.56.	PDRB per Kapita Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-103
2.57.	Jumlah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2022-2024	II-104
2.58.	Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Kota Samarinda Tahun 2022-2024	II-105
2.59.	Umur Harapan Hidup Penduduk Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II-108
2.60.	Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-111
2.61.	Jumlah Bayi dan Prevalensi Stunting Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-112
2.62.	Data Stunting Kota Samarinda Berdasarkan Batas Administrasi Tahun 2020-2024	II-113
2.63.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional 2020-2024	ll-115
2.64.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2021-2024 Kota Samarinda (%)	II-118
2.65.	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2021-2024 Kota Samarinda (%)	ll-118
2.66.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (%)	II-119
2.67.	Angka Literasi dan Numerasi di Kota Samarinda Tahun 2023-2024 (%)	II-120
2.68.	Data Akreditasi Sekolah Kewenangan Kota Samarinda Tahun 2023/2024 Negeri dan Swasta	II-112
2.69.	Nilai IMDI Kota Samarinda dan Nilai Pembentuk Tahun 2022-2024	II-123

Tabel		Halaman
2.70.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	II-126
2.71.	Jumlah Unjuk Rasa Kota Samarinda Tahun 2024	II-128
2.72.	Indeks Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2022 dan 2023	II-129
2.73.	Capaian Pembangunan Pemuda Kota Samarinda	II-135
2.74.	Perkembangan Prestasi Olahraga Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-136
2.75.	Rasio Ketergantungan Kota Samarinda Tahun 2019-2023	II-137
2.76.	Indeks Profesionalitas ASN 2024	II-138
2.77.	Rasio dan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kota Samarinda Terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-139
2.78.	Jenis Industri Tahun 2020-2024 Kota Samarinda	II-139
2.79.	Rasio dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Samarinda Terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-140
2.80.	Data Kunjungan Wisatawan Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (Orang)	II-141
2.81.	Daftar Tempat Wisata Kota Samarinda	II-142
2.82.	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (Orang)	II-144
2.83.	Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan TIK Kota Samarinda Prov Kalimantan Timur dan Nasional	II-146
2.84.	Rasio dan Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Samarinda Terhadap PDRB Tahun 2020–2024	II-148
2.85.	Kemantapan Jalan Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (km)	II-150
2.86.	Jalan Nasional Di Kota Samarinda	II-151
2.87.	Jalan Provinsi Di Kota Samarinda	II-151
2.88.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 Di Kota Samarinda	II-153
2.89.	Luasan Permukiman Kumuh Kota Samarinda (Ha) Tahun 2021-2024	II-155
2.90.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kota Samarinda	II-159
2.91.	Kebutuhan Penghunian dan Kepemilikan Kota Samarinda	II-159
2.92.	Status Daya Dukung Air Kota Samarinda	II-160

Tabel		Halaman
2.93.	Jumlah Penumpang Angkutan Kota Samarinda (Orang) Tahun 2020-2024	II-162
2.94.	Pelabuhan yang Diusahakan	II-163
2.95.	Data Pengguna Fasilitas Pelabuhan dan Dermaga	II-164
2.96.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024 Kota Samarinda	II-166
2.97.	Rasio Pajak Terhadap PDRB Tahun 2019-2024 Kota Samarinda	II-167
2.98.	Hasil Evaluasi AKIP Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-169
2.99.	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Samarinda	II-170
2.100.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-171
2.101.	Hasil Evaluasi SPBE Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-171
2.102.	Penegakan PERDA Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-176
2.103.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-176
2.104.	Angka Kriminalitas Tahun 2020-2024 Kota Samarinda	II-177
2.105.	Pekerja Rentan Penerima Perlinjamsos	II-181
2.106.	Persentase Koperasi Aktif di Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-182
2.107.	Jumlah Koperasi di Kota Samarinda Berdasarkan Jenis Tahun 2024	II-183
2.108.	Realisasi SPM Urusan Pendidikan Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2024	II-184
2.109.	Realisasi SPM Urusan Pendidikan BerdasarJumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2024	II-184
2.110.	Realisasi SPM Urusan Kesehatan Berdasar Penerima Layanan Dasar Tahun 2024	II-187
2.111.	Realisasi SPM Urusan Kesehatan Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2024	II-188
2.112.	Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2024	II-202
2.113.	Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar	II-202
2.114.	Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar	II-205
2.115.	Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar	II-205
2.116.	Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar	II-206
2.117.	Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar	II-207

Tabel		Halaman
2.118.	Realisasi SPM Urusan Sosial Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar	II-210
2.119.	Realisasi SPM Urusan Sosial Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar	II-211
2.120.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	II-217
2.121.	Rata–Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-251
2.122.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-255
2.123.	Kemampuan Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2019–2023	II-258
2.124.	Rata -Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-260
2.125.	Rata – Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2023	II-262
2.126.	Analisis Rasio Keuangan Kota Samarinda Tahun 2020–2024	II-266
2.127.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Samarinda Tahun 2020–2024	II-269
2.128.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Samarinda Tahun 2020–2023	II-273
2.129.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Samarinda Tahun 2020-2023	II-274
2.130.	Defisit Riil Anggaran Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-275
2.131.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Samarinda	II-276
2.132.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Samarinda Tahun 2020-2024	II-277
2.133.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2030	II-279
2.134.	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2030	II-283
2.135.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2030	II-285
2.136.	SiLPA Kota Samarinda Tahun 2025-2030	II-286
2.137.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kota Samarinda Tahun 2026-2030	II-287
2.138.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2030	II-289

Tabel		Halaman
2.139.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Kota Samarinda Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	II-303
2.140.	Peran dan Fungsi Kabupaten/Kota di Sekitar Kota Samarinda	II-342
2.141.	Isu Strategis Kota Samarinda Berdasarkan Hasil Analisis Masterplan	II-343
2.142.	Target Indikator Makro Kota Samarinda	II-349
2.143.	Energi GRK (ton CO2e) Berdasarkan Jenis Bahan Bakar	II-350
2.144.	Emisi Sektor Industri dari Tahun 2019 Hingga 2022	II-351
2.145.	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Kota Samarinda Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	II-352
2.146.	Tingkat Emisi GRK Akumulatif Periode Tahun 2014-2018 Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lainnya (dalam 1000 ton CO2e)	II-353
2.147.	Emisi GRK Bersih (ton CO2 e) Sektor Limbah Berdasarkan Kecamatan di Kota Samarinda	II-354
2.148.	Emisi GRK (ton CO2 e) Berdasarkan Jenis Limbah	II-355
2.149.	Emisi GRK (ton CO2 e) Sektor Limbah Berdasarkan Jenis GRK	II-356
2.150.	Bagian Wilayah Perencanaan Kota Samarinda	II-362
2.151.	Tantangan Pembangunan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda	II-372
2.152.	Tantangan pembangunan Kota Samarinda dengan mempertimbangkan dampak IKN	II-374
2.153.	4 (Empat) Pilar Strategis	II-375
2.154.	Skema Proyek Kolaborasi Tri City	II-377
2.155.	Hubungan antara Permasalahan dan Isu Strategis Kota Samarinda menurut Sustainable Development Aspects	II-381
2.156.	Bagian Wilayah Perencanaan Kota Samarinda	II-255
2.157.	Hubungan antara Permasalahan dan Isu Strategis Kota Samarinda menurut Sustainable Development Aspects	II-265
3.1	Keselarasan Misi RPJMD Kota Samarinda, RPJMD Provinsi Kaltim dengan RPJPD Kota Samarinda	III-15
3.2	17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat	III-16
3.3	Program Strategis Nasional (ProSN)	III-18
3.4	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029	III-21

Tabel		Halaman
3.5	Penyelarasan Target Makro RPJMD Kota Samarinda terhadap Target Makro Provinsi Kalimantan Timur dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029	III-27
3.6	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developments Goals (SDGs)	III-28
3.7	Keselarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Tujuan (Arah) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045	III-30
3.8	Penahapan Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2029	III-33
3.9	Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029	III-38
3.10	Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029	III-43
3.11	Prioritas Pembangunan Daerah	III-48
3.12	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029	III-62
3.13	Implementasi Program Unggulan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029	III-95
3.14	Indikasi Kegiatan Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030	III-99
3.15	Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program Unggulan RPJMD Tahun 2025-2029	III-103
3.16	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan dan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan	III-116
3.17	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan dan Pengembangan wilayah strategis kota	III-120
3.18	Skenario Pengembangan Struktur Ruang	III-124
4.1	Program Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029	IV-1
4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Samarinda Tahun 2025-2029	IV-75
4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 No	IV-78
4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029	IV-86

DAFTAR gambar

Gambar		Halaman
1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-9
1.2	Hubungan antara Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	I-10
2.1.	Peta Administrasi Kota Samarinda	II-2
2.2.	Kontribusi PDRB Kota Samarinda terhadap Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024	II-4
2.3.	Peta Geologi Kota Samarinda	II-13
2.4.	Kondisi Bentuk Lahan Kota Samarinda	II-14
2.5.	Peta Hidrologi Kota Samarinda	II-15
2.6.	Peta Curah Hujan Kota Samarinda	II-16
2.7.	Peta Jenis Tanah Kota Samarinda	II-17
2.8.	Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Samarinda	II-19
2.9.	Peta Tipe Vegetasi di Kota Samarinda	II-28
2.10.	Kebutuhan pangan kota samarinda	II-30
2.11.	Ketersediaan Pangan Kota Samarinda	II-30
2.12.	Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Samarinda	II-31
2.13.	Peta Kebutuhan Air Kota Samarinda	II-32
2.14.	Peta Ketersediaan Air Kota Samarinda	II-33
2.15.	Peta Status Daya Dukung Air Kota Samarinda	II-33
2.16.	Peta Risiko Banjir Kota Samarinda	II-36
2.17.	Peta Risiko Longsor Kota Samarinda	II-37
2.18.	Risiko karhutla, kekeringan dan cuaca ekstrim	ll-38
2.19.	Jasa ekosistem penyedia pangan Kota Samarinda	II-41
2.20.	Jasa ekosistem penyedia air Kota Samarinda	II-42
2.21.	Jasa ekosistem tata aliran air dan banjir Kota Samarinda	II-44
2.22.	Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kota Samarinda	II-47

Gambar **Halaman**

2.23. Kerangka Berfikir Kategori Terhadap Resiko Penyimpangan Iklim II-48

2.24. Indeks kerentanan terhadap perubahan iklim Kota Samarinda II-49

2.25. Jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati Kota Samarinda II-51

2.26. Peta Ekosistem Unik di Kota Samarinda II-52

2.27. Capaian PoU Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia pada tahun 2020-2024 II-62

2.28. Akses Air Minum Layak Kota Samarinda tahun 2020-2024 II-64

2.29. Akses Sanitasi Layak Kota Samarinda tahun 2020-2024 II-67

2.30. Indeks Risiko Bencana Kota Samarinda tahun 2020-2024 II-70

2.31. Persentase Kejadian Bencana di Kota Samarinda Tahun 2008 – 2022 II-73

2.32. Peta Risiko Banjir Kota Samarinda II-74

2.33. Peta Risiko Longsor Kota Samarinda II-80

2.34. Piramida Penduduk Kota Samarinda Tahun 2024 II-82

2.35. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2020-2024 II-87

2.36. Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 II-90

2.37. Distribusi Penduduk Miskin per Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2024 II-91

2.38. Jumlah Kemiskinan Ekstrim Kota Samarinda Tahun 2023-2024 II-93

2.39. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 II-104

2.40. Rasio Gini Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2010-2024 II-106

2.41. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2020-2024 II-107

2.42. Umur Harapan Hidup Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 II-108

2.43. Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Ekonomi II-109

2.44. Prevalensi Stunting Kota Samarinda Tahun 2020-2024 II-112

2.45. Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kota Samarinda Tahun 2020-2024 II-114

2.46. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024 II-116

Gambar **Halaman**

2.47. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024 II-117

2.48. Indeks Perkembangan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2020-2024 II-127

2.49. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Samarinda Tahun 2021-2024 II-131

2.50. Indeks Ketimpangan Gender Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 II-132

2.51. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 II-133

2.52. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 II-134

2.53. Proporsi kunjungan wisatawan domestik per objek wisata Kota Samarinda II-143

2.54. Rasio kewirausahaan daerah Kota Samarinda tahun 2019-2023 II-143

2.55. Indeks Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2024 II-145

2.56. Rasio Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Samarinda Terhadap PDRB Tahun 2020–2024 II-149

2.57. Grafik Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak DI Kota Samarinda Tahun 2024 II-153

2.58. Peta kebutuhan air Kota Samarinda II-161

2.59. Peta ketersediaan air Kota Samarinda II-161

2.60. Peta Status Daya Dukung Air Kota Samarinda II-162

2.61. Laju Inflasi Kota Samarinda Tahun 2020-2024 II-168

2.62. Indeks Integritas Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2024 II-174

2.63. Skor dua belas pilar Indeks Daya Saing Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 II-175

2.64. Indeks Trantibum Linmas Kota Samarinda Tahun 2022-2024 II-179

2.65. Proporsi Capaian TPB Kota Samarinda Tahun 2023 II-226

2.66. Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai (SS) II-227

2.67. Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB) II-227

2.68. Capaian TPB Kategori Belum Dikerjakan dan Belum Mencapai Target (BB) II-228

Gambar **Halaman**

2.69. Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data (NA) II-229

2.70. Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Sosial II-229

2.71. Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Ekonomi II-230

2.72. Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Lingkungan II-231

2.73. Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola II-231

2.74. Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 II-336

2.75. 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat II-337

2.76. Gambar Ilustrasi Batas Administrasi Kota Samarinda II-346

2.77. Kebutuhan dan Konsep Penanganan II-346

2.78. Konsep Penanganan II-347

2.79. Tahap Pengembangan Masterplan II-347

2.80. Struktur Ruang Kota Samarinda II-365

2.81. Keterkaitan antar TPB yang Menjadi Isu Strategis di Kota Samarinda II-383x

3.1. Keterkaitan Asta Cita dengan Misi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 III-13

3.2. Peta Highlights Indikasi Kebijakan di Kota Samarinda Tahun 2025–2029 III-114

Samarinda
KOTA PUSAT PERADABAN

BAB I

magnificent
SAMARINDA

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 27 November 2024 Kota Samarinda telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak periode 2025-2030. Berdasarkan hasil Pilkada tersebut, maka ditetapkan pasangan **Dr. H. Andi Harun dan H. Saefuddin Zuhri, SE., MM., sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda periode 2025-2030** yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota dan Wakil Walikota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas dalam membangun Kota Samarinda dengan memperhatikan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, RPJMD memiliki nilai strategis yang sangat penting, antara lain:

1. Sebagai alat untuk memetakan arah pembangunan jangka menengah Kota Samarinda secara terpadu dan terukur.
2. Menjadi pedoman dalam pengalokasian anggaran daerah untuk berbagai sektor pembangunan.

3. Menyelaraskan program-program pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel.
5. Mendorong penguatan kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD memedomani dan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan lainnya. RPJMD Kota Samarinda 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Tahap I (periode 2025-2029) RPJPD Kota Samarinda 2025-2045. Dengan demikian, kebijakan pembangunan jangka menengah disusun dengan memperhatikan arahan kebijakan dalam tahap I RPJPD. Selanjutnya, kebijakan terkait pemanfaatan tata ruang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029 mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2023-2042.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMN 2025-2029. Selanjutnya, sebagai ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur maka penyusunan RPJMD Kota Samarinda memedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Dengan demikian, terwujud keselarasan perencanaan pusat dan daerah.

Proses penyusunan RPJMD yang meliputi beberapa tahapan, yaitu: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak baik unsur pemerintah maupun non pemerintah untuk mewujudkan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial. Rencana yang dihasilkan tidak hanya berbasis sektoral namun juga memperhatikan aspek keruangan atau kewilayahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki jangka waktu lima tahun yang sama dengan RPJMD, dan disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tingkat daerah, RPJMD

dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 53);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selain dasar hukum yang relevan, penyusunan RPJMD Kota Samarinda juga harus mengikuti kaidah penyusunan produk hukum yang berlaku di daerah ini, yaitu:

1. **Kesesuaian dengan Sistem Hukum Nasional dan Daerah**. RPJMD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Hal ini termasuk mencocokkan dengan RPJPD dan RKPD yang sudah ada.

2. **Proses Partisipatif**. Penyusunan RPJMD Kota Samarinda harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat, untuk memastikan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.
3. **Koordinasi dengan Instansi Terkait**. Penyusunan RPJMD Kota Samarinda harus melibatkan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat Kota Samarinda maupun instansi yang terkait di tingkat provinsi dan pusat, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan nasional.
4. **Dokumentasi dan Penyebarluasan**. RPJMD Kota Samarinda harus didokumentasikan dengan baik dan disebarluaskan ke publik agar masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. **Konsistensi dengan Visi dan Misi Kepala Daerah**. RPJMD harus mencerminkan visi dan misi yang disampaikan oleh kepala daerah terpilih dan mengimplementasikannya melalui program-program yang nyata dan terukur, serta memperhatikan prioritas pembangunan yang ada.
6. **Evaluasi dan Pengendalian**. Proses penyusunan RPJMD harus memuat mekanisme untuk melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pencapaian hasil yang sudah ditetapkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa implementasi pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Samarinda disusun dengan mempedomani RPJPD Kota Samarinda dan RTRW Kota Samarinda, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN. RPJMD merupakan dokumen yang penting sebab merupakan pelaksanaan dari RPJPD dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD. Selain itu, untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka RPJMD disusun

dengan memperhatikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Induk Pengembangan Jaringan Pengelolaan Informasi dan Data (RIPJPID), dan Rencana Sektoral lainnya.

Penjelasan singkat mengenai keterkaitan RPJMD Kota Samarinda dengan berbagai dokumen lainnya disajikan sebagai berikut:

a. RPJMD Kota Samarinda dengan RPJPD Kota Samarinda

   RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2025-2045. RPJPD memberikan arah umum dan visi pembangunan jangka panjang daerah, sementara RPJMD menetapkan sasaran dan langkah-langkah konkret untuk mencapainya dalam lima tahun. RPJMD disusun dengan memedomani RPJPD yakni melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

b. RPJMD Kota Samarinda dengan RPJMN Tahun 2025-2029

   Dokumen RPJMD Kota Samarinda harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. RPJMN memberikan prioritas pembangunan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

c. RPJMD Kota Samarinda dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

   Mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kota dengan arah serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

d. RPJMD Kota Samarinda dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2023-2042

   RPJMD Kota Samarinda harus mempedomani RTRW Kota Samarinda Tahun 2023-2042 sebagai dasar dalam merencanakan pembangunan

wilayah Kota Samarinda. Mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

e. RPJMD Kota Samarinda dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

   Penyusunan RPJMD Kota Samarinda mempertimbangkan hasil KLHS, yang memberikan analisis mengenai dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. Rekomendasi KLHS menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD guna mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang menerapkan pembangunan berkelanjutan.

f. RPJMD Kota Samarinda dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID)

   Penyusunan RPJMD Kota Samarinda mempertimbangkan dokumen RIPJPID yang didalamnya memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi untuk mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

g. RPJMD Kota Samarinda dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

   Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD ke tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan penjenjangan kinerja.

h. RPJMD Kota Samarinda dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

   RKPD merupakan perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dari RPJMD. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD dalam rangka mencapai target-target sasaran pembangunan jangka menengah, melalui prioritas pembangunan serta program, kegiatan, dan sub kegiatan.

i. Selain keterkaitan RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan sebagaimana dijelaskan di atas, RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan sektoral. RPJMD Kota Samarinda akan mengintegrasikan rencana sektoral ini dalam kebijakan pembangunan

daerah. Lebih lanjut, RPJMD Kota Samarinda juga memprioritaskan pengembangan sistem informasi dan data daerah untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti.

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

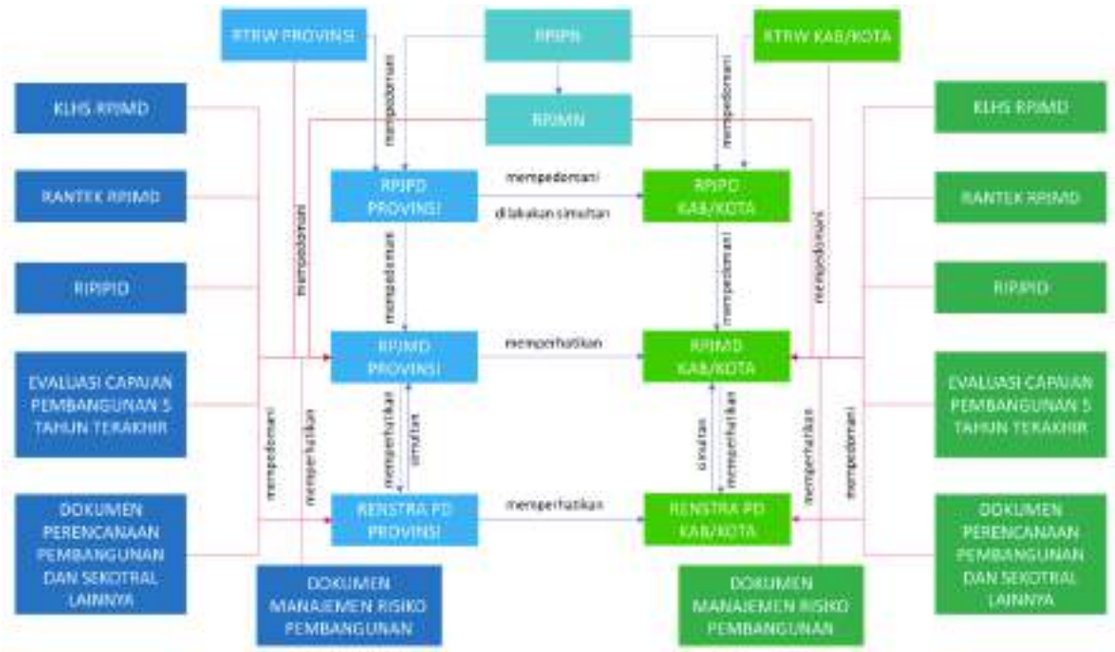

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Tinjauan kebijaksanaan sektoral dilakukan untuk melihat implikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat multisektoral agar dapat diakomodir sesuai kebutuhan dan kesesuaiannya pada ruang Kota Samarinda dalam muatan RTRW Kota Samarinda. Rencana pembangunan menjadi salah satu acuan dan pertimbangan dalam merumuskan muatan/substansi dalam rencana tata ruang. Visi, misi, serta kebijakan pembangunan jangka panjang maupun menengah diterjemahkan kedalam rencana tata ruang yang dapat mendukung pengembangan wilayah di Kota Samarinda. sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023. Dijelaskan dalam Pasal 115 bahwa RTRW Kota Samarinda menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Hubungan antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 1.2

Hubungan antara Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

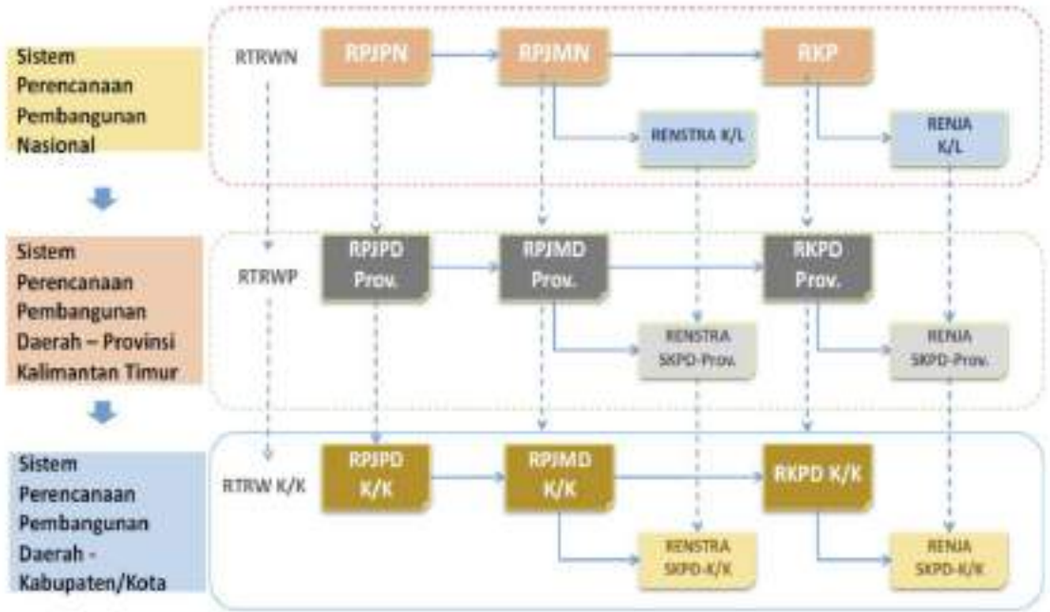

Sumber: Bappenas, diolah

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas dan terstruktur bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam menjalankan program-program pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang. RPJMD ini bertujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih, yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Dengan adanya RPJMD, pemerintah daerah dapat mengarahkan seluruh kebijakan dan program pembangunan agar lebih terfokus, terencana, dan terukur dalam pencapaian hasil yang diinginkan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah untuk mengarahkan dan merencanakan pembangunan daerah yang sistematis, terkoordinasi, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, RPJMD juga berfungsi sebagai alat untuk mengelola sumber daya secara efisien, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Gambaran Umum Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang memberikan data dan informasi pembangunan selama beberapa tahun terakhir. Selain itu disajikan juga gambaran keuangan daerah, baik informasi kinerja dan kebijakan keuangan masa lalu maupun proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pelaksanaan RPJMD. Dengan informasi kondisi daerah, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Bab 3. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat visi dan misi Kota Samarinda tahun 2025-2029 yang dijabarkan ke tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator dan target per tahun. Selanjutnya ditentukan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai misi dan sasaran RPJMD. Upaya pencapaian sasaran membutuhkan program-program prioritas pembangunan daerah merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka menengah untuk mencapai sasaran.

Bab 4. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat rencana program perangkat daerah yang diperlukan oleh seluruh perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyajian rencana program dilengkapi dengan indikator, target dan pagu indikatif untuk setiap perangkat daerah. Selain itu, di bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) beserta target per tahun.

Bab 5. Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan pedoman transisi.

Samarinda
KOTA PUSAT PERADABAN

BAB II

magnificent
SAMARINDA

Bab II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Luas Wilayah Perencanaan yakni 71.678,36 Ha (tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma tiga enam hektare) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042. Kota Samarinda terletak antara 0°19'02" Lintang Selatan dan 117°18'14" Bujur Timur dan dilalui oleh garis equator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun batas administrasi Kota Samarinda sebagai berikut:

sebelah Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara
sebelah Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara
sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
sebelah Barat : Kabupaten Kutai Kartanegara

Kota Samarinda secara administratif terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yakni Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Sementara itu, untuk jumlah kelurahan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 59 kelurahan, dan 1.975 rukun tetangga. Jumlah kelurahan yang paling banyak yaitu di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang.

Luas Wilayah berdasarkan kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 229,52 Km^2 dan Kecamatan Palaran dengan luas 221,19 Km^2. Berikut luas per kecamatan di Kota Samarinda (Gambar 2.1), dan secara terinci luas kecamatan disajikan pada Tabel 2.1.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Samarinda

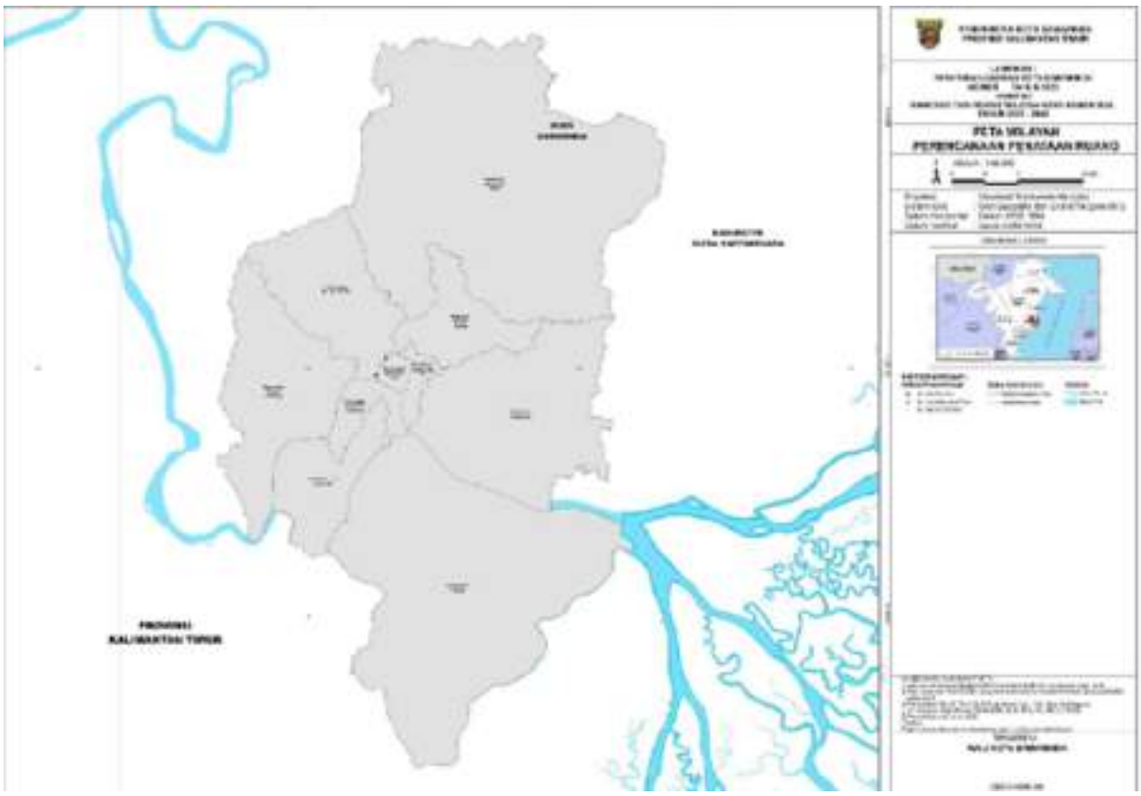

Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022-2042

Tabel 2.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan
Di Kota Samarinda Tahun 2024

Kecamatan	Kelurahan	Luas (km2)
(1)	(2)	(3)
Palaran	Rawa Makmur	12
	Handil bakti	49,85
	Bukuan	30,66
	Simpang Pasir	24,15
	Bantuas	74,94
Samarinda Seberang	Sungai Keledang	3,93
	Baqa	1,73
	Masjid	0,96
	Mangkupalas	1,75
	Tenun	0,42
	Gunung Panjang	3,1
Samarinda Ulu	Teluk Lerong Ilir	1,08
	Jawa	0,92
	Air Putih	5,98
	Sidodadi	2,12
	Air Hitam	25,63
	Dadi Mulya	0,98
	Gunung Kelua	3,04
	Bukit Pinang	11,57

Samarinda Ilir	Selili	2,07
	Sungai Damai	0,68
	Sido Maulyo	1,15
	Sido Damai	1,25
	Pelita	0,66
Samarinda Utara	Sempaja Selatan	4,69
	Lempake	34,5
	Sungai Siring	36,29
	Sempaja Utara	72,75
	Tanah Merah	48,85
	Sempaja Barat	1,82
	Sempaja Timur	5,96
	Budaya Pampang	27,95
Sungai kunjang	Loa Bakung	11,88
	Loa Buah	12,32
	Karang Asam Ulu	5,41
	Loa Bahu	32,94
	Teluk Lerong Ulu	1,26
	Karang Asam Ilir	2,11
	Karang Anyar	1,61
Sambutan	Sungai Kapih	7,25
	Sambutan	30,23
	Makroman	32,69
	Sindang Sari	4,84
	Pulau Atas	17,24
Sungai Pinang	Temindung Permai	1,58
	Sungai Pinang Dalam	5,89
	Gunung Lingai	5,87
	Mugirejo	14,19
	Bandara	0,68
Samarinda Kota	Karang Mumus	0,58
	Pelabuhan	0,97
	Pasar Pagi	0,53
	Bugis	0,76
	Sungai Pinang Dalam	0,76
Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	4,7
	Tani Aman	6,35
	Sengkotek	5,92
	Harapan Baru	8,32
	Rapak Dalam	6,55

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Samarinda Tahun 2025

Kontribusi PDRB Kota/Kabupaten terhadap provinsi merujuk pada persentase seberapa besar "kue ekonomi" (nilai total barang dan jasa yang dihasilkan) suatu kota atau kabupaten menyumbang pada total perekonomian di tingkat provinsi, yang penting untuk mengidentifikasi

daerah lokomotif ekonomi, merencanakan pembangunan yang merata, serta menganalisis kesenjangan ekonomi regional.

Gambar 2.2
Kontribusi PDRB Kota Samarinda terhadap Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024

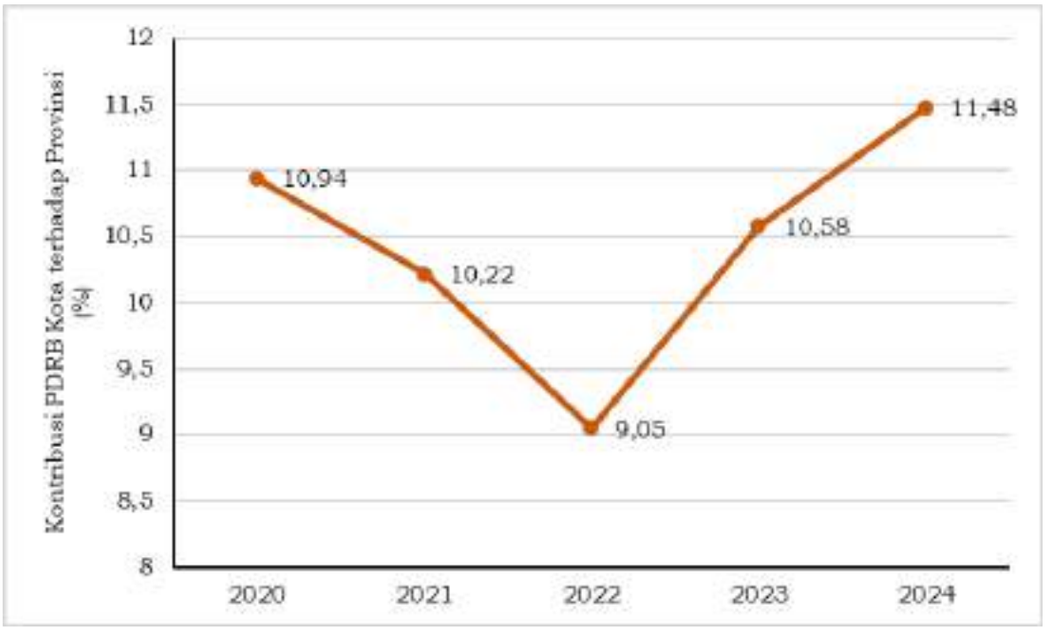

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan Gambar di atas, Kontribusi PDRB Kota Samarinda terhadap Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Samarinda dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peran ekonomi Kota Samarinda terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, kontribusi PDRB Kota Samarinda terhadap Provinsi Kalimantan Timur berada di angka 10,94%. Ini menunjukkan bahwa Samarinda memiliki peran yang cukup substansial dalam menggerakkan roda ekonomi provinsi. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 10,22%, dan berlanjut ke penurunan yang lebih tajam di tahun 2022, mencapai titik terendah pada 9,05%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Samarinda mungkin melambat atau kalah cepat dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, atau adanya pergeseran sektor dominan di provinsi yang tidak terpusat di Samarinda (misalnya, peningkatan aktivitas pertambangan atau industri di daerah lain yang tidak berpusat di Samarinda). Dampak pandemi COVID-19 yang memuncak di tahun 2021-2022 juga

berkontribusi pada penurunan ini, mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di Samarinda seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Tren ini berbalik positif di tahun 2023, di mana kontribusi PDRB Kota Samarinda kembali meningkat menjadi 10,58%. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi di Samarinda pasca-pandemi, dengan sektor-sektor ekonomi mulai kembali bergeliat. Puncaknya, di tahun 2024, kontribusi PDRB Samarinda melonjak ke angka 11,48%. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam periode yang diamati, melampaui capaian tahun 2020. Kenaikan signifikan ini dapat diartikan sebagai penguatan kembali peran Samarinda sebagai pusat ekonomi dan jasa di Kalimantan Timur, mungkin didorong oleh pemulihan sektor perdagangan, peningkatan investasi, atau pertumbuhan sektor-sektor strategis lainnya di kota tersebut.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa setelah mengalami penurunan kontribusi ekonomi di awal periode pandemi, Kota Samarinda berhasil menunjukkan pemulihan yang kuat dan bahkan mampu meningkatkan perannya dalam perekonomian provinsi secara keseluruhan di tahun-tahun terakhir. Hal ini menegaskan posisi Samarinda sebagai salah satu penopang utama ekonomi Kalimantan Timur.

a. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Secara umum topografi Kota Samarinda terbagi dalam dua wilayah yakni tanah datar dan berbukit, sebagai berikut:

1) Dataran rendah dengan ketinggian 18 m diatas permukaan laut yang tersebar di seluruh Kecamatan pada Kota Samarinda dengan luas wilayah berkisar 36.846,45 hektar atau dengan persentase sebesar 51,5% dari seluruh wilayah Kota Samarinda.
2) Dataran dengan ketinggian 35 m diatas permukaan laut persebaran yang mendominasi terdapat pada Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang serta Kecamatan Sungai Pinang, dengan luas total keseluruhan 17.241,80 hektar atau dengan persentase sebesar 24,1% dari seluruh Kota Samarinda.
3) Dataran dengan ketinggian 54 m diatas permukaan laut tersebar pada wilayah Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan

Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang serta Kecamatan Sungai Pinang, dengan luasan berkisar 8.404,33 Ha atau dengan persentase sebesar 11,7% dari luas wilayah Kota Samarinda.

4) Dataran dengan ketinggian 78 m diatas permukaan laut yang tersebar diantaranya Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang serta Sungai Pinang, dengan luasan keseluruhan 5.523,34 hektar atau 7,7% dari wilayah Kota Samarinda.
5) Dataran dengan ketinggian 122 m diatas permukaan laut berada pada beberapa Kecamatan pada wilayah Kota Samarinda, diantaranya Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu serta Samarinda Utara dengan luasan 2.565,13 hektar dengan persentase 3,6% dari luas wilayah Kota Samarinda.
6) Dataran dengan ketinggian 247 m diatas permukaan laut merupakan ketinggian yang hanya terdapat pada Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan 1.007,32 hektar dengan persentase 1,4% dari total luas wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan hal tersebut, menunjukan bahwa kondisi topografi Kota Samarinda terdiri dari 6 (enam) klasifikasi. Keragaman kondisi topografi tersebut didominasi oleh ketinggian 18 mdpl (tersebar hampir seluruh kecamatan di Kota Samarinda) dan 247 mdpl menjadi ketinggian tertinggi (yang hanya tersebar di wilayah utara Kota Samarinda). Topografi per kecamatan Kota Samarinda secara terinci disajikan Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kondisi Topografi di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Topografi (Ha)					
	18 mdpl	35 mdpl	54 mdpl	78 mdpl	122 mdpl	247 mdpl
Kec. Palaran	13.304,58	4.304,11	882,89	517,86	69,50	
Kec. Samarinda Ilir	337,74	225,76				
Kec. Samarinda Kota	362,35	0,08				
Kec. Samarinda Seberang	893,23	257,45		12,12	5,92	
Kec. Samarinda Ulu	1.191,60	1.843,47	1.390,91	619,47	116,37	
Kec. Samarinda Utara	6.072,40	6.031,25	4.758,35	3.968,66	2.231,18	1.007,33
Kec. Sambutan	7.067,72	845,03	132,26			
Kec. Sungai Kunjang	4.028,27	1.806,35	725,95	147,91		

Kec. Sungai Pinang	1.331,08	1.277,92	513,96	49,95		
Kec. Loa Janan Ilir	2.257,49	650,37		207,36	142,15	

Sumber: *RTRW Kota Samarinda Tahun 2022-2042*

Kemiringan lereng pada Kota Samarinda terbagi menjadi 5 (lima) kemiringan lereng, diantaranya 0–8%, 8-15%, 15-25%, 25-45% serta >45% yang tersebar di seluruh Kota Samarinda. Untuk kemiringan lereng yang paling mendominasi pada Kota Samarinda yaitu kemiringan lereng 0-8% (datar) dengan kuasa 32985,13 hektar sedangkan untuk luasan terkecil yaitu kemiringan lereng >45% (Sangat Curam), yang banyak terdapat pada Kecamatan Samarinda Utara. Adapun luas wilayah dan persentase berdasarkan klasifikasi kelas kelerengan, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Fisiografi Kota Samarinda

Kecamatan	Kemiringan Lereng				
	0 - 8%	8 - 15%	15 -25%	25 -45%	>45%
Palaran	11.459,79	4.107,83	2.717,59	682,24	111,49
Samarinda Seberang	734,08	222,98	154,59	38,24	18,84
Samarinda Ulu	1.392,85	1.796,04	1.320,18	544,59	108,12
Samarinda Ilir	205,86	58,08	117,58	100,23	81,75
Samarinda Utara	7.412,24	6.238,22	5.829,68	3.428,26	1.160,95
Sungai Kunjang	2.920,38	1.197,01	1.353,67	1.202,77	34,66
Sungai Pinang	1.177,58	1.052,24	824,74	118,35	
Sambutan	5.961,14	1.234,88	720,05	128,64	0,30
Samarinda Kota	329,20	33,23			
Loa Janan Ilir	1.392,01	532,32	455,96	630,64	246,44

Sumber: *RTRW Kota Samarinda Tahun 2022-2042*

Kondisi penggunaan lahan di Kota Samarinda berdasarkan tutupan lahannya terdiri atas Area Parkir dan Lapangan, Bangunan Industri dan Perdagangan, Bangunan Non Permukiman Lain, Danau Buatan Lainnya, Danau Wisata Air, Hutan Lahan Rendah Primer Kepadatan Tinggi, Hutan Lahan Rendah Sekunder Kepadatan Rendah, Jaringan Jalan Aspal/ Beton/ Tanah, Kebun Campuran, Kolam Air Tawar Lain, Ladang/ Tegalan Dengan Palawija, Lahan Terbuka Lain, Landasan Pacu (Runway) dan Taxiway, Lapangan Diperkeras, Padang Golf, Padang Rumput, Pekarangan, Pelabuhan Penambangan.

Terbuka Bukan Sirtu, Penggalian Pasir, Tanah dan Batu (Sirtu), Perairan Lainn, Perkebunan Kelapa Sawit, Permukiman Perdesaan,

Permukiman Perkotaan, Pertahanan Keamanan, Rawa, Sawah Dengan Padi Terus Menerus, Semak/ Belukar, Stadion dan Sarana Olahraga, Sungai, Taman Kota, Tampungan Air Lain, Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah Terminal Bandara, Terminal Bus, Terminal Timbang, Waduk Irigasi dan Waduk Multiguna.

Tabel 2.4
Luas Bentuk Lahan di Kota Samarinda

Kecamatan	Tutupan Lahan									
	Area Parkir dan Lapangan	Bangunan Industri dan Perdagangan	Bangunan Non Permukiman Lain	Danau Buatan Lainnya	Danau Wisata Air	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kepadatan Tinggi	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kepadatan Rendah	Jaringan Jalan Aspal/Beton/Tanah	Kebun Campuran	Kolam Air Tawar Lain
Kecamatan Loa Janan Ilir		84,18	9,14	4,61				41,45	698,87	0,08
Kecamatan Palaran	12,97	261,99	13,21					138,34	7.360,83	0,47
Kecamatan Samarinda Ilir	1,10	15,92						0,01	97,89	
Kecamatan Samarinda Kota		38,37	0,76				2,32	7,46		
Kecamatan Samarinda Seberang		29,24	5,33					17,75	83,03	
Kecamatan Samarinda Ulu	2,75	45,53	2,22	9,71			7,89	40,87	1.687,71	0,03
Kecamatan Samarinda Utara	1,27	15,1	10,53	2,2		364,56	25,90	23,83	9.896,05	0,66
Kecamatan Sambutan	2,90	146,04	5,76	0,50	2,56			11,05	1.120,29	
Kecamatan Sungai Kunjang		184,22	5,63		0,21			33,46	892,30	0,33
Kecamatan Sungai Pinang	1,43	12,13	11,56					15,35	833,20	0,27

Tabel 2.4 [Lanjutan]

Kecamatan	Tutupan Lahan									
	Ladang/Tegalan Dengan Palawija	Lahan Terbuka Lain	Landasan Pacu (Runway) dan Taxiway	Lapangan Diperkeras	Padang Golf	Padang Rumput	Pekarangan	Pelabuhan	Penambahan Terbuka Bukan Sirtu	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu (Sirtu)
Kecamatan Loa Janan Ilir	1,35			0,19	73.41				45,74	128,25
Kecamatan Palaran	100,04	57,83				74,64		2,08	3499,75	174,23
Kecamatan Samarinda Ilir								2,60		1,58
Kecamatan Samarinda Kota		2,17						7,28		
Kecamatan Samarinda Seberang										8,34
Kecamatan Samarinda Ulu	239,12			5,50		5,42			219,21	36,99
Kecamatan Samarinda Utara	2107,01	1,52	106,14		40,63	66,85			1849,78	280,98
Kecamatan Sambutan	53,33	0,88				115,71			843,02	13,34
Kecamatan Sungai Kunjang	314,49	1,24				22,30		1,50	468,97	52,84
Kecamatan Sungai Pinang	0,21						21,45		184,48	29,41

Tabel 2.4 [Lanjutan]

Kecamatan	Tutupan Lahan									
	Perairan Lainnya	Perkebunan Kelapa Sawit	Permukiman Perdesaan	Permukiman Perkotaan	Pertahanan Keamanan	Rawa	Sawah Dengan Padi Terus Menerus	Semak/Belukar	Stadion dan Sarana Olahraga	Sungai
Kecamatan Loa Janan Ilir	3,97		266,55	560,2		0,18	365,96	691,53		199,61
Kecamatan Palaran	320,01	24,93	466,47	914,37		512,37	656,79	3441,13	83,74	991,75
Kecamatan Samarinda Ilir				328,42				66,62		66,05
Kecamatan Samarinda Kota				211,58	1,58			4,28	10,61	67,91
Kecamatan Samarinda Seberang	2,16		31,27	487,20	15,28	1,01	12,15	205,96		288,03
Kecamatan Samarinda Ulu	121,16		48,14	1359,27		198,95	2,17	1045,58		39,58
Kecamatan Samarinda Utara	151,78	366,03	668,58	1494,43		1584,34	953,78	3181,23		3,46
Kecamatan Sambutan	139,07		736,88	468,65		1254,40	748,16	3044,51		514,51
Kecamatan Sungai Kunjang	224,10		207,82	1418,19	2,34	771,06	53,90	1723,17		427,00
Kecamatan Sungai Pinang	8,18		65,64	1086,72		14,53	29,02	492,25		5,92

Tabel 2.4 [Lanjutan]

Kecamatan	Tutupan Lahan							
	Taman Kota	Tampungan Air Lain	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	Terminal Bandara	Terminal Bus	Terminal Timbang	Waduk Irigasi	Waduk Multiguna
Kecamatan Loa Janan Ilir	2,08	8,67				0,82		
Kecamatan Palaran		2,73						
Kecamatan Samarinda Ilir	1,87	0,24						
Kecamatan Samarinda Kota	5,77							
Kecamatan Samarinda Seberang	0,45	1,38			1,02			
Kecamatan Samarinda Ulu	3,37	0,43	13,39					
Kecamatan Samarinda Utara		9,17		37,82			14,33	7,91
Kecamatan Sambutan	1,26	2,95	6,91					
Kecamatan Sungai Kunjang	9,71	0,12			1,91			
Kecamatan Sungai Pinang	0,04	0,74		12,27				

Sumber: *RTRW Kota Samarinda Tahun 2022-2024*

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Samarinda

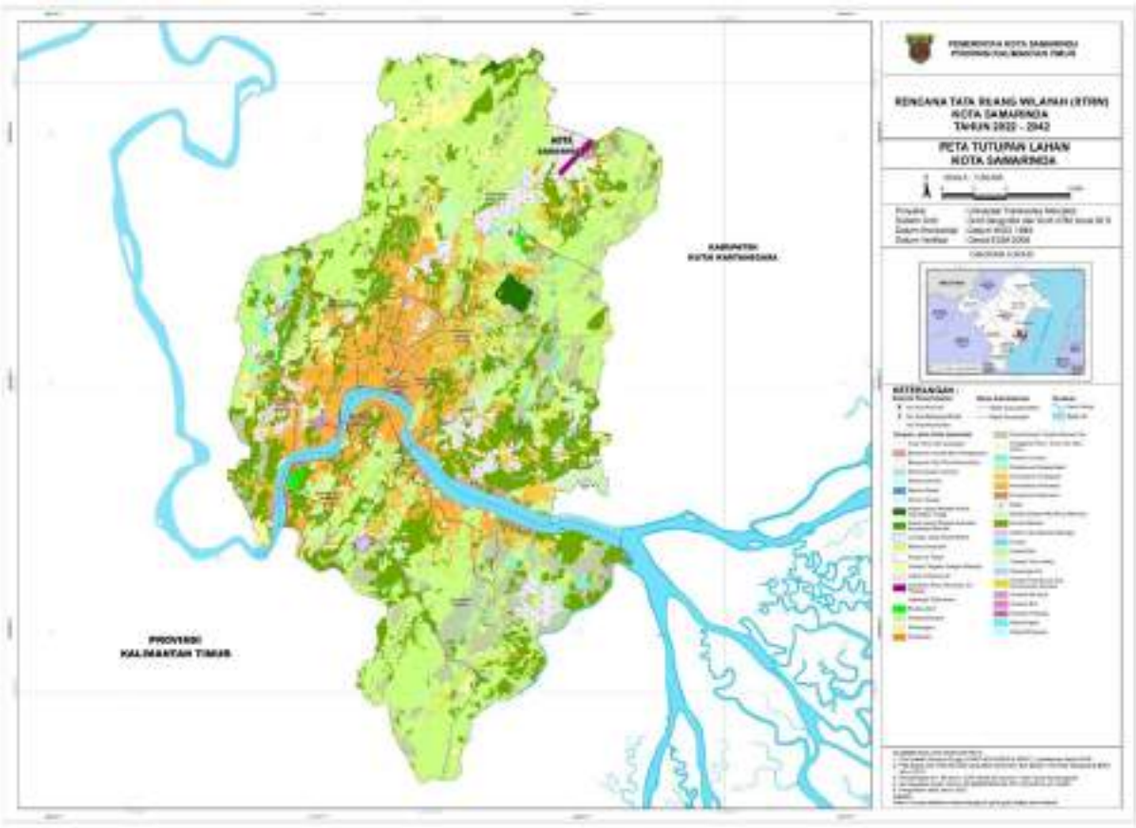

(Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042)

b. Kondisi Geologi

Secara struktur geologi di Kota Samarinda terdiri dari 4 (empat) jenis yakni aluvium, formasi balikpapan, formasi pulau balang dan formasi kampung baru. Adapun penjabaran secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.3 berikut:

Tabel 2.5
Kondisi Geologi di Kota Samarinda

Kecamatan	Endapan Aluvium	Formasi Balikpapan	Formasi Bebuluh	Formasi Kampung Baru	Formasi Pulau Balang
	Qa	Tmbp	Tmb	Tmpk	Tmpb
Palaran	2224,62	5485,03		7669,79	3699,50
Samarinda Seberang		586,99			581,73
Samarinda Ulu		2582,12			2579,70
Samarinda Ilir		219,42			344,08
Samarinda Utara		12508,01	897,31	961,90	9701,96
Sungai Kunjang		4127,79			2580,69
Sungai Pinang		1285,35			1887,57
Sambutan	2355,09	1191,18		3204,68	1294,06
Samarinda Kota		362,42			

Kecamatan	Endapan Aluvium	Formasi Balikpapan	Formasi Bebuluh	Formasi Kampung Baru	Formasi Pulau Balang
	Qa	Tmbp	Tmb	Tmpk	Tmpb
Loa Janan Ilir		1667,78			1589,59
Total	4579,71	30016,1	897,31	11836,36	24258,89

Sumber: *Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042)*

Gambar 2.4
Kondisi Bentuk Lahan Kota Samarinda

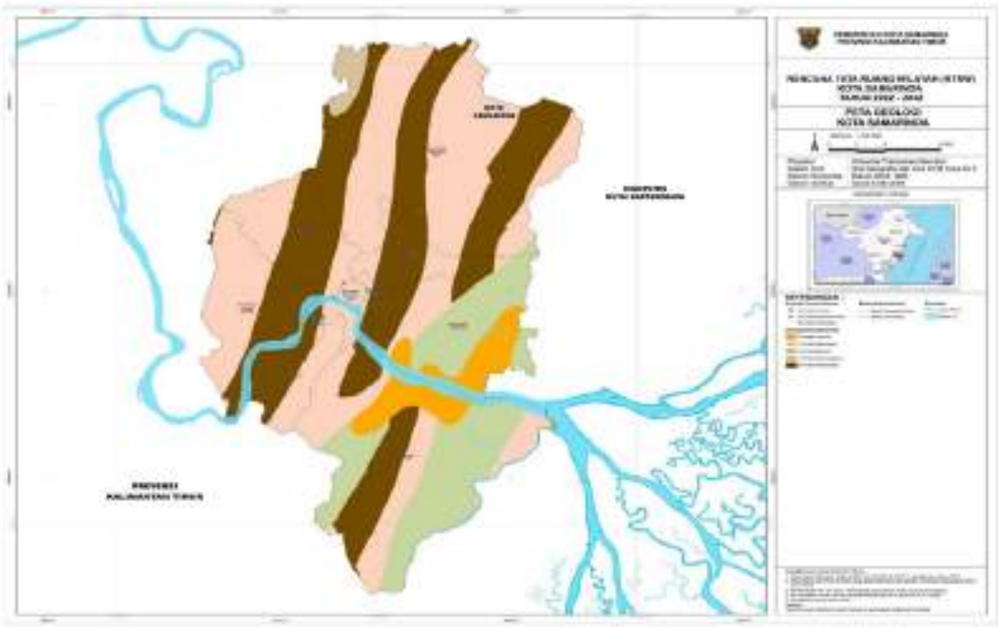

(Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042)

c. Kondisi Hidrologis

Berdasarkan kondisi hidrologinya, Kota Samarinda dipengaruhi oleh sekitar 20 daerah aliran sungai (DAS). Sungai Mahakam adalah sungai utama yang membelah Kota Samarinda dengan lebar antara 300 - 500 meter, sungai-sungai lainnya adalah anak-anak sungai yang bermuara di Sungai Mahakam, sebagai berikut:

1) Sungai Karang Mumus dengan luas DAS sekitar 218,60 km^2.
2) Sungai Palaran dengan luas DAS 67,68 km^2.
3) Anak sungai lainnya antara lain Sungai Loa Bakung, Loa Bahu, Bayur, Betepung, Muang, Pampang, Kerbau, Sambutan, Lais, Tas, Anggana, Loa Janan, Handil Bhakti, Loa Hui, Rapak Dalam, Mangkupalas, Bukuan, Ginggang, Pulung, Payau, Balik Buaya, Banyiur, Sakatiga, dan Sungai Bantuas.

Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kota Samarinda

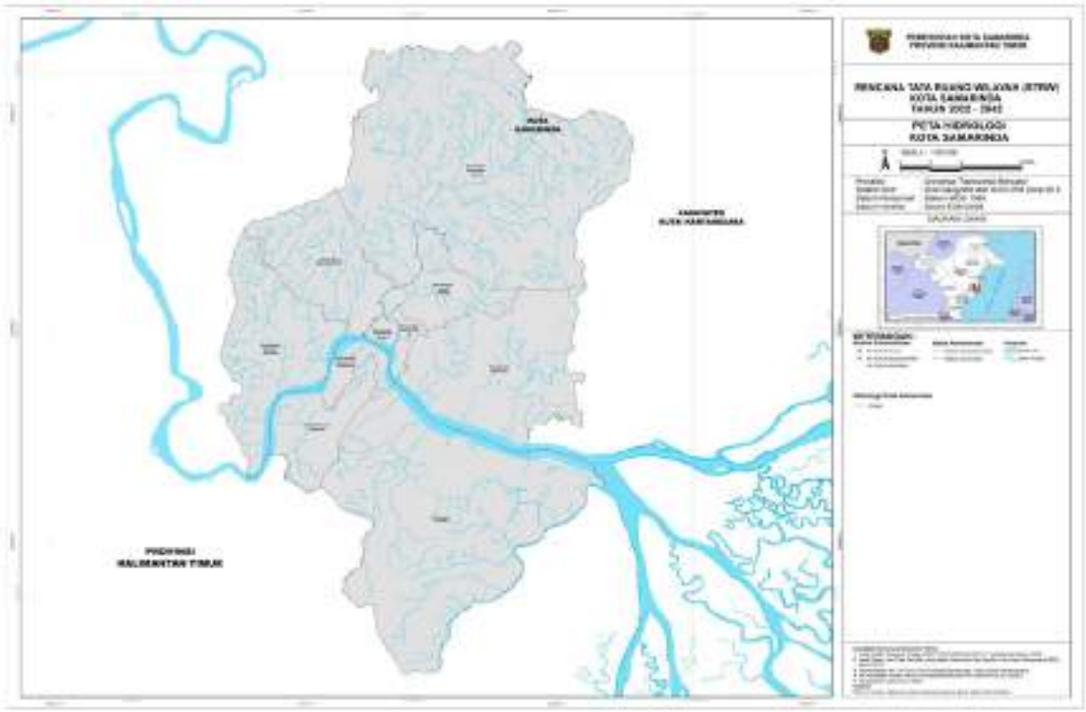

(Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042)

d. Kondisi Klimatologi

Kota Samarinda memiliki Iklim Tropika Humida yakni memiliki musim penghujan dan musim kemarau. Secara umum curah hujan wilayah Kota Samarinda berada pada kategori Normal (85% - 115%). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Kota Samarinda pada tahun 2024, Samarinda mengalami curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Desember 2024 dengan jumlah hujan di Kota Samarinda rata-rata 151,1 m2. Adapun penjabaran secara rinci Kondisi Curah Hujan Kota Samarinda, dapat dilihat pada tabel 2.6 dan Gambar 2.5.

Tabel 2.6
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan di Kota Samarinda Tahun 2024

Bulan	Curah Hujan		Hari Hujan
	Jumlah	Maks	
Januari	154	74	13
Februari	75,2	41,9	10
Maret	135,9	37,8	12
April	62,3	31,6	10
Mei	206	60	21
Juni	188,5	56	22

Tabel 2.6 (Lanjutan)

Bulan	Curah Hujan		Hari Hujan
	Jumlah	Maks	
Juli	105,5	30,9	13
Agustus	184	41	19
September	149.8	58.3	9
Oktober	176.9	44	14
November	128.2	25.5	21
Desember	246.4	37	18
Rata-rata 2024	**151.1**	**44.8**	**15**

(Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur)

Gambar 2.6
Peta Curah Hujan Kota Samarinda

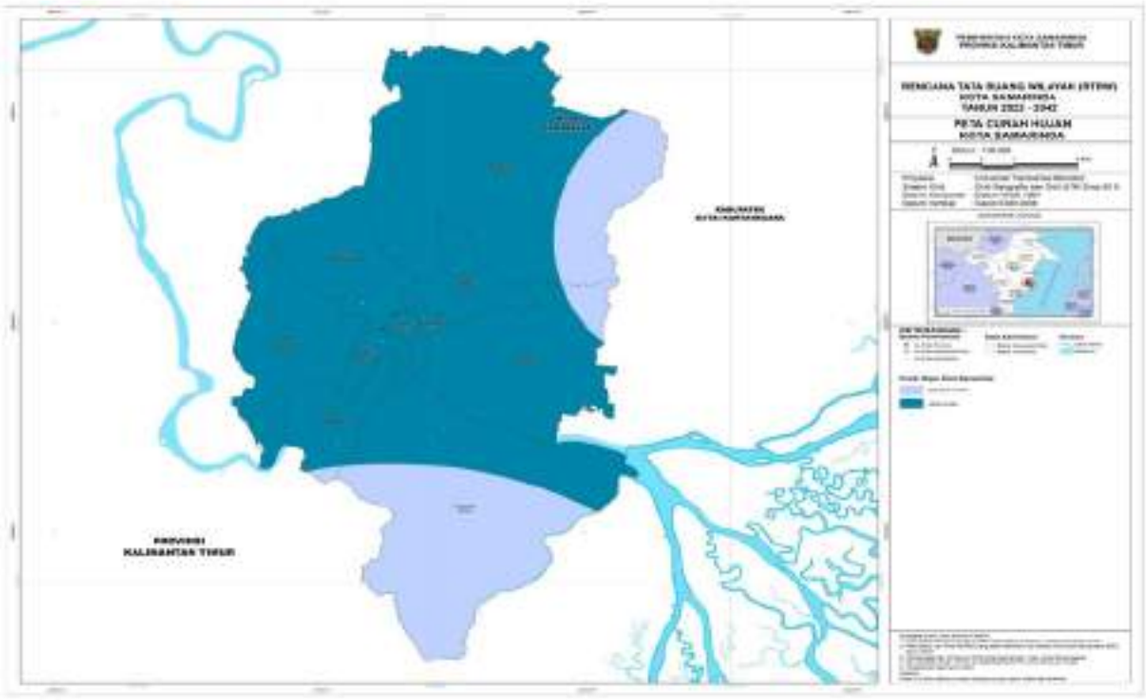

(Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042)

e. Kondisi Jenis Tanah

Secara eksploratif Kota Samarinda terdiri dari beberapa jenis tanah, diantaranya:

1) Jenis tanah Aluvial yang hanya terdapat pada Kecamatan Palaran 14,89 hektar
2) Jenis tanah Organosol Glei Humus terdapat pada tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Kunjang dengan luasan total 6.608,96 hektar
3) Jenis tanah Komplek Podsolik Merah Kuning terdapat di Kecamatan Palaran dan Samarinda Utara dengan luasan total 3.661,80 hektar.

4) Jenis tanah Podsolik Merah Kuning merupakan jenis tanah yang tersebar di seluruh Kota Samarinda dan memiliki luasan 58.760,68 hektar.

Adapun penjabaran secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.6 berikut:

Tabel 2.7
Jenis Tanah Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Jenis Tanah Kota Samarinda (Ha)				
	Aluvial	Komplek Padsolik Merah Kuning, Latosol & Litosol	Organosol Glei Humus	Padsolik, Merah Kuning	Sungai
Palaran	14,90	2.300,58		15.800,19	978,33
Samarinda Seberang				862,30	307,35
Samarinda Ulu			3.493,24	1.635,79	36,90
Samarinda Ilir				504,73	59,22
Samarinda Utara		1.364,11	438,72	22.285,28	
Sungai Kunjang			2.682,26	3.606,61	424,96
Sungai Pinang				3.175,42	
Sambutan				7.583,76	467,58
Samarinda Kota				299,72	62,99
Loa Janan Ilir				3.053,26	206,71

(Sumber: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 2000 (Skala 1:1.000.000))

Gambar 2.7
Peta Jenis Tanah Kota Samarinda

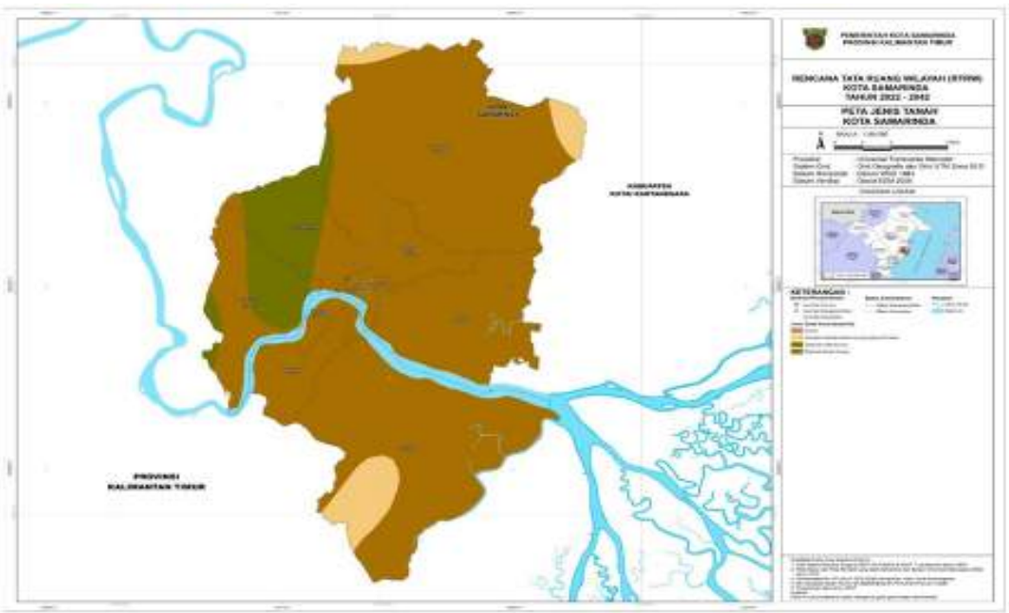

(Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042)

Berdasarkan informasi dari Peta Tanah Skala 1:50.000 (BBSDLP Kementan, 2016), wilayah Kota Samarinda didominasi oleh tanah dari

kombinasi ordo Kambisol Distrik dan Podsolik Haplik, diikuti oleh kombinasi ordo Podsolik Haplik dan Kambisol Distrik, serta ordo Kambisol Distrik dan Gleisol Sulfik. Ketiga kombinasi ordo ini dicirikan dengan kedalaman tanah yang dalam (60-90 cm), drainase yang baik, tekstur halus hingga sedang, kapasitas tukar kation bervariasi antara tinggi hingga sedang, dengan bahan induk batu liat dan batu pasir. Selebihnya, wilayah Kota Samarinda masih didominasi kombinasi ordo yang serupa kecuali kombinasi ordo Aluvial Sulfidik dan Gleysol Sulfik, yang kedalaman tanahnya dangkal (0-30 cm), dan drainasenya sangat terhambat yang tersebar di dataran estuarin di sekitar muara Sungai Mahakam atau bagian timur Kota Samarinda. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah yang arealnya terluas di Kota Samarinda mencapai 57,57% dan masih tersedia untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur-unsur hara di permukaan belum habis melalui proses *biocycle*.

f. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologis, Kota Samarinda merupakan bagian muara dari Sungai Mahakam yang membentang sepanjang kurang lebih 920 kilometer dari hulunya. Beberapa anak sungai yang bermuara di Sungai Mahakam dan sebagian besar daerah aliran sungainya membentuk Kota Samarinda, adalah: Sungai Karang Mumus, Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil, Loa Bakung, Palaran, dan Sambutan. Sebagaimana disajikan pada Gambar 2.8, Daerah Aliran Sungai Karang Mumus memiliki wilayah hingga di luar wilayah administratif Kota Samarinda, sehingga penanganan DAS ini membutuhkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten di sekitarnya (Kutai Kartanegara).

Gambar 2.8
Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Samarinda

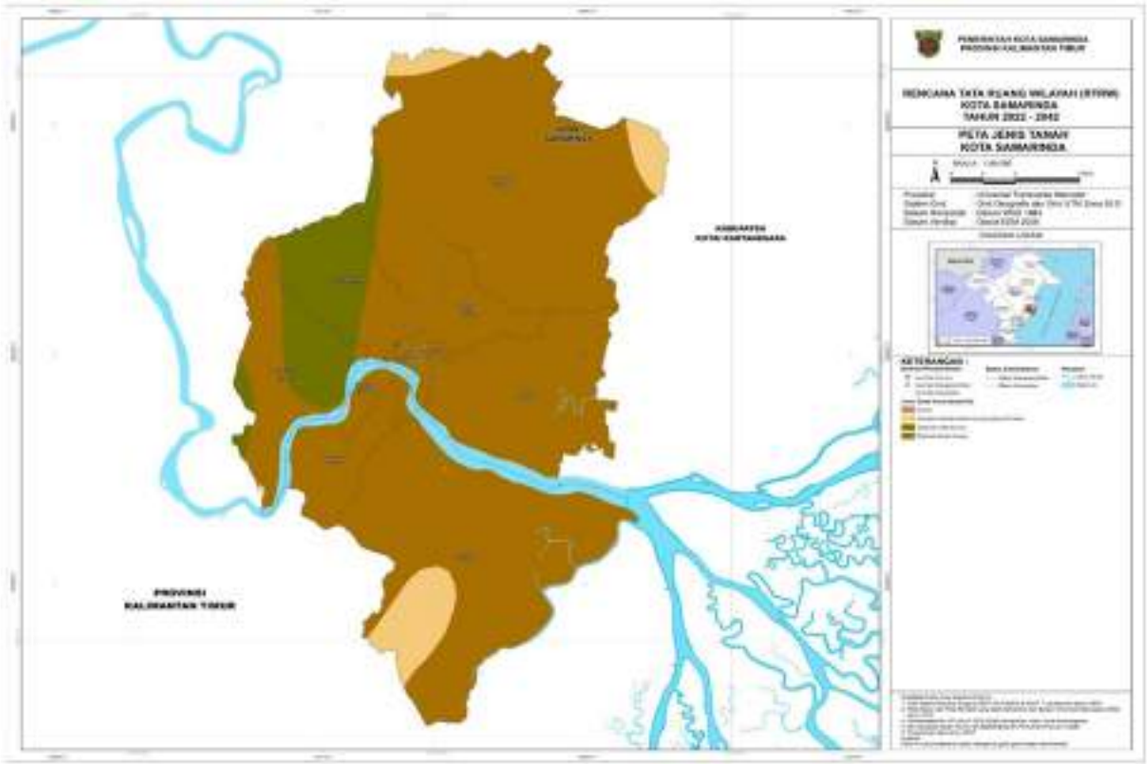

(Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042)

2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Kelautan dan Perikanan

Komoditi perikanan yang menjadi primadona di Kota Samarinda yaitu ikan air tawar khususnya ikan gabus, ikan nila, dan ikan mas, oleh karena itu menjadi komoditi yang dibudidayakan oleh masyarakat Kota Samarinda. Permintaan terhadap ikan gabus selalu tinggi mengingat ikan ini menjadi salah satu pilihan lauk dalam menu nasi kuning di Kota Samarinda. Sedangkan permintaan yang tinggi terhadap ikan nila dan ikan mas dikarenakan semakin banyaknya jumlah rumah makan di Kota Samarinda yang menghadirkan menu kedua ikan tersebut.

Tabel 2.8
Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024
Kota Samarinda (ton)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kolam	520,2	568,9	676,5	627,0	660,1
2	Keramba	186,4	186,4	217,0	195,7	206,8
Total		**706,6**	**755,3**	**893,5**	**822,7**	**866,9**

Sumber: Dinas Perikanan Kota Samarinda

Produksi Perikanan Budidaya cenderung mengalami pertumbuhan positif selama periode 2020-2024. Pertumbuhan positif mulai terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 6,89 persen dan pada tahun 2022 kembali tumbuh sebesar 18,3 persen atau menjadi 893,5 ton. Sedangkan di tahun 2024 menurun menjadi 866,9 ton. Setiap tahunnya produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok budidaya dengan media kolam, rata-rata 79,61 persen. Pembudidaya air tawar di Kota Samarinda tersebar di seluruh kecamatan, dan yang paling banyak berada di Palaran, Samarinda Utara, dan Sambutan.

Tabel 2.9
Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024
Kota Samarinda (Ton)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Perikanan Umum	5.780,0	5.765,0	2.800,0	3.960,0	3.562,0
2	Perikanan Laut	13.218,4	13.235,0	6.620,0	11.052,0	11.680,0
Total		**18,998.4**	**19.000,0**	**9.420,0**	**15.012,0**	**15.242,0**

Sumber: Dinas Perikanan Kota Samarinda dan Kota Samarinda dalam Angka 2024

Selain perikanan budidaya, perikanan tangkap pun memberikan hasil yang cukup besar dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 hasil perikanan tangkap mencapai 18.998,4ton, yang kemudian meningkat menjadi 19.000 ton di tahun 2021. Kondisi yang berbeda ditunjukkan pada tahun 2020, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan menutup restoran maupun tempat makan, sehingga membuat produksi perikanan tangkap terus menurun. Namun pada tahun 2021 jumlah produksi perikanan tangkap mulai tumbuh walau kecil, sebesar 1 persen atau menjadi 19.000 ton, dimana produksi terbanyak merupakan perikanan laut. Di tahun 2024 menurun kembali menjadi 15.242,0 ton. Secara keseluruhan, meskipun bukan menjadi sektor penting dalam perekonomian, tetapi produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya mampu bernilai secara ekonomis dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Samarinda, sehingga inflasi dapat terkendali.

b. Pertanian

Kota Samarinda pada saat ini masih dalam proses penetapan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Cakupan lahan LP2B seluas 1.230.88 Ha dan untuk Lahan Cadangan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LCP2B) mencakup 760,267 Ha. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
4) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
6) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Dalam rangka meningkatkan jumlah produksi, maka pemerintah Kota Samarinda harus memaksimalkan luas tanam. Luas tanam pangan di Kota Samarinda tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi. Selain komoditi beras, semua komoditi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, kemudian mengalami kecenderungan penurunan sampai dengan tahun 2023, kecuali komoditi ketela rambat yang mengalami kenaikan luas tanam. Pada tahun 2024 semua komoditi mengalami kenaikan kecuali komoditi Padi sawah. Luas tanam komoditi padi sawah selama 2020-2024 terus mengalami penurunan, yang semula luasnya 3.31,90 ha pada tahun 2020 menjadi tinggal 1.676,2 ha pada tahun. Melihat kondisi ini, maka peningkatan luas tanam pada semua tanaman pangan harus menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda, selain mendukung perekonomian masyarakat, juga mendukung penyediaan pangan pengganti beras sebagai bagian program ketahanan pangan.

Tabel 2.10
Luas Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 Kota Samarinda (Ha)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi Sawah	3.131,90	2.397,50	2.160,90	1.877,8	1.676,2
2	Jagung	19,50	180,70	26,20	24,2	28
3	Ketela Pohon	35,05	122,40	68,9	40	54,7
4	Ketela Rambat	10,10	24,80	12,20	26	19,5
5	Kacang Tanah	8,30	21,90	18,70	17,7	4,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

c. Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Kota Samarinda. Perkebunan masih memiliki prospek yang sangat baik dalam mendukung perekonomian di Kota Samarinda. Di sisi lain usaha sektor pertanian, termasuk di dalamnya sektor perkebunan juga memerlukan dan menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga bisa menjadi nilai tambah guna mengurangi jumlah pengangguran.

Karet, kelapa, kelapa sawit, lada, kemiri, dan kakao merupakan komoditi unggulan yang ada di Kota Samarinda yang memberikan pengaruh yang cukup baik untuk perkembangan perekonomian di Kota Samarinda.

Untuk mendukung program Walikota Samarinda di kembangkan pula tanaman kopi di kota Samarinda seluas 15,25 ha yang dikembangkan secara bertahap sejak tahun 2023 dengan rincian 1 ha di makroman, 19,25 ha di Bantuas.

Tabel 2.11
Data Produksi Perkebunan Tahun 2020-2024 Kota Samarinda

Jenis	TAHUN									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Karet	822,97	1.052,05	794,97	1.025,81	812,47	367,96	809,97	376,99	809,97	376,99
Kelapa	317,52	364,24	321,54	418,92	305,79	305,98	320,75	265,5	320,75	265,5
Kelapa sawit	1.209,20	13.657,10	1.169,95	14.830,91	1.216,45	15.101,84	1.216,45	13.966,91	1.216,45	13.966,91
Lada	55,5	13,07	53,5	12,9	49,5	10,74	47,5	10,1	47,5	10,1
Kemiri	258,75	39,87	258	49,52	255,75	61,82	255,75	64,28	255,75	64,28
Kakao	22	3,17	22	3,43	42	2,78	42	2,79	42	2,79
JUMLAH	**2.685,94**	**15.129,50**	**2.619,96**	**16.341,49**	**2.681,96**	**15.851,12**	**2.692,42**	**14.686,57**	**2.692,42**	**14.686,57**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan yang paling prospektif hal ini bisa dilihat dari luas areal lahan maupun hasil produksi yang lebih tinggi dibandingkan komoditas perkebunan lainnya, Harga yang menjanjikan menjadikan kelapa sawit mendapat perhatian dalam pengembangan potensi agribisnis komoditas unggulan untuk sektor perkebunan.

Peningkatan produksi kemiri disebabkan karena semakin banyak buah kemiri yang di panen. Sebelumnya pekebun hanya memanen kemiri sesuai dengan kebutuhan untuk dijadikan bumbu dapur

selebihnya buah kemiri dibiarkan saja di pohon. Tahun 2023 dilaksanakan pelatihan pengolahan minyak kemiri, sehingga buah kemiri memiliki nilai tambah.

Menurunnya produksi kelapa sawit disebabkan oleh berkurangnya lahan kelapa sawit akibat alih fungsi lahan, terutama di Kecamatan Samarinda Ilir Beberapa areal perkebunan beralih fungsi juga menjadi tanah kaplingan

d. Hortikultura

Pengertian tanaman hortikultura dibagi menjadi Hortus yang berarti tanaman kebun dan Culture atau Colere yang berarti budidaya adalah bahasa latin asal usul hortikultura, sehingga dapat diartikan budidaya tanaman kebun. Namun penggunaan hortikultura bukan hanya digunakan pada kebun saja, melainkan istilah yang digunakan pada semua tanaman yang dibudidayakan.

Di Kota Samarinda terdapat 6 komoditas tanaman hortikultura unggulan yaitu pisang, papaya, jeruk, bawang merah, cabai rawit, dan cabai besar. Untuk jumlah produksi dari keenam tanaman hortikultural tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Produksi Unggulan Hortikultura Di Kota Samarinda

No.	Komoditas	TAHUN				
		2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)	2024 (Ton)
1	Pisang	2.600,10	3.638,62	1.829,52	7.511,28	2.965,24
2	Pepaya	1.766,00	453,73	772,12	1.278,25	4.895,47
3	Jeruk	340,70	59,89	55,99	159,00	551,24
4	Bawang Merah	16,10	1,40	7,55	11,30	0
5	Cabai Rawit	324,17	236,28	140,46	209,65	129,9
6	Cabe Besar	293,78	677,67	324,49	179,12	140,54
	Jumlah	**5.340,85**	**5.067,59**	**3.130,13**	**9.348,60**	**5.717,15**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Penurunan produksi pisang yang sangat drastis tahun 2021 disebabkan oleh serangan layu fusarium di sentra pengembangan kawasan pisang desa Loa Kumbar seluas 1 ha lebih.

Produksi pepaya yang rendah di tahun 2021 disebabkan produksi tahun tersebut merupakan sisa produksi dari tanaman tahun sebelumnya, pepaya merupakan tanaman buah semusim yang akan berkurang produktivitasnya semakin bertambahnya umur tanaman, oleh karena itu perlu dilakukan peremajaan tanaman setiap 3 tahun.

Peningkatan produksi bawang merah di tahun 2022 dan 2023 disebabkan karena adanya bantuan benih bawang merah. Namun pada tahun 2024 terjadi gagal semai benih bawang merah sehingga tidak ada produksi bawang merah di tahun 2024.

e. Peternakan

Peternakan merupakan usaha yang sangat potensial . Meskipun begitu masih terjadi fluktuasi dalam perkembangannya, baik dalam populasi maupun produksi dagingnya.

Tabel 2.13
Data Populasi Ternak Tahun 2020-2024 Kota Samarinda

NO.	JENIS TERNAK	TAHUN				
		2020 (Ekor)	2021 (Ekor)	2022 (Ekor)	2023 (Ekor)	2024 (Ekor)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sapi perah	13	16	16	18	19
2	Sapi potong	6.599	6.659	6.722	3.194	3.354
3	Kerbau	87	94	116	154	162
4	Kuda	14	14	20	17	18
5	Kambing	6.951	7.066	6.850	4.511	4.737
6	Domba	214	214	250	325	341
7	Babi	12.450	12.802	1.653	3.167	3.325
8	Itik/Ducks	34.380	34.380	38.070	27.630	29.012
9	Itik Manila	-	-	-	4.037	4.239
10	Ayam Kampung	835.213	869.913	1.109.270	817.051	891.416
11	Ayam Petelur	302.659	313.209	398.315	495.000	519.750
12	Ayam Pedaging	16.585.000	15.902.894	16.060.710	4.125.000	4.331.250.
13	Puyuh	7.150	7.150	17.232	4.720	4.965
14	Merpati				1.652	1.735
15	Kelinci	7.400	9.376	6.000	4.143	4.350
16	Lebah kelulut (koloni)	-	-		-	1.170
	J U M L A H	**17.798.130**	**17.163.787**	**17.645.224**	**5.490.619**	**5.749.872**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Populasi hewan ternak Kota Samarinda dalam periode 5 tahun, 2020 sd 2024, menggambarkan dinamika jumlah hewan ternak yang dipelihara di Kota Samarinda selama lima tahun terakhir. Data menunjukkan perubahan dalam jumlah ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan ayam, yang merupakan indikator penting untuk pertumbuhan sektor peternakan di Kota Samarinda. Peningkatan atau penurunan populasi ternak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan peternakan, kondisi ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Populasi ternak di Kota Samarinda masih didominasi oleh kelompok ternak unggas. Dari mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 populasi ternak unggas selalu mencapai lebih dari 99 persen dari seluruh populasi ternak.

Penyumbang penurunan populasi ternak yang terbesar pada jenis unggas yaitu ayam potong, hal ini disebabkan oleh perubahan kebijakan dalam perhitungan populasi ayam potong pada Tahun 2023. Semula cara perhitungannya dimana ayam potong hidup yang masuk dan ada di Kota Samarinda tercatat sebagai populasi Kota Samarinda, diubah menjadi populasi ayam potong Kota Samarinda adalah exciting dari kandang yang berada di Kota Samarinda

Tabel 2.14
Data Produksi Daging Tahun 2020-2024 Kota Samarinda

NO.	JENIS TERNAK	TAHUN				
		2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)	2024 (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sapi perah	-	-	-	0	0
2	Sapi potong	1.565,60	1.353,14	975,82	830,5	1192,84
3	Kerbau	-	-	1,16	0,16	0
4	Kuda	-	-	-	-	0
5	Kambing	80,26	148,45	172,46	221,74	268,19
6	Domba	-	-	-	-	0,58
7	Babi	-	-	97,69	71,06	115,12
8	Itik Ducks	109,79	134,81	134,81	134,81	135,18
9	Daging Ayam	14.757,79	11.574,26	11.827,75	10.603,25	10815,32
	J U M L A H	**16.513,44**	**13.210,66**	**13.209,69**	**11.861,52**	**12.527,23**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Tabel 2.15
Data Produksi Telur Tahun 2020-2024 Kota Samarinda

Jenis Produksi	TAHUN				
	2020 (kg)	2021 (kg)	2022 (kg)	2023 (kg)	2024 (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Telur Ayam Buras	0	0	507.991,50	739.490,00	741.516,00
Telur Ayam Ras	3.526.220,00	3.842.000,95	3.505.167,99	4.500.961,00	4.513.292,40
Telur Itik	67.188,00	73.204,40	66.786,48	93.184,50	93.439,80
TOTAL	**3.593.408,00**	**3.915.205,35**	**4.079.945,97**	**5.333.635,50**	**5.348.248,20**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Guna mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Samarinda akan kebutuhan daging dan produk olahan daging maupun hasil ternak lainnya seperti telur, masih tergantung kepada pasokan daerah lain. Hal ini disebabkan masih kurangnya para pengusaha yang bergerak di bidang peternakan, rendahnya produktivitas, adanya penyakit ternak, serta manajemen pengelolaan yang belum optimal.

Berbagai upaya dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan kepada daerah lain dalam memenuhi kebutuhan hasil peternakan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Perumda Varia Niaga Kota Samarinda kini bersiap melaksanakan ekspansi bisnisnya. Rencananya Perumda Varia Niaga bakal membangun pabrik ayam petelur berskala besar. Ekspansi bisnis yang ditargetkan Perumda Varia Niaga ini seiring dengan tingginya permintaan telur di pasar lokal hingga nasional. Selain itu, proyek ini diharap mampu berdampak positif pada perekonomian daerah dengan menyerap tenaga kerja lokal.

Proyek ini diprediksi dapat memenuhi permintaan telur dalam jumlah besar, mengurangi ketergantungan pada impor dari wilayah lain, dan bahkan menciptakan peluang ekspor ke provinsi lain di Indonesia. Dengan strategi ekspansi, perusahaan ini berpotensi memperluas jaringan distribusi sekaligus memperkuat semangat ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Timur.

2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian

lingkungan Hidup Strategis, analisis materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program paling sedikit memuat kajian:

1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2) Perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup;
3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

b. Ekoregion

UU No 32 Tahun 2009 mendefinisikan ekoregion sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya, penentuan daya dukung dan daya tampung dilakukan atas dasar inventarisasi lingkungan hidup dan ekoregion. Pemetaan ekoregion ditujukan untuk meletakkan dasar informasi tematik yang dibutuhkan dalam menentukan kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Peta ekoregion dikembangkan berdasarkan karakteristik bentang alam berupa geomorfologi dan morfogenesa, tipe vegetasi alami dan kondisi terkini tutupan lahan. Bentang alam di Kota Samarinda disajikan dalam gambar diatas, dan dapat dilihat bahwa Kota Samarinda didominasi bentang alam perbukitan struktural dan denudasional, berseling dengan dataran fluvial yang tersebar di alur sungai utama yang membelah Kota Samarinda.

Sebaran tipe vegetasi di Kota Samarinda disajikan dalam gambar berikut dan dapat dilihat bahwa vegetasi alami yang mendominasi wilayah Kota Samarinda adalah hutan dipterokarpa dan non dipterokarpa berseling dengan hutan rawa dan riparian yang ditemui di lahan basah maupun tepi sungai yang membelah Kota Samarinda.

Gambar 2.9
Peta Tipe Vegetasi di Kota Samarinda

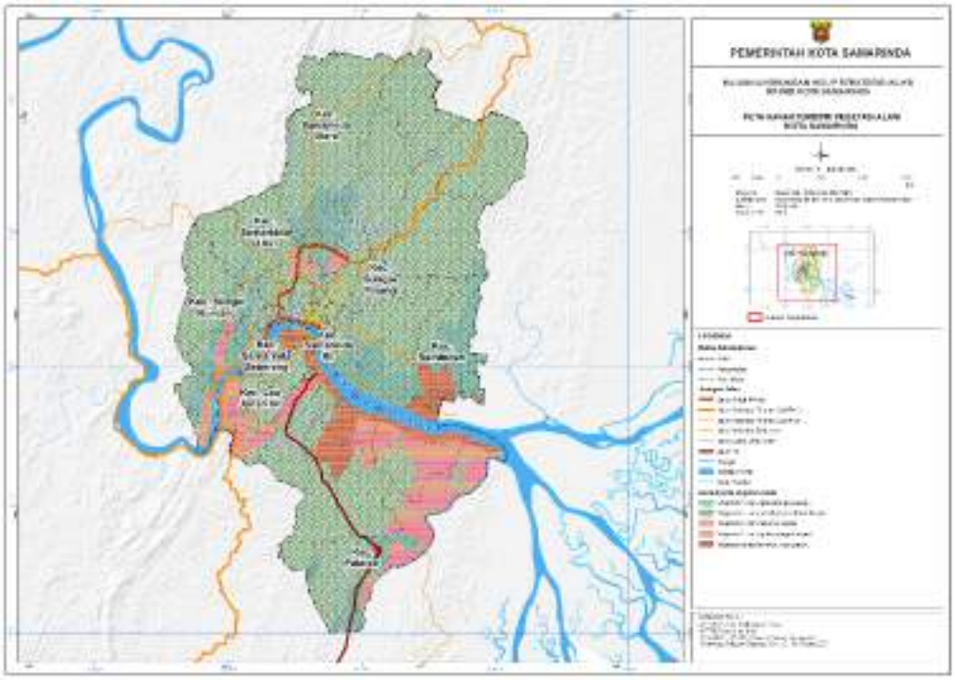

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

c. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Samarinda menggunakan pendekatan jasa ekosistem memanfaatkan grid skala ragam dengan resolusi 90m x 90m. Datum geodetik yang digunakan adalah DGN95 yang memiliki nilai-nilai parameter ellipsoid sama dengan datum WGS 84. Titik asal sistem koordinat geodetik berada pada 900BT, 150 LS dengan titik batas ujung timur dan ujung utara grid adalah 1440BT dan 80 LU (Riqqi, 2008).

Nilai sebaran jumlah penduduk akan menjadi dasar dalam setiap perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan terkait dengan kebutuhan penduduk, baik itu kebutuhan energi pangan maupun kebutuhan air.

1) Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Mengingat wilayah kota samarinda sebagai daerah perkotaan tentu saja kota ini sudah tidak lagi fokus sebagai wilayah pemasok pangan untuk masyarakat di wilayah samarinda itu sendiri. Meskipun demikian cukup penting untuk mengetahui kondisi daya dukung pangan tersebut sebagai baseline awal dalam menentukan sebuah kebijakan.

Mengingat wilayah Kota Samarinda sebagai daerah perkotaan dan namun sebagian wilayah masih memiliki lahan untuk penyedia pangan seperti Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Palaran. Sehingga cukup penting untuk mengetahui kondisi daya dukung pangan di Kota Samarinda sebagai baseline awal dalam menentukan sebuah kebijakan. Ketersediaan energi pangan dalam jumlah besar ditemukan di Kecamatan Samarinda Utara yaitu mencapai 8.463 Juta Kkal/tahun. Kebutuhan pangan terbesar ditemukan di Kecamatan Sungai Kunjang yaitu 109.331 juta Kkal sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Samarinda Kota sebesar 25.204 juta Kkal.

Tabel 2.16
Status Daya Dukung Pangan Kota Samarinda

No	Kecamatan	Kebutuhan Pangan (Kkal/thn)	Ketersediaan Pangan (Kkal/thn)	Selisih (Kkal/thn)	Status DDTLH Pangan
1	Kec. Loa Janan Ilir	54.458.510.999,93	731.516.174,76	-53.726.994.825,17	Terlampaui
2	Kec. Palaran	52.509.192.000,09	1.153.228.386,39	-51.355.963.613,70	Terlampaui
3	Kec. Samarinda Ilir	54.748.868.499,96	314.685.577,87	-54.434.182.922,10	Terlampaui
4	Kec. Samarinda Kota	25.409.420.249,99	-	-25.409.420.249,99	Terlampaui
5	Kec. Samarinda Seberang	51.633.411.000,01	120.833.694,59	-51.512.577.305,42	Terlampaui
6	Kec. Samarinda Ulu	104.631.502.249,95	773.264.414,62	-103.858.237.835,32	Terlampaui
7	Kec. Samarinda Utara	87.951.641.000,05	8.463.581.207,43	-79.488.059.792,62	Terlampaui
8	Kec. Sambutan	48.991.157.750,04	469.885.390,76	- 48.521.272.359,27	Terlampaui
9	Kec. Sungai Kunjang	109.331.370.000,06	175.577.926,22	-109.155.792.073,83	Terlampaui
10	Kec. Sungai Pinang	86.693.686.750,00	606.351.380,78	- 86.087.335.369,22	Terlampaui
Total		**676.358.760.500,08**	**12.808.924.153,42**	**-663.549.836.346,65**	**Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Gambar 2.10
Kebutuhan pangan kota samarinda

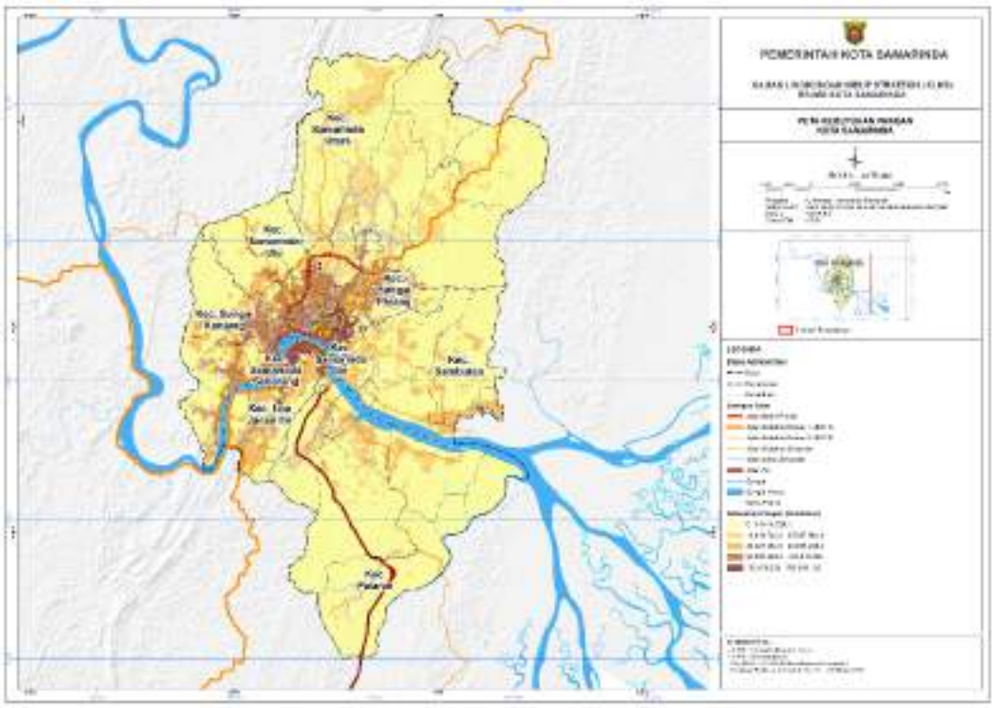

Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Gambar 2.11
Ketersediaan Pangan Kota Samarinda

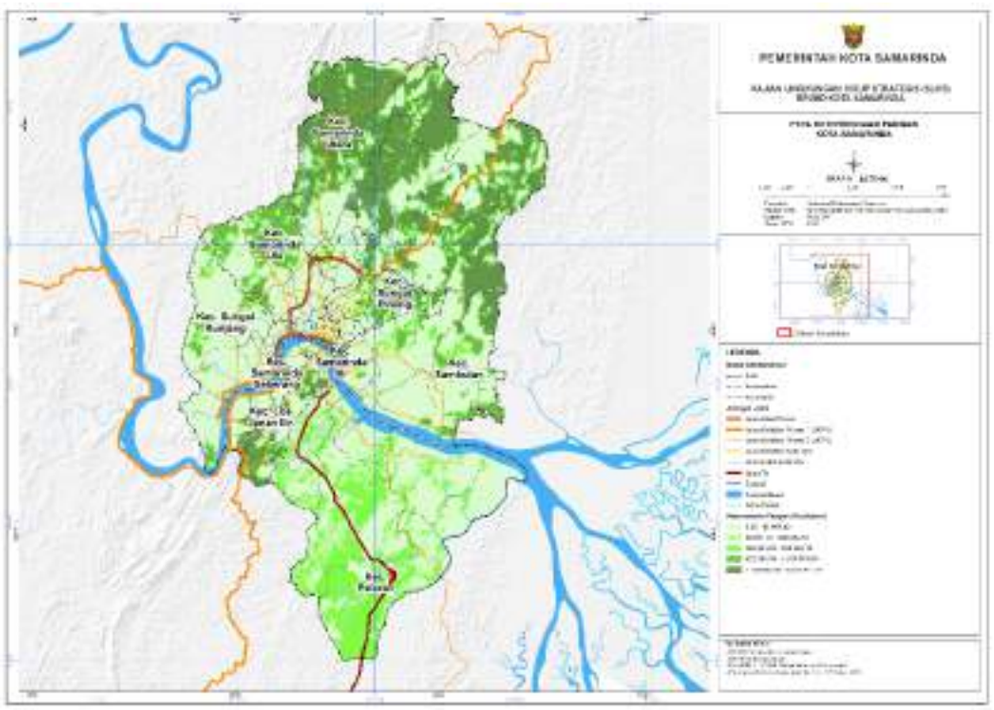

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Gambar 2.12
Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Samarinda

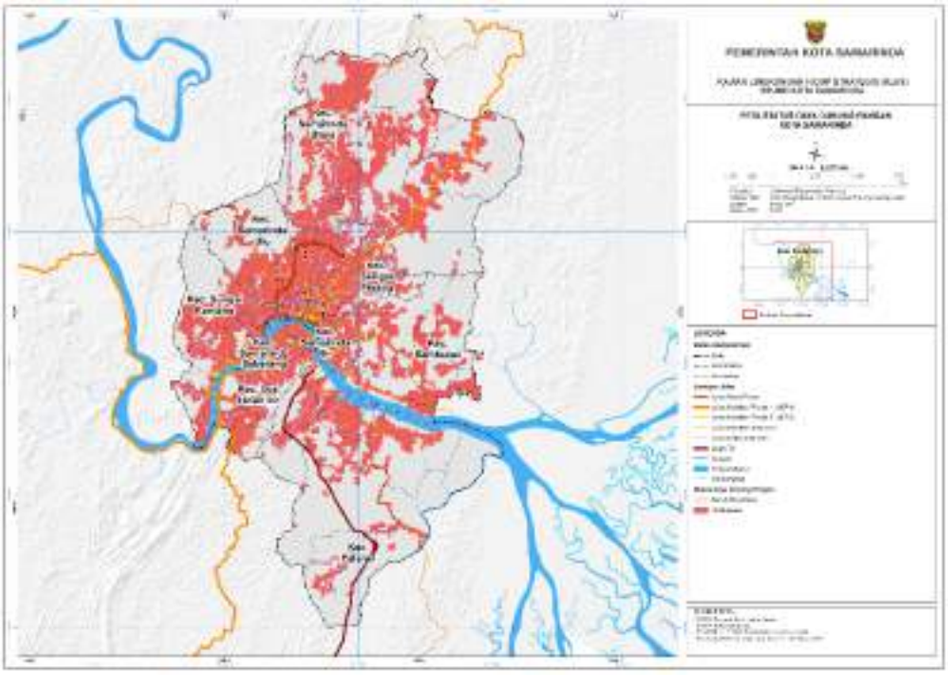

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

2) Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air

Daya dukung air di Kota samarinda dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan nondomestik.

Ketersediaan air di Kota Samarinda diperoleh melalui analisis ketersediaan air berbasis zona PDAM dan Air Tanah dan berbasis jasa ekosistem di Kota Samarinda. Daya dukung air di Kota Samarinda dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Hasil perhitungan ketersediaan air dapat dilihat pada tabel 2.17. Ketersediaan air terbesar dari seluruh kecamatan di Kota Samarinda dalam satu tahun terdapat di Kecamatan Samarinda Utara yaitu 21.773.018 m3/tahun. Sedangkan ketersediaan air terendah terdapat di Kecamatan Samarinda Kota sebesar 408.091 m3/tahun.

Total kebutuhan air di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 2.17, dimana Kecamatan Samarinda Utara memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu

304.269.936 m3/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Palaran sebesar 174.337.425 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Samarinda Seberang sebesar 9.107.005 m3/tahun. Secara keseluruhan daya dukung air di Kota Samarinda berada pada daya dukung air yang terlampaui.

Tabel 2.17
Status Daya Dukung Air Kota Samarinda

No	KECAMATAN	Kebutuhan Air Total (m3/thn)	Ketersediaan Air (m3/thn)	Selisih	Status DDTLH Air
1	Kec. Loa Janan Ilir	37.260.661	3.145.270	-34.115.390	Terlampaui
2	Kec. Palaran	174.337.425	16.635.612	-157.701.812	Terlampaui
3	Kec. Samarinda Ilir	15.534.230	663.251	-8.938.437	Terlampaui
4	Kec. Samarinda Kota	13.132.673	408.091	-3.228.718	Terlampaui
5	Kec. Samarinda Seberang	9.107.005	1.166.028	-7.940.977	Terlampaui
6	Kec. Samarinda Ulu	45.450.398	4.723.189	-40.727.209	Terlampaui
7	Kec. Samarinda Utara	304.269.936	21.773.018	-236.689.597	Terlampaui
8	Kec. Sambutan	48.672.031	7.959.750	-40.712.281	Terlampaui
9	Kec. Sungai Kunjang	24.583.255	6.675.238	-16.070.046	Terlampaui
10	Kec. Sungai Pinang	29.114.053	2.363.743	-24.890.639	Terlampaui
Total		**701.461.666**	**65.513.190**	**-571.015.107**	Terlampaui

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Gambar 2.13
Peta Kebutuhan Air Kota Samarinda

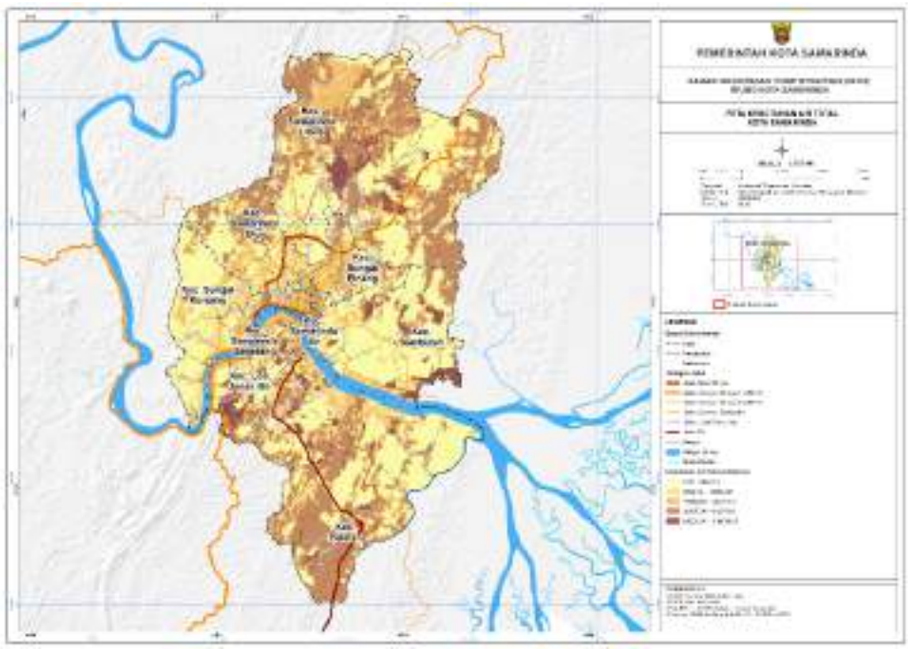

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Gambar 2.14
Peta Ketersediaan Air Kota Samarinda

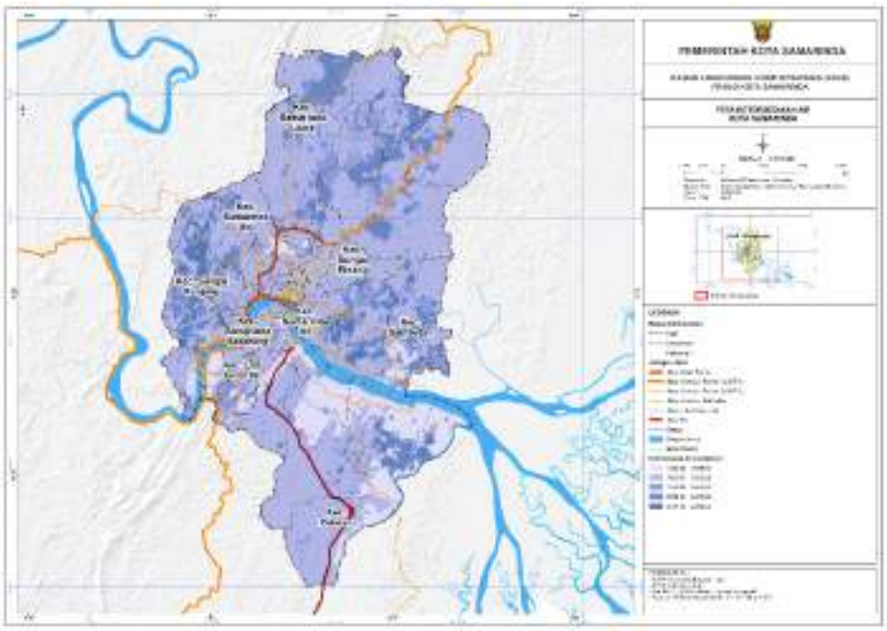

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Gambar 2.15
Peta Status Daya Dukung Air Kota Samarinda

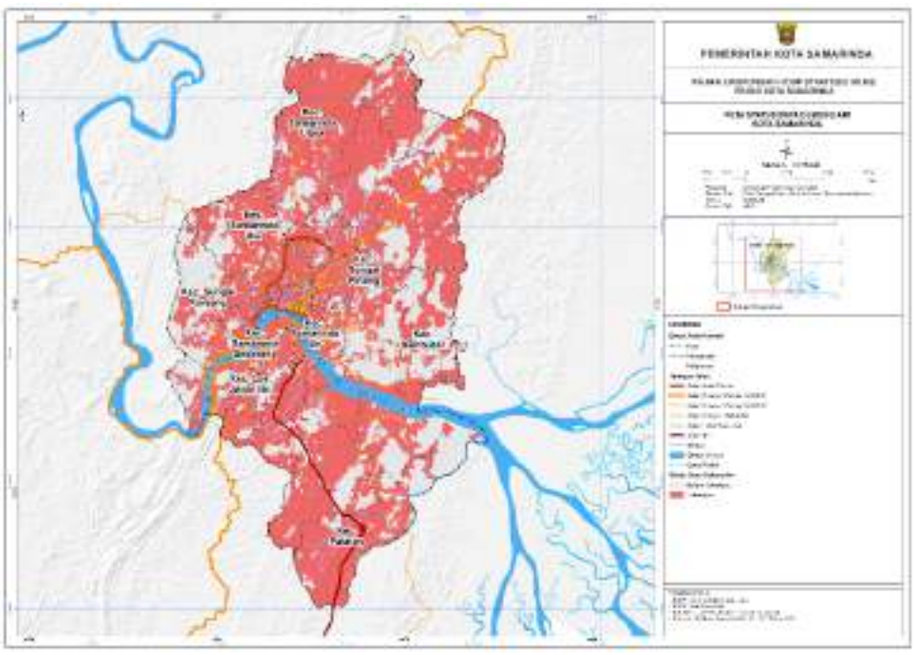

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Prakiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup

1) Rawan Bencana Kota Samarinda

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022, diketahui bahwa banjir memiliki kelas bahaya dominan yang tergolong tinggi, diikuti oleh longsor, kekeringan dan konflik sosial. Namun apabila dicermati di tingkat Provinsi Kaltim, Kota

Samarinda justru memiliki skor terendah dalam Indeks Rawan Bencana dibanding kabupaten/kota se-Kaltim dengan skor 135 dan masuk kelas rawan sedang. Sebaran risiko bencana tertinggi di Kota Samarinda disajikan sebagai berikut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa banjir memiliki kelas bahaya dominan paling tinggi di Kota Samarinda. Adapun kelas bahaya yang terjadi untuk aspek bencana lainnya di Kota Samarinda yaitu:

Tabel 2.18
Kelas Bahaya Dominan di Kota Samarinda

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
1	Banjir	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	Tinggi
3	Difteri	Rendah
4	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah
6	Kekeringan	Sedang
7	Konflik Sosial	Sedang
8	Longsor	Sedang

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Di Kota Samarinda terdapat 50 titik bencana banjir yang tersebar di 9 kecamatan dimana hanya wilayah Kecamatan Sambutan yang tidak pernah mengalami bencana banjir seperti yang terlihat pada tabel. Titik bencana banjir terbanyak berada di Kecamatan Palaran yang mencapai 9 titik, kemudian Samarinda Ilir dan Samarinda Utara yang masing-masing sebanyak 7 titik banjir. Pada tahun 2005, setiap titik banjir tersebut hanya meng alami 6-10 kali bencana banjir dalam setahun, tetapi pada masa sekarang hampir setiap kondisi hujan mengalami bencana banjir. Melihat keadaan seperti itu bukan hal yang aneh jika urgensi penanganan banjir di Kota Samarinda menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah periode saat ini.

Selain banjir, bencana longsor kerap terjadi di Kota Samarinda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa di Kota Samarinda telah terjadi total 41 kejadian bencana longsor, 3 orang meninggal, 2 luka-luka dan 422 orang menderita.

Tabel 2.19
Risiko Bencana di Kota Samarinda

No	Risiko Banjir	Luas (ha)	(%)
1	Rendah	11.179,18	67,07
2	Sedang	3.501,36	21,01
3	Tinggi	1.987,90	11,93
Total (ha)		**16.668,44**	**100**

No	Risiko Longsor	Luas (ha)	(%)
1	Rendah	19.628,95	89,66
2	Sedang	2.264,69	10,34
Total (ha)		**21.893,64**	**100**

No	Risiko Karhutla	Luas (ha)	(%)
1	Rendah	57.919,77	81,28
2	Sedang	13.343,19	18,72
Total (ha)		**71.262,97**	**100**

No	Risiko Kekeringan	Luas (ha)	(%)
1	Rendah	68,49	0,58
2	Sedang	11.759,72	99,42
Total (ha)		**11.828,21**	**100**

No	Risiko Cuaca Ekstrim	Luas (ha)	(%)
1	Sedang	11.836,43	100
Total (ha)		**11.836,43**	**100**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Gambar 2.16
Peta Risiko Banjir Kota Samarinda

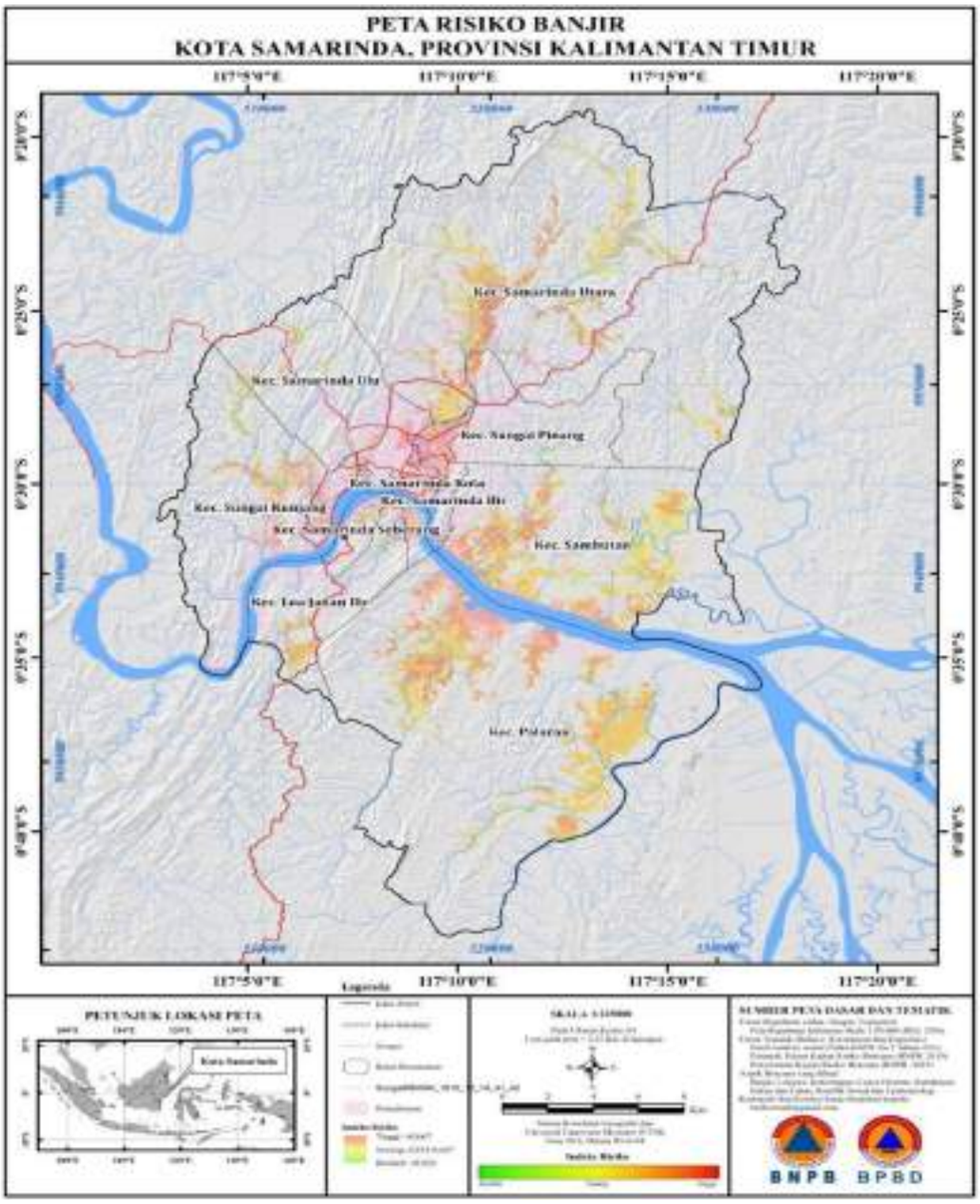

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Gambar 2.17
Peta Risiko Longsor Kota Samarinda

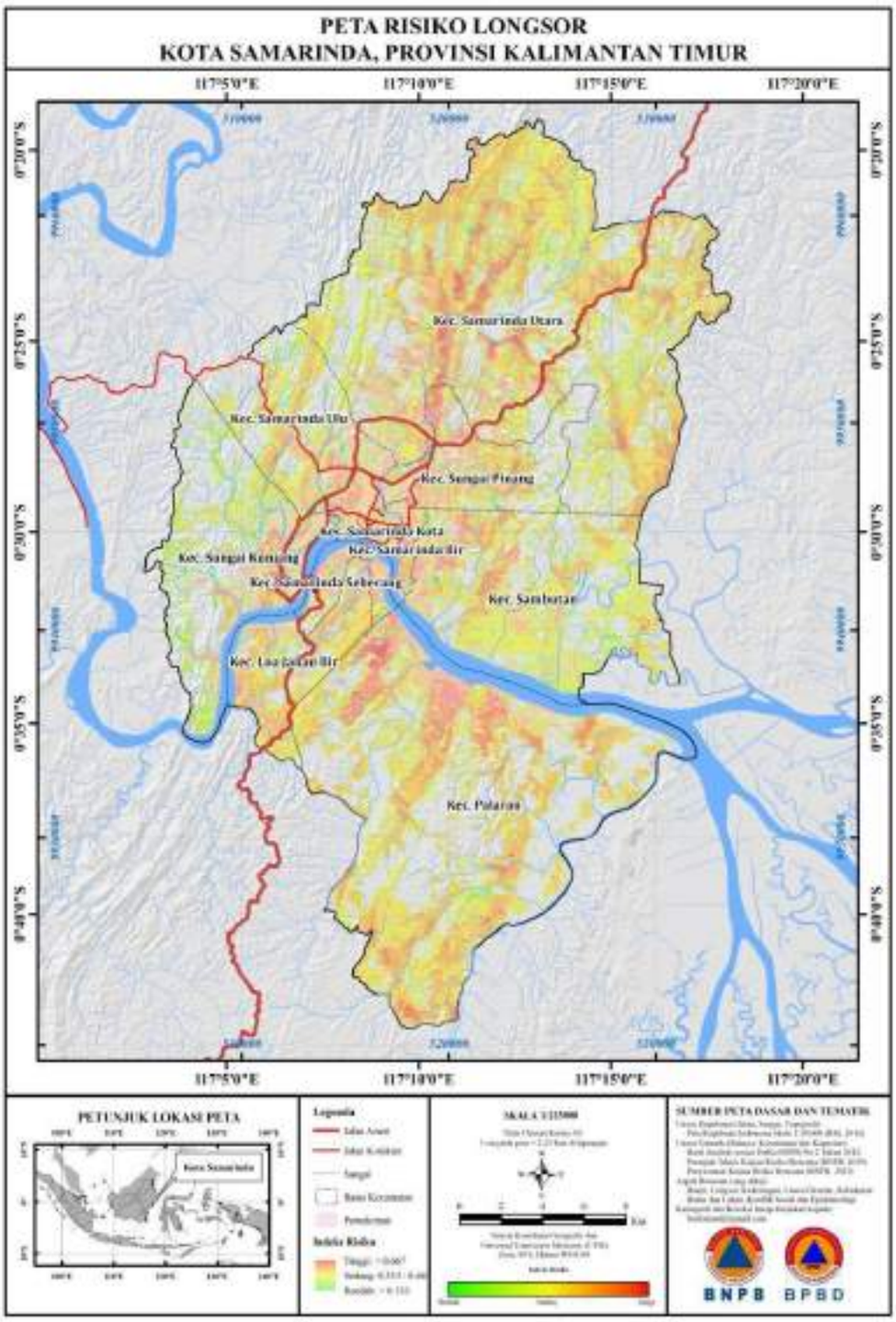

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Gambar 2.18
Risiko karhutla, kekeringan dan cuaca ekstrim

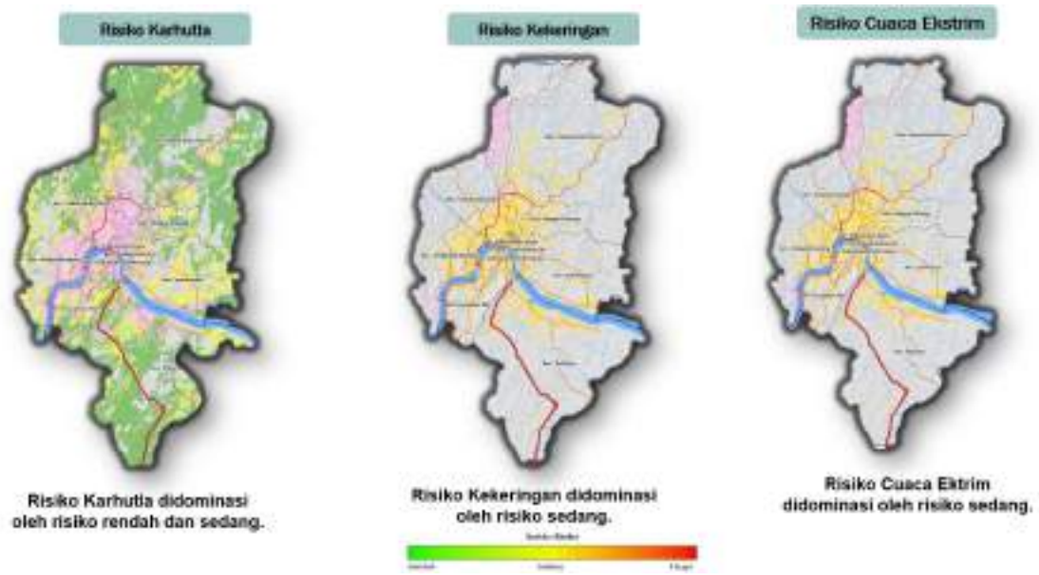

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

d. Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem adalah produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Terdapat empat kelompok jasa ekosistem yaitu: jasa ekosistem penyedia, pengaturan, kultural, dan pendukung; yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub-jenis/kelompok.

1) Layanan penyedia (*provisioning services*): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dll.
2) Layanan pengaturan (*regulating services*): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll.
3) Layanan kultural (*cultural services*): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
4) Layanan pendukung (*supporting services*): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Tabel 2.20
Klasifikasi Jasa Lingkungan

No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (Provisioning)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (*fiber*)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (*fuel*)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (Regulating)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (pollination)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (Cultural)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (Supporting)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (*nutrient*)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Adapun dalam penyusunan KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, akan lebih difokuskan pada:

1) Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jasa ekosistem penyedia pangan menunjukkan kinerja ekosistem dalam menyediakan kebutuhan energi pangan di Kota Samarinda. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan di setiap kecamatan cukup beragam. Dari hasil analisis diketahui secara umum wilayah Kota Samarinda memiliki jasa ekosistem penyedia pangan sedang..

Jasa ekosistem penyedia pangan menunjukkan kinerja ekosistem dalam menyediakan kebutuhan energi pangan di Kota Samarinda. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan di setiap kecamatan cukup beragam. Jika dilihat secara keseluruhan, Kecamatan Samarinda Utara memiliki indeks jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi dengan luasan mencapai 1.107,36 ha dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, hal ini terkait dengan jenis penggunaan lahan sawah yang masih produktif di kecamatan tersebut.

Sementara itu, Kecamatan Samarinda ulu hanya memiliki indeks jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi hanya seluas 2,17 Ha. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan dan masing-masing luasannya dapat dilihat pada Tabel 2.21. Peta nilai sebaran tingkat jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Gambar 2.19 Secara umum dapat diketahui bahwa jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Samarinda dalam kelas rendah.

Tabel 2.21
Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kota Samarinda

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
1	Kec. Loa Janan Ilir	1.068,14	1.308,06	0,38	286,34	521,44	3.184,36
2	Kec. Palaran	5.658,56	10.923,62	62,68	1.949,93	575,82	19.170,62
3	Kec. Samarinda Ilir	356,59	158,67		66,58		581,84
4	Kec. Samarinda Kota	276,65	12,23		70,93		359,81
5	Kec. Samarinda Seberang	620,31	235,16		320,86	12,33	1.188,66
6	Kec. Samarinda Ulu	1.854,32	2.592,50	0,03	681,83	2,17	5.130,85
7	Kec. Samarinda Utara	4.777,05	12.588,79	27,87	4.779,84	1.107,36	23.280,90
8	Kec. Sambutan	2.307,04	3.979,95	14,69	2.164,53	759,31	9.225,52

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
9	Kec. Sungai Kunjang	2.303,45	2.131,55	29,17	2.243,51	43,97	6.751,65
10	Kec. Sungai Pinang	1.385,21	1.334,40		81,92	21,04	2.822,57
Total		**20.607,32**	**35.264,91**	**134,82**	**12.646,28**	**3.043,45**	**71.696,78**

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Gambar 2.19
Jasa ekosistem penyedia pangan Kota Samarinda

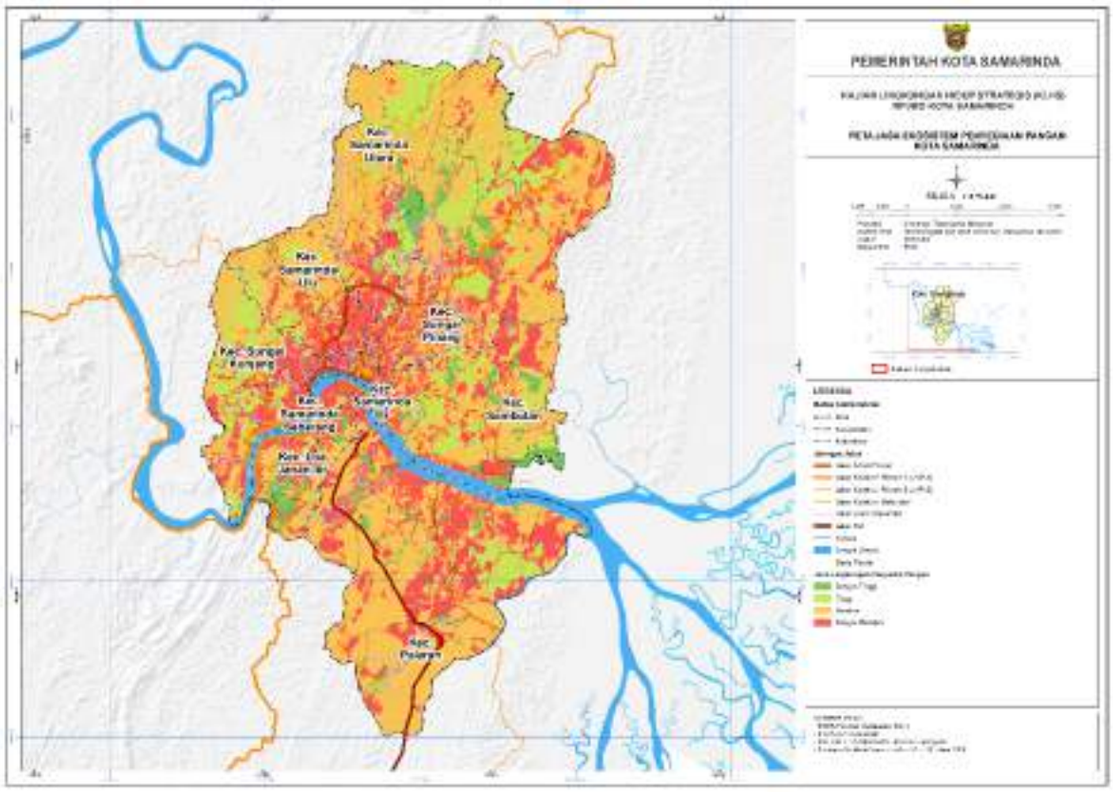

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

2) Jasa Ekosistem Penyedia Air

Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan kemampuan atau kinerja ekosistem dalam menyediakan air bersih. Ketersediaan air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem penyedia air di Kota Samarinda didominasi oleh klasifikasi sangat rendah yakni seluas 55.872,24 ha.

Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan kemampuan atau kinerja ekosistem dalam menyediakan air bersih. Ketersediaan air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Sebagian besar jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kelas sangat tinggi ditemukan di Kecamatan Palaran dengan cakupan wilayah

berkisar 1.271,16 Ha. Sedangkan jika dilihat secara keseluruhan maka kelas jasa ekosistem penyedia air di Kota Samarinda tergolong sangat rendah. Luas wilayah berdasarkan nilai indeks jasa ekosistem penyedia air bersih di setiap kecamatan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 2.22. Sedangkan peta sebaran tingkat jasa ekosistem penyedia air dapat dilihat pada Gambar berikut.

Tabel 2.22
Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kota Samarinda

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
1	Kec. Loa Janan Ilir	2.376,19	521,44	0,38	68,42	217,93	3.184,36
2	Kec. Palaran	16.582,19	575,82	62,68	678,77	1.271,16	19.170,62
3	Kec. Samarinda Ilir	515,26				66,58	581,84
4	Kec. Samarinda Kota	288,88		2,28		68,65	359,81
5	Kec. Samarinda Seberang	855,47	12,33		15,63	305,23	1.188,66
6	Kec. Samarinda Ulu	4.446,82	2,17	223,49	286,44	171,93	5.130,85
7	Kec. Samarinda Utara	17.365,83	1.107,36	2.864,12	1.658,85	284,74	23.280,90
8	Kec. Sambutan	6.286,99	759,31	21,50	1.483,33	674,40	9.225,52
9	Kec. Sungai Kunjang	4.434,99	43,97	346,10	1.265,59	660,99	6.751,65
10	Kec. Sungai Pinang	2.719,61	21,04	0,42	65,30	16,20	2.822,57
Total		**55.872,24**	**3.043,45**	**3.520,97**	**5.522,32**	**3.737,80**	**71.696,78**

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Gambar 2.20
Jasa ekosistem penyedia air Kota Samarinda

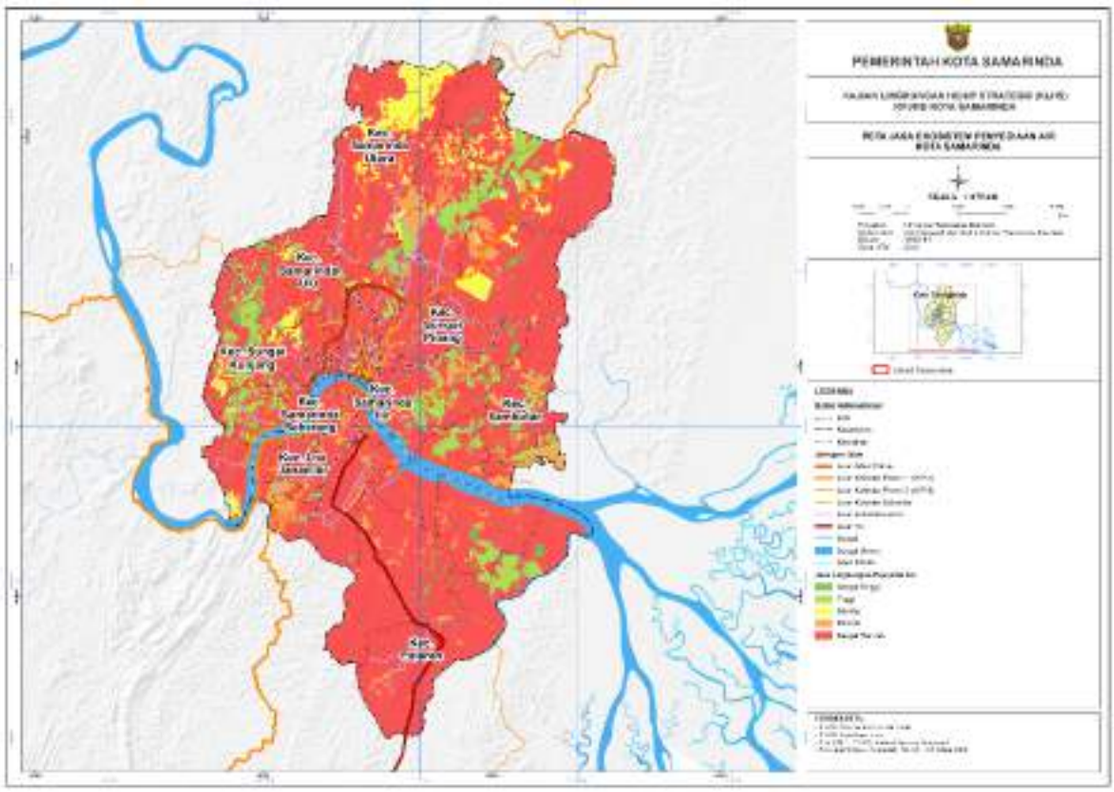

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

3) Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir

Ekosistem dapat berfungsi sebagai pengatur tata aliran air sehingga fungsi-fungsi aliran alami dari ekosistem sangat perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pengaruh penggunaan lahan pun tidak bisa dihindari yang akan berdampak pada kinerja ekosistem dalam menjaga tata aliran air. Fungsi ekosistem yang rendah dalam mengatur tata aliran air akan memberikan potensi yang besar untuk terjadinya banjir jika kondisi hidrometeorologi mendukung. Berdasarkan hasil analisis, jasa ekosistem pengatur tata aliran air dan banjir di Kota Samarinda didominasi oleh klasifikasi sangat rendah seluas 34.101,21 ha.

Ekosistem dapat berfungsi sebagai pengatur tata aliran air sehingga fungsi-fungsi aliran alami dari ekosistem sangat perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pengaruh penggunaan lahan pun tidak bisa dihindari yang akan berdampak pada kinerja ekosistem dalam menjaga tata aliran air. Fungsi ekosistem yang rendah dalam mengatur tata aliran air akan memberikan potensi yang besar untuk terjadinya banjir jika kondisi hidrometeorologi mendukung.

Kota Samarinda memiliki karakteristik curah hujan yang tinggi sehingga sangat menjadi perhatian penting untuk mengetahui kondisi jasa ekosistemnya dalam mengatur tata aliran air dan mencegah banjir. Berdasarkan hasil analisis, jasa ekosistem pengatur tata aliran air di Kota Samarinda didominasi oleh tingkat jasa ekosistem yang rendah dalam mengatur tata air dan mencegah banjir. Detail kelas jasa ekosistem ini dalam setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.23. Sedangkan peta sebaran jasa ekosistem pengatur air dapat dilihat pada Gambar berikut.

Tabel 2.23
Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kota Samarinda

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Total (ha)
1	Kec. Loa Janan Ilir	2.068,57	829,07	0,38	286,34	3.184,36
2	Kec. Palaran	8.597,71	8.560,30	62,68	1.949,93	19.170,62
3	Kec. Samarinda Ilir	432,58	82,67		66,58	581,84
4	Kec. Samarinda Kota	288,88			70,93	359,81
5	Kec. Samarinda Seberang	777,87	89,94		320,86	1.188,66
6	Kec. Samarinda Ulu	2.910,39	1.754,18	0,03	466,26	5.130,85

7	Kec. Samarinda Utara	7.525,89	13.316,89	27,87	2.410,26	23.280,90
8	Kec. Sambutan	5.250,64	1.802,46	14,69	2.157,73	9.225,52
9	Kec. Sungai Kunjang	4.305,09	490,81	29,17	1.926,58	6.751,65
10	Kec. Sungai Pinang	1.943,59	797,48		81,50	2.822,57
Total		**34.101,21**	**27.723,79**	**134,82**	**9.736,96**	**71.696,78**

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Gambar 2.21
Jasa ekosistem tata aliran air dan banjir Kota Samarinda

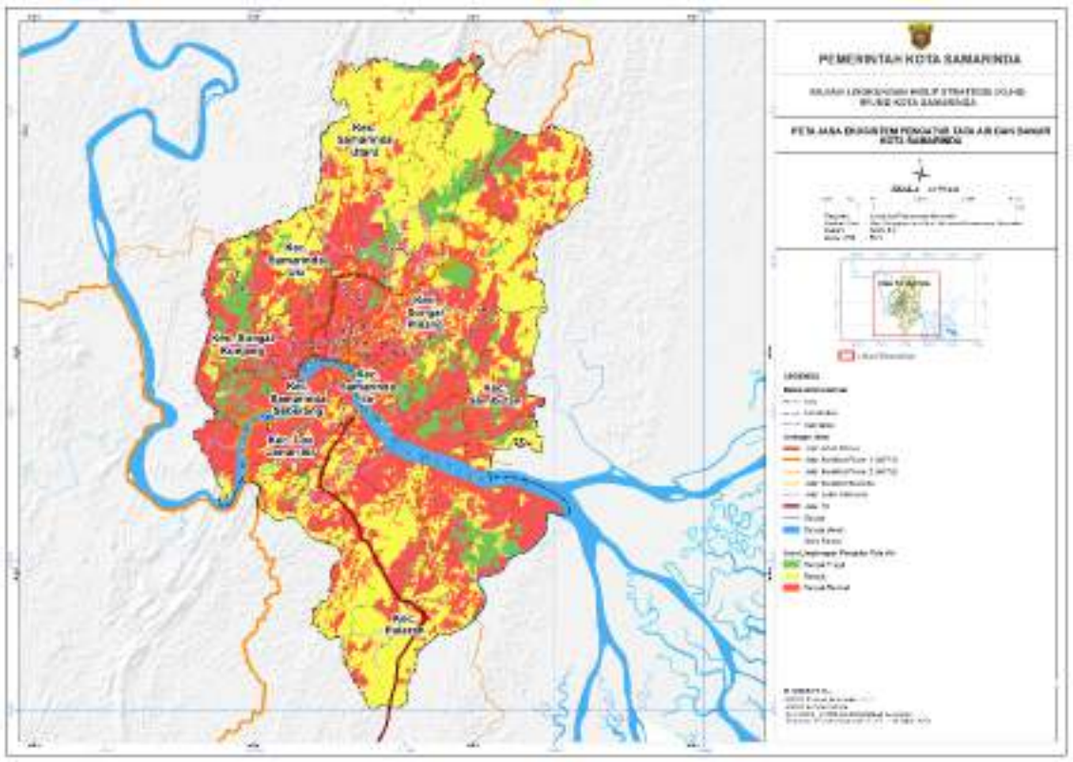

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

e. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dianalisis dari efisiensi sumber daya alam dalam menampung jumlah penduduk. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien berarti memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi dari ekosistem di dalamnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah ambang batas ketersediaan air dan ambang batas ketersediaan pangan, kecamatan yang memiliki nilai ambang batas belum terlampaui artinya memiliki pemanfaatan sumber daya yang optimal. Ambang batas ketersediaan air secara keseluruhan di Kota Samarinda sudah melampaui nilai ambang batas di seluruh kecamatan Kota Samarinda, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut ini.

Tabel 2.24
Ambang Batas Air Kota Samarinda

No	KECAMATAN	Ambang Batas Air (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Selisih
1	Kec. Loa Janan Ilir	36.404	69.396	-32.992
2	Kec. Palaran	192.542	66.912	125.630
3	Kec. Samarinda Ilir	7.677	69766	-62.089
4	Kec. Samarinda Kota	4.723	32.379	-27.656
5	Kec. Samarinda Seberang	13.496	65.796	-52.300
6	Kec. Samarinda Ulu	54.667	133.331	-78.664
7	Kec. Samarinda Utara	252.003	112.076	139.927
8	Kec. Sambutan	92.127	62.429	29.698
9	Kec. Sungai Kunjang	77.260	139.320	-62.060
10	Kec. Sungai Pinang	27.358	110.473	-83.115
Total		**758.255**	**861.878**	**-103.623**

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Ambang batas ketersediaan pangan secara keseluruhan di Kota Samarinda sudah terlampaui, total nilai ambang batas di Kota Samarinda adalah 496.470 jiwa dengan Kecamatan yang memiliki nilai ambang batas terbesar adalah Kecamatan Samarinda Utara sebanyak 328.046 jiwa hal itu terlihat karena Kecamatan Samarinda Utara memiliki penggunaan lahan non terbangun yang masih luas, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.25
Ambang Batas Pangan Kota Samarinda

No	KECAMATAN	Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Selisih
1	Kec. Loa Janan Ilir	28.353	69.396	-41.043
2	Kec. Palaran	44.699	66.912	-22.213
3	Kec. Samarinda Ilir	12.197	69766	-57.569
4	Kec. Samarinda Kota	-	32.379	-32.379
5	Kec. Samarinda Seberang	4.683	65.796	-61.113
6	Kec. Samarinda Ulu	29.971	133.331	-103.360
7	Kec. Samarinda Utara	328.046	112.076	215.970
8	Kec. Sambutan	18.213	62.429	-44.216
9	Kec. Sungai Kunjang	6.805	139.320	-132.515
10	Kec. Sungai Pinang	23.502	110.473	-86.971
Total		**496.470**	**861.878**	**-365.408**

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

f. Tingkat Ketahanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

1) Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Jasa ekosistem pengatur iklim merupakan fungsi ekosistem dalam menjaga kondisi iklim dari perubahan iklim secara ekstrim akibat pemanasan global. Tutupan vegetasi merupakan salah satu faktor dominan yang akan menentukan apakah ekosistem memiliki fungsi yang baik dalam mengatur iklim dengan salah fungsinya adalah menyerap karbon sebagai salah satu faktor terjadinya peningkatan suhu udara secara global.

Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan akan berpotensi besar dalam memberikan pengaruh pemanasan global akibat meningkatnya fungsi lahan terbangun dan aktivitas masyarakat kota dalam penggunaan energi yang pada akhirnya menghasilkan emisi dan buangan. Jasa ekosistem pengatur iklim berdasarkan tingkatannya di setiap kecamatan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 2.26. Secara umum, tingkat jasa ekosistem pengatur iklim di Kota Samarinda adalah sedang seluas 35.399,73 Ha selanjutnya diikuti oleh tingkat jasa ekosistem sangat rendah seluas 20.607,32 Ha.

Tabel 2.26
Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kota Samarinda

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
1	Kec. Loa Janan Ilir	1.068,14	521,44	1.308,44	286,34		3.184,36
2	Kec. Palaran	5.658,56	575,82	10.986,30	1.949,93		19.170,62
3	Kec. Samarinda Ilir	356,59		158,67	66,58		581,84
4	Kec. Samarinda Kota	276,65		12,23	68,65	2,28	359,81
5	Kec. Samarinda Seberang	620,31	12,33	235,16	320,86		1.188,66
6	Kec. Samarinda Ulu	1.854,32	217,75	2.592,53	458,37	7,88	5.130,85
7	Kec. Samarinda Utara	4.777,05	3.476,94	12.616,65	1.943,58	466,67	23.280,90
8	Kec. Sambutan	2.307,04	766,12	3.994,64	2.157,73		9.225,52
9	Kec. Sungai Kunjang	2.303,45	360,90	2.160,71	1.926,58		6.751,65
10	Kec. Sungai Pinang	1.385,21	21,46	1.334,40	81,50		2.822,57
Total		**20.607,32**	**5.952,76**	**35.399,73**	**9.260,12**	**476,84**	**71.696,78**

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Gambar 2.22
Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kota Samarinda

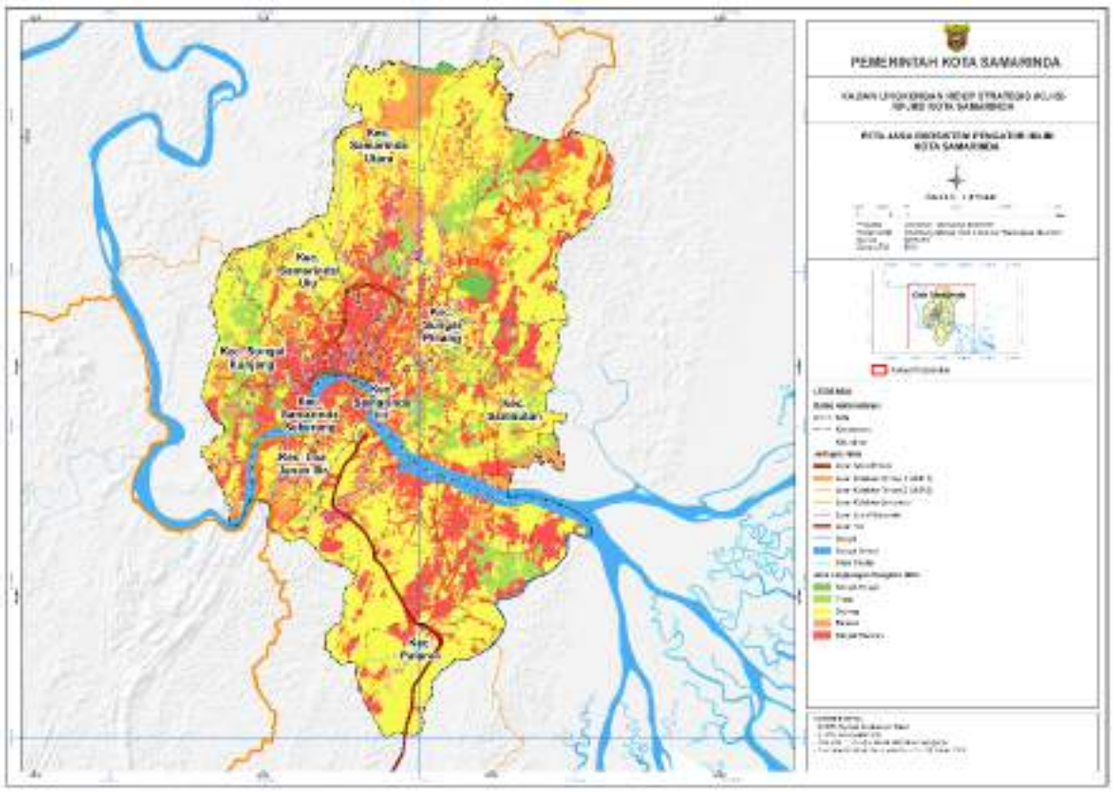

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

2) Tingkat Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kota Samarinda

Besar kecilnya dampak atau Konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian bencana (perubahan iklim) pada suatu sistem akan ditentukan oleh tingkat keterpaparan (Exposure, E), Sensitivitas (Sensitivity, S) dan Kapasitas (C) dari sistem tersebut. Kerentanan (Vulnerability) menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati *batas toleransi dari sistem* maka sistem menjadi rentan karena penyimpangan atau perubahan iklim tersebut menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, Kerentanan (V) dapat direpresentasikan oleh kondisi *biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi*, yang selanjutnya dinyatakan dengan indek sensitivitas dan keterpaparan (Sensitivity and Exposure Index, SEI). Misalnya orang miskin lebih rentan dari orang kaya, atau orang yang tinggal di pinggir sungai lebih rentan terhadap bahaya banjir. Kapasitas (C) menunjukkan kemampuan untuk menghindari atau mengantisipasi, mengatasi atau mengelola dampak atau

kemampuan untuk pulih kembali dengan cepat setelah terkena dampak. Sistem yang memiliki kapasitas yang tinggi akan memiliki selang toleransi yang lebar terhadap keragaman atau perubahan iklim yang terjadi. Kapasitas juga direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi yang terkait dengan kemampuan. Misalnya petani yang sumber pencaharian satu-satunya hanya dari usahatani akan memiliki kapasitas yang rendah dibanding petani yang memiliki sumber pencaharian alternatif yang banyak. Kemampuan adaptasi ini dinyatakan dalam *Adaptive Capacity Index* (ACI).

Gambar 2.23
Kerangka Berfikir Kategori Terhadap Resiko Penyimpangan Iklim

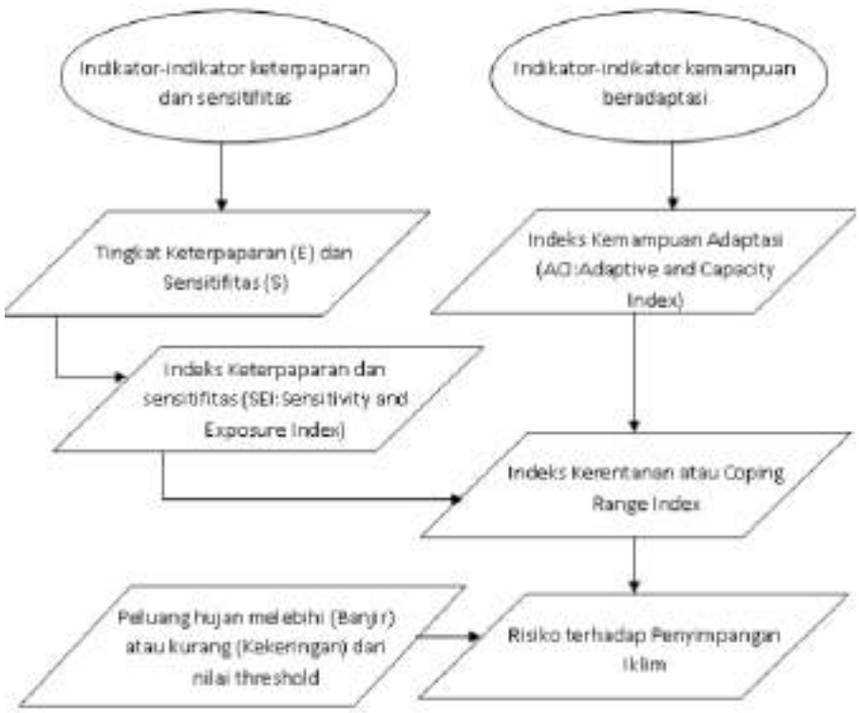

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Berdasarkan data SIDIK pada tahun 2018, diketahui bahwa nilai indeks risiko kekeringan dominan pada tingkat rendah, sedangkan untuk risiko kerentanan perubahan iklim pada kondisi sedang dan tinggi.

Gambar 2.24
Indeks kerentanan terhadap perubahan iklim Kota Samarinda

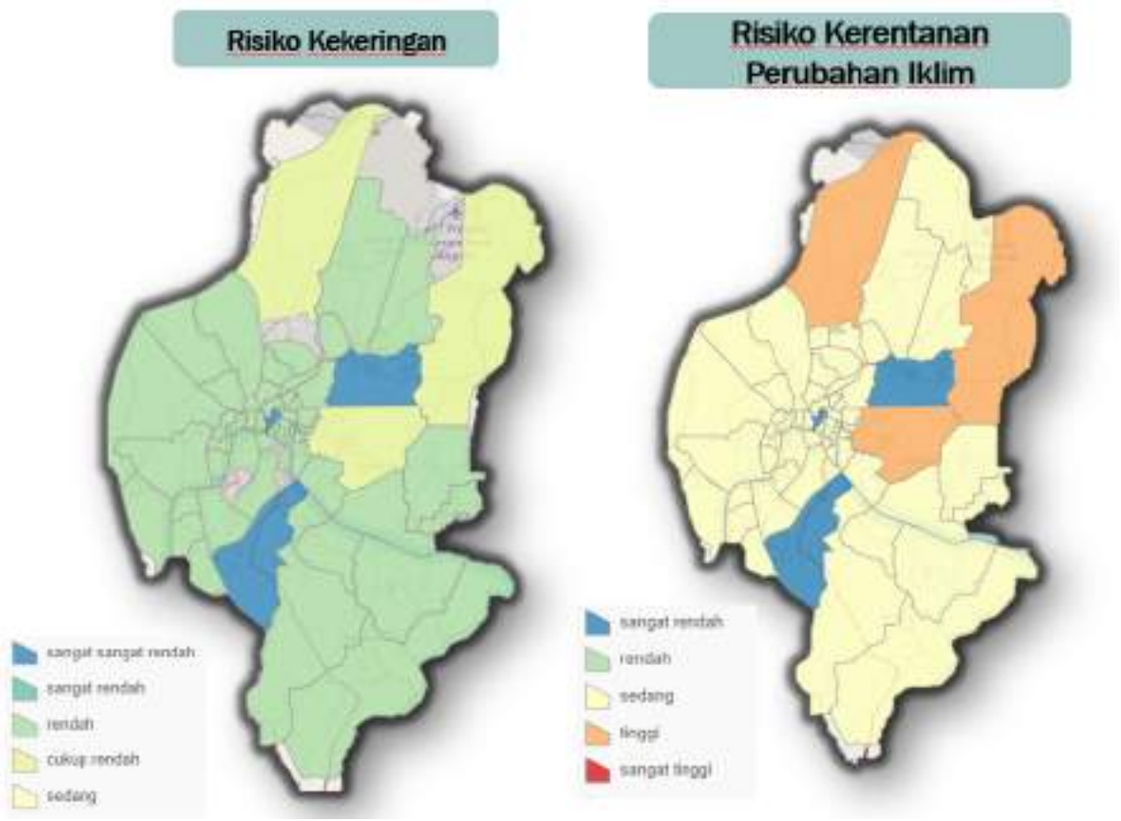

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

g. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Keanekaragaman hayati mengandung beragam manfaat dan dapat memerankan berbagai fungsi sehingga pelestariannya menjadi sangat penting baik ditinjau dari sudut ekonomi maupun ekologi serta etika. Berbagai komponen flora maupun fauna telah memberikan sumbangannya dalam penemuan dan pengembangan farmasi dan kedokteran, substitusi terhadap jenis-jenis bahan pangan baru, dan peningkatan kemampuan rekayasa genetik. Keindahan dan keunikan keanekaragaman hayati telah memperkaya kehidupan dan kebudayaan kita, menyediakan berbagai obyek penelitian dan pengembangan. Potensi tersebut merupakan modal yang besar dalam pengembangan ecotourism yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Manfaat lain yang sulit untuk dihitung adalah peranan

keanekaragaman hayati sebagai pemelihara dan penyangga proses-proses pendukung kehidupan. Hutan misalnya, berfungsi sebagai pengatur iklim dan pelindung siklus air, penyerap bahan-bahan pencemar, dan pelindung tanah dari erosi. Berikut merupakan data dan peta jasa ekosistem pendukung biodiversity di Kota Samarinda.

Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan terus mengalami perubahan alih fungsi kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun. Jasa ekosistem pendukung kehati berdasarkan tingkatannya di setiap kecamatan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel. Secara umum, tingkat jasa ekosistem pendukung kehati di Kota Samarinda adalah sangat rendah dan sedang seluas 30.297,89 ha dan 21.905,84 ha. Hal itu terlihat pada Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Palaran.

Tabel 2.27
Jasa Lingkungan Pendukung Kehati Kota Samarinda

No	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total (ha)
1	Kec. Loa Janan Ilir	1.807,51	1.000,43	308,00	68,42		3.184,36
2	Kec. Palaran	7.505,55	2.939,15	8.047,16	678,77		19.170,62
3	Kec. Samarinda Ilir	423,17	76,00	82,67			581,84
4	Kec. Samarinda Kota	345,30	12,23			2,28	359,81
5	Kec. Samarinda Seberang	937,87	157,56	77,60	15,63		1.188,66
6	Kec. Samarinda Ulu	2.244,00	1.056,07	1.536,46	286,44	7,88	5.130,85
7	Kec. Samarinda Utara	8.538,73	2.748,84	9.867,81	1.658,85	466,67	23.280,90
8	Kec. Sambutan	3.747,55	2.943,61	1.051,04	1.483,33		9.225,52
9	Kec. Sungai Kunjang	3.325,35	2.001,64	159,07	1.265,59		6.751,65
10	Kec. Sungai Pinang	1.422,87	558,38	776,02	65,30		2.822,57
Total		**30.297,89**	**13.493,89**	**21.905,84**	**5.522,32**	**476,84**	**71.696,78**

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Gambar 2.25
Jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati Kota Samarinda

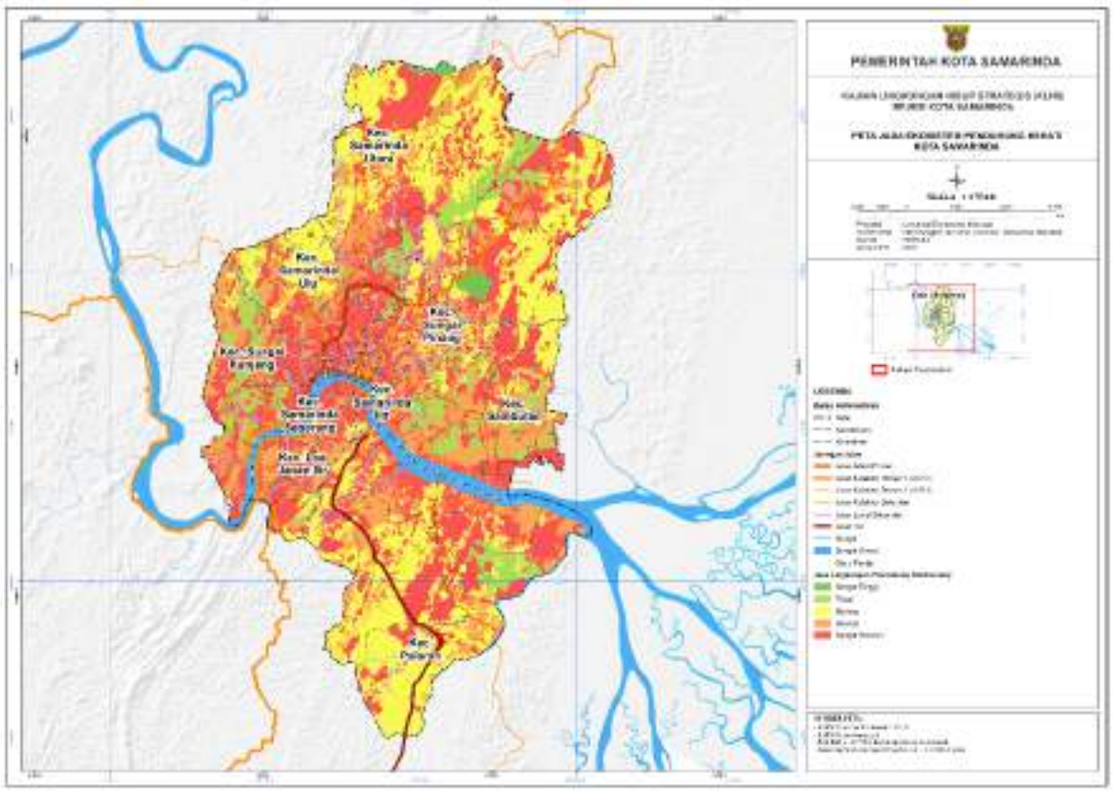

(Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029)

Adapun jika dilihat dari keragaman ekosistemnya, sebaran ekosistem unik di Kota Samarinda yang terdiri dari ekosistem hutan lahan kering/hutan tropis dataran rendah, hutan rawa air tawar dan hutan mangrove. Adapun hutan tropis dataran rendah yang tersisa berada di lokasi Hutan Pendidikan dan Penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (KHDTK Fahutan UNMUL) di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.

Gambar 2.26
Peta Ekosistem Unik di Kota Samarinda

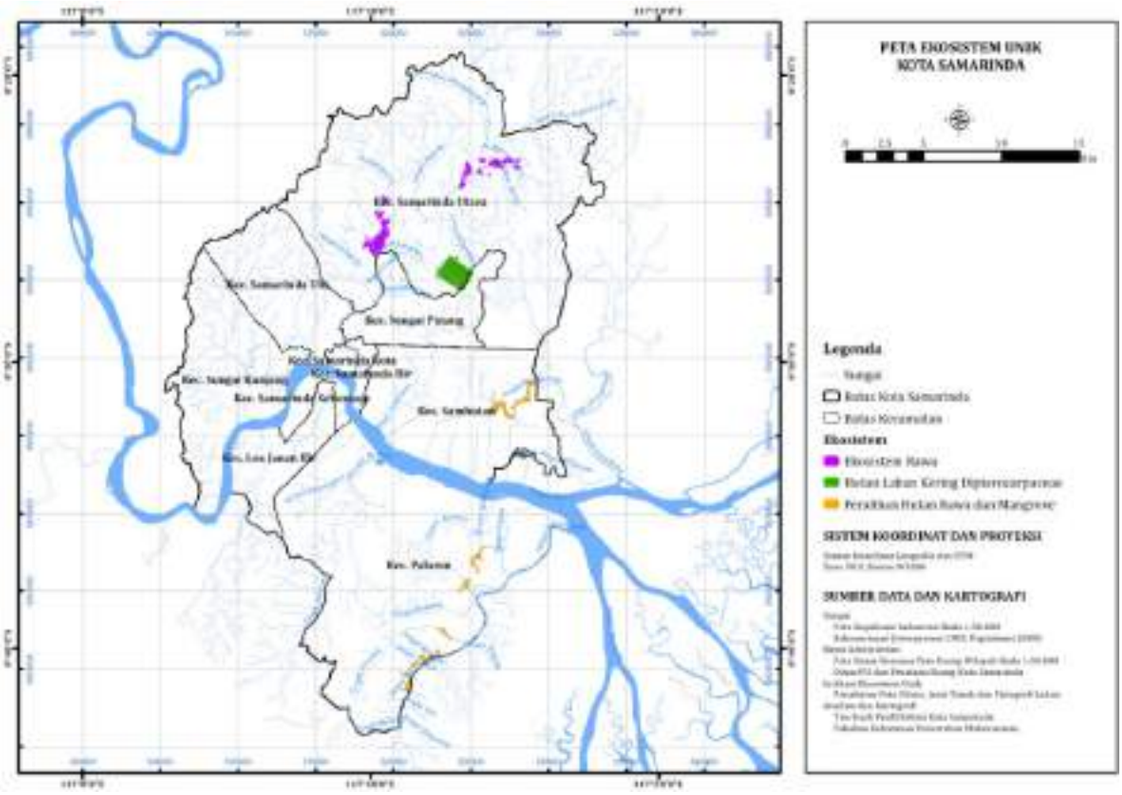

(Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045)

Kota Samarinda merupakan ekosistem dataran rendah tropis (*lowland tropical ecosystem*). Ekosistem dataran rendah tropis merupakan kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Gambaran kekayaan jenis ini masih terdapat di Kota Samarinda terutama pada lokasi satu-satunya kawasan hutan, yaitu Hutan Pendidikan.

Dari aspek vegetasi dan pepohonan, sebagian besar dari berbagai jenis vegetasi dan pepohonan kota samarinda merupakan jenis vegetasi yang menyusun tegakan kawasan berhutan yang di Kota Samarinda, terutama dari Hutan Pendidikan dan Penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kampus Unmul Gunung Kelua, dan beberapa kawasan dengan tutupan hutan sekunder lainnya. Belum masuk beberapa jenis vegetasi yang berada di lahan basah pasang surut yang dekat dengan delta Mahakam berupa hutan mangrove atau hutan rawa. Untuk keragaman satwa dijelaskan sebagai berikut:

1) Ditemukan lebih dari 80 jenis burung yang hidup secara alami, namun didominasi jenis-jenis burung yang menyukai kawasan

hutan sekunder muda, perkebunan, pertanian, kawasan terbuka, dan pemukiman;

2) Teridentifikasi lebih dari 20 jenis burung dan mamalia yang diperjualbelikan baik merupakan hasil budidaya, didapat dari kawasan hutan di sekitar Samarinda dan didatangkan dari luar propinsi;
3) Diperoleh data jumlah mamalia lebih dari 40 jenis yang hidup alami yang mendiami beberapa wilayah berhutan di Samarinda.

3. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Kota Samarinda menuntut pemerintah untuk menyediakan segala kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), terlebih lagi dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur yang secara tidak langsung menjadikan Kota Samarinda sebagai kota penyangga. Berbicara pemenuhan kebutuhan pangan maka sangat erat kaitannya dengan pemenuhan bahan pokok penting, salah satunya beras yang telah turun-temurun menjadi makanan pokok masyarakat di Indonesia. Namun pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi tidak sebanding dengan peningkatan produksi beras. Hal ini disebabkan karena penurunan jumlah lahan sebagai akibat tingginya perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan lainnya.

a. Ketersediaan Pangan Utama

Melihat kondisi Kota Samarinda yang tumbuh menuju kota metropolitan, tentunya mempunyai beban tersendiri untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Jumlah penduduk yang hampir mencapai 900 ribu jiwa tentunya membutuhkan pangan utama yang amat besar, bahkan apabila ada keterlambatan dalam pemenuhannya maka akan berakibat pada kelangkaan pangan utama yang berujung pada inflasi. Kondisi ini yang selalu menjadi perhatian oleh pemerintah Kota Samarinda, terutama menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan’

Tabel 2.28
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2019-2024 Kota Samarinda

Tahun		Komoditas			
		Beras	Gula Pasir	Minyak Goreng	Tepung Terigu
2019	Produksi	9.724	0	0	0
	Impor	86.526	38.325	14.118	74.704
	Ketersediaan	96.250	38.325	14.118	74.704
2020	Produksi	7.192	0	0	0
	Impor	67.763	72.940	7.565	13.135
	Ketersediaan	74.955	72.940	7.565	13.135
2021	Produksi	6.645	0	0	0
	Impor	150.363	121.390	34.653	13.894
	Ketersediaan	157.008	121.390	34.653	13.894
2022	Produksi	5.691	0	0	0
	Impor	104.597	12.672	17.676	3.321,46
	Ketersediaan	110.288	12.672	17.676	3.321,46
2023	Produksi	7.832,55	0	0	0
	Impor	104.597	179.789	94.781	197.160
	Ketersediaan	112.429,55	179.789	94.781	197.160
2024	Produksi	4.832	-	-	-
	Impor	217.402	160.742	93.398	84.654
	Ketersediaan	222.234	160.742	93.398	84.654

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Pada tahun 2019 Kota Samarinda mampu menghasilkan 9.724 ton beras, sedangkan pada tahun 2024 hanya mampu memproduksi 4.832 ton. Melihat perkembangan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan Kota Samarinda dalam menyediakan pangan utama dari hasil lokal semakin menurun, yang artinya pemerintah Kota Samarinda harus melakukan kerjasama dengan daerah penghasil untuk memenuhi kebutuhan pangan utama di masyarakat sebelum terjadi kasus kelangkaan di pasar.

Fluktuasi tonase ketersediaan 2019-2024:

1) Dari 4 komoditi yang dipantau yaitu komoditi beras, gula, migor dan tepung, hanya komoditi beras yang ada produksinya selain itu semuanya adalah komoditi impor.

2) data diambil dari beberapa sumber dan direkap serta diolah oleh Distapangtani, sehingga data yang ada adalah rekapitulasi data bulanan dari sumber data.
3) Tahun 2020 hingga 2021 terjadi wabah covid sehingga berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan hingga tahun 2022
4) Terdapat pengurangan jumlah penduduk di tahun 2022 dr tahun sebelumnya.
5) Ada beberapa OPD/instansi sumber data seperti karantina dan PT.Peti Kemas Palaran yang tidak memberikan data karena kebijakan pimpinan dan regulasi instansi sehingga terjadi gelombang data di tiap tahunnya.

b. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah, CPP berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan dari pembelian dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau harga pembelian pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai harga pembelian pemerintah.

Tabel 2.29
Data Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2019-2024

Tahun	Stok Awal Tahun (ton)	Pengadaan (ton)	Penyaluran (ton)	Atok Akhir Tahun (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019		4,95	-	4,95
2020	4,95	10,54	14,39	1,1
2021	1,1	18,5	-	19,6
2022	19,6	3,38	6,25	16,62
2023	16,62	35	6,25	41,11
2024	41,11	20,89	6,17	55,82

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat tercermin melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara terencana dan berkesinambungan. Pengelolaan

ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan dalam menghadapi kondisi darurat, gejolak harga, serta gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aksesibilitas pangan masyarakat.

Pada tahun 2019, pengelolaan cadangan pangan dimulai dengan kegiatan pengadaan sebesar 4,95 ton tanpa adanya stok awal tahun. Tidak terdapat kegiatan penyaluran pada tahun tersebut, sehingga stok akhir tahun tercatat sebesar 4,95 ton. Tahun ini menjadi dasar pembentukan sistem cadangan pangan di daerah.

Tahun 2020 menunjukkan peningkatan peran cadangan pangan dalam mitigasi kondisi darurat, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19. Terdapat pengadaan sebesar 10,54 ton dan penyaluran mencapai 14,39 ton. Dengan stok awal sebesar 4,95 ton, maka stok akhir tahun tersisa 1,1 ton. Hal ini menunjukkan respons cepat pemerintah dalam menjawab kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak pandemi.

Pada tahun 2021, terdapat peningkatan signifikan pengadaan pangan sebesar 18,5 ton. Dengan stok awal yang hanya 1,1 ton dan tanpa penyaluran, stok akhir tahun melonjak menjadi 19,6 ton. Kondisi ini mencerminkan upaya konsolidasi cadangan pangan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ketidakpastian yang masih berlangsung.

Tahun 2022 ditandai dengan penurunan volume pengadaan menjadi 3,38 ton, namun disertai dengan penyaluran sebesar 6,25 ton. Dengan stok awal sebesar 19,6 ton, maka stok akhir tahun tercatat sebesar 16,62 ton. Penurunan pengadaan dapat dikaitkan dengan mulai pulihnya kondisi sosial ekonomi, sementara penyaluran tetap dilakukan sebagai bentuk stabilitas kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan pengadaan secara signifikan hingga 35 ton, dengan penyaluran tetap pada angka 6,25 ton. Stok awal sebesar 16,62 ton dan stok akhir yang meningkat menjadi 41,11 ton menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan jangka menengah, khususnya untuk menjaga stabilitas pasokan di tingkat daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2024, penguatan cadangan pangan terus dilanjutkan dengan pengadaan sebesar 20,89 ton. Penyaluran dilaksanakan sebesar 6,17 ton. Dengan stok awal tahun sebesar 41,11 ton, maka stok akhir tahun meningkat menjadi 55,82 ton. Hal ini

menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah berhasil menciptakan sistem cadangan pangan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan masa depan.

Secara keseluruhan, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan tren positif, dengan peningkatan kapasitas stok pangan yang berkelanjutan. Strategi ini sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam menciptakan ketahanan pangan sebagai bagian integral dari perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH menyatakan nilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah maupun komposisi/keragaman pangan menurut jenis pangan. Susunan keberagaman pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi terdiri 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Sembilan kelompok pangan tersebut beserta proporsinya adalah:

1) Padi-padian 50%.
2) Umbi-umbian 6%.
3) Pangan hewani 12%.
4) Minyak dan lemak 10%.
5) Buah/biji berminyak 3%.
6) Kacang-kacangan 5%.
7) Gula 5%.
8) Sayur dan buah 6%
9) Lain-lain (bumbu) 3%.

Tabel 2.30
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Tahun 2019-2024 Kota Samarinda

No.	JENIS	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Skor	Skor	Skor	Skor	Skor	Skor
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,4	85,8	87,2	84,7	84,8	87,3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Fluktuasi Skor PPH tahun 2019 – 2024 menunjukkan konsumsi masyarakat yang belum memenuhi keseimbangan energi 9 kelompok pangan.

Idealnya komposisi pola makan dalam 1 piring memenuhi proporsi keseimbangan energi 9 kelompok pangan agar seimbang dan beragam untuk memenuhi fungsi sebagai sumber zat tenaga (karbohidrat dan lemak) dengan persentase 33,3%, zat pembangun (protein hewani nabati) dengan persentase 33,3%, zat pengatur (vitamin dan mineral) dengan persentase 33,3% dan lain lain dengan persentase 3%. Terpenuhinya komposisi pola makan tersebut akan memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan Permenkes nomor 28/2019 sebesar 2100 kilokalori per kapita per hari (kkal/kap/hari) sementara AKE saat ini baru mencapai 1.976 kkal/Kap/hari.

d. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP disusun dari sembilan indikator yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan suatu sistem penilaian untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

IKP ini bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA), karena indikator yang digunakan sebagai dasar penentuan IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA.

Semakin tinggi IKP suatu wilayah, maka semakin baik tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut.

Terdapat Sembilan indikator yang digunakan sebagai dasar penentuan IKP dan khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan Delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yaitu sebagai berikut :

1) Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
2) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan
3) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
4) Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun
5) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
6) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
7) Persentase balita stunting
8) Angka harapan hidup pada saat lahir.

Hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Samarinda Tahun 2024 yang menunjang peningkatan nilai IKP Kota Samarinda adalah:

1) Penurunan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dari 46 Kelurahan tahun 2023 menjadi 33 Kelurahan pada tahun 2024.
2) Peningkatan rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk dari 31 kelurahan tahun 2023 menjadi 27 kelurahan tahun 2024.

Hal tersebut merupakan hasil dari intervensi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda antara lain:

1) Melaksanakan penyaluran bantuan pangan (sembako dan Cadangan Beras Pemerintah Daerah) untuk masyarakat di wilayah rentan pangan.
2) Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat kelurahan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta kemudahan akses pangan.
3) Sosialisasi dan edukasi konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman. Diharapkan dengan

sosialisasi dan edukasi ini, dapat menjadi salah satu cara untuk pencegahan terjadinya kasus stunting dalam satu keluarga.

4) Kampanye STOP BOROS PANGAN untuk mengurangi *Food Waste* (Makanan yang terbuang).
5) Koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder terkait penyediaan data guna mendukung analisis wilayah rentan pangan di Kota Samarinda.

Perkembangan IKP Kota Samarinda tahun 2021 sampai dengan 2024 dibandingkan dengan IKP provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 2.31
Tren IKP Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 – 2024

Wilayah	Indeks Ketahanan Pangan (Tahun)			
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kota Samarinda	83,72	84,66	88,97	89,68
Provinsi Kaltim	77,46	77,65	79,29	78,61

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Samarinda Tahun 2024 adalah 89,68 lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 87,00 dengan capaian kinerja sebesar 103,08%. Pencapaian kinerja ini didukung melalui pelaksanaan program-program yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

IKP Kota Samarinda yang terus meningkat setiap tahunnya didukung dengan berkurangnya wilayah rentan pangan di Kota Samarinda karena semakin meningkatnya akses atau keterjangkauan pangan yang didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi. Hal ini menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup dalam suatu wilayah bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan fisik, ekonomi dan sosial. Selain itu ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup di suatu wilayah atau rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk juga mempengaruhi tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tantangan kedepan dalam peningkatan ketahanan pangan merupakan tugas bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan,

masyarakat, sektor swasta, BUMD (PDAM). Dengan adanya kolaborasi dengan semua pihak, diharapkan IKP kota Samarinda dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, serta menciptakan masyarakat yang tahan pangan menuju kemandirian pangan.

e. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Menurut Badan Pusat Statistik, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah persentase dari perkiraan proporsi kelompok penduduk tertentu, dimana asupan energi harian dari makanan tidak mencukupi untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan agar kehidupan berjalan normal, aktif, dan sehat. Dengan kata lain, Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merujuk pada kemungkinan seseorang yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, secara rutin mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Sementara itu, *undernourishment* atau ketidakcukupan konsumsi pangan dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana seseorang secara teratur mengonsumsi sejumlah makanan, tetapi jumlah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan untuk menjalani kehidupan normal, aktif, dan sehat (BPS, 2023). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan salah satu indikator strategis dalam mencapai tujuan SDG's kedua, yaitu tanpa kelaparan.

Gambar 2.27
Capaian PoU Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia pada tahun 2020-2024

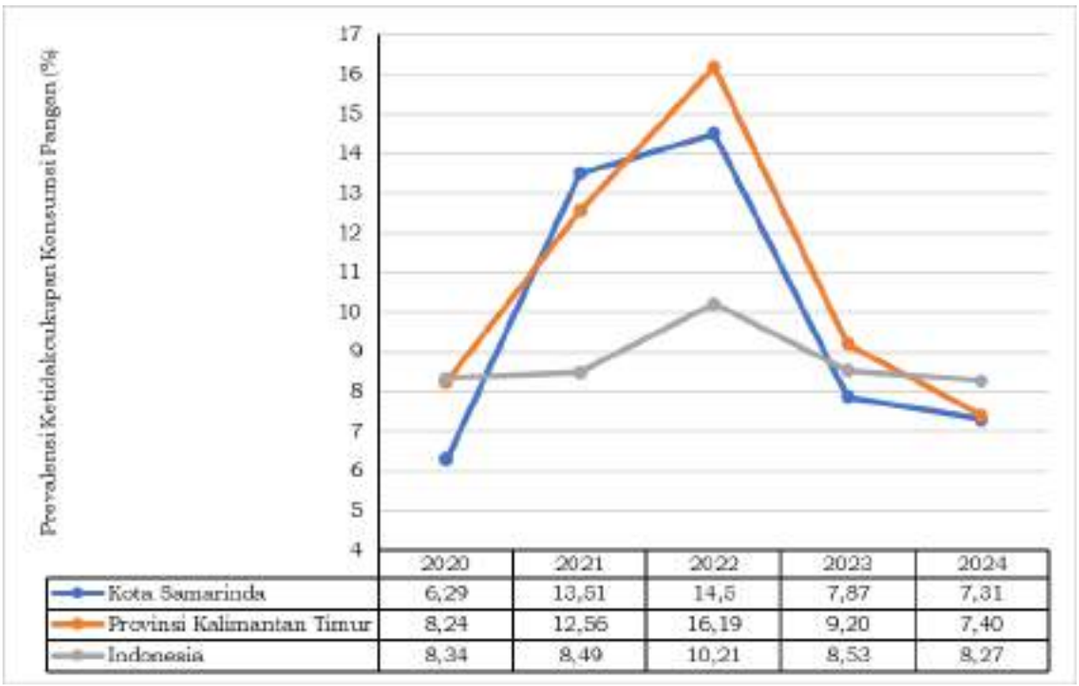

	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Samarinda	6,29	13,61	14,5	7,87	7,31
Provinsi Kalimantan Timur	8,24	12,56	16,19	9,20	7,40
Indonesia	8,34	8,49	10,21	8,53	8,27

(Sumber: BPS RI, 2025)

Nilai PoU Kota Samarinda dari tahun 2020-2024 secara rata-rata berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur, namun berada di atas capaian Indonesia. Dari tahun 2020 hingga 2022, capaian PoU Kota Samarinda menunjukkan tren naik, namun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan dengan persentase hamper 50 persen jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa program-program Pemerintah Kota Samarinda yang berkaitan dengan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan memberikan hasil yang positif.

f. Konsumsi Listrik Per Kapita

Listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat. Konsumsi listrik juga menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu negara. Konsumsi listrik per kapita adalah jumlah total energi listrik yang digunakan dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah penduduk.

Konsumsi Listrik perkapita menunjukan penggunaan dan pemanfaatan Listrik oleh Masyarakat. Peningkatan penggunaan Listrik mencerminkan pertumbuhan perekonomian, penggunaan dan akses teknologi yang lebih tinggi di suatu daerah/negara.

Tabel 2.32
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Kota Samarinda
Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	963.2	1027.6	834.7	1027.2	864.1

Sumber : BPS Kota Samarinda

Konsumsi Listrik per kapita di Kota Samarinda dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukan tren yang fluktuatif. Dalam rentang 5 tahun tersebut konsumsi listrik perkapita terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 834.7 kWh sedangkan penggunaan tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1027.6 . Faktor yang mempengaruhi konsumsi listrik salah satunya adalah pendapatan dan harga listrik. Pendapatan rumah tangga dan harga listrik merupakan faktor utama dalam menentukan permintaan akan energi listrik. Ketika pendapatan meningkat maka permintaan terhadap listrik juga akan meningkat sehingga konsumsi listrik akan meningkat. Namun ketika harga listrik tinggi maka pengaruhnya masyarakat akan mengurangi konsumsi listriknya .

g. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Air minum layak adalah salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dan merupakan pilar utama bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep "air minum layak" tidak hanya berarti air yang tersedia, tetapi juga air yang aman untuk dikonsumsi, mudah diakses, dan jumlahnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini adalah air yang bebas dari kontaminan fisik, kimia, dan mikrobiologi yang berbahaya bagi kesehatan, serta tidak memiliki warna, bau, atau rasa yang mengganggu. ketersediaan air minum layak mencerminkan tingkat pembangunan suatu daerah. Fasilitas air bersih yang memadai adalah investasi penting dalam pembangunan ekonomi, karena mendukung sektor-sektor seperti pariwisata, industri makanan dan minuman, serta meningkatkan kepercayaan investor.

Gambar 2.28
Akses Air Minum Layak Kota Samarinda tahun 2020-2024

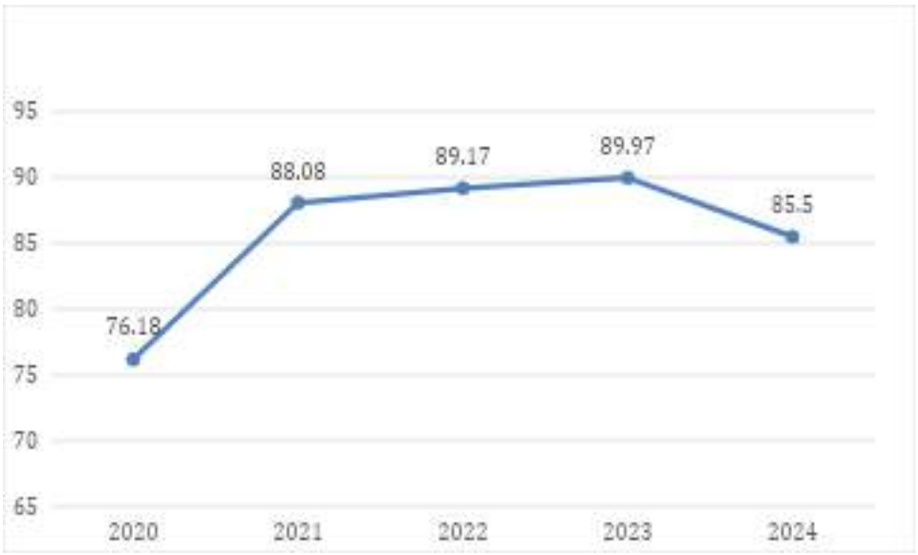

Sumber : Dinas PUPR Kota Samarinda

Persentase akses air minum layak pada tahun 2020 cukup tinggi, mencapai 76,18%. Kemudian mengalami di tahun 2021 menjadi 88,08% dan terus meningkat menjadi 89,17% pada tahun 2022 dan 89,97% pada tahun 2023. Stabilitas ini menunjukkan adanya upaya serius dan efektif dalam meningkatkan dan mempertahankan akses air minum layak. Namun, di tahun 2024, terjadi sedikit penurunan kembali menjadi Penurunan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga infrastruktur tidak dapat mengimbangi, masalah operasional pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seperti kebocoran pipa atau kapasitas produksi yang tidak mencukupi. Meskipun penurunannya tidak drastis, hal ini tetap mengindikasikan bahwa menjaga dan meningkatkan akses air minum layak merupakan tantangan berkelanjutan yang memerlukan perhatian terus-menerus. Fluktuasi ini juga bisa mencerminkan tantangan unik Samarinda, seperti kondisi geografis dengan sungai-sungai yang rentan terhadap intrusi air laut saat pasang tinggi atau kekeringan saat kemarau panjang, serta masalah kualitas air baku yang bisa dipengaruhi oleh aktivitas di hulu.

4. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan nilai komposit dari tiga indeks, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH merupakan alat yang penting untuk memantau dan mengevaluasi kondisi lingkungan hidup, serta mendukung upaya-upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 2.33
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	85,86	85,98	81,81	50	50,61
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	32,5	45,81	45,81	85,31	90,27
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,12	26,15	26,15	29,92	35,13
4	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**52,36**	**57,78**	**56,09**	**59,9**	**63,28**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Samarinda dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren yang bervariasi pada setiap komponen indikator. Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 85,86 di tahun 2020 menjadi 50,61 di tahun 2024, dengan penurunan drastis terjadi antara tahun 2022 ke 2023. Di sisi lain, Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan peningkatan yang sangat positif, terutama dari tahun 2022 ke 2023 dan terus meningkat menjadi 90,27 di tahun 2024. Sementara itu, Indeks Kualitas Lahan (IKL) cenderung stagnan dan bahkan menurun drastis di tahun 2021 sebelum kembali merangkak naik sedikit di tahun 2023 dan 2024, namun masih jauh dari nilai awal di tahun 2020. Secara keseluruhan, IKLH Kota Samarinda menunjukkan peningkatan di tahun-tahun terakhir, mencapai 63,28 di tahun 2024, terutama jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan IKLH ini didorong kuat oleh perbaikan kualitas udara,

namun terhambat oleh penurunan kualitas air dan fluktuasi kualitas lahan.

Untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Samarinda, prioritas utama harus diberikan pada pemulihan dan perlindungan kualitas air. Penurunan IKA yang drastis memerlukan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebabnya, seperti pencemaran dari limbah domestik, industri, atau aktivitas pertambangan. Tindakan perbaikan harus melibatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pembuangan limbah, peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem sanitasi, serta kampanye edukasi untuk masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Selain itu, upaya restorasi dan perlindungan ekosistem sungai juga sangat penting.

Meskipun IKU menunjukkan perbaikan yang signifikan, upaya mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas udara harus terus dilakukan, misalnya melalui promosi transportasi publik, penggunaan energi terbarukan, dan pengawasan emisi kendaraan serta industri. Untuk Indeks Kualitas Lahan, perlu ada program konservasi lahan yang lebih agresif, rehabilitasi lahan kritis, dan penegakan hukum yang tegas terhadap perusakan lahan. Pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk pengurangan sampah, daur ulang, dan pengolahan sampah yang efektif, juga akan berkontribusi pada peningkatan IKL. Sinergi antara pemerintah daerah, industri, masyarakat, dan akademisi sangat krusial dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan Samarinda yang lebih sehat dan lestari.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak berarti rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, yang dilengkapi dengan kloset leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau sistem pengolahan air limbah terpusat. Sanitasi layak juga mencakup aspek pengolahan air limbah secara aman melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pemeliharaan tangki septik secara berkala. Akses sanitasi layak merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dan hak

asasi manusia. PBB menyatakan akses sanitasi layak dan air minum aman sebagai hak asasi manusia.

Gambar 2.29
Akses Sanitasi Layak Kota Samarinda tahun 2020-2024

Sumber : Dinas PUPR Kota Samarinda

Berdasarkan data yang disajikan, capaian akses sanitasi layak Kota Samarinda menunjukkan tren yang fluktuatif dan perlu perhatian serius. Pada tahun 2020 angkanya relatif tinggi di 3,39, Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 dengan capaian 0,96 dan terus mengalami penurunan menjadi 0,7 pada tahun 2022. Kemudian melonjak signifikan di tahun 2023 dengan capaian 3,7. Kenaikan tajam di tahun 2023 mungkin menunjukkan adanya program atau intervensi yang efektif dalam peningkatan akses sanitasi layak pada periode tersebut. Kenaikan terus berlangsung sampai pada tahun 2024 yaitu menjadi 3,9. Kenaikan di tahun 2024 mengindikasikan bahwa keberlanjutan program atau inisiatif tersebut mungkin terjaga dengan baik, dan berhasil mengatasi faktor-faktor yang menghambat kemajuan. Hal ini tentu saja sangat menggembirakan karena akses sanitasi layak merupakan indikator krusial untuk kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah Kota Samarinda terus melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab penurunan tajam di tahun 2021 yang berlanjut sampai dengan 2022. Analisis yang dilakukan mencakup tinjauan terhadap program-program

sanitasi yang berjalan, alokasi anggaran, partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor eksternal seperti pertumbuhan penduduk atau perubahan kebijakan. Pemerintah Kota Samarinda perlu menyusun rencana aksi yang lebih berkelanjutan dan komprehensif. Hal tersebut meliputi peningkatan investasi dalam infrastruktur sanitasi yang terjangkau dan berkelanjutan, penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait pengelolaan limbah tinja, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi layak dan praktik kebersihan yang baik. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan solusi inovatif dan efektif dalam mencapai target akses sanitasi layak yang lebih tinggi dan stabil di masa mendatang.

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Dari tabel berikut ini dapat informasi bahwa persentase sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, namun mengalami penurunan di tahun 2024. Ini dikarenakan jenis sampah yang di tahun sebelumnya dikategorikan sampah tetapi di tahun 2024 sudah tidak masuk kategori. Jenis sampah tersebut adalah ban dan logam besi yang berasal dari rongsokan kendaraan kecuali besi untuk atap atau seng. Jenis-jenis sampah yang dapat diolah juga terbatas dikarenakan tidak adanya offtaker di Samarinda. Keadaan sekarang adalah sampah-sampah tersebut dibawa ke luar Kalimantan yang tentunya ditinjau dari segi ekonomi sangat tidak ekonomis. Sampah-sampah tersebut dibawa ke luar Kalimantan untuk didaur ulang menjadi barang-barang yang bernilai, seperti tutup botol menjadi furniture. Proses ini merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Selain itu juga adalah kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan sampah

Tabel 2.34
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Timbulan Sampah (Ton)	886.806	831.220	838.935	856.360	881.225
Jumlah Sampah yang terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (Ton)	25.207,22	30.982,78	37.249,90	40.620,75	29.248,93

Persentase Sampah yang terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	2,84	3,73	4,45	4,74	3,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Rendahnya persentase sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah juga dikarenakan terbatasnya jumlah dan jenisnya. Informasi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Jenis dan Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah
Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Jenis Fasilitas Pengelolaan Sampah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bank Sampah Unit (BSU)	10	19	30	40	59
2.	Bank Sampah Induk (BSI)	-	-	1	1	1
3.	TPS3R	1	1	1	1	1
4.	Pelapak/Pengepul	21	17	23	23	24
5.	Pusat Olah Organik*	-	-	-	-	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Rasio bank sampah unit dengan jumlah RT di Samarinda yang berjumlah 1971 RT hanyalah 2,99%. Peningkatan rasio ini penting dikarenakan 67,42% sampah berasal dari rumah tangga (survey timbulan sampah Kota Samarinda tahun 2023)

Selain dapat mengurangi timbulan sampah di lingkungan, peran bank sampah bagi masyarakat juga dapat mengubah paradigma masyarakat agar memaknai sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai untuk dimanfaatkan sekaligus mengurangi jumlah sampah nasional dan memberikan keuntungan berupa peningkatan kesehatan dan pendapatan karena bank sampah membuat sampah menjadi bernilai ekonomi, maka dapat menerapkan ekonomi sirkular.

Mengenai Pusat Olah Organik sebagai fasilitas pengelolaan sampah di Samarinda adalah sebenarnya komunitas penggiat eco enzym yaitu komunitas yang mengolah sampah organic menjadi eco enzym, produk yang mampu memperbaiki lingkungan karena manfaatnya

5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Risiko Bencana adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Ukuran ini mengkombinasikan potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan kata lain, indeks ini

membantu memahami seberapa besar risiko kerugian yang mungkin terjadi di suatu wilayah akibat bencana.

Gambar 2.30
Indeks Risiko Bencana Kota Samarinda tahun 2020-2024

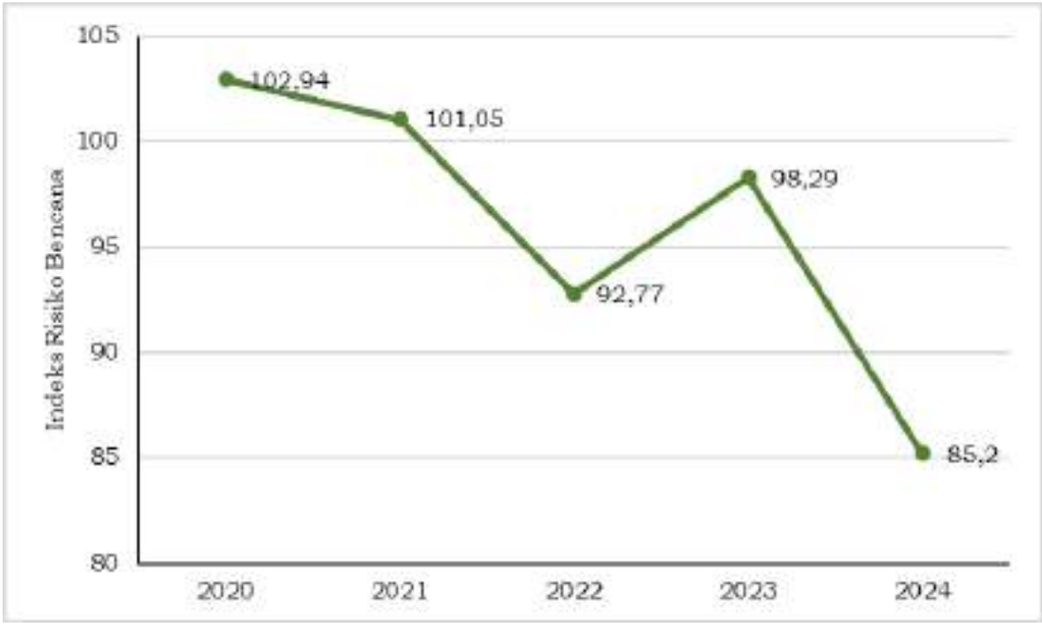

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Pada tahun 2020, indeks risiko bencana berada di angka 102,94, menunjukkan tingkat risiko yang relatif tinggi. Kemudian, terjadi sedikit penurunan di tahun 2021 menjadi 101,05, dan penurunan yang lebih signifikan di tahun 2022, mencapai 92,77. Penurunan menunjukkan hasil dari upaya-upaya mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan, atau adaptasi terhadap perubahan iklim yang mulai diterapkan pada periode tersebut. Namun, tren penurunan ini sempat terinterupsi di tahun 2023, di mana indeks risiko kembali sedikit meningkat menjadi 98,29. Meskipun demikian, tren positif kembali terlihat di tahun 2024, dengan penurunan signifikan ke level terendah dalam periode ini, yaitu 85,2. Angka 85,2 di tahun 2024 adalah pencapaian yang positif, menunjukkan bahwa Kota Samarinda semakin mampu mengelola dan mengurangi potensi dampak dari bencana.

Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, tren jangka panjang dari tahun 2020 ke 2024 menunjukkan penurunan indeks risiko bencana. Ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan pihak terkait dalam penanggulangan bencana mulai membuahkan hasil. Namun, masih menjadi pekerjaan

rumah bagi pemerintah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat, serta memastikan keberlanjutan program-program mitigasi dan kesiapsiagaan untuk menjaga tren penurunan risiko ini dan melindungi masyarakat dari potensi bencana di masa depan.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2022-2026, diketahui bahwa banjir memiliki kelas bahaya dominan yang tergolong tinggi, diikuti oleh longsor, kekeringan dan konflik sosial. Namun apabila dicermati di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda justru memiliki skor terendah dalam Indeks Rawan Bencana (IRB) dibandingkan kabupaten/kota se-Kaltim. Berdasarkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Rawan Bencana (IRB) pada tahun 2024 Kota Samarinda menempati peringkat 10 di Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 85,20 dan masuk kelas rawan "Sedang".

Tabel 2.36
Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Skor (IRB)	Skor (IKD)
Samarinda	85,20	0,80
Balikpapan	101,43	0,82
Kutai Kartanegara	118,80	0,52
Bontang	116,57	0,54
Penajam Paser Utara	131,81	0,43
Kutai Barat	151,32	0,30
Mahakam Ulu	146,03	0,41
Kutai Timur	173,36	0,42
Berau	148,64	0,72
Paser	187,98	0,35

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

Tingkat risiko bencana di Kota Samarinda dianalisis berdasar pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan

pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kota Samarinda. Kajian risiko bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kota Samarinda.

Tabel 2.37
Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda

No.	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Resiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
5	Kekeringan	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
6	Konflik Sosial	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2022-2026

Tingkat risiko bencana pada Tabel 2.37 menunjukkan Kota Samarinda berada pada tingkat risiko tinggi untuk bencana banjir. Sedangkan untuk tingkat risiko sedang ada pada ancaman bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, kekeringan dan konflik sosial. Tingkat risiko ini diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kota Samarinda.

Gambar 2.31
Persentase Kejadian Bencana di Kota Samarinda Tahun 2008 – 2022

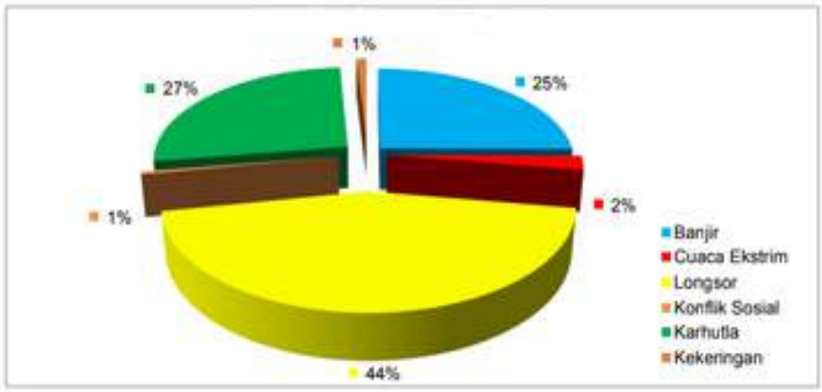

(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2022-2026)

Dari grafik pada Gambar 2.31 dapat dilihat bahwa bencana tanah longsor merupakan bencana dengan persentase terbesar yang terjadi di Kota Samarinda yaitu sebesar 44%. Kebakaran hutan dan lahan menempati posisi kedua dengan persentase 27%, kemudian banjir terjadi dengan persentase 25% yang diikuti dengan cuaca ekstrim sebesar 2%. Kekeringan dan konflik sosial merupakan bencana terendah yang terjadi dengan persentase sebesar 1%.

Tabel 2.38
Luas Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Loa Janan Ilir	137	80	789	1.006	Tinggi
2	Palaran	334	462	4.854	5.650	Tinggi
3	Samarinda Ilir	6	14	108	128	Tinggi
4	Samarinda Kota	16	10	104	130	Tinggi
5	Samarinda Seberang	68	140	403	611	Tinggi
6	Samarinda Ulu	67	23	643	733	Tinggi
7	Samarinda Utara	78	189	3.854	4.121	Tinggi
8	Sambutan	157	293	2.734	3.184	Tinggi

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
9	Sungai Kunjang	196	149	1.664	2.009	Tinggi
10	Sungai Pinang	33	35	511	579	Tinggi
Kota Samarinda		**1.092**	**1.395**	**15.664**	**18.151**	**Tinggi**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2022-2026

Tabel 2.38 menunjukkan hasil kajian bahaya terhadap bencana banjir di 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Berdasarkan luas dan kelas bahaya banjir terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka total luas bahaya bencana banjir di Kota Samarinda adalah 18.151 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Dari ke-sepuluh kecamatan yang ada di Samarinda, seluruhnya memiliki kelas bahaya banjir pada kategori Tinggi. Dilihat dari luasan potensi bahaya banjir, Kecamatan Palaran memiliki wilayah bahaya banjir terluas, yakni 5.650 Ha atau sekitar 31,13% dari total potensi luas wilayah bahaya banjir.

Peta Risiko Banjir Kota Samarinda

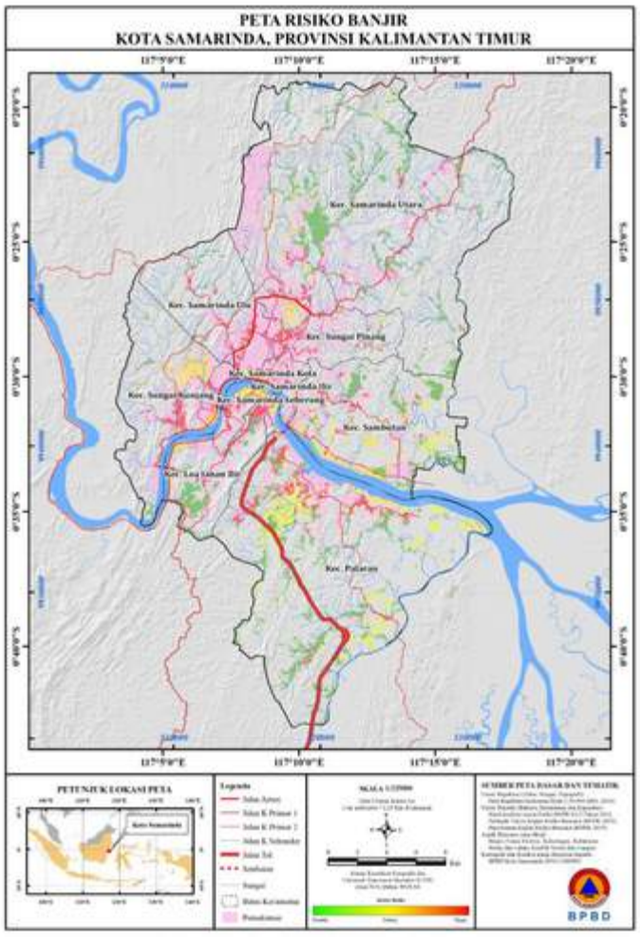

(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2022-2026)

Selain faktor kondisi letak geografis wilayah, kondisi topografi, geometri sungai dan laut (seperti meandering, penyempitan ruas sungai, sedimentasi, adanya ambang atau pembendungan alami pada ruas sungai dan terjadi erosi pantai) serta cuaca ekstrim seiring perubahan iklim, banjir diperparah oleh terjadinya degradasi lahan dan penggundulan hutan yang meningkatkan koefisien aliran dan bertambahnya dataran banjir baik di dataran tinggi maupun dataran rendah.

Faktor pemicu dan penunjang lainnya adalah: 1) Curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan; 2) Air laut pasang yang mengakibatkan pembendungan di muara sungai atau naiknya permukaan air laut di pantai. Pada bagian lain, laut pasang juga disebabkan oleh gelombang pasang atau dorongan angin kencang yang diikuti gelombang tinggi; 3) Penurunan permukaan tanah; serta 4) Pembendungan aliran sungai akibat longsor dan sedimentasi.

Aktivitas manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana banjir, yakni pembudidayaan daerah dataran banjir; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

Terjadinya bencana banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana banjir, antara lain:

1) Buruknya saluran air/drainase;
2) Daerah resapan air yang kurang;
3) Penebangan pohon secara liar;
4) Sungai yang tidak terawat; dan
5) Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kota Samarinda dikenal sebagai daerah yang rendah, sehingga tidak mengherankan apabila setiap tahun terjadi bencana banjir genangan yang melanda 50% kecamatan di ibukota provinsi ini. Pada tahun 2019 terjadi bencana banjir genangan yang melanda Kota Samarinda selama kurang lebih 14 hari, dan pada tahun 2020 terjadi kembali hal serupa. Melihat kondisi ini pemerintah Kota Samarinda tidak tinggal diam, penanganan banjir selalu menjadi agenda prioritas nomor 1 dalam perencanan dan penganggaran pemerintah Kota Samarinda. Bahkan karena kedudukannya sebagai ibukota provinsi, penanganan banjir di Kota Samarinda memperoleh dukungan dari pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat melalui instansi vertikal Balai Wilayah Sungai.

Tabel 2.39
Penanganan Banjir Tahun 2020-2024 Kota Samarinda

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kawasan Banjir	1,02	0,94	0,72	0,68	0,683
2	Jumlah Titik Banjir	33	32	36	35	48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Berbagai program dan kegiatan penanganan banjir yang telah dicanangkan pada akhirnya mampu memberikan hasil yang baik, terlihat dari penurunan persentase kawasan banjir dari 1,12% pada tahun 2018 menjadi 0,72 persen pada tahun 2022. Penurunan pun juga terjadi pada titik banjir, dari 41 titik menjadi 36 titik.

Keberhasilan penanganan banjir salah satunya ditempuh melalui program awasanat dan rehabilitasi drainase yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Pada tahun 2018 drainase dalam kondisi baik hanya sebesar 187.517,08 meter atau 32,63%, namun pada tahun 2022 menjadi 498.898,87 meter atau 73,54 persen.

Tabel 2.40
Kondisi Drainase Tahun 2020-2024 Kota Samarinda (meter)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang drainase sistem terbuka	598.737,32	645,695,69	678,409,69	695.114,91	807.282,18
1.1	Kondisi baik	259.881,09	400,756,18	498,898,87	549.013,86	591.013,86
1.2	Kondisi sedang	254.142,17	183,704,63	134,633,28	109.575,79	33.623,29
1.3	Kondisi buruk	84.714,06	61,234,88	44,877,76	36.525,26	152.150,91
2	Panjang drainase sistem tertutup	97.449,95	97,822,73	99,938,60	99.938,60	131.388,18
2.1	Kondisi baik	35.756,31	36,874,65	43,222,26	43.222,26	511.83,27
2.2	Kondisi sedang	46.270,23	45,711,06	42,237,25	42.537,25	38.749,67
2.3	Kondisi buruk	15.423,41	15,237,02	14,179,08	14.179,08	34.218,98

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Ancaman perlahan dapat terjadi akibat subsiden tanah dan faktor pendukung lainnya. Subsiden tanah adalah fenomena turunnya level permukaan tanah dari suatu bidang referensinya (seperti permukaan laut, geoid atau ellipsoid). Subsiden tanah dikenal dengan istilah amblesan tanah dan penurunan permukaan tanah. Persoalan ini banyak terjadi di dataran rendah pesisir, kawasan gambut pesisir dan daerah pertambangan migas. Daerah-daerah pertambangan bawah permukaan serta area basin (cekungan) lainnya juga rentan terhadap kejadian subsiden tanah.

Subsiden tanah terjadi akibat faktor antropogenik, yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan, dampak pembebanan (loading

effect), eksploitasi minyak dan gas bumi, pengeringan dan oksidasi lahan gambut serta dampak kegiatan tambang bawah permukaan. Faktor penyebab lain yang bersifat non-antropogenik adalah pemadatan alamiah dan efek subsiden tektonis. Pengambilan air tanah yang berlebihan akan menyebabkan kompaksi pada akuifer (lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air), sehingga terjadi respon di bagian permukaan berupa kejadian subsiden; Efek pembebanan dapat menyebabkan kompaksi pada lapisan tanah bagian atas yang menyebabkan adanya penurunan muka tanah; Kegiatan tambang bawah permukaan akan mengakibatkan pengurangan tekanan formasi pada lapisan batuan sekitar, sehingga terjadi respon subsiden di atasnya.

Pada tanah gambut, proses pengeringan gambut melalui pembuatan kanal-kanal menyebabkan tanah gambut terkompaksi dan mengalami subsiden yang disertai oksidasi dari bahan organik penyusun gambut. Penanaman tanaman non gambut pada ekosistem gambut menjadi salah satu faktor utama subsiden gambut. Pohon-pohon produksi seperti kelapa sawit dan akasia merupakan tanaman non gambut yang tidak boleh terpapar air dari tanah gambut karena sifatnya asam. Oleh karena itu, ketika dilakukan penanaman tanaman non gambut tersebut pada lahan gambut, pengelola melakukan pengeringan/drainase untuk menurunkan muka air tanah gambut yang dilakukan dengan cara membuat kanal/saluran air.

Tabel 2.41
Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Panjang Saluran (Km)	Kolam Retensi	Jumlah Pompa	Jumlah Penangkap Lumpur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Palaran	9	57,25	4	8	124
2	Samarinda Ilir	7	34,35	7	8	95
3	Samarinda Kota	4	18,00	-	2	51
4	Sambutan	-	-	-	-	-
5	Samarinda Seberang	6	29,70	3	5	84
6	Loa Janan Ilir	4	25,50	2	4	51
7	Sungai Kunjang	5	34,25	4	4	63

No.	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Panjang Saluran (Km)	Kolam Retensi	Jumlah Pompa	Jumlah Penangkap Lumpur
8	Samarinda Ulu	4	34,25	3	6	66
9	Samarinda Utara	7	33,75	4	9	87
10	Sungai Pinang	4	19,50	4	8	58
Total		**50**	**286,55**	**31**	**54**	**679**

Sumber: Skenario Masterplan Banjir Kota Samarinda Tahun 2022-2026

Dalam menangani banjir di Kota Samarinda sebagai bagian dari *masterplan* perencanaan penanganan bencana banjir, setidaknya terdapat empat kegiatan yang akan ditempuh ditambah dengan penanganan khusus terhadap beberapa wilayah. Program dan kegiatan pertama dalam menangani permasalahan banjir di Kota Samarinda adalah dengan meningkatkan panjang saluran air sekaligus mengefisiensikan sanitas lingkungan. Peningkatan saluran air ini merupakan pembuatan saluran baru atau memperbaiki saluran lama yang telah rusak dengan total saluran sepanjang 286,55 Km di seluruh Kota Samarinda. Sebagian besar peningkatan saluran air berada di Kecamatan Palaran sepanjang 57,25 Km dan paling pendek pembuatan saluran berada di Kecamatan Samarinda Kota sepanjang 18,00 Km.

Selain banjir, bencana longsor kerap terjadi di Kota Samarinda. Tanah longsor adalah gerakan massa baik tanah, batuan atau percampuran keduanya menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Tanah longsor terjadi ketika lereng tidak mampu menyangga beban yang berada di atasnya. Penyebabnya bisa bermacam-macam di antaranya hujan deras, aktivitas vulkanik, gempa bumi, erosi sungai, perubahan ketinggian muka air, aktivitas manusia atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Luas bahaya dan kelas bahaya per kecamatan yang terdampak bencana tanah longsor di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.42
Luas Potensi Bahaya Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Loa Janan Ilir	333	574	0	907	Sedang

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
2	Palaran	1.733	1.891	0	3.624	Sedang
3	Samarinda Ilir	59	169	0	228	Sedang
4	Samarinda Kota	0	0	0	0	-
5	Samarinda Seberang	98	80	0	178	Sedang
6	Samarinda Ulu	786	1.573	0	2.359	Sedang
7	Samarinda Utara	3.889	8.050	0	11.939	Sedang
8	Sambutan	299	221	0	520	Sedang
9	Sungai Kunjang	629	853	0	1.482	Sedang
10	Sungai Pinang	445	356	0	801	Sedang
Kota Samarinda		**8.271**	**13.767**	**0**	**22.038**	**Sedang**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2022-2026

Berdasarkan hasil kajian bahaya terhadap bencana tanah longsor, maka diperoleh potensi luas bahaya di Kota Samarinda untuk 10 (sepuluh) kecamatan. Luas potensi bahaya tanah longsor di Kota Samarinda adalah 22.038 Ha yang berada pada kelas Sedang. Kecamatan dengan potensi luas bahaya tanah longsor tertinggi adalah Kecamatan Samarinda Utara, yaitu seluas 11.939 Ha atau 54,17% dari total potensi luas bahaya tanah longsor. Sementara Kecamatan Samarinda Kota memiliki indeks bahaya 0 (nol). Perhitungan luas bahaya hanya memperhitungkan luas risiko yang tidak memiliki indeks bahaya bernilai 0 (nol). Artinya indeks bahaya bernilai 0 tidak diperhitungkan atau diakumulasikan ke dalam rekap potensi luas bahaya.

Gambar 2.32
Peta Risiko Longsor Kota Samarinda

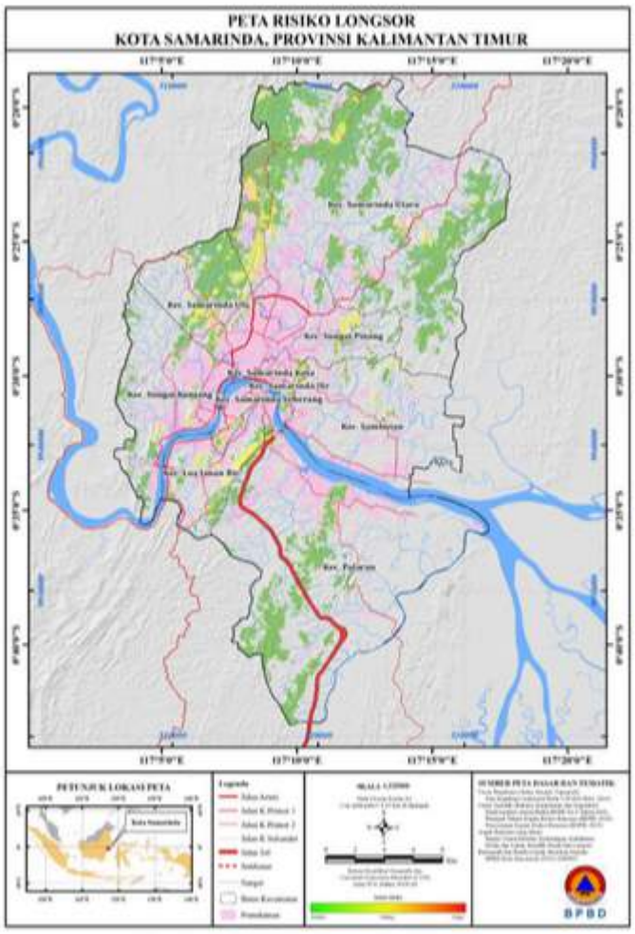

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2022-2026

6. Demografi

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Perekonomian di Kota Samarinda yang didominasi oleh sektor Konstruksi, Perdagangan dan Jasa, serta Pertambangan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bermigrasi ke Kota Samarinda sehingga berdampak langsung terhadap kepadatan dan persebaran penduduk di Kota Samarinda. Berdasarkan data dari BPS, tercatat pada tahun 2024 jumlah penduduk Kota Samarinda yaitu sebanyak 868.499 dengan kepadatan 1.209,61 jiwa/km^2. Melihat persebaran penduduk per kecamatan, penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sungai Kunjang sebanyak 140.620 jiwa dengan kepadatan penduduknya sebesar 3.267,19 jiwa/km^2. Adapun penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Samarinda Kota yang hanya 32.404 jiwa dengan kepadatan penduduknya sebesar 2.914,03 jiwa/km^2. Dari 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda ulu merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan 6.055,79 jiwa/km^2.

Tabel 2.43
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Samarinda Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
Palaran	67.609	1,04
Samarinda Ilir	69.701	-0,09
Samarinda Kota	32.404	0,08
Sambutan	63.123	1,11
Samarinda Seberang	66.081	0,43
Loa Janan Ilir	70.088	1
Sungai Kunjang	140.620	0,93
Samarinda Ulu	133.954	0,47
Samarinda Utara	113.491	1,26
Sungai Pinang	111.428	0,86
Kota Samarinda	**868.499***	**0,77**

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2025 (: angka sementara semester II)*

Laju pertumbuhan penduduk Kota Samarinda pada tahun 2024 bernilai positif yaitu sebesar 0,77 persen yang artinya jumlah penduduk Kota Samarinda mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kecamatan Samarinda Utara mengalami peningkatan jumlah penduduk yang paling tinggi dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Kecamatan Samarinda Ilir menjadi satu-satunya kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar -0,09 persen. Jumlah penduduk Loa Janan Ilir adalah tetap, tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan.

Struktur dan komposisi penduduk dapat digambarkan melalui diagram piramida penduduk. Piramida penduduk Kota Samarinda berbentuk kerucut dengan bagian tengah yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Kota Samarinda termasuk struktur penduduk produktif. Usia 15-24 tahun lebih banyak jumlahnya dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini dapat diartikan bahwa tingkat kelahiran turun dan atau harapan hidup meningkat, sehingga proporsi penduduk usia produktif menjadi

lebih besar. Jumlah penduduk usia produktif yang besar diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, karena semakin tinggi usia produktif maka akan semakin banyak penduduk yang terlibat dalam produksi barang dan jasa, sehingga produktivitas daerah akan semakin meningkat.

Gambar 2.33
Piramida Penduduk Kota Samarinda Tahun 2024

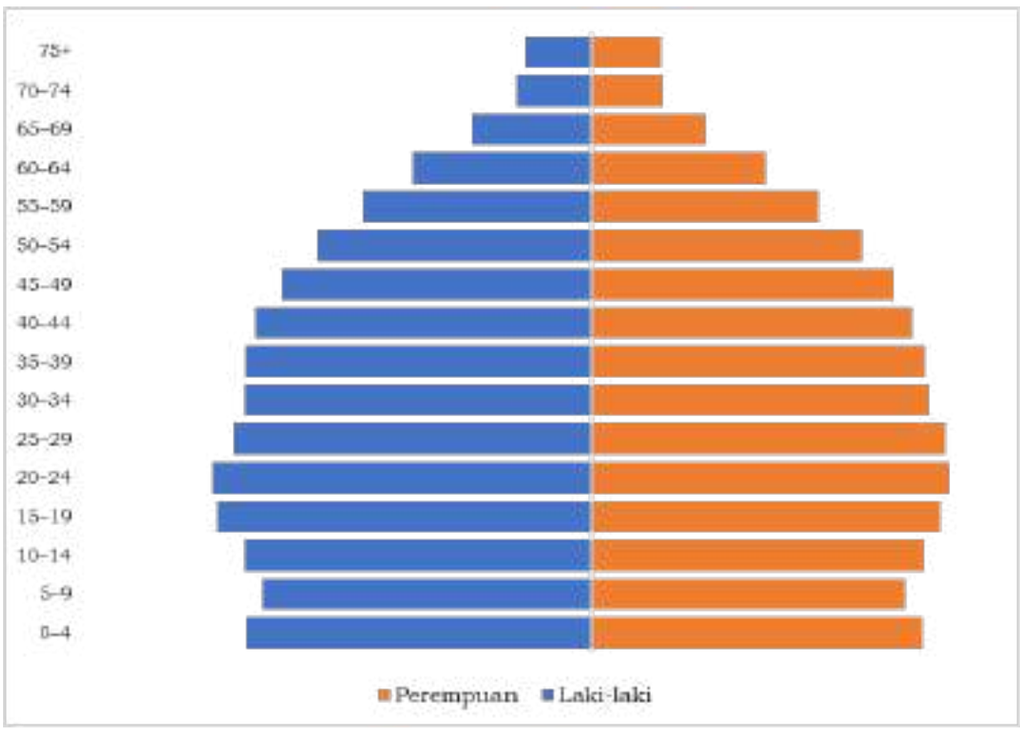

(Sumber: Website BPS Kota Samarinda (diolah))

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kota Samarinda didominasi oleh lulusan SLTA/Sederajat sebesar 27,85 persen. Penduduk yang menamatkan DI-DIII sebesar 2,48 persen, dan tamatan DIV/S1 – S3 sebesar 7,17 persen.

Tabel 2.44
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024
Kota Samarinda

Tingkat Pendidikan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tidak/Belum Sekolah	208.302	25,49	216.810	26,08	227.014	26,72	233.449	27,09	240.080	27,24

Tingkat Pendidikan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)
Belum Tamat SD/Sederajat	86.656	10,60	86.738	10,44	87.059	10,25	85.765	9,95	85.476	9,70
Tamat SD/Sederajat	104.040	12,73	103.383	12,44	102.792	12,10	101.821	11,81	102.443	11,63
SLTP/Sederajat	110.048	13,47	110.502	13,29	111.119	13,08	112.206	13,00	115.825	13,14
SLTA/Sederajat	228.851	28,00	231.670	27,87	236.052	27,78	240.029	27,85	244.504	27,75
Diploma I/II	2.968	0,36	2.946	0,35	2.919	0,34	2.908	0,34	2.916	0,33
Akademi/ Diploma III/ S. Muda	17.104	2,09	17.567	2,11	18.097	2,13	18.475	2,14	18.972	2,15
Diploma IV/Strata I	54.376	6,65	56.485	6,80	59.283	6,98	61.675	7,17	65.039	7,38
Strata II	4.612	0,56	4.797	0,58	5.027	0,59	5.272	0,61	5.562	0,63
Strata III	297	0,04	322	0,04	355	0,04	368	0,04	408	0,05
Jumlah	**817.254**	**100,00**	**831.220**	**100,00**	**849.717**	**100,00**	**861.968**	**100,00**	**881.225**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

b. Rasio dan Kepadatan Penduduk

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Samarinda Tahun 2024 adalah 103,47 yang berarti jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan atau terdapat 103-105 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.45
Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2024

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan per km^2
Palaran	105,83	305,52
Samarinda Ilir	104,19	4.057,10
Samarinda Kota	102,34	2.914,03
Sambutan	103,68	625,29
Samarinda Seberang	104,19	5.290,71
Loa Janan Ilir	102,98	2.682,28
Sungai Kunjang	103,98	3.267,19
Samarinda Ulu	102,91	6.055,79
Samarinda Utara	101,62	494,47
Sungai Pinang	103,66	3.261,94
Kota Samarinda	**103,47**	**1.209,61**

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2025 (: angka sementara semester II)*

Persebaran penduduk Kota Samarinda belum merata yang dilihat berdasarkan kepadatan penduduk. Kecamatan-kecamatan yang merupakan perbatasan Kota Samarinda dengan kabupaten/kota lain memiliki kepadatan penduduk yang kecil. Hal tersebut juga terjadi karena kecamatan-kecamatan tersebut jauh dari pusat kota. Kecamatan terpadat adalah Samarinda Ulu yang diikuti oleh Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Ilir.

c. Proyeksi Demografi Tahun 2025-2029

Proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah yang memperkirakan jumlah dan struktur penduduk di masa depan, berdasarkan asumsi tentang laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan publik, karena membantu memahami tren populasi dan dampaknya terhadap ekonomi dan sosial masyarakat.

Tabel 2.46
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Proyeksi Penduduk (Ribu orang)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	439,03	442,06	444,95	447,7	450,32

Perempuan	426,28	430,28	434,15	437,94	431,63
Rasio	102,99	102,74	102,49	102,23	104,33

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Jumlah penduduk Kota Samarinda diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2025 diproyeksikan berjumlah 837,5 ribu orang yang terdiri dari 439,03 ribu laki-laki dan 426,28 perempuan akan menjadi 881,95 ribu orang pada tahun 2029 dengan 450,32 ribu orang laki-laki dan 431,63 orang Perempuan. Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan oleh penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi adanya Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan Kota Samarinda sehingga menarik para pendatang dari luar daerah untuk datang dan menetap di Kota Samarinda.

Berdasarkan rasio jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk Perempuan. Pada tahun 2025 rasio jenis kelaminnya adalah 102,99 artinya ada 103 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan, sedangkan pada tahun 2029 angka rasio jenis kelaminnya adalah 104,33 artinya ada 104,33 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk Perempuan.

Tabel 2.47
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk (Ribu orang)				
	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-4	67,79	67,5	67,21	66,93	66,67
5-9	62,96	63,57	64,26	65,02	65,84
10-14	66,08	65,01	66,79	63,24	62,52
15-19	70,92	70,01	71,08	67,79	66,6
20-24	72,95	72,71	71,16	72,06	71,5
25-29	69,07	71,28	69,22	71,74	71,82
30-34	67,08	67,61	67,57	68,14	68,55
35-39	65,88	66,78	66,26	66,25	66,04
40-44	63,67	65,4	63,76	65,5	65,44
45-49	58,51	61,95	59,46	62,86	53,21
50-54	50,92	56,22	60,17	58,05	58,81
55-59	41,57	47,88	53,41	50,61	51,88

60-64	30,56	38,42	44,61	41,26	42,59
65-69	20,14	26,41	33,9	30,11	31,91
70-74	15,12	16,31	22,86	18,54	19,79
>75	14,28	15,28	17,28	17,54	18,78

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil proyeksi di atas, jumlah penduduk yang berusia antara 0-14 tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2025 berjumlah 196,83 ribu orang atau 23,50 persen dari populasi menjadi 195,03 ribu orang atau 22,11 persen dari populasi.

Untuk penduduk yang berada dalam usia produktif (15-65 tahun) diproyeksikan terjadi peningkatan. Pada tahun 2025 diproyeksikan berjumlah 591,13 ribu jiwa sedangkan pada tahun 2029 diproyeksikan berjumlah 616,44 ribu jiwa. Proporsi penduduk usia 15-64 tahun meskipun dari segi jumlah mengalami peningkatan tetapi dari segi persentase keseluruhan populasi mengalami penurunan. Tahun 2025 jumlah penduduk berusia 15-64 merupakan 70,58 persen dari seluruh populasi dan pada tahun 2029 menurun menjadi 69,90 dari keseluruhan populasi.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, pada tahun 2025 penduduk Kota Samarinda yang berusia 65 tahun ke atas berjumlah 49,54 ribu orang atau 5,92 persen dari jumlah populasi dan diproyeksikan meningkat pada tahun 2029 menjadi 70,48 persen atau 7,99 persen dari populasi.

Dari kondisi di atas, angka ketergantungan di Kota Samarinda diproyeksikan berada pada angka 41,68 persen pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 43,07 persen pada tahun 2029. Artinya untuk setiap 100 orang yang berada pada usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 41-43 orang yang tidak atau belum bekerja.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan indikator utama dalam melihat perkembangan perekonomian secara series sebagai pembanding antara nilai absolut perekonomian (PDRB atas dasar harga konstan) dan distribusi nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi

menjadi sebuah potret pembangunan perekonomian suatu daerah dengan membandingkan perencanaan pembangunan perekonomian antar waktu. Pembangunan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang.

Gambar 2.34
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2020-2024

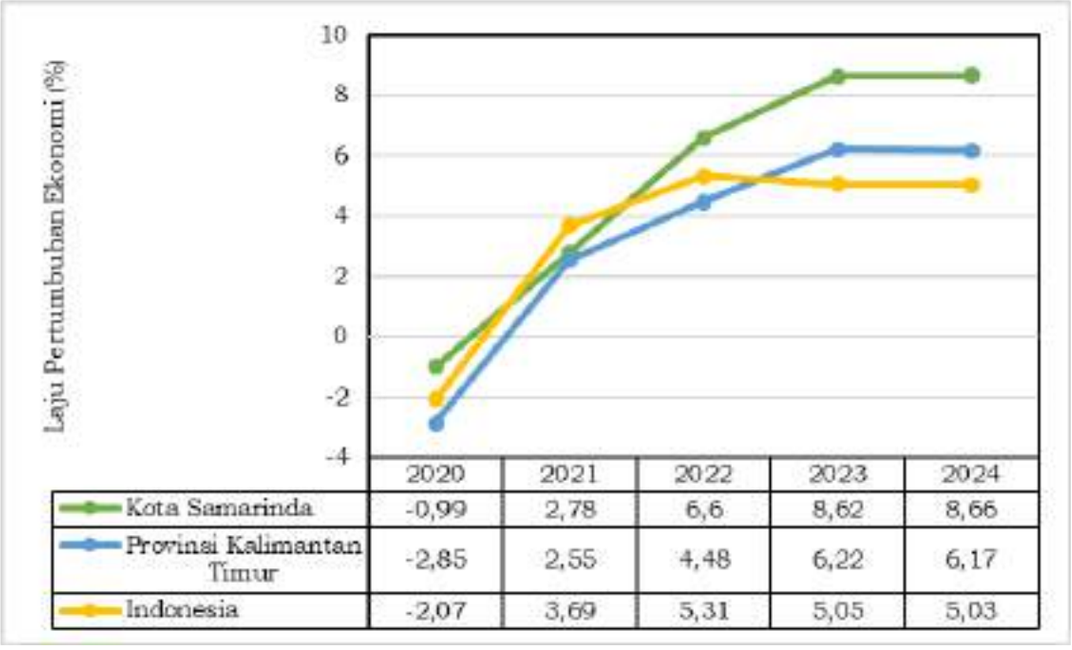

	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Samarinda	-0,99	2,78	6,6	8,62	8,66
Provinsi Kalimantan Timur	-2,85	2,55	4,48	6,22	6,17
Indonesia	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

(Sumber: BPS Kota Samarinda, 2025 & BPS Kalimantan Timur, 2025)

Sebagai ibukota provinsi pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda menjadi sebuah tolak ukur bagi perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjadi barometer pembangunan provinsi. Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda dapat dikatakan tumbuh positif Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mencapai 8,62 persen. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,66 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2023 dan 2024 bahkan bisa melebihi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, dimana untuk tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya sebesar 6,17 persen dan nasional pada tahun yang sama hanya sebesar 5,03 persen. Capaian yang terus meningkat dalam kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diambil telah berhasil merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama di Kota Samarinda.

b. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah. Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan inilah yang bisa menjadi pemicu bagi permasalahan sosial lainnya, seperti kriminalitas, kekumuhan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah Kota Samarinda terus mengupayakan penanggulangan kemiskinan dari hulu ke hilir sehingga tidak berpotensi menimbulkan masalah baru. Tolok ukur paling jelas dalam melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menangani kemiskinan adalah angka kemiskinan. Angka kemiskinan menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan persentase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Angka kemiskinan diperoleh dari perbandingan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan seluruh penduduk yang ditampilkan dalam satuan persen.

Tabel 2.48
Persentase Penduduk Miskin Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	719.710	750.055	784.198	850.842	877.945
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,72	1,07	0,59	0,75	0,54
3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,21	0,32	0,13	0,16	0,11
4	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	41,92	42,84	41,95	41,89	37,80
5	Persentase penduduk miskin	4,76	4,99	4,85	4,81	4,30

Sumber: BPS Kota Samarinda dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Penanganan kemiskinan di Kota Samarinda dilakukan secara terpadu dan komprehensif dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Samarinda. Secara terpadu dalam artian melibatkan seluruh unsur yang terkait mulai dari penanganan pengangguran, jaminan sosial, serta OPD lain yang terlibat

langsung dalam penanganan kemiskinan. Secara komprehensif dalam artian saling mendukung antar sektor dan pelaksanaannya tidak berjalan masing-masing (parsial). Program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui TKPKD yang bersinergi dengan pusat terkait dengan program bantuan perlindungan sosial seperti JKN, PKH, BPNT dengan program jaminan daerah seperti PBI daerah, penunjang program kemiskinan yang ada di OPD terkait namun pandemi yang menyebabkan sektor ekonomi minus berakibat angka pengangguran meningkat dan jumlah penduduk miskin yang bertambah sehingga angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 4,76 persen meningkat menjadi 4,99 persen pada tahun 2021, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 (4,85 persen). Namun dengan adanya pemulihan ekonomi sejak tahun 2022 berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi yang menciptakan peluang kerja dan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat, sehingga pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,14 atau menjadi 4,85 persen dan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan drastis hingga menjadi 4,30 persen atau turun sebesar 0,51 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Selain angka kemiskinan, pemerintah Kota Samarinda juga selalu memperhatikan pergerakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi P1 maka semakin tinggi pula kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang artinya butuh pembiayaan yang makin besar untuk menanganinya. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi P2 maka akan semakin tinggi pula kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Samarinda sebesar 0,75 persen dan 0,16 persen. Kedua indeks tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing 0,59 dan 0,13. Namun pada tahun 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Samarinda menurun

menjadi 0,54 persen dan 0,11 persen. Kedua indeks tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing 0,21 dan 0,05.

Gambar 2.35
Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

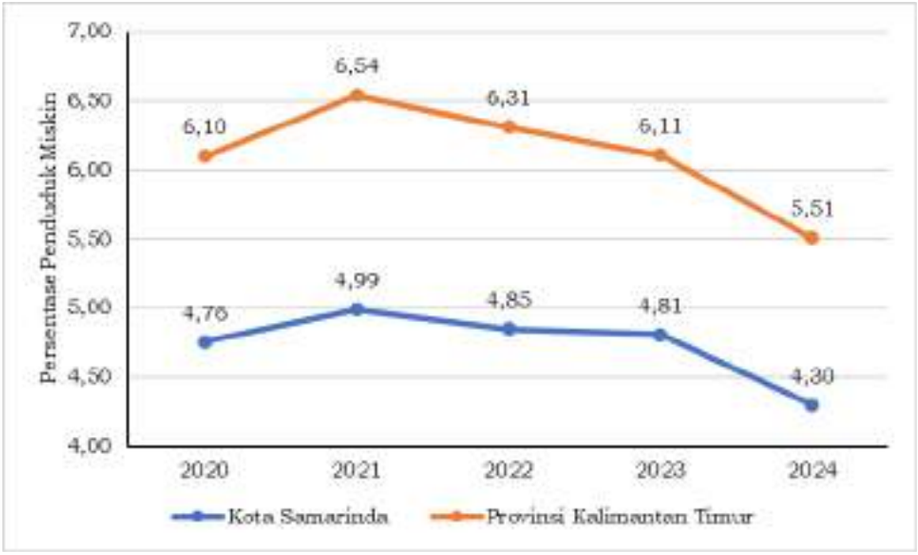

(Sumber: BPS Kota Samarinda dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025)

Berdasarkan Gambar 2.36 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. Dimana untuk tahun 2024 tingkat kemiskinan Kota Samarinda hanya sebesar 4,30 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,51 persen.

Tabel 2.49
Kondisi Kemiskinan per Kecamatan di Kota Samarinda Pada Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase	Distribusi
1	Sungai Pinang	111.428	3.531	3,17	9,34
2	Samarinda Kota	32.404	995	3,07	2,63
3	Palaran	67.609	4.234	6,26	11,21
4	Samarinda Ilir	69.701	4.517	6,48	11,95
5	Samarinda Seberang	66.081	2.988	4,52	7,91
6	Sungai Kunjang	140.620	4.732	3,37	12,52
7	Samarinda Ulu	133.954	4.922	3,67	13,03
8	Samarinda Utara	113.491	7.908	6,97	20,93
9	Sambutan	63.123	2.578	4,08	6,82
10	Loa Janan Ilir	70.088	1.381	1,97	3,65
	TOTAL	**868.499**	**37.786**		

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Berdasarkan Tabel di atas, Kecamatan Samarinda Utara memiliki persentase penduduk miskin terbesar yaitu 6,97 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 7.908 jiwa. Kecamatan Loa Janan Ilir memiliki persentase penduduk miskin terkecil yaitu 1,97 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.318 jiwa. Berdasarkan jumlah absolut dan persentase, Samarinda Utara adalah kecamatan yang paling membutuhkan perhatian serius karena memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dan persentase kemiskinan tertinggi di antara semua kecamatan. Kecamatan lain seperti Samarinda Ilir, Palaran, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang juga memerlukan fokus.

Gambar 2.36
Distribusi Penduduk Miskin per Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2024

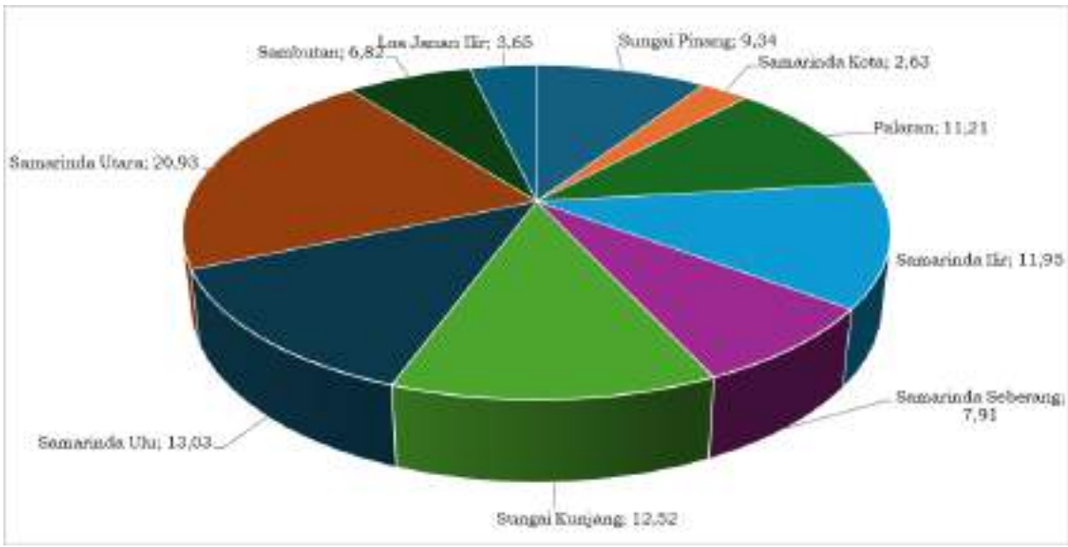

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,2025

Kontribusi masing-masing kecamatan terhadap total penduduk miskin di Kota Samarinda disajikan pada Gambar 2.37 Kecamatan Samarinda Utara memiliki distribusi tertinggi (20,93%), artinya lebih dari seperlima dari seluruh penduduk miskin Kota Samarinda berada di kecamatan ini. Samarinda Ulu (13,03%) dan Sungai Kunjang (12,52%) juga memberikan kontribusi signifikan. Kecamatan dengan distribusi terkecil adalah Samarinda Kota (2,63%) dan Loa Janan Ilir (3,65%).

Kondisi kemiskinan per kecamatan di Kota Samarinda tahun 2024 ini krusial bagi Pemerintah Kota untuk mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang ada, memastikan alokasi

sumber daya tepat sasaran pada wilayah prioritas seperti Samarinda Utara dengan persentase dan jumlah penduduk miskin tertinggi. Pemerintah dapat mengembangkan program peningkatan kualitas SDM atau infrastruktur yang disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan di setiap kecamatan, serta memadukan upaya pengentasan kemiskinan dengan program kesehatan seperti penanganan stunting, demi mencapai penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan warga Samarinda.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Kemiskinan ekstrem bukan hanya sekadar kekurangan uang, tetapi juga keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar manusia yang sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kesempatan seseorang.

Untuk mendapatkan kondisi yang sebenarnya terkait kemiskinan ekstrim di Samarinda pada tahun 2023 dilaksanakan pendataan ulang atau validasi kepada semua KK yang masuk dalam miskin ekstrim.

Gambar 2.37
Jumlah Kemiskinan Ekstrim Kota Samarinda Tahun 2023-2024

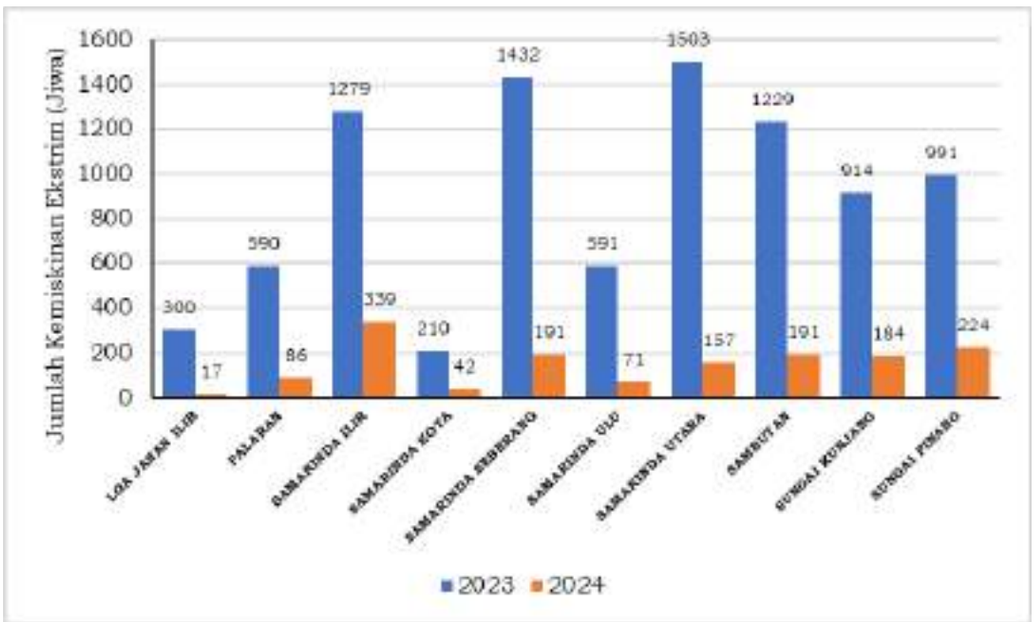

(a)

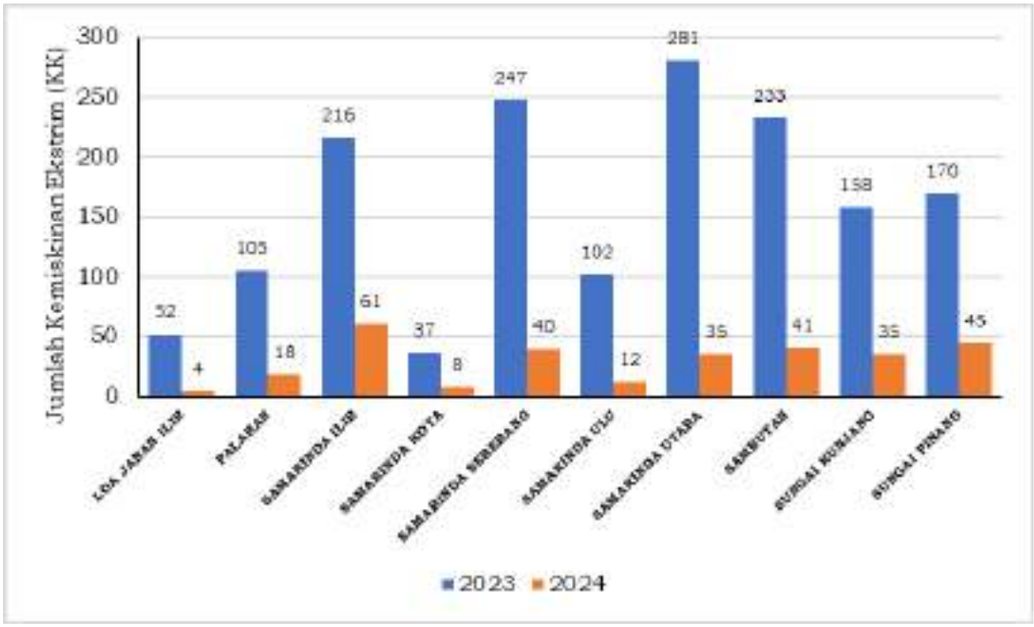

(b)

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda)

Berdasarkan grafik yang diberikan pada Gambar 2.38 data kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2023 ke 2024, baik dalam satuan jiwa maupun Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2023, jumlah jiwa dalam kemiskinan ekstrem tertinggi tercatat di Samarinda Utara (1503 jiwa), diikuti oleh Samarinda Seberang (1432 jiwa) dan Samarinda Ilir (1279 jiwa). Samarinda Kota memiliki jumlah jiwa kemiskinan ekstrem terendah (210 jiwa) pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, semua kecamatan menunjukkan penurunan drastis, dengan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Sambutan, Sungai Kunjang, dan Sungai Pinang masih memiliki jumlah jiwa kemiskinan ekstrem di atas 100, sementara Loa Janan Ilir, Samarinda Kota, dan Samarinda Ulu memiliki jumlah di bawah 100 jiwa. Penurunan paling drastis terlihat di Samarinda Utara dan Samarinda Seberang.

Dalam satuan Kepala Keluarga (KK) (Gambar 2.38), pola penurunan yang serupa juga terlihat. Pada tahun 2023, Samarinda Utara memiliki jumlah KK kemiskinan ekstrem tertinggi (281 KK), diikuti oleh Samarinda Seberang (247 KK) dan Sambutan (233 KK). Samarinda Kota memiliki jumlah KK kemiskinan ekstrem terendah (37 KK). Seperti halnya data jiwa, tahun 2024 menunjukkan penurunan drastis di semua kecamatan untuk data KK, dengan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Sambutan, Sungai Kunjang, dan

Sungai Pinang masih memiliki jumlah KK kemiskinan ekstrem di atas 18, sedangkan Loa Janan Ilir, Samarinda Kota, dan Samarinda Ulu memiliki jumlah di bawah 18 KK.

Penurunan jumlah KK kemiskinan ekstrem berdasarkan hasil validasi di lapangan ada beberapa penyebab yaitu orang yang tercatat di keluarga miskin ekstrim daftar keluarga miskin ekstrim dari awal sebenarnya kondisinya tidak bisa dimasukan sebagai keluarga miskin ekstrim, adanya peningkatan kondisi ekonomi keluarga miskin ekstrim yang mengindikasikan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kota Samarinda**.**

c. Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia, Disabilitas adalah ketidakmampuan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesetaraan hak. Ragam penyandang disabilitas meliputi:

- Disabilitas Fisik: Terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.
- Disabilitas Intelektual: Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.
- Disabilitas Mental: Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Contohnya termasuk skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan stres pasca trauma (PTSD).
- Disabilitas Sensorik: Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain:
  - ➢ Sensorik Netra: Gangguan pada penglihatan (buta total hingga low vision).
  - ➢ Sensorik Rungu: Gangguan pada pendengaran (tuli total hingga kurang dengar).
  - ➢ Sensorik Wicara: Gangguan dalam kemampuan berbicara.

Seseorang juga bisa menyandang disabilitas ganda atau multi, yaitu memiliki dua atau lebih ragam disabilitas sekaligus.

Tabel 2.50
Jumlah Penyandang Disabilitas per Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Loa Janan Ilir	37	37	86	94	94
Palaran	195	194	284	297	297
Samarinda Ilir	125	115	160	183	183
Samarinda Kota	115	78	84	94	94
Samarinda Seberang	60	68	159	165	165
Samarinda Ulu	142	138	186	232	232
Samarinda Utara	96	99	164	196	196
Sambutan	51	58	99	120	120
Sungai Kunjang	103	114	170	212	212
Sungai Pinang	130	139	195	235	235
Jumlah	**1.054**	**1.040**	**1.587**	**1.828**	**1.828**

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 2025

Tabel 2.49 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas Kota Samarinda cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan yang terjadi, terutama pada tahun 2022 dan 2023, bukan disebabkan oleh lonjakan jumlah orang yang menjadi disabilitas, melainkan karena upaya pendataan dan registrasi yang jauh lebih baik dan masif. Jumlah penyandang disabilitas paling banyak berasal dari Kecamatan Palaran dan paling sedikit berasal dari Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Samarinda Kota.

Tabel 2.51
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas per Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2024

Kecamatan	Ragam Disabilitas				
	Fisik (Lumpuh Layu, Cacat Fisik, Stroke, Folio)	Intelektual (Tuna Grahita, Lambat Belajar, Down Syndrom)	Mental	Sensorik (Tuna Wicara, Tuna Netra, Tuna Rungu)	Ganda Atau Multi
Loa Janan Ilir	32	20	8	17	17

Palaran	118	55	50	25	48
Samarinda Ilir	67	45	26	5	40
Samarinda Kota	39	27	9	2	18
Samarinda Seberang	63	31	20	18	33
Samarinda Ulu	82	49	23	14	63
Samarinda Utara	66	42	20	15	53
Sambutan	57	23	20	5	14
Sungai Kunjang	75	54	24	14	45
Sungai Pinang	77	55	23	17	65
Jumlah	**676**	**401**	**223**	**132**	**396**

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 2025

Berdasarkan Tabel 2.50, dari total 1.828 penyandang disabilitas yang terdata, ragam disabilitas yang paling banyak dijumpai adalah Disabilitas Fisik dengan jumlah mencapai 676 orang. Kategori ini, yang mencakup kondisi seperti lumpuh layu, cacat fisik, stroke, dan folio, merupakan tantangan utama di kota ini. Urutan kedua ditempati oleh Disabilitas Intelektual (termasuk Tunagrahita, lambat belajar, dan Down Syndrome) yang berjumlah 401 orang. Selanjutnya, terdapat 396 orang yang menyandang Disabilitas Ganda atau Multi, yang menunjukkan bahwa banyak individu menghadapi lebih dari satu jenis hambatan. Angka ini diikuti oleh Disabilitas Mental sebanyak 223 orang. Ragam disabilitas dengan jumlah paling sedikit yang terdata adalah Disabilitas Sensorik (mencakup Tuna Wicara, Tuna Netra, dan Tuna Rungu) dengan jumlah 132 orang.

d. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Tingginya jumlah penduduk yang ada di Kota Samarinda salah satunya memberikan dampak pada semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang artinya akan meningkatkan proses produksi barang dan jasa. Suatu produk baik berbentuk barang maupun jasa pasti akan menghasilkan nilai tambah (*value added*) yang secara makro akan menggambarkan output dari suatu daerah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Samarinda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB menggambarkan persentase peningkatan dari output yang dihasilkan oleh suatu daerah setiap tahun, dan tentunya menggambarkan pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dalam 2 jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dalam hal ini yaitu tahun 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Tabel 2.52
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	PDRB Dengan Migas	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	ADHB (Rp Juta)	66.526.911,43	71.170.547,80	83.353.692,94	89.289.450,00	98.414,870,00
	Pertumbuhan (%)	-1,59	6,98	17,12	7,12	9,27
2	ADHK (Rp Juta)	45.041.329,12	46.294.409,08	49.349.590,41	53.604.330,00	58.247.250,00
	Pertumbuhan (%)	-0,99	2,78	6,60	8,62	8,66

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2025 (:data sementara*

Nilai PDRB Kota Samarinda atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 98,41 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 9,13 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 89,29 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Samarinda meningkat dari 49,35 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 58,25 triliun rupiah pada tahun 2024. Selain itu, perekonomian Kota Samarinda pada Tahun 2024 tumbuh lebih cepat daripada tahun 2023 yakni dari 8,62 persen menjadi 8,66 persen pada 2024.

Tabel 2.53
Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori/ Lapangan Usaha	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.214.911,93	1.241.340,00	1.288.273,14	1.360.145,49	1.438.710,00
B	Pertambangan dan Penggalian	7.302.967,03	8.904.135,94	13.051.181,30	9.514.424,50	8,269.070,00
C	Industri Pengolahan	5.133.070,54	5.314.782,59	5.768.463,03	6.101.951,68	6.776.280,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	110.305,59	113.155,74	118.687,64	141.750,37	164.590,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	109.280,00	18.570,00	128.130,00	137,220,00	155.960,00
F	Konstruksi	13.957.503,08	14.771.533,83	17.108.759,88	20.628.241,04	23.577.140,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.390.251,78	11.829.729,29	13.392.966,42	15.047.001,42	16.796.450,00
H	Transportasi dan Pergudangan	4.842.474,67	5.266.550,57	6.287.319,78	7.338.989,60	8.584.150,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.688.564,67	2.786.436,46	3.155.411,37	3.562.770,37	4.093.390,00
J	Informasi dan Komunikasi	2.446.101,29	2.688.636,03	2.931.445,13	3.151.742,60	3.416.040,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.867.158,88	5.209.924,52	6.281.602,65	7.325.146,83	8.006.280,00
L	Real Estate	1.652.008,45	1.619.186,78	1.695.861,68	1.791.527,37	1.912.740,00
M,N	Jasa Perusahaan	533.002,60	540.989,77	576.670,74	628.041,74	699.290,00
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.172.283,19	4.328.427,23	4.721.725,71	5.088.952,61	6.177.330,00
P	Jasa Pendidikan	3.015.165,89	3.087.332,99	3.163.128,26	3.342.725,00	3.667.300,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.137.015,71	1.330.631,31	1.424.477,43	1.549.859,40	1.689.440,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.954.850,08	2.019.179,98	2.259.590,75	2.578.954,79	2.990.730,00
Produk Domestik Regional Bruto		**66.526.911,43**	**71.170.547,80**	**83.353.692,94**	**89.289.448,30**	**98.414.870,00**

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.54
Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori/ Lapangan Usaha	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	753.941,18	757.031,94	767.358,71	779.708,09	817.250,00
B	Pertambangan dan Penggalian	6.095.156,12	6.286.877,71	6.430.216,25	6.631.689,65	6.808.930,00
C	Industri Pengolahan	3.413.063,00	3.463.650,69	3.636.279,20	3.743.802,00	3.996.570,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	90.989,95	93.037,15	94.848,04	110.330,91	127.550,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	84.341,16	88.835,43	94.625,30	100.164,70	108.090,00
F	Konstruksi	8.660.528,20	8.821.023,15	9.520.599,44	11.003.330,39	12.281.440,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.790.886,60	8.070.796,51	8.621.093,88	9.327.612,26	10.142.110,00
H	Transportasi dan Pergudangan	3.108.613,87	3.208.754,45	3.513.804,06	3.821.813,13	4.186.930,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.739.046,91	1.773.842,35	1.943.890,44	2.121.397,84	2.375.330,00
J	Informasi dan Komunikasi	2.205.512,49	2.381.477,20	2.581.308,65	2.758.839,66	2.960.700,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.288.510,42	3.359.504,73	3.705.004,74	4.228.215,44	4.562.390,00
L	Real Estate	1.208.847,46	1.184.234,63	1.215.091,51	1.265.332,64	1.337910,00
M,N	Jasa Perusahaan	339.104,48	344.155,17	362.425,35	378.353,07	408.260,00
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.586.573,08	2.655.998,29	2.894.052,49	3.113.229,44	3.607.530,00
P	Jasa Pendidikan	1.764.219,84	1.785.219,34	1.825.920,54	1.912.568,69	2.009.240,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	738.022,31	838.860,21	874.989,80	927.150,70	980.240,OO
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.173.972,04	1.181.110,12	1.268.082,00	1.380.794,39	1.536.910,00
Produk Domestik Regional Bruto		**45.041.329,12**	**46.294.409,08**	**49.349.590,41**	**53.604.333,00**	**58.247.250,00**

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024, perekonomian di kota Samarinda didominasi oleh lapangan usaha konstruksi. nilai PDRB menurut harga berlaku yang dihasilkan oleh lapangan usaha tersebut sebesar 23,58 triliun rupiah dan berkontribusi terhadap total PDRB sebesar 23,10 persen. Disamping itu pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda mencapai 8,66 persen, meningkat 0,04 poin dibandingkan tahun 2023. pertumbuhan ini didukung oleh semua sektor lapangan usaha.

Tabel 2.55
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,75	0,41	1,36	1,61	4,81
B	Pertambangan & Penggalian	-3,82	3,15	2,28	3,13	2,67
C	Industri Pengolahan	-3,97	1,48	4,98	2,96	6,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,55	2,25	1,95	16,32	15,61
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,94	5,33	6,52	5,85	7,91
F	Konstruksi	-4,50	1,85	7,93	15,57	11,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1,85	3,59	6,82	8,20	8,73
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,40	3,22	9,51	8,77	9,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,74	2,00	9,59	9,13	11,97
J	Informasi dan Komunikasi	7,31	7,98	8,39	6,88	7,32
K	Jasa Keuangan dan asuransi	2,73	2,16	10,28	14,12	7,90
L	Real Estate	1,96	-2,04	2,61	4,13	5,74
M,N	Jasa Perusahaan	-3,49	1,49	5,31	4,39	7,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-3,75	2,68	8,96	7,57	15,88
P	Jasa Pendidikan	1,81	1,19	2,28	4,75	5,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,20	13,66	4,31	5,96	5,73
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-2,98	0,61	7,36	8,89	11,31
	PDRB	**-0,99**	**2,78**	**6,60**	**8,62**	**8,66**

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2025

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2024 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha, lapangan usaha pertama yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial yang memberikan kontribusi sebesar 15,88 persen atau mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang hanya sebesar 7,57 persen, dominasi lapangan usaha kedua yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang memberikan kontribusi sebesar 15,61 persen, dan lapangan ketiga jasa Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum yaitu Jasa Keuangan dan asuransi yang memberikan kontribusi sebesar 11,97 persen. Kondisi ini menandakan bahwa ketergantungan Kota Samarinda dengan Pengadaan Listrik dan Gas sudah mulai bergeser kepada Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Pada tahun 2024, lapangan usaha Konstruksi berkontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda sebesar 23,96. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,07, kemudian lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,72.

Tabel 2.56
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,83	1,74	1,55	1,52	1,46
B	Pertambangan & Penggalian	10,98	12,51	15,66	10,66	8,40
C	Industri Pengolahan	7,72	7,47	6,92	6,83	6,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,16	0,14	0,16	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,17	0,15	0,15	0,16
F	Konstruksi	20,98	20,75	20,53	23,10	23,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	17,12	16,62	16,07	16,85	17,07
H	Transportasi dan Pergudangan	7,28	7,40	7,54	8,22	8,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,04	3,92	3,79	3,99	4,16
J	Informasi dan Komunikasi	3,68	3,78	3,52	3,53	3,47
K	Jasa Keuangan dan asuransi	7,32	7,32	7,54	8,20	8,14
L	Real Estate	2,48	2,28	2,03	2,01	1,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,80	0,76	0,69	0,70	0,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,27	6,08	5,66	5,70	6,28
P	Jasa Pendidikan	4,53	4,34	3,79	3,74	3,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,71	1,87	1,71	1,74	1,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,94	2,84	2,71	2,89	3,04
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2025

PDRB per kapita merupakan indikasi awal dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro dimana penghitungan dilakukan dengan membagi seluruh nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk di suatu wilayah, dalam hal ini jumlah penduduk Kota Samarinda.

Tabel 2.57
PDRB per Kapita Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Per kapita ADHB (Ribu Rp)	80.363,21	85.218,57	97.139,88	104.057,38	114.692,09
2	PDRB Per kapita ADHK (Ribu Rp)	54.409,04	55.432,25	57.511,71	62.470,16	67.880,99
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)	1,13	1,88	5,61	7,65	-

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2025

Nilai PDRB per Kapita Kota Samarinda atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 memiliki trend naik. Pada tahun 2020 PDRB per kapita Kota Samarinda sebesar 80,36 juta rupiah mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 114,70 juta rupiah. Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2023 sebesar 7,65 persen. PDRB per kapita yang semakin tinggi dapat menjadi pendekatan untuk melihat kemampuan daya beli masyarakat secara makro, yang tentunya akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin tinggi pula angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Gambar 2.38
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

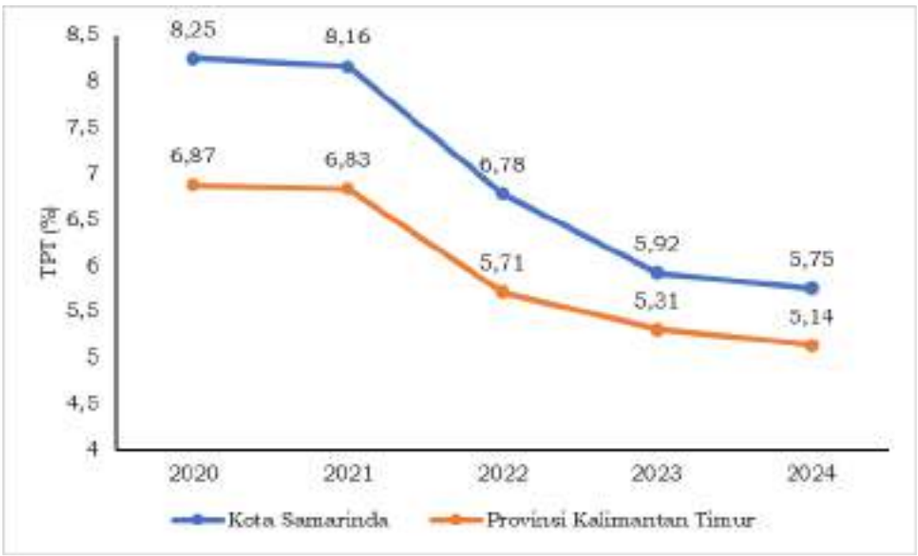

(Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2025)

Pada tahun 2020 TPT Kota Samarinda masih berada pada angka 8,25 persen, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 8,16 persen meskipun sempat menurun selama 5 tahun berturut-turut. pada tahun 2024, TPT mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun 2020 dari 8,25 persen menjadi 5,75 persen. Membaiknya capaian TPT diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan provinsi Kaltim, TPT Kota Samarinda justru berada di atas rata-rata provinsi selama 4 tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa peran Kota Samarinda sebagai pusat pemerintahan provinsi Kaltim yang didominasi sektor perdagangan mengalami dampak paling besar pada saat pandemi COVID-19.

Tabel 2.58
Jumlah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2022-2024

TAHUN	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2022	14.023	14.727
2023	14.925	10.456
2024	13.645	11.343

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Jumlah pengangguran berdasarkan jenis kelamin menunjukkan fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah pengangguran laki-laki tercatat sebanyak 14.023 orang, sedangkan perempuan sebanyak 14.727 orang. Tahun 2023, jumlah pengangguran laki-laki meningkat menjadi 14.925, namun jumlah pengangguran perempuan menurun tajam menjadi 10.456. Kemudian di tahun 2024, jumlah pengangguran laki-laki menurun menjadi 13.645, sementara jumlah pengangguran perempuan sedikit meningkat menjadi 11.343.

Tabel 2.59
Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan
Kota Samarinda Tahun 2022-2024

TAHUN	PENDIDIKAN				TOTAL
	SD	SMP	SMA	PERGURUAN TINGGI	
2022	3.479	4.425	15.347	5.499	28.750
2023	-	6.460	13.507	5.414	25.381
2024	-	7.819	12.671	4.498	24.988

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Pada tahun 2022, jumlah pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan adalah 28.750 orang, dengan sebagian besar lulusan SMA sebanyak 15.347orang, diikuti oleh perguruan tinggi 5.499 orang, SMP 4.425 orang, dan SD 3.479 orang.

Pada tahun 2023 dan 2024, data penganggur untuk lulusan SD tidak tercatat. Namun, terdapat peningkatan jumlah lulusan SMP dari 6.460 pada 2023 menjadi 7.819 pada 2024. Sementara itu, jumlah lulusan SMA dan perguruan tinggi mengalami penurunan berturut-turut, yaitu dari 13.507 orang menjadi 12.671 orang untuk SMA, dan dari 5.414 orang menjadi 4.498 orang untuk perguruan tinggi. Total keseluruhan juga menurun dari 25.381 orang pada 2023 menjadi 24.988 orang pada 2024.

e. Ketimpangan Pendapatan

Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Rasio gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila gini rasio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai gini rasio kurang dari 0,3

masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Gambar 2.39
Rasio Gini Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2010-2024

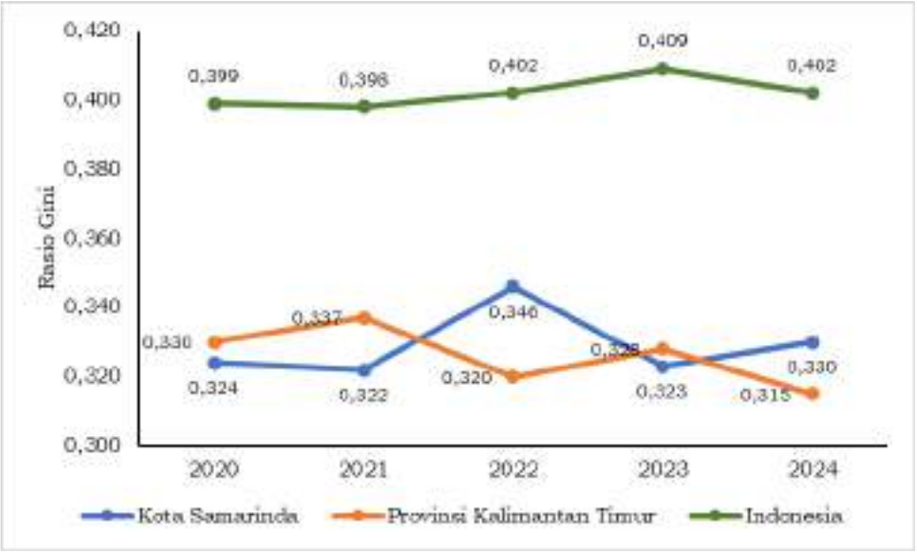

(Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025)

Rasio gini Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dan masuk kategori ketimpangan moderat. Pada tahun 2020 rasio gini Kota Samarinda sebesar 0341, pada tahun berikutnya hingga tahun 2021 terus mengalami penurunan menjadi 0,322. Selanjutnya, rasio gini Kota Samarinda meskipun naik pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 kembali turun menjadi 0,323 dan untuk tahun 2024 naik lagi menjadi 0,330. Nilai rasio gini Kota Samarinda pada tahun 2024 berada sedikit di atas rasio gini Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,315 namun lebih kecil dari rasio gini nasional yang mencapai 0,402.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu

mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya.

Terdapat tren positif pada IPM Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. IPM Kota Samarinda selama tahun 2020-2024 berada di atas rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia. Pada tahun 2024 IPM Kota Samarinda mengalami kenaikan sebesar 0,20 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2.40
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2020-2024

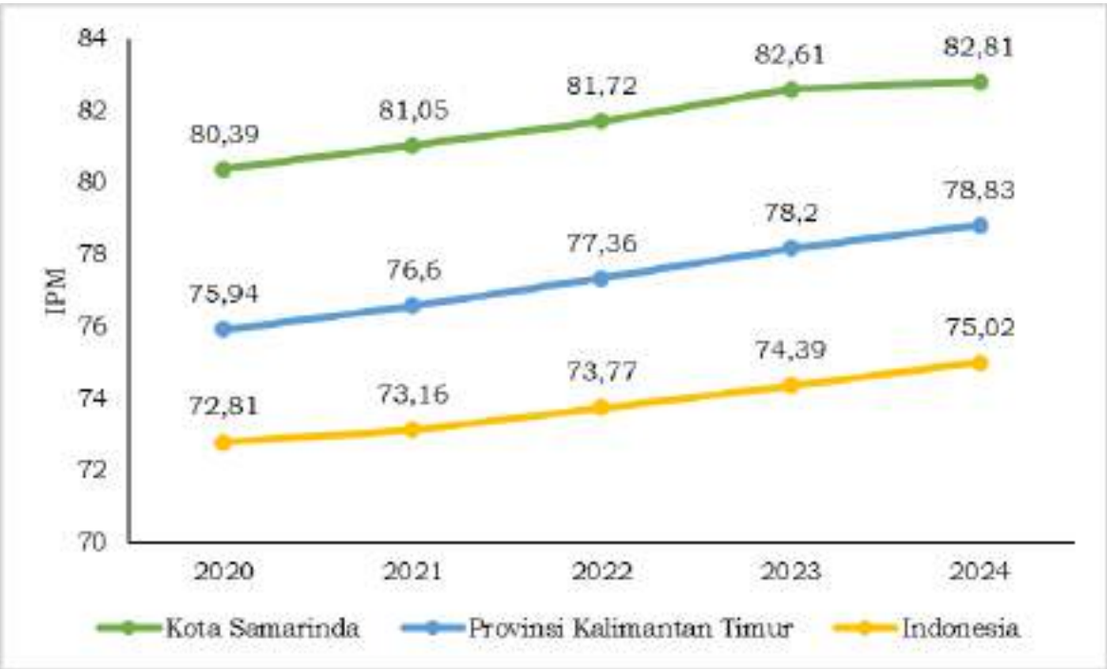

(Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025)

2. Kesehatan Untuk Semua

a. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan

dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan UHH. Menurut Statistik Indonesia, UHH pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Gambar 2.41
Umur Harapan Hidup Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024

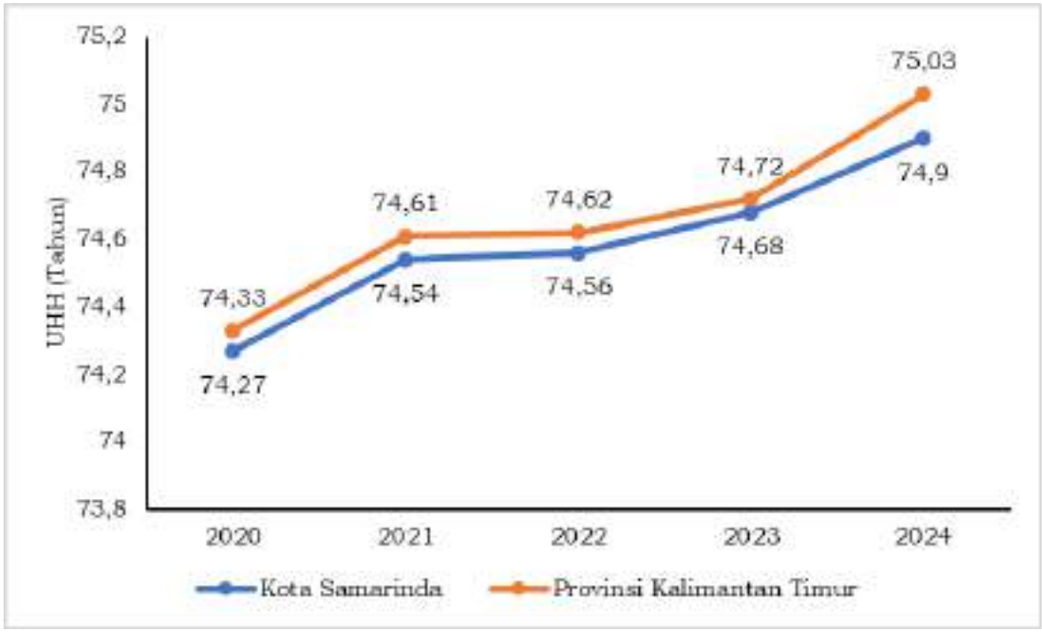

(Sumber: Bps Kalimantan TImur, 2025)

UHH Kota Samarinda setiap tahunnya terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 telah mencapai 74,9 tahun. Capaian ini dapat diartikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2024 diprediksikan dapat hidup sampai usia 74 tahun 2 bulan. Semakin tinggi angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Samarinda tergolong sejahtera karena mampu menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas. Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terlihat UHH perempuan lebih tinggi daripada laki-laki dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.60
Umur Harapan Hidup Penduduk Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kota Samarinda	72,38	76,06	72,62	76,23	72,64	76,23	72,93	76,60	73,12	76,80
Provinsi Kalimantan Timur	72,54	76,21	72,79	76,51	72,80	76,52	72,96	76,62	73,21	76,90

Sumber: BPS Kalimantan Timur, Tahun 2025

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk menilai tingkat kesehatan suatu keluarga secara komprehensif, dengan skor berkisar antara 0 hingga 1. IKS didasarkan pada 12 indikator utama yang mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, perilaku hidup sehat, serta akses terhadap fasilitas kesehatan dan sanitasi. Keluarga dikategorikan sebagai "sehat" jika nilai IKS-nya lebih dari 0,80, "prasehat" jika antara 0,50-0,80, dan "tidak sehat" jika kurang dari 0,50. Pengukuran IKS ini penting sebagai dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan intervensi kesehatan yang tepat sasaran demi meningkatkan derajat kesehatan keluarga di Indonesia.

Gambar 2.42
Indeks Keluarga Sehat Kota Samarinda Tahun 2022-2024

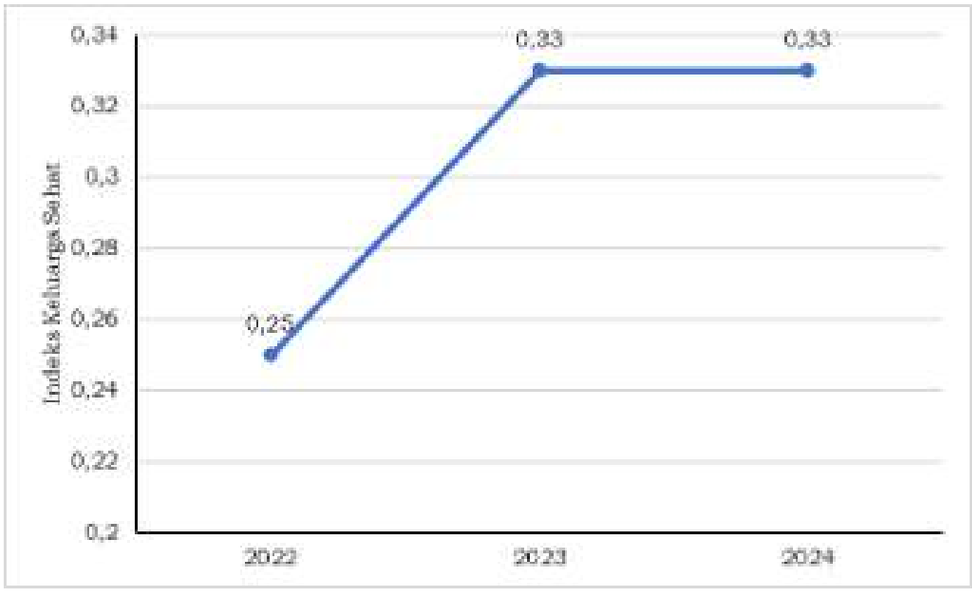

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2025

Pada tahun 2022, Indeks Keluarga Sehat Kota Samarinda tercatat sebesar 0,25. Terdapat peningkatan signifikan di tahun berikutnya. Pada tahun 2023, indeks ini melonjak menjadi 0,33, menunjukkan peningkatan sebesar 0,08 poin dalam kurun waktu satu tahun. Kenaikan substansial ini mengindikasikan adanya perbaikan yang berarti dalam berbagai indikator kesehatan keluarga di Kota Samarinda, yang mungkin disebabkan oleh program-program kesehatan yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, atau investasi dalam pelayanan kesehatan. Tren positif ini berlanjut, meskipun tidak ada peningkatan lebih lanjut di tahun terakhir data. Dari tahun 2023 ke tahun 2024, Indeks Keluarga Sehat Kota Samarinda tetap stabil pada angka 0,33 yang menunjukkan bahwa meskipun tidak ada lonjakan lebih lanjut, Kota Samarinda berhasil mempertahankan capaian yang sudah baik dari tahun sebelumnya. Kondisi ini bisa diinterpretasikan bahwa program atau upaya yang dilakukan pada tahun 2023 telah berhasil menciptakan fondasi kesehatan keluarga yang kuat dan berkelanjutan hingga tahun 2024.

Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan keberhasilan Kota Samarinda dalam meningkatkan Indeks Keluarga Sehat dari tahun 2022 ke 2023, dan kemudian mempertahankannya hingga tahun 2024.

Peningkatan awal yang tajam menunjukkan efektivitas intervensi atau program yang diluncurkan, sementara stabilisasi di tahun berikutnya menandakan keberlanjutan dampak positif tersebut. Untuk masa depan, tantangan bagi Kota Samarinda adalah bagaimana terus mendorong peningkatan indeks ini melampaui angka 0,33, agar semakin banyak keluarga yang mencapai status sehat optimal.

Berdasarkan kondisi historis tersebut juga perlu ditekankan bahwa nilai Indeks Keluarga Sehat di Kota Samarinda secara keseluruhan masih berada di bawah 0,50. Berdasarkan kriteria Indeks Keluarga Sehat, angka di bawah 0,50 menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di Kota Samarinda masih tergolong dalam kategori "tidak sehat". Hal ini menyoroti perlunya perhatian lebih lanjut dan intervensi yang lebih intensif dari pemerintah daerah dan sektor kesehatan untuk meningkatkan indikator-indikator kesehatan utama, seperti kepesertaan dalam program kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, agar kualitas kesehatan keluarga di Kota Samarinda dapat terus meningkat.

c. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.61
Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Samarinda
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	AKI per 100.000 kelahiran hidup (kasus)	67,72	156,39	102,35	109,47	80,68
2	Jumlah kematian ibu akibat melahirkan (kasus)	10	21	13	14	10
3	Jumlah kelahiran hidup (KH)	14.767	13.428	12.701	12.789	12.394

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Pada tahun 2024 terjadi penurunan AKI dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 AKI Kota Samarinda mencapai

109,47 namun pada tahun 2024 turun menjadi 80,68 yang berarti terdapat 80,68 kasus kematian ibu setiap 100.000 kelahiran hidup. Penurunan ini merupakan suatu gambaran bahwa Pemerintah Kota Samarinda fokus dalam pembangunan kesehatan.

d. Prevalensi Stunting

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Tabel 2.62
Jumlah Bayi dan Prevalensi Stunting Kota Samarinda Tahun 2020-2024

TAHUN	JUMLAH BALITA STUNTING (JIWA)	JUMLAH BALITA DIUKUR (JIWA)	PREVALENSI STUNTING (%)
2020	1402	11766	11,92
2021	1456	13451	10,82
2022	1907	19436	9,81
2023	2256	15285	14,76
2024	4177	24915	16,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda (SIGIZI Terpadu)

Target nasional untuk prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 18 persen. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatat pada tahun 2024, prevalensi stunting Kota Samarinda sebesar 16,77 persen. maka dengan itu Kota Samarinda telah berhasil melewati dari target nasional dan berhasil dalam menekan pertumbuhan stunting.

Gambar 2.43
Prevalensi Stunting Kota Samarinda Tahun 2020-2024

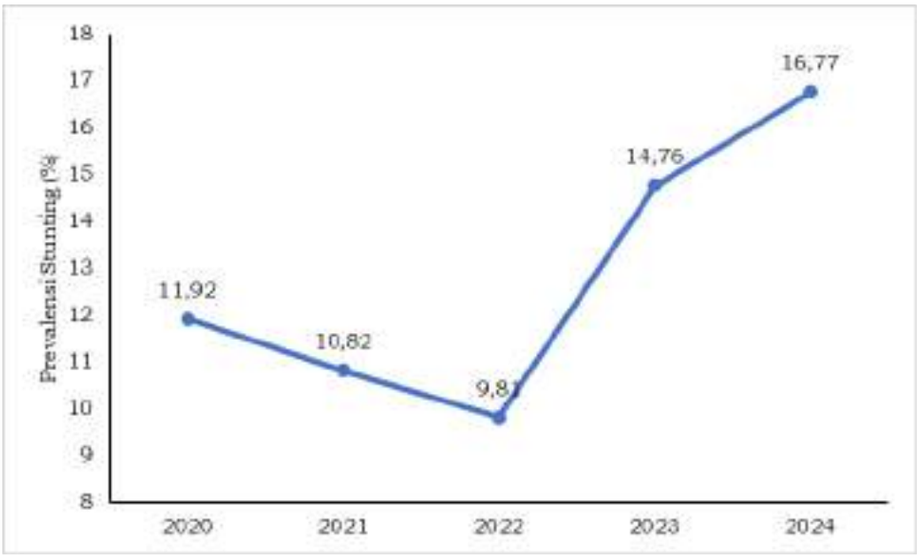

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda (SIGIZI Terpadu))

Jika melihat tabel stunting mulai tahun 2020 sampai dengan 2024, meskipun untuk Kota Samarinda terjadi kenaikan tetapi apabila dilihat berdasarkan batas wilayah kecamatan terjadi fluktuasi yang berbeda setiap tahunnya di masing-masing kecamatan. Jika membandingkan tahun 2023 dengan 2024 semua kecamatan mengalami kenaikan dan ada beberapa kecamatan yang mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu Kecamatan Loa Janan Ilir sebanyak 171 anak Kecamatan Sungai Kunjang 335 anak.

Tabel 2.63
Data Stunting Kota Samarinda Berdasarkan Batas Administrasi
Tahun 2020-2024

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Samarinda Kota	55	66	43	43	70
Samarinda Ilir	70	90	39	120	453
Sambutan	12	39	157	220	283
Sungai Pinang	81	77	110	169	480
Samarinda Utara	57	78	340	223	452
Samarinda Ulu	188	148	290	266	372
Sungai Kunjang	331	382	257	466	801
Samarinda Seberang	73	193	194	315	381
Loa Janan Ilir	177	254	257	334	505

Palaran	364	129	220	100	380
Total	**1.408**	**1.456**	**1.907**	**2.256**	**4.177**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk menurunkan angka stunting dimulai dengan kelembagaan TPPS (Tim percepatan Penurunan Stunting) tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. Program penurunan stunting telah di dilakukan yang ditujukan kepada kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. Intervensi mengenai penyebab langsung maupun tidak langsung terkait stunting telah dilakukan berupa intervensi yang terkait dengan lingkungan, ekonomi dan perilaku masyarakat. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan OPD terkait, instansi vertical, CSR, masyarakat yang kesemuanya konvergensi dalam menurunkan angka stunting Kota Samarinda. Sebagai basis data dalam pemberian layanan intervensi adalah menggunakan Keluarga berisiko stunting dalam tindakan pencegahan yang mana keluarga beresiko adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/Ibu Hamil/anak usia 0 – 23 bulan/anak usia 24 – 59 bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak. Sedangkan basis data penanganan stunting yaitu berasal dari pengukuran dan penimbangan anak dibawah 2 tahun yang dilakukan di posyandu yang melibatkan peran puskesmas, kader Keluarga berencana (Tim Pendamping Keluarga) dan kader Pemberdayaan masyarakat (Kader pembangunan manusia).

e. Penyakit Menular

Kota Samarinda termasuk salah satu wilayah dengan beban kasus tuberkulosis yang tinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai penyakit menular melalui udara, penularan tuberkulosis dapat terjadi dengan relatif mudah, terutama di lingkungan padat penduduk atau kondisi rumah yang kurang memenuhi syarat kesehatan seperti ventilasi dan pencahayaan yang buruk. Selain faktor lingkungan, aspek sosial ekonomi dan stigma negatif terhadap penderita TB juga menjadi

tantangan dalam penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan di masyarakat.

Gambar 2.44
Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kota Samarinda Tahun 2020-2024

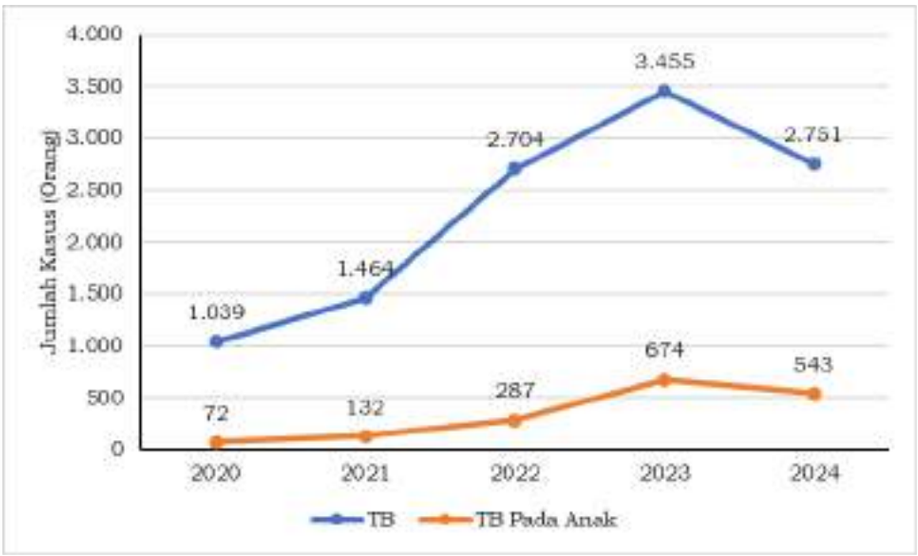

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2025)

Pada tahun 2020-2023, jumlah kasus tuberkulosis dan tuberkulosis pada anak menunjukkan tren naik. Namun pada tahun 2024, jumlah kasus menurun yang menunjukkan upaya-upaya pemerintah Kota Samarinda memberikan hasil yang positif. Pemerintah Kota Samarinda, melalui Dinas Kesehatan, bersama dengan berbagai pihak terus melakukan upaya penanggulangan. Ini mencakup program penemuan kasus secara aktif (screening), peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan akses pengobatan gratis selama 6 bulan, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Penanganan TB di Samarinda sejalan dengan program nasional yang menargetkan eliminasi TB pada tahun 2030, menunjukkan komitmen serius dari pemerintah daerah untuk menurunkan angka kasus.

f. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia selain hak untuk memperoleh penghidupan seperti sandang, pangan dan papan yang layak bagi manusia. Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang setiap orang berhak memperolehnya . Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya.

Tabel 2.64
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional 2020-2024
Kota Samarinda

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	87,58	93,22	96,03	99,9	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Partisipasi Pemerintah Daerah, masyarakat serta sektor swasta sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam pembangunan kesehatan sehingga jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia (Universal Health Coverage) seperti yang ditargetkan akan dapat segera tercapai.

Peningkatan jumlah peserta dan cakupan kepesertaan JKN menjadi salah satu alat ukur keberhasilan Pemerintah dalam menyediakan akses yang mudah bagi Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan. Kota Samarinda dalam periode 2020-2024 mengalami peningkatan dalam capain UHC nya. Tahun 2020 cakupannya mencapai 87,58 dan semakin meningkat hingga mencapai 100 pada tahun 2024.

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengindikasikan semakin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani RLS yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan RLS, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan

tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan.

Gambar 2.45
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Rata-rata lama sekolah di Kota Samarinda mencapai 10,95 tahun, yang artinya bahwa rata-rata penduduk Kota Samarinda usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,95 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Samarinda didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi, bahkan melampaui rata-rata penduduk se-Kalimantan Timur yang berada pada angka 10,02 tahun.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Gambar 2.46
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024

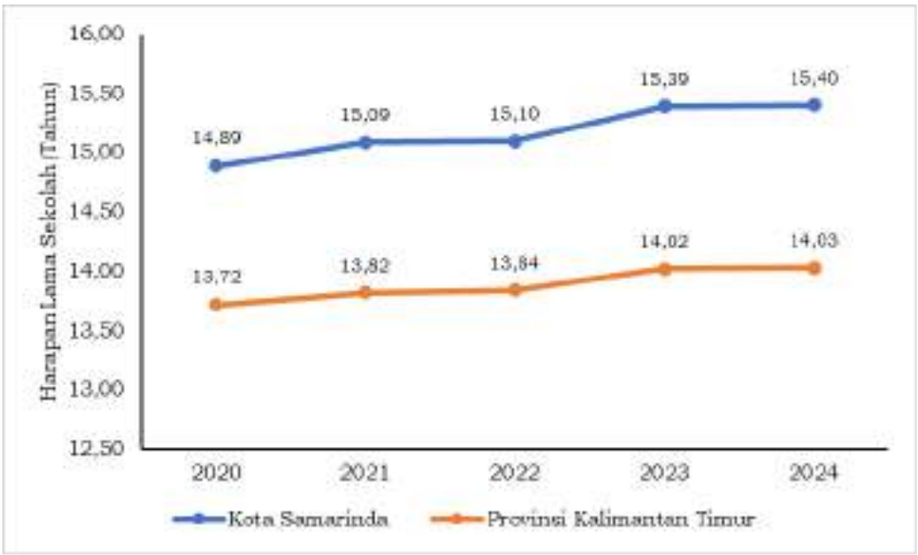

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

HLS Kota Samarinda selalu memperlihatkan adanya peningkatan tiap tahun dan pada tahun 2024 telah mencapai 15,40 yang dapat diartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,40 tahun atau setara dengan Diploma 3. Kondisi ini menunjukkan rata-rata masyarakat Kota Samarinda memiliki kemampuan untuk mengeluarkan biaya pendidikan hingga tingkat Diploma 3.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, APK Kota Samarinda tahun 2023-2024 untuk jenjang PAUD mencapai 31,99, jenjang SD mencapai 105,81 jenjang SMP mencapai 108,34 dan jenjang kesetaraan mencapai 4,45.

Tabel 2.65
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2021-2024 Kota Samarinda (%)

Tahun	Jenjang	APK
2021-2022	PAUD	20,99
2022-2023		29,53
2023-2024		31,99
2024-2025		29,03
2021-2022	SD	102,63
2022-2023		105,05

2023-2024		105,81
2024-2025		103,47
2021-2022	SMP	109,27
2022-2023		106,62
2023-2024		108,34
2024-2025		104,38

Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan Kota Samarinda Dalam Angka 2025*

Capaian APK PAUD tersebut artinya siswa pada jenjang PAUD masih lebih sedikit daripada penduduk Kota Samarinda usia 3-6 tahun. Begitu juga dengan capaian APK kesetaraan yang menunjukkan siswa pada jenjang kesetaraan masih lebih sedikit daripada penduduk Kota Samarinda usia 7-18 tahun. Capaian APK SD/MI lebih dari 100 persen yang artinya siswa pada jenjang SD/MI masih lebih banyak daripada penduduk Kota Samarinda usia 7-12 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat siswa pada jenjang SD/MI yang bukan usia 7-12 tahun atau bukan penduduk Kota Samarinda namun bersekolah di Kota Samarinda. Begitu juga dengan data APK SMP/MTs artinya siswa pada jenjang SMP/MTs masih lebih banyak daripada penduduk Kota Samarinda usia 13-15 tahun.

Tabel 2.66
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2021-2024 Kota Samarinda (%)

Tahun	Jenjang	APM
2021-2022	PAUD	-
2022-2023		-
2023-2024		-
2024-2025		
2021-2022	SD	96,62
2022-2023		99,24
2023-2024		99,27
2024-2025		97,05
2021-2022	SMP	81,36
2022-2023		82,00
2023-2024		85,81
2024-2025		86,27

Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan Kota Samarinda Dalam Angka 2025*

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap

penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, APM Kota Samarinda tahun 2023-2024 untuk jenjang SD mencapai 99,27, jenjang SMP mencapai 85,81 dan jenjang kesetaraan mencapai 2,36.

Capaian APM SD menandakan bahwa jumlah siswa usia 7-12 tahun yang menempuh pendidikan jenjang SD sebanyak 99,27 persen dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun di Kota Samarinda. APM SMP menandakan bahwa jumlah siswa usia 13-15 tahun yang menempuh jenjang pendidikan SMP sebanyak 85,81 persen dari seluruh penduduk usia 13-15 tahun di Kota Samarinda. APM Kesetaraan menandakan bahwa jumlah siswa usia 7-18 tahun yang menempuh jenjang pendidikan kesetaraan sebanyak 2,36 persen dari seluruh penduduk usia 7-18 tahun di Kota Samarinda. Hal ini memberikan gambaran bahwa akses pendidikan yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda dipergunakan oleh masyarakat sebagaimana mestinya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Tabel 2.67
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (%)

No.	Usia	2021	2022	2023	2024*
1	5 – 6	45,49	45,52	45,52	55,33
2	7 – 12	99,81	98,69	98,68	99,30
3	13 – 15	99,98	98,55	98,54	98,76
4	16 – 18	84,23	84,62	84,62	84,40
5	7 – 18 (Kesetaraan)	13,44	16,04	16,03	39,34

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2024 (:data sementara)*

APS setiap kelompok umur selama tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan. APS Kota Samarinda usia 5-6 tahun pada tahun 2024 mencapai 55,33 persen, yang artinya sebanyak 55,33 persen penduduk usia 5-6 tahun sedang mengenyam pendidikan. usia 7-12 tahun pada tahun 2024 mencapai 99,30 persen, yang artinya sebanyak 99,30 persen penduduk usia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan. Adapun APS usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun masing-masing mencapai 98,76 persen dan 84,40 persen. Pada tahun 2024, APS usia 7-18 (kesetaraan) adalah 39,34 persen yang berarti terdapat 39,34 persen penduduk usia 7-18 tahun yang sedang

mengenyam pendidikan non formal yaitu program Paket, Paket B, dan Paket C dan capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa keinginan penduduk untuk mengenyam pendidikan sangatlah tinggi, dan ini tidak terlepas dari peran pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi pendidikan di segala umur, mulai dari usia dini hingga menengah baik formal maupun non formal.

d. Angka Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi merupakan dua kompetensi dasar yang sangat penting dalam pembelajaran. Literasi mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi, sedangkan numerasi berkaitan dengan kemampuan memahami dan menggunakan angka dalam berbagai konteks. Kedua kompetensi ini saling melengkapi dan penting untuk pengembangan pemikiran kritis, analitis, dan kemampuan memecahkan masalah.

Tabel 2.68
Angka Literasi dan Numerasi di Kota Samarinda Tahun 2023-2024 (%)

No.	Jenjang	Kemampuan Literasi		Kemampuan Numerasi	
		2023	2024	2023	2024
1	Sekolah Dasar (SD)	63,13	65,50	48,53	56,10
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	75,57	78,31	64,52	66,41

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2025

Angka literasi dan numerasi pada jenjang SD dan SMP di Kota Samarinda mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi di sekolah-sekolah Kota Samarinda mulai menunjukkan hasil. Kenaikan yang paling menonjol terlihat pada kemampuan numerasi jenjang SD. Meskipun demikian, perlu terus didorong program dan strategi yang efektif untuk terus meningkatkan capaian ini di semua jenjang pendidikan.

Pemerintah Kota Samarinda direkomendasikan untuk memperkuat dan mereplikasi program-program yang telah terbukti berhasil di seluruh sekolah, diiringi dengan peningkatan kapasitas guru melalui

pelatihan berkelanjutan yang spesifik per jenjang dan mata pelajaran, pengembangan serta penyediaan sumber belajar yang beragam dan relevan, implementasi program intervensi yang terarah bagi siswa yang belum mencapai standar minimum, pelibatan aktif orang tua dan masyarakat, pemanfaatan optimal data asesmen seperti Rapor Pendidikan untuk perencanaan berbasis bukti, serta menjadikan peningkatan literasi dan numerasi sebagai gerakan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kota.

e. Akreditasi Sekolah

Akreditasi adalah proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa suatu institusi pendidikan atau program studi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utama akreditasi adalah untuk menjamin mutu pendidikan, memberikan pengakuan resmi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi atau program studi yang telah terakreditasi. Kriteria yang digunakan dalam akreditasi biasanya mencakup aspek-aspek seperti kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, manajemen, dan hasil belajar. Proses ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan hasilnya berupa pengakuan terhadap kelayakan sekolah tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan. Peringkat akreditasi yang diberikan adalah A (unggul), B (Baik), C (Cukup Baik), dan tidak terakreditasi (TT).

Tabel 2.69
Data Akreditasi Sekolah Kewenangan Kota Samarinda Tahun 2023/2024
Negeri dan Swasta

No.	Jenjang	Peringakat Akreditasi				Total
		A	B	C	TT	
1	PAUD	38	152	91	182	**463**
2	SD/MI/SDLB	97	135	22	13	**267**
3	SMP/MTs/SMPLB	69	57	18	5	**149**
4	Kesetaraan	3	12	30	27	**72**
Total		**207**	**356**	**161**	**227**	**951**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2024

Jenjang pendidikan PAUD, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, dan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C) paling banyak berperingkat akreditasi B yaitu 37,43 persen. Jenjang pendidikan yang tidak terakreditasi sebesar 23,87 persen, jenjang pendidikan dengan peringkat A sebesar 21,77 persen, dan jenjang pendidikan dengan peringkat C sebesar 16,93 persen. Untuk meningkatkan status akreditasi sekolah di Kota Samarinda, perlu dilakukan berbagai upaya yang terstruktur dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan manajemen sekolah.

f. Indek Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah alat ukur strategis yang dirancang untuk menilai kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun dunia kerja. Dengan mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang dikembangkan dalam forum Digital Economy Working Group (DEWG) selama Presidency G20 Indonesia, IMDI memberikan kerangka kerja komprehensif untuk memahami kemampuan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Indeks ini dibangun berdasarkan empat pilar utama: Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem mengukur aksesibilitas masyarakat terhadap internet dan perangkat digital, sementara Keterampilan Digita/fokus pada kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan mengoptimalkan teknologi secara efektif. Di sisi lain, pilar Pemberdayaan menekankan bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan pilar Pekerjaan menilai kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan keterampilan digital untuk berkontribusi pada ekonomi digital.

Dengan mengukur keempat pilar ini, IMDI memberikan gambaran menyeluruh tentang kesiapan masyarakat Indonesia menuju era digital. Indeks ini tidak hanya membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data, tetapi juga menjadi pedoman bagi sektor swasta dan masyarakat untuk memahami peluang serta tantangan

dunia digital. Sebagai alat evaluasi, IMDI mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem digital nasional agar mampu bersaing secara global. Dalam konteks lokal seperti di Kota Samarinda, IMDI dapat menjadi katalisator transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, melalui peningkatan literasi digital, aksesibilitas teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, IMDI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masyarakat digital yang tangguh dan siap menghadapi tantangan global.

Tabel 2.70
Nilai IMDI Kota Samarinda dan
Nilai Pembentuk Tahun 2022-2024

No	Indeks dan Pilar	TAHUN		
		2022	2023	2024
1	Infrastruktur dan ekosistem	53,39	59,38	62,82
2	Keterampilan Digital	73,2	61,5	67,79
3	Pemberdayaan	34,28	30,81	30,48
4	Pekerjaan	38,44	36,63	39,7
	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	**49,61**	**47,28**	**50,26**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, 2025

Hasil Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan nilai IMDI Kota Samarinda sebesar 50,26 pada tahun 2024, mengalami peningkatan dari 47,28 tahun sebelumnya. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan dalam memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Peningkatan ini sangat relevan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur yang responsif gender, menciptakan fondasi bagi transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Di Kota Samarinda, pilar Infrastruktur dan Ekosistem mengalami peningkatan signifikan dari 53,39 pada tahun 2022 menjadi 62,82 pada tahun 2024. Penguatan aksesibilitas internet dan ketersediaan perangkat digital telah mendukung masyarakat untuk lebih produktif dan inovatif, terutama dalam mendukung sektor ekonomi lokal. Hal ini menjadi landasan penting bagi percepatan digitalisasi di berbagai bidang.

Meskipun Pilar Keterampilan Digital mengalami penurunan dari 73,2 pada tahun 2022 menjadi 61,50 pada tahun 2023,namun terdapat peningkatan pada tahun 2024 dengan capaian 67,79. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pengembangan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, program pelatihan dan pendidikan digital harus terus diperluas, terutama bagi kelompok rentan dan perempuan. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah mengakses peluang ekonomi digital, meningkatkan daya saing di pasar kerja, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pilar Pemberdayaan dan Pekerjaan menunjukkan tantangan yang memerlukan perhatian serius. Pilar Pemberdayaan mengalami penurunan dari 34,28 pada tahun 2022 menjadi 30,48 pada tahun 2024, mencerminkan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sementara itu, Pilar Pekerjaan menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan penurunan dari 38,44 pada tahun 2022 menjadi 36,63 pada tahun 2023, sebelum meningkat kembali menjadi 39,7 pada tahun 2024. Hal ini menyoroti pentingnya pengembangan sektor berbasis teknologi untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. Dengan memperkuat keterampilan digital masyarakat, Kota Samarinda memiliki peluang besar untuk menarik investasi, menciptakan pekerjaan baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

g. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap upaya pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM mengukur tingkat literasi masyarakat berdasarkan unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM). IPLM digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk kemampuan literasi dasar, literasi fungsional, dan literasi informasi dan digital. IPLM juga menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Kategori penilaian yang digunakan adalah IPLM 0-29,9 masuk dalam kategori sangat rendah, IPLM 30-49,9 masuk dalam kategori rendah, IPLM 50-79,9 masuk dalam kategori sedang, IPLM 80-89,9 masuk dalam kategori tinggi dan IPLM 90-100 masuk dalam kategori sangat tinggi.

Capaian IPLM Kota Samarinda pada tahun 2024 adalah 68,67 dengan kategori sedang, yang mana mengalami peningkatan jika dibanding capaian pada tahun 2023 sebesar 64,10. Kota Samarinda memiliki IPLM yang tinggi dan terus meningkat, menjadikan daerah ini sebagai contoh dalam pembangunan literasi di Kaltim. Peningkatan IPLM ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Gebyar Anugerah Literasi 2024 dan kajian yang dilakukan oleh Perpusnas RI diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan IPLM di Kaltim, khususnya di Kota Samarinda.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jamsostek, atau kini BPJS Ketenagakerjaan, adalah program penting yang memberikan jaminan sosial dan perlindungan finansial bagi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama masa kerja hingga masa pensiun. Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Tabel 2.71
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tahun	Jumlah (Jiwa)
2023	127.435
2024	136.015

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Capaian cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Samarinda pada tahun 2023 adalah sebanyak 127.435 orang. Angka ini kemudian mengalami peningkatan substantial menjadi 136.015 orang pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 8.580 peserta (6,73%) dalam

kurun waktu satu tahun ini mengindikasikan keberhasilan upaya yang dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi pekerja di Kota Samarinda. Kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi dari perusahaan dan pekerja di Samarinda terkait pentingnya jaminan sosial, atau mungkin adanya kebijakan dan program pemerintah daerah atau pusat merupakan faktor pendorong meningkatnya cakupan ini. Peningkatan jumlah peserta ini juga mencerminkan komitmen yang lebih kuat terhadap kesejahteraan pekerja dan perlindungan mereka dari risiko-risiko terkait pekerjaan. Hal ini merupakan langkah positif dalam mewujudkan lingkungan kerja yang lebih aman dan terjamin di Kota Samarinda.

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan, baik di tingkat nasional maupun daerah. IPK dirancang untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan kebudayaan, menjadi dasar bagi formulasi kebijakan kebudayaan, dan menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari tujuh dimensi, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.

Gambar 2.47
Indeks Perkembangan Kebudayaan Kota Samarinda
Tahun 2020-2024

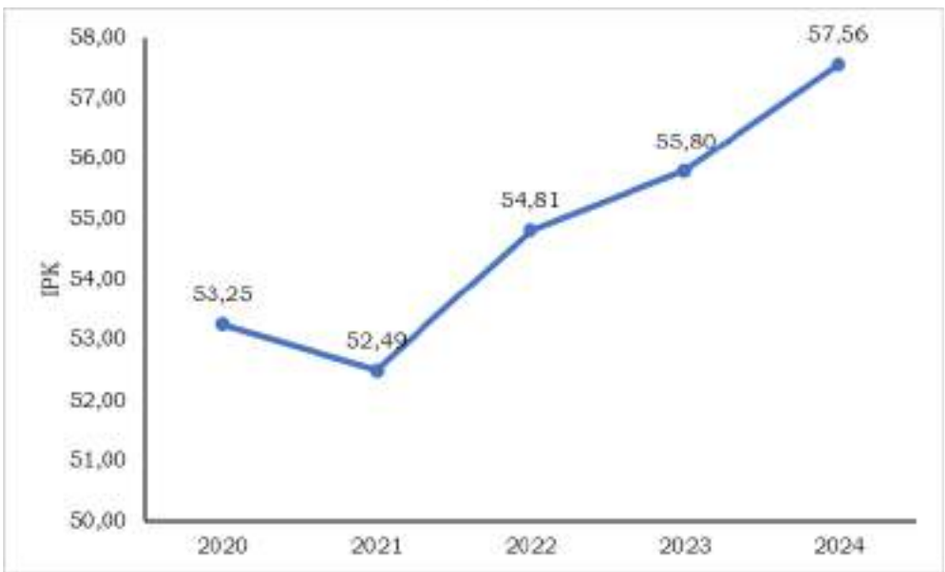

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2024)

Perkembangan IPK Kota Samarinda dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren naik. Pada tahun 2024, IPK Kota Samarinda mengalami peningkatan sebesar 1,76 poin. IPK Kota Samarinda meningkat karena adanya peningkatan fokus pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Kota Samarinda juga aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis budaya, serta mendukung kegiatan kreatif dan inovasi di bidang seni dan budaya. Dengan berbagai upaya tersebut, Samarinda diharapkan dapat semakin memperkuat identitas budaya lokalnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan kreativitas.

b. Jumlah Konflik SARA

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah yang begitu luas. Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan Timur menjadi daya tarik bagi para pendatang. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam komoditas batubara dan kelapa sawit tersebar di wilayah Kalimantan Timur. Geliat ekonomi dan pembangunan menarik banyak pendatang yang berasal dari beragam wilayah di Indonesia. Para pendatang itu bekerja di berbagai sektor usaha.

Bersamaan dengan masuknya pendatang tersebut, potensi gesekan antar kelompok warga yang berbeda suku pun meningkat. Samarinda, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur, menduduki peringkat pertama sebagai kota yang memiliki kecenderungan konflik sosial tertinggi. Konflik-konflik kecil yang terjadi dapat terakumulasi sehingga mengganggu ketahanan nasional. Konflik sosial di masyarakat dapat berujung pada bencana sosial di masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah identifikasi potensi konflik sosial di daerah, Konflik kecil antara warga dengan latar belakang kesukuan yang berbeda dapat melebar ke konflik SARA dalam skala besar. Isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) masih rentan terjadi di Samarinda. Isu ini menjadi potensi paling tinggi kerawanan sosial di masyarakat.

Isu kesukuan sangat sensitif untuk menjadi bahan perdebatan publik termasuk dalam kehidupan warga Kota Samarinda. Tingginya primordialisme warga tampak pada fakta bahwa warga suku asli

berupaya mempertahankan adat-istiadat dan hukum adat agar juga dihargai para pendatang. Sebaliknya, warga pendatang juga memiliki primordialisme yang begitu tinggi dalam mempertahankan adat istiadatnya.

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Kota Samarinda cukup banyak dan beragam. Faktanya, terdapat nama organisasi kemasyarakatan yang menggunakan nama yang mengesankan konfrontatif. Ormas-ormas itu pun mengidentikkan diri dengan suku-suku tertentu. Menonjolnya ormas-ormas kesukuan menambah potensi konflik sosial yang dapat terjadi di Kota Samarinda. Terjadinya gesekan antar ormas dapat merambat pada gesekan antar suku. Kasus pertanahan juga bisa memicu konflik yang beririsan dengan aktivitas keagamaan, apabila tidak segera mengambil langkah cepat bisa menimbulkan potensi gesekan sosial yang lebih luas.

Tabel 2.72
Jumlah Unjuk Rasa Kota Samarinda Tahun 2024

NO	URAIAN	2024	SATUAN
1	POLITIK	18	KASUS
2	EKONOMI	18	KASUS
3	SOSIAL	16	KASUS
4	BUDAYA	2	KASUS
5	HUKUM	5	KASUS
6	AGAMA	0	KASUS
7	PENDIDIKAN	2	KASUS
	JUMLAH DEMONSTRASI UNJUK RASA	**1.905**	**ORANG**
	TOTAL	**61**	**KASUS**

Sumber : Kesbangpol Kota Samarinda Tahun 2024

Dari Table 2.71 bisa dilihat Kota Samarinda di tahun 2024 tidak terjadi konflik bernuansa SARA hal ini menunjukan keberhasilan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjaga kondusifitas di wilayah Kota Samarinda. Potensi konflik yang ada berhasil diatasi dengan sosialisasi dan tindakan preventif lainnya. Meskipun begitu untuk menjaga situasi kondusif diperlukan langkah yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Adapun konflik yang terjadi lebih kepada aksi unjuk rasa.

Pemetaan daerah rawan bencana sosial harus terus dilaksanakan dan menjadi perhatian serius. Sehingga isu-isu yang berkembang bisa segera dinetralisir agar tidak membesar. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan pemetaan daerah rawan bencana sosial antara lain teridentifikasinya faktor-faktor penyebab bencana atau konflik sosial untuk dapat diredam sedini mungkin.

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang mengukur pencapaian perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya di suatu wilayah yang mencakup Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPA digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anak serta menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan di masa depan.

Tabel 2.73
Indeks Perlindungan Anak Kota Samarinda
Tahun 2022 dan 2023

No.	Indeks	Tahun	
		2022	2023
1	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60,38	60,08
2	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	84,79	78,42
3	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**65,21**	**62,75**

Sumber: Kemen PPPA

Indeks Perlindungan Anak secara keseluruhan di Kota Samarinda mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan umum terhadap anak-anak sedikit menurun dari tahun 2022 ke 2023. Penurunan ini bisa mencakup berbagai aspek seperti keselamatan anak, pencegahan kekerasan, atau lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Meskipun penurunannya relatif kecil dibandingkan IPA dan IPKA, penurunan pada IPHA tetap mengindikasikan adanya sedikit kemunduran dalam pemenuhan hak-hak dasar anak di Samarinda. Hak-hak ini bisa mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, akta kelahiran, atau partisipasi. Penurunan yang minimal mungkin

menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak masih berjalan, namun ada area kecil yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Indeks Perlindungan Khusus Anak mengalami penurunan yang paling signifikan. Ini adalah area yang paling mengkhawatirkan. Perlindungan khusus anak merujuk pada upaya perlindungan bagi anak-anak dalam situasi rentan, seperti anak korban kekerasan, anak dalam konflik hukum, anak penyandang disabilitas, atau anak yang memerlukan penanganan khusus lainnya. Penurunan yang drastis ini menunjukkan bahwa ada tantangan besar atau penurunan efektivitas dalam penanganan dan perlindungan anak-anak yang paling rentan di Kota Samarinda.

b. Indeks Kualitas Keluarga (iBANGGA)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah sebuah ukuran komprehensif yang dikembangkan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan keluarga di Indonesia, merefleksikan kualitas keluarga melalui tiga dimensi utama: Ketenteraman, Kemandirian, dan Kebahagiaan, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga secara keseluruhan. Indikator ini sangat penting sebagai dasar bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Gambar 2.48
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Samarinda Tahun 2021-2024

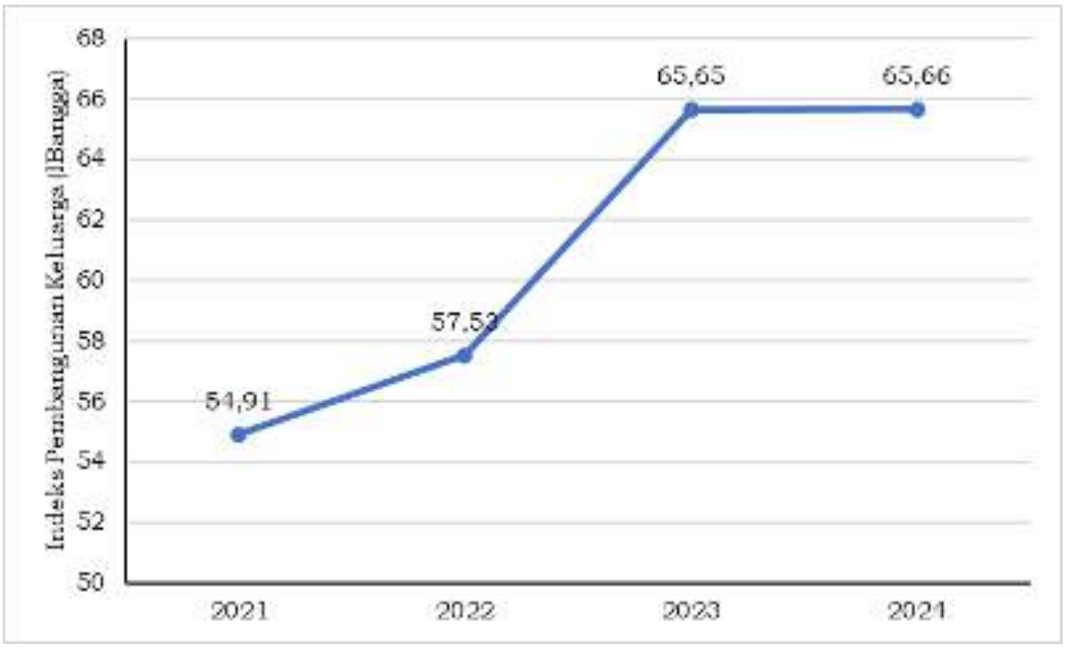

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, 2025

Grafik Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Samarinda menunjukkan tren yang umumnya positif dari tahun 2021 hingga 2024. Lonjakan paling signifikan terjadi antara tahun 2022 dan 2023, di mana Indeks Pembangunan Keluarga Kota Samarinda melonjak tajam hingga menyentuh angka 65,65 persen. Peningkatan drastis ini mengindikasikan adanya efektivitas yang kuat dari program-program pembangunan keluarga yang dijalankan atau perbaikan kondisi sosial ekonomi yang mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga di Kota Samarinda dalam rentang waktu tersebut.

Meskipun demikian, tren peningkatan yang pesat ini menunjukkan fase stagnasi pada periode selanjutnya. Dari tahun 2023 hingga 2024, nilai Indeks Pembangunan Keluarga Kota Samarinda tetap stabil di angka 65,66. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kota Samarinda telah berhasil mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan keluarga hingga tahun 2023. Namun, keberlanjutan kemajuan ini di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk menganalisis penyebab stagnasi dan merumuskan kebijakan yang adaptif dan proaktif guna mendorong Indeks Pembangunan Keluarga mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi.

c. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna antara laki-laki dan perempuan, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan gender yang paling besar. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan gender dalam pembangunan.

Gambar 2.49
Indeks Ketimpangan Gender Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

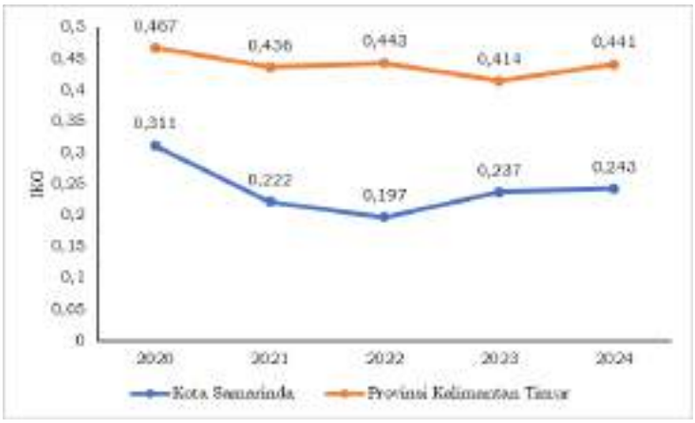

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Berdasarkan Gambar 2.50 diketahui bahwa Indeks Ketimpangan Gender Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus cenderung mengalami penurunan, dari yang semula 0,311 di tahun 2020 turun menjadi hanya 0,243 di tahun 2024. Pada tahun 2024, IKG Kota Samarinda mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,006 poin. Selama kurun waktu tersebut juga nilai Indeks Ketimpangan Gender Kota Samarinda selalu berada dibawah nilai Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil pembangunan yang berperspektif gender digambarkan dengan beberapa indikator diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender atau IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Index* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. IPG digunakan untuk melengkapi penghitungan Sementara IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Gambar 2.50
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

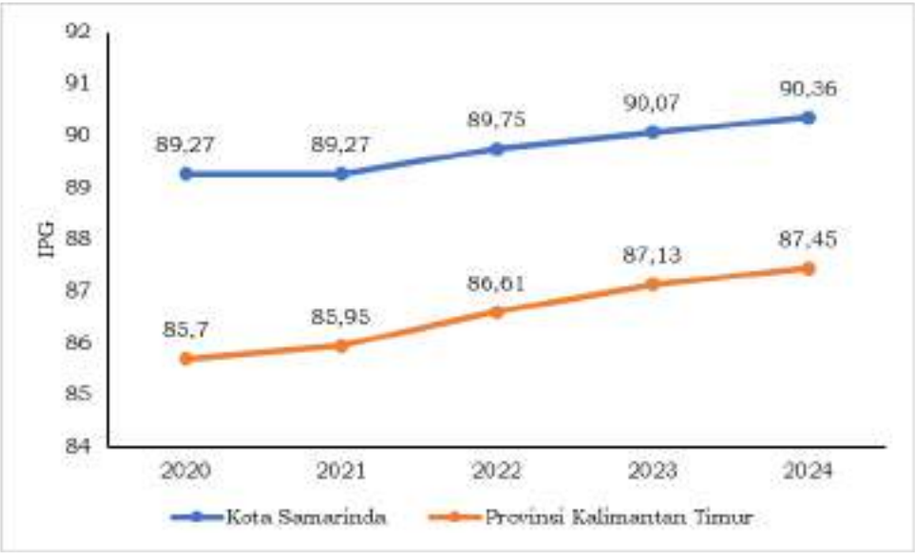

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Berdasarkan Gambar 2.51, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Samarinda sejak tahun 2020 hingga 2024 memiliki trend yang meningkat. Pada tahun 2020 IPG Kota Samarinda sebesar 89,27, mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 90,36. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 IPG Kota Samarinda selalu di atas angka Provinsi Kalimantan Timur. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Gambar 2.51
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024

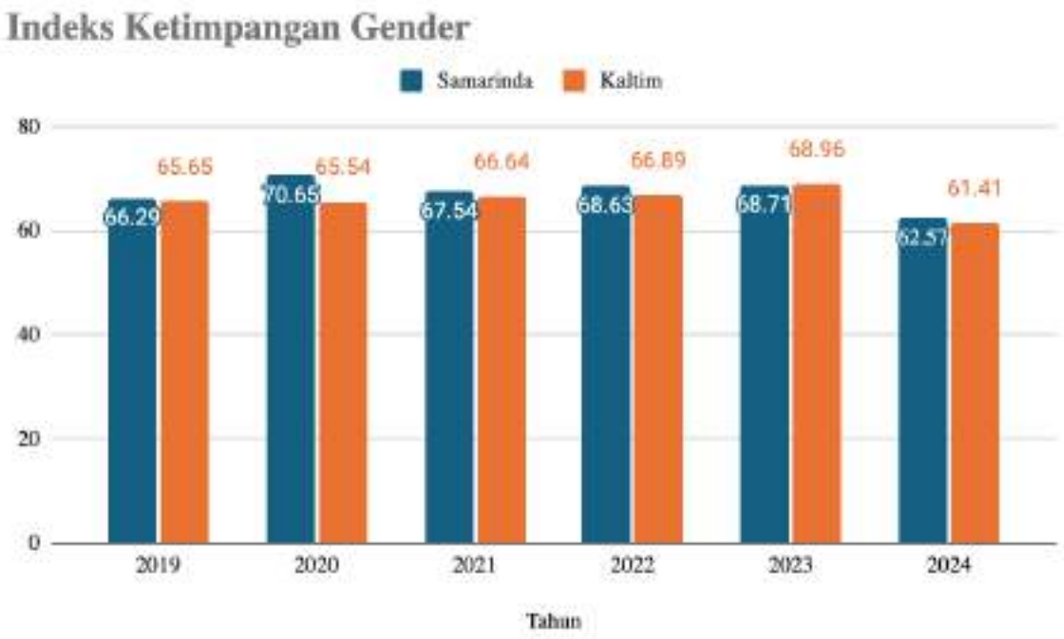

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Samarinda sejak tahun 2019 hingga 2023 memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 IPG Kota Samarinda sebesar 66,29, meningkat di tahun 2020 menjadi 70,65, menurun di tahun 2021 menjadi 67,54, kemudian mengalami kenaikan kembali hingga tahun 2023 mencapai 68,71. Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 IDG Kota Samarinda selalu di atas angka Provinsi Kalimantan Timur. Namun di tahun 2023 IDG Kota Samarinda berada sedikit di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur dengan selisih 0,25. IDG Kota Samarinda di angka 68,71, sedangkan IDG Provinsi Kalimantan Timur di angka 68,96.

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Peran pemuda sangat menentukan kelancaran dan kondusifitas pembangunan di Kota Samarinda. Semakin banyak pemuda yang aktif dan berprestasi maka semakin mudah pembangunan dilaksanakan, karena terdapat akselerator yang mendorong tercapainya tujuan pembangunan tersebut. Kondisi ini terlihat di Kota Samarinda, dimana terdapat 146 organisasi kepemudaan yang terbagi ke dalam 16 organisasi politik, 5 organisasi olahraga, 3 organisasi ekonomi, dan 122 organisasi sosial. Semakin banyak program kepemudaan dan tingginya

keterlibatan pemuda dalam pembangunan baik melalui organisasi maupun relawan, akan meningkatkan indeks pembangunan pemuda. Indeks pembangunan pemuda mulai dilakukan penghitungan secara mandiri oleh pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2023 yang menghasilkan nilai 61,17 poin dan dilakukan kembali tahun 2024 yang menghasilkan nilai 63,00 poin. Meskipun masih jauh dari angka maksimal, namun adanya indeks pembangunan pemuda menunjukkan keberanian pemerintah Kota Samarinda untuk mengukur capaian pembangunan pemuda secara kuantitatif. Secara lengkap perhatikan tabel berikut:

Tabel 2.74
Capaian Pembangunan Pemuda Kota Samarinda

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Organisasi bidang politik	16	16	16	-	16
2	Organisasi bidang olahraga	5	5	5	5	5
3	Organisasi bidang ekonomi	3	3	3	-	3
4	Organisasi bidang sosial	122	122	122	-	122
5	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	23,66 poin	35 poin	61,17 Poin	63,00 poin

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

Khusus pembangunan bidang olahraga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda difokuskan pada meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga baik secara mandiri maupun memanfaatkan fasilitas umum yang telah dibangun. Peningkatan minat masyarakat dapat terlihat dengan semakin tingginya pembinaan olahraga usia muda yang mencapai 63 orang pada tahun 2022. Tidak hanya itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga terlihat dengan semakin banyaknya gedung olahraga di Kota Samarinda yang mencapai 26 gedung pada tahun 2022. Secara lengkap perhatikan tabel berikut:

Tabel 2.75
Perkembangan Prestasi Olahraga Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah gedung olahraga	9 gedung	9 gedung	26 gedung	9 gedung	9 gedung
2	Cakupan pembinaan olahraga	56 cabor	56 cabor	63 cabor	70 cabor	70 cabor
3	Cakupan pembinaan atlet muda	40 orang	40 orang	64 orang	70 orang	70 orang
4	Jumlah prestasi olahraga	-	16 cabor	20 cabor	20 cabor	20 cabor
5	Persentase perolehan medali	-	50	51,3	51,3	

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

Tersedianya berbagai fasilitas dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda melahirkan berbagai prestasi bidang olahraga yang diraih oleh atlet asal Samarinda, baik yang mewakili kota, provinsi maupun nasional. Pada tahun 2024 sebanyak 20 cabang olahraga (cabor) Kota Samarinda memperoleh prestasi. Sedangkan perolehan medali mencapai 50 persen pada tahun 2021 dan 51,3 persen pada tahun 2024.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara bukan angkatan kerja, yaitu penduduk umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan angkatan kerja, yaitu penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.76
Rasio Ketergantungan Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun (jiwa)	219.845	203.133	200.128	197.267	198.881	221.870
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun (jiwa)	29.541	39.164	41.379	43.718	47.547	39.513
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	249.386	242.297	241.507	240.985	246.428	261.383
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun (jiwa)	623.322	585.697	589.953	593.839	604.201	619.842
5	Rasio ketergantungan (3)/(4) kali 100 (%)	40,01	41,37	40,94	40,58	40,79	42,16

Sumber: data diolah oleh wali data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda,2025

Rasio ketergantungan di Kota Samarinda sangat fluktuatif sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 tetapi berada di bawah 50%. Dimana pada tahun 2019 rasio ketergantungan di Kota Samarinda yaitu mencapai 40,01% dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 41,37%. Namun pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan hingga menjadi 40,79% di tahun 2023. Pada tahun 2024 rasio ketergantungan di Kota Samarinda sebesar 42,16% dimana terdapat usia produktif sebanyak 619.842 jiwa dan usia tidak produktif sebanyak 261.383 jiwa. Angka sebesar 42,16% dapat diartikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung (mempunyai tanggungan) sebanyak 42-43 orang usia belum produktif atau usia yang tidak produktif lagi.

b. Indeks profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan mempertimbangkan empat dimensi utama, masing-masing memiliki bobot tertentu dalam perhitungannya. Dimensi kualifikasi memiliki bobot 25 persen, yang menilai jenjang pendidikan formal terakhir ASN mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi S-3. Dimensi kompetensi mendapatkan bobot terbesar, yaitu 40 persen, yang

mengukur riwayat pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai latihan seperti diklat kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan teknis, seminar, dan workshop dalam dua tahun terakhir. Dimensi kinerja memiliki bobot 30 persen dan diukur melalui hasil penilaian kinerja pegawai seperti Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), perilaku kerja, capaian target, hasil, serta manfaat yang diberikan kepada organisasi. Terakhir, dimensi disiplin yang berbobot 5 persen dinilai berdasarkan ada atau tidaknya hukuman disiplin yang pernah diterima ASN dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Indeks Profesionalitas ASN Kota Samarinda hingga penarikan penilaian tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan, dari kategori rendah menjadi berada pada tahap sedang. Pemerintah Kota Samarinda melalui BKPSDM Kota Samarinda terus mengupayakan peningkatan agar dapat mencapai posisi kategori tinggi. Pada tahun 2024, nilai rata-rata IP ASN untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah 5.677 orang mencapai 80,38 yang masuk dalam kategori sedang. Rincian capaian per dimensi adalah kualifikasi sebesar 21,13, kompetensi 29,25, kinerja 25,01, dan disiplin 5. Sementara itu, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah 1.107 orang pada tahun 2024 memperoleh nilai rata-rata 81,02 yang masuk kategori tinggi, dengan rincian dimensi kualifikasi sebesar 20, kompetensi 30,22, kinerja 25,87, dan disiplin 5.

Tabel 2.77
Indeks Profesionalitas ASN 2024

Penilaian IP ASN	Dimensi				Rata-Rata Nilai	Kategori	Jumlah ASN
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin			
ASN PNS	21,13	29,25	25,01	5	80,38	Sedang	5.677
ASN PPPK	20	30,22	25,87	5	81,02	Tinggi	1.107

Sumber: BKPSDM Kota Samarinda 2025

2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Pada tahun 2020 kontribusi industri pengolahan masih berada pada angka 7,72 persen, sedangkan pada tahun 2024 menjadi 6,89 persen. Penurunan kontribusi ini menandakan bahwa terdapat sektor lain yang mampu tumbuh konsisten dan lebih tinggi sehingga secara

perlahan menggeser kontribusi industri dalam perekonomian Kota Samarinda.

Tabel 2.78
Rasio dan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Kota Samarinda Terhadap PDRB Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Distribusi PDRB (%)	7,72	7,47	6,92	6,83	6,89
2	Laju Pertumbuhan (%)	-3,97	1,48	4,98	2,96	6,75

Sumber: Kota Samarinda dalam Angka 2025

Laju pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,79 poin.

Tabel 2.79
Jenis Industri Tahun 2020-2024 Kota Samarinda

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Agro Industri dan Aneka					
	Unit	729	1.391	1.706	2.269	2.522
	Tenaga Kerja	4.509	5.171	5.304	6.534	7.168
2	Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, dan Elektronika					
	Unit	1.099	1.101	1.037	763	798
	Tenaga Kerja	7.115	4.031	4.051	4.898	5.399
3	Industri Hasil Hutan					
	Unit	544	546	428	493	524
	Tenaga Kerja	4.623	4.632	4.642	4.789	6.067

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Penurunan kontribusi industri dalam perekonomian justru tidak terlihat pada jumlah industri yang ada di Kota Samarinda. Peningkatan jumlah industri beserta penyerapan tenaga kerjanya terlihat dalam kurun waktu 2018-2022. Pada tahun 2018 jumlah industri mencapai 1.321 buah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 13.933 orang, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.372 buah dan menyerap 16.629 orang tenaga kerja. Penurunan jumlah industri dan tenaga kerja terjadi pada tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kondisi tersebut bertahan hingga tahun 2022, dimana

industri yang beroperasi sebanyak 1.801 dengan jumlah tenaga kerja tinggal 3.861 orang. Dari trend Data tersebut membuktikan bahwa peningkatan jumlah industri dan penyerapan tenaga kerja dari sektor industri masih belum mampu meningkatkan nilai tambah dari hasil diproduksi sektor ini, sehingga jumlah tersebut belum mampu mendorong kontribusi sektor industri dalam perekonomian Kota Samarinda. Sehingga kedepannya perlu dilakukan identifikasi komoditi unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat, dan mengarahkan sektor industri kepada komoditi tersebut.

b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk penyediaan akomodasi, makan, dan minum merupakan bagian penting dari PDRB suatu daerah. Penyediaan akomodasi dan layanan makanan (hotel, restoran, cafe, dll) memiliki peran penting dalam perekonomian karena mendukung pariwisata, mobilitas, dan konsumsi masyarakat.

Tabel 2.80
Rasio dan Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kota Samarinda Terhadap PDRB
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PDRB (%)	4,04	3,92	3,79	3,99	4,16
2	Laju Pertumbuhan (%)	-3,74	2,00	9,59	9,13	11,97

Sumber: Kota Samarinda dalam Angka 2025

Rasio PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk penyediaan akomodasi, makan, dan minum Kota Samarinda selama lima tahun terakhir berfluktuasi dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,17 poin. Laju pertumbuhan PDRB sektor tersebut cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun, 2020-2024 yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif, perubahan gaya hidup, dan peran sektor jasa yang semakin penting di Kota Samarinda.

c. Pariwisata

Kota Samarinda yang telah dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan tentunya masih perlu memaksimalkan sektor pariwisata. Berbekal sebagai kota jasa dan perdagangan, jumlah kunjungan ke

Kota Samarinda tahun 2020 mencapai 283.809 orang yang terdiri atas mancanegara sebanyak 213 orang dan nusantara 283.596 orang. ketika awal pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan secara drastis menjadi 283.809 kunjungan atau turun 77,32% dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan di beberapa sektor yaitu, investasi sektor perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, tahun 2021 menjadi awal Kota Samarinda untuk membuktikan ketangguhan daerah dalam menghadapi COVID-19, dan kembali meningkatkan kunjungan wisatawan. Di tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan, kemudian di tahun 2024 meningkat kembali menjadi 1.147.027 kunjungan yang terdiri dari 7.454 wisatawan mancanegara dan 1.140.027 wisatawan nusantara.

Tabel 2.81
Data Kunjungan Wisatawan Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (Orang)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mancanegara	213	3	11	6572	7.454
2	Nusantara	283.596	896.613	488.489	1.018.786	1.140.027
Jumlah		**283.809**	**896.616**	**488.500**	**1.025.358**	**1.147.027**

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dan Kota Samarinda dalam Angka 2024

Kota Samarinda memiliki potensi pariwisata yang meliputi destinasi buatan, alam, dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Destinasi buatan seperti Salma Shofa, Mahakam Lampion Garden, Rumah Ulin Arya, Jungle Water World, Citraland Waterpark, hingga Teras Langit berfungsi sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pusat ekonomi kreatif masyarakat. Pada sektor alam, daya tarik wisata Sungai Mahakam menjadi ikon utama dengan keberadaan Kapal Pesut Bentong, Kapal Enggang Borneo, Phinisi Bejalanan, hingga Puncak Samarinda yang memadukan panorama indah dan wisata berbasis transportasi air. Sementara itu, destinasi budaya seperti Islamic Center, Masjid Shiratal Mustaqim, Buddhist Centre, Klenteng Thien Ie Kong, Desa Budaya Pampang, dan Kampung Tenun berperan penting dalam pelestarian tradisi, sejarah, dan identitas daerah, sekaligus menjadi daya tarik wisatawan. Dengan pengelolaan yang terarah, sektor pariwisata

diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat citra Kota Samarinda di tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 2.82
Daftar Tempat Wisata Kota Samarinda

NO	NAMA DESTINASI KOTA SAMARINDA		
	DESTINASI BUATAN	DESTINASI ALAM	DESTINASI BUDAYA
1	Salma Shofa	Kapal Pesut Bentong	Islamic Center
2	Mahakam Lampion Garden	Kapal Pesut Kita	Masjid Shiratal Mustaqim
3	Rumah Ulin Arya	Kapal Enggang Borneo	Buddhist Centre
4	Jungle Water World	Kapal Silaq Maran	Klenteng Thien Ie Kong
5	Citraland Waterpark	Kapal Pesut Mahakam	Desa Budaya Pampang
6	Pemandian Serayu Lestari	Kapal Pesut Mahkota	Kampung Tenun
7	Pemancingan Jukut Etam	Phinisi Bejalanan	
8	Bumi Sempaja Waterpark	Tebing Lonceng	
9	Jessica Waterpark	Puncak Samarinda	
10	Kampung Ketupat		
11	Nauren Mini Garden		
12	Kebun Desa		
13	Wonderlan Samarinda		
14	Kayyisa Samarinda		
15	Museum Samarinda		
16	Citra Niaga		
17	Tjius Palace		
18	Teras Langit		

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dan Kota Samarinda

Dominasi kunjungan wisata ke Kota Samarinda dilakukan terbanyak pada wisata religi, wisata buatan, dan wisata belanja dengan proporsi masing-masing 61 persen, 25 persen, dan 6 persen. Perhatikan gambar berikut:

Gambar 2.52
Proporsi kunjungan wisatawan domestik per objek wisata Kota Samarinda

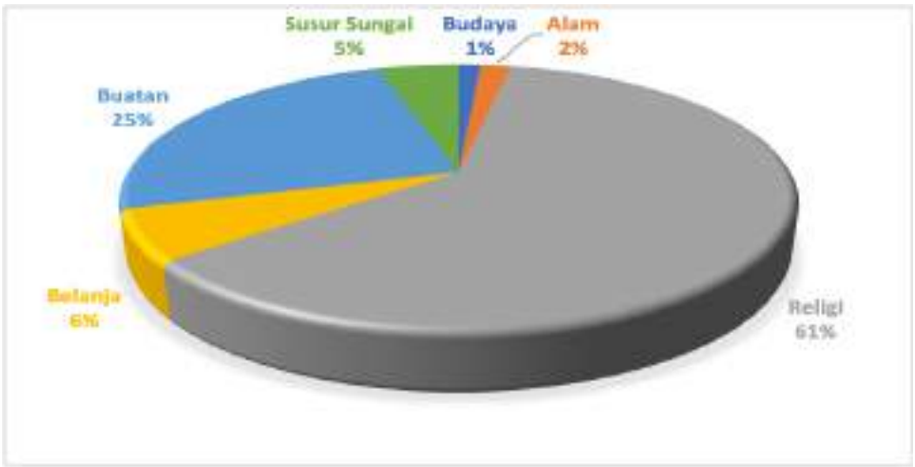

(Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda)

Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, pengelola taman wisata perlu berfokus pada peningkatan kualitas daya tarik dan fasilitas, serta memperbaiki aksesibilitas dan memanfaatkan strategi pemasaran yang tepat.

d. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah adalah perbandingan jumlah pelaku usaha atau wirausaha di suatu wilayah terhadap total jumlah penduduk atau angkatan kerja di wilayah tersebut. Rasio ini sering digunakan sebagai indikator tingkat perkembangan kewirausahaan dan daya saing ekonomi di suatu daerah.

Gambar 2.53
Rasio kewirausahaan daerah Kota Samarinda tahun 2019-2023

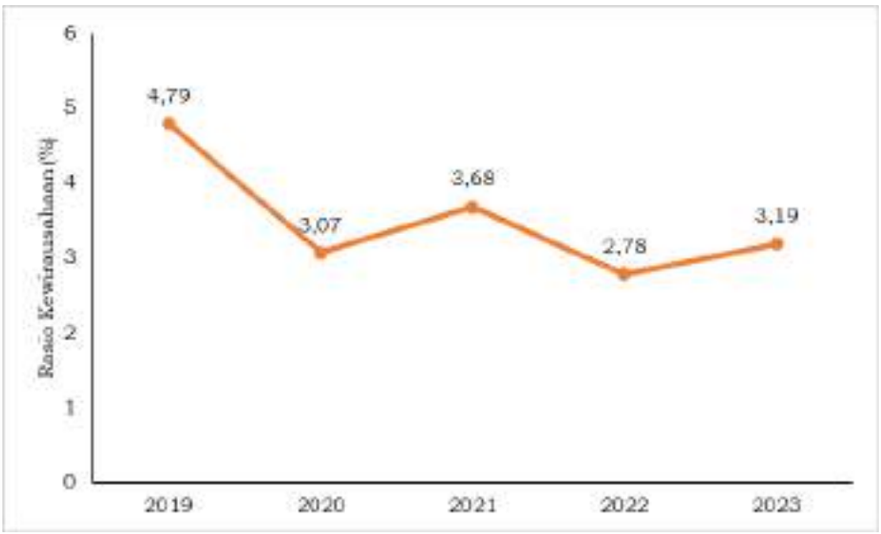

(Sumber: *Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda)*

Rasio kewirausahaan daerah Kota Samarinda berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 4,79 persen menjadi 3,19 persen pada tahun 2023. Rasio kewirausahaan di daerah Kota Samarinda relatif tinggi jika dibandingkan dengan capaian rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,47 persen, terutama karena pertumbuhan sektor UMKM yang signifikan. Sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di Kota Samarinda, dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) dan menyerap tenaga kerja. Rasio kewirausahaan di Kota Samarinda menunjukkan potensi yang besar untuk terus berkembang. Dengan dukungan pemerintah, peningkatan akses modal, serta pelatihan bagi pelaku UMKM, diharapkan rasio kewirausahaan di Kota Samarinda dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja dibanding penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK mampu menggambarkan persentase usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.83
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (Orang)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Angkatan Kerja**	**429.093**	**428.395**	**424.229**	**428.519**	**434.821**
	Bekerja	393.670	393.454	395.479	403.138	409.833
	Pengangguran Terbuka	35.423	34.941	28.750	25.381	24.988
2	**Bukan Angkatan Kerja**	**229.432**	**237.979**	**249.607**	**225.843**	**228.983**
	Sekolah	61.900	61.692	67.741	69.459	61.329
	Mengurus RT	141.834	147.251	152.252	128.564	135.123
	Lainnya	25.698	29.036	29.614	27.820	32.531
Jumlah		**654.968**	**666.374**	**673.836**	**654.362**	**663,804**
3	**TPAK**	**65,16**	**64,29**	**62,96**	**65,49**	**65,50**
4	**TPT**	**8,25**	**8,16**	**6,78**	**5,92**	**5,75**

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2025

Jumlah angkatan kerja di Kota Samarinda pada tahun 2024 sebanyak 434.821 orang, sedangkan 228.983 orang lainnya bukan angkatan kerja, sehingga TPAK Kota Samarinda tahun 2024 sebesar 65,50 persen artinya lebih 65 persen penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas di Kota Samarinda aktif secara ekonomi. Kondisi ini tentunya sangat bagus untuk mendukung iklim investasi, karena lebih 50% usia produktif di Kota Samarinda terlibat aktif memproduksi barang dan jasa dalam mendukung perekonomian daerah.

f. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. IID mengukur tingkat inovasi berdasarkan urusan dan kewenangan daerah, serta menjadi acuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang inovatif.

Gambar 2.54
Indeks Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2024

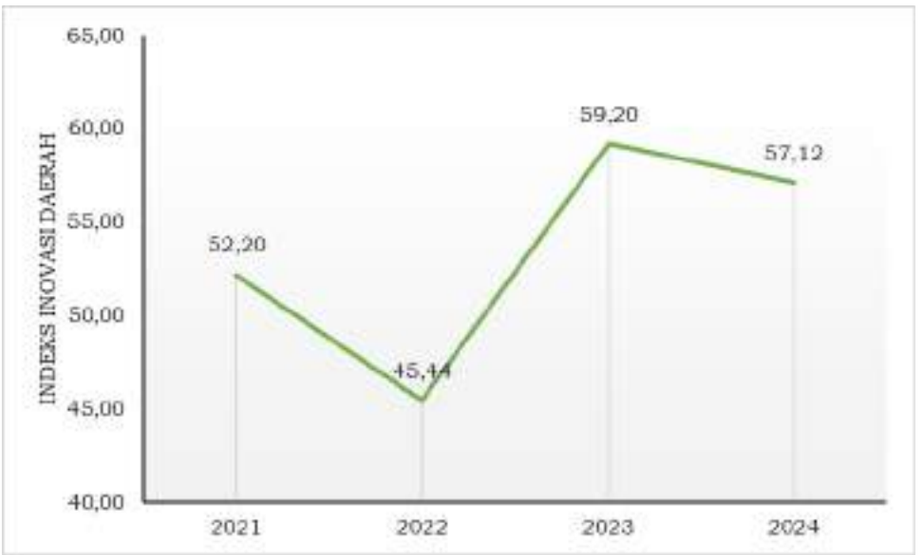

(Sumber: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kemendagri, 2025)

Selama tahun 2021 hingga tahun 2024, indeks inovasi daerah Kota Samarinda cenderung mengalami peningkatan. Capaian indeks inovasi daerah Kota Samarinda pada tahun 2024 sebesar 57,12 yang artinya Kota Samarinda masuk dalam kategori kota yang inovatif. Namun, capaian tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2,08 poin. Penurunan tersebut disebabkan oleh kurang

optimalnya pelaporan inovasi oleh pemerintah daerah dan kurangnya tingkat kematangan (kualitas) inovasi. Inovasi yang dilaporkan kurang didukung oleh data yang valid dan bukti yang jelas, bahkan ada beberapa inovasi yang tidak melakukan input dokumen yang menyebabkan inovasi terkait tidak dapat dinilai. Dari 20 Indikator Evaluasi, Indikator Kemanfaatan Inovasi dan Indikator Monitoring Evaluasi Daerah merupakan indikator yang capaiannya masih rendah sehingga perlu upaya memperbaikinya sehingga bisa meningkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Samarinda.

Sebagian besar Perangkat Daerah (PD) di Samarinda memiliki inovasi dan kesadaran untuk melaporkan inovasi juga meningkat. Kota Samarinda menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan inovasi daerah. Sinergi antara berbagai pihak, termasuk Perangkat Daerah, diperlukan untuk meningkatkan indeks inovasi daerah.

3. Transformasi Digital

a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di tengah pesatnya transformasi global, kemampuan suatu daerah dalam mengadopsi dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan. Bukan lagi sekadar alat bantu, TIK kini telah menjadi pendorong utama produktivitas, efisiensi layanan publik, inovasi sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Kota-kota yang adaptif terhadap perkembangan digital memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup warganya.

Tabel 2.84
Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan TIK
Kota Samarinda Prov Kalimantan Timur dan Nasional

Wilayah	TAHUN			
	Akses dan infrastruktur TIK	Penggunaan TIK	Keahlian TIK	IPTIK
Kota Samarinda	6,92	7,29	8,08	7,3
Kalimanatan Timur	6,62	6,66	6,74	6,66
Nasional	5,81	5,91	6,04	5,9

Sumber : Diskominfo Kota Samarinda

Kita Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan langkah signifikan dalam mengakselerasi transformasi digital di berbagai sektor. Pemanfaatan teknologi di lingkungan pemerintahan, sektor swasta, pendidikan, hingga masyarakat umum terus mengalami peningkatan. Untuk melihat sejauh mana perkembangan tersebut berlangsung, pengukuran Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) menjadi instrumen penting. Indeks ini tidak hanya menggambarkan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga mencerminkan keterampilan dan intensitas penggunaan teknologi di tengah masyarakat.

Pada tahun 2023, IPTIK Kota Samarinda mencatat skor 7,30 lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Kalimantan Timur (6,67) dan nasional (5,92). Capaian ini menunjukkan bahwa Samarinda telah memiliki fondasi digital yang solid serta kapasitas masyarakat yang terus berkembang dalam memanfaatkan TIK. Tiga dimensi utama IPTIK yang meliputi akses dan infrastruktur, penggunaan, serta keahlian, menjadi tolok ukur dalam mengidentifikasi kekuatan dan potensi digital kota ini.

Secara rinci, aspek akses dan infrastruktur mencatat skor 6,92, yang menggambarkan semakin meratanya ketersediaan jaringan internet, kepemilikan perangkat digital, dan pembangunan fasilitas penunjang TIK di seluruh wilayah. Pada dimensi penggunaan TIK, Samarinda memperoleh nilai 7,29, menandakan tingginya intensitas penggunaan teknologi oleh masyarakat, pelaku usaha, serta layanan pemerintahan yang terus bergerak menuju digitalisasi.

Namun keunggulan paling menonjol terlihat pada dimensi keahlian TIK, dengan skor 8,08 tertinggi dibandingkan provinsi maupun nasional. Capaian ini mencerminkan kapasitas literasi digital masyarakat Samarinda yang semakin kuat, mulai dari keterampilan dasar penggunaan perangkat hingga kemampuan mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi digital secara produktif.

Keberhasilan ini memberikan optimisme bahwa Samarinda berada pada jalur yang tepat dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor pendidikan, dan dunia usaha, serta mengurangi kesenjangan

digital, kota ini memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan digital di Indonesia.

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun, yang tidak termasuk barang konsumsi. PMTB mencakup investasi dalam aset tetap, seperti bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan, yang digunakan untuk produksi. Dengan kata lain, PMTB menunjukkan seberapa besar nilai tambah baru dalam perekonomian diinvestasikan daripada dikonsumsi.

Tabel 2.85
Rasio dan Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Samarinda Terhadap PDRB Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PDRB (%)	41,03	41,38	42,39	46,91	47,86
2	Laju Pertumbuhan (%)	-2,08	3,95	8,98	12,88	8,14

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2025

Kontribusi PMTB terhadap PDRB menurut pengeluaran untuk Kota Samarinda pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan PMTB di Kota Samarinda dipicu oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi di sektor energi, ekspor, dan berbagai lapangan usaha strategis, serta Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang meningkat.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor barang dan jasa (*net export of goods and services*) adalah selisih antara nilai total ekspor barang dan jasa suatu negara dengan nilai total impor barang dan jasa. Dengan kata lain, ini adalah jumlah selisih antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa ke negara lain dengan pengeluaran untuk membeli barang dan jasa dari negara lain. Net ekspor adalah salah satu indikator penting dalam ekonomi suatu negara. Nilai net ekspor dapat mempengaruhi neraca perdagangan, nilai tukar mata uang, dan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.55
Rasio Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Samarinda Terhadap PDRB
Tahun 2020–2024

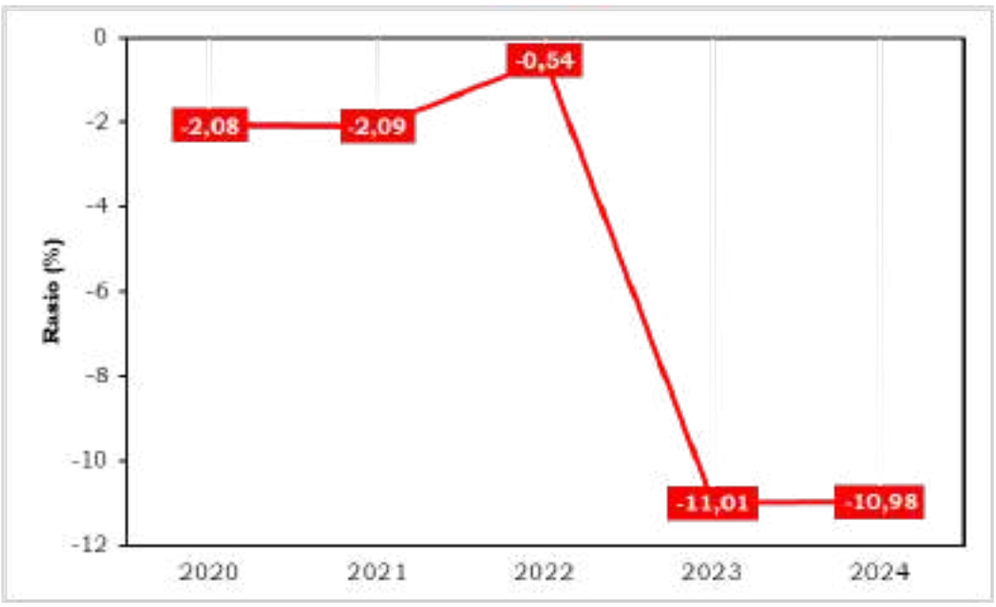

(Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2025)

Net ekspor barang dan jasa Kota Samarinda cenderung mengalami penurunan dan bernilai negatif (defisit perdagangan) yang menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan Kota Samarinda lebih banyak melakukan pembelian barang dan jasa daripada penjualannya.

6. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

1) Infrastruktur Jalan

Pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda yang semakin bertambah menyebabkan peningkatan pergerakan dan aktivitas orang, barang dan jasa. Salah satu infrastruktur utama dalam menunjang aktivitas manusia maupun aktivitas perekonomian adalah jalan. Keberadaan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta untuk menjamin kenyamanan aksesibilitas antar wilayah.

Kenaikan kemantapan jalan kota samarinda menunjukan peningkatan pada tahun 2021 sebesar 31,521 m kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,592 m dan dengan adanya terus perbaikan yang dilakukan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kondisi kemantapan jalan terus meningkat sampai tahun 2024 sebesar 0,661 m.

Tabel 2.86
Kemantapan Jalan Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (km)

No.	Kemantapan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan	881.302	881.302	881.302	881.302	881.302
2	Jalan Mantap	731.235	768.756	763.540	766.128	770.979
3	Persentase Kemantapan	82,972	87,230	86,638	86,931	87,482
4	Kondisi jalan					
	a. Baik	692,676	733,490	722,025	726,529	731,789
	b. Sedang	38,559	35,266	41,515	39,599	39,190
Kenaikan Kemantapan(m)		-	(+) 31,521	(-) 0,592	(+) 2,588	(+) 0,661

Sumber: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2. Kota Samarinda Dalam Angka 2023 dan 2024

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Wewenang penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Sedangkan jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.

Berikut Jalan Nasional dan Jalan provinsi yang ada di Kota Samarinda.

Tabel 2.87
Jalan Nasional Di Kota Samarinda

DAFTAR JALAN NASIONAL DI KOTA SAMARINDA		
NO.	**NAMA RUAS**	**PANJANG RUAS (KM)**
1	Jalan Rifadin	6,75
2	Jalan KH. Harun Nafsi	4,79
3	Jalan Bung Tomo (Akses Terminal Samarinda Seberang)	2,65
4	Jalan Sultan Hasanuddin (Akses Terminal Samarinda Seberang)	1,00
5	Jalan Jembatan Mahakam	0,61
6	Jalan Slamet Riyadi	2,70
7	Jalan RE. Martadinata	1,00
8	Jalan Gajah Mada	1,57
9	Jalan Yos Sudarso (Jalan ke pelabuhan Samarinda)	1,03
10	Simpang 3 Lempake - Batas Kabupaten Kutai Kartanegara	16,30
11	Jalan Antasari	1,80
12	Jalan Juanda	2,10
13	Jalan AW. Syahrani	3,73
14	Jalan D.I. Panjaitan	2,50
15	Jalan M.Noor	2,88
16	Batas Kota Samarinda - Simpang 3 Sambera	5,60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Tabel 2.88
Jalan Provinsi Di Kota Samarinda

DAFTAR JALAN PROVINSI DI KOTA SAMARINDA		
NO.	**NAMA RUAS**	**PANJANG RUAS (KM)**
1	Jalan Gunung Kinibalu I	0,12
2	Jalan Jenderal Sudirman II	0,27
3	Jalan Awang Long I	0,44
4	Jalan Tengkawang	0,58
5	Jalan pangeran Suryanata	9,16
6	Jalan MT. Haryono	2,57
7	Jalan Teuku Umar	3,96
8	Jalan Untung Suropati	1,46
9	Jalan KH. Mas Mansyur	2,93
10	Jalan K.H Hasyim Ashari	0,47
11	Jalan Hartati	0,70
12	Jalan Teluk Ambulung	0,42
13	Jalan Teratai	0,65
14	Jalan Jembatan Mahakam Ulu	1,47
15	Jalan Stadion Palaran	1,68
16	Jalan Lingkar Stadion Palaran	3,38
17	Jalan Simpang Pasir	4,87
18	Jalan APT. Pranoto	1,90
19	Jalan Cipto Mangunkusumo	9,53
20	Jalan Moeis Hasan	2,36
21	Jalan Kadrie Oening	1,79
22	Jalan R. Soeprapto	1,10
23	Jalan S. Parman	1,10
24	Jalan Ahmad Yani	2,00

25	Jalan D.I. Pandjaitan II	1,03
26	Simpang 3 Rapak Indah - Simpang 4 M. Said (Ring Road I	2,05
27	Jalan Nusyirwan Ismail (Ring Road II)	5,66
28	Jalan HM. Ardans (Ring Road III)	5,07
29	Jalan KH. Wahid Hasyim II	2,00
30	Jalan Batu Besaung	20,90

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Berdasarkan SK Walikota no. 622.3/228/HK-KS/IV/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kota Samarinda terdapat 1.364 ruas jalan di Kota Samarinda dengan panjang keseluruhan 881,302 km. Jalan nasional yang ada di Kota Samarinda terdiri dari 16 ruas jalan dengan panjang 57,01 km berarti 6,47 persen dari keseluruhan panjang jalan yang ada di Kota Samarinda. Untuk jalan provinsi terdapat 30 ruas jalan dengan panjang 91,62 km, 10,40 persen dari panjang jalan yang ada di Kota Samarinda.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. Jalan raya sangat penting bagi suatu wilayah, karena tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penghubung antar daerah yang memperlancar pergerakan barang dan jasa. Keberadaan jalan yang baik mampu membuka peluang ekonomi yang lebih besar dan memberikan dampak langsung pada peningkatan produktivitas serta kualitas hidup Masyarakat Kota samarinda. Infrastruktur jalan yang memadai dapat meningkatkan produktivitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan barang, serta memperlancar distribusi dan mobilitas. Pembangunan infrastruktur jalan juga mendukung kemudahan akses ke berbagai pasar, yang pada gilirannya menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat.

2) Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan data cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Samarinda dapat di sampaikan pada tabel berikut :

Tabel 2.89
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Tahun 2020-2024 Di Kota Samarinda

NO	Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)/Unit	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) /Unit	Prosentase
1	2020	142.043	119.396	22.647	84,06
2	2021	142.043	119.593	22.450	84,19
3	2022	142.043	119.933	22.110	84,43
4	2023	142.043	120.572	21.471	84,88
5	2024	142.043	121.169	20.874	85,30

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2024

Gambar 2.56
Grafik Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak DI Kota Samarinda Tahun 2024

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, Tahun 2024

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, menandakan bahwa selama periode 5 (lima) tahun terakhir Kota Samarinda mampu secara efektif menyediakan hunian yang layak. Hal ini terutama disebabkan keberhasilan pelaksanaan program Kawasan permukiman tahun 2020-2024 melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam rentang waktu tersebut, telah dilakukan perbaikan RTLH sejumlah 2.452 unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR), APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD kota dan DAK Integrasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak adalah permasalahan inkonsistensi data RTLH. Masalah lainnya adalah harga bahan baku dan upah pekerja yang relatif tinggi dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penanganan Kawasan kumuh merupakan upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dianggap tidak layak huni. Berdasarkan Permen PU No. 14/PER.Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, terdapat 7 aspek dan 16 variabel yang digunakan untuk mengukur Tingkat kekumuhan suatu wilayah. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, kekumuhan di Kota Samarinda utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan.

Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini melalui berbagai program lintas sektoral berupaya untuk meningkatkan akses hunian layak yang mengacu pada rumah yang memenuhi kriteria tertentu seperti kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, akses sanitasi layak, dan ketahanan bangunan. Hunian layak sangat penting karena mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup penghuninya melalui beberapa kegiatan antara lain:

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha Menyandang status sebagai ibukota provinsi, Kota Samarinda tentunya perlu mengalami perubahan fisik agar menjadi “rumah” yang nyaman bagi masyarakatnya. Program penanganan kawasan permukiman kumuh terus digalakkan, baik melalui APBD Kota Samarinda maupun pemerintah provinsi dan pusat.

Tabel 2.90
Luasan Permukiman Kumuh Kota Samarinda (Ha)
Tahun 2021-2024

Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kukuh Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat	Provinsi	Kota/ Kab
						(>15 Ha)	(10-15 Ha)	(<10 Ha)
TAHUN 2021								
SAMARINDA	SK Walikota Samarinda 66/404/HK-KS/XI/2020	Karang Mumus 1	Samarinda Ulu	Dadimulya	0,14	6,24		
			Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	0,70			
			Sungai Pinang	Temindung Permai	2,47			
			Sungai Pinang	Bandara	1,33			
			Samarinda Ilir	Pelita	1,60			
		Karang Mumus 2	Sungai Pinang	Temindung Permai	4,15		9,47	
			Samarinda Utara	Sempaja Selatan	5,32			
		Muara	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu	0,26			0,26
		Karang Asam	Sungai Kunjang	Karang Anyar	0,75			0,75
		Sungai Kapih	Samarinda Ilir	Selili	5,93		11,34	
			Sambutan	Sungai Kapih	5,41			
		Tenun	Samarinda Seberang	Tenun	5,72			5,72
		Simpang Tiga	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	5,85			5,85
		Steling	Samarinda Ilir	Sidomulyo	1,43	12,20		
			Samarinda Ilir	Sidodamai	3,64			
			Samarinda Ilir	Sungai Dama	7,13			
		Tinggiran	Samarinda Ulu	Air Putih	1,19			1,19
TOTAL LUASAN					53,02	18,44	20,81	13,77
TAHUN 2022								
SAMARINDA	SK Walikota Samarinda 663/404/HK-KS/XI/2020	Karang Mumus 1	Samarinda Ulu	Dadimulya	0,14	3,31		
			Samarinda Ulu	Sungai Pinang Luar	0,70			
			Samarinda Kota	Temindung Permai	0,37			
			Sungai Pinang	Bandara	0,5			
			Sungai Pinang	Pelita	1,60			
		Karang Mumus 2	Sungai Pinang	Temindung Permai	4,15		9,47	

Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kukuh Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat (>15 Ha)	Provinsi (10-15 Ha)	Kota/Kab (<10 Ha)
			Samarinda Utara	Sempaja Selatan	5,32			
		Muara	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu	0.26			0,26
		Karang Asam	Sungai Kunjang	Karang Anyar	0,75			0,75
		Sungai Kapih	Samarinda Ilir	Selili	5,93		11,34	
			Sambutan	Sungai Kapih	5,41			
		Tenun	Samarinda Seberang	Tenun	5,72			5,72
		Simpang Tiga	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	0,00			0,00
		Steling	Samarinda Ilir	Sidomulyo	1,43	10,47		
			Samarinda Ilir	Sidodamai	3,64			
			Samarinda Ilir	Sungai Dama	5,4			
		Tinggiran	Samarinda Ulu	Air Putih	1,19			1,19
TOTAL LUASAN					42,51	13,78	20,81	7,92
TAHUN 2023								
SAMARINDA	SK Walikota Samarinda 663/404/HK-KS/XI/2020	Karang Mumus 1	Samarinda Ulu	Dadimulya	0,14	2,24		
			Samarinda Ulu	Sungai Pinang Luar	0,70			
			Samarinda Kota	Temindung Permai	0,37			
			Sungai Pinang	Bandara	0			
			Sungai Pinang	Pelita	1,60			
		Karang Mumus 2	Sungai Pinang	Temindung Permai	4,15		9,47	
			Samarinda Utara	Sempaja Selatan	5,32			
		Muara	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu	0.26			0,26
		Karang Asam	Sungai Kunjang	Karang Anyar	0,75			0,75
		Sungai Kapih	Samarinda Ilir	Selili	5,93		11,34	
			Sambutan	Sungai Kapih	3,73			
		Tenun	Samarinda Seberang	Tenun	5,72			5,72
		Simpang Tiga	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	0,00			0,00
		Steling	Samarinda Ilir	Sidomulyo	1,43	8,25		
			Samarinda Ilir	Sidodamai	2,53			
			Samarinda Ilir	Sungai Dama	4,29			

Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kukuh Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat	Provinsi	Kota/ Kab
						(>15 Ha)	(10-15 Ha)	(<10 Ha)
		Tinggiran	Samarinda Ulu	Air Putih	0,00			0,00
TOTAL LUASAN					36,35	10,49	19,13	6,73

Tahun 2024								
KOTA	DASAR HUKUM	KAWASAN	LOKASI		LUAS PER-KELURAHAN (Ha)	LUAS KUMUH HASIL PENDATAAN BASELINE TAHUN 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No.14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat	Provinsi	Kota/Kab)
						(>15 Ha)	(10-15 Ha)	(<10 Ha)
SAMARINDA	SK Walikota Samarinda 663/404/HK-KS/XI/2020	Karang mumus 1	Samarinda Ulu	Dadimulya	0,00	0,60		
			Samarinda Ulu	Sungai Pinang Luar	0,00			
			Samarinda Kota	Temindung Permai	0,00			
			Sungai Pinang	Bandara	0,00			
			Sungai Pinang	Pelita	0,60			
		Karang Mumus 2	Sungai Pinang	Temindung Permai	0,68		3,07	
			Samarinda Utara	Sempaja Selatan	2,39			
		Muara	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu	0,26			0,26
		Karang Asam	Sungai Kunjang	Karang Anyar	0,75			0,75
		Sungai Kapih	Samarinda Ilir	Selili	5,93		7,51	
			Sambutan	Sungai Kapih	1,58			
		Tenun	Samarinda Seberang	Tenun	5,72			5,72
		Simpang Tiga	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	0,00			0,00
		Steling	Samarinda Ilir	Sidomulyo	1,43	8,25		
			Samarinda Ilir	Sidodamai	2,53			
			Samarinda Ilir	Sungai Dama	4,29			
		Tinggiran	Samarinda Ulu	Air Putih	0,00			0,00
TOTAL LUASAN					**26,16**	**8,85**	**10,58**	**6,73**

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di Samarinda untuk menangani Kawasan kumuh adalah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi,

kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Samarinda dibentuk sebagai salah satu upaya dalam mempercepat penangan masalah permukiman kumuh. Dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan terlihat adanya hasil yang positif dalam penurunan Kawasan permukiman kumuh di Samarinda. Tahun 2021 luasan Kawasan permukiman kumuh di Samarinda mencapai 53,02 ha yang lokasinya tersebar di 17 Kelurahan. Tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 42,51 hektar yang berada di 16 Kelurahan. Satu Kelurahan yang berhasil dituntaskan adalah Kelurahan Simpang Tiga. Tahun 2023 kawasan permukiman kumuh berhasil dikurangi menjadi tersisa seluas 36,35 ha yang berada di 14 Kelurahan. Terdapat 2 Kelurahan yang berhasil diselesaikan penanganan pemukiman kumuhnya yaitu Kelurahan Bandara dan Kelurahan Air Putih. Pada tahun 2024 berbagi upaya yang dilakukan berhasil menyelesaikan pemukiman kumuh di 3 Kelurahan dan mengurangi luasan Kawasan di wilayah lainnya. Sehingga yang semula kawasan permukiman kumuh tahun 2021 terdapat di 17 Kelurahan, tahun 2024 tersisa 11 Kelurahan.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, terdapat 9 kawasan permukiman kumuh yang menjadi fokus penyelesaian pemerintah Kota Samarinda, terutama kawasan yang berada di atas tanah negara atau secara hukum melanggar tata ruang. Meskipun belum mencapai target nasional, namun program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda menunjukkan hasil yang signifikan, terlihat dengan penurunan luasan permukiman kumuh dari 53,02 hektar pada tahun 2021 menjadi 26,16 hektar di tahun 2024. Oleh karena itu program penanganan kawasan kumuh yang telah berjalan masih terus dipertahankan guna menjadikan Kota Samarinda yang nyaman untuk dihuni.

Munculnya rumah tidak layak huni sendiri didasari atas ketidakmampuan seseorang untuk menyediakan sarana prasarana dasar yang layak untuk berdiam diri, bahkan beberapa kasus rumah tidak layak huni justru tidak memiliki legalitas yang kuat dikarenakan keberadaannya yang melanggar tata ruang. Namun penanganan

kawasan kumuh tidak bisa dipisahkan dari penanganan rumah tidak layak huni. Berbagai program pemerintah mulai dari pusat hingga pemerintah Kota Samarinda telah dilakukan guna mengurangi persentase rumah tidak layak huni.

Tabel 2.91
Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kota Samarinda

Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan hunian memiliki luas lantai ≥ 7,2 m2 per orang (Unit rumah tangga)	Jumlah Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis (Unit rumah tangga)	RTLH
Kec. Loa Janan Ilir	9,718.00	8,662	8,961	757
Kec. Palaran	12,876	9,858	10,800	2,076
Kec. Samarinda Ilir	12,664	10,378	10,868	1,796
Kec. Samarinda Kota	8,254	5,832	6,413	1,841
Kec. Samarinda Seberang	6,731	5,432	5,671	1,060
Kec. Samarinda Ulu	24,450	19,333	20,734	3,716
Kec. Samarinda Utara	12,531	9,614	10,543	1,988
Kec. Sambutan	9,255	7,776	7,839	1,416
Kec. Sungai Kunjang	25,712	19,840	21,586	4,126
Kec. Sungai Pinang	19,852	13,466	14,523	5,329
	142.043,00	110.191	117.938	24.105
			Data tambahan baru BNBA	2.400
				26.505

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda

Tabel 2.92
Kebutuhan Penghunian dan Kepemilikan Kota Samarinda

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah (Unit)	**142,043**	**156,787**	**157,872**	**157,903**	**215,349**	**215,349**
Jumlah Penduduk	**872,768**	**827,994**	**831,460**	**834,824**	**861,878**	**868,499**
Jumlah KK	**309,157**	**266,232**	**272,054**	**279,749**	**285,127**	**227,460**
Backlog Penghunian (Unit)	**167,114**	**109,445**	**114,182**	**121,846**	**69,778**	**12,111**
Backlog Kepemilikan (Unit)	**59,317**	**61,241**	**68,011**	**48,808**	**56,917**	**69,170**
Milik Sendiri (%)	58.24	60.94	56.92	69.09	73.57	67,88
Bukan Milik Sendiri (%)	41.76	39.06	43.08	30.91	26.43	32,12
Milik Sendiri (Unit)	82,726	95,546	89,861	109,095	158,432	146,179
Bukan Milik Sendiri (Unit)	59,317	61,241	68,011	48,808	56,917	69,170

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda

3) Sumber Daya Air

Daya dukung air di Kota samarinda dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup

kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan nondomestik.

Ketersediaan air di Kota Samarinda diperoleh melalui analisis ketersediaan air berbasis zona PDAM dan Air Tanah dan berbasis jasa ekosistem di Kota Samarinda. Daya dukung air di Kota Samarinda dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Hasil perhitungan ketersediaan air dapat dilihat pada tabel 2.92. Ketersediaan air terbesar dari seluruh kecamatan di Kota Samarinda dalam satu tahun terdapat di Kecamatan Samarinda Utara yaitu 21.642.394,89 m3. Sedangkan ketersediaan air terendah terdapat di Kecamatan Samarinda Kota sebesar 388.558,60 m3/tahun.

Total kebutuhan air di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 2.92, dimana Kecamatan Samarinda Utara memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 173.396.425,95 m3/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Palaran sebesar 109.442.705,08 m3/tahun dan Kecamatan Samarinda Ulu sebesar 32.781.472,91 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Samarinda Kota sebesar 3.285.291,22 m3/tahun. Secara keseluruhan daya dukung air di Kota Samarinda berada pada daya dukung air yang terlampaui.

Tabel 2.93
Status Daya Dukung Air Kota Samarinda

No	Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih Air	Status DDTLH Air
1	Kec. Loa Janan Ilir	2.910.595,30	18.611.096,06	-15.700.504,65	Terlampaui
2	Kec. Palaran	16.493.605,82	109.442.705,08	-92.949.080,92	Terlampaui
3	Kec. Samarinda Ilir	516.271,20	7.628.133,00	-7.111.867,18	Terlampaui
4	Kec. Samarinda Kota	388.558,60	3.285.291,22	-2.896.735,98	Terlampaui
5	Kec. Samarinda Seberang	1.265.788,33	7.388.441,57	-6.122.657,60	Terlampaui
6	Kec. Samarinda Ulu	4.561.770,92	32.781.472,91	-28.219.733,51	Terlampaui
7	Kec. Samarinda Utara	21.642.394,89	173.396.425,95	-151.753.953,64	Terlampaui
8	Kec. Sambutan	8.158.316,52	25.022.429,43	-16.864.115,10	Terlampaui
9	Kec. Sungai Kunjang	6.945.814,43	18.235.018,89	-11.289.211,80	Terlampaui
10	Kec. Sungai Pinang	2.630.074,47	20.428.375,82	-17.798.311,78	Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih Air	Status DDTLH Air
Total		**65.513.190,49**	**416.219.389,91**	**-350.706.172,15**	Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Gambar 2.57
Peta kebutuhan air Kota Samarinda

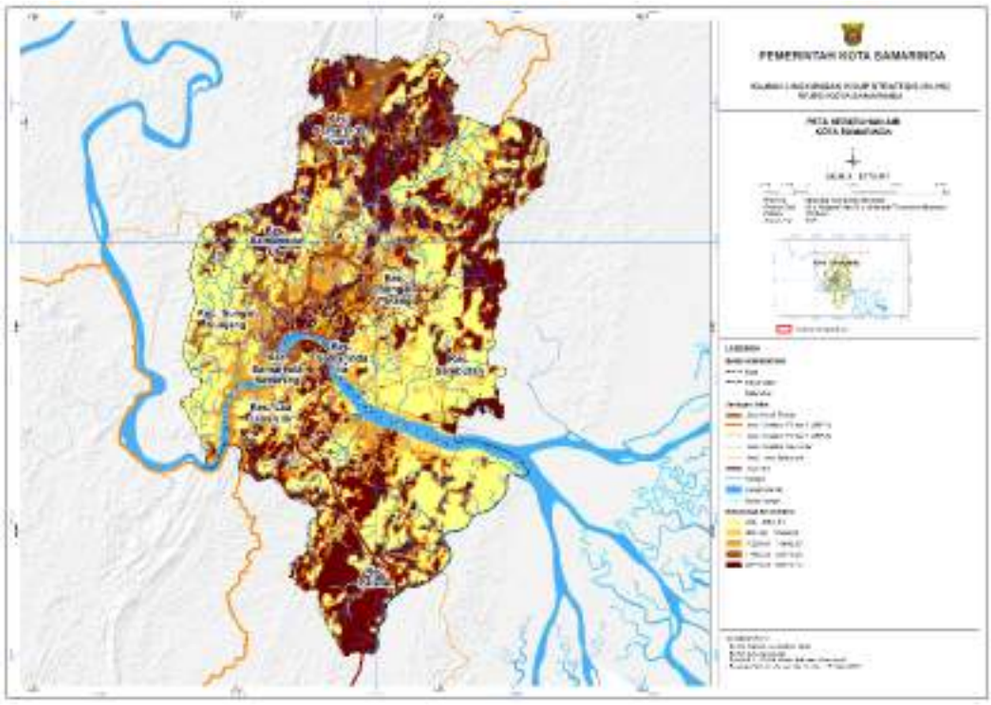

(Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045)

Gambar 2.58
Peta ketersediaan air Kota Samarinda

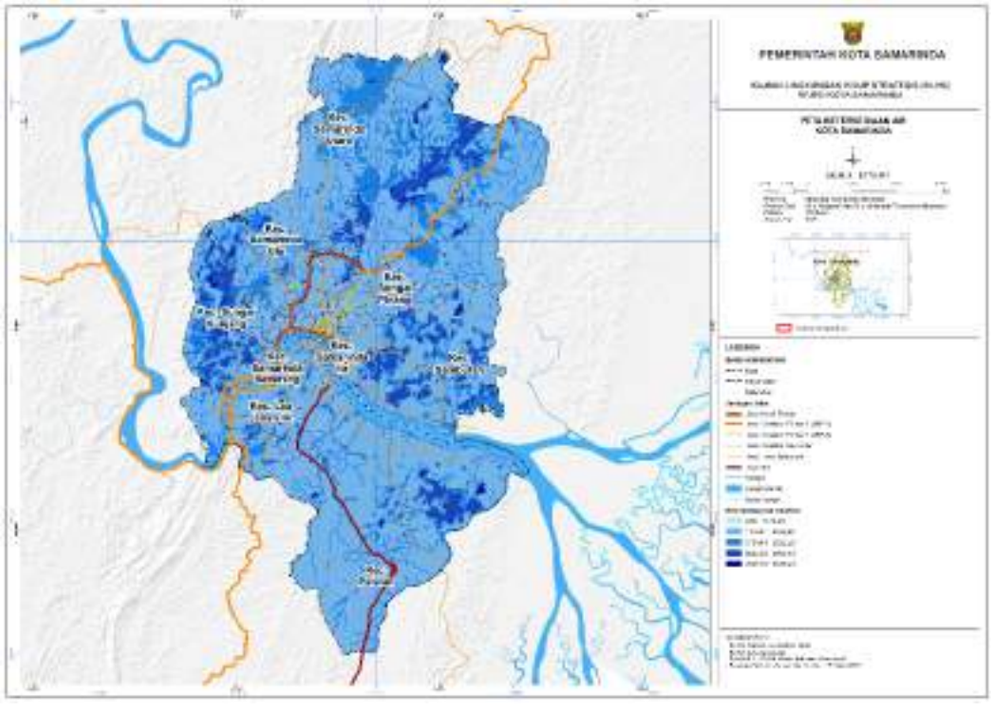

(Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045)

Gambar 2.59
Peta Status Daya Dukung Air Kota Samarinda

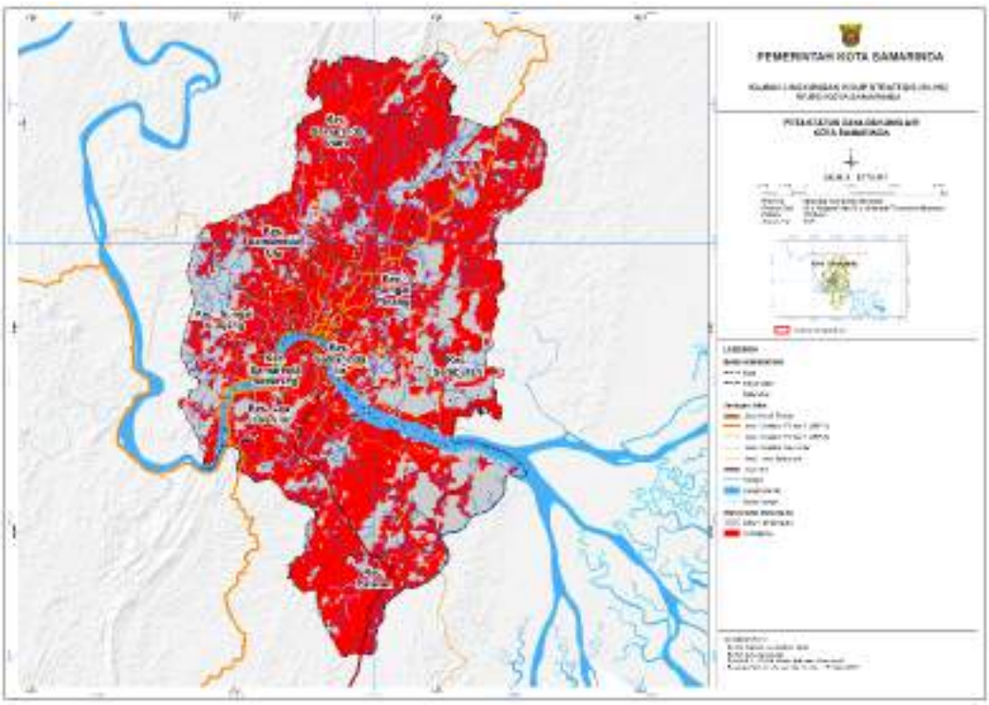

(Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045)

4) Kondisi Jaringan Irigasi

Keberadaan konstruksi, perdagangan, dan pertambangan sebagai 3 sektor tertinggi dalam perekonomian daerah, tidak menyurutkan pemerintah Kota Samarinda dalam membangun sektor pertanian, mengingat masih adanya potensi pada sektor tersebut terutama dalam mendukung ketahanan pangan. Guna meningkatkan produksi, pemerintah Kota Samarinda terus melakukan pengawasan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Tabel 2.94
Perkembangan Jaringan Irigasi Tahun 2020-2024 Kota Samarinda (meter)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jaringan Irigasi Non Teknis (meter)					
1.1	Saluran Kondisi Baik	33.863	41.758,86	43.786,86	44.704,31	44.704,31
1.2	Saluran Kondisi Sedang	20.612	20.879,43	21.893,43	22.352,15	22.352,15
1.3	Saluran Kondisi Rusak Ringan	11.042	9.636,66	10.104,66	10.316,38	10.316,38
1.4	Saluran Kondisi Rusak Berat	8.098	8.030,55	8.420,55	8.596,98	8.596,98

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jaringan Irigasi Teknis (meter)					
2.1	Panjang Jaringan Primer					
	a. Saluran Kondisi Baik	9.779	10.416,42	10.203,84	10.203,84	10.203,84
	b. Saluran Kondisi Sedang	5.952	2.976,12	3.401,28	3.401,28	3.401,28
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	3.189	3.188,70	3.188,70	3.188,70	3.188,70
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	2.338	4.676,76	4.464.18	4.464,18	4.464,18
2.2	Panjang Jaringan Sekunder					
	a. Saluran Kondisi Baik	4.046	6.798,55	7.180,95	7.809,00	8.668,46
	b. Saluran Kondisi Sedang	2.463	2.169,75	2.198,25	2.342,70	2.549,55
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	1.319	3.760,90	3.810,30	3.748,32	4.079,28
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	967	1.735,80	1.612,06	1.717,98	1.869,67
2.3	Panjang Jaringan Tersier					
	a. Saluran Kondisi Baik	2.872	2.997,22	3.212,737	3.179,62	3.179,62
	b. Saluran Kondisi Sedang	1.748	874,19	960,51	993,63	993,63
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	937	936,63	993,63	993,63	993,63
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	687	1.436,17	1.457,32	1.457,32	1.457,32

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

5) Infrastruktur Perhubungan

Sarana prasarana perhubungan yang representatif merupakan kebutuhan semua orang untuk dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan lancar, aman dan nyaman. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat akan memberikan efek positif pada jumlah orang yang masuk ke Kota Samarinda dan memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tingginya

jumlah kunjungan yang masuk ke Kota Samarinda akan memberikan peningkatan pada PAD, yang artinya Kota Samarinda memiliki sumber daya yang lebih banyak lagi untuk membiayai pembangunan.

Tabel 2.95
Jumlah Penumpang Angkutan Kota Samarinda (Orang)
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Armada	584	584	584	584	222
2	Jumlah Armada Siap Operasi	164	41	65	65	7
3	*Load Factor*	0,42	0,24	0,24	0,24	0.24
4	Jumlah Kursi Penumpang	8	8	8	8	8
5	Jumlah Penumpang per Hari	551,04	78,72	124,80	99	40
6	Jumlah Penumpang per Bulan	16.531	2.362	3.744	2.974	1,210
7	Jumlah Penumpang per Tahun	198.374	28.339	44.928	35.683	14,515

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Sesuai dengan kewenangan pemerintah Kota Samarinda, bahwa pengelolaan angkutan yang dilakukan terbatas pada angkutan umum kota (angkot). Jumlah penumpang angkot pada tahun 2021-2023 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 karena mulai banyaknya alternatif angkutan umum lain khususnya yang berbasis *online*. Penumpang tahun 2021 sebanyak 28.339 orang dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 44.928 orang, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 35.683 orang. Meskipun keberadaan angkutan umum *online* semakin banyak dan bervariasi, angkot masih memiliki penggemar tersendiri. Masih digunakannya angkot sebagai angkutan umum oleh masyarakat dikarenakan perbedaan harga yang masih menjadi pertimbangan. Sementara itu, ditengah keberadaan angkutan umum *online* jumlah armada angkot masih bertahan sebanyak 584 unit dan yang siap beroperasi sebanyak 65 unit.

Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya tentunya akan menyebabkan pergerakan orang yang tinggi setiap harinya, sehingga pemerintah Kota Samarinda perlu menjamin kenyamanan dan keamanan mereka dalam berkendara. Kenyamanan dan keamanan dalam berkendara merupakan salah

satu tujuan dalam penyediaan sarana prasarana jalan dan lalu lintas seperti Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), *traffic light*, marka jalan, median jalan dan trotoar, bahkan penempatan CCTV. Kenyamanan dan keamanan tersebut dapat dikatakan tercapai apabila angka kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan.

Tabel 2.96
Pelabuhan yang Diusahakan

NO	DERMAGA	Ruang Tunggu (M2)	POS Pengawasan (M2)	Dermaga Tetap (M2)	Pontoon Apung (M2)	BORDER Jemb.		Jemb. Penghubung (M2)	Lap. Parkir (M2)	Relling (M2)	Turap (M2)	PAGAR (BRC) (M2)
						Besi (M2)	Safety (M2)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*
1	Mahakam Hilir	48	4	300	72	320	250	400	68	70	100	20
2	Mahakam Hulu	48	4	300	72	350	250	325	600	100	90	90
3	Samarinda Sbr	24	2	150	48	68	4	20	30	0	10	0
4	Harapan Baru	-	-	250	-	225	163	300	400	100	70	20
5	Loa Janan	36	-	168	-	-	50	20	138	-	40	8,75
6	Palaran	-	4	-	48	4	-	8	-	-	-	
JUMLAH		**156**	**10**	**1168**	**240**	**967**	**717**	**1073**	**1236**	**270**	**310**	**138.75**

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Tabel di atas menyajikan data mengenai sarana dan prasarana enam dermaga yang berada di wilayah Kota Samarinda, yaitu Mahakam Hilir, Mahakam ulu, Samarinda Seberang, Harapan Baru, Loa Janan dan Palaran. Setiap dermaga memiliki infrastruktur yang berbeda-beda berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Tiga dermaga yaitu Mahakam Ilir, Mahakam Ulu, dan Samarinda Seberang masing-masing memiliki ruang tunggu seluas 48 m^2 dan pos pengawasan seluas 4 m^2. Dermaga lainnya tidak dilengkapi dengan fasilitas ini. Luas total lapangan parkir di seluruh dermaga adalah 1.236 m^2, dengan Mahakam Ulu memiliki area terbesar yakni 600 m^2.

Total luas dermaga tetap yang tersedia adalah 1.168 m^2 dengan kontribusi terbesar dari Mahakam Hilir dan Hulu masing-masing

sebesar 300 m². Sementara itu, luas ponton apung mencapai total 240 m², tersebar di Mahakam Hilir, Hulu, Samarinda Seberang, dan Palaran. Semua dermaga kecuali Palaran memiliki jembatan penghubung dengan total panjang keseluruhan 1.073 m². Yang terbesar terdapat di Mahakam Hilir (400 m²).

Tabel 2.97
Data Pengguna Fasilitas Pelabuhan dan Dermaga

NO	Jenis Muatan	Kapal Motor		Ketinting		Penumpang		Barang (TON)		Kend. R2		Keterangan
		TB	BR	TB	BR	TB	BR	TB	BR	TB	BR	
1	Mahakam Hilir	648	661	3.517	36.184	5.502	57.285	30	20	-	-	Barang Campuran Kelontongan
2	Mahakam Hulu	1.09	1.09	-	-	29.993	28.532	404	29.995	3.834	5.617	-
3	Samarinda Seberang	85	87	55	105	1.101	203	-	-	-	-	-
4	Harapan baru	358	360	-	-	-	-	402	-	-	-	BBM
5	Loa Janan	253	180	30	30	420	245	399	265	144	72	Karet, Ikan Asin
	Jumlah	**2.434**	**2.378**	**3.602**	**4.012**	**67.698**	**34.777**	**1.235**	**30.288**	**3.978**	**5.689**	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Transportasi perairan merupakan moda penting dalam mendukung mobilitas barang dan penumpang di wilayah Kalimantan Timur, khususnya yang berada di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Moda ini menjadi tulang punggung bagi konektivitas antar wilayah, terutama daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh akses jalan darat. Berdasarkan data terkini, tercatat aktivitas transportasi sungai yang signifikan pada lima titik utama perlintasan, yaitu Mahakam Ilir, Mahakam Ulu, Samarinda Seberang, Harapan Baru, dan Loa Janan. Adapun jenis moda transportasi yang digunakan meliputi kapal motor dan ketinting, dengan berbagai muatan penumpang, barang, dan kendaraan roda dua.

Total pergerakan kapal motor mencapai 4.812 unit, terdiri dari 2.434 unit keluar (TB) dan 2.378 unit masuk (BR). Sedangkan untuk ketinting, terdapat pergerakan sebanyak 3.602 unit keluar

dan 4.012 unit masuk, yang menunjukkan tingginya frekuensi aktivitas masyarakat lokal dalam mobilitas harian maupun distribusi logistik berskala kecil. Wilayah Mahakam Ilir dan Mahakam Ulu mencatat volume pergerakan tertinggi untuk kedua jenis moda ini.

Jumlah penumpang yang tercatat keluar wilayah mencapai 67.698 orang, sedangkan yang masuk berjumlah 34.770 orang. Lonjakan penumpang masuk yang sangat signifikan terlihat pada wilayah Mahakam Ilir yaitu 57.285 penumpang masuk, mengindikasikan tingginya arus kedatangan dari hulu sungai, baik untuk aktivitas perdagangan, sosial, maupun keperluan lainnya. Mahakam Ulu pun menjadi titik utama pengangkutan keluar, dengan 29.993 penumpang tercatat meninggalkan wilayah tersebut.

Distribusi barang melalui moda sungai mencapai total 2.443 ton, terdiri dari 1.235 ton keluar dan 1.208 ton masuk. Volume barang terbesar berasal dari Mahakam Hulu dengan total 434 ton keluar dan 29.995 ton masuk, yang menunjukkan peran wilayah tersebut sebagai pusat produksi dan distribusi hasil bumi serta komoditas lainnya.

Untuk kendaraan roda dua, sebanyak 3.978 kendaraan roda dua keluar dan 5.689 kendaraan masuk, menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap transportasi darat setelah menyeberangi wilayah perairan. Dominasi pergerakan kendaraan tercatat di Mahakam Ulu dengan total 9.451 unit kendaraan, yang turut menjadi indikator peningkatan mobilitas ekonomi antarwilayah.

Tabel 2.98
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024
Kota Samarinda

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kecelakaan (kali)	64	97	98	173	240
2	Korban (orang)	97	129	153	231	341
	Meninggal (orang)	27	77	65	82	74
	Luka Berat (orang)	24	13	30	46	125
	Luka ringan (orang)	46	39	58	103	142
3	Kerugian material (Rp.)	145.900.000	675.600.000	476.300.000	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Kota Samarinda Dalam Angka 2024 dan Polresta

Berdasarkan catatan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, angka kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda berfluktuatif namun memiliki kecenderungan Naik. Kenaikan angka kecelakaan lalu lintas juga menaikan jumlah korban dan kerugian material. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bidang perhubungan di Kota Samarinda harus lebih responsif lagi dalam mengatasi masalah kecelakaan lalu lintas.

7. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Terhadap PDRB

Rasio pajak merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara, perbandingan antara pendapatan pajak negara dan nilai total barang serta jasa yang dihasilkan. Semakin tinggi rasio pajak, semakin baik kondisi ekonomi karena pajak yang dikumpulkan lebih banyak. Rasio pajak daerah yang semakin meningkat mencerminkan meningkatnya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan meningkatkan sumber pendapatan lokal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Tabel 2.99
Rasio Pajak Terhadap PDRB Tahun 2019-2024
Kota Samarinda

Indikator	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,55	0,47	0,54	0,62	0,68	0,69

Sumber : Bapenda dan BPS, data diolah

Rasio pajak Daerah terhadap PDRB menunjukan tren yang meningkat, hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda berhasil dalam membiayai kebutuhan yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan Rasio pajak ini dipengaruhi beberapa hal. Kondisi ekonomi masyarakat yang meningkat mempengaruhi kepada kemampuan daya beli dan pola konsumsi masyarakat. Selain itu kepatuhan masyarakat membayar pajak secara otomatis meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Faktor yang tak kalah pentingnya

adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pajak misalnya kebijakan optimalisasi pemungutan pajak dan digitalisasi layanan.

b. Laju Inflasi

Dalam menganalisis pembangunan perekonomian di Kota Samarinda, tidak terlepas dari asumsi mikro terkait stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat terutama bahan pokok. Faktor stabilitas harga sangat penting untuk diamati dan diperhatikan karena fluktuasi harga terutama di perkotaan sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang dihasilkan sekaligus berdampak pada daya beli masyarakat.

Gambar 2.60
Laju Inflasi Kota Samarinda Tahun 2020-2024

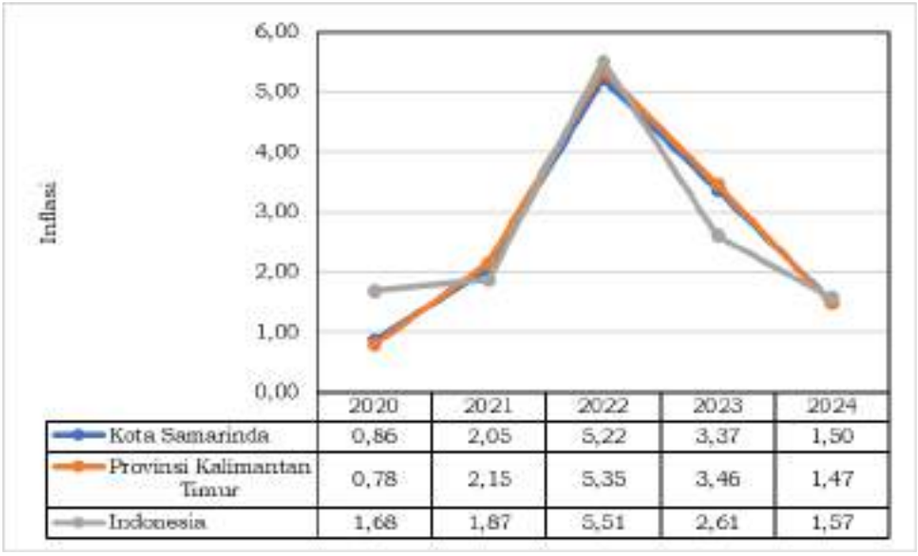

	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Samarinda	0,86	2,05	5,22	3,37	1,50
Provinsi Kalimantan Timur	0,78	2,15	5,35	3,46	1,47
Indonesia	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Laju inflasi sangat penting dalam mengkaji gambaran perekonomian Kota Samarinda terutama dalam melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dan mikro dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki laju inflasi yang sangat fluktuatif yang mengindikasikan terjadinya gejolak harga yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pengendalian inflasi di Kota Samarinda tergolong berhasil, karena telah mampu menekan laju inflasi selalu berada di bawah 5 persen. Namun demikian, terjadi kenaikan laju inflasi pada tahun 2021 hingga 2022 menjadi 2,05 (2021) dan 5,22 (2022). Laju inflasi Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023 berada di bawah laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan pada tahun 2020, 2022, dan 2024

inflasi Kota Samarinda berada di bawah laju inflasi Indonesia (nasional).

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya penunjang urusan pemerintahan. Apabila dilihat lebih mendalam, beberapa penilaian seluruh penyelenggaraan urusan dilakukan secara terpadu oleh salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan, dalam hal ini Sekretariat Daerah, yang kemudian hasilnya dapat merepresentasikan kinerja pemerintah Kota Samarinda. Penilaian-penilaian tersebut antara lain Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.100
Hasil Evaluasi AKIP Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	20,48	20,67	21,15	21,28	21,33
2.	Pengukuran Kinerja	13,33	13,39	16,54	17,04	17,23
3.	Pelaporan Kinerja	10,98	11,07	10,71	10,76	11,16
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,76	5,81	14,75	15,03	15,61
5.	Capaian Kinerja	12,05	12,11	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		**62,60**	**63,05**	**63,15**	**64,10**	**65,33**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**	**B**	**B**	**B**

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, capaian akuntabilitas pemerintah Kota Samarinda berada pada predikat B dalam kurun waktu 2020-2024, yang artinya implementasi akuntabilitas kinerja berada pada kategori Baik. Meskipun berada dalam predikat dan kategori yang sama, namun terdapat peningkatan poin dari 62,60 tahun 2020 menjadi 65,33 pada tahun 2024. Komponen yang menunjukkan peningkatan signifikan

dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu pengukuran kinerja, yang mencapai 3,9 poin. Sementara komponen lainnya tidak lebih 1 poin bahkan komponen pelaporan kinerja terjadi penurunan. Pada tahun 2024 terjadi perubahan komponen penilaian dari 5 komponen menjadi 4 komponen yang menyebabkan terjadinya peningkatan signifikan pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

b. Indeks Reformasi Birokrasi

Tidak hanya berdasarkan evaluasi AKIP, kinerja pemerintah Kota Samarinda dapat dilihat pada Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 2.101
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Samarinda

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Komponen pengungkit**	**29,41**	**29,93**	**29,80**	**-**	**-**
1.1	Pemenuhan	12,57	13,24	11,72	-	-
1.2	Hasil antara area perubahan	6,37	5,20	5,91	-	-
1.3	Reform	10,47	11,49	12,17	-	-
2	**Komponen hasil**	**30,67**	**30,23**	**30,49**	**-**	**-**
2.1	Akuntabilitas kinerja dan keuangan	7,35	7,38	7,42	-	-
2.2	Kualitas pelayanan publik	8,40	8,36	9,26	-	-
2.3	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	8,58	7,63	7,77	-	-
2.4	Kinerja organisasi	6,35	6,86	6,04	-	-
3	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**60,08**	**60,16**	**60,29**	**70,94**	**78,49**

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan Tabel 2.99, terlihat adanya peningkatan indeks reformasi birokrasi di Kota Samarinda selama tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Samarinda mencapai 60,29 dengan predikat B. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai hasil antara, area reform, dan komponen hasil. Namun mengalami penurunan pada area pemenuhan. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti dukung yang mendukung pernyataan di area pemenuhan.

Guna meningkatkan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, diperlukan peran perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan untuk menghasilkan program/kegiatan pembangunan yang terarah, tepat sasaran, dan akuntabel.

c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Menanggapi perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi di masyarakat, maka pemerintah Kota Samarinda berupaya Samarinda memperoleh predikat kota informatif dengan dukungan digitalisasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan evaluasi Komisi Informasi Provinsi kaltim, selama tahun 202-2024, pemerintah Kota Samarinda memperoleh predikat sebagai berikut.

Tabel 2.102
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda 2025

Hasil penilaian dan evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Samarinda telah melaksanakan amanat Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Secara khusus penghitungan indeks didasarkan 4 (empat) indikator yaitu pengembangan website dan digitalisasi, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.

Sejalan dengan salah satu indikator penilaian pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik yaitu pengembangan *website* dan digitalisasi, maka pemerintah Kota Samarinda menjadikan digitalisasi pelayanan publik sebagai salah satu program prioritas. Pelaksanaan digitalisasi dalam pelayanan publik berpotensi memicu terjadinya kejahatan siber yang menyebabkan kebocoran data pemerintah. Guna menghindari hal tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang didalamnya mengatur bahwa pengembangan aplikasi harus sesuai arsitektur SPBE yang memuat 5 domain, yaitu domain layanan SPBE, domain proses bisnis, domain aplikasi, domain data dan informasi SPBE, dan domain keamanan informasi SPBE.

Tabel 2.103
Hasil Evaluasi SPBE Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	N/A	2,46	2,44	3,14	3,85
2	Predikat SPBE	-	Cukup	Cukup	Baik	Sangat Baik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB, terjadi penurunan nilai indeks SPBE Kota Samarinda dari 2,46 tahun 2021 menjadi 2,44 tahun 2022. Penurunan ini dikarenakan adanya perubahan domain penilaian yang semula hanya 3 domain tahun 2018-2019, menjadi 5 domain tahun 2021, dan menjadi 6 domain tahun 2022. Namun pada tahun 2023, nilai Indeks SPBE Kota Samarinda mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai 3,14 dengan predikat baik dan peningkatan nilai indeks yang signifikan juga terjadi pada 2024 yakni 3,85 dengan predikat sangat baik. Capaian indeks SPBE Kota Samarinda tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 3,12.

d. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah suatu instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. IPP mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan, efektivitas prosedur, transparansi, aksesibilitas, serta akuntabilitas penyelenggara layanan. Dengan demikian, IPP berfungsi sebagai tolok ukur kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Samarinda menunjukkan tren positif dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, IPP Kota Samarinda tercatat sebesar 4,02, yang mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori yang cukup baik. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2024 dengan capaian IPP sebesar 4,26.

Kenaikan 0,24 poin ini merefleksikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek pelayanan publik di Kota Samarinda, seperti peningkatan efisiensi, kemudahan akses, atau responsivitas petugas. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya-upaya pemerintah kota dalam melakukan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kualitas layanan, sehingga memberikan dampak positif terhadap pengalaman masyarakat dalam mendapatkan layanan publik.

e. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan. Penilaian IRH dilakukan satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Komponen penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga meliputi empat variabel utama, yaitu: tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, Kompetensi aparatur sipil negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi Peraturan Perundang-undangan, dan penataan database peraturan perundang-undangan.

Capaian IRH Kota Samarinda mengalami peningkatan signifikan dari kategori "C (Cukup)" dengan nilai 55,80 pada tahun 2023 menjadi kategori "A (Sangat Baik)" dengan nilai 87,38 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya serius dan keberhasilan dalam perbaikan sistem hukum di Samarinda. Kategori C menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah reformasi, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan di beberapa aspek, sedangkan kategori A merefleksikan pencapaian yang sangat baik dalam mewujudkan birokrasi yang kapabel, penataan regulasi, peningkatan kompetensi aparat hukum (legal drafter), serta koordinasi yang lebih

baik dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pergeseran drastis ini didorong oleh komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi kendala sebelumnya, peningkatan sumber daya, serta implementasi strategi reformasi yang lebih efektif, seperti pendampingan intensif dari Kanwil Kemenkumham dan sosialisasi tata cara penyusunan produk hukum daerah.

f. Indeks Integritas Pemerintah

Indeks Integritas Pemerintah adalah ukuran yang mengukur tingkat risiko korupsi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, baik melalui persepsi dan pengalaman masyarakat maupun data objektif dari pihak internal lembaga. Indeks ini dihasilkan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil SPI dan Indeks Integritas Pemerintah diharapkan dapat digunakan untuk memitigasi risiko korupsi dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Gambar 2.61
Indeks Integritas Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2024

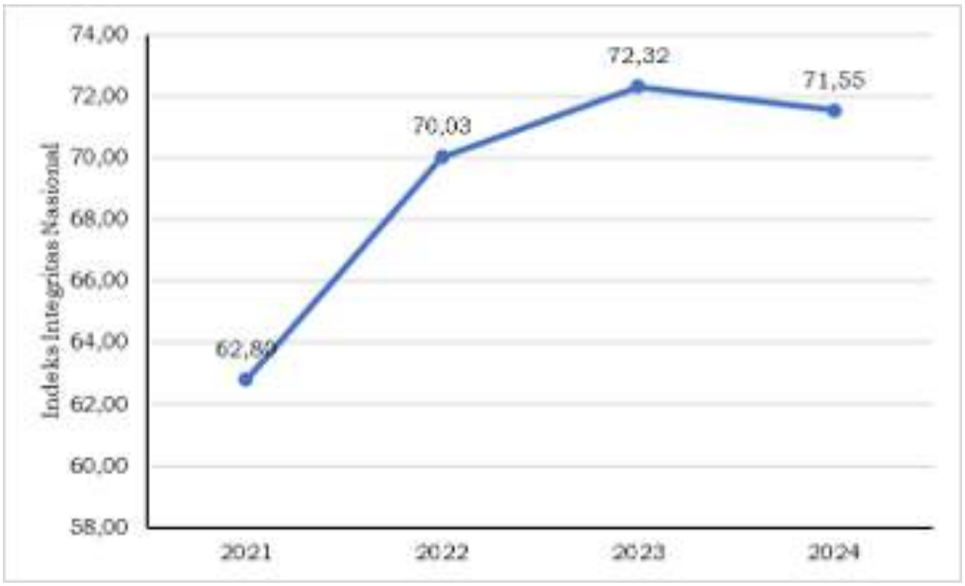

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan grafik Indeks Integritas Pemerintah Kota Samarinda tahun 2021-2024 pada Gambar di atas, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, diikuti dengan sedikit penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2021, indeks berada di angka 62,80, yang kemudian meningkat tajam menjadi 70,03

pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya atau kebijakan yang berhasil meningkatkan tingkat integritas di Kota Samarinda dalam periode tersebut. Puncak indeks tercapai pada tahun 2023 dengan angka 72,32, menunjukkan pencapaian integritas tertinggi dalam empat tahun terakhir. Namun, pada tahun 2024, Indeks Integritas Nasional Kota Samarinda mengalami sedikit penurunan menjadi 71,55. Meskipun masih berada di atas angka tahun 2021 dan 2022, penurunan ini mengindikasikan bahwa terdapat tantangan baru atau perlu adanya evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, dinamika sosial, atau masalah-masalah yang muncul dalam tata kelola pemerintahan. Penting bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk menganalisis penyebab penurunan ini agar dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mempertahankan dan terus meningkatkan integritas di masa mendatang.

g. Pilar Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) memiliki empat komponen utama yang menjadi dasar pengukuran, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen ini kemudian dijabarkan ke dalam 12 pilar yang lebih rinci, yang digunakan untuk mengevaluasi daya saing suatu daerah.

Gambar 2.62
Skor dua belas pilar Indeks Daya Saing Daerah Kota Samarinda
Tahun 2023

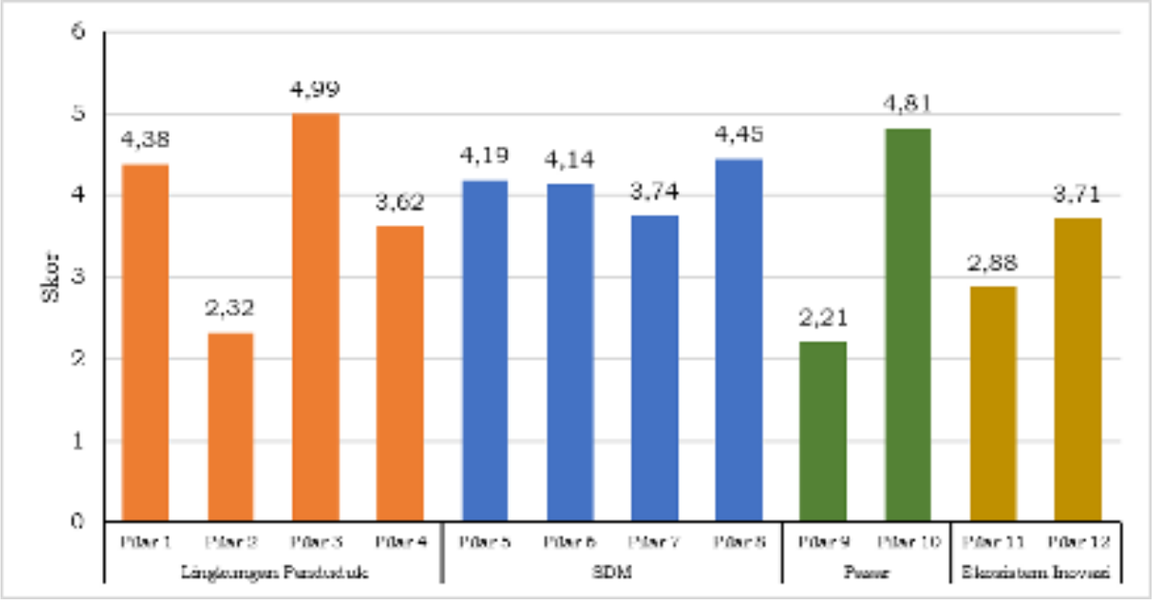

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, 2025

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan tolok ukur penting dalam keberhasilan pelaksanaan program bidang ketentraman dan ketertiban umum. Timbulnya gangguan dalam ketentraman dan ketertiban umum salah satunya disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap perda, seperti adanya kegiatan ekonomi pada sarana prasarana publik atau bahkan mendirikan bangunan di tanah negara. Namun khusus tahun 2020, pelanggaran yang sering dijumpai yaitu pelanggaran protokol kesehatan sebagai bentuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Samarinda.

Tabel 2.104
Penegakan PERDA Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggaran PERDA (kasus)	258	304	240	400	272
2	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA (kasus)	258	304	240	400	272
3	Persentase penegakan PERDA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda,2025

Berdasarkan Tabel 2.102, terlihat bahwa jumlah pelanggaran terhadap Perda sangat fluktuatif, selama 5 tahun terakhir Jumlah kasus Pelanggaran Perda tertinggi terjadi pada tahun 2023 mencapai 400 kasus dengan penegakan Perda 100 persen. Adapun pada tahun 2024 terjadi pelanggaran Perda sebanyak 272 kasus dengan penegakan Perda 100 persen. Dengan ditegakkannya seluruh pelanggaran Perda menandakan bahwa pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi lebih nyaman untuk dihuni.

Tabel 2.105
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam (orang)	1.095	1.095	270	1539	1539
2	Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) (kasus)	253	304	149	302	272
3	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) (kasus)	253	304	149	302	272
4	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (sesudah validasi) (kasus)	30	304	100	302	272
Persentase Pelanggaran K3		**80,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda,2025

Selain penegakan Perda, penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) juga menjadi tolok ukur penting dalam pelaksanaan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Pelanggaran K3 yang kerap terjadi di Kota Samarinda yaitu penyakit masyarakat, yang kerap ditemukan pada saat razia bersama unsur kepolisian dan TNI. Secara keseluruhan penanganan pelanggaran K3 di Kota Samarinda menunjukkan keberhasilan, meskipun jumlah pelanggaran sangat fluktuatif. Keberhasilan tersebut terlihat pada persentase penyelesaian pelanggaran K3 pada 4 tahun terakhir yang capaiannya konsisten 100%.

b. Angka Kriminalitas

Jumlah tindak kriminal pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya atau menjadi 694 kasus yang sebelumnya sebanyak 729 kasus. Dengan membandingkan jumlah penduduk tahun 2024 diperoleh angka kriminalitas Kota Samarinda

sebesar 79,90 yang berarti setiap 100.000 penduduk diduga akan terjadi 79 kasus tindak kriminal.

Tabel 2.106
Angka Kriminalitas Tahun 2020-2024 Kota Samarinda

No.	Jenis Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus Narkoba	137	219	55	339	255
2	Jumlah kasus Pembunuhan	1	4	2	3	4
3	Jumlah Kejahatan Seksual	7	31	1	6	19
4	Jumlah kasus Penganiayaan	32	114	61	83	70
5	Jumlah kasus Pencurian	66	285	67	255	320
6	Jumlah kasus Penipuan	12	26	14	43	25
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	376	2	0	0	1
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun (kasus)	631	681	200	729	694
9	Jumlah Penduduk (jiwa)	872.770	827.994	831.460	850.629	868.499
10	Angka Kriminalitas (8)/(9) (kasus)	7,22	8,22	2,40	8,57	7,99

Sumber: Kepolisian Resor Kota Samarinda,2025

c. Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan melibatkan upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat. Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) berkaitan dengan upaya menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan teratur dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan Linmas (Perlindungan Masyarakat) adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta memberikan perlindungan dari berbagai ancaman. Indeks Trantibum Linmas adalah sebuah ukuran untuk menilai kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan penegakan peraturan daerah. Indeks Trantibum Linmas terdiri dari sub urusan yaitu sub urusan Trantibum, sub urusan Bencana, dan sub urusan Kebakaran.

Trantibum merupakan salah satu sub urusan pemerintahan yang harus diprioritaskan oleh pemerintahan daerah. Penguatan kualitas penyelenggaraan trantibum melalui pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Upaya untuk mewujudkan pembinaan dan penyelenggaraan trantibum sebagaimana harapan di atas sampai saat ini belum dapat dilakukan secara optimal. Terdapat isu krusial dalam hal ketiadaan kebijakan yang digunakan sebagai pedoman baku yang komprehensif, teknis, dan terukur untuk mengevaluasi kinerja pembinaan dan penyelenggaraan trantibum di daerah.

Untuk sub urusan Bencana, penguatan diperlukan dalam menjawab tantangan pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di daerah. Diperlukan aturan yang implementatif baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Menjawab tantangan tersebut harus disertai dengan pola pembinaan dan pengawasan berjenjang yang konsisten serta berkelanjutan di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran adalah sebuah instrumen yang dirancang untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan di bidang kebakaran dan penyelamatan. Indeks ini mengacu pada serangkaian indikator yang sudah ditentukan, yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan kebakaran, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, hingga pemulihan pasca kebakaran. Indeks ini tidak hanya berguna sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah, tetapi juga sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan penanggulangan kebakaran di masa depan.” Setiap indikator dalam indeks ini memiliki bobot yang berbeda, yang disesuaikan dengan urgensi dan dampaknya terhadap pelayanan kebakaran dan penyelamatan di daerah tersebut.

Gambar 2.63
Indeks Trantibum Linmas Kota Samarinda Tahun 2022-2024

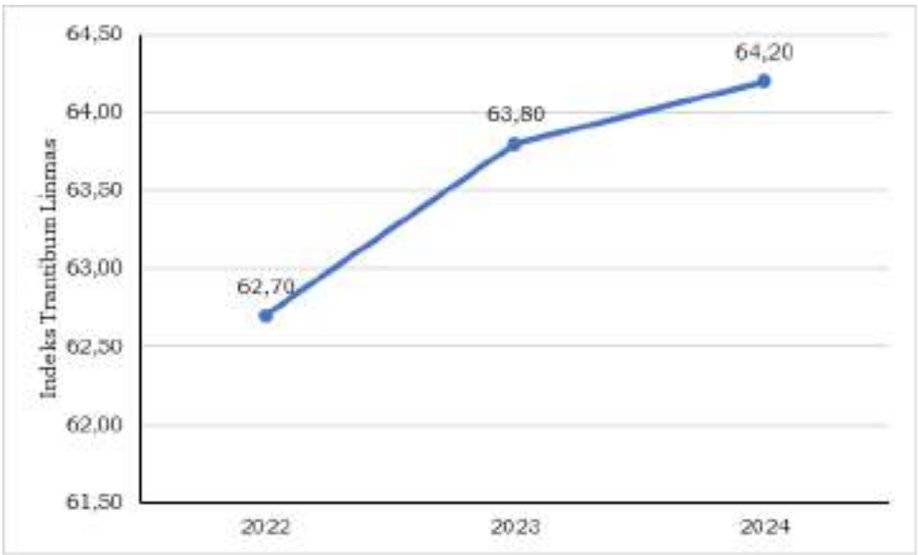

Sumber : Satpol PP, BPBD, dan Damkar, 2025

Capaian indeks trantibum linmas Kota Samarinda tahun 2022-2024 disajikan pada Gambar di atas. Berdasarkan grafik pada Gambar 2.64, terjadi peningkatan indeks trantibum linmas pada tahun 2023 menjadi 63,80 dibandingkan tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat. Tren positif terus berlanjut hingga tahun 2024 yang mana indeks trantibum linmas kembali naik dan mencapai 64,20. Meskipun kenaikannya tidak setajam dari 2022 ke 2023, peningkatan ini tetap menunjukkan konsistensi dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan tren yang sangat positif dan konsisten dalam capaian Indeks Trantibum Linmas Kota Samarinda. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda, khususnya dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Linmas), menunjukkan hasil yang nyata dan terus membaik dari tahun ke tahun.

Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kota Samarinda yang cenderung membaik dari tahun ke tahun, pada gilirannya dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi warganya. Meskipun demikian, angka indeks yang masih berada di kisaran 60-an juga menyiratkan bahwa masih terdapat ruang untuk pengembangan dan peningkatan lebih lanjut. Pemerintah Kota Samarinda dapat terus berupaya mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan

merumuskan strategi inovatif untuk mencapai capaian indeks yang lebih tinggi di masa mendatang, demi mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan tertib secara berkelanjutan.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Nilai IDSD Kota Samarinda pada tahun 2022 mencapai 3,60, yang berarti menempati posisi kedua setelah Kota Balikpapan yang mencapai 3,71. Capaian IDSD Kota Samarinda lebih tinggi bila dibandingkan dengan IDSD Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 3,27. Pada tahun 2023, nilai IDSD Samarinda meningkat menjadi 3,79, yang menempatkannya pada posisi tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur bahkan diatas IDSD provinsi.

b. Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 500.15.1/382/HK-KS/IX/2024 Pekerja Rentan Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kota Samarinda Tahun 2024 Sebanyak 18.402 (Delapan Belas Ribu Empat Ratus Dua) orang, namun pada saat akan dilakukan pembayaran iuran terdapat 206 (Dua Ratus Enam) Tenaga Kerja yang tidak dapat diproses dikarenakan beberapa hal antara lain yakni ; Pekerja Rentan mendapatkan pekerjaan (menjadi Penerima Upah), meninggal Dunia dan terdapat 4 (Empat) orang yang berusia di bawah 18 Tahun. Sehingga jumlah Pekerja Rentan yang ditanggung sebanyak 18.184 (Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Empat) Orang Pekerja

Rentan dengan nilai sebesar Rp. 305.491.200 (Tiga Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Dua Ratus Rupiah) Per Bulan.

Kemudian di bulan Desember menjadi 18.174 (Delapan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat) Orang Pekerja Rentan dengan nilai sebesar Rp. 305.323.200 (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Rupiah) dikarenakan Terdapat Pekerja Rentan yang melewati usia 65 Tahun. Di Tahun 2024, Penerima manfaat atau penerima klaim Jaminan Kematian sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Peserta dengan jumlah nilai sebesar Rp.966,000,000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) atau sebesar Rp. 42.000.000.000 per jiwa.

Tahun 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 500.15.16/143.HK-KS/IV/2025 ditetapkan sebanyak 19.000 (Sembilan Belas Ribu) Pekerja Rentan dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Pekerja Rentan Cadangan. Dengan Total biaya Iuran 19.000 Kepesertaan sebesar Rp. 319.200.000.00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan.

Tabel 2.107
Pekerja Rentan Penerima Perlinjamsos

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pekerja Rentan Yang Dibayarkan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2024	Oktober	18.184	305.491.200
2	2024	November	18.184	305.491.200
3	2024	Desember	18.174	305.323.200
5	2025	April	19.000	319.200.000
6	2025	Mei	19.000	319.200.000

Sumber: Dinas tenaga Kerja Kota Samarinda,2025

c. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi serta asas kekeluargaan, dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi berbeda dengan badan usaha lain karena berlandaskan pada prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Secara umum, jenis koperasi yang paling umum adalah Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.

Tabel 2.108
Persentase Koperasi Aktif di Kota Samarinda
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif	298	330	341	345	379
2	Jumlah Koperasi	1310	1327	1327	1353	1372
3	Persentase	22,75	24,87	25,70	25,50	27,62

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan PErindustrian Kota Samarinda, 2025

Jumlah koperasi aktif di Kota Samarinda tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang positif meskipun peningkatannya tidak terlalu drastis. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif menjadi 330 (24,87%) dibandingkan tahun 2020, diikuti oleh 341 (25,70%) pada 2022, 345 (25,50%) pada 2023, dan mencapai puncaknya di 379 (27,62%) koperasi aktif pada tahun 2024. Peningkatan jumlah koperasi aktif ini menunjukkan adanya pertumbuhan atau keberhasilan program pembinaan koperasi di Kota Samarinda. Secara keseluruhan, data tersebut merefleksikan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan koperasi di Kota Samarinda. Namun, dengan persentase aktif yang masih di bawah 30% dari total koperasi, ini juga menggarisbawahi bahwa masih ada potensi besar untuk mengoptimalkan jumlah koperasi yang tidak aktif agar dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap perekonomian lokal.

Tabel 2.109
Jumlah Koperasi di Kota Samarinda Berdasarkan Jenis Tahun 2024

No.	Jenis Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Konsumen	204	878	1082
2	Produsen	59	90	149
3	Simpan Pinjam	24	13	37
4	Jasa	85	6	91
5	Pemasaran	7	6	13
	Jumlah	**379**	**993**	**1372**

Sumber: Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Samarinda, 2025

Kondisi koperasi di Kota Samarinda berdasarkan jenis tahun 2024, terlihat bahwa total terdapat 1.372 koperasi. Koperasi konsumen memiliki jumlah terbanyak secara keseluruhan (1.082 koperasi), namun juga memiliki jumlah koperasi tidak aktif tertinggi secara

drastis (878 koperasi). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun banyak koperasi konsumen yang didirikan, banyak diantaranya gagal mempertahankan aktivitasnya. Koperasi produsen dan jasa menunjukkan rasio aktif yang lebih baik dibandingkan konsumen, namun jumlah non-aktifnya tetap signifikan. Koperasi simpan pinjam memiliki rasio aktif yang cukup baik (24 aktif dari 37 total), yang mungkin disebabkan oleh sifat bisnisnya yang lebih terstruktur dan berorientasi pada layanan keuangan. Sementara itu, koperasi pemasaran memiliki jumlah paling sedikit, baik secara total maupun yang aktif, menunjukkan bahwa jenis koperasi ini mungkin belum terlalu berkembang atau diminati di Samarinda. Secara keseluruhan, data ini menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap revitalisasi koperasi yang tidak aktif dan pengembangan strategi untuk memastikan keberlanjutan operasional koperasi di Kota Samarinda.

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a. Urusan Pendidikan

Realisasi SPM yang dilaksanakan pada tahun 2024 pada urusan pendidikan di Kota Samarinda berdasar penerima layanan dasar sebagai berikut :

Tabel 2.110
Realisasi SPM Urusan Pendidikan
Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2024

No	Standar Pelayanan Minimal		Penduduk yang Harus Dilayani	Penduduk yang Terlayani	Capaian (%)
	Jenis Pelayaanan Dasar	Indikator			
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	14.805	14.805	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	132.485	132.485	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	6.196	6.196	100

No	Standar Pelayanan Minimal		Penduduk yang Harus Dilayani	Penduduk yang Terlayani	Capaian (%)
	Jenis Pelayaanan Dasar	Indikator			
		yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

Tabel 2.111
Realisasi SPM Urusan Pendidikan
BerdasarJumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi sekolah	100	55,33	55,33
		Angka Partisipasi Murni	28	27,8	99,29
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi minimal B	69,84	64,18	91,90
		Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/D IV	77,22	76,12	98,58
		Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	10	10	100
		Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100
		Indeks distribusi guru	100	100	96.36
		Proporsi PTK bersertifikat	50	52,17	97.05
		Proporsi PTK penggerak	1,65	1,65	100
2	Pendidikan Dasar (SD)	Angka partisipasi kasar	100	105,8	100
		Angka partisipasi sekolah	100	99,3	99,3
		Kemampuan literasi	64,09	80,98	100

		Kemampuan numerasi	49,62	69,71	100
		Perbedaan skor literasi	2,5	2,53	100
		Perbedaan skor numerasi	1,25	1,27	100
		Indeks iklim keamanan	76,49	71,37	93,31
		Indeks iklim kebhinekaan	74	71,34	96,41
		Indeks iklim inklusivitas	61,59	54,71	88,83
		Kecukupan formasi guru ASN	93	92,86	99,85
		Indeks distribusi guru	100	97	97,00
		Proporsi PTK bersertifikat	90	90,2	100
		Proporsi PTK penggerak	0,07	0,07	100
	Pendidikan Dasar (SMP)	Angka partisipasi kasar	100	108,34	100
		Angka partisipasi sekolah	100	98,76	98,76
		Kemampuan literasi	77,35	85,1	100
		Kemampuan numerasi	73,13	77,5	100
		Perbedaan skor literasi	3	3,95	100
		Perbedaan skor numerasi	19	19,86	100
		Indeks iklim keamanan	75,99	71,26	93,78
		Indeks iklim kebhinekaan	76,84	74,01	96,32
		Indeks iklim inklusivitas	61,9	56,81	91,78
		Kecukupan formasi guru ASN	87	86,15	99,02

		Indeks distribusi guru	100	97	97,00
		Proporsi PTK bersertifikat	90	89,6	99,56
		Proporsi PTK penggerak	0,5	0,5	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Angka partisipasi kasar	47	46,83	99,64
		Angka partisipasi sekolah	100	39,34	39,34
		Kemampuan literasi	60	60,67	100
		Kemampuan numerasi	50	52,51	100
		Perbedaan skor literasi	4	3,32	83,00
		Perbedaan skor numerasi	6	5,53	92,17
		Indeks iklim keamanan	65	65,4	100
		Indeks iklim kebhinekaan	60	62,6	100
		Indeks iklim inklusivitas	50	52,04	100
		Kecukupan formasi guru ASN	1	1	100
		Indeks distribusi guru	100	100	100
		Proporsi PTK bersertifikat	0	0	100
		Proporsi PTK penggerak	0	0	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

b. Urusan Kesehatan

Tabel 2.112
Realisasi SPM Urusan Kesehatan
Berdasar Penerima Layanan Dasar Tahun 2024

No	Standar Pelayanan Minimal		Penduduk yang Harus Dilayani	Penduduk yang Terlayani	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	14.121	12.204	86,42

No	Standar Pelayanan Minimal		Penduduk yang Harus Dilayani	Penduduk yang Terlayani	Capaian (%)
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	13.480	12.656	93.89
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	12.838	12.673	98.71
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	56.248	49.854	88,63
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	137.547	110.137	80,07
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	542.602	438.037	80,73
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	45.992	41.250	89,69
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	216.281	214.129	99,00
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	24.618	24.118	97.97
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	1.357	1.090	80,32
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	23.227	18.512	79,70
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	28.235	28.201	99,88

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

Tabel 2.113
Realisasi SPM Urusan Kesehatan
Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	14.121	8.568	60,68
		Tablet tambah darah	14.121	12.162	86,13
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	14.121	13.058	92,47
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	14.121	9.731	68,91
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	14.121	12.003	85,00
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Gluco Protein Urin	14.121	8.733	61,84
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	14.121	10.583	74,95
		Kartu ibu/rekam medis ibu	14.121	13.058	92,47
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.121	13.058	92,47
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	26	26	100
		Gel USG	260	260	100

		Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	54	34	62,96
		Tenaga kesehatan : Perawat	2.755	2.755	100
		Tenaga kesehatan : Bidan	868	807	92,97
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	863	863	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	95	95	100
		Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	14.121	11.173	79,12
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Formulir Partograf	13.480	12.656	93,89
		Kartu ibu (rekam medis)	13.601	12.656	93,89
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.121	13.058	92.47
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	26	26	100
		Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	154	34	62,96

		Tenaga kesehatan : Perawat	868	807	92,97
		Tenaga kesehatan : Bidan	2.755	2.755	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	863	863	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	95	95	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	12.751	10.785	84,58
		Vitamin K1 injeksi	12.838	12.673	98,71
		Salep/tetes mata antibiotik	12.838	12.673	98,71
		Formulir bayi baru lahir	12.838	12.673	98,71
		Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	12.751	9.706	76,12
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.838	12.838	100
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	26	26	100
		Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	54	31	57,41
		Tenaga kesehatan : Bidan	868	807	92,97
		Tenaga kesehatan : Perawat	2.755	2.755	100

		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	863	863	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	41	41	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	95	95	100
		Kader Kesehatan	3.640	3.424	94,07
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	56.248	49.854	88.63
		Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	56.248	49.854	88.63
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	56.248	49.854	88.63
		Vitamin A Biru	5.102	5.102	100
		Vitamin A Merah	38.420	25.277	65,79
		Vaksin imunisasi dasar: BCG	12.751	9.974	78,22
		Vaksin imunisasi dasar: Polio tetes	12.751	9.318	73,08
		Vaksin imunisasi dasar: IPV	12.751	8.166	64,04
		Vaksin imunisasi dasar: DPT –HB -Hib	12.751	8.923	69,98
		Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	12.751	10.224	80,18

		Vaksin imunisasi lanjutan: DPT –HB -Hib	12.902	7.554	58,55
		Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	12.902	8.014	62,11
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	89.559	72.957	81,46
		Peralatan Anafilaktik	26	26	100
		Formula Terapi Gizi Buruk	26	26	100
		Tenaga medis : Dokter	540	540	100
		Tenaga kesehatan : Bidan	868	807	92,97
		Tenaga kesehatan : Perawat	2.755	2.755	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	95	95	100
		Guru PAUD	0	0	100
		Kader Kesehatan	3.640	3.424	94,07
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Buku rapor kesehatanku	137.547	110.137	80,07
		Buku pemantauan kesehatan	137.547	110.137	80,07
		Kuesioner skrining kesehatan	26	26	100
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah	137.547	110.137	80,07

		dan remaja di dalam sekolah			
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	26	26	100
		Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah	41.770	37.762	90,40
		Alat Pemeriksaan Hb	26	26	100
		Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	8.215	8.215	100
		Media promosi kesehatan	26	26	100
		Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	42.109	33.216	78,88
		Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	119	119	100
		Tenaga kesehatan : Bidan	868	807	92,97
		Tenaga kesehatan : Perawat	2.755	2.755	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	95	95	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	863	863	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	195	195	100

		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	346	0	100 (tutup mutu)
		Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	2007	0	100 (tutup mutu)
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	26	100
		Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	26	26	100
		Alat : Tensimeter	26	26	100
		Alat : Glukometer	26	26	100
		Alat: Alat Pemeriksa Hb	26	26	100
		Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	542.602	438.037	80,73
		Alat : KIT IVA Tes	26	17	65,38
		Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	542.602	438.037	80,73
		Kit Ophthalmology Komunitas	26	26	100
		Kuesioner PUMA	26	26	100
		Alat Pelayanan KB	78	0	0 (tutup mutu)

		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26	26	100
		Vaksin Tetanus Difteri (td)	17.025	8.568	50,33
		Tenaga medis : Dokter	549	549	100
		Tenaga kesehatan : Bidan	868	807	92,97
		Tenaga kesehatan : Perawat	2.755	2.755	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	95	95	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	195	195	100
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	3.640	3.424	94,07
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	26	26	100
		Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	26	26	100
		Alat pemeriksaan kolesterol	26	26	100
		Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	45.992	41.250	89,69

		Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	45.992	41.250	89,69
		Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	45.992	41.250	89,69
		Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	26	26	100
		Tenaga medis : Dokter	540	540	100
		Tenaga kesehatan : Bidan	868	807	92,97
		Tenaga kesehatan : Perawat	2.755	2.755	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	95	95	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	195	195	100
		Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	3.640	3.424	94,07
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	26	100
		Obat Hipertensi	26	26	100
		Tensimeter	52	52	100
		Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	1	1	100

		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	26	26	100
		Tenaga medis : Dokter	540	540	100
		Tenaga kesehatan : Bidan	868	807	92,97
		Tenaga kesehatan : Perawat	2.755	2.755	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	95	95	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	41	41	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	863	863	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	195	195	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Obat Diabetes Melitus	26	26	100
		Fotometer atau Glukometer	26	26	100
		BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	26	26	100

		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	26	26	100
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	26	26	100
		Tenaga medis : Dokter	540	540	100
		Tenaga kesehatan : Bidan	868	807	100
		Tenaga kesehatan : Perawat	2.755	2.755	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	863	863	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	195	195	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	95	95	100
		Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	324	324	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	26	26	100
		Penyediaan Psikofarmaka	13	8	61,54

		Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	1.357	1.090	80,32
		Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	1.357	1.090	80,32
		Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	26	26	100
		Tenaga kesehatan : Dokter	26	26	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	26	26	100
		Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	69	69	100
		Tenaga profesional lainnya	1	1	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan tuberkulosis	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	26	26	100
		Reagan Zn TB	120	120	100
		Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	26	26	100
		Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alcohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	23.227	18.512	79,70

		Cartridge tes cepat molekuler	14.400	14.400	100
		Formulir pencatatan dan pelaporan	26	26	100
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	100
		Tuberkulin	264	264	100
		Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	54	29	53,70
		Tenaga kesehatan : Perawat	2.755	2.755	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	863	863	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	195	195	100
		Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	324	324	100
		Tenaga kesehatan : Radiografer	75	75	100
		Kader Kesehatan	3.640	3.424	94,07
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	26	26	100

		Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	28.235	28.201	99,88
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	28.235	28.201	99,88
		Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	26	26	100
		Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	8	8	100
		Tenaga kesehatan : Bidan	868	807	92,97
		Tenaga kesehatan : Perawat	2.755	2.755	100
		Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	324	324	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	195	195	100
		Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	17	17	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

c. Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2.114
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum
Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Penduduk yang Harus Dilayani	Penduduk yang Terlayani	Capaian (%)
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	5.000	5.000	100
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.256	1.256	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

Tabel 2.115
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum
Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	1.000	1.000	100

		Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	1.000	1.000	100
		Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	1	1	100
		Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	1	1	100

2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	314	314	100
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	314	314	100
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	314	314	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

d. Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 2.116
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat
Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Penduduk yang Harus Dilayani	Penduduk yang Terlayani	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Samarinda	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Tidak ada kejadian bencana yang diatur oleh Wali Kota Samarinda pada Tahun 2023		-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	151	151	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

Tabel 2.117
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat
Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Samarinda		Tidak ada kejadian bencana di Kota Samarinda pada Tahun 2023	-	-
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Samarinda	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	151	151	100

		Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	0	0	100 (tutup mutu)

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

e. Urusan Trantibunlinmas

Tabel 2.118
Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas
Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Penduduk Harus Terlayani	Penduduk Terlayani	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kota Samarinda	350	350	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	300	300	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	450	450	100
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	600	600	100
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.136	1.130	99,47

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

Tabel 2.119
Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas
Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	3	3	100
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	7	7	100
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	1.648	1.648	100
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	2	2	100
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	100

					(tutup mutu)
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	0	0	100 (tutup mutu)
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	10	10	100
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	200	200	100
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	20	20	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Sarana prasarana penanggulangan bencana	64	64	100
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	53	53	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	100
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	15	15	100
		Melakukan respon cepat darurat bencana	1	1	100

		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	0	0	100 (tutup mutu)
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3	3	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	266	266	100
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	13	13	100
		Sarana prasarana pemadam kebakaran	2.029	2.029	100
		Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	221	221	100
		Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	266	266	100
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	5	5	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

f. Urusan Sosial

Tabel 2.120
Realisasi SPM Urusan Sosial
Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Penduduk Harus Terlayani	Penduduk Terlayani	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar di luar panti	50	54	100
2	Rehabilitas sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	35	35	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	65	65	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	40	40	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara korban bencana Kota Samarinda yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kota Samarinda	2.309	2.309	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

Tabel 2.121
Realisasi SPM Urusan Sosial
Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Layanan data dan pengaduan	50	54	100
		Penyediaan permakanan	7	7	100
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	1	1	100
		Penyediaan sandang	7	7	100
		Penyediaan alat bantu	50	50	100
		Penyediaan perbekalan kesehatan	11	11	100
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	30	30	100
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	1	1	100
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	10	11	100
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10	10	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	10	10	100
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	100
		Layanan rujukan	35	35	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Layanan data dan pengaduan	50	50	100
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	10	10	100
		Penyediaan permakanan	7	13	100
		Penyediaan sandang	8	13	100
		Penyediaan perbekalan kesehatan	8	13	100
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	30	30	100
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	1	1	100
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	15	15	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10	10	100
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	10	10	100
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	100
		Layanan rujukan	35	35	100
3	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Layanan data dan pengaduan	50	50	100
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	1	1	100
		Penyediaan permakanan	20	20	100
		Penyediaan sandang	20	20	100
		Penyediaan alat bantu	20	20	100
		Penyediaan perbekalan kesehatan	10	20	100
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10	10	100
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	1	1	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	10	10	100
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10	10	100
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	10	10	100
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	15	100
		Layanan rujukan	35	35	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Layanan data dan pengaduan	25	25	100
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	20	=20	100
		Penyediaan permakanan	7	7	100
		Penyediaan sandang	33	33	100
		Penyediaan perbekalan kesehatan	33	33	100
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	30	30	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	40	40	100
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependuduka	17	17	100
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10	10	100
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	4	4	100
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6	6	100
		Layanan rujukan	10	10	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kota Samarinda	Penyediaan permakanan	1.595	1.962	100
		Penyediaan sandang	214	214	100
		Penyediaan tempat penampungan pengungsi	2	2	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Jumlah Mutu Dibutuhkan	Jumlah Mutu Tersedia	Capaian (%)
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	25	133	100
		Pelayanan dukungan Psikososial	1	1	100

Tabel 2.122
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	2023	2024
1	2	5	6
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		
1	Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	98,68	99,30
2	Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS)	98,54	98,76
3	Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)	55,34	57,30
4	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	39,35	44,04
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	60,00	63,16
6	Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi Sl/D-IV	88,96	90,49
7	Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	37,49	35,15
8	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	74,75	76,00
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,28	82,33
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
1	Angka Kematian Ibu	109,47	80,68
2	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	87,00	86,60
3	Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	86	90
4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100	100
5	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	43,5	100
6	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100	96
7	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar	60	80
8	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	85	95,3
9	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	74,25	76,25
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,43	85,85
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
1	Persentase luas kawasan perkotaan yang terlayani fasilitas dasar	0	0
2	Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik	70	75
3	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	55	60

No	Indikator	2023	2024
1	2	5	6
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78	80
5	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	47,62	71,57
6	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	90,26	91,69
7	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	13	26,09
8	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10	16,05
9	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	0,34	40,45
10	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	40,13	42,55
11	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82,68	82,96
12	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	58	62
13	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	86,93	82,22
14	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	73,55
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	89,23
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
1	Persentase perumahan dan permukiman tertata	24,27	27,26
2	Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha	9,54	9,54
3	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,97	9,69
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-	-
5	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	78,18	78,00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,83	90,75
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	n/a	65,50
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	n/a	65,50
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	n/a	n/a
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	50
5	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	64	68
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	76,05
7	Indeks Pra Bencana	0,410	0,530
8	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	0,122	0,181
9	Indeks Pasca Bencana	0,048	0,089
10	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	61,5	77,5
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	63	75
12	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran	n/a	n/a
13	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	n/a	n/a
14	Penurunan luas area yang terbakar	45716	25702
15	Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan	n/a	42

No	Indikator	2023	2024
1	2	5	6
16	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	n/a	87
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	88,4
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		
1	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	77	80
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100
3	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	92	92
4	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100
5	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	64	70
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.08	97
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**		
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	N/A	60
2	Persentase Pencari kerja yang bersertifikat Kompetensi	32	24,21
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	6,78	5,95
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50	51,34
5	Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	N/A	N/A
6	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	59,88	58
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,35	87,85
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
1	Persentase Anggaran responsif Gender (ARG)	8	9
2	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	50,42	49,69
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	14,05	68,69
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	3	5
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	17	25
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60,38	62,00
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	46,81	69,57
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	78,42	79,79
9	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	68,25	76
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,6	91,15
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**		
1	Cadangan Pangan Masyarakat	23,45	24,25
2	PPh Ketersediaan	97,59	98,53
3	PPH Konsumsi	84,8	87,3
4	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	77,97	83,05
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	96	96
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		

No	Indikator	2023	2024
1	2	5	6
1	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	40	20%
2	Persentase luas penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat	50	20,54
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**		
1	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	-	-
2	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	-	-
3	Tutupan Lahan	-	-
4	Persentase RTH	-	-
5	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	-	-
6	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	-	-
7	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	-	-
8	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-
9	Persentase Penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	-	-
10	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	-	-
11	Jumlah Sampah terkelola	-	-
12	Jumlah Sampah terkelola	0	0
13	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	-
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	N/A	N/A
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	65	70
3	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	N/A	16,6
4	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	N/A	95,42
5	Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	N/A	16
6	Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	N/A	16,6
7	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	N/A	N/A
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	1	1
9	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	69	62,5
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
1	Persentase Kelurahan BERKEMBANG	-	6
2	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	-	100
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
1	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	2,01	1,95
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	62,21	70,15
3	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	-	-
4	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,5	83,5
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,38	84,48
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**		
1	Konektivitas Darat	0	0,89

No	Indikator	2023	2024
1	2	5	6
2	Persentase Kendaraan Layak Uji	0	0
3	Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	0	0
4	Persentase kendaraan layak uji	0	0
5	Konektivitas Sungai	0	1,00
	#REF!	#REF!	#REF!
6	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75,75	79
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,08	87,28
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	-	-
2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	-	52,50
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73,50	67,25
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,10	89,28
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	1,61	2,00
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	6,20	17,79
3	Persentase Koperasi Aktif	4,43	4,43
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	12,08	19,32
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	18,50	19,00
6	Pertumbuhan Wirausaha	10,15	10,23
7	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0,50	0,78
8	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	63,75	63,75
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	85,05
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		
1	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	154,45	106,33
2	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	5	7
3	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	60	65
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	50	55
6	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	78,00	79,00
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00	92,00
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		
1	Rasio Wirausaha Pemuda	0,09	0,31
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	NA	5,86
3	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda	NA	NA
4	Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	NA	NA
5	0	0	0
6	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	64	64
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	78
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIKA**		

No	Indikator	2023	2024
1	2	5	6
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	0%	0%
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	6,37	8,33
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**		
1	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang dilestarikan	50,00	70,00
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal	16,95	17,00
3	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	24,40	32,56
4	Persentase Wisatawan/ Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas	66,00	70,00
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**		
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74,44	84,86
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	0,00	0,00
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0,00	39,25
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,29	83,00
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	0,00	0,00
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0,00	0,00
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0,00	0,00
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	15,012 Ton	15,242.0 Ton
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	822.7 Ton	866.88 Ton
3	Jumlah Pengawasan Di Perairan Darat	-	4
4	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	-	-
5	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71,85	69,25
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	85,8
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**		
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	NA	NA
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	NA	NA
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	NA	0,15
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	NA	17,15
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		
1	Jumlah produksi pertanian	24053,63	24154,55
2	Jumlah populasi ternak	4617706	1267934
3	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	7,41	4,94
4	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	20	30
5	Persentase Produk Ternak Yang ASUH	57	60
6	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	100	100
7	Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	14000	12000
8	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	100	100
9	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	78,57	78,57

No	Indikator	2023	2024
1	2	5	6
10	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	68,04	60,16
11	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	77,50	80,75
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,25	87,85
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**		
1	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	30,83	49,88
2	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	21,43	28,57
3	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	82,35	88,24
4	Nilai Ekspor Barang	32,59	187,64
5	Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	63,52	84,95 %
6	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	14,71	20,00
7	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	50,30	42,50
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,43	84,09
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4,20	4,35
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	7,26	7,52
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	0,16	0,16
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**		
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3,45	3,58
2	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi	N/A	N/A
3	Indeks Reformasi Hukum	55,8	80,3
4	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	51,72	73,69
5	Tingkat Inflasi	3,0	2,5
6	Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	N/A	N/A
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	61,41	61,28
8	Persentase tindak lanjut Kebijakan Urusan SDA hasil fasilitasi	N/A	75
9	Indeks Kematangan Organisasi	N/A	42,58
10	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	56,25	73,25
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	88,29
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**		
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	NA	NA
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	25,93	26,32
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	NA	NA
4	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,25	90
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	90,05
5.01	**PERENCANAAN**		
1	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	85	88
2	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	85%	88%
3	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonomian dan SDA	85%	88%
4	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	85%	88%

No	Indikator	2023	2024
1	2	5	6
5	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73,25	71,75
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86
5.02	**KEUANGAN**		
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	20,05	18,26
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	50,16	45,73
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	91,54	95,65
4	Persentase Penurunan SILPA	41,35	51,33
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	-2,56	11,15
7	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	50,75	71
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,37	90,15
9	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	0	0
10	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	68,25	65
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85
5.03	**KEPEGAWAIAN**		
1	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	94,05	92,11
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	500
3	0	5	73,76
4	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 %	1500 orang
5	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	100	79,30
6	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	67,5	71,5
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,05	95
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	100	1177 orang
2	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100	100
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		
1	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	N/A	N/A
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**		
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	NA	NA
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	84,72	84,62
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	NA	NA
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,50	81,50
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,22	85,60
7.01	**KECAMATAN PALARAN**		
1	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	82,00	83,00
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	83,00	84,00
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	76,5	80,25
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,85	87,23
7.01	**KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**		
1	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0

No	Indikator	2023	2024
1	2	5	6
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	82	83
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	64,75
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	92,73
7.01	**KECAMATAN SAMARINDA ULU**		
1	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	90	91
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100	100
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,05	88,8
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,5	75
7.01	**KECAMATAN SAMARINDA ILIR**		
1	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92.30	92.50
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,00	80,00
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73,25	77,25
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,45	94,45
7.01	**KECAMATAN SAMARINDA UTARA**		
1	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	100	100
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	98,92	100
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	72,25	74,42
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,4	85
7.01	**KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**		
1	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0,00
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70,25	70,50
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	78,5	79,50
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82,25
7.01	**KECAMATAN SAMBUTAN**		
1	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	84,25	84,25
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65	70
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	60,5	0
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00	92,00
7.01	**KECAMATAN SAMARINDA KOTA**		
1	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90,55	92,30
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,25	75,50
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	45,25	68,00
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75	86,50
7.01	**KECAMATAN SUNGAI PINANG**		
1	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	80,55	81
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	60	70
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	50,45	74

No	Indikator	2023	2024
1	2	5	6
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	81
7.01	**KECAMATAN LOA JANAN ILIR**		
1	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	-	-
2	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100,00	100,00
3	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71	72,5
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,80	89,15
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		
1	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	25,00	100
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	14,63	100
3	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	20,00	100
4	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70,25	50,25
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6	76,7

Sumber : Hasil Analisa 2025

2.1.6 **Capaian TPB Kota Samarinda**

a. Pelaksanaan TPB di Kota Samarinda

Secara umum pelaksanaan TPB di Kota Samarinda pada tahun 2023 capaian data yang dapat diisi sekitar 81%, indikator TPB yang sudah mencapai target nasional 57%, 17% belum mencapai target nasional, sudah dilaksanakan namun tidak relevan dengan target 7% dan 19% belum ada datanya.

Untuk lebih jelas persentase capaian TPB dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.64
Proporsi Capaian TPB Kota Samarinda Tahun 2023

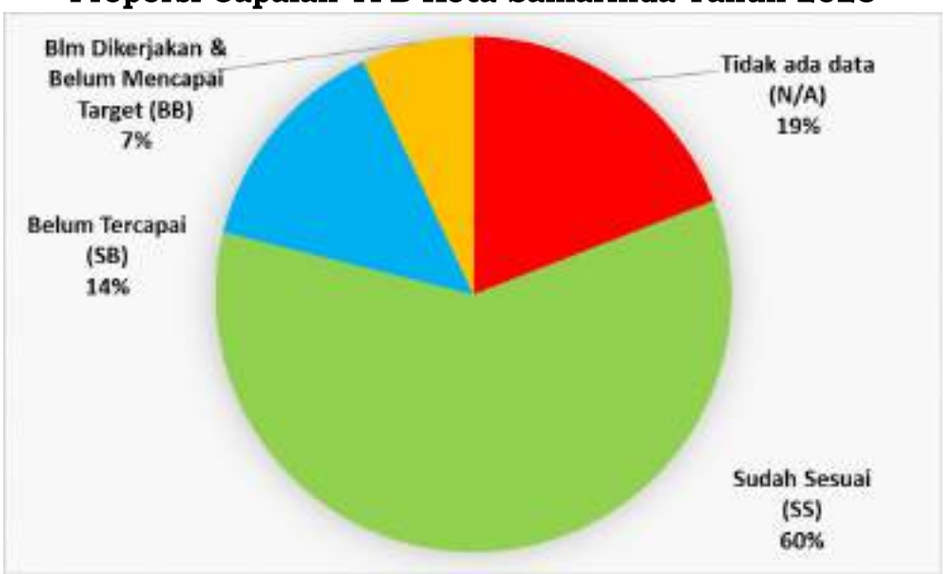

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

b. Target TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 114 indikator atau 57,29% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah kota. Berikut grafik indikator capaian masing-masing tujuan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.

Gambar 2.65
Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai (SS)

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

c. Target TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 33 indikator atau 16,58% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kota. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian TPB kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) Kota Samarinda dapat di lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.66
Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

d. Target TPB yang belum dikerjakan dan belum target/ (BB)

Indikator TPB yang belum dikerjakan dan belum mencapai target (BB). Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 14 indikator atau 7,04% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah kota. Untuk lebih jelasnya mengenai target TPB yang berstatus BB dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.67
Capaian TPB Kategori Belum Dikerjakan
dan Belum Mencapai Target (BB)

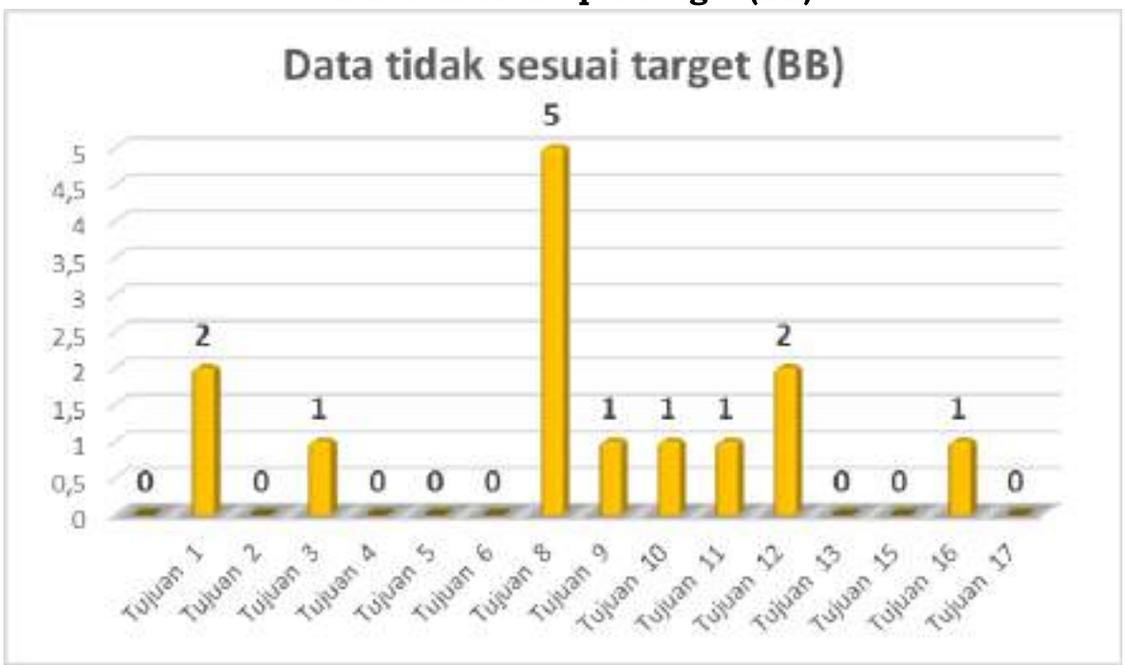

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

e. Target TPB yang belum ada data (NA)

Indikator ini tidak ada data yang dapat mendukung penjelasan capaiannya. Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 38 indikator atau 19,10% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah Kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai target TPB yang belum ada data (NA) dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.68
Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data (NA)

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

f. Capaian TPB Berdasarkan Pilar

1. Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 01, TPB 02, TPB 03, TPB 04, dan TPB 05. Total indikator untuk pilar sosial adalah sebanyak 93 indikator. persentase capaian indikator pilar sosial disajikan pada Gambar 2.70. Dari total 93 indikator pilar sosial, terdapat 61 indikator atau 65,59% telah mencapai target, 18 indikator atau 19,35% belum mencapai target, 3 indikator atau 3,23% belum dikerjakan dan belum mencapai target, dan 11 indikator atau 11,83% tidak ada data.

Gambar 2.69
Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Sosial

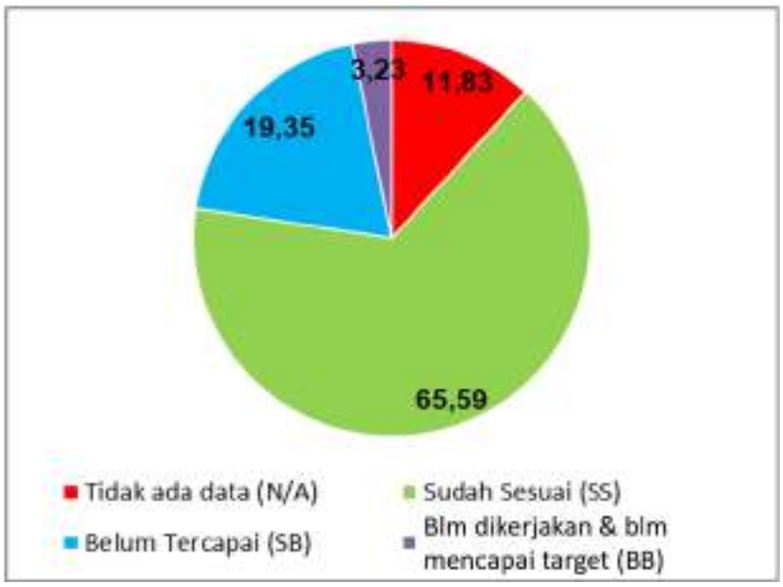

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2. Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 08, TPB 09, TPB 10, dan TPB 17. Total indikator untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 50 indikator. persentase capaian indikator pilar ekonomi disajikan pada Gambar 2.71. Dari total 50 indikator, terdapat 27 indikator atau 54% telah mencapai target, 6 indikator atau 12% belum mencapai target, 7 indikator atau 14% belum dikerjakan dan belum mencapai target dan 10 indikator atau 20% tidak ada data.

Gambar 2.70
Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Ekonomi

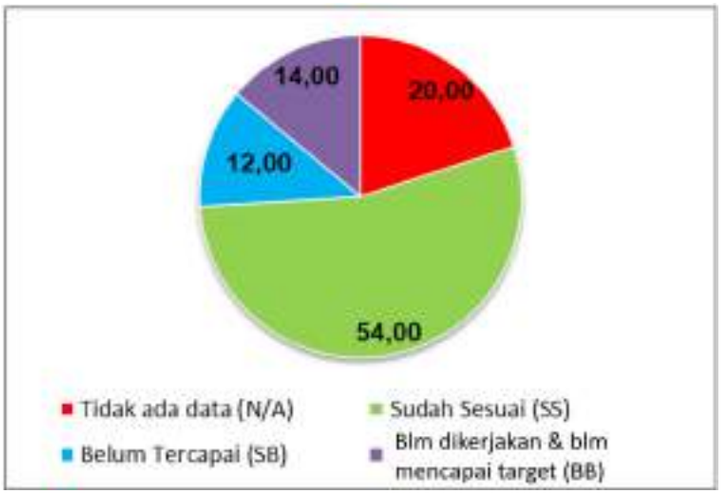

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

3. Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan hidup mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 06, TPB 11, TPB 12, TPB 13, dan TPB 15. Total indikator untuk pilar lingkungan hidup adalah sebanyak 35 indikator. persentase capaian indikator pilar lingkungan hidup disajikan pada Gambar 2.72. Dari total 35 indikator pilar lingkungan, terdapat 14 indikator atau 40% telah mencapai target, 7 indikator atau 20% belum mencapai target, 3 indikator atau 8,57% belum dikerjakan dan belum mencapai target dan 11 indikator atau 34,43% tidak ada data.

Gambar 2.71
Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Lingkungan

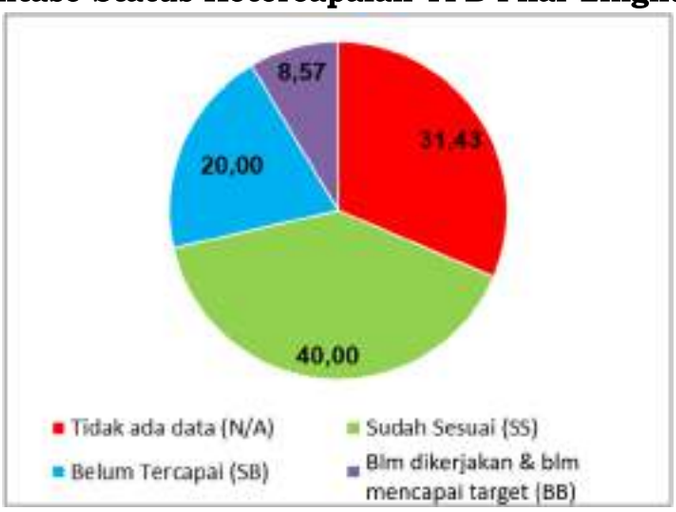

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

4. Capaian Indikator TPB Pilar Hukum Dan Tata Kelola

Pilar Hukum dan Tata Kelola mencakup satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 16. Total indikator untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 21 indikator. persentase capaian indikator pilar hukum dan tata kelola disajikan pada Gambar 2.73. Dari total 21 indikator, terdapat 12 indikator atau 57,14% telah mencapai target, 2 indikator atau 9,52% indikator yang belum mencapai target, 1 indikator atau 4,76 belum dikerjakan dan belum mencapai target, dan 6 indikator atau 23,57% tidak ada data.

Gambar 2.72
Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

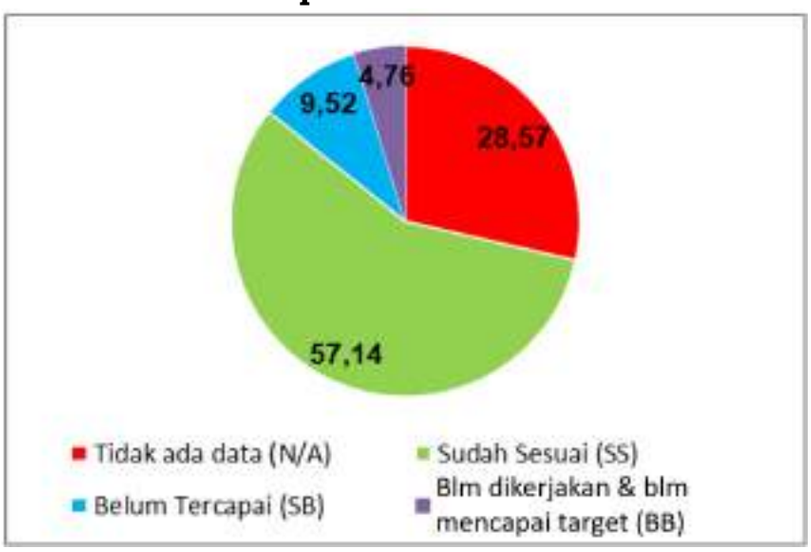

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2.5 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.5.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah, di mana penerimaan meliputi pendapatan dan pembiayaan, serta pengeluaran mencakup belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah diukur berdasarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan. Berbagai sumber penerimaan dianalisis untuk memahami karakteristik dan tren penerimaan tersebut.

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi ke tahun-tahun mendatang, sebagai dasar penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan memahami kapasitas ini, dapat ditentukan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Kota Samarinda.

a. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahun, yang meliputi kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berikut ini adalah gambaran umum kinerja pelaksanaan APBD:

b. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, jumlah pendapatan daerah Kota Samarinda memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditunjukkan dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 16,5 persen per tahun, atau dengan besaran Rp 2.872.836.034.923,00 di tahun 2020 meningkat menjadi Rp 5.177.044.600.564,00 pada tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki besaran kecenderungan meningkat, atau jika ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhannya bertumbuh sebesar 19,2 persen per tahun, Pendapatan Transfer sebesar 17,1 persen, namun pada lain-lain pendapatan daerah yang sah terjadi penurunan yaitu sebesar Rp 96.300.745.000,00 di tahun 2020 menurun menjadi Rp 65.783.434.870,00 pada tahun 2024. Pendapatan daerah yang disajikan setiap tahunnya menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Samarinda 2020–2024 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.123

Rata–Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
A	**PENDAPATAN**	**2.872.836.034.923**	**2.860.333.904.523**	**3.671.108.194.050**	**4.026.969.291.271**	**5.177.044.600.564**	**16,5%**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**485.189.493.721**	**573.726.380.357**	**746.441.991.061**	**857.839.919.068**	**973.187.565.368**	**19,2%**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	314.002.648.363	381.933.143.495	518.519.749.592	608.761.181.360	683.041.335.376	21,8%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	42.755.656.314	41.727.346.527	43.445.618.227	51.489.693.765	52.928.286.087	5,8%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.010.873.971	4.447.636.905	5.330.050.662	13.337.956.568	22.082.018.474	47,8%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	120.420.315.073	145.618.253.430	179.146.572.579	184.251.087.375	215.135.925.431	15,9%
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.291.345.796.202**	**2.171.166.219.590**	**2.924.666.202.989**	**3.168.703.081.359**	**4.138.073.600.326**	**17,1%**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**1.530.119.937.719**	**1.324.423.498.281**	**2.160.845.749.520**	**2.172.401.743.615**	**2.971.848.290.765**	**21,8%**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	101.585.284.366	429.375.703.162	83.733.452.889	121.089.658.309	144.122.432.000	76,5%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	527.291.122.431	-	1.166.866.530.278	1.043.825.330.845	1.700.094.740.000	-
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	670.356.522.000	660.405.062.000	650.756.087.000	677.722.969.133	837.214.760.055	6,2%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	230.887.008.922	234.642.733.119	259.489.679.353	329.763.785.328	290.416.358.710	6,8%
1.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**35.336.461.000**	**27.384.618.000**	**46.434.416.000**	**16.333.666.000**	**20.758.998.000**	**2,3%**
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	35.336.461.000	27.384.618.000	46.434.416.000	16.333.666.000	0	-29,4%
	Insentif Fiskal	-	-	-	-	20.758.998.000	-
1.2.3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi**	**725.889.397.483**	**819.358.103.309**	**717.386.037.469**	**979.967.671.744**	**1.145.466.311.561**	**13,5%**
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	286.846.897.483	347.713.442.409	469.175.047.469	625.517.671.744	557.097.679.235	19,6%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	588.368.632.326	-
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	439.042.500.000	471.644.660.900	248.210.990.000	354.450.000.000	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**96.300.745.000**	**115.441.304.576**	**-**	**426.290.844**	**65.783.434.870**	**-**
1.3.1	Pendapatan Hibah	96.300.745.000	94.547.498.000	-	-	-	-
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-	20.893.806.576	-	426.290.844	65.783.434.870	-

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	Perundang-undangan						

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Samarinda 2020-202

c. Belanja Daerah

Analisis belanja daerah bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah efisien dalam mengelola anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan memastikan pengeluaran tepat sasaran. Sub bab ini juga membahas tentang pertumbuhan belanja daerah, dengan menganalisis perkembangan komponen-komponen belanja dari tahun ke tahun.

Secara umum, selama periode 2020 hingga 2024, total belanja dan transfer daerah Kota Samarinda menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 18,1 persen per tahun. Besaran belanja dan Transfer daerah meningkat dari Rp 2.978.185.111.174 pada tahun 2020 menjadi Rp 5.477.751.130.832 pada tahun 2024. Selanjutnya, sama dengan komponen pada belanja operasi, komponen-komponen dalam belanja modal Kota Samarinda juga menunjukkan besaran yang fluktuatif.

Tabel 2.124

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
B	**BELANJA**	**2.978.185.111.174**	**3.069.980.559.431**	**2.987.848.106.437**	**4.429.959.804.298**	**5.477.751.130.832**	**18,1%**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.816.178.901.099**	**1.911.082.455.468**	**2.117.388.618.923**	**2.492.138.566.388**	**2.881.290.343.019**	**12,3%**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.216.845.222.333	1.023.542.751.092	1.027.954.895.525	974.299.843.648	1.134.351.571.606	-1,1%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.029.982.650	839.408.590.570	1.032.761.500.898	1.358.181.894.105	1.467.796.117.633	35,6%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	167.998.000	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	132.303.696.117	47.726.318.805	43.128.364.500	159.288.078.635	273.881.706.522	66,9%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	404.795.000	13.375.860.000	368.750.000	5.260.947.258	-
2.2	**BELANJA MODAL**	**1.066.113.143.022**	**1.077.524.414.721**	**860.449.938.353**	**1.936.638.601.701**	**2.595.851.534.346**	**35,0%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	14.754.178.146	18.687.364.684	36.021.838.621	96.919.196.734	68.288.983.726	64,7%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.771.805.211	123.286.277.213	90.211.880.292	216.628.835.493	179.766.693.810	25,7%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.835.065.893	145.854.414.211	130.862.676.300	492.678.445.844	912.425.268.299	92,8%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	809.804.044.134	752.545.267.415	582.743.311.404	1.111.790.641.599	1.415.682.927.225	22,1%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.948.049.638	37.151.091.198	20.198.114.186	18.471.632.031	19.363.811.286	197,9%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	149.850.000	323.850.000	-
2.2.7	Belanja Modal Dana BOS	-	-	412.117.550	-	-	-
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**93.794.421.718**	**81.373.689.242**	**10.009.549.161**	**1.182.636.208**	**609.253.467**	**-59,4%**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	93.794.421.718	81.373.689.242	10.009.549.161	1.182.636.208	609.253.467	-59,4%
2.4	**TRANSFER**	**2.098.645.335**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4.1	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**2.098.645.335**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.098.645.335	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan keuangan daerah diukur dari jumlah pendapatan umum daerah dibandingkan dengan belanja untuk pegawai aparatur sipil negara.

Tabel di bawah menunjukkan bahwa Kota Samarinda pada tahun 2020 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 859.588.179.485. Nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp 2.736.616.344.314 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

Pada tahun 2021, pendapatan daerah Kota Samarinda mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 2,86 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab penurunan ini antara lain:

1. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sepanjang tahun 2021 memberikan tekanan besar terhadap perekonomian daerah. Banyak sektor usaha mengalami penurunan aktivitas, yang secara langsung berdampak pada turunnya penerimaan pajak daerah dan retribusi.

2. Penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian alokasi Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, seiring dengan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan dari pos dana transfer, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah.

3. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Terhambat

Sektor-sektor penyumbang PAD seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir mengalami kelesuan akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Selain itu, optimalisasi pemungutan retribusi juga menghadapi kendala operasional dan teknis di lapangan.

Tabel 2.125

Kemampuan Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2019–2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Pendapatan Umum Daerah**					
1	Pendapatan Asli Daerah	485.189.493.721	573.726.380.357	746.441.991.061	857.839.919.068	973.187.565.368
2	Dana Bagi Hasil	628.876.406.797	429.375.703.162	1.250.599.983.167	1.164.914.989.154	1.844.217.172.000
3	Dana Alokasi Umum	670.356.522.000	660.405.062.000	650.756.087.000	677.722.969.133	837.214.760.055
	Jumlah A	**1.784.422.422.518**	**1.663.507.145.519**	**2.647.798.061.228**	**2.700.477.877.355**	**3.654.619.497.423**
B	**Belanja Pegawai**					
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	652.442.853.126	520.953.021.250	503.772.126.786	481.931.952.029	519.644.272.047
2	Tambahan Pengjhasilan PNS	272.391.389.907	260.255.688.599	279.482.664.153	152.692.174.114	398.358.881.062
	Jumlah B	**924.834.243.033**	**781.208.709.849**	**783.254.790.939**	**634.624.126.143**	**918.003.153.109**
	Kemampuan Keuangan Daerah	**859.588.179.485**	**882.298.435.670**	**1.864.543.270.288**	**2.065.853.751.212**	**2.736.616.344.314**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Samarinda Tahun 2020-2024, diolah

d. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terbagi menjadi dua bagian utama: penerimaan pembiayaan, yang mencakup semua dana yang masuk ke kas umum negara yang harus dikembalikan, dan pengeluaran pembiayaan, yang mencakup semua pengeluaran dari kas umum negara yang nantinya akan diterima kembali.

Dalam kurun waktu tahun 2020, 2021 dan 2024, realisasi anggaran Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan realisasi anggaran defisit, sementara itu tahun 2022 menunjukkan realisasi anggaran surplus. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, total pembiayaan daerah mengalami fluktuatif baik penurunan maupun kenaikan, kenaikan signifikan yang ditunjukkan dengan rata-rata peningkatan sebesar 28,7 persen, kanaikan tersebut terjadi pada periode tahun 2024 dengan nilai penggunaan SiLPA sebesar Rp 998.635.191.776,00. Besaran pembiayaan netto dalam struktur APBD Kota Samarinda tahun 2020 mencapai Rp 645.333.377.526,00 hingga pada tahun 2024 besarannya sebesar Rp 585.717.659.685,00.

Tabel 2.126

Rata -Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
3	**PEMBIAYAAN**	**645.333.377.526**	**539.983.776.275**	**315.337.121.367**	**988.635.191.776**	**585.717.659.685**	**28,7%**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**645.333.377.526**	**539.983.776.275**	**330.337.121.367**	**998.635.191.776**	**585.717.659.685**	**26,5%**
3.1.2	Penggunaaan SiLPA	645.333.377.526	539.983.776.275	330.337.121.367	998.635.191.776	585.717.659.685	26,5%
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**15.000.000.000**	**10.000.000.000**	**-**	**-**
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	15.000.000.000	10.000.000.000	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Samarinda Tahun 2020-2024

e. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Neraca daerah Kota Samarinda dari tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan kondisi keuangan serta kemampuan aset daerah dalam mendukung pembangunan. Analisis neraca bertujuan untuk menilai kesehatan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya, gambaran neraca daerah Kota Samarinda dalam kurun waktu Tahun 2020–2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.127

Rata – Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2023

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	Rata -Rata Pertumbuhan
A	**ASET**					
1	**ASET LANCAR**					-
	Kas di Kas Daerah	522.639.659.327	305.647.334.573	968.565.793.892	323.019.812.517	36,24%
	Kas di Bendahara Pengeluaran	59.127.500	-	-	-	
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	7.167.000	
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	14.522.432.520	24.034.472.266	29.539.507.496	11.642.858.165	9,27%
	Kas Dana BOS		-	71.114.765	79.000.439	
	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP		655.314.527	420.792.826	895.840.629	
	Kas Lainnya	2.940.864.475	22.048.409	51.314.376	540.102	-21,82%
	Setara Kas				250.000.000.000	
	Piutang Pajak	244.919.305.763	271.298.716.495	320.774.157.285	281.135.272.868	5,55%
	Penyisihan Piutang Pajak	- 120.025.235.313	- 154.785.422.331	- 179.639.949.858	- 165.748.901.991	12,43%
	Piutang Retribusi	23.695.406.857	16.632.052.176	17.719.820.624	27.160.446.859	10,00%
	Piutang lain-lain PAD yang sah		53.010.468.539	9.135.316.729	4.547.156.267	
	Penyisihan Piutang Retribusi	- 21.664.684.015			-	
	Piutang Transfer antar Daerah		33.091.341.000	90.308.671.000	46.082.846.000	
	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	45.083.918.000			220.000	
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.052.033.364				
	Bagian Lancar Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	77.719.229				
	Piutang Lainnya	28.902.117.934	5.958.395.863	4.599.768.797	51.958.076.169	309,13%
	Belanja Dibayar Dimuka	806.686.503	790.153.474	65.198.266.458	34.102.495.895	2700,53%
	Persediaan	44.295.682.925	57.615.181.353	57.201.178.811	56.000.566.791	9,08%

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	Rata -Rata Pertumbuhan
	Jumlah Aset Lancar	**787.305.035.069**	**613.970.056.345**	**1.383.945.753.202**	**920.883.397.709**	**23,31%**
2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**					
	Investasi Non Permanen	-				
	Investasi dalam Dana Bergulir	2.398.871.445	2.401.579.445	1.892.547.282	1.927.643.929	-6,41%
	Investasi Non Permanen Lainnya	-				
	Investasi Permanen	-				
	Penyertaan Modal Pemerintah Pada BUMD	492.432.402.198	478.166.644.359	583.100.257.657	612.630.036.186	8,04%
	Investasi Permanen Lainnya	-				
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**494.831.273.643**	**480.568.223.803**	**584.992.804.939**	**614.557.680.115**	**7,97%**
3	**ASET TETAP**					
	Tanah	11.637.772.910.445	12.184.699.054.272	12.432.175.384.893	10.022.387.805.118	-4,22%
	Peralatan dan Mesin	996.053.911.526	1.154.722.114.348	1.249.848.006.713	1.516.776.078.132	15,17%
	Gedung dan Bangunan	2.355.083.801.966	2.514.528.284.601	2.643.657.389.751	2.973.052.624.993	8,12%
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.542.292.538.311	7.292.684.469.971	7.786.353.808.409	9.110.001.006.732	11,75%
	Aset Tetap Lainnya	8.473.894.415	9.345.551.212	10.032.206.710	10.492.774.077	7,41%
	Konstruksi dalam Pengerjaan	665.365.571.735	694.153.882.579	724.396.267.285	594.534.075.203	-3,08%
	Akumulasi Penyusutan	- 4.802.754.706.116	- 5.659.544.873.460	- 6.546.784.867.395	- 7.588.782.249.510	16,48%
	Jumlah Aset Tetap	**17.402.287.922.282**	**18.190.588.483.523**	**18.299.678.196.366**	**16.638.462.114.745**	**-1,32%**
4	**PROPERTI INVESTASI**					
	Properti Investasi				522.205.886.500	
	Jumlah Properti Investasi				**522.205.886.500**	
5	**ASET LAINNYA**					

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	Rata -Rata Pertumbuhan
	Tagihan Penjualan Angsuran	86.700.000				
	Tagihan Jangka Panjanh		66.300.000	29.580.000	21.420.000	
	Tuntutan Ganti Rugi	-				
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	58.429.788.130	46.421.845.130	46.421.845.130	41.501.845.130	-10,38%
	Kas yang dibatasi Penggunanya	-				
	Aset Tak Berwujud	27.093.164.554	28.528.480.954	29.407.946.804	31.037.478.304	4,64%
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	- 13.394.364.513	- 14.713.439.085	- 16.349.568.242	- 17.770.910.009	9,89%
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		- 163.162.201.686	- 161.811.783.441	- 160.557.652.442	
	Aset Lain-Lain	630.167.009.016	828.893.879.958	1.146.599.301.015	1.539.431.475.181	34,71%
	Jumlah Aset Lainnya	**702.382.297.187**	**726.034.865.271**	**1.044.297.321.266**	**1.433.663.656.164**	**28,16%**
	JUMLAH ASET	**19.386.806.528.181**	**20.011.161.628.943**	**21.312.914.075.773**	**20.129.772.735.233**	**1,39%**
B	**KEWAJIBAN**					
1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**					
	Pendapatan Diterima dimuka	177.782.547	4.501.494.625	4.367.709.197	5.109.384.429	815,34%
	Utang Belanja		155.755.501.120	97.355.037.218	117.705.864.327	
	Utang Pegawai	4.510.515.394				
	Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal					
	Utang jk Pendek kpd Pihak Ketiga	3.190.015.419	-	-	-	
	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Ketiga	101.175.395.855				
	Utang kjk Pendek Lainnya	-	22.048.409	51.314.376	540.102	
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**109.053.709.215**	**160.279.044.154**	**101.774.060.792**	**122.815.788.858**	**10,38%**
2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**					

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	Rata -Rata Pertumbuhan
	Utang Jangka Panjang Lainnya	104.257.723.752				
	Utang Kepada Masyarakat		104.257.723.752	103.026.268.359	96.566.698.359	
	Jum;ah Kewajiban Jangka Panjang	**104.257.723.752**	**104.257.723.752**	**103.026.268.359**	**96.566.698.359**	**-2,48%**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**213.311.432.967**	**264.536.767.906**	**204.800.329.151**	**219.382.487.217**	**2,85%**
C	**EKUITAS DANA**					
1	EKUITAS	19.173.695.065.314	19.746.624.861.038	21.108.113.746.622	19.910.390.248.016	1,40%
	JUMLAH EKUITAS DANA	**19.173.695.065.314**	**19.746.624.861.038**	**21.108.113.746.622**	**19.910.390.248.016**	**1,40%**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**19.387.006.498.281**	**20.011.161.628.943**	**21.312.914.075.773**	**20.129.772.735.233**	**1,39%**

Sumber: Neraca - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda 2020-2023

Analisis rasio keuangan daerah adalah metode untuk membandingkan nilai atau besaran yang terdapat dalam laporan keuangan daerah, dengan tujuan untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan Kota Samarinda dalam periode tertentu. Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.128
Analisis Rasio Keuangan Kota Samarinda
Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Lancar (*current ratio*)	7,22	3,83	13,60	7,50
2	Rasio Cepat (*quick ratio*)	6,81	3,47	13,04	7,04
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Asset	0,0110	0,0132	0,0096	0,0109
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,0111	0,0134	0,0097	0,0110

Sumber: Neraca Kota Samarinda Tahun 2020-2024, diolah

f. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah telah menyusun anggaran kas, analisis likuiditas diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki aset yang cukup likuid untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ini mencakup aset lancar yang jumlahnya lebih besar dari kewajiban yang harus diselesaikan. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*).

g. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan jumlah aktiva lancar dengan utang lancar yang tercatat dalam neraca. Semakin besar perbandingan aktiva lancar terhadap utang lancar, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi keuangan daerah dapat dianggap sehat jika rasio lancar berada di atas 1, yang berarti jumlah aktiva lancar lebih besar dari jumlah utang lancar.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancar, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2023 rasio lancar Kota Samarinda menunjukkan besaran lebih dari ukuran baku yang ditetapkan, dimana

hal tersebut mengindikasikan bahwa Kota Samarinda memiliki aset yang cukup untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban jangka pendeknya.

h. Rasio *Quick*

Rasio *quick* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*), Standar nilai untuk rasio *quick* adalah sebesar >1, semakin tinggi besaran nilai rasio ini maka semakin tinggi likuiditasnya, Secara umum dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2023, besaran rasio *quick* di Kota Samarinda rasio ini dapat dikatakan sehat karena memiliki besaran nilai >1, hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi aktiva lancar Kota Samarinda mampu menutupi utang lancarnya.

i. Rasio Solvabilitas

Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva, maka semakin kecil rasionya maka semakin aman (*solvable*), sementara itu apabila semakin besar rasionya maka semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan yang menandakan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah, dengan kata lain porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas Kota Samarinda dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2023 diketahui bahwa proporsi utang daerah lebih kecil dibandingkan dengan aktivanya, sehingga dapat dikatakan bahwa utang pemerintah dapat ditutupi oleh aktivanya (*solvable*) yang berarti pengaruh utang terhadap aktiva di Kota Samarinda adalah sangat kecil.

j. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio Total Utang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2020 sebesar 0,01 dan pada tahun 2023 sebesar 0,01 Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil.

k. Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio Utang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2020 Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebesar 0,01 serta periode tahun 2023 sebesar 0,01. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Samarinda, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang.

L. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah umumnya mencakup kebijakan mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk memahami realisasi dari kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam periode tahun anggaran sebelumnya.

M. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari realisasi kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Samarinda pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan di masa depan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta menetapkan kebijakan belanja untuk masa mendatang.

n. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran dari tahun 2020 hingga tahun 2024 memberikan informasi tentang tingkat realisasi belanja daerah Kota Samarinda.

Tabel 2.129

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Samarinda Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
B	**BELANJA**	**3.238.162.506.950**	**2.978.185.111.174**	**91,97%**	**3.317.530.870.684**	**3.069.980.559.430**	**92,54%**	**3.338.310.329.964**	**2.987.848.106.437**	**89,50%**
a	**BELANJA OPERASI**	**1.941.887.842.303**	**1.816.178.901.099**	**93,53%**	**2.084.185.927.103**	**1.911.082.455.468**	**91,69%**	**2.323.819.669.383**	**2.117.388.618.923**	**91,12%**
1	Belanja Pegawai	1.280.116.457.348	1.216.845.222.333	95,06%	1.108.252.939.216	1.023.542.751.092	92,36%	1.060.861.287.852	1.027.954.895.525	96,90%
2	Belanja Barang dan Jasa	523.036.957.955	467.029.982.650	89,29%	920.965.166.316	839.408.590.570	91,14%	1.189.681.726.324	1.032.761.500.898	86,81%
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	409.760.000	167.998.000	41,00%
3	Belanja Hibah	138.734.427.000	132.303.696.117	95,36%	54.510.816.571	47.726.318.805	87,55%	54.537.545.207	43.128.364.500	79,08%
4	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00%	457.005.000	404.795.000	88,58%	18.329.350.000	13.375.860.000	72,98%
5	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	**BELANJA MODAL**	**1.190.256.536.647**	**1.066.113.143.022**	**89,57%**	**1.120.255.347.491**	**1.077.524.414.720**	**96,19%**	**996.967.910.581**	**860.449.938.353**	**86,31%**
1	Belanja Modal Tanah	24.506.782.020	14.754.178.146	60,20%	26.138.176.884	18.687.364.684	71,49%	72.198.419.975	36.021.838.621	49,89%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.953.317.816	115.771.805.211	89,09%	139.184.326.834	123.286.277.212	88,58%	107.157.936.918	90.211.880.292	84,19%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.057.478.814	121.835.065.893	71,64%	152.688.629.178	145.854.414.211	95,52%	141.404.376.773	130.862.676.300	92,54%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	861.662.007.447	809.804.044.134	93,98%	767.477.947.125	752.545.267.415	98,05%	668.596.153.194	582.743.311.404	87,16%

No	Uraian	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.076.950.550	3.948.049.638	96,84%	34.766.267.470	37.151.091.198	106,86 %	5.547.943.721	20.198.114.186	364,06 %
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	2.063.080.000	412.117.550	19,98%
6	Belanja Modal Dana BOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**103.919.482.000**	**93.794.421.718**	**90,26%**	**113.089.596.090**	**81.373.689.242**	**71,96%**	**17.522.750.000**	**10.009.549.161**	**57,12%**
1	Belanja Tidak Terduga	103.919.482.000	93.794.421.718	90,26%	113.089.596.090	81.373.689.242	71,96%	17.522.750.000	10.009.549.161	57,12%
d	**BELANJA TRANSFER**	**2.098.646.000**	**2.098.645.335**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
`	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**2.098.646.000**	**2.098.645.335**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	2.098.646.000	2.098.645.335	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Samarinda 2020-2024

Lanjutan Tabel 2.113

No	Uraian	2023		(%)	2024		(%)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi			
B	**BELANJA**	**4.819.216.521.000**	**4.429.959.804.298**	**91,92%**	**5.726.586.379.700**	**5.477.751.130.832**	**95,65%**	**1,02%**	**92,3%**
a	**BELANJA OPERASI**	**2.755.222.358.275**	**2.492.138.566.388**	**90,45%**	**2.968.120.496.296**	**2.881.290.343.019**	**97,07%**	**1,00%**	**92,8%**
1	Belanja Pegawai	1.080.596.606.212	974.299.843.648	90,16%	1.162.923.724.582	1.134.351.571.606	97,54%	0,83%	94,4%
2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.372.818.918	1.358.181.894.105	95,96%	1.544.305.891.829	1.467.796.117.633	95,05%	1,73%	91,7%
	Belanja Subsidi								
3	Belanja Hibah	258.790.433.145	159.288.078.635	61,55%	255.592.979.885	273.881.706.522	107,16%	8,51%	86,1%
4	Belanja Bantuan Sosial	462.500.000	368.750.000	79,73%	5.297.900.000	5.260.947.258	99,30%		68,1%
5	Belanja Bantuan Keuangan						#DIV/0!		
b	**BELANJA MODAL**	**2.063.994.162.725**	**1.936.638.601.701**	**93,83%**	**2.756.965.883.404**	**2.595.851.534.346**	**94,16%**	**1,54%**	**92,0%**
1	Belanja Modal Tanah	152.070.242.000	96.919.196.734	63,73%	101.948.488.070	68.288.983.726	66,98%	5,34%	62,5%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.240.863.037	216.628.835.493	95,33%	190.880.010.339	179.766.693.810	94,18%	1,62%	90,3%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	521.725.334.366	492.678.445.844	94,43%	965.516.577.576	912.425.268.299	94,50%	8,08%	89,7%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.159.743.305.322	1.111.790.641.599	95,87%	1.464.582.915.419	1.415.682.927.225	96,66%	1,01%	94,3%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.064.418.000	18.471.632.031	602,78%	31.899.092.000	19.363.811.286	60,70%	56,67%	246,2%
	Belanja Aset Lainnya	150.000.000	149.850.000	99,90%	2.138.800.000	323.850.000	15,14%		27,0%
6	Belanja Modal Dana BOS			0,00%					
c	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**-**	**1.182.636.208**	**0,00%**	**1.500.000.000**	**609.253.467**	**40,62%**		**52,0%**
1	Belanja Tidak Terduga	-	1.182.636.208	-	**1.500.000.000**	**609.253.467**	**40,62%**		**52,0%**
d	**BELANJA TRANSFER**								

No	Uraian	2023		(%)	2024		(%)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi			
`	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
e	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Kota Samarinda Tahun 2020-2024, diolah

o. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Kota Samarinda ditampilkan pada tabel di bawah.

Tabel 2.130
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Samarinda
Tahun 2020–2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	652.442.853.126	520.953.021.250	503.772.126.786	481.931.952.029
2	Belanja Tambahan Penghasilan	272.391.389.907	260.255.688.599	279.482.664.153	152.692.174.114
3	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	23.031.279	-	-	-
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.348.647.455	-	6.576.525.000	-
5	Insentif Pemungutan Retribusi	821.546.531	-	189.823.000	-
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	8.434.590.000	1.193.120.000	1.343.120.000	1.701.925.600
7	Belanja Honorarium PNS	72.073.154.543	-	-	-
8	Honorarium Non PNS	202.585.232.632	-	-	-
9	Belanja Uang Lembur	596.850.000	-	-	-
11	Belanja Premi Asuransi	22.956.012.305	457.505.141	593.633.035	606.438.580
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	818.245.000	-	-	-
13	Belanja Pakaian Kerja	1.858.306.250	-	-	-
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	902.262.000	-	-	-
15	Belanja Perjalanan Dinas	26.606.987.584	53.836.028.464	61.681.201.228	96.572.306.447
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	250.429.500	141.302.000	97.500.000	204.500.000
20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.882.633.500	1.735.861.470	3.404.434.270	7.816.161.515
TOTAL		**1.267.992.171.612**	**838.572.526.924**	**857.141.027.472**	**741.525.458.285**

Sumber: LK Kota Samarinda Tahun 2020-2024, diolah

Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, besaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan

aparatur Kota Samarinda menunjukkan besaran yang semakin menurun yang ditunjukkan dengan penurunan. persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah Kota Samarinda menunjukkan besaran 42,57 pada tahun 2020 persen dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 16,07 persen. Dari besaran tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 belanja daerah yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan di Kota Samarinda memiliki proporsi yang lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparaturnya.

Tabel 2.131
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Samarinda Tahun 2020-2023

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1	2020	1.267.992.171.612	2.978.185.111.174	42,57
2	2021	838.572.526.924	3.069.980.559.431	27,31
3	2022	857.141.027.472	3.002.848.106.437	28,54
4	2023	741.525.458.285	4.439.959.804.298	16,70

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Samarinda Tahun 2020-2023, Diolah

C. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah ini menggunakan beberapa pendekatan, seperti analisis sumber penutup defisit anggaran yang sebenarnya, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), analisis sisa lebih pembiayaan dari anggaran tahun tersebut, dan analisis proyeksi pembiayaan daerah.

1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan anggaran masa lalu dalam menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, defisit anggaran di Kota Samarinda terjadi kecenderungan meningkat, dengan besaran Rp105.349.076.251 di tahun 2020 dan sebesar Rp300.706.530.268 di tahun 2024.

Tabel 2.132

Defisit Riil Anggaran Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	2.872.836.034.923	2.860.333.904.523	3.671.108.194.050	4.026.969.291.271	5.177.044.600.564
2	Belanja Daerah	2.978.185.111.174	3.069.980.559.431	2.987.848.106.437	4.429.959.804.298	5.477.751.130.832
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	15.000.000.000	10.000.000.000	0
A.	Defisit Riil	-105.349.076.251	-209.646.654.908	668.260.087.613	-412.990.513.027	-300.706.530.268
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	645.333.377.526	539.983.776.275	330.337.121.367	998.635.191.776	585.717.659.685
B.	Total Realisasi Penerimaan	645.333.377.526	539.983.776.275	330.337.121.367	998.635.191.776	585.717.659.685
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**539.984.301.275**	**330.337.121.367**	**998.597.208.979**	**585.644.678.750**	**285.011.129.417**

Sumber: LRA Kota Samarinda Tahun 2020-2024, diolah

Penutup defisit riil anggaran Kota Samarinda bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Defisit anggaran Kota Samarinda yang terjadi tahun 2020 hingga 2024 Komposisi penerimaan pembiayaan daerah untuk menutup defisit riil anggaran disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.133

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Samarinda

Tahun 2020-2024*Sumber: Laporan Realisasi Kota Samarinda 2020-2024, Diolah*

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata–Rata Pertumbuhan
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	645.333.377.526	539.983.776.275	330.337.121.367	998.635.191.776	585.717.659.685	26,5%
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan						
3	Kegiatan lanjutan						
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya		645.333.377.526	539.983.776.275	330.337.121.367	998.635.191.776	585.717.659.685	26,5%

Sumber: Laporan Realisasi Kota Samarinda 2020-2024, Diolah

0. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.134
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Samarinda
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024		Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	**539.984.301.274,64**		**330.337.121.366,63**		**998.597.208.979,33**		**585.644.678.749**		**585.717.659.685**		
Bersumber Dari:											
Pelampauan Pendapatan	280.016.906.164,00		82.787.335.113.253,28		648.134.985.452,45		176.349.978.270,93		36.146.946.963,90		
Penghematan Belanja	259.967.395.110,64		247.550.311.253,28		350.462.223.526,88		409.256.716.702,32		248.105.513.284,08		
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-		(525.000,36)		-		37.983.776,33		95.388.985,58		
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	-		-		-		-		-		
Penghematan Pembiayaan Netto	-		(525.000,36)		-		37.983.776,33		95.388.985,58		

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Samarinda 2020-2024, diolah

2.5.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk mengestimasi kapasitas keuangan total daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja periodik yang wajib, serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun ke depan. Analisis ini juga mencakup alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran lainnya. Kapasitas keuangan daerah merujuk pada total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangi kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

2.5.3. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

1. Pendapatan Daerah

APBD tahun 2025 tersebut menjadi tahun dasar dalam melakukan proyeksi pendapatan 2026-2030, Pendapatan daerah Kota Samarinda

sampai dengan tahun 2030 ditargetkan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,75 persen, dengan rincian komponen pada Pendapatan Asli Daerah terbesar 3,81 persen, pendapatan transfer sebesar 2,44 persen dan lain- lain pendapatan daerah yang sah tidak diproyeksikan kenaikan atau penurunannya.

Tabel 2.135
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2030

Kode Rek	Uraian	APBD 2025	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.350.793.000.000**	**5.385.666.248.562**	**5.518.857.554.830**	**5.669.535.797.604**	**5.832.730.661.245**	**6.001.994.158.467**	**2,75%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.133.678.481.000**	**1.217.997.089.862**	**1.250.131.224.047**	**1.303.709.545.989**	**1.358.794.971.231**	**1.414.122.887.875**	**3,81%**
4.1.01	Pajak Daerah	907.476.760.000	969.916.760.000	999.928.760.000	1.047.528.344.200	1.098.501.524.689	1.140.555.846.094	4,14%
4.1.02	Retribusi Daerah	160.486.606.000	182.854.482.000	186.649.113.631	189.406.311.766	192.440.426.800	203.383.759.236	2,71%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.590.115.000	22.953.380.441	23.840.470.242	24.967.359.738	25.950.616.504	26.840.734.828	3,99%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.125.000.000	42.272.467.421	39.712.880.173	41.807.530.284	41.902.403.238	43.342.547.717	0,72%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4.194.114.519.000**	**4.144.669.158.700**	**4.245.726.330.783**	**4.342.826.251.615**	**4.450.935.690.014**	**4.564.871.270.592**	**2,44%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.888.322.952.900	2.705.323.663.822	2.769.725.341.377	2.830.336.801.243	2.901.037.102.757	2.977.280.432.420	2,42%
4.2.01	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.305.791.566.100	1.439.345.494.878	1.476.000.989.406	1.512.489.450.372	1.549.898.587.257	1.587.590.838.172	2,48%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**23.000.000.000**	**23.000.000.000**	**23.000.000.000**	**23.000.000.000**	**23.000.000.000**	**23.000.000.000**	**0,00%**
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	
4.3.02	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	0,00%

Sumber: Hasil proyeksi, 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda terdiri dari beberapa komponen utama, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara umum, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokalnya. Komponen PAD Kota Samarinda, sebagaimana juga berlaku secara nasional, meliputi:

1. Pajak Daerah, seperti:
- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak parkir
- Pajak air tanah
- Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

2 Retribusi Daerah, yang terbagi menjadi:
- Retribusi jasa umum (seperti retribusi pelayanan kesehatan, persampahan)
- Retribusi jasa usaha (misalnya retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar daerah)
- Retribusi perizinan tertentu (seperti IMB atau sekarang disebut PBG - Persetujuan Bangunan Gedung)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, seperti:
- Laba dari BUMD (misalnya PDAM Tirta Kencana Samarinda)
- Dividen atau penyertaan modal di perusahaan lain

4. Lain-lain PAD yang Sah, contohnya:
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Denda atas keterlambatan pembayaran pajak atau retribusi
- Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dapat dilakukan melalui berbagai strategi dan upaya yang terstruktur dan

berkelanjutan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda:

1. Optimalisasi Pajak Daerah
    - Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Melalui sosialisasi, insentif, dan penegakan hukum terhadap wajib pajak daerah (seperti pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, parkir).
    - Digitalisasi Sistem Pajak: Menggunakan sistem digital untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah guna meminimalkan kebocoran dan meningkatkan transparansi.
    - Ekstensifikasi Pajak: Menambah basis pajak baru seperti objek pajak yang sebelumnya belum terdata.
2. Peningkatan Retribusi Daerah
    - Evaluasi dan Penyesuaian Tarif: Menyesuaikan tarif retribusi dengan kondisi ekonomi terkini dan kualitas layanan.
    - Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Meningkatkan layanan seperti pasar, terminal, parkir, dan pelayanan kesehatan agar masyarakat bersedia membayar retribusi.
    - Sistem Pembayaran Non-Tunai: Untuk mengurangi potensi kebocoran pendapatan retribusi.
3. Pengelolaan Aset Daerah yang Produktif
    - Pendataan dan Penataan Aset Daerah: Memastikan seluruh aset milik daerah tercatat dengan baik.
    - Pemanfaatan Aset Secara Komersial: Menyewakan tanah atau bangunan milik daerah yang tidak terpakai untuk kegiatan usaha atau investasi.
    - Kerjasama Pemanfaatan Aset (KSO/KSP): Bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola aset daerah secara profesional.
4. Pengembangan Usaha Milik Daerah (BUMD)
    - Revitalisasi BUMD: Meningkatkan kinerja BUMD agar lebih profesional dan memberikan dividen.
    - Diversifikasi Usaha BUMD: Mendorong BUMD untuk masuk ke sektor-sektor potensial seperti energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan jasa keuangan mikro.
    - Kemitraan Strategis: Mengundang investor untuk memperkuat BUMD melalui skema joint venture.

5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   - Promosi Pariwisata Lokal: Mengembangkan objek wisata unggulan di Samarinda seperti Sungai Mahakam, budaya Dayak, dan wisata religi.
   - Event dan Festival Daerah: Menarik wisatawan dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
   - Dukungan UMKM Kreatif: Mendorong produk lokal agar naik kelas dan menembus pasar nasional/internasional.
6. Digitalisasi Layanan Pemerintah
   - Satu Data PAD: Membangun sistem informasi PAD yang terintegrasi antar OPD.
   - E-Government dan Smart City: Meningkatkan efisiensi layanan publik untuk menarik investor dan meningkatkan iklim usaha.
7. Kolaborasi dengan Swasta dan Masyarakat
   - Kemitraan Publik-Swasta (PPP): Dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan ekonomi daerah.
   - CSR Perusahaan Tambang/Industri: Diarahkan untuk mendukung program PAD seperti pengembangan UMKM dan pelatihan kerja.

p. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih. Belanja ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Kota Samarinda,

Lebih lanjut, belanja pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,34 perse. Rata-rata pertumbuhan positif ditunjukkan oleh komponen belanja operasi sebesar 1,84 persen dan belanja modal sebesar 2,95 persen, sementara Belanja tidak terduga tidak diproyeksikan. Adapun proyeksi Belanja Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.136

Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2030

Kode Rek	Uraian	APBD 2025	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan
			2026	2027	2028	2029	2030	
5	**BELANJA DAERAH**	**5.850.793.000.000**	**5.385.666.248.562,00**	**5.518.857.554.830,00**	**5.669.535.797.604,00**	**5.832.730.661.245,00**	**6.001.994.158.467,00**	**2,75%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.146.104.470.136**	**3.181.978.749.138,00**	**3.250.990.167.924,00**	**3.335.575.962.568,00**	**3.430.708.823.125,00**	**3.529.882.069.572,00**	**2,62%**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.315.863.040.583	1.680.093.930.216,00	1.723.776.372.402,00	1.768.594.558.085,00	1.814.578.016.595,00	1.861.757.045.027,00	2,60%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.656.416.555.423	1.328.059.944.791,00	1.353.388.921.391,00	1.393.156.530.352,00	1.442.305.932.399,00	1.494.300.150.414,00	2,90%
5.01.05	Belanja Hibah	169.650.774.130	169.650.774.131,00	169.650.774.131,00	169.650.774.131,00	169.650.774.131,00	169.650.774.131,00	0,00%
5.01,06	Belanja Bantuan Sosial	4.174.100.000	4.174.100.000,00	4.174.100.000,00	4.174.100.000,00	4.174.100.000,00	4.174.100.000,00	0,00%
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.664.688.529.864**	**2.153.687.499.424,00**	**2.217.867.386.906,00**	**2.283.959.835.036,00**	**2.352.021.838.120,00**	**2.422.112.088.895,00**	**2,98%**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**40.000.000.000**	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	0,00%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**-**	**5.385.666.248.562,00**	**5.518.857.554.830,00**	**5.669.535.797.604,00**	**5.832.730.661.245,00**	**6.001.994.158.467,00**	**2,75%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	**3.181.978.749.138,00**	**3.250.990.167.924,00**	**3.335.575.962.568,00**	**3.430.708.823.125,00**	**3.529.882.069.572,00**	2,62%

Sumber: Hasil proyeksi, 2025

2.5.4.Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Dalam kerangka pendanaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih positif antara pendapatan dan belanja dalam suatu periode anggaran, yang tersisa setelah semua pengeluaran dan kewajiban dibayarkan. SiLPA menunjukkan jumlah dana yang tidak terpakai dari anggaran yang telah dialokasikan.

Tabel 2.137

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2030

Kode Rek	Uraian	APBD 2025	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan
			2026	2027	2028	2029	2030	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**500.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**500.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.000.000.000	0	0	0	0	0	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: hasil proyeksi, 2025

2.5.5. Perhitungan Kerangka Pendanaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Dalam kerangka pendanaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih positif antara pendapatan dan belanja dalam suatu periode anggaran, yang tersisa setelah semua pengeluaran dan kewajiban dibayarkan. SiLPA menunjukkan jumlah dana yang tidak terpakai dari anggaran yang telah dialokasikan. SiLPA pada APBD tahun 2025 sebesar Rp 500.000.000.000,-.

Tabel 2.138

SiLPA Kota Samarinda Tahun 2025-2030

Tahun	SiLPA (Rp)
2025 (APBD)	500.000.000.000
2026	0
2027	0
2028	0
2029	0
2030	0

Sumber: Hasil proyeksi, 2025

0. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Kota Samarinda pada periode tahun 2025 sampai dengan 2030 disusun berdasarkan definisi belanja wajib dan belanja mengikat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Rincian komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat ditampilkan pada tabel di bawah.

Tabel 2.139
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kota Samarinda Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi		Proyeksi							
		2026	%	2027	%	2028	%	2029	%	2030	%
A	**Belanja Wajib**	**5.024.937.181.220**		**5.128.646.785.470**		**5.249.831.042.466**		**5.383.506.838.881**		**5.523.213.499.314**	
1	Belanja Pegawai	1.323.485.850.778	22,5 %	1.356.572.997.049	22,6 %	1.390.487.321.977	22,7 %	1.425.249.505.026	22,7 %	1.460.880.742.652	22,7 %
2	Pendidikan	968.284.053.053	16,5 %	975.449.355.045	16,3 %	982.667.680.273	16,0 %	989.939.421.107	15,8 %	997.264.972.823	15,5 %
3	Infrastruktur	2.678.011.972.513	45,6 %	2.741.060.979.244	45,7 %	2.820.701.416.523	46,0 %	2.911.929.076.840	46,3 %	3.008.261.670.546	46,7 %
4	Peningkatan Kapasitas SDM	29.593.977.417	0,5%	29.812.972.850	0,5%	30.033.588.849	0,5%	30.255.837.407	0,5%	30.479.730.603	0,5%
5	Penguatan APIP	25.561.327.459	0,4%	25.750.481.282	0,4%	25.941.034.844	0,4%	26.132.998.501	0,4%	26.326.382.690	0,4%
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-	-	-
1	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Wajib	**5.024.937.181.220**		**5.128.646.785.470**		**5.249.831.042.466**		**5.383.506.838.881**		**5.523.213.499.314**	

Sumber: hasil proyeksi, 2025

1. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, konsep kapasitas keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak lagi relevan karena perubahan dalam Belanja Daerah. Oleh karena itu, proyeksi belanja untuk tahun 2025 hingga 2029 disusun sesuai dengan konsep dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Samarinda untuk tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.140
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025–2030

Kode Rek	Uraian	APBD 2025	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan
			2026	2027	2028	2029	2030	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.350.793.000.000**	**5.385.666.248.562**	**5.518.857.554.830**	**5.669.535.797.604**	**5.832.730.661.245**	**6.001.994.158.467**	**2,75%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.133.678.481.000**	**1.217.997.089.862**	**1.250.131.224.047**	**1.303.709.545.989**	**1.358.794.971.231**	**1.414.122.887.875**	3,81%
4.1.01	Pajak Daerah	907.476.760.000	969.916.760.000	999.928.760.000	1.047.528.344.200	1.098.501.524.689	1.140.555.846.094	4,14%
4.1.02	Retribusi Daerah	160.486.606.000	182.854.482.000	186.649.113.631	189.406.311.766	192.440.426.800	203.383.759.236	2,71%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.590.115.000	22.953.380.441	23.840.470.242	24.967.359.738	25.950.616.504	26.840.734.828	3,99%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.125.000.000	42.272.467.421	39.712.880.173	41.807.530.284	41.902.403.238	43.342.547.717	0,72%
		-	-	-	-	-	-	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4.194.114.519.000**	**4.144.669.158.700**	**4.245.726.330.783**	**4.342.826.251.615**	**4.450.935.690.014**	**4.564.871.270.592**	**2,44%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.888.322.952.900	2.705.323.663.822	2.769.725.341.377	2.830.336.801.243	2.901.037.102.757	2.977.280.432.420	2,42%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.488.933.000	6.671.221.366	6.971.426.328	7.285.140.513	7.612.971.836	7.955.555.568	4,50%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.607.010.020.900	1.332.664.599.405	1.359.505.963.691	1.379.305.178.776	1.407.506.023.448	1.439.850.352.449	1,95%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	927.366.947.000	969.098.459.615	990.903.174.956	1.013.198.496.393	1.035.995.462.562	1.059.305.360.469	2,25%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus(DAK)	346.457.052.000	396.889.383.436	412.344.776.402	430.547.985.562	449.922.644.912	470.169.163.933	4,33%

Kode Rek	Uraian	APBD 2025	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan
			2026	2027	2028	2029	2030	
4.2.01	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.305.791.566.100	1.439.345.494.878	1.476.000.989.406	1.512.489.450.372	1.549.898.587.257	1.587.590.838.172	2,48%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**23.000.000.000**	**23.000.000.000**	**23.000.000.000**	**23.000.000.000**	**23.000.000.000**	**23.000.000.000**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
4.3.02	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	0,00%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**500.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.000.000.000	0	0	0	0	0	
	Total Penerimaan	**5.850.793.000.000**	**5.385.666.248.562**	**5.518.857.554.830**	**5.669.535.797.604**	**5.832.730.661.245**	**6.001.994.158.467**	**2,34%**
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
5	**BELANJA DAERAH**	**5.850.793.000.000**	**5.385.666.248.562**	**5.518.857.554.830**	**5.669.535.797.604**	**5.832.730.661.245**	**6.001.994.158.467**	**2,34%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.146.104.470.136**	**3.155.154.276.049**	**3.213.109.075.586**	**3.272.264.068.581**	**3.332.645.529.717**	**3.394.280.334.601**	**1,84%**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.315.863.040.583	1.323.485.850.778	1.356.572.997.049	1.390.487.321.977	1.425.249.505.026	1.460.880.742.652	2,50%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.656.416.555.423	1.657.843.551.139	1.682.711.204.406	1.707.951.872.473	1.733.571.150.560	1.759.574.717.818	1,50%
5.01.05	Belanja Hibah	169.650.774.130	169.650.774.131	169.650.774.131	169.650.774.131	169.650.774.131	169.650.774.131	0,00%
5.01,06	Belanja Bantuan Sosial	4.174.100.000	4.174.100.000	4.174.100.000	4.174.100.000	4.174.100.000	4.174.100.000	0,00%
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.664.688.529.864**	**2.678.011.972.513**	**2.741.060.979.244**	**2.820.701.416.523**	**2.911.929.076.840**	**3.008.261.670.546**	**2,95%**

Kode Rek	Uraian	APBD 2025	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan
			2026	2027	2028	2029	2030	
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**40.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	0,00%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-
								-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pengeluaran	**5.850.793.000.000**	**5.385.666.248.562**	**5.518.857.554.830**	**5.669.535.797.604**	**5.832.730.661.245**	**6.001.994.158.467**	**2,34%**

Sumber: Hasil proyeksi, 2025

Pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda difokuskan pada peningkatan kualitas jalan, konektivitas antarwilayah, pengendalian banjir, kualitas SDM, penataan tepian sungai dan aksesibilitas ke pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk dukungan terhadap IKN. Hal ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan, drainase, sarana transportasi darat, rumah sakit bertaraf internasional, sekolah terpadu dan telekomunikasi. Selain itu, dikembangkan sentra-sentra industri berkelanjutan, permukiman, kesehatan, serta pendidikan. Upaya ini juga didukung oleh pembiayaan inovatif melalui skema APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), CSR (Corporate Social Responsibility) / Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Dana Hibah dan Bantuan Keuangan, Pinjaman Daerah serta Investasi Swasta.

Terkait KPBU Pemerintah Kota Samarinda menggagas pengembangan **RSUD I.A. Moeis** menjadi rumah sakit **Tipe B Pendidikan bertaraf internasional**, lengkap dengan layanan spesialis dan subspesialistik serta ruang perawatan unggulan. Ini merupakan proyek rumah sakit KPBU pertama pada sektor kesehatan di Indonesia. Skema KPBU yang digunakan adalah DBFMT (Design – Build – Finance – Maintenance – Transfer): skema dimana badan usaha swasta mendesain, membangun, membiayai, memelihara, kemudian menyerahkan kembali ke pemerintah di akhir masa konsesi.

Proyek KPBU Pengembangan RSUD I. A. Moeis dimulai melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/KM.8/2023, tanggal 18 Agustus 2023.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan Kota Samarinda baik secara sektoral maupun kewilayahan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat.

2.6.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah mengingat permasalahan pembangunan bersifat kompleks dan

multidimensional yang bersumber dari permasalahan sektoral maupun kewilayahan. Permasalahan pembangunan di Kota Samarinda dapat teratasi dan dituntaskan dengan adanya kebijakan pemerintah Kota Samarinda yang tepat dan relevan.

Permasalahan pembangunan daerah Kota Samarinda akan diidentifikasi melalui berbagai fenomena yang dikaji dari data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Oleh karenanya, perlu data dan informasi yang valid dan terkini dalam mengkaji setiap gerakan data sehingga tampak fenomena yang terjadi terutama permasalahan pembangunan Kota Samarinda.

2.6.2. Permasalahan Utama Pembangunan

Pada bagian ini disajikan permasalahan utama pembangunan yang merupakan kristalisasi dari beberapa masalah yang sangat mempengaruhi perkembangan kota. Permasalahan utama pembangunan akan memberi masukan bagi penentuan sasaran pembangunan untuk pembangunan jangka menengah daerah. Hasil identifikasi permasalahan utama pembangunan diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas SDM yang belum optimal

Hasil pembangunan yang adil dan merata harus menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan dampak nyata pembangunan kepada seluruh rakyat atau masyarakat dalam suatu daerah tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Dampak pembangunan diharapkan dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat tercipta. Pencapaian kesejahteraan masyarakat bukanlah tugas yang mudah bagi pemerintah daerah, oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan maka diperlukan monitoring dan evaluasi dengan melihat target kinerja pembangunan daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan lain-lain.

Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indikator utama dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat menunjukkan perkembangan yang positif dalam realisasi pembangunan daerah Kota Samarinda. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda sebagai tolok ukur derajat kesehatan, pendidikan, serta kemampuan ekonomi masyarakat konsisten menunjukkan peningkatan dalam 5 tahun terakhir,

dari 80,20 pada tahun 2019 menjadi 82,61 pada tahun 2023. Angka IPM ini baik secara level regional Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional tergolong tinggi karena berada di atas rata-rata IPM provinsi (78,20 tahun 2023) dan IPM nasional (74,39 tahun 2023). Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, IPM Kota Samarinda menduduki peringkat pertama. Tingginya IPM Kota Samarinda tidak serta merta menjadikan pembangunan sumber daya manusia berhenti, namun beberapa kualitas di aspek lain harus ditingkatkan demi mengisi kekosongan-kekosongan kualitas di beberapa bidang atau sektor pembangunan.

2. Belum optimalnya sektor unggulan daerah

Sektor Unggulan Daerah Kota Samarinda dengan perkembangan tinggi dan kontribusi tinggi yaitu, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Sektor Jasa Lainnya.

Sektor-sektor tersebut adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Samarinda. Pertumbuhan pesat di sektor-sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian kota, baik dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan PAD, maupun mendukung perkembangan sektor lainnya. Untuk menjaga pertumbuhannya, penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi untuk terus mengembangkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor-sektor unggulan ini.

Sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan berkembangnya sektor konsumsi dan kebutuhan masyarakat. Di Samarinda, sektor ini berkembang pesat dengan semakin banyaknya pusat perbelanjaan modern (mall, hypermarket) dan toko-toko eceran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Samarinda, karena tingginya aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat. Pada tahun 2023, sektor perdagangan besar dan eceran tercatat berkontribusi sekitar 15-20% terhadap PDRB Kota Samarinda, yang mencerminkan pentingnya sektor ini sebagai penggerak ekonomi lokal.

Samarinda sebagai ibu kota provinsi memiliki permintaan yang tinggi terhadap sektor akomodasi dan makan minum, baik untuk kebutuhan wisatawan, perjalanan dinas, maupun kegiatan bisnis. Hotel, restoran, kafe, dan rumah makan berkembang pesat, terutama di sekitar pusat kota dan area bisnis. Sektor ini semakin penting dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan pelaku bisnis yang membutuhkan layanan akomodasi dan kuliner. Pada 2023, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan menyumbang sekitar 10-12% dari PDRB Kota Samarinda, didorong oleh perkembangan sektor pariwisata dan sektor bisnis yang terus berkembang.

Sektor informasi dan komunikasi di Samarinda berkembang pesat, seiring dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat akan konektivitas. Penyediaan layanan internet, telekomunikasi, serta media massa (termasuk media sosial) menjadi semakin penting. Sektor ini mendukung berbagai sektor lainnya, seperti perdagangan, pendidikan, dan bisnis. Ketersediaan infrastruktur digital yang baik memperkuat daya saing daerah. Sektor ini berkontribusi sekitar 5-8% terhadap PDRB Kota Samarinda. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh kebutuhan akan internet cepat dan platform digital untuk berbagai keperluan.

Sektor jasa keuangan di Samarinda semakin berkembang dengan bertambahnya lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan lembaga pembiayaan. Layanan keuangan ini penting untuk mendukung kegiatan bisnis dan perdagangan. Jasa keuangan berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi lainnya, memberikan pembiayaan, serta mendukung stabilitas ekonomi melalui produk asuransi dan investasi. sektor jasa keuangan dan asuransi di Samarinda memberikan kontribusi sekitar 6-7% terhadap PDRB Kota Samarinda. Pertumbuhannya didorong oleh meningkatnya permintaan akan layanan perbankan dan asuransi.

Sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan di Samarinda mencakup berbagai layanan publik dan fasilitas pemerintah, serta perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program jaminan sosial. Meskipun sektor ini bukan sektor yang menghasilkan pendapatan langsung, kontribusinya sangat penting dalam menyediakan stabilitas sosial dan infrastruktur pemerintahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor ini memberikan kontribusi sekitar 8-10% terhadap PDRB Kota Samarinda.

Sektor jasa lainnya mencakup layanan seperti pendidikan, kesehatan, konsultasi, dan jasa profesional lainnya. Sebagai kota yang terus berkembang, kebutuhan terhadap layanan ini meningkat, baik dari kalangan individu maupun sektor bisnis. Sektor jasa lainnya memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. Sektor ini menyumbang sekitar 7-9% terhadap PDRB Kota Samarinda.

Sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Samarinda, dengan pertumbuhan yang tinggi dan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB kota tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor perdagangan, akomodasi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta administrasi pemerintahan berperan besar dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Samarinda perlu terus mendukung perkembangan sektor-sektor ini melalui kebijakan yang memfasilitasi investasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia agar lebih optimal.

3. Masih tingginya angka pengangguran

Dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan di Kota Samarinda sebagai wilayah tujuan urbanisasi, pemerintah perlu menyiapkan lapangan pekerjaan yang sangat besar agar mampu menyerap tenaga kerja yang kedepannya akan mengurangi tingkat pengangguran. TPT Kota Samarinda pada tahun 2020 sampai dengan 2024 bersifat fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2024 menjadi 5,75 persen. Selain itu, jika dilihat perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Timur, tingkat pengangguran Kota Samarinda pada tahun 2024 lebih tinggi yakni sebesar 5,75 persen, sedangkan angka provinsi pada tahun yang sama hanya mencapai 5,14 persen. Hal ini sebagai imbas dari posisi Kota Samarinda yang berstatus kota sekaligus ibukota provinsi sehingga banyak migrasi penduduk untuk mencari kerja namun belum mendapatkannya sehingga menjadi pengangguran.

4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin mempengaruhi Kota Samarinda. Sebagai ibu kota Provinsi

Kalimantan Timur, Samarinda menghadapi dampak perubahan iklim yang dapat memengaruhi berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, infrastruktur, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Samarinda, yang terletak di wilayah tropis, telah merasakan peningkatan suhu yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Ini menyebabkan suhu udara yang lebih panas, yang dapat memengaruhi kenyamanan hidup masyarakat dan memperburuk kualitas udara, terutama pada musim kemarau. Secara umum, suhu udara di Samarinda menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu rata-rata harian di Samarinda pada tahun 2023 tercatat sekitar 29-30°C, yang lebih tinggi dari suhu rata-rata di tahun 1980-an yang berkisar antara 28-29°C.

Pada musim kemarau, suhu maksimum di beberapa hari bisa mencapai 32-34°C, menunjukkan adanya tren peningkatan suhu yang lebih panas, terutama pada bulan-bulan puncak kemarau (Juni-Agustus).

Adanya perubahan dalam pola curah hujan di Samarinda. Pada periode 10 tahun terakhir, terjadi penurunan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 5-10% dibandingkan dengan data historis.

Musim hujan yang biasanya dimulai pada Oktober dan berakhir pada Maret kini mulai mengalami keterlambatan, dan intensitas hujan pada bulan-bulan tertentu semakin tinggi. Di sisi lain, musim kemarau menjadi lebih panjang dan intensitasnya semakin meningkat, yang mengarah pada periode kekeringan yang lebih lama. Curah hujan tahunan pada 2023 tercatat sekitar 2.400 mm, yang menunjukkan variasi curah hujan yang cukup besar, terutama dengan intensitas hujan yang lebih tinggi pada musim hujan.

Perubahan pola curah hujan yang ekstrem telah meningkatkan risiko banjir di Samarinda. Pada 2020 dan 2021, kota ini mengalami beberapa kejadian banjir besar yang disebabkan oleh hujan lebat yang terus-menerus dalam waktu singkat. Pada awal tahun 2021, Samarinda tercatat mengalami banjir besar yang mempengaruhi lebih dari 20.000 jiwa dan menyebabkan kerusakan infrastruktur, rumah, dan fasilitas umum. Curah hujan yang melebihi 200 mm dalam satu hari menjadi salah satu faktor penyebab banjir tersebut. Data BMKG mencatat bahwa ada kecenderungan meningkatnya intensitas banjir di kawasan perkotaan,

dengan banjir terjadi lebih sering setiap tahun, terutama di kawasan dataran rendah dan sekitar Sungai Mahakam.

Samarinda terletak di sepanjang Sungai Mahakam yang mengalir ke Laut Makassar. Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim dapat menyebabkan intrusi air laut ke dalam sungai, mengancam pasokan air bersih di kota. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tingkat kenaikan permukaan laut di wilayah pesisir Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 2-3 mm per tahun, yang berpotensi memperburuk masalah intrusi air laut ke sistem pasokan air bersih di Samarinda.

Perubahan iklim di Samarinda juga mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kenaikan suhu dan kelembaban yang lebih tinggi meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan cuaca ekstrem, seperti penyakit pernapasan akibat polusi udara, serta penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti malaria dan demam berdarah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Samarinda, pada tahun 2021, tercatat sekitar 1.200 kasus demam berdarah yang dilaporkan, sebagian besar terjadi selama musim hujan yang lebih intens. Banjir dan perubahan cuaca yang ekstrem juga memberi tekanan pada sistem kesehatan, dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan kewalahan dalam menangani pasien yang terdampak bencana dan penyakit.

Perubahan iklim mengancam ketahanan pangan di Samarinda. Penurunan curah hujan dan musim kemarau yang lebih panjang menyebabkan kekeringan yang mempengaruhi produksi pertanian, terutama tanaman pangan seperti padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pada 2023, sektor pertanian di Samarinda mengalami penurunan hasil produksi sebesar 15-20% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, akibat perubahan cuaca yang tidak terduga.

Perubahan iklim di Kota Samarinda sudah menunjukkan dampaknya yang signifikan, termasuk peningkatan suhu, perubahan curah hujan yang ekstrem, banjir, dan peningkatan risiko kesehatan. Dengan data yang ada, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih intensif harus terus dilakukan untuk meminimalkan dampak perubahan iklim.

5. Pengelolaan lingkungan hidup belum optimal dan berkelanjutan

Kualitas lingkungan hidup di Kota Samarinda menghadapi sejumlah tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan di kota ini. Meskipun Samarinda telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, kualitas lingkungan hidup yang rendah masih menjadi masalah yang perlu segera ditangani. Faktor-faktor seperti polusi udara, deforestasi, pengelolaan sampah yang buruk, serta perubahan iklim turut berkontribusi terhadap rendahnya kualitas lingkungan hidup di Samarinda**.**

Samarinda menghadapi masalah kualitas udara yang buruk, terutama pada musim kemarau. Tingginya tingkat polusi udara sebagian besar disebabkan oleh aktivitas industri, kendaraan bermotor, serta kebakaran lahan yang sering terjadi. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2022, Indeks Kualitas Udara (IKU) di Samarinda mencapai nilai yang tidak sehat pada beberapa titik, dengan PM 2.5 (partikulat udara) sering kali melampaui batas aman, mencapai 150 µg/m³, yang jauh di atas standar ambang batas yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 25 µg/m³ untuk kualitas udara yang sehat.

Kota Samarinda menghadapi masalah pengelolaan sampah yang belum optimal. Masyarakat yang terus berkembang menghasilkan sampah yang sangat banyak, sementara sistem pengelolaan sampah yang ada masih terbatas dan seringkali tidak efektif. Berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Samarinda, kota ini menghasilkan sekitar 1.000 ton sampah per hari pada 2023. Namun, hanya sekitar 60-70% sampah yang dapat dikelola dengan baik, sementara sisanya sering kali dibuang sembarangan atau dibakar, yang berkontribusi pada pencemaran udara.

Sungai Mahakam, yang merupakan sumber air utama bagi warga Samarinda, mengalami pencemaran akibat limbah domestik, industri, serta kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Pencemaran ini mengancam pasokan air bersih bagi ribuan orang. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Samarinda, kualitas air Sungai Mahakam menunjukkan kadar pencemaran yang tinggi, dengan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) sering kali melampaui standar yang diperbolehkan untuk air konsumsi. Pencemaran air ini tidak hanya berdampak pada ekosistem

sungai, tetapi juga pada kesehatan masyarakat, mengingat banyak warga yang masih bergantung pada Sungai Mahakam sebagai sumber air bersih mereka.

6. Belum optimalnya pengendalian banjir

Permasalahan lain yang mendesak yang dimiliki Kota Samarinda dengan peningkatan jumlah penduduk yang paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai ibukota provinsi adalah masalah penanganan banjir. Kota Samarinda dikenal sebagai daerah yang rendah, sehingga tidak mengherankan apabila setiap tahun terjadi bencana banjir genangan yang melanda 50% kecamatan di ibukota provinsi ini. Pada tahun 2019 terjadi bencana banjir genangan yang melanda Kota Samarinda selama kurang lebih 14 hari, dan pada tahun 2020 terjadi kembali hal serupa. Dengan pertimbangan ini, penanganan banjir menjadi agenda prioritas nomor 1 dalam RPJMD Kota Samarinda periode 2011-2015 dan 2016-2021. Bahkan karena kedudukannya sebagai ibukota provinsi, penanganan banjir di Kota Samarinda memperoleh dukungan dari pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat melalui instansi vertikal Balai Wilayah Sungai. Di masa datang, Kota Samarinda perlu merencanakan pembangunan kotanya yang dapat menyelesaikan masalah banjir dengan memperbaiki tata dan tingkatan drainase (primer, sekunder, tersier, lokal) dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Pada awal tahun 2021, Samarinda mengalami banjir besar yang menggenangi lebih dari 100 kawasan pemukiman, dengan lebih dari 20.000 jiwa terdampak. Curah hujan yang mencapai 300 mm dalam 24 jam menjadi penyebab utama banjir tersebut. Pada Februari 2022, hujan lebat menyebabkan banjir yang merendam kawasan Samarinda Ulu, dengan air mencapai ketinggian 1-2 meter, mempengaruhi lebih dari 10.000 orang. Tanggul penahan air yang sudah mulai menua dan tidak lagi efektif menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir besar tersebut.

Salah satu masalah utama dalam pengendalian banjir adalah sistem drainase yang tidak memadai. Banyak saluran drainase yang sempit, tertutup, atau bahkan tersumbat sampah. Hal ini membuat air hujan tidak dapat mengalir dengan baik ke sungai atau sistem pembuangan yang lebih besar.

Salah satu upaya pengendalian banjir di Samarinda adalah pembangunan tanggul dan waduk, namun infrastruktur ini tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah banjir besar. Sebagian besar tanggul di sepanjang Sungai Mahakam sudah menua dan tidak mampu menahan debit air yang besar, terutama pada musim hujan yang intens. Waduk yang ada di Samarinda, seperti Waduk Sempaja, tidak mampu menampung air hujan yang semakin besar karena kapasitasnya terbatas. Waduk tersebut hanya bisa menampung sekitar 2 juta meter kubik air, yang tidak mencukupi saat hujan deras yang berlangsung berjam-jam.

Laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa sedimentasi di Sungai Mahakam telah meningkat drastis dalam dua dekade terakhir, dengan volume sedimentasi yang mencapai 100.000 meter kubik per tahun, yang mengurangi kapasitas sungai dalam menampung air hujan.

Banjir yang terjadi setiap tahun menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Infrastruktur yang rusak, kerugian pada sektor pertanian, serta kerusakan pada rumah dan aset masyarakat menghambat pertumbuhan ekonomi kota ini. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, pada tahun 2021, kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat banjir besar diperkirakan mencapai Rp 50-70 miliar, yang mencakup biaya perbaikan infrastruktur, rumah, dan fasilitas umum yang rusak.

7. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kondisi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan, adalah meningkatnya tingkat kualitas dan kondisi jalan. Panjang jalan dalam kondisi baik selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 panjang jalan dalam kondisi baik yaitu sepanjang 448.180 km dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 442.631 km, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 733.490 dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan serta kenaikan kembali hingga menjadi 729.352 km di tahun 2023. Demikian pula dengan Panjang jalan dalam kondisi rusak berat, dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2023

juga mengalami fluktuasi dengan kondisi pada tahun 2023 mencapai 79.022 km atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 58.312 km.

Selain jalan, jaringan irigasi juga diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Panjang jaringan irigasi di Kota Samarinda masih belum memadai untuk mendukung penuh lahan pertanian yang tersedia. Dengan luas areal daerah irigasi seluas 4.126,260 Ha, luasan ini belum dapat dimanfaatkan maksimal untuk menghasilkan beras dikarenakan belum baiknya jaringan irigasi. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas jaringan irigasi perlu diperhatikan dalam rangka mendukung Kota Samarinda mewujudkan ketahanan pangan terutama beras. Permasalahan lainnya yaitu terdapat peningkatan saluran kondisi rusak berat pada Jaringan Irigasi Non Teknis yang semula hanya 6.479 meter pada tahun 2018 menjadi 8.420,55 meter di tahun 2022. Begitu pula dengan saluran kondisi rusak berat pada jaringan irigasi teknis baik pada panjang jaringan primer, panjang jaringan sekunder dan panjang jaringan tersier.

8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat tercapainya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Meskipun berbagai inisiatif telah diambil untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, namun masih terdapat kendala yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Beberapa aspek utama yang mengindikasikan belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Samarinda antara lain transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, serta pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran yang belum maksimal.

Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Namun, di Samarinda, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik masih terbatas. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Kualitas sumber daya manusia di pemerintahan Kota Samarinda masih perlu ditingkatkan. Banyak ASN yang belum memiliki keterampilan dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efektif dan efisien. Hal ini berujung pada lambatnya proses pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Birokrasi yang lambat dan proses administrasi yang berbelit-belit menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan publik di Samarinda. Meskipun berbagai sistem digitalisasi mulai diterapkan, banyak aspek pelayanan publik yang masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan keterlambatan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Praktik korupsi yang terjadi dalam pemerintahan Kota Samarinda masih menjadi masalah serius yang menghambat tata kelola pemerintahan yang baik. Meski ada upaya pencegahan dan penindakan, namun kasus korupsi masih kerap terjadi di tingkat pemerintahan daerah.

Meskipun sudah ada beberapa inisiatif untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem perizinan online dan aplikasi layanan publik, adopsi teknologi masih terbilang lambat dan belum merata. Hal ini menghambat efektivitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data.

2.6.3. Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Dari hasil identifikasi, analisis, maupun kajian data dan informasi pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, maka dirumuskan masalah pokok, masalah, dan akar masalah, sebagai berikut:

Tabel 2.141
Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Kota Samarinda Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
1	Pendidikan				
	Belum optimalnya Kualitas Pendidikan (Bagaimana membentuk kualitas siswa yang tidak	1	Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1	Masih belum maksimalnya pengembangan teknologi pendidikan yang meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
	hanya mewujudkan wajib belajar 12 tahun tetapi dapat mengembangkan kemampuan siswa yang lebih berpikir kritis, dan dapat memecahkan masalah yang lebih kompetitif)			2	Masih rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan memecahkan masalah
				3	Masih rendahnya budaya literasi di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas.
				4	Masih minimnya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional
				5	Masih terbatasnya penggunaan data dan analisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengidentifikasi area perbaikan
				6	Masih lemahnya pengembangan program literasi dan numerasi yang spesifik dan terarah untuk
				7	Masih belum terlihat pembentukan karakter yang dimulai dari usia dini
				8	Belum terwujudnya pendidikan inklusif bagi kelompok disabilitas
2	Kesehatan				
	Masih rendahnya angka usia harapan hidup Kota Samarinda bila dibandingkan dengan provinsi, dimana pada tahun 2019 sebesar 74,17 tahun, sedangkan provinsi 74,22 tahun.	1	Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, gizi kurang (ada kecenderungan prevalensi malnutrisi pada anak usia kurang dari lima tahun cenderung naik), kasus stunting, serta kasus penyakit menular dan tidak menular	1	Belum maksimalnya tingkat mutu pelayanan rumah sakit, dan puskesmas dan puskesmas pembantu
				2	Belum optimalnya kualitas, kuantitas dan distribusi sumber daya manusia kesehatan
				3	Belum meratanya jumlah sarana/fasilitas/ jaringan dan kualitas pelayanan kesehatan
				4	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
					menjaga kesehatan lingkungan. Terdapat kecenderungan prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun terus naik.
				5	Belum terbentuknya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin ke fasyankes
				6	Tidak semua penderita rutin berobat sesuai dengan tatalaksana pengobatan penyakitnya
				7	Minimnya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif.
				8	Belum terwujudnya pelayanan kesehatan ibu hamil (K6)
				9	Belum terwujudnya capaian pelayanan kesehatan balita terkait pertumbuhan dan perkembangan
				10	Belum optimalnya capaian kesehatan anak usia sekolah dan remaja
				11	Belum terwujudnya peran jejaring dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat
				12	Belum tersedianya BMHP dan Biaya Pemeriksaan SHK pada bayi baru lahir sesuai sasaran
		2	Capaian Pelayanan SPM 7 Kesehatan Usia Lanjut yang masih rendah	1	Belum tersedianya BHP sesuai dengan jumlah sasaran
				2	Skrining Kesehatan Lansia yang belum maksimal
		3	Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer (selain puskesmas) terakreditasi		Kurangnya pemahaman dan komitmen pemilik FKTP tentang regulasi dan proses akreditasi
		4	Belum optimalnya pengawasan Pemberian Izin Operasional Klinik		Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terkait Kegiatan usaha dan masih

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			Pratama bagi Pelaku Usaha FKTP		belum memenuhi PMK 14 Tahun 2021
		5	Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan belum optimal	1	Masih kurangnya Monitoring dan Evaluasi pada tempat praktik mandiri
				2	Pengelolaan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan belum optimal melalui aplikasi MMP digital, SISDMK.Pelataran sehat yang ada di satu sehat
		6	Belum optimalnya pengawasan pemberian Izin STPT bagi Tenaga Penyehat Tradisional		Kurangnya Pemahaman Penyehat Tradisional tentang Perizinan Penyahat dan masih belum memenuhi PMK No.61 Tahun 2016
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Kelayakan infrastruktur dan titik genangan air	1	Belum meratanya kemantapan jalan	1	Meningkatnya kerusakan kondisi jalan akibat banjir/genangan air dan longsor
				2	Menurunnya kondisi jalan akibat beban lalu lintas dan umur/masa Pelayanan Jalan
				3	Masih belum tersedianya jalan baru yang hanya melayani satu kawasan kecil tanpa menghubungkan ke kawasan lain
		2	Masih terbatasnya infrastruktur dasar di kawasan perkotaan	1	Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum layak masih sangat rendah
				2	Infrastruktur sistem penyediaan air minum masih belum optimal
				3	Masih terbatasnya infrastruktur persampahan
				4	Belum optimalnya pengelolaan database bangunan (Untuk Kawasan pariwisata/ Kawasan strategis/Kawasan lainnya)

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				5	Belum optimalnya koordinasi antara OPD (PUPR/Perkim /Dinkes) dalam manajemen sistem pengelolaan air limbah
		3	Belum tuntasnya penanganan luas genangan air	1	Kurangnya kapasitas sungai
				2	Tingginya volume sampah dan sedimentasi di saluran drainase
				3	Kurangnya ketersediaan kolam-kolam retensi sebagai tampungan air
				4	Saluran dan sungai yang butuh dipelihara dan dilakukan rehabilitasi
				5	Drainase yang buruk menyebabkan peningkatan risiko banjir di musim hujan
				6	Belum optimalnya sistem pengelolaan irigasi
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Rendahnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni		1. Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara kualitas dan kuantitas		1.1. Kawasan kumuh bukan hanya terpusat di bantaran sungai
					1.2. Penanganan kawasan permukiman kumuh belum optimal dilaksanakan secara terpadu lintas sektor
					1.3. Keberadaan kawasan permukiman kumuh masih terkendala dengan penanganan dampak sosial
			2. Minimnya ketersediaan rumah yang layak huni		2.1. penanganan penyediaan rumah layak huni masih terkendala faktor lahan perkotaan, faktor ekonomi & sosial budaya serta faktor status kepemilikan tanah dan bangunan
			3. Kejadian bencana longsor berskala kecil dan tersebar (tidak termasuk lingkup SPM)		3.1. Tidak dapat dikategorikan sebagai tanggap darurat bencana oleh kepala daerah

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			4. Maraknya pembangunan perumahan tidak memiliki persetujuan site plan		4.1. Pembangunan secara bertahap dalam skala kecil (<15 unit rumah) sebagai upaya menghindari kewajiban persetujuan site plan
			5. Penyediaan dan pemeliharaan/perbaikan PSU Perumahan dan Permukiman belum dilaksanakan secara optimal		5.1. Masih ada yang perumahan yang belum melaksanakan kewajiban serah terima PSU perumahan dan menyediakan lahan makam
					5.2. Data base penyediaan dan perbaikan PSU perumahan dan kawasan permukiman belum ada, sehingga gambaran secara spasial kewajiban pemeliharaan area PSU belum ada
5	Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1	Masih rendahnya efektivitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).	1	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masih rendah	1	Belum maksimalnya penegakan perda dan perkada
		2	Masih sering terjadi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum	2	Terbatasnya sarana prasarana trantibum
				3	Belum optimalnya pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		3	Perlindungan masyarakat terhadap potensi pelanggaran ketertiban dan hukum belum maksimal	4	Belum optimalnya satlinmas
				5	Belum optimalnya sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		4	Kapasitas dan kompetensi Penyidik Pegawai	6	terbatasnya peningkatan kapasitas SDM

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			Negeri Sipil (PPNS) belum merata dan belum memenuhi standar profesionalisme		
2	Masih tingginya jumlah kasus kebakaran	1	Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran.	1	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran secara dini
3	Jumlah kerugian harta/benda dan jiwa yang masih cukup besar	1	Upaya pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan yang masih kurang maksimal	1	Kurangnya sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan
				2	Kurangnya jumlah petugas telah mengikuti diklat pemadaman dan penyelamatan
4	Zona Risiko Bencana masih berada di level sedang (IRB)	1	Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana masih berada di kategori sedang (IKD)	1	Belum Optimalnya perkuatan kebijakan dan kelembagaan
				2	Perlunya Review Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu
				3	Masih lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi kebencanaan serta management Logistik PB
				4	Belum Optimalnya Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
				5	Kurangnya Efektivitas pencegahan dan Mitigasi bencana
				6	Lemahnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
				7	Belum Optimalnya Sistem Pemulihan Bencana
6	Sosial				
	Penanganan kemiskinan belum optimal dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin dan penanganan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Kemiskinan absolut yang cenderung tersebar dan cenderung meningkat
				2	Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
					kemiskinan dan PMKS lainnya
				3	Perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial
				4	Belum optimalnya pemenuhan hak dasar dan inklusif bagi penyandang disabilitas miskin
				5	Belum optimalnya penerapan standar pelayanan minimal baik dari segi cakupan jumlah penerima maupun mutu layanan.
7	Tenaga Kerja				
	Tingginya Angka Pengangguran yang berasal dari Pencari Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1	Rendahnya daya serap tenaga kerja terhadap kesempatan kerja yang tersedia	1	Jumlah angkatan kerja (usia produktif) yang besar tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai
				2	Kurangnya Informasi Pasar Kerja
		2	Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	1	Terbatasnya Program Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan
				2	Kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan industri
		3	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja (PHK) Cukup Tinggi	1	Perlindungan dan hak pekerja belum optimal
				2	Sosialisasi regulasi ketenagakerjaan kurang
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan	1	Belum efektifnya pemberdayaan perempuan bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi serta politik dan pemerintah	1	Masih rendahnya kontribusi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi, politik dan pemerintahan
				2	Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap pemberdayaan perempuan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
		2	Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan perempuan termasuk TPPO
				2	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap hak perempuan
				3	Masih tingginya stigma sosial dalam masyarakat
				4	Kurangnya infrastruktur yang ramah perempuan dan disabilitas
				5	Kurangnya kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan
				6	Kurangnya SDM dalam penanganan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
		3	Belum optimalnya pelembagaan pengarusutamaan gender	1	Masih kurangnya implementasi PPRG di tingkat Perangkat Daerah
				2	Masih kurangnya kebijakan dan infrastruktur yang responsif gender
2	Belum Optimalnya Perlindungan Anak	4	Masih tingginya kekerasan terhadap anak	1	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan anak
				2	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perlindungan anak
				3	Masih tingginya stigma dan pelabelan sosial dalam masyarakat
				4	Kurangnya infrastruktur yang ramah anak dan disabilitas
				5	Kurangnya SDM dalam penanganan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap anak
		5	Belum optimalnya pelembagaan dan	1	Masih kurangnya jumlah lembaga layanan dalam

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			penguatan lembaga layanan pemenuhan hak anak		peningkatan kualitas hidup anak
				2	Masih kurangnya infrastruktur ramah anak
				3	Kurangnya kapasitas SDM penyedia layanan
				4	Kurangnya keterlibatan stakeholders (dunia usaha, media massa dan lain-lain) dalam mendukung pemenuhan hak anak
		6	Belum optimalnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	1	Masih tingginya perkawinan usia anak
				2	Masih tinggi angka stunting
				3	Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak
				4	Masih tingginya angka putus sekolah
				5	Masih tingginya angka perceraian
				6	Masih tingginya angka pengangguran terbuka
		7	Belum optimalnya pemanfaatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	1	Belum optimalnya infrastruktur untuk layanan keluarga
				2	Masih kurangnya SDM tenaga ahli yang kompeten dalam penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
9	Ketahanan Pangan				
	Masih rendahnya sumber daya ekonomi (ketersediaan cadangan pangan dan penyediaan pangan)	1	Tingkat Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan masih belum optimal	1	Ketersediaan pangan untuk pemenuhan kebutuhan masih tergantung dari daerah lain
				2	Ketersediaan cadangan pangan pemerintah masih bergantung pada daerah lain
				3	Belum berkembangnya lembaga distribusi pangan untuk ketersediaan cadangan pangan
				4	Masih rendahnya tingkat produksi pangan pengganti padi

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				5	Pola konsumsi masyarakat untuk sumber tenaga (karbohidrat) masih bergantung pada beras dan belum terbiasa mengkonsumsi sumber karbohidrat dari jenis yang lainnya (misalnya singkong, jagung, ubi, pisang)
				6	Pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh salah satu jenis pangan saja (karbohidrat) dan belum Beragam Bergizi Seimbang (seimbang antara sumber tenaga, zat pembangun dan zat pengatur) dan Aman (B2SA)
				7	Belum berkembangnya industri pengolahan tepung yang berbasis pangan lokal sebagai pengganti terigu untuk mendukung keanekaragaman pangan
		2	Rendahnya minat pelaku usaha untuk melaksanakan Sertifikat Prima dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1	Belum ada perbedaan harga untuk produk yang sudah bersertifikat maupun yang belum memiliki sertifikat
				2	Belum tersedianya Pasar untuk Komoditi PSAT yang sudah memiliki sertifikat Prima 3
				3	Kurangnya informasi bagi pelaku usaha dan petani untuk mendaftarkan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
		3	Perlunya intervensi terhadap masyarakat berdasarkan FSVA	1	Masih terdapat penduduk dengan kerawanan pangan tingkat sedang berdasarkan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
10	Pertanahan				
	Belum optimalnya fasilitasi penyelenggaraan petanahan	1	Masih banyaknya surat tanah masyarakat tanpa titik koordinat yang pasti (sesuai standar)	1	Belum adanya data base dan pemetaan yang baik tentang data pertanahan masyarakat, baik tingkat Kelurahan, Kecamatan dan BPN
				2	Belum adanya sarana yang mendukung untuk pengarsipan kepemilikan lahan masyarakat
				3	Masih adanya sertifikat yang tidak diketahui posisi lahannya
				4	Belum semua lahan masyarakat memiliki surat tanah yang memiliki Titik koordinat yang pasti seperti IMTN ataupun sertifikat
11	Lingkungan Hidup				
	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1	Banyaknya sumber pencemar langsung dan tidak langsung
				2	Kurangnya informasi kondisi lingkungan hidup kepada masyarakat
				3	Meningkatnya perusakan lingkungan hidup
		2	Belum optimalnya perencanaan Lingkungan Hidup	1	adanya kebijakan rencana program yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup
				2	implementasi pembangunan masih belum mengacu kepada dokumen perencanaan lingkungan hidup
		3	Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati	1	Belum memadainya Ruang Terbuka Hijau
				2	Belum tersedianya taman kehati
		4	Belum maksimalnya pengelolaan sampah, B3 dan Limbah B3	1	adanya timbulan sampah yang belum terkelola
				2	Belum maksimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3
		5	Belum maksimalnya penaatan lingkungan hidup	1	Kurangnya pemahaman Implementasi pelaku kegiatan/usaha terhadap dokumen lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				2	Rasio SDM Pengawas belum terpenuhi
				3	Belum maksimalnya pelaksanaan program penilaian perhargaan lingkungan hidup
				4	Tingginya pengaduan lingkungan hidup
		6	Sampah terkelola belum optimal	1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan tidak optimal
12	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
1	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Belum optimalnya penataan administrasi kepemilikan akta - akta pencatatan sipil	1	Masih banyak penduduk yang belum melengkapi jati diri mereka untuk memiliki dokumen akta-akta catatan sipil
		2	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1	Masyarakat yang belum paham pentingnya dokumen kependudukan.
				2	Belum semua masyarakat memiliki kemampuan Teknologi dalam memanfaatkan Pelayanan Online Disdukcapil
2	Sarana dan Prasarana yang belum Optimal dalam mendukung proses kelancaran pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Sarana Prasarana untuk pelayanan Disdukcapil masih kurang	1	Masih belum optimalnya pengadaan sarana & prasarana dalam mendukung kelancaran pelayanan pd Ktr Disdukcapil & 10 Kecamatan
				2	Usia Perangkat Pelayanan Adminduk lebih dari 10 tahun
				3	Penataan Arsip belum maksimal
				4	Keterbatasan luasan area parkir
				5	Ketersediaan meubelair belum maksimal
3	Rendahnya SDM Aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Pelayanan publik kepada masyarakat masih rendah	1	Kompetensi dan Penguasaan teknologi informasi petugas pelayanan publik masih rendah
				2	Kompetensi dan Penguasaan Skill Publik Speaking masih rendah

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				3	Kompetensi dan Penguasaan pengelolaan administrasi keuangan masih rendah
				4	Kurangnya personil jabatan fungsional
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Belum optimalnya pengelolaan kelurahan secara menyeluruh		Belum Meratanya pembangunan potensi kawasan kelurahan		Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah kelurahan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Keluarga Berkualitas di Kota Samarinda	1	Masih Tingginya Angka Stunting di Kota Samarinda	1	Masih rendahnya peran serta/partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
				2	Masih ditemukannya Kelahiran di Usia Remaja (15-19) Tahun
				3	Masih Rendahnya Penggunaan KB Pasca Persalinan
				4	Belum Optimalnya pelaksanaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB
				5	Belum optimalnya advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Bangga Kencana
		2	Masih rendahnya Indeks Kemandirian	1	Belum semua kelurahan memiliki kelompok UPPKA
				2	Belum semua anggota UPPKA memiliki legalitas usaha
		3	Kurangnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1	Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang masih rendah
				2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih tinggi
				3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) yang masih masih kurang
14	Perhubungan				

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
	Kualitas Pelayanan Bidang Perhubungan yang Belum Memenuhi standar	1	Pengelolaan perparkiran belum optimal untuk mengatasi kemacetan dan peningkatan PAD	1	Belum optimalnya pembinaan terhadap para juru parkir sehingga sisi pelayanan dan pendapatan asli daerah belum mendapat hasil yang diharapkan
				2	Kurangnya ketersediaan kantong parkir dan gedung parkir serta belum adanya penerapan teknologi tepat guna sehingga aktivitas parkir tepi jalan cenderung memicu kemacetan
				3	SRP (Satuan Ruang Parkir) yang digunakan untuk kegiatan usaha/PKL
		2	Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas	1	Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan
				2	Belum optimalnya pemeliharaan perlengkapan jalan
		3	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan belum optimal	1	Fungsi ruas jalan yang berstatus jalan nasional dan jalan provinsi yang belum tertata sesuai fungsi dan peruntukannya, terkait rekayasa dan manajemen lalu lintas
				2	Masih banyaknya pemanfaatan ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang milik jalan (RUMAJA) yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya sehingga mengurangi kinerja jalan
				3	Belum adanya langkah konkrit terhadap pengendalian lalu lintas angkutan barang yang melebihi muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan
		4	Menurunnya kinerja angkutan umum di kota Samarinda	1	Sarana angkutan umum kurang layak, rata - rata usia kendaraan di atas 15

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				2	Kepastian waktu tunggu kendaraan, waktu perjalanan dan rute yang dilewati tidak bisa diprediksi sehingga banyak masyarakat yang kurang berminat menggunakan angkutan umum
				3	Belum semua jaringan jalan dan daerah permukiman/perumahan yang terjangkau trayek angkutan menuju lokasi aktivitas masyarakat (kantor, sekolah, pusat perbelanjaan dll)
16	Komunikasi Dan Informatika				
1	Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik berjalan lambat	1	Pengembangan sistem aplikasi masih yang belum terintegrasi secara keseluruhan	1	Masih lemahnya kebijakan tata kelola Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk sinkronisasi dan kolaborasi pengembangan layanan digital
		2	Pengembangan inovasi dalam mendukung smart city berjalan lambat	2	Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan inovasi yang efektif untuk mendukung smart city
		3	SDM dengan kemampuan IT masih belum cukup untuk memenuhi pengembangan aplikasi di pemerintah Kota Samarinda untuk mendukung Smart City	3	Belum semua aplikasi umum dan aplikasi khusus memiliki daya guna yang maksimal untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau OPD
		4	Pengembangan sistem aplikasi masih belum terpadu menyebabkan inefisiensi anggaran	4	Pengembangan sistem aplikasi di OPD belum mengacu kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
2	Akses informasi dan komunikasi publik belum dimanfaatkan seluruhnya	1	Belum optimalnya diseminasi informasi pada media cetak, media elektronik, media online, media sosial, media interpersonal, media luar ruang dan media tradisional	1	Masih minimnya SDM dan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang media
				2	Akses penunjang mobilitas diseminasi informasi yang belum terpenuhi
17	Koperasi Dan UMKM				
	Belum optimalnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro		Rendahnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro	1	Rendahnya SDM Koperasi dan Usaha Mikro
				2	Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi Koperasi dan UKM
				3	Kurangnya kerjasama Koperasi dan UKM dengan Lembaga keuangan dan perbankan
18	Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu				
	Belum optimalnya nilai investasi di kota Samarinda		Perlu dukungan instrumen Investasi untuk menarik minat investor	1	Diperlukan update Peta Potensi Investasi / Penanaman Modal di Kota Samarinda
				2	Belum adanya Peraturan Daerah untuk pemberian insentif investasi bagi investor
19	Pemuda Dan Olahraga				
1	Kurangnya kesadaran pentingnya menjadi pemuda yang mandiri dan berwirausaha		Kurangnya motivasi dan keterampilan kewirausahaan		Kurangnya pelatihan dan pendampingan
2	Kurangnya kemampuan kepemimpinan pemuda dalam pengembangan diri dan masyarakat		Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan		Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan dan dukungan terhadap pengembangan kepemimpinan pemuda
3	Belum optimalnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga		Belum Optimalnya Pembinaan Calon Atlet berprestasi (Atlet Usia Dini), terutama di tingkat	1	Terbatasnya tenaga pelatih, Wasit dan Juri yang memiliki sertifikasi tingkat nasional)
				2	Sistem pembinaan olahraga yang belum

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			junior secara berkelanjutan		tertata dengan baik dan kurangnya manajemen pembinaan olahraga
				3	Kurangnya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tenaga keolahragaan
				4	Pengurus Cabang Olahraga Masyarakat (KORMI) Kurang Optimal dalam menggiatkan Olahraga Masyarakat
				5	Minimnya Penyelenggaran event olahraga berprestasi di tingkat daerah dan rendahnya partisipasi calon atlet prestasi
				6	Minimnya sosialisasi penyelenggaraan event olahraga berprestasi ditingkat junior dan atlet usia dini
				7	Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya olahraga dalam kehidupan bermasyarakat
				8	Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan atlet menuju tingkat nasional dan internasional
20	Statistik				
	Masih rendahnya kualitas dan penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	1	Adanya pedoman/SOP yang mendukung penyelenggaraan SDI belum selaras	1	Belum optimalnya pelaksanaan forum data yang aktif dan fungsional sebagai wadah koordinasi lintas unit kerja.
		2	Sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penerapan prinsip SDI belum optimal	2	Belum tersusunnya Rencana Aksi SDI
		3	Kurangnya koordinasi antar unit dalam mengimplementasikan prinsip SDI dan proses bisnis statistik	3	Rendahnya kapasitas SDM dalam bidang statistik dan tata kelola data di sebagian OPD

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
21	Persandian				
	Pelaksanaan pengamanan informasi melalui sistem persandian belum berjalan secara optimal dan menyeluruh		Upaya pengamanan informasi melalui persandian masih menghadapi kendala, antara lain dilakukan secara bertahap, kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi teknis persandian, serta keterbatasan peralatan dan perlengkapan sandi		Pelaksanaan keamanan informasi terkendala oleh keterbatasan sumber daya, khususnya pada aspek peralatan dan perlengkapan persandian serta kurangnya SDM dengan keahlian yang fokus pada program persandian
22	Kebudayaan				
	Belum optimalnya Usaha pelestarian warisan budaya daerah (benda dan tak benda) yang berbasis kearifan lokal Kebudayaan		Belum optimalnya peran warisan budaya dalam membentuk identitas Kota Samarinda	1	Masih belum optimalnya Upaya inventarisasi dan pengkajian ilmiah pada karya budaya dari semua objek pemajuan kebudayaan dan inventarisasi objek yang diduga cagar budaya dan warisan budaya tak benda
				2	Belum didukung teknologi untuk promosi utk warisan budaya benda dan tak benda
				3	Masih kurangnya SDM yang mendukung terdapatnya dan terpeliharanya warisan budaya benda dan tak benda
				4	Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah, Masyarakat atau pelaku budaya
			Belum optimalnya pengembangan Dimensi Ekspresi Budaya	1	Masih belum optimalnya wadah maupun kesempatan bagi Masyarakat untuk mengekspresikan kebudayaannya
				2	Kurangnya pembiayaan dalam Upaya pengembangan kebudayaan dan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
					pengekspresian budaya (Non APBD melibatkan CSR atau filantropi)
				3	Kurangnya keterlibatan dan dukungan dunia usaha dan dunia industri
				4	Masih Kurangnya ketersediaan SDM yang mendukung kegiatan ekspresi budaya
23	Perpustakaan				
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat masih rendah	1	Belum Optimalnya budaya literasi di masyarakat	1	Kunjungan masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan masih belum ideal dengan skor 0,04%, sementara idealnya 2% penduduk di suatu wilayah mengunjungi perpustakaan setiap hari
				2	Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan masih rendah hanya 9,70%
		2	Belum optimalnya pelayanan Perpustakaan dalam menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan	1	Fasilitas penunjang untuk menarik minat masyarakat masih kurang.
				2	Koleksi pada perpustakaan masih sangat minim dan pada rasio ketercukupan koleksi berdasarkan judul masih belum memenuhi kondisi ideal, yang mana idealnya jumlah koleksi adalah 2 kali dari jumlah penduduk
		3	Belum optimalnya pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus	1	Jumlah perpustakaan berStandar Nasional Perpustakaan (SNP) masih rendah dengan persentase 6,81% perpustakaan yang ada di kota Samarinda
				2	Tenaga pustakawan kurang kompetensi di bidangnya
		4	Belum optimalnya sarana dan prasarana	1	Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan terhadap pemustaka

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			penunjang untuk kegiatan literasi.	2	Belum terupdatenya aplikasi Samarinda sehingga belum dapat mengakses database koleksi bahan bacaan digital yang ada pada Perpustakaan Nasional RI ataupun perpustakaan-perpustakaan yang lain
24	Kearsipan				
	Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan, dan pemusnahan arsip	1	Belum optimalnya sistem arsip daerah yang terintegrasi	1	Kurangnya pemahaman akan pentingnya arsip daerah
				2	Minimnya tenaga yang ahli di bidang IT
		2	Sarana dan prasarana penyimpanan arsip daerah yang belum optimal sesuai standar	1	Belum tersedianya mesin penghancur kertas yang memiliki kapasitas besar
				2	Belum memiliki Depo Arsip yang representatif sesuai dengan standar ANRI
25	Perikanan				
	Belum optimalnya ketersediaan pangan dari sektor perikanan	1	Masih rendahnya produksi perikanan tangkap	1	Terbatasnya sarpras dan teknologi perikanan tangkap
				2	Masih kurangnya kegiatan dan aktivitas sumber daya ikan di perairan darat
				3	Masih kurangnya peningkatan kapabilitas nelayan
				4	Masih kurangnya peningkatan kapabilitas nelayan
				5	Masih kurangnya kompetensi dan keahlian SDM Pengelola TPI
				6	Masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
		2	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	1	Terbatasnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
				2	Tingginya Biaya Produksi budidaya
				3	Masih rendahnya penerapan teknologi dalam pengembangan perikanan budidaya

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				4	Masih rendahnya keterampilan SDM pelaku perikanan budidaya
				5	Kurangnya ketaatan pembudidaya dalam pengurusan dokumen perizinan perikanan budidaya
				6	Degradasi lingkungan dan penurunan kualitas air
				7	Masih adanya hama penyakit ikan yang mengakibatkan penurunan produksi perikanan budidaya
				8	Masih rendahnya efektivitas kelembagaan pelaku usaha perikanan
		3	Belum optimalnya volume hasil olahan perikanan	1	Masih rendahnya kualitas dan diversifikasi olahan hasil perikanan
				2	Kurangnya informasi mengenai penambahan nilai jual produk / pemasaran olahan hasil perikanan (variasi menu dan bentuk olahan)
				3	Masih kurangnya literasi masyarakat akan manfaat mengkonsumsi ikan
				4	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat
26	Pariwisata				
1	Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata	1	Belum maksimalnya pengembangan potensi wisata menjadi destinasi wisata	1	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata
				2	Masih Adanya Peraturan dan kebijakan yang tumpang tindih
				3	Mayoritas Lahan yang memiliki potensi obyek wisata bukan milik pemerintah
				4	Belum optimalnya koordinasi Lintas OPD terkait pembinaan dan pengembangan Pariwisata
		2	Kurangnya pengelolaan usaha jasa pariwisata secara profesional	1	Kualitas SDM yang belum berkompetensi
				2	Belum optimalnya pembinaan dan bantuan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
					terhadap pengelolaan Usaha jasa pariwisata
		3	Belum optimalnya promosi pariwisata sehingga kunjungan wisatawan masih sangat rendah.	1	Kurangnya Inovasi Bidang Pariwisata, baik untuk kegiatan perencanaan, pengembangan maupun promosi pariwisata
				2	Kurangnya sumber daya untuk mempromosikan pariwisata (Media, SDM, Pembiayaan dan lain-lain)
		4	Kurangnya infrastruktur pendukung pariwisata		Aksesibilitas pariwisata yang belum memadai (Akses jalan, bandara, pelabuhan, transportasi umum dan lain-lain)
2	Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	1	Keterbatasan SDM Ekraf yang kompeten dan berkualitas
				2	Minimnya pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				3	Belum maksimalnya pendataan dan up date data Pelaku Ekonomi Kreatif
				4	Belum optimalnya koordinasi Lintas OPD terkait pembinaan dan pengembangan Ekraf
		2	Minimnya Pengembangan Riset Ekraf	1	Belum ada Riset Ekonomi Kreatif (Produk, Kemasan dan Merk)
				2	Belum optimalnya aset pemerintah dalam menyediakan insfrastruktur dan fasilitas Penegembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka untuk membangun Ekosistem Ekonomi Kreatif
				3	Belum tersusunnya Roadmap pengembangan Ekonomi Kreatif
				4	Minimnya pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
27	Pertanian				

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
1	Masih rendahnya teknologi budidaya pertanian pada semua sub pertanian sektor yaitu pangan, hortikultura dan perkebunan	1	Rendahnya teknologi dalam hal budidaya dan daya dukung lahan pertanian	1	Masih rendahnya tingkat kualitas padi yang sesuai dengan karakteristik lahan di daerah
				2	Rendahnya produktivitas pangan, hortikultura dan perkebunan terutama dalam pengolahan dan pemanfaatan lahan
				3	Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pertanian
2	Masih rendahnya tingkat produksi pangan dan hortikultura	1	Rendahnya produktivitas pangan dan hortikultura	1	Kurang memadainya sarana irigasi yang membantu peningkatan produksi
				2	Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pertanian
				3	Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian yang membantu petani dalam meningkatkan produksi pertanian
				4	Belum adanya regulasi yang bersifat teknis (Perwali) tindak lanjut dari Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
3	Belum optimalnya fungsi Rumah Potong Hewan dalam memenuhi standar pelayanan	1	Keterbatasan sarana dan prasarana rumah potong Hewan Ruminansia dan rumah potong unggas (RPU)	1	Belum adanya pengembangan RPH ruminansia dan RPU yang modern dan memenuhi standar pelayanan teknis
				2	Belum adanya penetapan lokasi dan regulasi penyebaran RPU yang sesuai dengan kepentingan pedagang
				3	Sumber daya manusia Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia/unggas masih kurang
				4	Rendahnya tingkat pengawasan terhadap pemotongan unggas di luar rumah potong yang dilakukan oleh pedagang

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				5	Kesadaran pelaku usaha untuk memotong unggas di Rumah Potong Unggas (RPU) masih rendah
4	Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis zoonosis	1	Belum tertanggulangi sepenuhnya pencegahan dan mitigasi penyebaran penyakit hewan menular strategis zoonosis	1	Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian dan keterlibatan masyarakat pada penyakit hewan zoonosis
				2	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung penanggulangan penyakit hewan zoonosis
				3	Masih terbatasnya SDM dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis
28	Perdagangan				
1	Belum adanya komoditi unggulan daerah Kota Samarinda yang siap ekspor	1	Kurangnya daya saing produk lokal	1	Promosi yang dilaksanakan kurang optimal karena produk yang tidak kompetitif
		2	Sinergitas lintas OPD pada pengembangan produk belum optimal	2	Penciptaan pasar melalui kemitraan belum optimal dampak mutu dan kualitas produk
2	Fluktuasi harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tidak dapat diprediksi sehingga berdampak pada kenaikan harga dan penurunan daya beli masyarakat	1	Pemenuhan ketersediaan stok terhadap kebutuhan BAPOKTING masyarakat kota samarinda belum optimal	1	Belum Optimalnya Pemantauan harga dan stok serta Pelaksanaan Operasi Pasar Khususnya Barang Kebutuhan Pokok
3	Pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan yang belum optimal	1	Belum adanya regulasi zonasi sarana perdagangan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan lainnya	1	Pedagang Informal yang menimbulkan berbagai masalah dari lalu lintas, pencemaran lingkungan hingga kurangnya minat masyarakat berbelanja ke pasar rakyat
				2	Pengembangan dan pertumbuhan sarana perdagangan yang belum diatur berdampak pada pelaku usaha lainnya
		2	Pengembangan dan Pengawasan terhadap	1	Standar syarat pemenuhan pasar rakyat ber-SNI belum terpenuhi di

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			pengelolaan sarana perdagangan yang belum optimal		beberapa pasar rakyat yang dikelola pemerintah
				2	Pengembangan dan pengawasan pengelolaan pasar rakyat belum Optimal
				3	Pengawasan terhadap pusat distribusi Kota Samarinda belum optimal
4	Belum optimalnya pengawasan dan layanan metrologi legal dan tertib niaga	1	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya metrologi legal dan tertib niaga	1	kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha pada standarisasi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), ketepatan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan ketepatan Satuan Ukuran sesuai aturan yang berlaku
				2	Sosialisasi dan Penyuluhan pentingnya Kemetrologian yang belum optimal
				3	Kurangnya SDM Teknis dan Sarana Alat Standar dalam memberikan layanan dan pengawasan hingga penyidikan Kemetrologian
29	Perindustrian				
	Belum optimalnya pengembangan industri		Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk industri rumah tangga dan IKM	1	Rendahnya SDM pelaku industri rumah tangga dan IKM tentang mutu/kualitas produk
				2	Rendahnya SDM pelaku industri rumah tangga dan IKM tentang desain dan kemasan produk
				3	Belum tersedianya kawasan berikat
				4	Kurangnya produk IKM yang terstandarisasi (SNI, Halal, Barcode, ISO)
				5	Kurangnya peningkatan produksi unggulan daerah
30	Sekretariat Daerah				

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
1	Belum Optimalnya Fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Simplikasi dalam perumusan pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah	1	Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	1	Kapasistas SDM yang belum memadai dalam memahami dan menginplementasikan sistem akuntabilitas kinerja dan perumusan kebijakan berbasis data.
		2	Perumusan Kebijakan belum sepenuhnya berbasis data dan belum terintegrasi	1	Sistem Informasi belum terintegrasi (antara perencanaan, evaluasi, dan pelayanan)
				2	Koordinasi antar bagian belum efektif
				3	Monitoring dan Evaluasi internal belum berjalan optimal
2	Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	3	Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara optimal	1	Terbatasnya kuantitas pelaksanaan pelatihan / diklat / bimtek yang mendukung upaya peningkatan SDM
31	Sekretariat DPRD				
1.	Kurang maksimalnya fasilitasi terhadap 3 (tiga) fungsi DPRD	1	Kurangnya kompetensi SDM baik dalam hal penguasaan teknologi, komunikasi, koordinasi dan dinamisasi peraturan perundang-undangan		Kuantitas dan Kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan
		2	Penyediaan dan Penggunaan Sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja DPRD belum maksimal	1	SDM Sekretariat DPRD kurang adaptif terhadap perubahan peraturan perundang - undangan dan kebijakan
				2	Tuntutan pelayanan yang bervariasi dari Anggota DPRD
				3	Agenda Anggota DPRD yang dinamis sehingga mempengaruhi tugas dan fungsi DPRD

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				4	Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman Anggota DPRD mengenai substansi peraturan
32	Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan daerah	1	Dokumen Perencanaan kinerja belum seluruhnya memenuhi standar yang baik dan belum mengacu kepada hasil capaian kinerja	1	Masih terdapat target kinerja pada Perjanjian Kinerja lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya
				2	Rumusan sasaran Strategis dan indikator Kinerja pada perencanaan belum berorientasi hasil dan indikator kinerja belum SMART
				3	Belum optimalnya kualitas data dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah
		2	Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisiean serta belum dimanfaatkan secara optimal	1	Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya masih sebatas pemenuhan belum kepada kualitas
				2	Hasil pengukuran kinerja belum seluruhnya dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
				3	IKU pada Pemerintah daerah dan Perangkat Daerah belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan tiap indikator
33	Keuangan Dan Aset Daerah				
	Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Legalitas Kepemilikan Tanah belum memadai		Bukti Surat Tanah belum lengkap
		2	Pemanfaatan Aset Tanah belum Optimal		Dokumen Kepemilikan kurang lengkap dan terkendala penilaian Aset yang akan dilakukan Pemanfaatan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
		3	Penilaian Aset kurang maksimal		Jumlah SDM Penilaian Aset terbatas
34	Pendapatan Daerah				
	Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Belum optimalnya pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakkan masih rendah
				2	Perhitungan target pajak daerah dan retribusi daerah belum memperhitungkan potensi riil
				3	Masih tingginya piutang pajak daerah
		2	Belum optimalnya pelayanan dan penatausahaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berbasis digitalisasi	1	Belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis elektronifikasi
				2	Belum optimalnya integrasi sistem penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
35	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan				
	Indeks Profesionalitas ASN masih rendah	1	Masih belum meratanya distribusi pegawai dan penempatan jabatan yang sesuai kompetensi	1	Masih kurangnya pelaksanaan uji kompetensi untuk semua lini dan struktur jabatan
				2	Terdapat PNS yang sudah pensiun yang tidak diisi/ digantikan oleh PNS dengan anjab sejenis
				3	Penerimaan PPPK belum sesuai dengan kebutuhan organisasi
				4	Kurangnya dukungan OPD untuk input penilaian kinerja pegawai di lingkungan masing-masing
				5	Masih kurangnya intensitas pelaksanaan diklat teknis, struktural dan fungsional dalam pengelolaan pembangunan
				6	Terbatasnya diklat yang diikuti setiap ASN
		2	Kepatuhan terhadap Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)		Kurangnya komitmen bersama untuk mematuhi norma standar tersebut.

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			Kepegawaian masih kategori sedang		
36	Penelitian dan Pengembangan				
	Hasil kelitbangan belum optimal dimanfaatkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat		Ekosistem Riset dan Inovasi belum maksimal	1	Monitoring dan evaluasi hasil riset dan inovasi kurang maksimal
				2	Fasilitasi dan penerapan inovasi daerah yang belum maksimal
37	Pengawasan				
	Hasil pengawasan (assurance) dan pembinaan (consulting) APIP belum sepenuhnya memadai	1	Hasil pengawasan belum cukup optimal ditindaklanjuti	1	Jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia APIP masih kurang memadai sehingga tugas pengawasan masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan termasuk masih kurang memadainya kualitas tugas pengawasan yang dilaksanakan
				2	Minimnya pedoman/modul teknis APIP yang dipergunakan untuk memandu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan
				3	Perencanaan pengawasan dan pembinaan APIP belum sepenuhnya berbasis risiko dan belum adanya perencanaan pengawasan strategis
				4	Tata laksana pengawasan dan pembinaan APIP yang belum optimal
				5	Minimnya atensi perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP
				6	Sistem pelaporan ikhtisar pengawasan belum terbangun dengan baik
				7	Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pihak eskternal (BPK, BPKP, Itjen Kemendagri, Itprov, dsb) masih berjalan lamban dan belum

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
					menunjukkan hasil yang signifikan
				8	Banyaknya permintaan pemeriksaan khusus dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin ASN, pengaduan masyarakat dan permintaan pengawasan oleh kepala daerah yang belum ditindaklanjuti
		2	Peran dan layanan APIP belum cukup memadai	1	Masih banyaknya perangkat daerah yang belum mengimplementasikan manajemen risiko secara optimal
				2	Minimnya pemahaman perangkat daerah dalam penerapan manajemen risiko
				3	Belum adanya evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas implementasi pengelolaan risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP)
		3	Pembenahan sistem serta tata kelola organisasi APIP secara menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja	1	Tata kelola internal APIP yang belum cukup optimal, terutama dalam hal pemenuhan anggaran (mandatory spending) dan penggunaannya, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sistem informasi manajerial dan pelaksanaan pengawasan serta dukungan pelaksanaan pengawasan (sekretariat APIP)
38	Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)				
	Belum semua masyarakat memahami dan mengamalkan ideologi Pancasila dan		Belum optimalnya peran ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga	1	Kurangnya kesadaran Partai Politik dalam menerapkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
	berwawasan Kebangsaan yang baik.		Keagamaan dan Partai politik dalam membantu memberikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.	2	Kurangnya kesadaran Ormas dalam menerapkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				3	Kurangnya Kesadaran Lembaga- Lembaga dalam menerapkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sumber: Hasil analisis, 2025

2.6.4. Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis akan memberikan panduan terhadap perumusan perencanaan pembangunan daerah karena dalam isu strategis akan termuat hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah mengingat pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kota Samarinda, isu dunia internasional, serta penelaahan kebijakan pembangunan nasional, dan provinsi, serta kebijakan di Kota Samarinda.

1. **Penelaahan Isu Internasional**

Isu strategi internasional memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembangunan nasional sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi wilayah administrasi regional terutama Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Jumlah penduduk dunia menjadi 9,45 Miliar (55% di Asia);
2. Urbanisasi meningkat, penduduk tinggal di perkotaan mencapai 66%;
3. Perubahan geopolitik, peningkatan peran Cina dalam perekonomian dunia;
4. Komitmen penurunan emisi GRK dan tantangan perubahan iklim;
5. Perdagangan global tumbuh 3,4% pertahun, negara berkembang menjadi poros perdagangan;
6. Bergesernya kekuatan ekonomi ke negara-negara berkembang;

7. Dimulainya transisi energi;
8. Gangguan rantai pasok dan bencana iklim yang mengakibatkan kerawanan pangan;
9. Stagflasi ekonomi dan inflasi tinggi akibat perang dagang dan penguasaan sumber daya;
10. Dominasi TIK, bioteknologi, rekayasa genetik, Al, Era Industry 5.0 dan sebagainya; dan
11. Tantangan kesehatan masyarakat.

2.6.5. Penelaahan Isu/Kebijakan Nasional

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Pemerintah telah menyusun RPJMN 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2O25-2O29 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2O25-2O29 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2O25-2O45. Tema Pembangunan Jangka Menengah Tahap Pertama RPJPN Tahun 2025-2045 adalah Penguatan Fondasi Transformasi.

Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Visi Presiden periode 2O25-2029 yaitu 'Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045'. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Gambar 2.73
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Gambar 2.74

17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

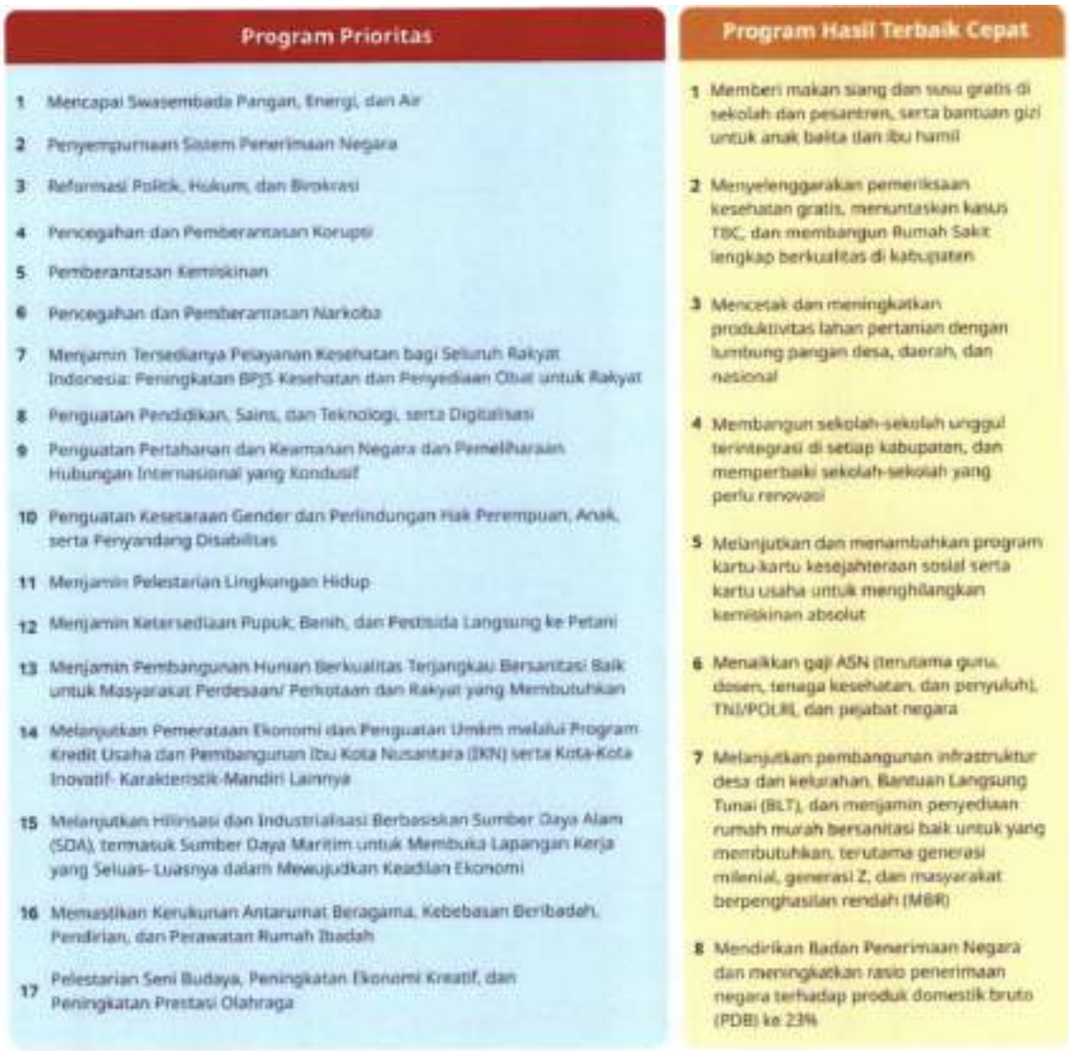

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2O25-2O29. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN

Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

b. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, serta mengurangi beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan pengembangan lbu Kota Nusantara direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045. Pengembangan kawasan dan konektivitas akan terus dilaksanakan pada tahapan berikutnya untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua.

Wilayah Ibu Kota Nusantara berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Secara administratif, Wilayah Ibu Kota Nusantara terletak di antara dua kabupaten eksisting, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Sepaku) dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Samboja, dan Sanga-Sanga) serta dibatasi oleh:

. bagian utara: Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
. bagian selatan: Kecamatan Sepaku, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
. bagian timur: Selat Makassar; dan
. bagian barat: Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Perencanaan Ibu Kota Nusantara terbagi atas dua wilayah perencanaan, yakni: a. Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektare termasuk Kawasan Inti Pusat

Pemerintahan (KIPP); dan b. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektare.

Berdasarkan Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green and Beautiful oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2019), pemindahan ibu kota negara (IKN) akan menimbulkan efek positif yang disebabkan oleh adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum termanfaatkan. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional atau menyebabkan kontraksi ekonomi di wilayah lain jika lokasi alternatif ibu kota memiliki sumber daya yang memadai dan keterkaitan aktivitas ekonomi positif di wilayah lain.

Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Pemindahan ibu kota ke akan meningkatkan perdagangan antar wilayah. Baik perdagangan dalam tingkat regional, nasional, maupun internasional di Kota Samarinda. Diantaranya akan mendorong adanya kebutuhan terhadap akomodasi tempat untuk pertemuan/rapat bagi pejabat-pejabat daerah, nasional, maupun internasional. Hal ini dikarenakan Kota Samarinda yang berperan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi salah satu tujuan untuk mengadakan pertemuan selain IKN itu sendiri.

Untuk itu, perlu adanya akomodasi berupa tempat-tempat pertemuan (meeting) yang skala pelayanannya berstandar nasional maupun internasional. Adanya kebutuhan terhadap tempat-tempat pertemuan tersebut, akan mendorong perkembangan bisnis MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*). MICE merupakan jasa yang identik dengan pemberian pelayan/services. MICE dapat memberikan kontribusi tinggi secara ekonomi dan menguntungkan bagi banyak pihak, karena industri MICE ini merupakan industri yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Sehingga akan menarik investor dan para pelaku bisnis. Kegiatan bisnis MICE telah membuka lapangan kerja baru, tidak hanya menciptakan tenaga kerja musiman saja, tetapi juga telah menciptakan pekerjaan yang tetap bagi banyak masyarakat. Indonesia dengan wilayah

yang strategis serta memiliki daya tarik tersendiri bagi warga negara asing, memberikan peluang bagi tumbuhnya industri MICE.

Selain itu event MICE memberikan manfaat langsung pada ekonomi masyarakat seperti akomodasi, usaha kuliner, cinderamata, guide, hingga transportasi lokal sehingga sejalan dengan tiga strategi yang dijalankan pemerintah yakni pro-pengentasan kemiskinan, pro- penciptaan lapangan kerja, serta pro-pertumbuhan. Berbagai acara meeting, incentive, conference, and exhibition yang berskala internasional yang telah diselenggarakan di Kota Samarinda diharapkan dapat menjadi media untuk mempromosikan produk-produk lokal Kalimantan atau Samarinda. Berbagai jenis produk ekonomi kreatif yang dipamerkan diharapkan mendorong tumbuhnya pelaku kreatif sehingga dapat mampu mendukung ekonomi regional dan nasional.

Melalui destinasi MICE, beragam peluang untuk kebangkitan usaha kecil dan menengah akan dapat terus berkembang. Peran Pemerintah daerah dalam mempromosikan wilayahnya agar menjadi destinasi para konsumen MICE perlu terus ditingkatkan. Pengembangan industri MICE ini bertujuan untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai tujuan pariwisata yang aman, kerja sama antar daerah dan negara dalam memacu investasi. Adapun keunggulan industri MICE antara lain adalah mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar, lama tinggal (length of stay) lebih lama, dampak promosi ke dunia internasional, jumlah uang yang dibelanjakan, peningkatan infrastruktur, serta memberikan kebanggaan dan memperkuat diplomasi bangsa.

Penyelenggaraan berbagai kegiatan baik itu mega sport event; meeting, incentive, conference, exhibition (MICE); mega entertainment event (live music event yang menjadi trend di dunia saat ini), festival dan lainnya akan mendorong tumbuhnya industri ikutan yang merupakan jagoan dalam urusan perolehan devisa, peningkatan citra, investasi,pengembangan usaha kecil, dan lainnya. Diantaranya adalah meeting/convention industry, sport industry, exhibition industry, music (live music/concert) industry, dan lainnya. Dengan kata lain, peluang pembangunan ekonomi akan semakin terbuka di masa mendatang, asal saja aspek ukuran, manajemen dan pemeliharaan berbagai venue itu terjaga dari waktu ke waktu.

Dengan adanya potensi ekonomi yang ditimbulkan dari rencana pemindahan IKN, akan muncul kebutuhan pembiayaan meliputi pembangunan fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan dalam rangka menunjang fungsi dan keberadaan IKN. Lokasi Kota Samarinda yang cukup dekat dengan IKN, akan menjadikan Kota Samarinda sebagai alternatif tujuan pendatang maupun pelaku bisnis, sehingga diperlukan infrastruktur penunjang baik sarana maupun prasarana perkotaan maupun regional. pemerintah harus benar-benar memperhatikan perjanjian kerja sama dengan pihak badan usaha atau swasta sehingga kualitas IKN baru beserta infrastruktur pendukung dapat sesuai dengan spesifikasi yang mendukung jalannya pemerintahan dan tidak lagi memberikan beban tambahan bagi APBN maupun APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun Kota Samarinda.

Gambar 2.75
Orientasi Samarinda dengan wilayah IKN

Sumber: Dokumen RTRW 2022-2042

c. Pengembangan Tri-City (Tri Kota) IKN, Samarinda, dan Balikpapan

Pembangunan IKN mengedepankan konsep kota pintar yang berkelanjutan dan konsep kolaborasi tri-city (tri kota). Konsep tri-city diusung oleh Nusantara dengan Samarinda dan Balikpapan sebagai kota penyangga. Konektivitas Nusantara akan dibangun melalui konsep tri-city, yaitu Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan sebagai satu kesatuan ekosistem tiga kota yang menggerakkan ekonomi regional dan nasional.

Samarinda memiliki berbagai potensi dan keunggulan sebagai daerah penyanggah IKN. Samarinda dalam sistem perkotaan PKN dan pusat koleksi distribusi bagi wilayah hinterland di sekitarnya. Samarinda memiliki potensi dan keunikan untuk pengembangan kota dan dukungan bagi IKN dalam hal logistik dan pelayanan (pendidikan, rekreasi, transportasi, fasilitas (MICE dan akomodasi).

Dalam rangka pengembangan wilayah Kota Samarinda, telah disusun master plan pengembangan dan penataan kota. Hasil kajian tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.142
Peran dan Fungsi Kabupaten/Kota di Sekitar Kota Samarinda

PERAN & FUNGSI	BONTANG	SAMARINDA	IKN (PPU)	BALIKPAPAN	TENGGARONG (KUKAR)
IKN	-	-	V	-	-
PKN	V	V	V	V	V
PKSN	-	-	-	-	-
PKW	-	-	-	-	-
PKWp	-	-	V	-	-
Pusat Pertumbuhan Kelautan	-	Sentra Industri Maritim	Pelabuhan & sentra kegiatan Perikanan	Sentra Industri Maritim	-
Perguruan Tinggi	V	V	-	V	V
Rumah Sakit	V	V	V	V	V
Hotel Berbintang	V	V	-	V	V
Bandara	V	V	V	V	-
Pelabuhan	V	Pengumpul	Pengumpul	Utama	V
Instansi Pemerintah	Pusat	Pusat, Provinsi	Pusat	Pusat	Pusat
Kawasan Industri	V	V	V	V	V

Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

Tabel 2.143
Isu Strategis Kota Samarinda Berdasarkan Hasil Analisis Masterplan

No.	Klasifikasi Isu	No	Isu Strategis	No	Keterangan
A.	Peran Tri Kota	1	Penguatan peran Kota Samarinda pada tahap pembangunan IKN	1	Menguatkan peran Kota Samarinda dalam Tiga Kota pada tahap awal, tahap lanjut, dan tahap pematangan kawasan IKN
				2	Menguatkan peran Kota Samarinda sebagai super hub regional
		2	Transformasi ekonomi Kota Samarinda menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	1	Tidak lagi terdapat perpanjangan izin kegiatan pertambangan di Kota Samarinda
				2	Meningkatkan nilai komoditas unggulan pada sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian)
B.	Lingkungan	1	Peluang untuk pengembangan dan pembangunan kota: Aspek Daya dukung dan daya tampung lingkungan kota Samarinda Potensi pengembangan wilayah ke selatan (Kecamatan Palaran) yang memang diarahkan sebagai PPK	1.	Penggunaan lahan cenderung masih di pusat Kota Samarinda, potensi wilayah pengembangan ke arah utara (Samarinda Utara, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang), timur (Sambutan), dan selatan (Palaran).
				2.	Potensi pengembangan wilayah ke arah utara (Samarinda Utara) namun menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagai pusat penelitian hutan tropis lembab Unmul.
				3.	Potensi pengembangan wilayah ke selatan (Kecamatan Palaran) yang memang diarahkan sebagai PPK Bukuan.
		2.	Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi dan jalur perekonomian regional	1.	Kebijakan pengembangan pelabuhan penumpang dan pelabuhan peti kemas yang lebih performa di Kecamatan Palaran
				2.	Membatasi jenis kapal yang terlalu besar dengan dibangunnnya Jembatan Mahkota di sisi sebelah barat Pelabuhan Yos Sudarso
		3.	Pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai Wajah Kota Samarinda		Sisi utara Sungai Mahakam yang termasuk dalam Tepian Teras Mahakam sudah tercover, dibutuhkan perencanaan dan penataan tepian di bagian selatan sungai Mahakam
		4.	Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk kepentingan pengembangan kota	1.	Bekas penambangan batubara meninggalkan kolong-kolong, belum terdapat kondisi nyata terkait

No.	Klasifikasi Isu	No	Isu Strategis	No	Keterangan
					pengembalian fungsi lahan eks tambang
		5.	Penanganan area resiko bencana dan penyediaan infrastruktur penanganan bencana di Kota Samarinda	1.	Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) untuk Kota Samarinda tahun 2022 adalah Sedang dengan skor 92,77 (terendah bila dibandingkan Kab/Kota lainnya di Kalimantan Timur), dengan resiko bencana tertinggi adalah Banjir (Tinggi), Cuaca Ekstrim (Tinggi), Kekeringan (Sedang), Konflik Sosial (Sedang), Longsor (Sedang)
		6.	Aktivitas kegiatan Kota Samarinda cenderung tidak ramah lingkungan		
C.	Tata Kota	1.	Peningkatan dan pengendalian perkembangan permukiman perkotaan (kumuh, sprawl, tepian sungai, kampung budaya)	1.	Pengupdatean data kawasan kumuh sebanyak 83 lokasi pada 8 kawasan kumuh di Kota Samarinda
				2.	Pelestarian kawasan bernilai budaya (Kota Lama Samarinda Seberang dan Kampung Budaya Pampang)
				3.	Penataan kawasan/kampung di area tepian di bagian utara Sungai Mahakam
		2.	Pemenuhan fasilitas skala kota untuk peningkatan kualitas taraf hidup penduduk di masa mendatang	1.	Belum intensnya penyediaan fasilitas akomodasi penginapan dan pariwisata skala regional dan nasional
				2.	Belum intensnya penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun sarana publik dalam skala massif
		3.	Pemenuhan infrastruktur yang mencukupi dengan kualitas yang lebih baik	1.	Penyediaan kebutuhan air bersih untuk pelayanan skala kota, antisipasi kemungkinan kondisi intrusi air laut
				2.	Penanganan drainase dalam pencegahan risiko genangan air
				3	Pengelolaan persampahan dengan baik disaat Capaian Akses Aman
		4.	Pengembangan sistem transportasi berbasis sistem angkutan umum massal (moderen, rendah karbon, hemat energi)	1.	Pengembangan jaringan transportasi darat, penyeberangan sungai, dan alur pelayaran
				2.	Rencana pengembangan KA Trans Kalimantan (angkutan umum berbasis rel di Pulau Kalimantan)
				3.	Rencana pembangunan jalan tol Samarinda - Bontang
				4.	Rencana pengembangan skytrain
		5.	Integrasi objek dan Kawasan strategis kota menjadi kawasan	1.	Beberapa aset daerah yang tidak terkelola dan termanfaatkan dengan

No.	Klasifikasi Isu	No	Isu Strategis	No	Keterangan
			perkotaan baru yang layak huni		optimal (decline): Stadion Utama Kaltim, Area Pasar Rakyat Harapan Baru
		6.	Menyediakan ruang ekonomi baru dengan mengembangkan dan membangun pusat kegiatan/komersial sejalan dengan pembangunan permukiman baru yang terkoneksi dengan SAUM	1.	Perencanaan pembangunan kota baru yang modern dengan integrasi penguatan Sistem Angkutan Umum Massal

Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

Gambar 2.76
Dasar Pertimbangan Penentuan Branding Kota Samarinda

Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

Berdasarkan hasil analisis, ditetapkan Branding kota:

SAMARINDA: SPIRIT OF MAHAKAM (Semangat Mahakam)

SPIRIT OF MAHAKAM memiliki makna “Sungai Mahakam sebagai pemersatu Kota Samarinda bagian utara dan selatan Sungai Mahakam”. Kota Samarinda yang tidak hanya disatukan oleh Sungai Mahakam secara fisik namun juga dari aktivitasnya yang saling melengkapi. Oleh karena itu, memadukan dan menyeimbangkan perkembangan kedua sisi menjadi penting. Wilayah Utara sudah memiliki pengembangan yang cukup pesat dan keterbatasan dari sisi fisik lingkungan dibandingkan wilayah selatan. Wilayah selatan sendiri memiliki potensi penghubung dengan IKN, pengembangan stimulan baru, persebaran kegiatan, dan pengembangan dengan prinsip keberlanjutan melalui implementasi KPI.

Gambar 2.77

Gambar Ilustrasi Batas Administrasi Kota Samarinda

Gambar 2.78
Kebutuhan dan Konsep Penanganan

	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP PENANGANAN
UTARA	1. Peningkatan kualitas moda transportasi antara kawasan 2. Penataan kawasan: penanganan kawasan kumuh tingkat Kota, Beautifikasi kawasan 3. Mitigasi kebencanaan terutama banjir dan longsor	1. Aksesible antara pusat-pusat kegiatan 2. Beberepa penanganan terkait revitalisasi maupun beautifikasi sudah terlaksana/dalam waktu pelaksanaan dan menggunakan pendanaan daerah. Dapat menerapkan *Creative City* 3. Penerapan *Resilient City*
KORIDOR SUNGAI	1. Penataan kawasan sebagai Wajah Kota Samarinda 2. Ruang pemersatu/pelebur antara sistem kegiatan di utara dan di selatan Sungai Mahakam	1. Penerapan *waterfront city* 2. Menghidupkan Sungai Mahakam tidak hanya menjadi badan penampung air namun menjadi Teras Rumah Samarinda, menerapkan prinsip-prinsip yang dapat mendukung *Creative city*
SELATAN	1. Pengembangan baru kawasan (revitalisasi kawasan eks-tambang; penataan kawasan transmigrasi; pembukaan lahan baru) 2. Palaran sebagai kecamatan yang terdekat menuju Kota Balikpapan dan IKN 3. Pengembangan jalan arteri primer (Jalan Soekarno Hatta) selain jalan tol 4. Peningkatan kualitas jalan kolektor 5. Integrasi objek-objek strategis skala Kota (Stadion, Pusat Pemerintahan Baru, Pusat Perkotaan Baru) 6. Meningkatkan hubungan wilayah barat dan timur di bagian selatan Sungai Mahakam.	1. Pengembangan baru kawasan dapat menerapkan sistem *sponge city*, baik penerapan pada tingkat kaveling hunian, maupun penerapan drainase kawasan yang baik. 2. Aksesible antara pusat-pusat kegiatan

Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

Gambar 2.79
Konsep Penanganan

Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

Gambar 2.80
Tahap Pengembangan Masterplan

Sumber: Rancangan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, 2023

2.6.6. Penelaahan Isu/Kebijakan Provinsi

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur terpilih dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 dan menandai dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Samarinda.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, serta KLHS, dihasilkan 9 (sembilan) isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM
2. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan
3. Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif
4. Pemerataan Pembangunan Wilayah
5. Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi
6. Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN
7. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK
8. Kemandirian Pangan
9. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, Bapak Dr. H. Rudy Mas'ud S.E., M.E. dan Bapak Ir. H. Seno Aji, S.E., M.Si, telah ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yaitu: **KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS**.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera.
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah.
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi.
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal.
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan agregat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di sepuluh kabupaten/kota. Dalam rangka menyusun arah kebijakan kabupaten/kota yang terukur dan berkelanjutan, diperlukan indikator makro yang menjadi acuan dalam menilai capaian, memantau progres, serta menetapkan target jangka menengah dan panjang. Indikator-indikator ini disusun untuk

memastikan keselarasan antara perencanaan strategis, implementasi program, dan evaluasi kinerja pembangunan, sesuai dengan visi dan misi daerah.

Kota Samarinda diarahkan untuk Mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan. Berikut data capaian indikator makro beserta highlights indikasi kebijakan Provinsi untuk Kota Samarinda.

Tabel 2.144
Target Indikator Makro Kota Samarinda

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	83,11	83,11–83,40	83,50–85,77
LPE (%)	8,66	8,66–8,70	10,20–10,40
Tingkat Kemiskinan (%I	4,30	4,00–4,30	2,45–2,60
Indeks Gini	0,330	0,312–0,330	0,278–0,284
TPT (%)	5,75	5,65–5,75	4,80–5,20

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029

Highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kota Samarinda:

1. Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Atma Husada dan Rumah Sakit Islam
2. Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana RS Mata dan RSUD AMS II
3. Pembangunan Sekolah Menengah Unggulan
4. Peningkatan Jalan Provinsi di Kota Samarinda
5. Pembangunan Jalan di Kota Samarinda
6. Rencana SAUM (Sarana Angkutan Umum Massal) Kota Samarinda
7. Pengendalian Banjir di Kota Samarinda

2.6.7. Penelaahan Isu/Kebijakan Kota Samarinda

. Telaahan Kajian Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota Samarinda

1. Sektor Energi

Sumber GRK yang berasal dari sektor energy dan transportasi dihitung dari pembakaran bahan bakar hidrokarbon. Berbagai kegiatan sektor energi dan transportasi menghasilkan emisi karbon dioksida (CO2) dan sedikit methane (CH4) dan nitrogen oksida (N2O). Emisi GRK (ton CO2 e) berdasarkan jenis bahan bakar disajikan pada tabel di bawah. Berdasarkan penggunaan jenis bahan bakar berbeda dihasilkan emisi GRK yang berbeda berdasarkan BAU Baseline penelitian sebelumnya (Emisi GRK Kota Samarinda tahun 2020). Selama periode 2018-2022 emisi GRK Sektor

energi dan transportasi mengalami peningkatan secara signifikan. Emisi GRK berasal dari penggunaan bahan bakar jenis premium dan MFO (*Marine Fuel Oil*) menunjukkan nilai yang meningkat sepanjang tahun 2018-2022.

Tabel 2.145

Energi GRK (ton CO2e) Berdasarkan Jenis Bahan Bakar

Tabel 3.1. Energi GRK (ton CO_2 e) berdasarkan jenis bahan bakar

No	Jenis bahan bakar	2018	2019	2020	2021	2022
1	Premium	526.907,98	565.075,40	605.097,85	645.120,29	685.142,73
2	Pertamax	78.024,22	83.676,03	89.602,53	95.529,03	101.455,53
3	Pertalite	328.346,57	352.130,88	377.071,16	402.011,44	426.951,71
4	Solar	1.954.396,28	2.095.966,11	2.244.416,53	2.392.866,95	2.541.317,37
5	Dexlite	40.813,88	43.770,30	46.870,41	49.970,51	53.070,62
6	MFO	176.208,38	188.972,32	202.356,61	215.740,90	229.125,19
7	Solar (HSD)	32.688,99	35.056,87	37.539,83	40.022,80	42.505,76
8	Biodiesel *)	9.851,47	10.565,08	11.313,37	12.061,66	12.809,95
9	LPG	97.318,91	104.368,36	111.760,43	119.152,50	126.544,57
	Total	3.234.723,20	3.469.035,56	3.714.736,00	3.960.436,44	4.206.136,88

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

Emisi dari berbagai jenis bahan bakar minyak secara rinci disajikan pada tabel di atas yang menunjukkan emisi yang terbanyak adalah berasal dari konsumsi bahan bakar dari jenis solar. Selanjutnya adalah jenis premium sebagai jenis bbm terbanyak kedua dan ketiga adalah jenis premium dan pertalite. Sementara jenis terkecil yang menyumbangkan emisi adalah biodiesel dan biosolar.

Berdasarkan jenis sektoral, emisi GRK total dari sektor energi dan transportasi di Kota Samarinda didominasi oleh sektor transportasi dan industri. Emisi sektor transportasi berasal dari penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik jenis premium, pertamax, solar dan dexlite. Sedangkan sektor industri menimbulkan emisi GRK baik dari penggunaan kelima jenis BBM tersebut maupun dari penggunaan energi listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

2. Sektor IPPU (*Industrial Processes and Product Use*)

Kota Samarinda saat tidak memiliki industri skala besar dan dominan, seperti halnya tahun `1980 hingga akhir tahun 2000-an yang

dikenal sebagai pusat industri kayu lapis di Indonesia. Data dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa hanya industri skala kecil dan menengah saja yang saat ini eksis di kota Samarinda. Data konsumsi bahan bakar dari Dinas Perindustrian Kota Samarinda dikombinasikan dengan data-data sekunder yang dapat diakses seperti BPS Kota Samarinda dan beberapa dokumen hasil kajian lingkungan untuk mendapatkan bahan-bahan analisa yang lebih akurat.

Sementara itu, perhitungan inventarisasi GRK tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 22 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca memisahkan sektor energi dan proses dan penggunaan industri. Berdasar data yang tersedia pada DHL Kota Samarinda untuk 2023 ini, inventarisasi GRK Kota Samarinda terkalkulasi dari aktivitas sektor industri yang terbagi atas 2 kelompok skala industri yaitu industri kecil dan menengah. Sedangkan untuk industri yang termasuk dalam skala besar tidak terdapat di kota Samarinda. Jenis bahan bakar yang dikonsumsi untuk digunakan pada aktivitas industri di kota Samarinda terdiri dari jenis gas alam, LPG dan kayu bakar.

Tabel 2.146
Emisi Sektor Industri dari Tahun 2019 Hingga 2022

	Jenis			
	2019	2020	2021	2022
Industri Kecil dan Menengah	5.699,66	5.528,67	5.360,95	5.199,49

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan data mengenai konsumsi bahan bakar di sektor industri terjadi penurunan emisi dari 5.699,66 ton CO2e pada tahun 2019 hingga 5.199,49 ton CO2e pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan penggunaan bahan bakar utama dalam proses produksi di sektor industri. Pada tahun 2020 pemakaian bahan bakar sebagian

3. Sektor Perternakan dan Pertanian

Sektor pertanian memiliki peran sebagai penyumbang utama bagi emisi metana, dimana metana memiliki hubungan yang erat dengan penggunaan dan pengelolaan lahan terutama untuk budidaya tanaman

pertanian seperti padi, sayur mayur atau palawija serta tanaman perkebunan lainnya. Pada sistem pertanian yang tidak memperhatikan aspek aspek keseimbangan ekosistem atau lingkungan hidup umumnya sering menerapkan berbagai kegiatan yang berdampak negatif seperti pembakaran untuk membuka lahan dan juga membakar sisa panen dan penggunaan pupuk urea secara berlebihan untuk memacu produksi. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan menghasilkan tambahan emisi karbondioksida (CO2). Selain itu, pola penanaman tanaman pertanian seperti padi sawah terkesan memaksakan terus untuk ditanam dan berproduksi sepanjang tahun, sementara tanah atau garapan pertanian memerlukan adanya massa benda atau masa istirahat untuk memulihkan kondisi tanah agar subur kembali. Sumber emisi lainnya dari sektor pertanian yang juga berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar adalah kegiatan peternakan hewan. Beberapa jenis ternak yang banyak diusahakan oleh masyarakat Kota Samarinda adalah sapi, kambing, ayam dan bebek. Peternakan merupakan bentuk kegiatan yang bersifat komplementer atau saling melengkapi pada masyarakat agraris. Walaupun demikian peternakan di Kota Samarinda belum dianggap sebagai sektor yang memiliki potensi ekonomi yang besar, oleh karena itu tidak banyak masyarakat bekerja sebagai peternak. Hasil inventarisasi gas rumah kaca untuk sektor pertanian tahun 2022 digambar pada tabel berikut.

Tabel 2.147
Hasil Perhitungan GRK Sektor Pertanian Kota Samarinda Tahun 2022

No.	Uraian	Emisi CO_2 eq (ton/tahun)			
		2019	2020	2021	2022
1	Pertanian	6.518,13	6.695,11	6.748,13	6.766,37
2	Peternakan	16.444,12	14.990,50	14.267,65	13.328,62
	Total	22.962,25	21.865,61	21.015,78	20.094,99

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

Emisi GRK sektor pertanian yang didalamnya termasuk bidang peternakan secara umum mengalami penurunan emisi, khususnya pada bidang peternakan. Namun demikian penurunan tersebut dikarenakan tidak terdapat data jumlah ternak yang di tahun sebelumnya (2018) tercatat seperti sapi perah, kuda, dan itik atau bebek. Sementara pada bidang

pertanian untuk persawahan dan tanaman hortikultura lainnya terjadi sedikit peningkatan. Hal ini disebabkan adanya penambahan luas lahan pertanian dan bertambahnya pemakaian pupuk.

4. Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya

Serapan karbon untuk sektor kehutanan dan perubahan lahan lainnya di Kota Samarinda dari tahun 2018 hingga 2022, dilakukan dengan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis untuk analisis perubahan tutupan lahan menggunakan citra satelit landsat seusia dengan tahun liputannya. Emisi GRK sub sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya berfluktuatif dari tahun ke tahun selama periode 2014-2018 sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah. Hasil analisa menunjukan bahwa serapan karbon terbesar adalah pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2022 maupun tahun 2018.

Tabel 2.148
Tingkat Emisi GRK Akumulatif Periode Tahun 2014-2018 Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lainnya (dalam 1000 ton CO2e)

Sektoral	2018	2019	2020	2021	2022
Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya	1.463.168,00	1.467.391,62	1.476.823,19	1.472.154,02	1.422.119,25

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

5. Sektor Limbah

Perhitungan menunjukkan tiga kecamatan di Kota Samarinda dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Kunjang menyumbang emisi GRK bersih terbesar pula dari sektor limbah. Emisi GRK bersih dari Kecamatan Samarinda Ulu sebesar 42.785,06 ton CO2 e, diikuti Kecamatan Samarinda Utara sebesar 41.410,73 ton CO2 e dan Kecamatan Sungai Kunjang sebesar 40.133,24 ton CO2 e sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.149
Emisi GRK Bersih (ton CO2 e) Sektor Limbah Berdasarkan Kecamatan di Kota Samarinda

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Palaran	20.806,91	21.867,82	21.590,72	21.841,40	22.099,45
2.	Samarinda Seberang	24.414,26	25.634,22	21.884,91	21.886,13	21.885,84
3.	Loa Janan Ilir	28.417,59	25.248,03	22.514,29	22.515,75	22.515,41
4.	Sambutan	20.061,60	21.055,72	19.797,56	19.800,60	19.802,28
5.	Samarinda Ilir	26.380,52	26.172,77	23.624,77	23.635,68	23.644,54
6.	Samarinda Kota	11.629,34	11.914,80	10.837,56	10.982,50	10.975,34
No	**Kecamatan**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
7.	Sungai Kunjang	40.133,08	41.119,25	45.629,61	45.735,90	45.838,51
8.	Samarinda Ulu	42.785,05	43.832,87	44.352,73	44.794,88	45.238,28
9.	Samarinda Utara	41.410,89	44.274,87	36.472,46	36.488,95	36.503,12
10.	Sungai Pinang	36.407,57	37.688,71	36.208,33	36.214,09	36.217,17
	Total	292.446,82	298.809,06	282.912,94	283.895,88	284.719,94

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

Emisi GRK dari sektor limbah dihitung berdasarkan jenis limbah sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas. Peningkatan jumlah penduduk pada 10 kecamatan di Kota Samarinda menyebabkan peningkatan emisi GRK dari sektor limbah, baik berupa limbah padat maupun limbah cair selama periode 2014-2018. Emisi GRK yang dihasilkan dari limbah padat mencapai 94 persen dari total emisi GRK sektor limbah. Sedangkan sisanya sebanyak 6 persen berasal dari limbah cair. Berdasarkan jenis GRK yang diemisikan meliputi 92 persen berupa gas CO2, sedangkan gas CH4 dan N2O masing-masing sebesar 4 persen. Emisi GRK sektor limbah berdasarkan jenis GRK ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 2.150
Emisi GRK (ton CO2 e) Berdasarkan Jenis Limbah

Jenis Limbah	2018	2019	2020	2021	2022
Limbah padat	274.281,38	283.003,95	268.347,05	270.275,97	265.795,29
Limbah cair	18.834,32	19.137,71	18.155,93	18.231,93	18.296,22
Total	293.115,70	302.141,66	286.502,97	288.507,89	284.091,51

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

Limbah padat merupakan kategori limbah penyumpang terbanyak dibandingkan dengan limbah cair, Namun hal ini disebabkan karena tingkat kesulitan dan ketelitian untuk mendapatkan data yang valid mengenai limbah cair, khususnya limbah dari lingkungan perumahan atau limbah cair rumah tangga. Meskipun demikian perhitungan emisi khususnya limbah padat merupakan gambaran penanganan yang baik terhadap pengelolaan sampah atau limbah.

Tabel di atas menunjukan adanya penurunan emisi GRK di Kota Samarinda dari tahun 2018 hingga 2022. Salah satu sebab keberhasilan pada penurunan emisi adalah pengelolaan sampah yang semakin baik. Pembakaran sampah sudah tidak lagi dilakukan dan di sisi lain keterlibatan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai jenis sampah untuk diolah dan menjadi beberapa produk yang bernilai turun memberikan dampak pada pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Samarinda juga telah menunjukan usaha serius dengan memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada program Bank Sampah atau Bank Ramah Lingkungan (Bang Ramli) yang saat ini berkembang di lingkungan masyarakat. Program ini harus mendapatkan penghargaan dan dukungan agar terus berkembang. Berdasarkan jenis emisi GRK yang dihasilkan dari sektor limbah dari tahun 2018 hingga 2020 ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2.151
Emisi GRK (ton CO2 e) Sektor Limbah Berdasarkan Jenis GRK

Jenis GRK	2018	2019	2020	2021	2022
CO_2	272.418,62	276.806,84	262.606,33	263.705,60	264.635,52
CH_4	9.558,24	11.994,82	11.306,04	11.780,58	8.940,59
N_2O	11.138,84	13.340,01	12.590,61	13.021,71	10.515,40
Total	293.115,70	302.141,66	286.502,97	288.507,89	284.091,51

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Samarinda, 2023

Tingkat emisi aktual GRK sektor limbah tahun 2018 hingga 2022 berdasarkan jenis GRK menunjukan bahwa CO2 adalah jenis GRK yang terbesar dengan nilai 264 ribu ton CO2 e (93%) dibandingan jenis CH4 dan N2O yang masing-masing hanya 8 ribu dan 10 ton CO2 e atau sekitar 3% dan 4%.

b. Telaahan RTRW Kota Samarinda Tahun 2022-2042

Isu-isu strategis yang tervalidasi dan terkonfirmasi berdasarkan RTRW Kota Samarinda Tahun 2022-2042, meliputi:

1. Kota Samarinda sebagai Kota Tepian;
2. Perubahan pada batas-batas wilayah administrasi (dari 53 menjadi 59 kelurahan);
3. Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda;
4. Pengaruh Pembangunan infrastruktur transportasi seperti Bandara Samarinda Baru dan jalan tol Balikpapan-Samarinda;
5. Kota Samarinda merupakan salah satu kota penyangga IKN;
6. Penguatan Posisi Kota Samarinda dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di sektor perindustrian;
7. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa
8. Upaya rehabilitasi pada lahan-lahan kritis (Pit dan lahan disposal) terutama lahan bekas/terdampak kegiatan pasca penambangan;
9. Alih fungsi lahan tanpa melihat aturan Tata Ruang;
10. Perubahan Pemanfaatan Kawasan Eks. Bandara Temindung;
11. Kawasan rawan bencana yang berpengaruh pada kemampuan pengembangan kawasan diatasnya dan upaya mitigasi serta pengurangan resiko kebencanaan

12. Identifikasi Kawasan Resapan Air; dan
13. Rencana penutupan (penghentian operasi kegiatan) pada TPA Bukit Pinang

Tujuan Penataan Ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa serta industri berskala regional dengan peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda merupakan penjabaran dari tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda meliputi:

a) pengembangan Kota Tepian dengan acuan konsep waterfront city development dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan asas berkelanjutan;
b) peningkatan akses pelayanan perkotaan dalam skala nasional dan sistem PPK yang merata dan berhierarki;
c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa dan industri berskala regional;
d) peningkatan dan penguatan infrastruktur dan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan karena memiliki posisi yang strategis dan berbatasan dengan Wilayah sekitarnya;
e) pelestarian dan pemantapan Kawasan Lindung untuk penyelamatan lingkungan hidup berkelanjutan;
f) pengembangan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan;
g) kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan ekonomi kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
h) kebijakan pemantapan kawasan kepentingan sosial budaya berbasis kearifan lokal; dan
i) kebijakan pemantapan kawasan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Strategi penataan ruang Kota Samarinda meliputi:

1. Strategi Pengembangan Kota Tepian dengan acuan konsep waterfront city development dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan

asas berkelanjutan meliputi: a. melakukan penataan dan pengendalian lingkungan pada Wilayah atau Kawasan tepian air (waterfront) yang telah beralih fungsi dan atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukan fungsi dan pemanfaatan Wilayah atau Kawasan sebagai Kawasan Lindung; b. meningkatkan dan mengendalikan konservasi lingkungan berupa penataan Wilayah terutama Kawasan tepian air (waterfront) yang memiliki nilai sejarah/historis terhadap Daerah dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan; c. melakukan pembangunan kembali (redevelopment) dengan memanfaatkan kembali fungsi-fungsi Wilayah atau Kawasan tepian air (waterfront) lama dan/atau belum berfungsi optimal yang masih ada sampai saat ini dan tetap digunakan untuk kepentingan Masyarakat dengan merevitalisasi ataupun merekonstruksi fasilitas-fasilitas yang ada tanpa penambahan pembangunan permukiman baru guna menjaga fungsi sungai; dan d. mengembangkan Wilayah atau Kawasan tepian air (*waterfront*) yang dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi Kawasan yang ditetapkan.

2. Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dalam skala nasional dan sistem PPK yang merata dan berhierarki meliputi: a. penetapan PPK, SPPK, dan PPL secara merata dan berhierarki; b. mengembangkan PPK dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa dan industri berskala nasional serta pusat pelayanan umum dan kegiatan lainnya pada simpul-simpul pusat pelayanan; c. mengembangkan pusat pemerintahan baru; d. meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu baik dalam Kawasan maupun antar Kawasan; e. menambah dan mengembangkan sarana dan prasarana kota di Kawasan yang belum terlayani oleh pusat atau sub pusat pelayanan kota maupun lingkungan; dan f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Wilayah sekitar secara sinergis dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah.
3. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa dan industri berskala regional meliputi: a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat,

laut, dan udara; b. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik dan telekomunikasi yang merata, menyeluruh, dan terintegrasi; c. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan air bersih, drainase, dan air limbah; d. menyediakan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki pada Kawasan fungsional dan sepanjang jalan utama kota; dan e. menyediakan jalur dan Ruang evakuasi bencana pada lokasi-lokasi kawasan rawan bencana yang berisiko terhadap bencana alam maupun bencana lainnya.

4. Strategi peningkatan dan penguatan infrastruktur dan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan karena memiliki posisi yang strategis dan berbatasan dengan Wilayah sekitarnya meliputi: a. menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; c. pengembangan zona penyangga (buffer zone) pada kawasan militer berupa Ruang Terbuka Hijau; dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan atau aset Tentara Nasional Indonesia.
5. Strategi pelestarian dan pemantapan Kawasan Lindung untuk penyelamatan lingkungan hidup berkelanjutan meliputi: a. mewujudkan Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya; b. mengembalikan atau memulihkan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat berkembangnya kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah; c. melindungi dan melestarikan kawasan resapan air untuk mengimbangi perkembangan kegiatan budi daya; d. melindungi dan melestarikan Kawasan Perlindungan Setempat; e. melindungi kawasan rawan bencana; f. membatasi perkembangan Kawasan terbangun dan permukiman dengan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan sempadan sungai; g. mempertahankan Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada serta menambah penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik dalam bentuk taman kota, taman lingkungan, lapangan olahraga, jalur hijau, makam, dan hutan kota; dan h. mempertahankan dan memelihara keaslian benda dan kawasan

cagar budaya dan melakukan konservasi dan preservasi benda dan kawasan cagar budaya yang kondisinya menurun.

6. Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan meliputi: a. menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang Wilayah; b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan termasuk di dalamnya pengoptimalan potensi perairan dan perikanan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya dalam bentuk perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata; c. mengendalikan dan mengembangkan Kawasan Perumahan dan permukiman memadai sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; d. meningkatkan kualitas perumahan pada kawasan kumuh melalui perbaikan kondisi lingkungan perumahan; e. mengelola dan menata Ruang serta mengembangkan sarana dan prasarana untuk sektor informal di Kawasan Perdagangan dan Jasa; f. mengembangkan Kawasan Perkantoran baru; g. menetapkan dan menyiapkan Kawasan Peruntukan Industri kecil atau industri rumah tangga sebagai kawasan sentra industri; dan h. pengembangan Ruang evakuasi bencana, dengan strategi menyediakan Kawasan untuk Ruang evakuasi bencana melalui penggunaan Ruang Terbuka Hijau dan bangunan umum.
7. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan ekonomi kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi: a. mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa, industri dan pariwisata sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi; b. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; c. mengembangkan Kawasan Pariwisata sebagai sektor penunjang pertumbuhan ekonomi; dan d. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata.
8. Strategi pemantapan kawasan kepentingan sosial budaya berbasis kearifan lokal meliputi: a. menetapkan Kawasan yang memenuhi kriteria strategis sosial budaya; b. melindungi dan melestarikan warisan

budaya berupa cagar budaya; dan c. penataan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat lainnya diantaranya manfaat ekonomis bagi perekonomian kota.

9. Strategi pemantapan kawasan untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: a. menetapkan dan memberikan arahan terkait daya tampung dan daya dukung lingkungan melalui peraturan zonasi; dan b. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan hayati.

Pusat pelayanan kota yang mempunyai skala pelayanan regional terdapat di:

1. PPK Bugis di Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota sebagai simpul pusat kegiatan dengan fungsi kegiatan utama pemerintahan, pelayanan umum kota dan pusat perdagangan dan jasa; dan
2. PPK Rawa Makmur di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran dengan fungsi kegiatan sebagai pusat Industri skala nasional, pusat perdagangan dan transportasi regional.

Untuk mendukung pusat pelayanan kota, penyebaran kegiatan yang merata, dan untuk mengurangi beban kawasan pusat kota, maka Kota Samarinda dibagi lagi menjadi 6 Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) sebagai berikut:

1. SPPK Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran dengan fungsi kegiatan utama meliputi Pusat Pemerintahan Baru dan Pusat Transportasi;
2. SPPK Baqa di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang dengan fungsi kegiatan utama meliputi perdagangan jasa skala kota, dan pusat sejarah, budaya dan pariwisata;
3. SPPK Makroman di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan dengan fungsi kegiatan utama perdagangan jasa skala kota;
4. SPPK Loa Bakung di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi perdagangan jasa skala kota, perkantoran; dan industri skala kota;
5. SPPK Bukit Pinang di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu dengan fungsi kegiatan utama perdagangan jasa skala kota; dan

6. SPPK Sungai Siring di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi perdagangan jasa skala regional dan transportasi regional.

Berdasarkan hirarki yang berjenjang, untuk pengembangan 20 tahun mendatang dengan pemerataan jangkauan pelayanan dan menumbuhkan pusat-pusat kegiatan baru, maka Kota Samarinda memiliki 8 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota. Ciri utama pada kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), adalah skala pelayanan jenis kegiatan yang ada pada kawasan Pusat Lingkungan, diperuntukan untuk skala pelayanan kegiatan lingkup pemukiman setingkat kecamatan, kelurahan, dan RT. Pusat lingkungan dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan pada skala pusat pelayanan lingkungan. Pusat pelayanan lingkungan di Kota Samarinda meliputi:

1. PPL Bantuas di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran;
2. PPL Simpang Pasir di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran;
3. PPL Sengkotek di Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir;
4. PPL Lempake di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara;
5. PPL Sempaja Selatan di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara;
6. PPL Mugirejo di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang;
7. PPL Pulau Atas di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan; dan
8. PPL Lok Bahu di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang

Berdasarkan kondisi Kota Samarinda yang akan menjadi penyangga IKN (Ibu Kota Negara), maka wilayah perencanaan Kota Samarinda dibagi menjadi 3, yaitu kawasan utara, tengah dan selatan. Adapun batasan wilayah administrasi pada wilayah perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152
Bagian Wilayah Perencanaan Kota Samarinda

Bagian Wilayah Perencanaan	Wilayah Administrasi
BWP 1 (Kawasan Utara)	Kecamatan Samarinda Utara Kel. Budaya Pampang Kel. Lempake Kel. Sempaja Barat Kel. Sempaja Selatan

Bagian Wilayah Perencanaan	Wilayah Administrasi
	Kel. Sempaja Timur Kel. Sempaja Utara Kel. Sungai Siring Kel. Tanah Merah
	Kecamatan Sungai Pinang Kel. Bandara Kel. Gunung Lingai Kel. Mugirejo Kel. Sungai Pinang Dalam Kel. Temindung Permai
BWP 2 (Kawasan Tengah)	Kecamatan Samarinda Ilir Kel. Pelita Kel. Selili Kel. Sidodamai Kel. Sidomulyo Kel. Sungai Dama
	Kecamatan Samarinda Kota Kel. Bugis Kel. Karang Mumus Kel. Pasar Pagi Kel. Pelabuhan Kel. Sungai Pinang Luar
	Kecamatan Samarinda Ulu Kel. Air Hitam Kel. Air Putih Kel. Bukit Pinang Kel. Dadi Mulya Kel. Gunung Kelua Kel. Jawa Kel. Sidodadi Kel. Teluk Lerong Ilir
	Kecamatan Sambutan Kel. Makroman Kel. Pulau Atas Kel. Sambutan Kel. Sindang Sari Kel. Sungai Kapih
BWP 3 (Kawasan Selatan)	Kecamatan Loa Janan ilir Kel. Sengkotek Kel. Simpang Tiga Kel. Tani Aman Kel. Harapan Baru Kel. Rapak Dalam
	Kecamatan Palaran Kel. Handil Bhakti Kel. Simpang Pasir Kel. Rawa Makmur Kel. Bukuan Kel. Bantuas
	Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Baqa Kel. Gunung Panjang Kel. Mangkupelas Kel. Mesjid Kel. Sungai Keledang Kel. Tenun
	Kecamatan Sungai Kunjang Kel. Loa Buah Kel. Loa Bakung Kel. Teluk Lerong Ulu Kel. Lok Bahu Kel. Karang Asam Ulu Kel. Karang Asam Ilir Kel. Karang Anyar

Sumber: RTRW Kota Samarinda

Skenario kewilayahan yang akan diterapkan, yaitu:

1. Kawasan Selatan akan dilakukan pembatasan laju kawasan masif terbangun dengan prediksi pertumbuhan penduduk bersifat linier;
2. Kawasan Tengah dengan pengembangan pusat layanan skala regional dan nasional dengan prediksi sistem target pada beberapa kawasan; dan
3. Kawasan Utara dengan prediksi pertumbuhan penduduk bersifat linier dilakukan pengembangan dengan tetap mengutamakan dan menjaga fungsi lingkungan hidup.

Gambar 2.80
Struktur Ruang Kota Samarinda

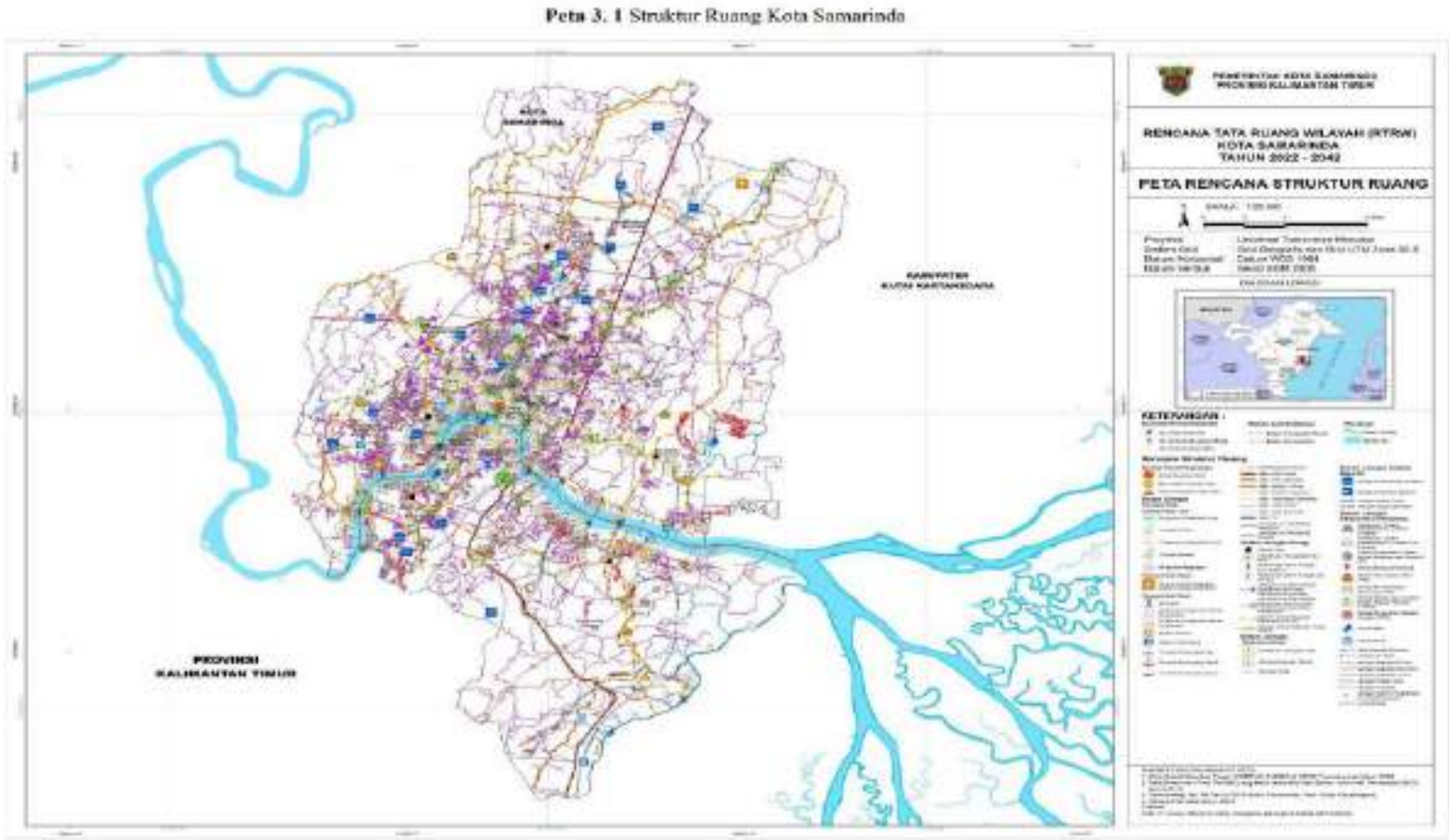

Sumber : DOkumen RTRW Kota Samarinda Tahun 2022-2042

Kota Samarinda sebagai bagian Dari IKN Superhub ekonomi akan mengubah wajah perekonomian Indonesia agar menjadi lebih inklusif melalui strategi tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) serta kerja sama dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu menjadi penggerak perekonomian di Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai nilai domestik di wilayah bagian timur dan seluruh Indonesia. Dalam mewujudkan konsep Tiga Kota yang kokoh, IKN, Balikpapan, dan Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi.

1. IKN akan menjadi 'saraf dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT). IKN juga akan menjadi basis untuk Smart Citg dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan.
2. Samarinda akan menjadi 'jantung' dari struktur Tiga Kota yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur
3. Balikpapan akan menjadi 'otot' pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Samarinda dalam sistem perkotaan PKN dan pusat koleksi distribusi bagi wilayah hinterland di sekitarnya. Samarinda sebagai pendukung IKN dalam masa transisi maupun dalam perkembangannya setelah beroperasi:

1. Logistik
2. Bahan pangan
3. Fasilitas sosial ekonomi
4. Fasilitas akomodasi dan rekreasi

Samarinda memiliki potensi dan keunikan untuk pengembangan kota dan dukungan bagi IKN dalam hal logistik dan pelayanan (pendidikan, rekreasi, transportasi, fasilitas (MICE dan akomodasi).

Perkiraan distribusi dan keterkaitan antarkota dengan adanya IKN adalah:

1. Perkembangan dan pertumbuhan wilayah mengikuti jaringan jalan
2. Terbentuknya koridor Tana Paser-Kota Sangatta di bagian timur Kalimantan Timur
3. Pertumbuhan IKN dan simpul IKN Balikpapan Penajam
4. Kota Samarinda sebagai pusat pemerintahan provinsi
5. Kota Balikpapan sebagai gerbang Kalimantan Timur baik darat maupun laut
6. Kota Balikpapan sebagai kota terdekat IKN menjadi semakin kuat
7. Kota Samarinda dapat menjadi kota singgah bagi pelaku perjalanan dari kota lain menuju IKN

c. Telaahan Isu Strategis Berdasarkan Aspek Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan aspek pembangunan berkelanjutan, isu pembangunan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) isu strategis utama Kota Samarinda, sebagai berikut:

1. Isu Lingkungan

Isu strategis dalam pembangunan Kota Samarinda yang terkait lingkungan adalah terkait pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang berkelanjutan dan penanggulangan banjir Kota Samarinda.

. Pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang berkelanjutan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang sangat *concern* terhadap antisipasi *global warming* terutama untuk mengatasi degradasi lingkungan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Menindaklanjuti hal tersebut, Provinsi Kalimantan Timur merumuskan sebuah gerakan bernama *Kaltim Green* dimana setiap penentuan arah kebijakan harus berfokus pada kelanjutan lingkungan hidup. Berawal dari komitmen terhadap arus pemikiran agar pembangunan harus menemukan titik tengah antara berbagai

kekuatan dan kepentingan yang kerap saling bertolak belakang maka deklarasi *Kaltim Green* dapat dianggap sebagai salah satu cikal bakal transformasi (pergerakan) perekonomian berbasis lingkungan.

Kaltim Green didefinisikan sebagai kondisi Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan serta program-program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. Kaltim Hijau menandai dimulainya sebuah proses pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan*(green development)*dengan basis tata guna pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan *(smart environment and smart development)*.

Menindaklanjuti perihal tersebut, untuk mendukung terselenggaranya *Kaltim Green*, maka Kota Samarinda harus menjadi barometer wilayah se-Provinsi Kalimantan Timur dalam mendeklarasikan dan merealisasikan pembangunan berkelanjutan terutama dalam pembangunan perekonomian dan sosial. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui perencanaan pembangunan daerah yang *concern* terhadap lingkungan hidup beserta realisasi pembangunan berkelanjutan yang selalu dimonitoring dan dievaluasi oleh instansi terkait. Selain itu, perencanaan tata ruang wilayah Kota Samarinda harus berlandaskan asas berkelanjutan pula dengan implementasi peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Samarinda serta mengatasi degradasi kualitas lingkungan hidup yang memasuki status kritis.

b. Penanggulangan Banjir di Kota Samarinda

Penyebab terjadinya banjir di Samarinda ada dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dimaksud adalah topografi wilayah, curah hujan, pasang sungai, banjir kiriman, dll. Faktor alam ini tidak bisa dikendalikan, kalaupun bisa memerlukan biaya yang cukup besar. Faktor manusia yang dimaksud adalah pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan infrastruktur seperti pemukiman dan kebutuhan lainnya. Selain itu, diikuti pula

peningkatan penyediaan lahan untuk usaha seperti pertanian, perkebunan, maupun industri.

Peningkatan kebutuhan infrastruktur menyebabkan daerah yang semula menjadi daerah resapan air berubah fungsi menjadi pemukiman maupun daerah industri. Daerah resapan air yang berkurang mengakibatkan jika terjadi hujan air yang turun tidak dapat meresap ke dalam tanah melainkan menggenangdan menyebabkan banjir. Drainase yang buruk juga dapat mengakibatkan banjir. Banjir yang terjadi menghambat aktivitas di Kota Samarinda.

Untuk upaya penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Samarinda maka diperlukan untuk menambah daerah resapan air dan memperbaiki sistem drainase yang ada di Kota Samarinda terutama di daerah rawan banjir.

2.6.8. Isu Ekonomi

Isu strategis dalam pembangunan Kota Samarinda yang terkait Ekonomi adalah terkait Infrastruktur dan Konektivitas, transparansi tata kelola pemerintahan (*Good Governance* dan *Clean Government*) penguatan peran transportasi publik untuk menunjang fungsi Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi, Persiapan Kota Samarinda sebagai Tri City, dan Perwujudan Kota Samarinda menjadi Smart City.

. **Infrastruktur dan Konektivitas**

Peningkatan Infrastruktur: Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya akan mempermudah distribusi barang dan mempercepat konektivitas antara Samarinda dengan daerah lain di Kalimantan maupun luar pulau

Konektivitas Digital: Memperluas akses internet dan teknologi informasi dapat mendukung pengembangan bisnis, pendidikan, dan inovasi di Samarinda. Infrastruktur digital yang memadai juga penting untuk menarik investor dan mempermudah pelaku usaha lokal. Ketersediaan dan kualitas akses internet sangat penting untuk mendukung ekonomi digital dan layanan masyarakat. Perluasan jaringan fiber optic dan 5G dapat membantu mengatasi masalah konektivitas digital.

b. Transparansi tata kelola pemerintahan

Pemerintahan Kota Samarinda sebagai pelaksana inti perencanaan pembangunan daerah memiliki tugas sebagai agen perubahan menuju sebuah reformasi pemerintahan berupa reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, antisipasi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan pemerintahan, hingga peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur negara terutama pegawai pemerintahan Kota Samarinda. Oleh karena itulah, untuk mencapai *Good Governance* dan *Clean Government* perlu adanya transparansi tata kelola pemerintahan Kota Samarinda untuk menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Samarinda.

c. Penguatan peran transportasi publik untuk menunjang fungsi Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi dan Tri City

Status sebagai ibukota provinsi menjadikan Kota Samarinda menjadi salah satu kawasan yang paling sering dikunjungi sehingga menjadikan infrastruktur perhubungan mendapat perhatian lebih dalam pengembangannya. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya karena kemudahan akses dari Kota Samarinda ke wilayah sekitar.

Selain itu, Kota Samarinda berada di wilayah strategis Provinsi Kalimantan Timur yakni berada pada salah satu pusat wilayah yang langsung dikelilingi oleh Kabupaten/Kota lain seperti Kota Balikpapan, Kota Bontang, maupun Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut menjadikan Kota Samarinda maupun akses menuju Kota Samarinda harus ditingkatkan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar selaras sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan provinsi. Terpecahkannya kebuntuan koordinasi pusat dengan provinsi dalam pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda menjadi isu positif bagi pengembangan Kota Samarinda di masa datang

Pengembangan transportasi massal di kawasan Tri-City, yaitu Samarinda, Balikpapan, dan IKN dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi kemacetan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Memperkenalkan dan meningkatkan sistem transportasi massal, seperti bus rapid transit (BRT) untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan.

d. Perwujudan Kota Samarinda menjadi *Smart City*

Konsep manajemen kota cerdas dipercaya oleh banyak pihak, saat ini, sebagai jawaban oleh berbagai permasalahan kota-kota di Indonesia. Pelayanan masyarakat kota yang kian kompleks dalam manajemen kota cerdas dilakukan dengan mengintegrasikan semua sektor yang ada untuk menanggulangi berbagai permasalahan kota seperti ketersediaan listrik, air bersih, banjir, kemacetan, dan lain-lain. Inisiator *smart city* menegaskan bahwa semua masalah kependudukan dapat diselesaikan melalui integrasi di segala sektor khususnya bantuan infrastruktur teknologi informasi atau *Broadband IT*.

Dalam penanganan (manajemen) kota, Samarinda kini menghadapi kompleksitas antara lain pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam karena adanya migrasi, timbulnya pemukiman kumuh, krisis energi, banjir, penurunan kualitas infrastruktur publik, hingga permasalahan sosial yang semakin kompleks seperti kriminalitas.

Sebagai ibukota provinsi yang mencerminkan “wajah” Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda harus mau dan mampu menapaki jalan menuju *Smart City* di masa datang. Tujuan dari realisasi *Smart City* adalah menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Layak Huni terutama bagi generasi mendatang melalui optimalisasi berbagai hal seperti cerdas berkehidupan (*smart living*), cerdas masyarakat (*smart people*), cerdas tata kelola pemerintahan (*smart governance*), cerdas ekonomi (*smart economy*), cerdas pengembangan (*smart development*), dan cerdas lingkungan (*smart environment*).

Untuk mencapai *smart city*, Kota Samarinda harus tetap memperhatikan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Jika dalam usaha mencapai *smart city* tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan maka lingkungan akan

menjadi rusak sebagai akibat dari tidak adanya pembangunan yang berkelanjutan yang tidak memperhatikan lingkungan.

e. Konsep dan Rencana Pembangunan Tri-City

IKN, Balikpapan, dan Samarinda menjadi segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi" dalam mewujudkan superhub ekonomi terpadu. Konsep Pembangunan **Tri-City** yang terdiri dari Visi Pembangunan **Tri-City** dan Pilar-pilar Strategis memberikan arah pembangunan **Tri-City** ke depan. Konsep tersebut diharapkan tercermin dalam Rencana Pembangunan **Tri-City** serta RPJMD, RTRW, dan sebagainya.

Rencana Pembangunan Tri-City diharapkan menjadi rencana pembangunan yang komprehensif untuk memberikan arah kebijakan, strategi, rencana aksi, dan proyek-proyek prioritas bagi pembangunan jangka panjang melalui kolaborasi antara IKN, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan instansi terkait lainnya, sehingga terciptalah pembangunan yang harmoni.

Tantangan Pembangunan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.153

Tantangan Pembangunan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda

Sektor	Samarinda	Balikpapan
Ekonomi	Pengembangan Kawasan Industri Kariangau	Melepaskan diri dari ketergantungan pada industri batu bara
	Pembentukan hub bagi industri petrokimia	Memanfaatakan kembali lahan bekas tambang batu bara untuk perkebunan
	Dari industri yang berorientasi pada sumber daya alam menjadi industri yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi	Transformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan
	Pengembangan SDM bagi industri-industri baru	

Kehidupan perkotaan	Mengelola urbanisasi yang cepat dan meningkatkan kualitas hidup	Pengembangan wilayah Palaran
	Langkah-langkah transportasi dan angkutan umum	Manajemen lalu lintas dan transportasi umum
	Meningkiatkan fasilitas air, drainase, dan air limbah	Peningkatan fasilitas air, drainase, air limbah
	Langkah-langkah perumahan informal	Langkah-langkah perumahan informal dan peningkatan kualitas hidup (QOL)
	Mempromosikan 3R, perluasan lokasi TPA	Inklusi keberagaman, koeksistensi tradisi
	Melibatkan keberagaman, koeksistensi tradisi, budaya dan daerah pedesaan	Promosi 3R, Peningkatan kapasitas pengelolaan limbah, sanitas
Lingkungan dan Ketahanan	Melestarikan lingkungan alam, pengelolaan hutan	Melestarikan lingkungan alam, pengelolaan hutan
	Pengelolaan banjir/bencana, tindakan drainase	Pengelolaan banjir/bencana, tindakan drainase
	Pengelolaan lahan gambut	Pengelolaan lahan gambut
Konektivitas	Penanggulangan bencana transportasi dan peningkatan transportasi umum	Manajemen lalu lintas dan transportasi umum
	Pengembangan pelabuhan/bandara, fasilitas air regional	Pengembangan pelabuhan/bandara
	Pengembangan energi terbarukan	Promosi energi terbarukan
	Peningkatan air baku dan sistem penyediaan air	Peningkatan pasokan energi

Sumber : Hasil Kajian JIKA, Tahun 2024

Berikut disajikan tantangan pembangunan Kota Samarinda dengan mempertimbangkan dampak IKN:

Tabel 2.154

Tantangan pembangunan Kota Samarinda dengan mempertimbangkan dampak IKN

Sektor	Jangka Pendek (2024-2029)	Jangka Menengah (2030-2034)	Jangka Panjang (2035-2045)
Ekonomi	Pengembangan kawasan industri Palaran Menghentikan ketergantungan pada industri batubara Reklamasi lahan tambang batubara yang terbengkalai Pengembangan SDM untuk industri baru	Transformasi menuju ekonomi hijau Peningkatan nilai tambah dalam seluruh rantai pasok untuk dari hulu ke hilir Pengembangan energi rendah karbon (Biofuel, Gasifikasi batu bara) Pengembangan ekowisata	Membangun struktur kerjasama dengan pusat ekonomi IKN Sektor ekonomi baru yang inovatif Revitalisasi UMKM Kawasan industri berteknologi tinggi yang berkelanjutan
Kehidupan Perkotaan	Pengembangan wilayah Palaran Mengelola urbanisasi yang cepat, meningkatkan kualitas hidup Mengembangkan infrastruktur jalan, transportasi umum, drainase, dan air limbah dengan “smart system” Langkah-langkah atau tindakan untuk mengatasi atau mengatur pemukiman informal Mengembangkan fasilitas dan layanan sosial Melibatkan keberagaman, koeksistensi tradisi, budaya, dan daerah pedesaan Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah	Pengelolaan pertumbuhan perkotaan yang cepat Memperluas sistem jalan dan transportasi umum, air, drainase, dan infrastruktur air limbah dengan teknologi cerdas Langkah-langkah perumahan informal Meningkatkan fasilitas dan layanan sosial Mempromosikan 3R, peningkatan sanitasi Mempromosikan pembangunan yang inklusif	Pengelolaan pertumbuhan perkotaan yang cepat Memperluas infrastruktur jalan, transportasi umum, air, drainase, dan air limbah dengan teknologi cerdas Meningkatkan fasilitas dan layanan sosial Memaksimalkan keberlanjutan pengelolaan limbah Mempromosikan pembangunan yang inklusif

Lingkungan dan Ketahanan	Melestarikan lingkungan alam dan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan hutan Mengembangkan strategi dan langkah-langkah pengurangan risiko bencana/perubahan iklim/banjir Pengelolaan lahan gambut dan bekas tambang	Melestarikan lingkungan alam dan keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan Mempromosikan dan menginvestasikan langkah-langkah pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim Pengelolaan lahan gambut dan bekas tambang	Melestarikan lingkungan alam dan keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan Mempromosikan dan menginvestasikan langkah-langkah pengurangan risiko bencana/banjir dan perubahan iklim Pengelolaan lahan gambut dan bekas tambang
Konektivitas	Mengembangkan/memperluas jaringan jalan dan transportasi umum, bandara APT Pranoto, pelabuhan, dan infrastruktur perairan regional Mempromosikan energi terbarukan	Memperluas infrastruktur jalan, transportasi umum, bandara APT Pranoto, dan logistik Memperluas pasokan energi dan mendorong transisi energi	Memperluas infrastruktur jalan, transportasi umum, dan logistik Memperluas pasokan energi dan mendorong transisi energi

Sumber : Hasil Kajian JIKA, Tahun 2024

Tri City mempunyai visi Membangun Sinergi dan Kolaborasi Menuju Pusat Ekonomi Berkelanjutan, Adil, dan Tangguh dengan Koneksi Global melalui Pembangunan dan Infrastruktur Terpadu. Dengan 4 (empat) pilar strategis strategis yang tersaji sebagai berikut :

	Ekonomi	**Kehidupan Perkotaan**	**Lingkungan dan Ketahanan**	**Konektivitas**
4 Pilar Strategis	**1. Mewujudkan Ekonomi Hijau dan Biru: Klaster Ekonomi dan Industri yang Produktif, Inovatif, Kreatif, dan Berkelanjutan** Menggabungkan dan meningkatkan	**2.Menyediakan Layanan Perkotaan yang Layak Huni dan Inklusif melalui Pembangunan yang Hijau, Berbudaya, dan Berkelanjutan** Selesaikan berbagai tantangan bersama antara kota dan desa,	**3. Melestarikan/Menciptakan Kembali Lingkungan Alam yang Berharga dan Meningkatkan Ketahanan Perkotaan** Melestarikan/menciptakan kembali lingkungan alam dan keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya, dan meningkatkan	**4. Meningkatkan Konektivitas Regional dengan Infrastruktur Ramah Lingkungan** Meningkatkan konektivitas regional dan mendorong pembangunan infrastruktur hijau (netral

	kekuatan yang ada dan peluang baru di Tri-City dan kabupaten sekitarnya	pendatang baru dan penduduk setempat	ketahanan perkotaan terhadap perubahan iklim dan bencana alam	karbon, transisi energi)
Sektor-Sektor Sasaran untuk Pengembangan Tri-City	Transformasi ekonomi dan industri Klaster industri baru Pariwisata dan pertanian Pengembangan industri baru yang terkait dengan energi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perencanaan tata ruang, penggunaan lahan Pembangunan inklusif Pembangunan kota pintar Infrastruktur perkotaan Pengelolaan limbah Perumahan dan peningkatan masyarakat	Melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati Pengelolaan hutan, lahan gambut, bekas tambang Ketahanan perkotaan terhadap perubahan iklim dan bencana	Pengembangan jaringan jalan dan transportasi umum Pengembangan logistik Penyediaan air regional Penyediaan energi regional, transisi energi

Sumber Data : Hasil Kajian JIKA tahun 2024

Skema proyek yang diusulkan dalam kolaborasi Tri-City tersaji dalam tabel berikut :

Visi	4 Pilar Strategis	Proyek Kolaborasi Pembangunan Tri-City (Tentatif)
Kawasan Tri-City yang Lebih Besar dan Pusat Ekonomi Tangguh dengan Koneksi Global melalui Pembangunan dan Infrastruktur Terpadu	**1. Menciptakan Ekonomi Hijau: Klaster Industri yang Berkelanjutan, Inovatif, dan Kreatif** • Pengembangan Pariwisata • Pengembangan Klaster Industri Baru • Transisi yang adil (transformasi industri) • Pengembangan Industri Baru yang terkait dengan Energi	**1.** Dukungan Revitalisasi Industri Pariwisata Tri-City **2.** Program Penciptaan Industri Baru/Pengembangan Sumber Daya Manusia Tri-City **3.** Proyek Pengembangan UKM **4.** Proyek Dukungan Pengembangan Industri Farmasi Terpadu dan Industri Kimia Lanjutan Tri-City **5.** Proyek Dukungan Pembangunan Program Kerjasama/Promosi Industri Pendidikan Tri-City **6.** Proyek Pengembangan Pertanian Berkelanjutan Tri-City **7.** Proyek Promosi Transisi Energi (Pengembangan Fasilitas CCS/CCUS) **8.** Survei Perumusan Rencana Pemanfaatan Hidrogen/Gas Alam Tri-City **9.** Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Hidrogen/Rantai Pasokan Hidrogen **10.** Proyek Dukungan Pengembangan Industri Energi Bahan Bakar Rendah Karbon Tri-City
	2. Mendorong Pembangunan yang Beragam dan Inklusif dengan Kesempatan yang Sama	1. Proyek Peningkatan Kemampuan Manajemen Perkotaan Tri-City 2. Dukungan Pengembangan Platform Kota Cerdas Tri-City

	· Pengelolaan perkotaan · Kota pintar · Pengelolaan limbah · Infrastruktur perkotaan	3. Proyek Peningkatan Lingkungan Pasokan Air Perkotaan Tri-City 4. Proyek Peningkatan Lingkungan Drainase Perkotaan Tri-City 5. Proyek Peningkatan Lingkungan Pembuangan Limbah Perkotaan Tri-City 6. Proyek Peningkatan Lingkungan Jalan Raya Tri-City 7. Proyek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah Tri-City melalui Kolaborasi Wilayah yang Luas 8. Proyek Peningkatan Komunitas Permukiman Kumuh Tri-City
	3. Melestarikan/Menciptakan Kembali Lingkungan Alam yang Tak Ternilai dan Meningkatkan Ketahanan Perkotaan	1. Proyek Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Proyek Pengelolaan Hutan, Pembangunan Kembali Lokasi Bekas Tambang Batu Bara, dan Pengelolaan Lahan Gambut 3. Proyek Pembangunan Tiga Kota yang Tahan Iklim
	4. Meningkatkan Konektivitas Regional dengan Infrastruktur Ramah Lingkungan • Meningkatkan konektivitas • Transportasi umum, Logistik, dll. • Pasokan air regional • Pasokan energi, Transisi energi	1. Rencana Induk Transportasi Tri-City 2. Rencana Induk Logistik Komprehensif Tiga Kota 3. Proyek Pengembangan dan Pengoperasian Perluasan Bandara Sepingan Balikpapan 4. Proyek Pengembangan dan Pengoperasian Perluasan Bandara APT Pranoto Samarinda 5. Proyek Rel Kereta Api Penghubung Balikpapan-Ibu Kota Baru 6. Proyek Pembangunan Rel Kereta Api/LRT Kota Samarinda-Bandara dan Kota Samarinda-IKN 7. Proyek Jalan Tol Kedua Samarinda-

		IKN 8. Proyek Pembangunan Jalan Bypass Balikpapan-IKN 9. Proyek Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Air Minum Regional 10. Proyek Pembangunan Pelabuhan Industri Baru 11. Proyek Penguatan Jaringan Listrik Regional (Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi antara Kayan dan IKN) 12. Rencana Induk Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik untuk Penyediaan Tenaga Listrik Energi Terbarukan 100% di Ibu Kota Baru 13. Proyek Peningkatan Kapasitas Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Ibu Kota Baru 14. Proyek Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Pengembangan IKN Selanjutnya

Sumber : Hasil Kajian JIKA Tahun 2024

2.6.9. Isu Sosial

Isu strategis dalam pembangunan Kota Samarinda yang terkait sosial adalah terkait Pembangunan Kota Samarinda berbasis *gender*, Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan masalah social masyarakat, dan Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing.

. **Pembangunan Kota Samarinda berbasis gender**

Dalam melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam hal mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan serta tindak lanjutnya dari laporan panel tingkat tinggi (*High-Level Panel of Eminent Person/HLPEP*) perihal pergeseran transformatif pada pelaksanaan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan, maka Kota Samarinda dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan faktor kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan sebuah kesamaan kondisi yang didapatkan baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional. Kesetaraan gender dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Selain kesetaraan gender, terdapat juga keadilan gender yang merupakan sebuah proses menuju perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender ini akan membawa pada sebuah kondisi dimana tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan.

b. Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan masalah sosial masyarakat

Permasalahan perkotaan pada umumnya adalah urbanisasi yang tidak terkontrol oleh pemerintah kota sehingga menimbulkan berbagai efek negatif.Begitu juga dengan Kota Samarinda, sebagai ibukota provinsi yang memiliki daya tarik berupa kelengkapan infrastruktur dasar, pergerakan ekonomi berbagai sektor terutama jasa (perdagangan, akomodasi, dan sebagainya), hingga peluang penciptaan lapangan usaha mikro yang luas, menjadikan Kota Samarinda bagaikan “gula” bagi para “semut” yang berada di daerah sekitar Kalimantan Timur, bahkan dari luar Pulau Kalimantan.

Peningkatan penduduk yang signifikan karena adanya migrasi jika ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya akan menjadi potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Samarinda. Namun jika sebaliknya, akan menimbulkan permasalahan sosial seperti kriminalitas, munculnya wilayah kumuh, kemacetan, timbunan sampah, hingga penggunaan fasilitas publik tidak pada tempatnya, yang saat ini masih menjadi gambaran umum Kota Samarinda.

c. Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing

Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang menjadi sebuah potensi dasar bagi pelaksanaan pembangunan manusia terutama dalam pergerakan roda perekonomian. Oleh karena itu, penting halnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan dan pembenahan sarana prasarana dasar kehidupan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan.

Daya saing sumber daya manusia akan menjadi salah satu penentu utama pembangunan Kota Samarinda dengan tujuan membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Permasalahan dan isu strategis merupakan pijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang saling berkaitan. Untuk mengetahui hubungan permasalahan dan isu strategis perlu adanya kajian berdasarkan *Sustainable* Development *Aspects* yang terdiri atas tiga aspek yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.155

Hubungan antara Permasalahan dan Isu Strategis Kota Samarinda menurut Sustainable Development Aspects

Sustainable Development Aspects	**Permasalahan**	**Isu Strategis**	
Lingkungan	Pembangunan belum berbasis lingkungan	1	Pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang berkelanjutan
		2	Penanggulangan Banjir di Kota Samarinda
Ekonomi	Perekonomian yang belum kuat dan mapan	1	Infrastruktur dan Konektivitas
		2	Transparansi tata kelola pemerintahan (*Good Governance dan Clean Government*)
		3	Penguatan peran transportasi publik untuk menunjang fungsi Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi
		4	Persiapan Kota Samarinda Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Sustainable Development Aspects	Permasalahan	Isu Strategis	
		5	Perwujudan Kota Samarinda menjadi *Smart City*
Sosial	Belum terciptanya Kualitas Hidup dan Kesetaraan Sosial	1	Pembangunan Kota Samarinda berbasis gender
		2	Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan masalah sosial masyarakat
		3	Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing

Sumber: hasil analisis, 2025

d. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen penting dalam penyusunan RPJMD. Hasil kajian dan rekomendasi dari KLHS menjadi input bagi penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan proses yang telah dilakukan, disepakati bahwa Kota Samarinda memiliki sembilan TPB yang menjadi isu strategis, yakni:

1. TPB 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. TPB 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
3. TPB 3 : Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
4. TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. TPB 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
6. TPB 8 : Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
7. TPB 10: Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
8. TPB 11: Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
9. TPB 13 : Penanggulangan Perubahan Iklim

Gambar II.80
Keterkaitan antar TPB yang menjadi isu strategis di Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Kemudian ke sembilan isu tersebut dirumuskan menjadi 5 isu pembangunan berkelanjutan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemerataan terhadap kesehatan, kesejahteraan dan Pendidikan Kota Samarinda (SDGs 1-4)
2. Peningkatan dan pemerataan terhadap akses air bersih, sanitasi dan RTH (TPB 6 & TPB 11)
3. Optimalisasi sektor unggulan yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan ekonomi (TPB 8 + ekonomi hijau)
4. Peningkatan upaya penanganan, penanggulangan dan pecegahan terhadap kerawanan bencana Kota Samarinda (TPB15)
5. Samarinda sebagai Mitra IKN

e. Penentuan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, maka isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Samarinda Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu strategis utama yang akan menentukan keberhasilan berbagai aspek pembangunan daerah. Sebab saat ini isu ketimpangan kesehatan dan pendidikan masih terjadi di Kota Samarinda. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan perlu terus menerus dilakukan untuk menjamin tercapaianya tujuan pembangunan. Perbaikan sarana dan prasarana, dukungan tenaga kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, intervensi program pendidikan dan kesehatan sesuai dengan karakteristik kewilayahan, serta kemudahaan akses kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah Kota Samarinda merupakan modal dasar penting yang harus terus menerus menjadi perhatian. Dengan demikian, sumber daya manusia Kota Samarnda memiliki daya saing yang tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, Indonesia memerlukan transformasi ekonomi. Demikian halnya dengan Kota Samarinda, diperlukan upaya transformasi ekonomi untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Transformasi ekonomi diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tetap berkelanjutan dan cita-cita untuk mencapai pendapatan perkapita tinggi bisa terwujud. Transformasi ekonomi merupakan proses menyeluruh dan terus menerus untuk menggerakan sumber daya manusia dan sektor-sektor lain yang memiliki produktivitas rendah ke arah yang lebih tinggi. Upaya meningkatan produktivitas ini dilakukan secara bertahap dan menyeleruh. Dalan proses transformasi ekonomi ini berbagai kebijakan perlu ditempuh untuk memperkuat struktur perekonomian dan mempercepat peningkatan produktivitas. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi dari berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah menjadi berbasis industri bernilai tambah tinggi dengan didukung oleh teknologi serta inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama (1) Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM (2) Pengembangan dan pembangunan kawasan industri kecil dan menengah (3) penerapan teknologi informasi, (4) investasi

yang besar dalam riset dan inovasi serta didukung oleh pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi memerlukan kolaborasi berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya.

3. Penurunan kemiskinan dan pengangguran

Penurunan kemiskinan dan pengangguran adalah dua isu strategis yang sangat penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda. Kedua isu ini saling terkait dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, ketahanan sosial, serta daya saing ekonomi daerah. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat.

4. Penguatan ketahanan pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda. Ketahanan pangan yang baik memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup dan berkelanjutan terhadap pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau. Namun, tantangan terkait ketahanan pangan di Samarinda sangat kompleks, melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan pangan lokal, sistem distribusi, keberagaman sumber pangan, serta dampak perubahan iklim**.**

5. Iklim investasi yang kondusif

Iklim investasi yang kondusif adalah salah satu faktor kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di suatu daerah, termasuk Kota Samarinda. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi investor sangat penting agar sektor-sektor ekonomi dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, Kota Samarinda perlu fokus pada beberapa isu strategis yang dapat memengaruhi iklim investasi, seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur, kemudahan berbisnis, dan tata kelola yang baik.

6. Lingkungan hidup yang berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan faktor penting bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Kota Samarinda. Namun, berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi oleh kota ini, seperti polusi udara, sampah, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim, menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara komprehensif. Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas, perlu adanya upaya untuk memperbaiki kualitas udara, mengelola sampah, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan memperbaiki kualitas ekosistem.

7. Kota tangguh perubahan iklim

Perubahan iklim adalah tantangan global yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai daerah, termasuk Kota Samarinda. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda menghadapi isu-isu strategis terkait perubahan iklim yang memerlukan perhatian serius untuk menciptakan kota yang tangguh, baik dari segi infrastruktur, ketahanan sosial, maupun ekonomi. Kota yang tangguh terhadap perubahan iklim memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim, seperti banjir, kebakaran lahan, serta ketahanan pangan dan air.

8. Konektivitas dan aksesibilitas antar dan inter wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan merujuk pada upaya membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan. Hal ini mencakup (i) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah, (ii) Peningkatan dan pemertaan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak), dan (iii) Peningkatan prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.

9. Pencegahan kawasan kumuh

Kawasan kumuh sering kali menjadi masalah yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, seperti kualitas lingkungan, pemukiman yang

tidak teratur, masalah sanitasi, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, menghadapi tantangan besar terkait dengan masalah kawasan kumuh yang mempengaruhi kualitas hidup warganya, perkembangan ekonomi, dan daya tarik kota.

Pertumbuhan penduduk di Samarinda yang pesat, seiring dengan urbanisasi yang terus meningkat, menyebabkan permintaan akan perumahan dan lahan berkembang pesat. Hal ini menyebabkan terbentuknya kawasan kumuh, terutama di sekitar pusat kota dan daerah yang kurang terlayani oleh infrastruktur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda, pada tahun 2022, jumlah penduduk kota ini mencapai 900.000 orang lebih, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan migrasi penduduk dari luar kota dan daerah sekitar. Hal ini meningkatkan tekanan pada kebutuhan lahan dan fasilitas dasar seperti sanitasi dan perumahan.

Banyak kawasan kumuh di Samarinda terbentuk karena pemukiman yang tidak terencana dengan baik, terutama di daerah yang dekat dengan sungai atau daerah yang tidak diperuntukkan sebagai kawasan perumahan. Kondisi ini memengaruhi kualitas hidup, seperti kesulitan akses air bersih, sanitasi yang buruk, dan infrastruktur yang terbatas.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kawasan kumuh adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, jalan yang layak, dan sanitasi. Kawasan-kawasan kumuh sering kali tidak dilayani oleh sistem pembuangan limbah yang baik dan minimnya penyediaan fasilitas publik lainnya. Kawasan kumuh sering kali dihadapkan pada masalah sanitasi yang buruk, yang mengarah pada peningkatan risiko penyakit menular seperti diare, demam tifoid, dan penyakit saluran pernapasan. Ketiadaan sistem sanitasi yang memadai memperburuk kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh.

Meskipun Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki beberapa program untuk menangani kawasan kumuh, implementasi dan pencapaian pembaruan infrastruktur masih terbatas, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan.

Mengatasi kawasan kumuh memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Program pembersihan dan penataan kawasan

kumuh sering kali kurang berhasil jika tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

10. Peningkatan reformasi birokrasi secara menyeluruh

Dalam upaya mencapai tujuan Kota Samarinda ke depan tentu perlu didukung oleh sistem tata kelola dan kelembagaan yang mapan, dan profesional. Di sisi lain, salah satu langkah yang dicanangkan untuk menuju pada kesejahteraan rakyat adalah terbangunnya kerja sama atau kemitraan yang semakin luas dan intens baik di internal maupun eksternal pemerintah. Hal tersebut juga berhubungan dengan konsepsi tata kelola pemerintahan masa depan yang menitikberatkan pada stabilitas dan kelincahan dengan sinergisitas multipihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Secara kontekstual untuk mendukung pencapaian tujuan Kota Samarinda sebagai pusat peradaban yang maju, maka sistem tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah Kota Samarinda diarahkan menuju pada pendekatan yang lebih relevan dengan tujuan pembangunan dengan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur namun juga perlu mengoptimalkan jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah. Optimalisasi jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi yang bersifat horizontal dan dengan instansi vertikal (multilevel governance) dapat diinisiasi dengan joint outcome sehingga tidak lagi berfokus pada pencapaian tujuan berbasis urusan.

Selain itu, dalam isu peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor, terutama untuk mempermudah proses bisnis antar pemerintah dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Saat ini, digitalisasi adalah keniscayaan dan Kota Samarinda harus bersiap untuk bertransformasi menuju digital. Penerapan digitalisasi dapat menjadi pintu masuk cara lahirnya birokrasi yang lincah dan cepat dengan basis ideal bahwa seluruh informasi dan data terintegrasi, serta infrastruktur digital tersebar di seluruh wilayah Kota Samarinda.

Evaluasi terhadap pengelolaan layanan *e-government* di Kota Samarinda mengidentifikasi bahwa data antarinstansi saat ini masih belum terintegrasi, terlebih faktor penunjang seperti keamanan sistem dan rendahnya keterampilan digital SDM ASN belum optimal. Dengan demikian,

diperlukan upaya peningkatan baik pada kompetensi SDM ASN maupun sistem *e-government* pemerintahan di Kota Samarinda melalui akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi kebijakan berbasis data yang didukung oleh pusat data terintegrasi.

11. Pemanfaatan teknologi dan inovasi

Pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai isu strategis bagi Kota Samarinda memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki peluang untuk memanfaatkan berbagai teknologi dan inovasi untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, mempercepat pembangunan kota, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan ekonomi akan mendorong perkembangan yang lebih inklusif dan efisien. Pemerintah Kota Samarinda perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk mewujudkan visi kota “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”.

Samarinda
KOTA PUSAT PERADABAN

BAB III

magnificent
SAMARINDA

Bab III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Pembangunan jangka menengah periode tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045. RPJMD tahun 2025-2029 sebagai tahap awal RPJPD, disusun dalam rangka mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 yakni “SAMARINDA PUSAT PERADABAN BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, Bapak Dr. H. Andi Harun dan Bapak H. Saefuddin Zuhri, SE.,MM, telah ditetapkan Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, yaitu:

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

Visi "**Samarinda Maju untuk Kaltim Maju**" mencerminkan harapan dan arah pembangunan Kota Samarinda dalam konteks pembangunan provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Visi ini memiliki makna yang mendalam, baik untuk Kota Samarinda maupun untuk kontribusinya terhadap provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Samarinda Maju mempunyai makna sebagai berikut:

1. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**: Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing dalam

pasar global, memiliki daya saing tinggi, dan mampu mengelola peluang dalam dunia kerja yang semakin kompetitif.

2. **Kemajuan Ekonomi**: Kota Samarinda diharapkan menjadi pusat perekonomian yang berkembang pesat, menciptakan peluang usaha, investasi, dan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian yang berkelanjutan di bidang sektor-sektor unggulan seperti, perdagangan, jasa, industri, pariwisata, perikanan dan pertanian menjadi fokus utama.
3. **Kesejahteraan Sosial**: Kota Samarinda harus mampu meningkatkan kualitas hidup warganya, termasuk dalam hal kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lingkungan yang nyaman.
4. **Peningkatan Infrastruktur**: Mengarah pada pembangunan infrastruktur yang modern dan berkualitas, seperti jalan, transportasi, fasilitas umum, dan teknologi informasi yang mendukung kemudahan akses dan konektivitas bagi masyarakat.

Kaltim Maju mempunyai makna sebagai berikut:

1. **Pusat Pemerintahan dan Layanan Publik**: Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif untuk mendukung pembangunan di seluruh Kalimantan Timur.
2. **Kontribusi terhadap Provinsi Kalimantan Timur**: Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan dan kemajuan Kalimantan Timur. Visi ini menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai oleh Kota Samarinda juga akan berkontribusi pada kemajuan provinsi secara keseluruhan. Kemajuan Samarinda akan berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
3. **Pembangunan Berkelanjutan**: Maju di sini bukan hanya berarti ekonomi yang berkembang, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam, keseimbangan sosial, dan kualitas hidup yang baik bagi seluruh masyarakat.

"**MAJU**" dalam konteks visi "**Samarinda Maju, Kaltim Maju**" yang terdiri dari singkatan **M-A-J-U** memiliki arti yang mendalam, yaitu sebagai acuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh Kota Samarinda. Berikut adalah penjelasan dari arti singkatan **M-A-J-U** tersebut:

Mandiri berarti Kota Samarinda diharapkan menjadi kota yang mampu berdiri sendiri secara ekonomi, sosial, dan administrasi tanpa bergantung pada pihak luar dalam hal dasar-dasar kebutuhan pembangunan. Kota Samarinda harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta menciptakan kemandirian dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Adil mengandung makna bahwa pembangunan di Kota Samarinda harus berjalan dengan prinsip keadilan, tidak ada kesenjangan antar wilayah, sektor, dan kelompok masyarakat. Semua lapisan masyarakat, baik yang berada di daerah perkotaan maupun pedesaan, harus merasakan manfaat dari pembangunan yang ada. Pembangunan yang adil berarti pemberian akses yang setara terhadap kesempatan dan sumber daya, serta pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Ber-Jaya mencerminkan harapan agar Kota Samarinda menjadi kota yang berjaya, unggul, dan memiliki daya saing tinggi. Kota yang berjaya berarti kota yang memiliki prestasi dan keberhasilan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Samarinda diharapkan mampu menjadi kota yang berperan penting di tingkat regional maupun nasional, dengan reputasi yang baik dalam pengelolaan dan pencapaian pembangunan.

Unggul menunjukkan bahwa Kota Samarinda diharapkan menjadi kota yang unggul dalam berbagai aspek, baik dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, kualitas pendidikan, kesehatan maupun pembangunan ekonomi. Kota yang unggul berarti memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya, memiliki daya tarik bagi investor, wisatawan, dan penduduknya untuk berinvestasi dan berkembang. Kota Samarinda juga diharapkan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif, serta sistem pemerintahan yang efisien dan modern.

Dengan demikian, **Mandiri, Adil, Ber-Jaya, Unggul** mencerminkan cita-cita untuk menjadikan Kota Samarinda sebagai kota yang mandiri dalam mengelola pembangunan dan keuangan daerah, adil dalam membagi hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat, berjaya dengan prestasi di berbagai sektor, dan unggul dalam segala aspek untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda ditempuh melalui beberapa misi. Misi RPJMD selain menjawab cita-cita masa depan dan isu strategis daerah, juga mempertimbangkan posisi kota sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan daerah yang berdampingan dengan IKN. Dengan menjaga sinergi pembangunan antara kota, provinsi, dan IKN, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda periode tahun 2025-2029, yaitu:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing.**
2. **Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.**
3. **Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.**
4. **Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis.**
5. **Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.**

Penjelasan masing-masing misi pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing**

   Memiliki makna yang sangat penting dalam pembangunan Kota Samarinda, terutama dalam konteks peningkatan kualitas hidup masyarakat. **Unggul** berarti Kota Samarinda berkomitmen untuk menciptakan SDM yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. SDM yang unggul memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Masyarakat Kota Samarinda diharapkan dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan yang relevan, serta layanan kesehatan yang optimal, yang dapat mendorong mereka untuk menjadi individu yang produktif, kreatif, dan inovatif. **Keunggulan** ini juga mencakup kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan perkembangan global, sehingga SDM Kota Samarinda bisa berperan aktif dalam membangun ekonomi daerah yang maju

   Berbudaya menunjukkan bahwa pembangunan SDM tidak hanya terfokus pada aspek keterampilan dan pengetahuan teknis saja, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai budaya yang positif. Hal ini

mencakup pemahaman dan pelestarian budaya lokal, seperti adat istiadat, tradisi, dan bahasa daerah, serta menciptakan masyarakat yang menghargai keberagaman budaya. Misi ini mengajak masyarakat untuk membangun karakter yang berbudi pekerti luhur, menjaga moralitas, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, serta solidaritas sosial. Masyarakat yang berbudaya akan menciptakan harmoni sosial yang kuat dan menjadi landasan bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Berdaya saing berarti menciptakan SDM yang mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, dan bahkan global. Kota Samarinda harus memastikan bahwa warganya memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. SDM yang berdaya saing mampu berkontribusi pada perekonomian kota melalui inovasi, kewirausahaan, dan peningkatan produktivitas. Untuk itu, pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar menjadi kunci agar SDM Kota Samarinda siap bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, serta siap menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan teknologi.

Pemerintah Kota Samarinda bertekad untuk meningkatkan kualitas manusia yang tinggal di kota ini, bukan hanya dalam hal keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga dalam hal moralitas, budaya, dan daya saing. Masyarakat yang unggul dalam bidang pendidikan dan keterampilan, berbudaya dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta berdaya saing dalam menghadapi persaingan global akan menjadi pilar utama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan Kota Samarinda secara keseluruhan.

2. Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan

Misi ini memiliki makna yang mendalam dalam rangka membangun perekonomian Kota Samarinda agar dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kemandirian ekonomi daerah, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut :

Inklusif berarti perekonomian Kota Samarinda harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Ini mencakup penyediaan

akses yang setara terhadap peluang kerja, pendidikan, dan kewirausahaan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Pembangunan ekonomi yang inklusif bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara berbagai lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap warga dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Inklusif juga berarti adanya pemerataan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah di Kota Samarinda, baik di kawasan perkotaan maupun pinggiran.

Mandiri mengandung arti bahwa Kota Samarinda berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar (baik dalam hal sumber daya alam maupun bantuan dari luar daerah atau pusat) dalam proses pembangunan ekonomi. Kota Samarinda diharapkan mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara optimal dan efisien, serta menciptakan berbagai sektor ekonomi yang dapat mendukung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Kemandirian ekonomi ini mencakup pengembangan sektor-sektor unggulan lokal, seperti perdagangan, jasa, industri, pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya yang dapat memberi nilai tambah bagi ekonomi daerah. Selain itu, misi ini juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, agar mereka dapat menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi daerah melalui kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).

Berkelanjutan berarti bahwa perekonomian Kota Samarinda harus dibangun dengan prinsip keberlanjutan, yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup dikelola dengan bijaksana untuk kepentingan generasi yang akan datang. Ekonomi berkelanjutan juga mencakup pengelolaan sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan industri dan pembangunan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam, sehingga Kota Samarinda dapat berkembang dengan tetap menjaga kualitas hidup dan lingkungan untuk generasi mendatang.

Pemerintah Kota Samarinda bertekad untuk menciptakan perekonomian yang dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dengan perekonomian yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, diharapkan Kota Samarinda dapat menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya, sambil menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

3. **Misi 3: Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan**

Memiliki makna yang sangat penting khususnya terkait dengan pengembangan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perekonomian daerah. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai makna misi ini:

Berkualitas berarti bahwa seluruh infrastruktur yang dibangun di Kota Samarinda, baik itu infrastruktur fisik (seperti jalan, jembatan, bangunan publik, fasilitas air bersih, dan energi) maupun infrastruktur sosial (seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat layanan masyarakat), harus memiliki standar yang tinggi dalam hal konstruksi, daya tahan, kenyamanan, dan keamanan.

Infrastruktur yang berkualitas mencakup pembangunan yang memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat, serta kemampuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial dengan efisien. Pembangunan infrastruktur juga harus memenuhi standar teknis dan peraturan yang berlaku, serta dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas infrastruktur juga mencakup desain yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan faktor-faktor keberlanjutan, serta pemeliharaan yang berkelanjutan untuk memastikan infrastruktur tersebut dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Berkelanjutan berarti pembangunan infrastruktur yang dilakukan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, dengan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan. Infrastruktur yang berkelanjutan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga dapat terus berfungsi dalam jangka

panjang tanpa merusak lingkungan dan mengurangi kualitas hidup generasi yang akan datang.

Infrastruktur berkelanjutan mencakup penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem. Misalnya, pembangunan sistem transportasi umum yang efisien dan ramah lingkungan atau pengelolaan air bersih yang memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya alam. Infrastruktur yang berkelanjutan juga mencakup perencanaan dan pengelolaan yang dapat menanggulangi perubahan iklim dan bencana alam. Contohnya, pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam, seperti banjir, dengan memanfaatkan teknologi yang modern dan ramah lingkungan.

Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan juga berhubungan erat dengan **konektivitas** dan **aksesibilitas**. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat, baik dalam hal transportasi, komunikasi, maupun akses ke fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi.

Mewujudkan konektivitas yang baik antar wilayah di Kota Samarinda, serta antara Samarinda dengan daerah lain di Kalimantan Timur, akan meningkatkan efisiensi perekonomian, mempermudah mobilitas barang dan orang, serta mendukung integrasi sosial dan budaya.

Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan memiliki dampak langsung pada **peningkatan kualitas hidup masyarakat**. Dengan adanya jalan yang baik, sistem transportasi yang efisien, fasilitas kesehatan yang memadai, dan akses pendidikan yang lebih baik, masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang lebih optimal, serta memiliki kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas sehari-hari. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan sosial, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk membangun dan mengelola infrastruktur yang tidak hanya memenuhi standar kualitas teknis, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan

lingkungan dan dampaknya terhadap generasi yang akan datang. Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan akan mendukung kemajuan perekonomian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki konektivitas antar wilayah, sambil menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Dengan demikian, misi ini berfokus pada pencapaian pembangunan yang holistik, inklusif, dan ramah lingkungan.

4. **Misi 4: Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis**,

Misi ini mengandung makna penting untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Samarinda. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai makna dari misi ini:

Layak huni berarti menciptakan sebuah kota di mana warganya dapat hidup dengan nyaman, aman, dan sejahtera. Kota Samarinda diharapkan menyediakan lingkungan yang mendukung kualitas hidup yang tinggi bagi warganya, termasuk kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, akses ke fasilitas umum, serta lingkungan yang bersih dan aman. Ini juga mencakup upaya untuk memperbaiki kualitas infrastruktur, perumahan, akses air bersih, sanitasi, dan kesehatan, yang semuanya berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang dapat dihuni dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat.

Stabilitas Kamtibmas berfokus pada pentingnya menjaga **keamanan** dan **ketertiban masyarakat** sebagai dasar untuk mewujudkan kota yang layak huni. Keamanan yang baik akan menciptakan rasa aman bagi warga dalam beraktivitas sehari-hari dan mengurangi potensi gangguan yang dapat merusak kualitas hidup.

Penciptaan stabilitas Kamtibmas mencakup upaya kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani tindak kriminal, kekerasan, serta ancaman yang dapat mengganggu ketentraman warga. Ini juga berhubungan dengan upaya membangun sistem keamanan yang berbasis pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Ketahanan sosial budaya berarti membangun masyarakat yang kuat dalam aspek sosial dan budaya, sehingga dapat menjaga persatuan, kesatuan, dan keberagaman yang ada di Kota Samarinda.

Hal ini mencakup pemeliharaan dan pelestarian budaya lokal, serta menjaga hubungan yang harmonis antar kelompok masyarakat yang berbeda, seperti suku, agama, dan adat. Ketahanan sosial budaya juga penting untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai, toleran, dan inklusif. Pembangunan ketahanan sosial budaya juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang terjadi, serta memastikan bahwa identitas budaya lokal tetap terjaga di tengah modernisasi.

Ketahanan ekologis mengacu pada kemampuan Kota Samarinda untuk mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengurangan polusi, dan perlindungan terhadap ekosistem. Ketahanan ekologis juga berarti mengurangi dampak bencana alam, seperti banjir atau kebakaran lahan, dengan merencanakan pembangunan yang ramah lingkungan dan memperhatikan mitigasi bencana.

Misi ini mengandung makna bahwa untuk menjadikan Kota Samarinda layak huni, lingkungan hidupnya harus aman dan sehat. Pembangunan yang dilakukan harus berkelanjutan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada, melainkan mendukung kelestarian alam untuk generasi yang akan datang.

Pemerintah Kota Samarinda berfokus pada penciptaan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi warganya. Hal ini dicapai melalui:

1) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah kota.
2) Membangun ketahanan sosial budaya yang kuat dengan menghargai keberagaman dan memastikan hubungan sosial yang harmonis antar warga.
3) Menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi terhadap bencana alam.

5. Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang integritas dan akuntabel.

Misi ini memiliki makna upaya pemerintah Kota Samarinda dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien,

transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai makna dari misi ini:

Inovatif berarti bahwa Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk terus berinovasi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta layanan publik. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan dapat mencakup penerapan teknologi terbaru dalam administrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta pembaharuan dalam proses pengambilan keputusan. Inovasi juga melibatkan kreativitas dalam mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta pengembangan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah yang inovatif mampu merespons tantangan zaman dengan cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif, terutama di tengah perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat yang cepat berubah.

Responsif berarti pemerintah Kota Samarinda harus dapat merespon dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masyarakat. Pemerintah yang responsif adalah pemerintah yang mendengarkan masukan masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi, dan memberikan solusi yang relevan dalam waktu yang cepat. Hal ini juga mencakup kemampuan pemerintah dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi, serta mengatasi masalah-masalah yang muncul, seperti bencana alam, pandemi, atau krisis lainnya. Responsif berarti proaktif dalam memberikan pelayanan dan perhatian yang memadai terhadap masalah yang dihadapi Masyarakat

Adaptif berarti bahwa pemerintah harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan sosial, politik, ekonomi, maupun teknologi. Pemerintah yang adaptif mampu menyesuaikan kebijakan dan program-programnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang serta perubahan kondisi yang ada. Ketika ada perubahan dalam konteks global maupun lokal, pemerintah Kota Samarinda harus siap untuk mengubah pendekatannya, menyesuaikan peraturan yang ada, serta menggali potensi baru yang dapat mendukung pembangunan daerah. Adaptasi yang cepat akan memastikan bahwa pemerintahan tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan yang ada.

Integritas mengandung makna bahwa pemerintah Kota Samarinda harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan jujur, adil, dan tanpa penyimpangan dari aturan yang ada. Pemerintahan yang berintegritas berarti tidak ada praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme dalam setiap proses administrasi dan pengambilan keputusan. Integritas juga mencakup komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, bersih, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik. Masyarakat harus percaya bahwa pemerintah bertindak dengan niat baik demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Akuntabel berarti bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah harus terbuka dalam hal penggunaan anggaran, keputusan politik, serta hasil dari kebijakan yang diimplementasikan. Akuntabilitas juga mencakup adanya mekanisme pengawasan yang jelas, baik dari lembaga internal pemerintahan maupun dari masyarakat dan media. Pemerintah yang akuntabel memastikan bahwa setiap proses administrasi dan kebijakan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga menciptakan transparansi dan kepercayaan publik.

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang:

- **Inovatif**, yaitu terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan proses administrasi.
- **Responsif**, yaitu mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat.
- **Adaptif**, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
- **Berintegritas**, yaitu menjalankan pemerintahan dengan jujur dan tanpa penyimpangan.
- **Akuntabel**, yaitu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada masyarakat.

Dengan misi ini, pemerintah Kota Samarinda bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipercaya, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang ada dan memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan.

Antara misi Wali Kota dengan Asta Cita ada keterkaitan yang sangat erat yang berarti bahwa kelima misi Wali Kota sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan 8 Asta Cita.

Gambar 3.1

Keterkaitan Asta Cita dengan Misi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Misi 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
Misi 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel
Misi 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
Misi 4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis

Tabel 3.1 Keselarasan Misi RPJMD Kota Samarinda, RPJMD Provinsi Kaltim dengan RPJPD Kota Samarinda

5 MISI RPJMD KOTA SAMARINDA 2025-2029	6 MISI RPJMD KALTIM 2025-2029	8 MISI RPJPD KOTA SAMARINDA 2025-2045
MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing	MISI 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera MISI 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal	MISI 1 Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
MISI 2 Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan	MISI 2 Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah	MISI 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah MISI 4 Mewujudkan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
MISI 3 Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	MISI 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan	MISI 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan yang Sehat dan Asri MISI 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan MISI 7 Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Strategis
MISI 4 Mewujudkan Samarinda yang layak	MISI 6 Mewujudkan Pembangunan	MISI 8 Mewujudkan Kesinambungan

5 MISI RPJMD KOTA SAMARINDA 2025-2029	6 MISI RPJMD KALTIM 2025-2029	8 MISI RPJPD KOTA SAMARINDA 2025-2045
huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis	Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan	Pembangunan
MISI 5 Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel	MISI 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi	MISI 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber: Hasil analisis 2025

Keselarasan pelaksanaan misi tersebut menjadi penting mengingat upaya pencapaian pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan pencapaian rencana pembangunan jangka panjang daerah memerlukan sinergi antar level pemerintahan dan antar dokumen perencanaan. Misi ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam perumusan arah kebijakan pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan.

Arah pembangunan daerah harus selaras dengan agenda pembangunan nasional. Berikut disajikan 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

Tabel 3.2. 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan	rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	

Program Strategis Nasional (ProSN) adalah program dan proyek pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai prioritas nasional karena dinilai strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Program Strategis Nasional (ProSN)

No	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 3. Sekolah Rakyat 4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk mendukung swasembada pangan) 2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian 3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan

No	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
		Beras Pemerintah 4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (sawah/lumbung pangan/food estate)
3	Kesehatan untuk semua	1. Stunting 2. Pemeriksaan kesehatan gratis 3. Jaminan kesehatan 4. Penuntasan TBC 5. Pembang
4	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran 4. Makan Bergizi Gratis
5	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4. Industrialisasi dan Hilirisasi (investasi , lapangan pekerjaan) 5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Pencapaian visi pembangunan daerah selanjutnya diturunkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan tujuan pembangunan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan kondisi tercapainya visi selama 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran pembangunan merupakan rangkaian kinerja dari hasil pelaksanaan pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini selanjutnya menjadi sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara cascading dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan

keterkaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) misi pembangunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dapat diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Indikator kinerja yang digunakan dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah menginternalisasi indikator sasaran visi dan sebagian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045. Sedangkan untuk target kinerja juga telah memperhatikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dalam RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 tahap pertama. Khusus untuk target indikator makro pembangunan, telah disusun dengan memperhatikan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Lebih rinci mengenai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

VISI
"SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU"

MISI

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing**
2. **Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang Inklusif, Mandiri dan berkelanjutan**
3. **Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan**
4. **Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis**
5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline Tahun*		Target Tahun					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SDM MAJU											
1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**82,32**	**82,81**	**83,25**	**83,41**	**83,59**	**83,79**	**84,01**	**84,50**
1.1	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	10,93	10,94	11,40	11,53	11,66	11,79	11,92	12,05
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,27	75,51	75,63	75,85	76,07	76,29	76,51	76,73

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline Tahun*		Target Tahun					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,40	20,30	20,30	20,00	19,70	19,30	18,80	18,20
1.3	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,237	0,237**	0,237	0,236	0,234	0,232	0,231	0,231
EKONOMI MAJU											
2	**Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**8,62**	**8,66**	**6,25-8,00**	**6,51-8,16**	**6,79-8,34**	**7,09-8,54**	**7,41-8,76**	**8,00-9,00**
		PDRB per kapita	**Juta Rupiah**	**104,97**	**104,97**	**118,41**	**130,25**	**143,27**	**157,61**	**173,36**	**190,70**
		Rasio Gini	**Indeks**	**0,323**	**0,330**	**0,325-0,330**	**0,310-0,320**	**0,294-0,312**	**0,288-0,306**	**0,282-0,300**	**0,276-0,285**
2.1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	47,88	50,66	51,74	52,83	54,09	54,97	55,60	56,08

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline Tahun*		Target Tahun					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	21,16	18,79	21,19	22,62	22,65	22,99	23,30	23,56
2.3	Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,97	89,68	89,68-90,68	90,18-91,19	90,68-91,69	91,19-92,19	91,69-92,69	92,19-93,19
2.4	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	%	4,81	4,30	4,25	4,07	3,90	3,73	3,56	3,38
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,92	5,75	5,6 - 5,63	5,40 - 5,50	5,28 - 5,41	5,17 - 5,31	5,05 - 5,22	4,93-5,12
KOTA LAYAK HUNI											
3	**Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih dengan infrastruktur yang berkualitas**	**Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)**	**Indeks**	**NA**	**NA**	**73,69**	**75,00**	**78,00**	**80,00**	**82,00**	**85,00**
3.1	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	98,29	85,20	84,05	83,05	82,05	81,05	80,05	79,05
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin	Indeks	63,80	64,20	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline Tahun*		Target Tahun					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		mas									
3.2	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	59,90	63,28	69,99	70,05	70,10	70,16	70,21	71,07
3.3	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	NA	NA	76,24	78,00	80,00	82,00	84,00	85,00
PEMERINTAHAN YANG BAIK											
4	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**70,94**	**78,49**	**80,00**	**81,00**	**82,00**	**83,00**	**84,00**	**85,00**
4.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	64,10	65,33	67,50	70,50	73,50	76,00	78,50	80,10
		Indeks Pemerintahan	Indeks	NA	NA	NA	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline Tahun*		Target Tahun					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Digital									
		Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	72,32	73,00	74,50	75,52	76,54	77,56	78,58	79,60
4.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,02	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75

Sumber: hasil analisis, 2025

3.1.3. Penyelarasan Indikator Makro pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Samarinda dengan RPJMD Provinsi Kaltim dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka dalam rangka pencapaian target sasaran RPJM Nasional Tahun 2025-2029 diperlukan penyelarasan perencanaan pembangunan. Hal ini menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat daerah. Penyelarasan RPJMD terhadap RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kaltim bertujuan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat, provinsi dan daerah, mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Kaltim, menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dengan RPJMN tahun 2025-2029, dan menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan nasional.

Penyelarasan indikator makro memungkinkan adanya keselarasan dalam penetapan target, sasaran, dan program, sehingga tercipta harmoni antara kebijakan pusat, provinsi dan kebijakan daerah. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan kontradiksi dalam implementasi program pembangunan.

Keterpaduan kebijakan pusat, provinsi dan daerah diwujudkan melalui penggunaan indikator yang konsisten, terukur, dan berbasis data yang dapat diverifikasi. Indikator makro berperan sebagai alat ukur yang objektif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah tetap berada dalam kerangka kebijakan provinsi dan nasional. Dengan demikian, hasil pembangunan di daerah dapat berkontribusi secara langsung terhadap capaian pembangunan nasional.

Indikator makro juga menjadi sarana untuk menilai dan memastikan sejauh mana daerah berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Melalui indikator yang selaras, kontribusi nyata daerah dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pengendalian perubahan iklim dapat dikalkulasikan dan dinarasikan secara jelas dalam dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan. Penyelarasan Target Makro

RPJMD Kota Samarinda terhadap Target Makro Provinsi Kalimantan Timur dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Penyelarasan Target Makro RPJMD Kota Samarinda terhadap Target Makro Provinsi Kalimantan Timur dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Indikator Makro	Target RPJM Nasional		Target RPJMD Prov. Kaltim		Target RPJMD Kota Samarinda	
	2025	2029	2025	2029	2025	2029
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,8 (rata-rata)	8,6	6,40	8,60	6,25-8	7,41-8,76
PDRB Per-Kapita (juta Rupiah)	237,1	326,9	237,10	237,10 326,90	118,41	173,36
Tingkat Kemiskinan (%)	4,24-5,05	2,37-3,37	4,24–5,05	2,37–3,37	4,25	3,56
Rasio Gini	0,310-0,321	0,309-0,313	0,310–0,321	0,309–0,313	0,325-0,330	0,282-0,300
Indeks Modal Manusia (Indeks Pembangunan Manusia)	0,59	0,62	0,59	0,62	83,25	84,01
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	40,82	67,46	40,82	67,46	31,90	53,57
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	80,20	80,87	80,20	81,46	69,99	70,21
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,60-5,14	4,14-4,77	4,60–5,14	4,60–5,14 4,14–4,77	5,60 - 5,63	5,05 - 5,22

Ket : Indikator Kinerja Makro ditentukan berdasarkan Lampiran IV Perpres Nomor 12 Tahun 2025

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan juga telah diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's), yang mengarah pada upaya pengentasan persoalan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan dalam kerangka kebijakan Pembangunan Hijau. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan SDGs dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6 Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Developments Goals* (SDGs)

Sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's
Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	
Sasaran 1 : Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	(T-4) Pendidikan Berkualitas
Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	(T-3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Sasaran 3 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	(T-5) Kesetaraan Gender
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif	
Sasaran 4 : Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	(T-8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
	(T-9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Sasaran 5 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	(T-8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
	(T-9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Sasaran 6 : Meningkatnya Kemandirian pangan	(T-1) Tanpa Kemiskinan
	(T-2) Tanpa Kelaparan

Sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's
	(T-12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Sasaran 7 : Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	(T-1) Tanpa Kemiskinan
	(T-2) Tanpa Kelaparan
	(T-10) Berkurangnya Kesenjangan
	(T-8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan 3 : Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas	
Sasaran 8 : Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	(T-7) Energi Bersih dan Terjangkau
	(T-11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	(T-13) Penanganan Perubahan Iklim
Sasaran 9 : Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	(T-7) Energi Bersih dan Terjangkau
	(T-11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	(T-13) Penanganan Perubahan Iklim
	(T-15) Ekosistem Daratan Tujuan
Sasaran 10 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	(T-6) Air Bersih dan Sanitasi Layak
	(T-7) Energi Bersih dan Terjangkau
	T-9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Tujuan 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Sasaran 11 : daerah Meningkatnya akuntabilitas dan	(T-16) Perdamaian, Keadilan dan

Sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's
transparansi kinerja pemerintah	Kelembagaan yang Tangguh
Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	(T-17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan pemetaan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa rumusan tujuan dan sasaran RPJMD telah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memiliki semangat untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, mewujudkan pembangunan yang inklusif, serta menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3.1.4. Penyelarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Tujuan (Arah) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2029

Rumusan sasaran RPJMD sebagai upaya pencapaian tujuan dan visi pembangunan perlu diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan (arah) pembangunan jangka panjang daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2024 sebagai bagian pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I. Penyelarasan ini bertujuan untuk mengendalikan bahwa rangkaian kinerja dan rangkaian kerja yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah jangka menengah daerah tetap pada koridor upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Hal ini menjadi penting mengingat pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pondasi bagi pelaksanaan tahapan RPJPD Tahun 2025-2045 pada periode-periode berikutnya.

Tabel 3.7. Keselarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Tujuan (Arah) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045
1	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
		4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

No	Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045
		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Kesehatan untuk Semua
		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
4	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		8. Pertumbuhan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Ekonomi
		11. Stabilitas Ekonomi Makro
		12. Peningkatan Produktivitas Daerah
5	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		8. Pertumbuhan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Ekonomi
		12. Peningkatan Produktivitas Daerah
6	Meningkatnya Kemandirian pangan	5. Penerapan Ekonomi Hijau
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
7	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	1. Kesehatan untuk Semua
		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
		3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
		4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

No	Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045
		8. Pertumbuhan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Ekonomi
		11. Stabilitas Ekonomi Makro
		12. Peningkatan Produktivitas Daerah
		14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
8	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	10. Hukum Berkeadilan, Ketentraman dan Ketertiban Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial
		13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
9	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
10	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	8. Pertumbuhan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Ekonomi
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
11	Daerah Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah	6. Transformasi Digital
		9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif disertai Pelayanan Publik yang Prima
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	6. Transformasi Digital
		9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif disertai Pelayanan Publik yang Prima

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan Kota Samarinda jangka menengah merupakan penjabaran per tahun dari tema tahapan I RPJPD Kota Samarinda (tahun 2025-2029). Tahap pertama RPJPD mengusung tema **Membangun Fondasi Transformasi Pembangunan**. Adapun penahapan pembangunan RPJMD disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Penahapan Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2029

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Membangun Fondasi Transformasi Pembangunan				
Penguatan Fondasi Pembangunan Samarinda MAJU	**Akselerasi Pembangunan Samarinda Maju untuk Kaltim Maju**	**Perluasan Upaya Pembangunan Samarinda Maju untuk Kaltim Maju**	**Pemantapan Samarinda Maju untuk Kaltim Maju**	**Perwujudan Samarinda Maju untuk Kaltim Maju**

Sumber: Hasil analisa, 2025

Penahapan pembangunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025–2029 terbagi menjadi 5 (lima) tahap pembangunan, yaitu Tahap 1 (Tahun 2026) sebagai tahap Penguatan Fondasi Pembangunan: merupakan fase awal dalam proses pembangunan Kota Samarinda lima tahun ke depan yang bertujuan menyiapkan prasyarat dasar agar pembangunan dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan inklusif. Tahap ini sangat krusial karena membentuk landasan bagi keberhasilan tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Tahap 2 (Tahun 2027) sebagai Akselerasi Pembangunan Samarinda : Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Samarinda memiliki posisi strategis dalam mempercepat pembangunan wilayah. Akselerasi pembangunan di Samarinda menjadi penting untuk: Meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur, meningkatkan daya saing kota,menjawab tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk serta mendukung integrasi ekonomi kawasan Kalimantan Timur. Tahap 3 (Tahun 2028) sebagai tahap Perluasan Upaya

Pembangunan Samarinda : menekankan langkah-langkah strategis untuk memperluas jangkauan, sektor, dan dampak pembangunan secara lebih menyeluruh dan inklusif: Tahap 4 (Tahun 2029) sebagai tahap Pemantapan Samarinda ; tahap lanjutan setelah penguatan fondasi dan perluasan pembangunan dan Tahap 5 (Tahun 2030) sebagai tahap Perwujudan Samarinda Maju untuk Kaltim Maju : menegaskan posisi **Kota Samarinda sebagai motor utama penggerak kemajuan Provinsi Kalimantan Timur.**

Secara rinci penahapan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. **Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 1 (Tahun 2026)**

Penahapan pembangunan daerah Tahap 1 adalah Tahap Penguatan Fondasi dengan tujuan : Menyediakan prasyarat struktural dan fungsional pembangunan; Meningkatkan kapasitas institusi dan SDM; Membangun sistem dan infrastruktur dasar yang menunjang transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Komponen Utama Penguatan Fondasi Pembangunan yang pertama yaitu : Pembangunan Infrastruktur Dasar yang berupa fisik seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan sanitasi. Untuk yang digital berupa jaringan internet, data center, sistem keamanan digital. Kedua Peningkatan Kualitas SDM yang meliputi: Reformasi pendidikan dan vokasi; Literasi digital dan pelatihan kerja, dan Peningkatan kesehatan masyarakat. Ketiga adalah Penguatan Tata Kelola dan Regulasi yang meliputi : Reformasi birokrasi, Regulasi pro-investasi dan ramah digital, Transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan. Keempat adalah Stabilisasi Ekonomi dan Sosial yang berupa : Pengendalian inflasi dan peningkatan daya beli,Perlindungan sosial dasar, Pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan yang kelima yaitu : Pembangunan Ekosistem Digital meliputi Akses digital merata, Literasi dan inklusi digital, Kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

2. **Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 2 (Tahun 2027)**

Penahapan pembangunan daerah Tahap 2 adalah Akselerasi Pembangunan Samarinda dengan strategi yaitu : 1) Penguatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang meliputi Pembangunan dan rehabilitasi jalan kota,

jembatan, dan drainase; Penguatan infrastruktur digital (akses internet, CCTV smart city, layanan digital publik). serta Penataan kawasan kumuh dan permukiman terpadu. 2) Transformasi Ekonomi dan UMKM yang meliputi: Digitalisasi UMKM, inkubasi wirausaha muda; Pengembangan ekonomi kreatif (kuliner, fesyen, kerajinan) dan Penguatan sektor jasa dan perdagangan. 3) Reformasi Pelayanan Publik yang meliputi : Peningkatan kualitas pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP); Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan Inovasi pelayanan seperti "Samarinda Smart City". 4) Penataan Tata Ruang dan Transportasi yang meliputi ; Pembangunan transportasi ramah lingkungan (angkutan massal, integrasi moda); Revitalisasi bantaran Sungai Mahakam dan Optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH). 5) Peningkatan Kualitas SDM terdiri dari Pendidikan vokasi berbasis industri; Beasiswa lokal dan kerja sama pendidikan tinggi ; Literasi digital dan pelatihan kerja untuk anak muda dan ibu rumah tangga. 6) Pengendalian Banjir dan Lingkungan terdiri dari Normalisasi sungai dan kanal air; Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan; Implementasi bank sampah digital dan pengelolaan limbah rumah tangga.

3. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 3 (Tahun 2028)

Penahapan pembangunan daerah Tahap 3 adalah Perluasan Pembangunan Samarinda dengan Arah Strategis meliputi : 1) Perluasan Wilayah dan Pemerataan Infrastruktur yang berupa Pembangunan jalan lingkungan dan infrastruktur dasar ke wilayah pinggiran dan daerah rawan banjir, Pengembangan kawasan baru seperti Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir sebagai pusat pertumbuhan alternatif, Pemerataan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan air bersih di seluruh kecamatan. 2) Peningkatan Inklusivitas Sosial dan Ekonomi yaitu Program pemberdayaan masyarakat berbasis kelurahan melalui dana stimulan partisipatif, Perluasan jangkauan bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, Akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan untuk perempuan, disabilitas, dan pemuda. 3) Diversifikasi Sumber Pertumbuhan Ekonomi berupa Pengembangan sektor ekonomi kreatif, pariwisata lokal (wisata sungai, religi, dan budaya), Perluasan digitalisasi UMKM dan pasar tradisional, Mendorong pertumbuhan

industri hijau dan ekonomi sirkular. 4) Perluasan Layanan Digital dan Tata Kelola Cerdas berupa Digitalisasi seluruh layanan publik tingkat kelurahan dan kecamatan, Implementasi e-Government secara menyeluruh dan integrasi data antar-OPD, Pengembangan sistem pengaduan publik terpadu dan dashboard keterbukaan data. 5) Penguatan Ketahanan Kota yang berupa Program penanganan banjir berbasis kawasan (infiltrasi air hujan, ruang terbuka hijau), Penguatan sistem mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, Penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon dan ramah iklim. 6) Kemitraan dan Inovasi Daerah yaitu Perluasan kolaborasi dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas lokal, Penerapan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan kearifan lokal, Kerja sama dengan IKN untuk integrasi pembangunan kawasan aglomerasi Samarinda-Balikpapan-IKN.

4. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 4 (Tahun 2029)

Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 4 adalah Pemantapan Pembangunan yang mempunyai tujuan yaitu : Menjamin **konsistensi program pembangunan** yang sudah berjalan; Meningkatkan **efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan;** Menguatkan **kapasitas kelembagaan dan SDM** di seluruh lini pelayanan; Mendorong **pembangunan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.**

Arah Strategis Pemantapan Pembangunan Samarinda meliputi: 1) Pemantapan Kualitas Layanan Publik terdiri dari : Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik, Pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan dalam sistem pemerintahan, Evaluasi dan penyempurnaan sistem pengaduan dan partisipasi warga; 2) Pemantapan Infrastruktur dan Tata Ruang meliputi ; Finalisasi pembangunan infrastruktur strategis (transportasi, sanitasi, perumahan) ; Penataan ulang ruang kota berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkini; Peningkatan konektivitas antar wilayah kota dan integrasi transportasi publik; 3) Penguatan Ekosistem Ekonomi Lokal terdiri dari ; Konsolidasi dan ekspansi klaster UMKM unggulan; Pemantapan digitalisasi sektor perdagangan dan jasa; Penguatan branding ekonomi lokal Samarinda (tenun, wisata sungai, kuliner khas); 4) Pemantapan Ketahanan Sosial dan Lingkungan yaitu Penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi banjir; Pemantapan program kebersihan dan pengelolaan sampah terpadu; Penanaman karakter warga kota yang sadar lingkungan dan tangguh

bencana; 5) Pemantapan Sinergi dan Kemitraan meliputi Penyelarasan pembangunan kota dengan IKN dan kabupaten/kota sekitar; Penguatan kerja sama dengan sektor swasta, komunitas, dan perguruan tinggi; Konsistensi pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.

5. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 5 (Tahun 2030)

Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 5 adalah Pemantapan Pembangunan yang mempunyai tujuan Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda memegang peran kunci dalam: Menyediakan pelayanan publik berkualitas, Mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, Menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan, Menjadi simpul konektivitas antar wilayah di Kaltim.

Tujuan Perwujudan Samarinda Maju adalah Meningkatkan daya saing kota agar mampu mendorong kemajuan provinsi, Memperkuat peran Samarinda sebagai simpul logistik, pemerintahan, dan ekonomi, Menciptakan kota yang modern, tangguh, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun Pilar Strategis Samarinda Maju meliputi : 1) Samarinda Terhubung dan Terkoneksi ; Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi publik yang terintegrasi; Konektivitas antar-kecamatan dan antar-kota/kabupaten (dengan Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara serta IKN); Digitalisasi layanan dan integrasi sistem informasi publik, 2) Samarinda Cerdas dan Responsif yaitu dengan Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau Pemerintahan Digital; Optimalisasi “Smart City Samarinda” dalam tata kelola, pendidikan, dan layanan kesehatan; Pengembangan pusat data dan dashboard kota berbasis data real-time, 3) Samarinda Hijau dan Berkelanjutan meliputi Penanganan banjir secara sistemik dan terpadu; Penguatan ruang terbuka hijau dan inisiatif kota rendah karbon; Pengelolaan sampah dan limbah secara partisipatif dan digital, 4) Samarinda Sejahtera dan Inklusif dengan Perluasan jangkauan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan; Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM dan ekonomi kreatif; Akses terhadap hunian layak, 5) Samarinda Berdaya Saing dengan Penguatan ekosistem wirausaha dan digitalisasi pasar, Pengembangan SDM unggul melalui pendidikan vokasi

dan pelatihan kerja, Menarik investasi lokal dan nasional dengan iklim usaha yang sehat dan transparan.

3.2.2. Arah Kebijakan

Melengkapi strategi yang telah diuraikan diatas, maka disusun arah kebijakan yang lebih rinci dalam memberi panduan pelaksanaan pembangunan. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan akan menjadi panduan bagi penentuan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Tabel 3.9
Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda
Tahun 2025-2029

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Lokasi
1	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing**	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan	Seluruh kecamatan
		Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis	Seluruh kecamatan
		Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan	Rumah Sakit I.A. Moeis dan Puskesmas
		Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas, didukung teknologi informasi dan komunikasi	Rumah Sakit I.A. Moeis dan Puskesmas
		Percepatan wajib belajar 13 tahun	Seluruh kecamatan
		Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan dan antardaerah didukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Palaran
		Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi	Seluruh kecamatan
		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Seluruh SD dan SMP yang menjadi kewenangan Kota
		Pemantapan koordinasi pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dan kebutuhan pasar kerja.	Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Lokasi
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi, didukung inovasi dan TIK	Seluruh SMP di wilayah Kota Samarinda
		Pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Seluruh kecamatan
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Seluruh kecamatan
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.	Seluruh kecamatan
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Seluruh kecamatan
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Seluruh kecamatan
2	**Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang Inklusif, Mandiri dan berkelanjutan**	Pemantapan perekonomian daerah yang berbasis perdagangan dan jasa serta energi baru terbarukan, rendah karbon, dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan superhub ekonomi IKN	Seluruh kecamatan
		Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan	Seluruh kecamatan
		Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan	Seluruh kecamatan
		Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi	Seluruh kecamatan
		Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan yang berkelas dunia	Lokasi sesuai RIPPDA
		Mengembangkan program promosi dan insentif untuk menarik investor serta mempermudah proses perizinan	Seluruh kecamatan
		Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global	Seluruh kecamatan
		Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berbasis partisipasi stakeholder dan implementasi teknologi tepat guna	Seluruh kecamatan
		Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman	Seluruh kecamatan

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Lokasi
		Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	Seluruh kecamatan
		Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan	Seluruh kecamatan
		Industrialisasi koperasi	Seluruh kecamatan
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	Seluruh kecamatan
		Peningkatan produktivitas BUMD	Sesuai lokasi BUMD dan wilayah cakupan pelayanannya
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Pengungkit Pembangunan Ekonomi di Daerah	Seluruh kecamatan
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan mendorong pembiayaan inovatif	Seluruh kecamatan
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal	Seluruh kecamatan
		Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan	Seluruh kecamatan
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	Seluruh kecamatan
		Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat	Seluruh kecamatan
		Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Seluruh kecamatan
		Penguatan ketahanan pangan khususnya pemanfaatan pangan melalui perbaikan pola konsumsi, penganekaragaman konsumsi, perbaikan gizi, serta keamanan dan mutu pangan	Seluruh kecamatan
3	**Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan**	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Seluruh kecamatan
		Peningkatan kualitas penataan ruang, dengan mengupayakan ruang terbuka hijau dan pencegahan banjir	Seluruh kecamatan
		Peningkatan pelaksanaan reforma agraria	Seluruh kecamatan
		Pengembangan pelabuhan sungai	Kecamatan yang dialiri sungai
		Pembangunan dan pengembangan bandara	Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat (Samarinda Utara)

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Lokasi
		Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Seluruh kecamatan
		Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi	Seluruh kecamatan
		Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif	Seluruh kecamatan
		Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Seluruh kecamatan
		Pemerataan terhadap akses hunian layak	Seluruh kecamatan
		Penanganan kawasan permukiman kumuh	Seluruh kecamatan terutama kecamatan yang memiliki kawasan kumuh
		Peningkatan layanan telekomunikasi dan pengembangan ekosistem digital	Seluruh kecamatan
		Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Seluruh kecamatan
		Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi	Seluruh kecamatan
4	**Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis**	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Seluruh kecamatan
		Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan	Seluruh kecamatan
		Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas	Seluruh kecamatan
		Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Seluruh kecamatan
		Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Seluruh kecamatan
		Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	Seluruh kecamatan
		Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter	Seluruh kecamatan
		Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya	Seluruh kecamatan
		Penguatan Penegakan Hukum dan Keamanan	Seluruh kecamatan
		Penguatan regulasi untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan untuk memastikan mekanisme penegakan hukum yang jelas	Seluruh kecamatan

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Lokasi
		Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana	Seluruh kecamatan terutama pada kawasan rawan bencana
		Peningkatan ketangguhan wilayah rawan kebakaran terhadap bahaya kebakaran	Kecamatan yang memiliki hutan
		Peningkatan ketangguhan terhadap bencana	Seluruh kecamatan terutama pada kawasan rawan bencana
5	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel**	Optimasi regulasi daerah, termasuk proses pra-regulasi yang memadai	Kantor Pemda sampai ke Kecamatan dan Kelurahan
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Seluruh kecamatan
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Seluruh kecamatan
		Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Kantor Pemkot sampai ke Kecamatan dan Kelurahan
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kantor Pemkot sampai ke Kecamatan dan Kelurahan
		Pembinaan dan audit pengawasan secara kontinyu	Seluruh kecamatan
		Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja	Kantor Pemkot sampai ke Kecamatan dan Kelurahan
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemkot	Kantor Pemkot sampai ke Kecamatan dan Kelurahan
		Perkuatan pengendalian dan pengawasan pembangunan termasuk melalui penerapan manajemen risiko	Kantor Pemkot sampai ke Kecamatan dan Kelurahan
		Pengembangan sistem pemerintahan elektronik dan tata kelola data pembangunan yang terpadu	Kantor Pemkot sampai ke Kecamatan dan Kelurahan
		Pengembangan infrastruktur digital	Seluruh kecamatan

Sumber: hasil analisis, 2025

3.2.3.Strategi

Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, salah satunya ditandai dengan penahapan pembangunan yang berkesinambungan.

Berikut indikasi Strategi dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029:

Tabel 3.10. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
SDM Maju		
Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berbudaya	Sasaran 1: Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	1. Peningkatan Akses Pendidikan yang Merata 2. Peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan 3. Penguatan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Karakter 4. Peningkatan Minat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan 5. Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Keterampilan
	Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 2. Penguatan Layanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi 3. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 5. Peningkatan Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kesetaraan Gender	1. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	dalam Pembangunan	Pelaksanaan Pembangunan 2. Peningkatan Akses Perempuan terhadap Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi 3. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 4. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 5. Penguatan Data Terpilah dan Sistem Informasi Gender
Ekonomi Maju		
Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	Sasaran 4 : Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	1. Identifikasi dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah 2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Unggulan 3. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Sektor Unggulan 4. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Kemitraan Usaha 5. Promosi dan Perluasan Pasar Produk Unggulan Daerah 6. Penguatan Kelembagaan dan Kelembagaan Ekonomi Lokal
	Sasaran 5 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah 3.Pengelolaan Aset Daerah yang Efisien dan Produktif 4. Efisiensi Belanja Daerah dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 5. Pengembangan Inovasi Pembiayaan Pembangunan Daerah
	Sasaran 6 : Meningkat kemandirian pangan	1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Lokal 2. Penguatan Cadangan dan Distribusi Pangan Daerah 3. Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal 4. Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Produksi 5. Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga dan Komunitas 6. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Sistem Pangan
	Sasaran 7 : Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	1. Peningkatan Akses terhadap Lapangan Kerja yang Layak 2.Penguatan UMKM dan Ekonomi Lokal 3. Perluasan Program Perlindungan Sosial Adaptif 4. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Konektivitas Wilayah 5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Berbasis Desa 6. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Inovatif 7. Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk Penyerapan Tenaga Kerja
Kota Layak Huni		
Tujuan 3 : Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih dengan infrastruktur yang berkualitas	Sasaran 8 : Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	1. Penguatan Sistem Keamanan dan Ketertiban Kota 2. Peningkatan Ketangguhan terhadap Bencana 3. Penerapan program 100-0-100 (100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, 100% akses sanitasi layak) 4. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Kumuh

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		5. Penguatan Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan 6. Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Berkelanjutan 7. Peningkatan Akses Layanan Dasar Kota 8. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota
	Sasaran 9 : Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	1. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi 2. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai salah satu proyek *Waste to Energy* (WTE) 3. Peningkatan Akses Sanitasi dan Air Bersih 4. Pengendalian Pencemaran Lingkungan 5. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat 7. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Lingkungan 8. Adaptasi Perkotaan terhadap Perubahan Iklim
	Sasaran 10 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	1. Peningkatan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur Dasar 2. Penguatan Infrastruktur Permukiman dan Perkotaan 3. Modernisasi Infrastruktur Layanan Publik 4. Peningkatan Infrastruktur Lingkungan 5. Penguatan Tata Kelola Infrastruktur Berkelanjutan 6. Pengembangan Infrastruktur Berbasis Mitigasi dan Adaptasi Iklim 7. Kemitraan Strategis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		dalam Pembiayaan Infrastruktur
Pemerintahan yang Baik		
Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	1. Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja Terintegrasi 2. Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja dan Keuangan 3. Transparansi Informasi Publik 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 5. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal 6. Penerapan Prinsip Anti-Korupsi dan Integritas
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Standar dan Kepastian Pelayanan 2. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik 3. Peningkatan Kompetensi dan Etika Pelayanan ASN 4. Penguatan Sistem Pengaduan dan Penilaian Publik 5. Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas Pelayanan 6. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

Sumber : hasil analisis, 2025

3.2.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Berikut program prioritas dalam pembangunan jangka menengah Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Berikut indikasi Strategi dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029:

Tabel 3.11 Prioritas Pembangunan Daerah

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat yang meningkat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
			Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Terwujudnya kesetaraan dalam pembangunan manusia	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
			Program Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
			Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		
Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Terwujudnya peran sektor unggulan daerah dalam pembangunan ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
			Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
			Program Pengembangan ekspor	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri	Indeks Kemandirian Fiskal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
Meningkatnya kemandirian pangan	Kemampuan daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan Kota Samarinda
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan Kota Samarinda
Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
			Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas		**Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)**		

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
			Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
			Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Persetujuan lingkungan dan izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Tersedianya infrastruktur yang andal, merata, dan berkesinambungan untuk mendukung	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
	pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		**Indeks Reformasi Birokrasi**		
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang akuntabel dan transparan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
		Indeks Pemerintahan Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
		Indeks Integritas Pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan responsif.	Indeks Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Palaran
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Samarinda Seberang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Samarinda Ulu

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Samarinda Ilir
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Samarinda Utara
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sungai Kunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sambutan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Samarinda Kota
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sungai Pinang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Loa Janan Ilir
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Palaran
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Seberang
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Ulu

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Ilir
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Utara
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Sungai Kunjang
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Sambutan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Samarinda Kota
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Sungai Pinang
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Loa Janan Ilir
			Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
			Program Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Tabel 3.12
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**													
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	98,68	99,30	%	99,70	99,79	99,88	99,97	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
				Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	98,54	98,76	%	97,52	97,88	98,24	98,60	98,96	99,32	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Sekolah Menengah Pertama (APS)										
				Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)	55,34	57,30	%	60,48	63,66	66,84	70,03	73,06	76,10	
				Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	39,35	44,04	%	52,25	58,74	65,23	71,72	72,48	73,25	
		Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	60,00	63,16	%	66,49	66,82	67,15	67,48	67,81	68,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi Sl/D-IV	88,96	90,49	%	90,94	91,39	91,84	92,29	92,75	93,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
				Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	37,49	35,15	%	35,50	35,85	36,20	36,56	36,92	37,28	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74,44	84,86	Nilai	85,00	85,25	85,50	85,75	86,00	86,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Nasional Perpustakaan											
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu	109,47	80,68	Per 100.000 KH	122,51	109,04	97,84	86,06	77,97	69,14	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	87,00	86,60	%	80,00	82,00	81,9	84	86	88	
				Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	86	90	%	81,00	81	82	83	84	84	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100	100	%	100,00	100,00	100	100	100	100	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	43,5	100	%	2,55	30,00	40,00	50,00	60,00	65,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100	96	%	85,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar	60	80	%	81,00	85,00	88,00	90,00	92,00	93,00	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	85	95,3	%	25,00	30,00	45,00	60,00	75,00	85,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	2,01	1,95	Rata-rata Anak per Wanita	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	62,21	70,15	%	70,65	71,15	71,65	72,15	72,65	73,15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
				Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	17,32	8,77	%	7,10	6,10	5,30	5,50	5,10	5,00	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera(KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	-	-	%	60	65	70	75	80	85	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran responsif Gender (ARG)	8	9	%	10,5	11,5	12	12,5	13	14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
				Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	50,42	49,69	%	49,71	50,05	50,25	50,50	50,75	51,00	
		Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	14,05	68,69	%	84,21	91,11	98,81	98,73	98,65	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	3	5	Layanan	5	5	6	7	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
		Program Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60,38	62,00	Indeks	63,00	64	65,00	65,50	66,00	66,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
		Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan	46,81	69,57	%	88,24	89,47	92,26	95,18	97,56	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Layanan Komprehensif										Anak Kota Samarinda
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	78,42	79,79	Indeks	81,16	82,53	83,9	85,27	86,64	88,00	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	-	100	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pemuda	Rasio Wirausaha Pemuda	0,09	0,31	%	0,31	0,35	0,45	0,50	0,55	0,60	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**													
Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	10,15	10,23	%	20,45	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4,20	4,35	%	4,41	4,46	4,72	4,93	5,11	5,11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
														Kota Samarinda
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	0,16	0,16	%	2,64	2,90	3,17	3,43	3,70	3,70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah produksi pertanian	24053,63	24154,55	Ton	21469,78	21955,41	22491,41	22982,19	23500,11	24031,36	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
				Jumlah populasi ternak	4617706	1267934	Ekor	1331331	1397898	1467793	1541183	1618557	1699485	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	154,45	106,33	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	5	7	%	10	15	20	25	30	35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	30,83	49,88	%	70,13	49,04	55,46	63,25	72,13	79,37	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien , merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	21,43	28,57	%	26,67	40,00	46,67	53,33	60,00	66,67	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	82,35	88,24	%	88,24	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		Program Pengembangan ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	36.982.810,65	191.296.395,79	US$	110.694.000,00	130173376,00	153.080.636,00	179.220.636,00	205360636,00	231500636,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Peningkatan pengamanan perdagangan menuju daerah tertib ukur	Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	63,52	84,95 %	%	87,95	90,95	93,17	95,39	97,61	100	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	14,71	20,00	%	25,00	25,00	33,33	44,44	50	54,55	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	NA	NA	%	5	6	7	8	9	10	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	71,06	70,21	%	80,05	79,63	79,99	80,35	80,84	80,65	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
			Meningkatnya kualitas Pengawasan Dan pelaporan	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	14,6	2,76	%	30,61	7,44	2,64	4,29	4,23	4,23	
			Meningkatnya Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	64,63	56,93	%	49,23	3,05	9,15	12,2	16,77	16,77	
Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kadaulatan dan kemandirian pangan	Cadangan Pangan Masyarakat	23,45	24,25	Ton	24,37	24,49	24,62	24,74	24,86	24,98	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	PPh Ketersediaan	97,59	98,53	Skor	95	95,5	96	96,5	97	97,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
				PPH Konsumsi	84,8	87,3	Skor	85,60	88,31	89,83	91,04	91,27	91,75	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Pangan Masyarakat												
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	77,97	83,05	%	84,75	86,44	88,14	89,83	91,53	93,22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah produksi pertanian	24053,63	24154,55	Ton	21469,78	21955,41	22491,41	22982,19	23500,11	24031,36	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
				Jumlah populasi ternak	4617706	1267934	Ekor	1331331	1397898	1467793	1541183	1618557	1699485	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	20	30	%	20	20	20	20	20	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
				Persentase Produk Ternak Yang ASUH	57	60	%	65	80	85	85	90	95	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	100	100	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
				Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	14000	12000	Ha	10000	9000	8000	7000	6000	5000	
		Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	78,57	78,57	%	76,92	78,26	85,00	85,00	85,00	85,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
				Persentase kelompok tani	68,04	60,16	%	47,81	49,8	53,78	57,77	61,75	65,74	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				yang meningkat kapasitasnya										
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	15,012 Ton	15,242.0 Ton	Ton	15,475.5	15,709.05	15,946.10	16,186.72	16,430.98	16,678.92	Dinas Perikanan Kota Samarinda
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	822.7 Ton	866.88 Ton	Ton	873.4	879.97	886.59	893,26	899,97	906,74	Dinas Perikanan Kota Samarinda
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	Ton	74.06	76.17	78.35	80.59	82.89	85.26	Dinas Perikanan Kota Samarinda
Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	77	80	%	80	100	100	100	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar	100	100	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				panti (Indikator SPM)										
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	92	92	%	2	3	5	8	10	15	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktifitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	18,50	19,00	%	19,98	19,98	19,98	19,98	20,06	20,06	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	10,15	10,23	%	20,45	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi	Persentase Pencari kerja yang bersertifikat Kompetensi	32	24,21	%	4	5,6	7,2	8,8	10.4	11,2	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja melalui penempatan tenaga kerja yang efektif dan	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	6,78	5,95	%	16,17	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			perluasan akses informasi pasar kerja											
		Program Hubungan Industrial	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif melalui penyelesaian perselisihan yang cepat dan efektif	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50	51,34	%	90	91	92	93	94	95	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
				Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	N/A	N/A	%	90	91	92	93	94	95	
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	12,08	19,32	%	19,84	19,84	19,84	20,11	20,37	20,37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0,50	0,78	%	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	NA	0,15	%	0,17	0,21	0,24	0,26	0,30	0,33	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas	**Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)**													
Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Pra Bencana	0,410	0,530	Indeks	0,533	0,534	0,536	0,537	0,538	0,540	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	0,122	0,181	Indeks	0,182	0,183	0,183	0,184	0,185	0,186	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Indeks Pasca Bencana	0,048	0,089	Indeks	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	0,104	
		Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	%	100%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
		Program Pengelolaan dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	58	62	%	65	67	70	73	75	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Sistem Drainase												Ruang Kota Samarinda
		Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase perumahan dan permukiman tertata	24,27	27,26	%	27,53	27,79	28,05	28,32	28,58	28,85	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	n/a	65,50	%	66	66,50	71	75	78	80	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	n/a	65,50	%	66	66,50	71	75	78	80	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	n/a	n/a	%	55	60	65	70	75	80	
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	50	%	50	50	50	50	50	50	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran	n/a	n/a	%	17,14	27,71	57.71	73,14	85,71	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	n/a	n/a	%	80,00	82	84,00	86,00	88,00	90,00	
				Penurunan luas area yang terbakar	45716	25702	M2	23654	19673	15691	11709	7727	3745	
				Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan	n/a	42	%	60	65	70	75	80	85	
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Pra Bencana	0,410	0,530	Indeks	0,533	0,534	0,536	0,537	0,538	0,540	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	0,122	0,181	Indeks	0,182	0,183	0,183	0,184	0,185	0,186	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Indeks Pasca Bencana	0,048	0,089	Indeks	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	0,104	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	25,00	100,00	%	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	20,00	100,00	%	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	-	-	Indeks	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
				Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	-	-	Indeks	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50	
				Tutupan Lahan	-	-	Koefisien	≥ 0,20	≥ 0,20	≥ 0,20	≥ 0,20	≥ 0,20	≥ 0,20	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	-	-	%	5,30	5,55	5,75	5,95	6,15	6,30	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	-	-	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
		Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Jumlah Sampah terkelola	-	-	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Persetujuan lingkungan dan izin PPLH	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	-	-	%	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya layanan sampah regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	55	60	%	65	70	75	80	85	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	58	62	%	65	67	70	73	75	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78	80	%	85	87	90	95	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	86,93	82,22	%	83,22	84,22	85,22	86,22	87,22	88,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
														Ruang Kota Samarinda
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	40,13	42,55	%	33,09	35,00	38	40	43	45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82,68	82,96	%	83,64	83,92	84,20	84,47	84,75	84,75	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	70	75	%	80	85	90	95	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	47,62	71,57	%	82,35	92,16	93,14	92,16	98,04	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
				Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	90,26	91,69	%	93,12	94,56	95,99	97,42	98,85	98,85	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	13	26,09	%	39	47.83	52,17	56,52	69,57	69,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
														Ruang Kota Samarinda
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	0,34	40,45	%	45,44	50,44	55,44	60,44	65,44	70,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	40	20	%	20	60	60	80	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	9,54	9,54	%	7,64	5,73	3,82	1,91	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-	-	%	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
		Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase perumahan dan permukiman tertata	24,27	27,26	%	27,53	27,79	28,05	28,32	28,58	28,85	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	n/a	65,50	%	66	66,50	71	75	78	80	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	n/a	65,50	%	66	66,50	71	75	78	80	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	n/a	n/a	%	55	60	65	70	75	80	
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	50	%	50	50	50	50	50	50	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	0,89	0,34	Nilai	0,58	0,31	0,46	0,62	0,77	1,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
				Persentase Kendaraan Layak Uji		52 %	%	53,00	55,00	56,00	58,00	59,00	61,00	
				Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	N/A	N/A	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	
		Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Trasnportasi Sungai	Konektivitas Sungai	1,00	0,57	Rasio	0,57	0,71	0,71	0,86	0,86	1,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi													

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi	N/A	42,58	Indeks	42,58	42,58	46,1	46,1	46,1	50	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	85	88	%	90	95	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	85%	88%	%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	
			Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonomian dan SDA	85%	88%	%	90%	92%	93%	94%	95%	96%	
			Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	85%	88%	%	90%	92%	93%	94%	95%	96%	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembanganko mpetensi dasar , kader , manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	100,00	1177 orang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100,00	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	20,05	18,26	%	20,14	21,25	22,35	23,27	24,18	25,63	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	50,16	45,73	%	60,50	61,23	62,32	63,55	64,75	65,83	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	91,54	95,65	%	96,10	96,80	97,00	97,20	97,50	97,75	
				Persentase Penurunan SILPA	41,35	51,33	%	50,56	34,66	30,75	26,42	17,94	10,19	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Program Pengelolaan	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	-2,56	11,15	%	14,15	17,15	20,15	23,15	26,15	29,15	Badan Pengelolaan Keuangan dan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Barang Milik Daerah												Aset Daerah Kota Samarinda
	Indeks Pemerintahan Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	-	52,50	%	93,90	95,15	96,14	97,61	98,80	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
				Jumlah titik layanan (endpoint)			Node	235	255	275	295	315	335	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	-	-	%	75,00	81,00	87,00	93,00	99,00	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
				Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	-	-	%	80	82	87	90	92	97	
		Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	0,00	0,00	%	32,50	34,38	36,25	38,13	40,00	41,88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	Indeks Integritas Pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	NA	NA	%	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	84,72	84,62	%	84,00	85,20	86,40	87,60	88,80	90,00	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	NA	NA	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	82,00	83,00	%	90,25	90,75	91,25	92,25	92,75	93,00	Kecamatan Palaran
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0	%	91,05	93,00	93,15	93,30	93,45	93,60	Kecamatan Samarinda Seberang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	90,00	91,00	%	92,00	92,75	93,00	93,25	93,50	93,75	Kecamatan Samarinda Ulu
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,30	92,50	%	92,75	93,00	93,15	93,25	93,35	93,45	Kecamatan Samarinda Ilir

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	100	100	%	86,00	87,00	88,00	88,25	88,50	88,75	Kecamatan Samarinda Utara
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0,00	%	92,75	93,00	93,15	93,25	93,35	93,45	Kecamatan Sungai Kunjang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	84,25	84,25	%	84,5	84,5	84,75	85	85,25	85,25	Kecamatan Sambutan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90,55	92,30	%	92,50	92,75	93,00	93,25	93,50	93,75	Kecamatan Samarinda Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	80,55	81	%	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	Kecamatan Sungai Pinang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	-	-	%	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25	Kecamatan Loa Janan Ilir

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	83,00	84,00	%	85,00	86,50	87,75	88,50	89,75	91,00	Kecamatan Palaran
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	82	83	%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	Kecamatan Samarinda Seberang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Samarinda Ulu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,00	80,00	%	85,00	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	Kecamatan Samarinda Ilir

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	98,92	100	%	94,25 %	94,25 %	94,50 %	94,75	95,00	95,25	Kecamatan Samarinda Utara
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70,25	70,50	%	90.00	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	Kecamatan Sungai Kunjang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65	70	%	72	85	88	90	90,75	90,75	Kecamatan Sambutan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,25	75,50	%	75,75	85,00	87,00	89,00	90,00	91,00	Kecamatan Samarinda Kota

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	60,00	70,00	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	Kecamatan Sungai Pinang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100,00	100,00	%	85,00	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
		Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	N/A	16,6	%	33,3	66	66,60	83,30	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
				Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	N/A	95,42	%	96	97	98,00	99,00	100,00	100,00	
				Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	N/A	16	%	33,30	63	66,60	83,00	100,00	100,00	
				Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	N/A	16,6	%	33,30	63	66,60	83,00	100,00	100,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	N/A	N/A	%	7	10	15,00	20,00	25,00	30,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	65	70	%	75	80	85,00	90,00	95,00	95,00	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	N/A	N/A	%	58,00	60	62,00	64,00	66,00	68,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	60	65	%	70	75	80	85	90	95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	NA	NA	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	NA	NA	%	75,00	82,00	85,00	87,00	89,00	91,00	
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	NA	NA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Riset dan Inovasi	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	N/A	N/A	%	79,00	85,29	88,24	91,18	94,12	97,06	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

3.2.2. Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Program unggulan yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Samarinda harus selaras dengan visi dan misi Wali Kota, agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan kota secara keseluruhan. Visi dan misi Wali Kota biasanya berfokus pada tujuan jangka menengah yang mencakup aspek kesejahteraan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Program unggulan ini harus mendukung pencapaian visi tersebut, serta berorientasi pada solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kota.

Dengan adanya program unggulan, diharapkan dapat tercipta perubahan positif yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan kota, termasuk kesejahteraan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Program-program ini juga akan memperkuat pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, program unggulan akan membawa Kota Samarinda menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, ramah lingkungan, dan inklusif.

Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan Trisula Pembangunan Daerah yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maupun Trisula Kota Samarinda yaitu :

1. Pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
2. Penataan ruang publik, sarana prasarana kota bagi kepentingan masyarakat
3. Pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

Terdapat 6 (enam) Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu:

1. **Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT**

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (*PROBEBAYA*) merupakan salah satu inisiatif unggulan Pemerintah Kota Samarinda yang bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayahnya secara langsung. Dengan basis pelaksanaan di tingkat Rukun Tetangga (RT), PROBEBAYA menjadi instrumen strategis

dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata warga.

Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA menjadi krusial, karena:

1) Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Secara Langsung

Dengan memberi kewenangan kepada masyarakat di tingkat RT untuk mengusulkan dan mengelola program, PROBEBAYA menciptakan rasa kepemilikan terhadap pembangunan serta meningkatkan kapasitas warga dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

2) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah

Melalui alokasi anggaran yang tersebar secara merata ke seluruh RT, program ini membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta mempercepat perbaikan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan kualitas lingkungan hidup di skala mikro.

3) Menguatkan Sinergi Pemerintah dan Warga dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Daerah

PROBEBAYA bukan hanya sebuah program bantuan, tetapi merupakan pendekatan pembangunan kolaboratif. Dengan mengintegrasikan prioritas warga ke dalam sistem perencanaan daerah, program ini memperkuat keterhubungan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata masyarakat.

4) Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional dan SDGs di Level Lokal

Program ini menjadi wujud konkret kontribusi lokal dalam mendukung agenda pembangunan global seperti pengurangan kemiskinan, kesetaraan, pendidikan berkualitas, dan lingkungan berkelanjutan — yang semuanya termuat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2. Melanjutkan Pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf Internasional.

Pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf Internasional merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang setara dengan standar global. Sekolah ini tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses terhadap pendidikan bermutu, tetapi juga untuk mencetak generasi muda yang kompetitif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di era globalisasi.

3. **Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial melalui Perlindungan Sosial.**

Penanggulangan masalah sosial merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Melalui program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjamin hak dasar warga, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

4. **Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT).**

Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat RT. BUMRT berfungsi sebagai wadah pengelolaan potensi ekonomi lokal secara kolektif, partisipatif, dan profesional, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat ketahanan ekonomi wilayah.

5. **Melanjutkan Pembangunan Penataan Tepian Sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan.**

Tepian sungai merupakan ruang strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, sekaligus ekonomi. Penataan kawasan ini secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kota yang tertata, ramah lingkungan, serta nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pembangunan kota berbasis wilayah, penataan tepian sungai dan ruang publik dilakukan dengan pendekatan kewilayahan yang mempertimbangkan karakteristik lokal dan potensi unik setiap kawasan.

6. **Melanjutkan dan meningkatkan program pengendalian banjir.**

Banjir merupakan salah satu persoalan utama di wilayah perkotaan yang berdampak langsung pada keselamatan warga, kerugian ekonomi, gangguan pelayanan publik, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengendalian banjir bukan sekadar penanganan teknis jangka pendek, tetapi membutuhkan pendekatan berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis kewilayahan.

Tabel 3.13 Implementasi Program Unggulan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

No	Program Unggulan	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah
1	Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
2	Melanjutkan Pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf Internasional	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial melalui Perlindungan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
4	Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasioan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
5	Melanjutkan Pembangunan Penataan Tepian Sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan

No	Program Unggulan	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah
			Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
6	Melanjutkan dan meningkatkan program pengendalian banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Kawasan	Dinas Perumahan

No	Program Unggulan	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah
		Permukiman	dan Kawasan Permukiman
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan

Sumber : Hasil analisis, 2025

Sedangkan untuk tematik pembangunan sosial seperti Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial dimana fokus pada penurunan angka kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan.Termasuk juga program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan jaring pengaman sosial didukung oleh beberapa program di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Peningkatan PSU

Tematik Penanganan Stunting yang merupakan turunan dari Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana menyangkut gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan dasar sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM sejak dini. Program-program yang menunjang penanganan stunting meliputi :

1. Program Pemenuhan UKP dan UKM
2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengawasan keamanan Pangan
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Untuk tematik pembangunan ekonomi Pengendalian Inflasi (Ketahanan Pangan) dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, melaksanakan Koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan melaksanakan intervensi pasar (operasi pasar, subsidi transportasi, dan lain-lain). Hal ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Program Penyuluhan Pertanian
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Penguatan Perekonomian adalah tematik pembangunan ekonomi yang mencakup kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, kemandirian ekonomi lokal, serta ketahanan ekonomi masyarakat dan daerah secara menyeluruh. Program-program yang akan dilaksanakan dalam upaya penguatan perekonomian meliputi :

1. Program Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
9. program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
10. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
11. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tematik selanjutnya adalah Peningkatan Reformasi Birokrasi merupakan arus utama (mainstreaming) untuk mendorong: Efektivitas dan efisiensi pemerintahan, Pelayanan publik yang berkualitas dan Good governance dan clean government dilaksanakan melalui program-program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi)
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pembangunan Daerah
5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Penyelenggaraan Pengawasan
7. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
8. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
9. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sedangkan untuk tematik kesetaraan gender yang merupakan indikator utama SDGs: Tujuan 5 yaitu Mencapai Kesetaraan Gender, dilaksanakan melalui program-program yaitu :

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Pemenuhan Hak Anak
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Unggulan Provinsi Kalimantan Timur yakni Gratispol dan Jospol yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan di Kota Samarinda dilaksanakan kegiatan-kegiatan unggulan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Indikasi Kegiatan Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030

No.	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program
Program Unggulan Gratispol		
1	Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB hingga S3	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Kesejahteraan Rakyat
2	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting	Program Pemenuhan Upaya

No.	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program
		Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Gratis Seragam Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
5	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6	Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah	Program Kesejahteraan Rakyat
Program Unggulan Jospol		
Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern		
	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Pembangunan Workshop Produksi Pupuk Organik Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao dan Karet Karet : Kubar, Kukar, Paser, Samarinda, PPU, Balikpapan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Peningkatan pengendalian OPT dan pengembangan APH	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Pendirian Laboratorium DNA pemuliaan Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Pendirian Laboratorium Keamanan Pangan (mendukung generasi emas)	Program Pengawasan Keamanan Pangan
Jospol 2 Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik		
	Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan Cold Storage sebagai sarana Sistem Rantai Dingin	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan Cold Storage sebagai sarana Sistem Rantai Dingin, dan hilirisasi produk perikanan	Program Pengolahan Perikanan

No.	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program
Jospol 3 Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, Serta Penjaga Rumah Ibadah		
	Pemberian Insentif Dosen, Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah	Program Kesejahteraan Rakyat Program Pendidik dan Tenaga Pendidik
Jospol 4 Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif Dan Digital Untuk Mendukung UMKM		
	Bantuan Permodalan, Peralatan dan Pembinaan UMKM Secara Terpadu	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Kemitraan Pelaku Industri dengan UMKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Jospol 6 Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan		
	Pembangunan SMA/SMK Unggulan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Jospol 7 Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi, dan Pelabuhan Internasional		
	Penyiapan Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Bontang	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pembangunan Waterfront and Riverside Road (Selili - Jembatan Mahkota II)	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pembangunan SPAM Regional Mahakam	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Kegiatan peningkatan/rehabilitasi ruas jalan Provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan
Jospol 8 Revitalisasi Sungai Mahakam untuk Transportasi Publik, Angkutan Industri dan Pariwisata		
	Revitalisasi Dermaga Sungai Mahakam	Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu
Jospol 9 Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta		
	Pembuatan Peta Peluang Investasi,	Program Pengembangan Iklim

No.	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program
	Penyusunan IPRO dan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi	Penanaman Modal
	Forum Investasi Daerah	Program Promosi Penanaman Modal

Ket : Kegiatan unggulan bersifat indikatif, dapat berubah menyesuaikan dengan permasalahan, isu strategis dan perkembangan pembahasan dalam proses penyusunan RPJMD 2025-2029

Sumber: hasil analisis, 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional 2025–2029, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah. Adapun penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama dan program unggulan daerah dituangkan sebagai berikut:

Tabel 3.15. Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program Unggulan RPJMD Tahun 2025-2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program	Perangkat Daerah
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema *Spend to Invest*	Prioritas Nasional 2		
3	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	Prioritas Nasional 2		
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	Prioritas Nasional 2		
5	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	Prioritas Nasional 2		
6	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Prioritas Nasional 2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program	Perangkat Daerah
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
8	Pengembangan Pangan Hewani	Prioritas Nasional 2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
9	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Prioritas Nasional 2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Prioritas Nasional 2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
10	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Prioritas Nasional 2		
11	Peningkatan Penyediaan Energi	Prioritas Nasional 2		
12	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan	Prioritas Nasional 2		

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program	Perangkat Daerah
	Energi			
13	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	Prioritas Nasional 2		
14	Konservasi Sumber Daya Air	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	Prioritas Nasional 2		
18	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Prioritas Nasional 2	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
19	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Prioritas Nasional 2	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
20	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Prioritas Nasional 2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program	Perangkat Daerah
21	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	Prioritas Nasional 2		
22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Prioritas Nasional 2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
23	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	Prioritas Nasional 2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
24	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Prioritas Nasional 2	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
25	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
26	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Prioritas Nasional 2		
27	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3		
28	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem	Prioritas Nasional 3		

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program	Perangkat Daerah
	Digital			
29	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta-Prambanan	Prioritas Nasional 3		
30	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	Prioritas Nasional 3		
31	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	Prioritas Nasional 3		
32	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	Prioritas Nasional 3		
33	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan GIM	Prioritas Nasional 3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Prioritas Nasional 3	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
35	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4		
36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program	Perangkat Daerah
37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Prioritas Nasional 4		
38	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Prioritas Nasional 4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
41	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
43	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program	Perangkat Daerah
			Kesehatan Masyarakat	
44	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
45	Penuntasan TBC	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
46	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
47	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
48	Eliminasi Penyakit Kusta & *Schistosomiasis*	Prioritas Nasional 4		
49	Investasi pelayanan kesehatan primer	Prioritas Nasional 4		
50	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program	Perangkat Daerah
	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses		Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Prioritas Nasional 4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Prioritas Nasional 4		
53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Prioritas Nasional 4		
54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Prioritas Nasional 4 Prioritas Nasional 4		
55	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Prioritas Nasional 5		
56	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	Prioritas Nasional 5		
57	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	Prioritas Nasional 5		
58	Pengembangan Hilirisasi Timah	Prioritas Nasional 5		
59	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Prioritas Nasional 5		

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program	Perangkat Daerah
60	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Prioritas Nasional 5		
61	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Prioritas Nasional 5		
62	Pengembangan Industri Kimia	Prioritas Nasional 5		
63	Pengembangan Industri Kimia	Prioritas Nasional 5		
64	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Prioritas Nasional 5		
65	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	Prioritas Nasional 5		
66	Pengembangan Industri Dirgantara	Prioritas Nasional 5		
67	Pengembangan KEK Sei Mangkei	Prioritas Nasional 5		
68	Pengembangan KIT Batang	Prioritas Nasional 5		
69	Pengembangan KI Weda Bay	Prioritas Nasional 5		

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program	Perangkat Daerah
70	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
71	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Prioritas Nasional 6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
72	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Prioritas Nasional 6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
73	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	Prioritas Nasional 6		
74	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Prioritas Nasional 6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
75	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Prioritas Nasional 6	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
76	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prioritas Nasional 7	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
77	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep *Total Reward*	Prioritas Nasional 7		

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Program	Perangkat Daerah
	Berbasis Kinerja ASN			
78	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Prioritas Nasional 7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
79	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Prioritas Nasional 7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
80	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Prioritas Nasional 7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
81	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Prioritas Nasional 8	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
82	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Prioritas Nasional 8	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
83	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	Prioritas Nasional 8		

Arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Samarinda diarahkan agar Mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan.

Sinkronisasi dengan rencana tata ruang perlu dilakukan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Selain untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, hal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan di Kalimantan Timur. Highlights indikasi kebijakan pembangunan untuk Kota Samarinda disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berfokus di Kota Samarinda.

Gambar 3.2 Peta Highlights Indikasi Kebijakan di Kota Samarinda Tahun 2025–2029

(Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025)

Adapun highlights Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana RS Mata dan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II
2. Penyelenggaraan jalan provinsi di Kota Samarinda
3. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan
4. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Sei Kunjang dan Lempake
5. Pengembangan pelabuhan angkutan sungai

6. Rencana pengembangan transportasi angkutan massal terintegrasi
7. Pengendalian banjir di Kota Samarinda
8. Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi
9. Pengembangan sentra IKM berbasis teknologi
10. Pengembangan destinasi wisata & creative hub
11. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Selili
12. Penghijauan lingkungan
13. Uji emisi gas buang kendaraan
14. Pembangunan Waterfront & Riverside Road (selili-jembatan mahkota 2)
15. Pembangunan jalan akses menuju Bandara APT Pranoto
16. Pembangunan jalan ring road 1 Samarinda (Jembatan Mahulu - Jl. Jakarta)
17. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan
18. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
19. Penanganan banjir
20. Penyediaan PSU permukiman
21. Penyiapan Penyelenggaraan SPAM Regional Sistem Mahakam
22.Pembangunan sekolah unggulan (SMAN 10 Samarinda)
23. Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah
24. Penyediaan afirmasi akses pendidikan

3.3. Arah Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan dan fokus pengembangan wilayah di Kota Samarinda mempertimbangkan dan melakukan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda dan RPJPD Kota Samarinda. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan kewilayahan di Kota Samarinda pada Tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2021 – 2026. Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah terbagi atas arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah kecamatan dan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis.

A. Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah kecamatan

Tabel 3.16

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan dan Pengembangan Kewilayahan Kecamatan

No	Kecamatan	Arah Kebijakan	Fokus
1	Samarinda Kota	- Pengembangan sektor perdagangan dan jasa skala regional dan nasional - Pengembangan UMKM - Peningkatan kualitas PSU permukiman - Pengembangan ruang UMKM - Pemenuhan standar RTH perkotaan	- Penciptaan ruang pengembangan ekonomi lokal (UMKM) - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan - Peningkatan kualitas jalan arteri, kolektor, dan lokal - Perwujudan PSU dan RTH di lingkungan permukiman
2	Samarinda Ilir	- Pengembangan sektor perdagangan dan jasa skala lingkungan dan kota - Pengembangan UMKM - Peningkatan kualitas PSU permukiman - Pengembangan ruang UMKM - Pemenuhan standar RTH perkotaan	- Penciptaan ruang pengembangan ekonomi lokal (UMKM) - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan - Peningkatan kualitas jalan arteri, kolektor, dan lokal - Perwujudan PSU dan RTH di lingkungan permukiman

No	Kecamatan	Arah Kebijakan	Fokus
3	Samarinda Seberang	- Peningkatan pelayanan infrastruktur untuk mendukung kawasan cagar budaya - Pengembangan obyek wisata tepi sungai - Peningkatan kualitas layanan infrastruktur permukiman - Pemenuhan standar RTH perkotaan	- Penciptaan ruang pengembangan ekonomi lokal (UMKM) - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan - Peningkatan kualitas jalan arteri, kolektor, dan lokal - Perwujudan PSU dan RTH di lingkungan permukiman
4	Samarinda Ulu	- Pengembangan sektor perdagangan dan jasa skala regional dan nasional - Pengembangan UMKM - Peningkatan kualitas PSU permukiman - Pengembangan ruang UMKM - Pemenuhan standar RTH perkotaan	- Penciptaan ruang pengembangan ekonomi lokal (UMKM) - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan - Peningkatan kualitas jalan arteri, kolektor, dan lokal - Perwujudan PSU dan RTH di lingkungan permukiman

No	Kecamatan	Arah Kebijakan	Fokus
5	Samarinda Utara	- Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis - Konservasi DAS - Pengembangan fasilitas dan aksesibilitas transportasi udara - Pengendalian perluasan kawasan pertambangan - Pemenuhan standar RTH perkotaan	- Pengembangan jaringan jalan dan jembatan atau jalan tol yang menghubungkan Bandara APT Pranoto dengan fasilitas dan wilayah lainnya - Pembangunan fasilitas berbasis konservasi lingkungan - Peningkatan upaya pengendalian banjir - Peningkatan pelayanan air bersih - Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan eks galian tambang - Pengurangan aktivitas pertambangan
6	Sungai Pinang	- Pengembangan sektor perdagangan dan jasa skala lingkungan dan kota - Pengembangan UMKM - Peningkatan kualitas PSU permukiman - Pengembangan ruang UMKM - Pemenuhan standar RTH perkotaan	- Penciptaan ruang pengembangan ekonomi lokal (UMKM) - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan - Peningkatan kualitas jalan arteri, kolektor, dan lokal - Perwujudan PSU dan RTH di lingkungan permukiman

No	Kecamatan	Arah Kebijakan	Fokus
7	Sungai Kunjang	- Pengembangan jasa pergudangan dan perdagangan skala kota - Pengembangan dan peningkatan kualitas PSU permukiman - Pemenuhan standar RTH	- Penciptaan ruang pengembangan ekonomi lokal (UMKM) - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan - Peningkatan kualitas jalan arteri, kolektor, dan lokal - Perwujudan PSU dan RTH di lingkungan permukiman
8	Loa Janan Ilir	- Pengembangan sektor perdagangan dan jasa skala lingkungan dan kota - Pengembangan UMKM - Peningkatan kualitas PSU permukiman - Pengembangan ruang UMKM - Pemenuhan standar RTH perkotaan	- Penciptaan ruang pengembangan ekonomi lokal (UMKM) - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan - Peningkatan kualitas jalan arteri, kolektor, dan lokal - Perwujudan PSU dan RTH di lingkungan permukiman
9	Palaran	- Pengembangan sektor transportasi laut dan sungai - Pengembangan industri manufaktur dan industri multi-sektor - Pengembangan kota mandiri - Pengembangan lahan pertanian produktif - Pemenuhan standar RTH perkotaan	- Penciptaan ruang pengembangan ekonomi lokal (UMKM) - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan - Peningkatan kualitas jalan arteri, kolektor, dan lokal - Perwujudan PSU dan RTH di lingkungan permukiman

No	Kecamatan	Arah Kebijakan	Fokus
	Sambutan	- Pengembangan sektor perdagangan dan jasa skala lingkungan dan kota - Pengembangan UMKM - Peningkatan kualitas PSU permukiman - Pengembangan ruang UMKM - Pemenuhan standar RTH perkotaan	- Penciptaan ruang pengembangan ekonomi lokal (UMKM) - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan - Peningkatan kualitas jalan arteri, kolektor, dan lokal - Perwujudan PSU dan RTH di lingkungan permukiman

Sumber data : RTRW Kota Samarinda

B. Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis

Tabel 3.17

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Strategis Kota

No	Wilayah Strategis	Arah Kebijakan	Fokus
	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
1.	Kawasan Industri dan Pelabuhan di Kecamatan Palaran dan di Kecamatan Samarinda Kota	- Pengembangan kawasan untuk menampung pengadaan fasilitas terminal peti kemas - Pengembangan terminal barang umum/kargo dan terminal penumpang	- Pengembangan fasilitas pelabuhan Palaran - Perencanaan tata guna lahan pelabuhan - Pengembangan kawasan industri - Perencanaan dan pembangunan fasilitas dan infrastruktur

No	Wilayah Strategis	Arah Kebijakan	Fokus
2.	Kawasan Perdagangan Citra Niaga	- Pengembangan sektor informal - Pengembangan potensi perdagangan cindera mata - Pengembangan sektor jasa dan perdagangan UMKM	- Pengembangan jaringan jalan arteri - Pengembangan terminal Penumpang Tipe B - Pengembangan pelabuhan penyeberangan Mahakam Ilir - Pengembangan Menara Base Transceiver Station (BTS) - Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) - Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan nasional
3.	Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota di Kecamatan Sambutan	- Pengembangan pusat kegiatan sebagai pemerataan pembangunan - Pengembangan industri dan jasa serta sarana umum dan sosial skala kota	- Pengembangan jaringan jalan kolektor primer; - Dilalui Jalan bebas hambatan; - Pembangunan Jaringan jalan outer ring road dan inner ring road; - Pelabuhan Penyeberangan di Kelurahan Sungai Kapih, Pulau Atas Kecamatan Sambutan; - Pengembangan GI Sambutan kapasitas 50 MVA; - Pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi yang berkapasitas 150 KV Bukuan–Sambuta; - Pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi yang berkapasitas 150 KV PLTG

No	Wilayah Strategis	Arah Kebijakan	Fokus
			Kaltim (FTP 2)–Sambutan dan New Samarinda-Sambutan; - Pembangunan SUTT GI Sambutan di Kecamatan Sambutan – GI Bontang melalui Kecamatan Samarinda Utara sepanjang kurang lebih 18 km; - Pembangunan SUTT GI Bukuan di Kecamatan Palaran – GI. Sambutan di Kecamatan Sambutan sepanjang kurang lebih 7 km; - Pembangunan TPA Sambutan (sanitary landfill) Kelurahan Sambutan dengan luas kurang lebih 30 hektar; - Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); - Peningkatan layanan pengelolaan air limbah meliputi perencanaan dan pengelolaan air limbah kawasan padat penduduk; - Kawasan peruntukan industri sedang dan menengah (industri perkapalan kayu); - Kawasan peruntukan industri besar (kawasan Industri Perkapalan Baja); - Penyediaan ruang terbuka

No	Wilayah Strategis	Arah Kebijakan	Fokus
			peruntukan area penyediaan lahan parkir, plaza dan tempat bermain; dan - Pengembangan kawasan pendidikan tinggi.
	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya		
4.	Kawasan Pariwisata Budaya Desa Pampang di Kecamatan Samarinda Utara	- Pelestarian lingkungan dan cagar budaya - Peningkatan ekonomi lokal masyarakat adat - Pengembangan UMKM - Peningkatan promosi wisata berbasis sapta pesona	- Pengembangan dan pembangunan akses infrastruktur permukiman - Penciptaan lapangan kerja sektor pariwisata - Peningkatan mutu sumber daya manusia - Pembangunan ruang atraksi wisata virtual dan non-virtual - Penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM pariwisata
5.	Kawasan Kota Lama di Kecamatan Samarinda Seberang	- Pelestarian lingkungan dan cagar budaya - Peningkatan ekonomi lokal masyarakat adat - Pengembangan UMKM - Peningkatan promosi wisata berbasis sapta pesona	- Pengembangan dan pembangunan akses infrastruktur permukiman - Penciptaan lapangan kerja sektor pariwisata - Peningkatan mutu sumber daya manusia - Pembangunan ruang atraksi wisata virtual dan non-virtual - Penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM pariwisata
	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		

No	Wilayah Strategis	Arah Kebijakan	Fokus
6.	Kawasan Kebun Raya Samarinda	- Peningkatan konservasi kawasan hutan - Perlindungan potensi keanekaragaman hayati	- Peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah - Peningkatan nilai tambah dari sektor jasa lingkungan - Pengembangan usaha ekonomi lokal - Pengembangan obyek wisata edukasi
7.	Kawasan Tepian Sungai di Sepanjang Sungai Kota Samarinda	- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan permukiman - Pemenuhan standar fasilitas umum dan fasilitas sosial - Pemenuhan standar ruang terbuka hijau - Pengembangan ruang aktivitas ekonomi lokal	- Peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah pada setiap tahap pembangunan - Peningkatan program perbaikan kualitas hunian berbasis partisipasi masyarakat - Pengembangan ruang berbasis nilai tambah ruang tepi sungai untuk pembangunan UMKM

3.13. Skenario Pengembangan Struktur Ruang

Berdasarkan kondisi Kota Samarinda yang akan menjadi penyangga IKN (Ibu Kota Negara), maka wilayah perencanaan Kota Samarinda dibagi menjadi 3, yaitu kawasan utara, tengah dan selatan. Adapun batasan wilayah administrasi pada wilayah perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18

Skenario Pengembangan Struktur Ruang

No	Bagian Wilayah Perencanaan	Wilayah Administrasi
1	BWP 1 (Kawasan Utara)	**Kecamatan Samarinda Utara** Kel. Budaya Pampang Kel. Lempake Kel. Sempaja Barat Kel. Sempaja Selatan Kel. Sempaja Timur Kel. Sempaja Utara Kel. Sungai Siring Kel. Tanah Merah

No	Bagian Wilayah Perencanaan	Wilayah Administrasi
		Kecamatan Sungai Pinang Kel. Bandara Kel. Gunung Lingai Kel. Mugirejo Kel. Sungai Pinang Dalam Kel. Temindung Permai
2	BWP 2 (Kawasan Tengah)	**Kecamatan Samarinda Ilir** Kel. Pelita Kel. Selili Kel. Sidodamai Kel. Sidomulyo Kel. Sungai Dama
		Kecamatan Samarinda Kota Kel. Bugis Kel. Karang Mumus Kel. Pasar Pagi Kel. Pelabuhan Kel. Sungai Pinang Luar
		Kecamatan Samarinda Ulu Kel. Air Hitam Kel. Air Putih Kel. Bukit Pinang Kel. Dadi Mulya Kel. Gunung Kelua Kel. Jawa Kel. Sidodadi Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Sambutan Kel. Makroman Kel. Pulau Atas Kel. Sambutan Kel. Sindang Sari Kel. Sungai Kapih
		Kecamatan Sambutan Kel. Makroman Kel. Pulau Atas Kel. Sambutan Kel. Sindang Sari
3	BWP 3 (Kawasan Selatan)	**Kecamatan Loa Janan Ilir** Kel. Bantuas Kel. Bukuan Kel. Bukuan Kel. Rapak dalam Kel. Harapan Baru Kel. Sengkotek
		Kecamatan Palaran Kel. Handil Bakti Kel. Simpang Pasir Kel. Bantuas Kel. Bukuan Kel. Rawa Makmur
		Kecamatan Samarinda Seberang Kel. Baqa Kel. Gunung Panjang Kel. Mangkupalas Kel. Mesjid Kel. Sungai Keledang Kel. Tenun Samarinda
		Kecamatan Sungai Kunjang Kel. Karang Anyar Kel. Karang Asam Ilir Kel. Karang Asam Ulu Kel. Loa Bakung Kel. Loa Buah Kel. Lok Bahu Kel. Teluk Lerong Ulu

Skenario kewilayahan yang akan diterapkan, yaitu:

a. Kawasan Selatan akan dilakukan pembatasan laju kawasan masif terbangun dengan prediksi pertumbuhan penduduk bersifat linier

b. Kawasan Tengah dengan pengembangan pusat layanan skala regional dan nasional dengan prediksi sistem target pada beberapa kawasan.

c. Kawasan Utara dengan prediksi pertumbuhan penduduk bersifat linier dilakukan pengembangan dengan tetap mengutamakan dan menjaga fungsi lingkungan hidup.

3.14 Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan Kota Samarinda

Sistem kota-kota adalah suatu sistem yang menggambarkan sebaran kota atau kawasan perkotaan, fungsi kota-kota dan hirarki fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah. Rencana struktur ruang merupakan kegiatan menyusun rencana yang produknya menitikberatkan pada pengaturan hirarki pusat permukiman dan pusat pelayanan barang dan jasa, serta keterkaitan antara pusat tersebut melalui sistem prasarana utama.Hirarki kota dimaksudkan untuk dapat menentukan suatu sistem jenjang pelayanan yang dikaitkan dengan pusat-pusat pelayanan (kota) yang ada di Kota Samarinda.

Pembagian pola struktur ruang menggunakan pola Struktur Pusat Banyak Berjenjang (*Multiple Nuclei*) dengan pertimbangan :

a. Konsep kepusatan yang lebih dari satu dan berjenjang (hierarki) diasumsikan lebih mampu untuk mengendalikan terjadinya arus pergerakan tarikan dari pusat – pusat bangkitan secara berlebihan ke pusat kota.

b. Konsep ini relatif lebih memberdayakan dan memaksimalkan fungsi pusat-pusat yang akan dibentuk, terlebih pada pusat dengan hirarki paling bawah.

c. Pemerataan pembangunan akan dapat terdistribusikan secara merata sampai ke tingkat paling bawah.

d. Pusat pelayanan hirarki bawah akan lebih dapat memaksimalkan potensinya dan meminimalisir ketergantungan pada pusat hierarki di atasnya.

Sistem perwilayahan Kota Samarinda, terbagi berdasarkan hirarki berjenjang dari skala pelayanan regional hingga skala pelayanan lokal. Kegiatan utama pada pusat – pusat pelayanan mendukung fungsi utama Kota Samarinda. Untuk menetapkan fungsi utama perwilayahan atau

pusat pelayanan Kota Samarinda, perlu juga tinjauan fungsi Kota Samarinda terhadap lingkup regional atau skala pelayanan di atasnya.

Pusat kegiatan di wilayah kota, meliputi:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

2. Pusat Pelayanan Kota (PPK); melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

3. Sub Pusat Pelayanan Kota (sub PPK); melayani sub-wilayah kota; dan/atau Sub Pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

4. Pusat Lingkungan (PL). Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.

Kota Samarinda merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan pengembangan/peningkatan fungsi pengembangan kota sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan dan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Dalam pengembangan Kota Samarinda, harus mampu melayani kebutuhan skala regional. Kota Samarinda merupakan pintu gerbang internasional dengan lokasi pada wilayah perbatasan. Infrastruktur skala nasional meliputi jaringan transportasi laut dan udara, dengan adanya Bandar Udara APT Pranoto sebagai pengembangan bandar udara pengumpul skala sekunder.

Kegiatan PKN didukung dengan pusat distribusi barang dan jasa serta hasil pengolahan industri skala nasional. Adapun fungsi pusat kegiatan nasional (PKN) di Kota Samarinda terdapat di Kecamatan Samarinda Ulu, tepatnya di Kelurahan Jawa. PKN pada Kecamatan Samarinda Ulu memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi.

1. Pusat Kota

Pusat pelayanan kota mempunyai skala pelayanan regional dalam wilayah Kota Samarinda, yang harus mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Samarinda dan mendukung kegiatan skala regional pada hirarki di atasnya. Deliniasi untuk penentuan pusat pelayanan kota yakni berdasarkan dominasi kegiatan. Berdasarkan kondisi eksisting dan hasil analisa, perkembangan Kota Samarinda diarahkan ke bagian Utara Kota Samarinda. Dengan demikian, Kota Samarinda perlu adanya pusat pelayanan kota untuk pemerataan pelayanan dan perkembangan kota.

Pusat kota yang mempunyai skala pelayanan regional dalam wilayah Kota Samarinda, harus mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Samarinda dan mendukung kegiatan skala regional pada hirarki di atasnya. Deliniasi untuk penentuan pusat kota berdasarkan dominasi kegiatan. Untuk Kota Samarinda, pusat pelayanan kota yang mempunyai skala pelayanan regional terdapat di:

a. Pusat Pelayanan Kota 1, adalah Kelurahan Bugis di Kecamatan Samarinda Kota.

b. Pusat Pelayanan Kota 2, adalah Kelurahan Handil Bakti di Kecamatan Palaran.

Dominasi kegiatan untuk pusat pelayanan kota sebagai arahan fungsi utama, meliputi:

a) Pusat Pelayanan Kota 1 yaitu Kecamatan Samarinda Kota dengan simpul pusat kegiatan di Kelurahan Bugis diarahkan dengan fungsi kegiatan utama pemerintahan dan pelayanan umum kota;

b) Pusat Pelayanan Kota 2 yaitu Kecamatan Palaran dengan simpul kegiatan di Kelurahan Handil Bakti sebagai pusat pemerintahan skala kota dengan simpul pusat kegiatan diarahkan sebagai pusat kegiatan perkantoran dan pusat pemerintahan kota.

2. Sub Pusat Pelayanan Kota

Sub pusat pelayanan kota dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota, yang meliputi :

a. sarana perdagangan dan jasa;

b. sarana pendidikan;

c. sarana kesehatan;

d. sarana peribadatan; dan

e. sarana pelayanan umum

Untuk mendukung pusat pelayanan kota, penyebaran kegiatan yang merata, dan untuk mengurangi beban kawasan pusat kota, maka Kota Samarinda dibagi lagi menjadi 7 Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) sebagai berikut:

1. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) 1, yakni pada Kelurahan Rapak Dalam di Kecamatan Loa Janan Ilir dengan simpul pusat kegiatan diarahkan dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi:

   a) Perdagangan jasa skala kota;

   b) Perkantoran; dan

   c) Industri skala nasional.

2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) 2, yakni Kelurahan Bantuas dan Rawa Makmur di Kecamatan Palaran dengan simpul pusat kegiatan pada diarahkan dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi:

   a) Perdagangan jasa (pergudangan);

   b) Industri skala nasional; dan

   c) Transportasi regional (pelabuhan dan terminal barang/industri)

3. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) 3, yakni di Kecamatan Samarinda Seberang dengan simpul pusat kegiatan pada Kelurahan Baqa diarahkan dengan fungsi kegiatan utama perdagangan jasa skala kota;

4. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) 4, yakni Kelurahan Air Putih di Kecamatan Samarinda Ulu dengan simpul pusat kegiatan pada diarahkan dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi:

a) Pemerintahan provinsi;

b) Perdagangan jasa skala regional;

c) Pelayanan kesehatan skala regional;

d) Perkantoran; dan

e) Industri skala kota.

5. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) 5, yakni Kelurahan Makroman di Kecamatan Sambutan dengan simpul pusat kegiatan pada diarahkan dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi:

a) Pusat pemerintahan kota

b) Perdagangan jasa skala kota; dan

c) Perkantoran.

6. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) 6, yakni Kelurahan Loa Bakung di Kecamatan Sungai Kunjang dengan simpul pusat kegiatan pada diarahkan dengan fungsi kegiatan utama yang meliputi:

a) Perdagangan jasa skala kota;

b) Perkantoran; dan

c) Industri skala kota.

7. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) 7, yakni Kelurahan Gunung Lingai di Kecamatan Sungai Pinang dengan simpul pusat kegiatan diarahkan pada fungsi kegiatan utama yang meliputi:

a) Perdagangan jasa skala kota;

b) Perkantoran; dan

c) Pertanian perkebunan.

8. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) 8, yakni Kelurahan Sungai Dama di Kecamatan Samarinda Ilir dengan simpul pusat kegiatan

pada diarahkan dengan fungsi kegiatan utama perdagangan jasa skala kota.

3. Pusat Lingkungan

Berdasarkan hirarki yang berjenjang, untuk pengembangan 20 tahun mendatang dengan pemerataan jangkauan pelayanan dan menumbuhkan pusat-pusat kegiatan baru, maka Kota Samarinda memiliki 5 Pusat Lingkungan (PL). Mempunyai skala pelayanan yang lebih kecil dari kedua pusat pelayanan kota. Pusat Lingkungan (PL) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota. Ciri utama pada kawasan Pusat Lingkungan (PL), adalah skala pelayanan jenis kegiatan yang ada pada kawasan Pusat Lingkungan, diperuntukan untuk skala pelayanan kegiatan lingkup pemukiman setingkat kecamatan, kelurahan, dan RT. Pusat lingkungan dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan pada skala pusat lingkungan. Pusat lingkungan di Kota Samarinda meliputi:

1) Pusat Lingkungan (PL) 1, Kelurahan Bantuas, Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur, dan Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran.

2) Pusat Lingkungan (PL) 2, Kelurahan Bukit Pinang di Kecamatan Samarinda Ulu.

3) Pusat Lingkungan (PL) 3, Kelurahan Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Selatan, dan Kelurahan Sempaja Utara di Kecamatan Samarinda Utara.

4) Pusat Lingkungan (PL) 4, Kelurahan Loa Bakung di Kecamatan Sungai Kunjang.

5) Pusat Lingkungan (PL) 5, Kelurahan Mugirejo dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam di Kecamatan Sungai Pinang.

Samarinda
KOTA PUSAT PERADABAN

BAB IV

magnificent
SAMARINDA

Bab IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Dalam mencapai target-target pembangunan jangka menengah, dibutuhkan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rencana program perangkat daerah dalam bab ini menggambarkan kebutuhan untuk mengimplementasikan visi, misi dan program prioritas kepala daerah serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan oleh seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, dan dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dalam menyusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dibutuhkan sumber daya berupa anggaran yang memadai guna mencapai kinerja dan target yang diinginkan. Setiap program perangkat daerah akan dilengkapi dengan pagu yang bersifat indikatif. Seluruh kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program disesuaikan dengan proyeksi belanja daerah sebagaimana telah disusun dalam bab 2 dokumen ini.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.067.722.190.401,00**		**3.620.709.916.187,00**		**3.714.637.944.700,00**		**3.836.657.838.275,00**		**3.972.626.381.814,00**		**4.041.267.234.350,00**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.144.113.200.979,00**		**1.221.030.794.658,00**		**1.213.807.252.200,00**		**1.205.903.874.350,00**		**1.238.978.485.768,00**		**1.245.714.004.350,00**	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	98,68	99,30	%	99,70	495.746.787.198,00	99,79	455.416.699.055,00	99,88	470.090.699.800,00	99,97	472.821.700.000,00	100,00	483.521.700.000,00	100,00	472.821.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sekolah Dasar (APS)																
			Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS)	98,54	98,76	%	97,52		97,88		98,24		98,60		98,96		99,32		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)	55,34	57,30	%	60,48		63,66		66,84		70,03		73,06		76,10		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	39,35	44,04	%	52,25		58,74		65,23		71,72		72,48		73,25		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kesetaraan (APS)																
2	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	60,00	63,16	%	66,49	16.229.638.700,00	66,82	720.286.000,00	67,15	535.550.000,00	67,48	552.894.500,00	67,81	552.894.500,00	68,14	741.894.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi Sl/D-IV	88,96	90,49	%	90,94	66.127.527.000,00	91,39	60.644.495.000,00	91,84	60.644.495.000,00	92,29	61.463.829.850,00	92,75	61.463.829.850,00	93,21	61.463.829.850,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	37,49	35,15	%	35,50		35,85		36,20		36,56		36,92		37,28		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas	74,75	76,00	Nilai	76,76	566.009.248.081,00	77,52	704.249.314.603,00	78,29	682.536.507.400,00	79,07	671.065.450.000,00	79,86	693.440.061.418,00	80,65	710.686.580.000,00	Dinas Pendidikan dan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	tugas dan fungsi perangat daerah	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah																Kebudayaan
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,28	82,33	Indeks	82,74		83,15		83,56		83,97		84,38		84,80		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**526.712.226.019,00**		**672.110.712.799,00**		**607.281.208.900,00**		**659.684.697.500,00**		**690.855.016.500,00**		**697.595.728.900,00**	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu	109,47	80,68	Per 100.000 KH	122,51	184.788.082.696,00	109,04	307.426.796.998,00	97,84	232.426.796.900,00	86,06	274.675.750.000,00	77,97	294.775.750.000,00	69,14	289.777.109.700,00	Dinas Kesehatan
			Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	87,00	86,60	%	80,00		82,00		81,9		84		86		88		

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	86	90	%	81,00		81		82		83		84		84		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100	100	%	100,00		100,00		100		100		100		100		
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	43,5	100	%	2,55	279.721.000,00	30,00	2.461.134.083,00	40,00	2.500.000.000,00	50,00	2.500.000.000,00	60,00	2.650.000.000,00	65,00	2.650.000.000,00	Dinas Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan,	100	96	%	85,00	716.909.000,00	96,00	1.026.563.000,00	96,00	1.185.500.000,00	96,00	1.255.000.000,00	96,00	1.255.000.000,00	96,00	1.300.000.000,00	Dinas Kesehatan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Dan Makanan Minuman	kesehatan, dan makanan minuman	dan makanan minuman																
			Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar	60	80	%	81,00		85,00		88,00		90,00		92,00		93,00		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	85	95,3	%	25,00	2.578.935.000,00	30,00	2.193.863.000,00	45,00	2.250.500.000,00	60,00	2.250.500.000,00	75,00	2.350.750.000,00	85,00	2.350.750.000,00	Dinas Kesehatan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	74,25	76,25	Nilai	77,00	338.348.578.323,00	78,00	359.002.355.718,00	79,00	368.918.412.000,00	80,00	379.003.447.500,00	81,00	389.823.516.500,00	82,00	401.517.869.200,00	Dinas Kesehatan
			Indeks Kepuasan	83,43	85,85	Indeks	88,00		89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Masyarakat (IKM)																
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**2.086.953.009.982,00**		**1.480.484.893.490,00**		**1.639.258.808.400,00**		**1.713.533.325.750,00**		**1.779.381.598.896,00**		**1.829.331.454.900,00**	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	70	75	%	80	14.737.532.500,00	85	15.600.000.000,00	90	16.179.200.000,00	95	16.353.000.000,00	100	16.709.500.000,00	100	17.077.104.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampa	Meningkatnya layanan sampah regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	55	60	%	65	70.666.451.530,00	70	12.200.000.000,00	75	17.288.000.000,00	80	20.420.000.000,00	85	20.865.156.000,00	85	21.320.016.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	han Regional																		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78	80	%	85	102.094.604.500,00	87	74.720.150.000,00	90	81.513.433.000,00	95	82.335.355.250,00	100	87.335.355.250,00	100	91.085.355.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	47,62	71,57	%	82,35	577.094.833.895,00	92,16	96.660.024.020,00	93,14	229.530.617.200,00	92,16	222.905.294.500,00	98,04	266.115.850.000,00	100	260.353.530.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5			Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	90,26	91,69	%	93,12		94,56		95,99		97,42		98,85		98,85		
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	13	26,09	%	39	11.204.418.000,00	47.83	78.950.000.000,00	52,17	50.250.000.000,00	56,52	75.500.000.000,00	69,57	50.000.000.000,00	69,57	50.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kopetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10	16,05	%	8,51	3.572.810.000,00	9,07	2.085.000.000,00	9,6	2.120.000.000,00	10,12	2.157.975.000,00	10,65	2.157.975.000,00	11,18	2.157.975.000,00	
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	0,34	40,45	%	45,44	4.800.734.250,00	50,44	3.850.000.000,00	55,44	3.925.000.000,00	60,44	3.950.750.000,00	65,44	3.950.750.000,00	70,44	3.975.250.000,00	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	40,13	42,55	%	33,09	123.881.479.375,00	35,00	39.785.651.875,00	38	53.934.218.000,00	40	49.794.453.000,00	43	58.464.575.396,00	45	59.993.749.300,00	
10			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	82,68	82,96	%	83,64		83,92		84,20		84,47		84,75		84,75		
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	58	62	%	65	575.169.425.094,00	67	667.194.818.458,00	70	687.694.818.500,00	73	711.546.637.000,00	75	716.546.637.000,00	75	722.203.417.500,00	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	86,93	82,22	%	83,22	569.584.220.625,00	84,22	457.268.539.163,00	85,22	464.322.771.700,00	86,22	495.272.938.000,00	87,22	523.272.938.000,00	88,22	566.522.938.000,00	
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		73,55	Nilai	75	34.146.500.213,00	76	32.170.709.974,00	77	32.500.750.000,00	78	33.296.923.000,00	80	33.962.862.250,00	82	34.642.119.450,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89,23	Indeks	90,23		91,23		92,23		93,23		94,23		95,23		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN**							**200.847.113.608,00**		**129.164.546.054,00**		**133.263.680.800,00**		**133.179.221.000,00**		**136.556.099.000,00**		**139.106.332.200,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PERMUKIMAN																		
1	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase perumahan dan permukiman tertata	24,27	27,26	%	27,53	3.819.027.680,00	27,79	5.250.000.000,00	28,05	5.375.000.000,00	28,32	5.400.625.000,00	28,58	5.518.350.000,00	28,85	5.635.227.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	9,54	9,54	%	7,64	21.043.005.504,00	5,73	41.370.408.631,00	3,82	42.363.250.000,00	1,91	42.514.950.000,00	0	43.241.775.000,00	0	44.238.805.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,97	9,69	%	9,52	10.822.054.500,00	9,30	10.615.000.000,00	9,09	11.970.000.000,00	8,88	10.959.950.000,00	8,67	12.000.000.000,00	8,46	12.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-	-	%	16,67	149.432.215.400,00	33,33	57.145.708.870,00	50,00	58.517.200.000,00	66,67	59.002.848.000,00	83,33	60.239.110.000,00	100,00	61.353.300.200,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	78,18	78,00	Nilai	78,50	15.730.810.524,00	79,00	14.783.428.553,00	79,50	15.038.230.800,00	80,00	15.300.848.000,00	80,50	15.556.864.000,00	81,00	15.879.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,83	90,75	Indeks	90,78		90,81		90,84		90,87		90,90		90,93		
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTE**							**89.501.342.968**		**98.082.750.190**		**100.296.409.000**		**102.233.662.550**		**104.278.335.800**		**106.471.861.150**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	RAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	n/a	65,50	%	66	4.154.962.500	66,50	4.350.000.000	71	4.544.400.000	75	4.719.650.000	78	4.814.043.000	80	4.915.900.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	n/a	65,50	%	66		66,50		71		75		78		80		
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	n/a	n/a	%	55		60		65		70		75		80		

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	50	%	50		50		50		50		50		50		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	64	68	Nilai	68,50	37.415.947.329	70	40.227.854.611	70,25	41.003.323.000	70,50	41.535.259.850	70,75	42.365.965.000	71	43.289.543.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	76,05	Indeks	76,10		77		78		79		80		81		
3	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Pra Bencana	0,410	0,530	Indeks	0,533	6.529.565.572,00	0,534	8.659.064.000,00	0,536	8.966.881.000,00	0,537	9.296.767.000,00	0,538	9.482.702.000,00	0,540	9.689.425.200,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	0,122	0,181	Indeks	0,182		0,183		0,183		0,184		0,185		0,186		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Indeks Pasca Bencana	0,048	0,089	Indeks	0,090		0,093		0,096		0,099		0,102		0,104		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	61,5	77,5	Nilai	65	8.292.710.626,00	61	11.240.308.296,00	64	11.469.750.000,00	67	11.605.618.000,00	70	11.837.730.700,00	73	12.074.485.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	63	75	Indeks	80		81		83		85		87		90		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Program Pencegahan,	Meningkatnya layanan	Cakupan penyebaran informasi dan	n/a	n/a	%	17,14	6.846.228.000,00	27,71	4.410.000.000,00	57.71	7.136.757.101,00	73,14	7.901.069.801,00	85,71	8.602.597.201,00	100	9.127.209.751,00	Dinas Pemadam Kebakara

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	pencegahan kebakaran	edukasi daerah rawan kebakaran																n dan Penyelamatan
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	n/a	n/a	%	80,00		82		84,00		86,00		88,00		90,00		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Penurunan luas area yang terbakar	45716	25702	M2	23654		19673		15691		11709		7727		3745		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan	n/a	42	%	60		65		70		75		80		85		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya kualitas tata kelola dan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas	n/a	87	Nilai	88,00	26.261.928.941,00	88,5	29.195.523.283,00	89,00	27.175.297.899,00	89,5	27.175.297.899,00	90,00	27.175.297.899,00	90,50	27.375.297.899,00	Dinas Pemadam Kebakara

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	kinerja perangkat daerah	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah																n dan Penyelamatan
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	88,4	Indeks	89,00		89,5		90,00		90,50		91,00		91,50		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**19.595.296.845,00**		**19.836.218.996,00**		**20.730.585.400,00**		**22.123.057.125,00**		**22.576.845.850,00**		**23.047.852.850,00**	
1	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya	77	80	%	80	2.040.829.200,00	100	2.181.243.000,00	100	2.257.500.000,00	100	2.596.311.450,00	100	2.645.225.000,00	100	2.695.129.500,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			dalam pelayanan sosial																
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100	%	100	3.129.650.000,00	100	2.225.000.000,00	100	2.337.840.000,00	100	2.691.775.000,00	100	2.750.450.000,00	100	2.810.959.900,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi	92	92	%	2	2.460.895.559,00	3	2.486.437.750,00	5	2.535.110.000,00	8	2.583.408.675,00	10	2.639.726.950,00	15	2.697.800.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			dari kemiskinan																
5	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	%	100%	1.392.091.000,00	100	2.541.062.250,00	100	2.975.000.000,00	100	3.275.000.000,00	100	3.345.350.000,00	100	3.423.947.700,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	64	70	Nilai	75	10.571.831.086,00	80	10.402.475.996,00	85	10.625.135.400,00	88	10.976.562.000,00	88	11.196.093.900,00	90	11.420.015.750,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.08	97	Indeks	99.75		99.75		99.75		99.75		99.75		99.75		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**494.498.870.886,00**		**421.072.917.661,00**		**440.653.335.100,00**		**449.344.620.575,00**		**460.321.135.500,00**		**474.090.908.550,00**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**13.937.111.838,00**		**17.736.139.301,00**		**18.141.186.000,00**		**18.430.443.000,00**		**18.700.799.000,00**		**19.059.772.650,00**	
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesesuaian kegiatan dengan rencana tenaga kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	N/A	60	%	64,29	119.597.000,00	-	0,00	71,43	100.000.000,00	71,43	100.000.000,00	71,43	100.000.000,00	71,43	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi	Persentase Pencari kerja yang bersertifikat Kompetensi	32	24,21	%	4	944.109.875,00	5,6	2.425.000.000,00	7,2	2.465.500.000,00	8,8	2.569.575.000,00	10.4	2.625.590.000,00	11,2	2.703.350.000,00	Dinas Tenaga Kerja
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja melalui penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan akses informasi pasar kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	6,78	5,95	%	16,17	600.806.875,00	16,50	895.000.000,00	17,00	900.000.000,00	17,50	929.905.000,00	18,00	950.176.000,00	18,50	970.889.000,00	Dinas Tenaga Kerja
4	Program Hubungan Industrial	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif melalui penyelesaian perselisihan yang cepat dan efektif	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50	51,34	%	90	2.490.037.875,00	91	4.935.000.000,00	92	4.950.000.000,00	93	5.127.465.000,00	94	5.127.465.000,00	95	5.230.014.300,00	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Meningkatnya jumlah pekerja yang tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	N/A	N/A	%	90		91		92		93		94		95		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	59,88	58	Nilai	79	9.782.560.213,00	80	9.481.139.301,00	81	9.725.686.000,00	82	9.703.498.000,00	83	9.897.568.000,00	84	10.055.519.350,00	Dinas Tenaga Kerja
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,35	87,85	Indeks	88		88,5		89		89,5		90		90,5		
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPU**							**12.381.417.337,00**		**17.199.364.298,00**		**17.659.256.800,00**		**17.969.242.700,00**		**18.338.664.000,00**		**18.717.368.750,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	AN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran responsif Gender (ARG)	8	9	%	10,5	391.297.833,00	11,5	2.220.900.000,00	12	2.270.200.000,00	12,5	2.305.294.200,00	13	2.355.550.000,00	14	2.407.350.000,00	#REF!
			Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	50,42	49,69	%	49,71		50,05		50,25		50,50		50,75		51,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	14,05	68,69	%	84,21	987.137.000,00	91,11	1.299.000.000,00	98,81	1.325.176.000,00	98,73	1.348.362.000,00	98,65	1.377.750.000,00	100	1.408.060.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	3	5	Layanan	5	184.545.500,00	5	773.800.000,00	6	842.000.000,00	7	898.204.400,00	8	917.785.000,00	8	937.976.250,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	17	25	%	42	46.453.000,00	67	150.000.000,00	75	170.000.000,00	83	205.700.000,00	92	205.700.000,00	100	205.700.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60,38	62,00	Indeks	63,00	268.512.000,00	64	830.000.000,00	65,00	850.000.000,00	65,50	861.540.000,00	66,00	880.325.000,00	66,50	899.692.150,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	46,81	69,57	%	88,24	2.449.025.000,00	89,47	2.359.848.000,00	92,26	2.416.485.000,00	95,18	2.449.522.200,00	97,56	2.502.921.750,00	100	2.557.985.000,00	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	78,42	79,79	Indeks	81,16		82,53		83,9		85,27		86,64		88,00		
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	68,25	76	Nilai	77	8.054.447.004,00	78	9.565.816.298,00	79	9.785.395.800,00	80	9.900.619.900,00	81	10.098.632.250,00	82	10.300.604.850,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,6	91,15	Indeks	92		93		94		95		96		97		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Perlindungan Anak
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**3.195.140.802,00**		**4.030.000.000,00**		**4.132.795.000,00**		**4.259.140.000,00**		**4.348.334.850,00**		**4.436.206.900,00**	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kadaulatan dan kemandirian pangan	Cadangan Pangan Masyarakat	23,45	24,25	Ton	24,37	171.043.250,00	24,49	280.000.000,00	24,62	285.440.000,00	24,74	290.640.000,00	24,86	300.975.950,00	24,98	300.975.950,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	PPH Ketersediaan	97,59	98,53	Skor	95	2.312.830.572,00	95,5	2.885.000.000,00	96	2.950.355.000,00	96,5	2.994.630.000,00	97	3.059.912.900,00	97,5	3.130.230.950,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			PPH Konsumsi	84,8	87,3	Skor	85,60		88,31		89,83		91,04		91,27		91,75		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	77,97	83,05	%	84,75	563.385.480,00	86,44	600.000.000,00	88,14	625.000.000,00	89,83	678.800.000,00	91,53	692.376.000,00	93,22	705.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	96	96	%	97	147.881.500,00	97	265.000.000,00	97	272.000.000,00	98	295.070.000,00	98	295.070.000,00	99	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**35.660.160.575**		**3.730.000.000**		**10.870.000.000**		**13.275.000.000**		**16.294.426.100**		**21.294.426.000**	
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah			%	60	252.762.000,00											

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kabupaten/Kota																
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	40	20	%	20	33.518.985.500,00	40	2.980.000.000,00	60	10.000.000.000,00	80	12.500.000.000,00	100	15.000.000.000,00	100	20.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Pengelolaan Tanah Kosong		Tersedianya Data Inventarisasi			Kelurahan	3	593.986.950,00											
4	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase luas penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat	50	20,54	%	20,68	1.294.426.125,00	20,82	750.000.000,00	21,03	870.000.000,00	21,10	775.000.000,00	21,24	1.294.426.100,00	21,24	1.294.426.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**							**115.155.887.526,00**		**111.250.993.796,00**		**116.774.670.000,00**		**114.178.433.100,00**		**116.433.831.450,00**		**117.809.499.300,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	LINGKUNGAN HIDUP																		
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	-	-	Indeks	50 ≤ x < 90	1.998.742.750,00	50 ≤ x < 90	2.318.745.000,00	50 ≤ x < 90	2.375.100.000,00	50 ≤ x < 90	2.406.857.300,00	50 ≤ x < 90	2.450.325.000,00	50 ≤ x < 90	2.510.425.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	-	-	Indeks	≤ 50		≤ 50		≤ 50		≤ 50		≤ 50		≤ 50		Dinas Lingkungan Hidup
			Tutupan Lahan	-	-	Koefisien	≥ 0,20		≥ 0,20		≥ 0,20		≥ 0,20		≥ 0,20		≥ 0,20		Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	-	-	%	5,30	5.573.479.100,00	5,55	6.034.828.160,00	5,75	6.925.625.000,00	5,95	7.190.186.450,00	6,15	7.190.186.450,00	6,30	7.348.350.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang	-	-	%	100,00	1.053.206.000,00	100,00	764.381.000,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.150.000.000,00	100,00	1.267.897.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		memitigasiDampak KRP	Ditindaklanjuti																
4	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Persetujuan lingkungan dan izin PPLH	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	-	-	%	25,00	188.264.500,00	30,00	310.000.000,00	40,00	310.000.000,00	50,00	310.000.000,00	60,00	350.000.000,00	70,00	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	-	-	%	100,00	299.797.000,00	100,00	269.092.000,00	100,00	327.500.000,00	100,00	398.700.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	%	100,00	466.309.500,00	100,00	500.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup	Meningkatnya Penyelesaian sengketa / Kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian sangketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	-	-	%	100,00	339.690.500,00	100,00	409.338.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	585.300.000,00	100,00	585.300.000,00	100,00	585.300.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	-	-	%	99,00	228.848.000,00	99,00	370.000.000,00	99,00	875.000.000,00	99,00	900.000.000,00	99,00	900.000.000,00	99,00	920.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Beracun (Limbah B3)																		
9	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Jumlah Sampah terkelola	-	-	%	99,00	39.175.413.029,00	99,00	25.724.638.258,00	99,00	34.900.825.000,00	99,00	30.508.399.150,00	99,00	31.173.450.000,00	99,00	31.859.265.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	-	Nilai	80,75	65.832.137.147,00	80,80	74.549.971.378,00	80,85	68.960.620.000,00	80,90	70.278.990.200,00	80,95	71.684.570.000,00	81,00	72.018.261.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,25	88,45	Indeks	88,45		88,46		88,47		88,48		88,49		88,50		
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI**							**18.445.672.857,00**		**21.118.314.362,00**		**21.960.113.500,00**		**22.245.163.700,00**		**22.537.567.000,00**		**23.282.380.500,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	N/A	N/A	%	7	956.206.650,00	10	700.000.000,00	15,00	915.000.000,00	20,00	950.000.000,00	25,00	950.000.000,00	30,00	1.000.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	65	70	%	75		80		85,00		90,00		95,00		95,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	N/A	16,6	%	33,3	770.348.000,00	66	785.000.000,00	66,60	805.000.000,00	83,30	825.000.000,00	100,00	850.000.000,00	100,00	879.437.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Kelahiran Yang	N/A	95,42	%	96		97		98,00		99,00		100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan																Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	N/A	16	%	33,30		63		66,60		83,00		100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	N/A	16,6	%	33,30		63		66,60		83,00		100,00		100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	N/A	N/A	%	58,00	1.844.296.504,00	60	1.750.000.000,00	62,00	1.950.000.000,00	64,00	1.950.000.000,00	66,00	1.950.000.000,00	68,00	2.115.625.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	1	1	Dokumen	3	136.320.000,00	5	100.000.000,00	5	125.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	175.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	69	62,5	Nilai	65,00	14.738.501.703,00	67	17.783.314.362,00	69,00	18.165.113.500,00	71,00	18.370.163.700,00	73,00	18.637.567.000,00	75,00	19.112.318.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,67	80,78	Indeks	82,00		82,50		83,00		83,50		84,00		84,50		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN**							**3.267.568.125,00**		**3.055.000.000,00**		**3.115.000.000,00**		**3.164.145.000,00**		**3.225.427.900,00**		**3.282.289.500,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	MASYARAKAT DAN DESA																		
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan	Persentase Kelurahan BERKEMBANG	-	6	%	20	466.999.750,00	40	275.000.000,00	60	290.000.000,00	80	305.725.000,00	94	309.839.500,00	94	309.839.500,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	-	100	%	100	2.800.568.375,00	100	2.780.000.000,00	100	2.825.000.000,00	100	2.858.420.000,00	100	2.915.588.400,00	100	2.972.450.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN**							**17.833.344.641,00**		**19.151.096.146**		**19.899.383.250**		**20.292.166.700**		**20.692.421.850**		**21.436.529.100**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
1	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	2,01	1,95	Rata-rata Anak per Wanita	1,95	1.128.124.050,00	1,95	1.324.000.000	1,95	1.354.452.000	1,95	1.375.452.000	1,95	1.425.436.850	1,95	1.673.650.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	62,21	70,15	%	70,65	3.974.185.050,00	71,15	4.735.041.000	71,65	4.843.950.000	72,15	4.850.950.000	72,65	4.903.950.000	73,15	5.012.605.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkata	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok	-	-	%	60	4.098.747.000,00	65	4.811.800.000	70	4.925.000.000	75	4.975.000.000	80	5.090.455.000	85	5.292.242.500	Dinas Pengendalian Pendudu

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	n Keluarga Sejahtera (KS)	Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera(KS)	Kegiatan Ketahanan Keluarga																k dan Keluarga Berencana
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,50	84,50	Nilai	84,50	8.632.288.541,00	85,00	8.280.255.146	85,50	8.775.981.250	86,00	9.090.764.700	86,50	9.272.580.000	87,00	9.458.031.600	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,38	84,48	Indeks	88,00		88,50		89,00		89,50		89,50		90,00		
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**117.500.111.789,00**		**83.458.313.958,00**		**85.433.313.000,00**		**86.588.000.000,00**		**88.280.769.500,00**		**90.105.639.950,00**	
1	Program Penyelenggaraan Lalu	Meningkatnya kualitas layanan	Konektivitas Darat	0,89	0,34	Nilai	0,58	57.421.976.626,00	0,31	25.145.000.000,00	0,46	25.724.335.000,00	0,62	26.087.937.500,00	0,77	26.650.696.250,00	1,00	27.235.769.000,00	Dinas Perhubungan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	transportasi darat	Persentase Kendaraan Layak Uji		52 %	%	53,00		55,00		56,00		58,00		59,00		61,00		Dinas Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	N/A	#REF!	%	40,00		45,00		50,00		55,00		60,00		65,00		Dinas Perhubungan
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Trasnportasi Sungai	Konektivitas Sungai	1,00	0,57	Rasio	0,57	4.982.151.750,00	0,71	3.855.000.000,00	0,71	3.943.665.000,00	0,86	3.999.562.500,00	0,86	3.999.562.500,00	1,00	4.086.750.000,00	Dinas Perhubungan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75,75	79	Nilai	80,00	55.095.983.413,00	82,00	54.458.313.958,00	84,00	55.765.313.000,00	86,00	56.500.500.000,00	88,00	57.630.510.750,00	89,00	58.783.120.950,00	Dinas Perhubungan
			Indeks Kepuasan	87,08	87,28	Indeks	87,48		87,68		87,98		88,18		88,48		88,78		

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Masyarakat (IKM)																
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**38.908.207.925,00**		**35.190.691.499,00**		**36.362.537.550,00**		**37.879.191.300,00**		**38.543.034.000,00**		**39.382.397.350,00**	
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	-	-	%	75,00	4.300.863.750,00	81,00	4.374.010.000,00	87,00	4.674.612.000,00	93,00	4.938.035.375,00	99,00	4.938.035.375,00	100	5.036.750.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang	-	-	%	80		82		87		90		92		97		

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			bekerjasama dengan pemerintah daerah																
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	-	52,50	%	93,90	22.128.008.932,00	95,15	18.356.230.000,00	96,14	18.978.423.250,00	97,61	20.044.588.625,00	98,80	20.450.500.000,00	100	20.928.058.750,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah titik layanan (endpoint)			Node	235		255		275		295		315		335		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73,50	67,25	Nilai	75	12.479.335.243,00	69,25	12.460.451.499,00	70	12.709.502.300,00	71	12.896.567.300,00	72	13.154.498.625,00	73	13.417.588.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,10	89,28	Indeks	88		89		90		91		92		93		Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**17.980.907.137,00**		**18.531.365.056,00**		**20.522.839.000,00**		**21.195.009.700,00**		**21.564.633.900,00**		**21.985.289.100,00**	
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya kualitas izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	1,61	2,00	%	2,12	82.602.750,00	2,12	150.000.000,00	2,38	153.450.000,00	2,91	155.625.000,00	3,44	155.625.000,00	3,44	165.625.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	6,20	17,79	%	19,91	118.321.125,00	19,91	200.000.000,00	20,06	204.600.000,00	20,06	207.500.000,00	20,06	207.500.000,00	20,06	210.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	4,43	4,43	%	8,47	311.495.000,00	9,52	450.000.000,00	10,58	460.800.000,00	11,64	466.875.000,00	12,70	466.875.000,00	12,70	475.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	12,08	19,32	%	19,84	199.261.000,00	19,84	920.540.000,00	19,84	945.000.000,00	20,11	956.441.000,00	20,37	956.441.000,00	20,37	975.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktifitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	18,50	19,00	%	19,98	330.370.000,00	19,98	597.578.000,00	19,98	610.325.000,00	19,98	620.883.000,00	20,06	620.883.000,00	20,06	635.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
6	Program Pemberdayaan Usaha	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang	Pertumbuhan Wirausaha	10,15	10,23	%	20,45	648.748.125,00	5,27	1.400.000.000,00	5,27	1.430.600.000,00	5,27	1.454.600.000,00	5,27	1.474.600.000,00	5,27	1.500.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	tangguh dan mandiri																	Kecil Menengah dan Perindustrian
7	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0,50	0,78	%	0,60	371.658.750,00	0,60	550.000.000,00	0,60	562.500.000,00	0,60	570.625.000,00	0,60	585.000.000,00	0,60	585.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	63,75	63,75	Nilai	66,00	15.918.450.387,00	67,00	14.263.247.056,00	68,00	16.155.564.000,00	68,00	16.762.460.700,00	68,00	17.097.709.900,00	68,00	17.439.664.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	85,05	Indeks	85,25		85,50		85,75		86,00		86,05		86,05		

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**27.996.272.871,00**		**20.839.420.481,00**		**24.337.716.000,00**		**24.623.223.700,00**		**25.069.054.100,00**		**25.582.076.250,00**	
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	154,45	106,33	%	100	1.125.845.950,00	100	950.000.000,00	100	971.850.000,00	100	985.625.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.025.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	5	7	%	10	802.045.600,00	15	1.100.000.000,00	20	1.126.400.000,00	25	1.142.900.000,00	30	1.142.900.000,00	35	1.175.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	60	65	%	70	481.202.000,00	75	650.000.000,00	80	665.000.000,00	85	674.375.000,00	90	685.000.000,00	95	700.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	%	100	150.982.000,00	100	450.000.000,00	100	460.800.000,00	100	467.550.000,00	100	467.550.000,00	100	475.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	50	55	%	60	264.378.000,00	65	300.000.000,00	70	306.900.000,00	75	311.250.000,00	80	311.250.000,00	85	315.475.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	78,00	79,00	Nilai	81,00	25.171.819.321,00	82,00	17.389.420.481,00	82,00	20.806.766.000,00	82,50	21.041.523.700,00	83,00	21.462.354.100,00	83,50	21.891.601.250,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00	92,00	Indeks	92,50		93,00		93,25		93,50		93,75		94,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**52.723.094.749,00**		**38.455.653.817,00**		**40.489.875.100,00**		**43.127.087.575,00**		**43.841.858.000,00**		**44.671.695.600,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pemuda	Rasio Wirausaha Pemuda	0,09	0,31	%	0,31	3.578.230.287,00	0,35	4.294.350.000,00	0,45	4.425.500.000,00	0,50	4.430.388.125,00	0,55	4.500.000.000,00	0,60	4.625.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	NA	5,86	%	5,92	2.397.831.675,00	5,99	1.800.000.000,00	6,06	1.941.400.000,00	6,12	2.072.500.000,00	6,19	2.100.000.000,00	6,26	2.125.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda	NA	NA	%	50	26.541.402.000,00	50	12.100.000.000,00	51	13.425.400.000,00	52	15.553.750.000,00	53	15.750.000.000,00	54	16.000.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatnya Jumlah Cabor Binaan (PPLPD)	Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	NA	NA	%	58,82		58,82		64,1		70,59				76,47		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	64	64	Nilai	70	20.205.630.787,00	71	20.261.303.817,00	72	20.697.575.100,00	73	21.070.449.450,00	74	21.491.858.000,00	75	21.921.695.600,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Daerah Kabupaten /Kota	perangkat daerah	Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah																Pariwisata
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	78	Indeks	85		85		86		86		87		87		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIKA**							**1.215.959.000,00**		**1.177.182.600,00**		**1.265.250.000,00**		**1.311.326.950,00**		**1.311.326.950,00**		**1.339.900.000,00**	
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)			Indeks	2,61	1.215.959.000,00	2,99	1.177.182.600,00	3,32	1.265.250.000,00	3,44	1.311.326.950,00	3,69	1.311.326.950,00	3,90	1.339.900.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21	**URUSAN PEMERIN**							**488.066.750,00**		**816.782.000,00**		**850.000.000,00**		**875.000.000,00**		**875.000.000,00**		**900.000.000,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TAHAN BIDANG PERSANDIAN																		
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	6,37	8,33	%	10,29	488.066.750,00	12,75	816.782.000,00	15,20	850.000.000,00	17,65	875.000.000,00	20,10	875.000.000,00	22,55	900.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2.539.060.700,00**		**1.675.000.000,00**		**1.719.600.000,00**		**2.547.886.650,00**		**2.576.860.000,00**		**2.550.084.350,00**	
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	50,00	70,00	%	70,00	954.476.350,00	80,00	725.000.000,00	80,00	750.000.000,00	90,00	954.476.350,00	90,00	965.500.000,00	100,00	965.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal	16,95	17,00	%	17,05	711.576.350,00	17,10	200.000.000,00	17,15	200.000.000,00	17,20	711.576.300,00	17,25	725.500.000,00	17,30	711.576.350,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	24,40	32,56	%	34,56	301.334.000,00	37,06	350.000.000,00	39,56	360.000.000,00	42,06	301.334.000,00	44,56	305.360.000,00	47,06	301.334.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Wisatawan/ Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas	66,00	70,00	%	73,00	571.674.000,00	75,00	400.000.000,00	77,00	409.600.000,00	79,00	580.500.000,00	80,00	580.500.000,00	80,00	571.674.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**13.761.638.639,00**		**20.970.050.347,00**		**15.227.249.900,00**		**15.443.973.000,00**		**15.483.950.000,00**		**15.795.353.250,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74,44	84,86	Nilai	85,00	1.922.624.500,00	85,25	9.691.589.000,00	85,50	3.490.020.700,00	85,75	3.475.000.000,00	86,00	3.500.000.000,00	86,25	3.575.000.000,00	
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	0,00	0,00	%	25,00	110.325.750,00	26,00	147.250.000,00	27,00	150.000.000,00	28,00	150.000.000,00	29,00	165.000.000,00	30,00	165.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		39,25	Nilai	71,00	11.728.688.389,00	71,50	11.131.211.347,00	72,00	11.587.229.200,00	72,5	11.818.973.000,00	73,00	11.818.950.000,00	73,5	12.055.353.250,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,29	83,00	Indeks	84,00		85		86,00		87,00		88,00		89,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**1.509.247.625,00**		**2.687.550.000,00**		**1.892.550.000,00**		**1.940.187.500,00**		**2.203.176.900,00**		**2.460.000.000,00**	
1	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	0,00	0,00	%	32,50	970.377.125,00	34,38	1.770.000.000,00	36,25	975.000.000,00	38,13	1.000.000.000,00	40,00	1.250.000.000,00	41,88	1.500.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0,00	0,00	%	100,00	460.579.750,00	100	812.550.000,00	100,00	812.550.000,00	100,00	831.250.000,00	100,00	844.239.400,00	100,00	850.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0,00	0,00	%	100,00	78.290.750,00	100	105.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	108.937.500,00	100,00	108.937.500,00	100,00	110.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**URUSAN PEMERIN**							**116.530.159.014,00**		**98.654.238.489,00**		**97.280.213.400,00**		**100.196.698.950,00**		**101.981.776.100,00**		**104.151.611.600,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TAHAN PILIHAN																		
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**27.087.549.445,00**		**14.345.873.025,00**		**14.658.585.000,00**		**14.850.823.650,00**		**15.154.863.200,00**		**15.447.798.800,00**	
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	15,012 Ton	15,242.0 Ton	Ton	15,475.5	15.700.145.000,00	15,709.05	2.812.011.758,00	15,946.10	2.879.500.000,00	16,186.72	2.917.462.250,00	16,430.98	2.981.062.900,00	16,678.92	3.046.645.000,00	Dinas Perikanan
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	822.7 Ton	866.88 Ton	Ton	873.4	1.950.694.000,00	879.97	2.005.000.000,00	886.59	2.053.120.000,00	893,26	2.080.187.500,00	899,97	2.125.000.000,00	906,74	2.171.325.000,00	Dinas Perikanan
3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Sumberdaya Perikanan	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	-	4	Kali	4	167.051.000,00	4	225.000.000,00	4	230.175.000,00	4	233.437.500,00	4	240.000.000,00	4	240.000.000,00	Dinas Perikanan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	dan Perikanan																		
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	Ton	74.06	525.300.000,00	76.17	730.000.000,00	78.35	745.790.000,00	80.59	745.790.000,00	82.89	757.375.000,00	85.26	757.375.000,00	Dinas Perikanan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71,85	69,25	Nilai	91,5	8.744.359.445,00	92	8.573.861.267,00	92,50	8.750.000.000,00	93	8.873.946.400,00	93,5	9.051.425.300,00	93,5	9.232.453.800,00	Dinas Perikanan
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	85,8	Indeks	86,5		87,5		88,5		89,5		90		90,5		
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.130.755.662,00**		**5.605.390.000,00**		**6.216.690.900,00**		**7.393.250.000,00**		**7.468.250.000,00**		**7.745.000.000,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	NA	NA	%	5	1.515.785.500,00	6	1.700.000.000,00	7	1.840.800.000,00	8	2.160.750.000,00	9	2.160.750.000,00	10	2.200.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	NA	NA	%	20	1.138.671.775,00	16	1.000.000.000,00	14	1.138.672.000,00	12	1.457.500.000,00	11	1.457.500.000,00	10	1.475.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	NA	0,15	%	0,17	1.682.218.950,00	0,21	1.555.390.000,00	0,24	1.652.218.900,00	0,26	1.700.000.000,00	0,30	1.725.000.000,00	0,33	1.770.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui	Meningkatnya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki	NA	17,15	%	18,89	1.794.079.437,00	20,93	1.350.000.000,00	22,96	1.585.000.000,00	25,58	2.075.000.000,00	27,91	2.125.000.000,00	29,06	2.300.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kekayaan Intelektual	Kekayaan Intelektual																
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**30.308.297.385,00**		**33.233.960.933,00**		**33.970.272.500,00**		**34.643.189.225,00**		**35.296.964.000,00**		**35.888.044.500,00**	
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah produksi pertanian	24053,63	24154,55	Ton	21469,78	2.440.978.991,00	21955,41	2.587.624.828,00	22491,41	2.645.140.000,00	22982,19	2.735.955.000,00	23500,11	2.790.674.100,00	24031,36	2.850.450.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Jumlah populasi ternak	4617706	1267934	Ekor	1331331		1397898		1467793		1541183		1618557		1699485		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	7,41	4,94	%	1,93	1.720.753.950,00	2,19	1.581.869.678,00	2,45	1.618.250.000,00	2,71	1.641.980.725,00	2,97	1.650.000.000,00	3,23	1.683.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Prasarana Pertanian																		
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	20	30	%	20	639.984.625,00	20	820.000.000,00	20	850.000.000,00	20	925.160.000,00	20	950.325.450,00	20	1.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Persentase Produk Ternak Yang ASUH	57	60	%	65		80		85		85		90		95		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	100	100	%	100	282.677.375,00	100	488.700.000,00	100	495.900.000,00	100	507.270.600,00	100	507.270.600,00	100	507.270.600,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	14000	12000	Ha	10000		9000		8000		7000		6000		5000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	100	100	%	100	138.389.000,00	100	180.000.000,00	100	185.000.000,00	100	186.840.000,00	100	186.840.000,00	100	186.840.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	78,57	78,57	%	76,92	1.262.922.794,00	78,26	1.688.200.000,00	85,00	1.725.002.500,00	85,00	1.752.351.600,00	85,00	1.780.350.000,00	85,00	1.780.350.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	68,04	60,16	%	47,81		49,8		53,78		57,77		61,75		65,74		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	77,50	80,75	Nilai	81,50	23.822.590.650,00	82,00	25.887.566.427,00	82,50	26.450.980.000,00	83,00	26.893.631.300,00	83,50	27.431.503.850,00	84,00	27.880.133.900,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,25	87,85	Indeks	88,50		88,75		89,00		89,25		89,50		89,75		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**51.052.427.787,00**		**42.066.592.531,00**		**38.971.190.000,00**		**39.784.723.250,00**		**40.536.986.000,00**		**41.465.768.300,00**	
1	Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	30,83	49,88	%	70,13	255.312.350,00	49,04	460.000.000,00	55,46	470.580.000,00	63,25	470.580.000,00	72,13	477.250.000,00	79,37	477.250.000,00	Dinas Perdagangan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien , merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	21,43	28,57	%	26,67	14.763.499.916,00	40,00	9.978.989.800,00	46,67	4.218.485.000,00	53,33	4.368.170.250,00	60,00	4.375.000.000,00	66,67	4.500.000.000,00	Dinas Perdagangan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	82,35	88,24	%	88,24	743.335.000,00	95,00	550.000.000,00	95,00	563.200.000,00	95,00	571.450.000,00	95,00	582.500.000,00	95,00	596.000.000,00	Dinas Perdagangan
4	Program Pengembangan ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	36.982.810,65	191.296.395,79	US$	110.694.000,00	213.836.250,00	130173376,00	350.000.000,00	153.080.636,00	350.000.000,00	179.220.636,00	350.000.000,00	205360636,00	363.125.000,00	231500636,00	363.125.000,00	Dinas Perdagangan
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Peningkatan pengamanan perdagangan menuju daerah tertib ukur	Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	63,52	84,95%	%	87,95	1.475.501.655,00	90,95	1.100.000.000,00	93,17	1.126.500.000,00	95,39	1.142.900.000,00	97,61	1.200.000.000,00	100	1.300.000.000,00	Dinas Perdagangan
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	14,71	20,00	%	25,00	245.765.000,00	25,00	260.000.000,00	33,33	270.000.000,00	44,44	269.750.000,00	50	275.000.000,00	54,55	300.000.000,00	Dinas Perdagangan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	50,30	42,50	Nilai	86,00	33.355.177.616,00	90	29.367.602.731,00	92,00	31.972.425.000,00	94,00	32.611.873.000,00	96,00	33.264.111.000,00	98,00	33.929.393.300,00	Dinas Perdagangan
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,43	84,09	Indeks	88,00		88		88,00		88,00		88,00		88,00		
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.951.128.735,00**		**3.402.422.000,00**		**3.463.475.000,00**		**3.524.712.825,00**		**3.524.712.900,00**		**3.605.000.000,00**	
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4,20	4,35	%	4,41	1.327.081.610,00	4,46	2.402.422.000,00	4,72	2.450.675.000,00	4,93	2.492.512.825,00	5,11	2.492.512.900,00	5,11	2.540.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	7,26	7,52	%	8,05	229.877.875,00	8,19	400.000.000,00	8,32	400.000.000,00	8,45	410.000.000,00	8,71	410.000.000,00	8,71	415.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	0,16	0,16	%	2,64	394.169.250,00	2,90	600.000.000,00	3,17	612.800.000,00	3,43	622.200.000,00	3,70	622.200.000,00	3,70	650.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**254.391.265.082,00**		**279.085.908.435,20**		**285.477.766.000,00**		**288.600.482.000,00**		**292.496.368.000,00**		**297.296.746.800,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**119.873.292.755,00**		**161.634.579.298,20**		**165.337.125.000**		**167.106.730.800,0**		**169.472.742.000,00**		**172.914.446.800,00**	
1	Program Pemerinta	Meningkatnya kinerja	Nilai Laporan Penyelenggara	3,45	3,58	Nilai	3,50	25.452.279.856,00	3,52	33.145.177.000,00	3,53	33.900.500.000	3,58	34.150.121.000,0	3,6	34.825.000.000,00	3,62	35.525.750.000,00	Sekretariat Daerah

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	han dan Kesejahteraan Rakyat	penyelenggaraan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	an Pemerintahan Daerah (LPPD)																
			Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi	N/A	N/A	%	80		80,00		82,5		85		87,5		90		
			Indeks Reformasi Hukum	55,8	80,3	Indeks	80,30		80,3		80,3		83		83		83		
			Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	51,72	73,69	%	76,92		80,77		86,42		88,46		92,31		96,15		
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang	Tingkat Inflasi	3,0	1,5	%	3	4.142.160.650,00	3	8.145.682.000,00	3	8.325.000.000	3	8.400.000.000	3	8.600.000.000,00	3	8.800.000.000,00	Sekretariat Daerah
			Persentase Capaian Target	N/A	N/A	%	95		95,5		96		96,5		97		97,5		

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Perekonomian dan Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan Daerah																
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	61,41	61,28	Indeks	70		70		73		75		78		80		
			Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi	N/A	75	%	80		85		95		95		95		100		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi	N/A	42,58	Indeks	42,58	90.278.852.249,00	42,58	120.343.720.298,20	46,1	123.111.625.000	46,1	124.556.609.800	46,1	126.047.742.000,00	50	128.588.696.800,00	Sekretariat Daerah
			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	56,25	73,25	Nilai	73,25		74		74,50		75		75,50		76		

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	88,29	Indeks	88,29		89		89,50		89,75		90		90,25		
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**134.517.972.327,00**		**117.451.329.137,00**		**120.140.641.000,00**		**121.493.751.200,00**		**123.023.626.000,00**		**124.382.300.000,00**	
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	NA	NA	%	100	34.284.991.700,00	100	35.129.978.500,00	100	23.801.112.388,00	100	24.801.112.388,00	100	22.601.112.388,00	100	24.801.112.388,00	Sekretariat DPRD
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	NA	NA	%	75,00		82,00		85,00		87,00		89,00		91,00		Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	NA	NA	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat DPRD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81,25	90	Nilai	90,00	100.232.980.627,00	90,00	82.321.350.637,00	94,00	96.339.528.612,00	95,00	96.692.638.812,00	95,00	100.422.513.612,00	97,00	99.581.187.612,00	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten /Kota		(AKIP) Perangkat Daerah																
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	90,05	Indeks	90,50		91,00		92,00		93,00		95,00		95,00		Sekretariat DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**368.248.077.017,00**		**441.390.593.391,80**		**447.025.751.100,00**		**452.295.603.050,00**		**456.239.507.858,00**		**460.575.680.800,00**	
5.01	**PERENCANAAN**							**41.498.457.605,00**		**53.571.655.825,80**		**53.666.600.300,00**		**53.936.200.300,00**		**55.381.750.000,00**		**56.710.840.000,00**	
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	85	88	%	90	10.594.177.743,00	95	10.916.213.500,00	100	10.216.250.000,00	100	10.410.350.000,00	100	10.728.900.000,00	100	10.964.940.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	85%	88%	%	90%	3.931.150.587,00	91%	4.522.997.974,00	92%	4.575.000.000,00	93%	4.650.500.000,00	94%	5.000.000.000,00	95%	5.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonomian dan SDA	85%	88%	%	90%		92%		93%		94%		95%		96%		
		Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	85%	88%	%	90%		92%		93%		94%		95%		96%		
3	Program Penunjang Urusan	Meningkatnya kualitas tata kelola dan	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas	73,25	71,75	Nilai	73	26.973.129.275,00	75	38.132.444.351,80	76	38.875.350.300,00	77	38.875.350.300,00	78	39.652.850.000,00	80	40.245.900.000,00	Badan Perencanaan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	kinerja perangkat daerah	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah																Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86	Indeks	87		90		91		92		93		95		
5.02	**KEUANGAN**							**282.861.169.555,00**		**304.911.612.289,00**		**306.434.974.800,00**		**309.876.427.800,00**		**311.864.502.808,00**		**313.262.266.250,00**	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	20,05	18,26	%	20,14	31.000.821.762,00	21,25	56.331.960.417,00	22,35	57.537.500.000,00	23,27	57.937.500.000,00	24,18	58.237.500.000,00	25,63	58.537.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	50,16	45,73	%	60,50		61,23		62,32		63,55		64,75		65,83		

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	91,54	95,65	%	96,10		96,80		97,00		97,20		97,50		97,75		
			Persentase Penurunan SILPA	41,35	51,33	%	50,56		34,66		30,75		26,42		17,94		10,19		
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,00	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	-2,56	11,15	%	14,15	92.953.062.793,00	17,15	98.349.327.621,00	20,15	98.850.000.000,00	23,15	98.850.000.000,00	26,15	98.850.000.000,00	29,15	98.850.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	50,75	71,00	Nilai	75,00	68.080.823.626,00	80,00	83.335.132.918,00	85,00	84.135.176.100,00	90,00	85.835.176.100,00	91,45	86.135.176.108,00	93,00	85.835.176.100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten /Kota		(AKIP) Perangkat Daerah																Aset Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,37	90,15	Indeks	92,00		93,00		94,00		95,00		96,00		97,00		
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	71,06	70,21	%	80,05	20.699.137.175,00	79,63	22.094.081.256,00	79,99	20.085.962.000,00	80,35	20.772.600.000,00	80,84	21.231.052.000,00	80,65	21.680.600.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya kualitas Pengawasan Dan pelaporan	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	14,6	2,76	%	30,61		7,44		2,64		4,29		4,23		4,23		Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	64,63	56,93	%	49,23		3,05		9,15		12,2		16,77		16,77		Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	68,25	65	Nilai	68	70.127.324.199,00	69	44.801.110.077,00	70	45.826.336.700,00	71	46.481.151.700,00	72	47.410.774.700,00	73	48.358.990.150,00	Badan Pendapatan Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	Indeks	85		86		87		88		89		90		Badan Pendapatan Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**							**35.576.696.330,00**		**72.042.325.277,00**		**73.727.551.000,00**		**74.743.912.450,00**		**75.042.755.050,00**		**76.477.574.550,00**	
1	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	94,05	92,11	%	100	6.720.979.157,00	100	9.447.500.000,00	100,00	9.630.450.000,00	100,00	9.801.781.250,00	100,00	9.801.781.250,00	90,00	9.911.781.250,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100	500 ASN	%	100		100		100,00		100,00		100,00		100,00		

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 %	1500 orang	%	100		100		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	100	79,30	%	95		95		96,00		97,00		98,00		100,00		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	45,44	71,5	Nilai	71,5	28.855.717.173,00	70,00	62.594.825.277,00	70,50	64.097.101.000,00	71,00	64.942.131.200,00	71,50	65.240.973.800,00	71,50	66.565.793.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,05	99,03	Indeks	95		90		90,00		90,00		90,00		90,00		
5.04	**PENDIDIKAN DAN**							**5.993.604.341,00**		**6.375.000.000,00**		**6.521.625.000,00**		**7.014.062.500,00**		**7.150.000.000,00**		**7.225.000.000,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PELATIHAN																		
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar , kader , manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	100	1177 orang	%	100	5.993.604.341,00	100	6.375.000.000,00	100	6.521.625.000,00	100	7.014.062.500,00	100	7.150.000.000,00	100	7.225.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100	100	%	100		100		100		100		100		100		
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**2.318.149.186,00**		**4.490.000.000,00**		**4.525.000.000,00**		**4.575.000.000,00**		**4.650.500.000,00**		**4.750.000.000,00**	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk	63	74	%	79,00	2.318.149.186,00	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)																Inovasi Daerah
2	Program Riset dan Inovasi	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	N/A	N/A	%	79,00	0,00	85,29	4.490.000.000,00	88,24	4.525.000.000,00	91,18	4.575.000.000,00	94,12	4.650.500.000,00	97,06	4.750.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**42.747.846.615,00**		**41.191.637.738,00**		**42.154.293.800,00**		**42.659.183.450,00**		**43.340.654.550,00**		**44.244.043.400,00**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**42.747.846.615,00**		**41.191.637.738,00**		**42.154.293.800,00**		**42.659.183.450,00**		**43.340.654.550,00**		**44.244.043.400,00**	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraa	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang	NA	NA	%	75,00	4.236.650.250,00	78,00	6.292.512.500,00	81,00	8.466.622.000,00	84,00	8.590.644.850,00	87,00	8.777.920.000,00	90,00	8.971.035.000,00	Inspektorat Daerah

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		n pemerintah daerah	Ditindaklanjuti																
			Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	84,72	84,62	%	84,00		85,20		86,40		87,60		88,80		90,00		
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	NA	NA	%	75,00	3.198.335.965,00	80,00	2.798.080.000,00	85,00	7.138.690.000,00	90,00	7.243.251.700,00	95,00	7.401.154.550,00	100	7.563.979.950,00	Inspektorat Daerah
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70,50	81,50	Nilai	83,25	35.312.860.400,00	85,00	32.101.045.238,00	86,75	26.548.981.800,00	88,50	26.825.286.900,00	90,25	27.161.580.000,00	92,00	27.709.028.450,00	Inspektorat Daerah
			Indeks Kepuasan	83,22	85,60	Indeks	88,00		90,40		92,80		95,20		97,60		100		Inspektorat Daerah

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Masyarakat (IKM)																
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**434.807.826.352,00**		**461.814.818.448,00**		**467.091.246.400,00**		**476.273.930.750,00**		**480.235.022.746,00**		**533.880.871.450,00**	
7.01	**KECAMATAN PALARAN**							**37.474.599.583,00**		**40.709.227.817,00**		**41.193.106.000,00**		**41.991.504.950,00**		**42.344.279.000,00**		**47.025.337.100,00**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	82,00	83,00	%	90,25	3.227.884.500,00	90,75	4.230.000.000,00	91,25	4.325.199.907,00	92,25	4.394.970.000,00	92,75	4.405.283.000,00	93,00	4.519.941.100,00	Kecamatan Palaran
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	83,00	84,00	%	85,00	20.074.199.368,00	86,50	20.284.495.304,00	87,75	20.284.500.000,00	88,50	20.794.500.000,00	89,75	20.794.500.000,00	91,00	25.044.500.000,00	Kecamatan Palaran

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	76,5	80,25	Nilai	81,25	14.172.515.715,00	81,35	16.194.732.513,00	81,45	16.583.406.093,00	81,55	16.802.034.950,00	81,65	17.144.496.000,00	81,75	17.460.896.000,00	Kecamatan Palaran
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,85	87,23	Indeks	88,50		89,25		90,50		91,00		91,50		92,00		Kecamatan Palaran
7.01	**KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**							**34.020.933.098,00**		**35.753.714.561,00**		**36.258.636.800,00**		**36.904.384.750,00**		**37.341.022.300,00**		**40.761.361.200,00**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0	%	91,05	2.574.047.248,00	93,00	3.152.800.000,00	93,15	3.228.467.200,00	93,30	3.275.759.200,00	93,45	3.341.270.000,00	93,60	3.408.075.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	82	83	%	95,00	14.392.821.615,00	95,50	14.715.287.200,00	96,00	14.715.287.200,00	96,50	15.072.287.200,00	97,00	15.072.287.200,00	97,50	18.047.287.200,00	Kecamatan Samarinda Seberang
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	64,75	Nilai	72,75	17.054.064.235,00	73,00	17.885.627.361,00	73,25	18.314.882.400,00	73,50	18.556.338.350,00	73,75	18.927.465.100,00	74,00	19.305.999.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	92,73	Indeks	86,3		92,00		92,25		92,50		92,75		93,00		
7.01	**KECAMATAN SAMARINDA ULU**							**64.804.745.297,00**		**69.766.095.520,00**		**70.533.228.400,00**		**71.931.850.850,00**		**72.442.226.650,00**		**80.971.538.750,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	90,00	91,00	%	92,00	4.167.148.380,00	92,75	4.740.000.000,00	93,00	4.853.760.000,00	93,25	4.924.860.000,00	93,50	5.020.357.200,00	93,75	5.123.460.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100,00	100,00	%	100,00	37.514.149.364,00	100,00	37.802.219.450,00	100,00	37.802.219.400,00	100,00	38.762.219.450,00	100,00	38.762.219.450,00	100,00	46.762.219.450,00	Kecamatan Samarinda Ulu
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,05	88,80	Nilai	89,00	23.123.447.553,00	89,50	27.223.876.070,00	90,00	27.877.249.000,00	90,50	28.244.771.400,00	91,00	28.659.650.000,00	91,50	29.085.859.300,00	Kecamatan Samarinda Ulu

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,50	75,00	Indeks	76,00		77,00		78,00		79,00		80,00		81,00		Kecamatan Samarinda Ulu
7.01	**KECAMATAN SAMARINDA ILIR**							**39.639.159.903,00**		**41.005.985.947,00**		**41.451.792.700,00**		**42.273.264.050,00**		**42.658.118.200,00**		**47.732.043.200,00**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	92,30	92,50	%	92,75	2.242.423.000,00	93,00	2.470.000.000,00	93,15	2.529.280.000,00	93,25	2.566.330.000,00	93,35	2.617.000.000,00	93,45	2.669.340.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,00	80,00	%	85,00	22.255.272.977,00	90,00	22.430.703.200,00	90,25	22.430.703.200,00	90,50	22.997.703.200,00	90,75	22.997.703.200,00	91,00	27.722.703.200,00	Kecamatan Samarinda Ilir

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73,25	77,25	Nilai	77,30	15.141.463.926,00	77,35	16.105.282.747,00	77,40	16.491.809.500,00	77,45	16.709.230.850,00	77,50	17.043.415.000,00	77,55	17.340.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,45	94,45	Indeks	94,47		94,49		94,51		94,53		94,55		94,57		
7.01	**KECAMATAN SAMARINDA UTARA**							**54.343.498.223,00**		**56.283.801.666,00**		**56.934.655.100,00**		**58.037.845.200,00**		**58.600.663.950,00**		**65.273.966.500,00**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	100	100	%	86,00	3.394.945.262,00	87,00	3.390.000.000,00	88,00	3.471.360.000,00	88,25	3.522.210.000,00	88,50	3.592.654.200,00	88,75	3.663.840.002,00	Kecamatan Samarinda Utara

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	98,92	100	%	94,25%	28.812.390.729,00	94,25%	29.164.906.500,00	94,50%	29.164.906.500,00	94,75	29.896.906.500,00	95,00	29.896.906.500,00	95,25	35.996.906.498,00	Kecamatan Samarinda Utara
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	72,25	74,42	Nilai	76,65	22.136.162.232,00	78,94	23.728.895.166,00	79,00	24.298.388.600,00	80,00	24.618.728.700,00	81,00	25.111.103.250,00	82,00	25.613.220.000,00	Kecamatan Samarinda Utara
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,4	85	Indeks	86,00		87,23		88,00		88,25		88,50		88.60		Kecamatan Samarinda Utara
7.01	**KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**							**59.050.805.640,00**		**62.066.395.415,00**		**62.683.727.400,00**		**63.956.776.700,00**		**64.284.607.600,00**		**72.401.114.300,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0,00	%	92,75	2.916.957.269,00	93,00	3.200.000.000,00	93,15	3.276.800.000,00	93,25	3.324.800.000,00	93,35	3.385.296.000,00	93,45	3.450.121.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	70,25	70,50	%	90.00	35.935.508.682,00	90,00	36.344.226.600,00	90,25	36.344.226.600,00	90,50	37.265.226.600,00	90,75	37.265.226.600,00	91,00	44.940.226.600,00	Kecamatan Sungai Kunjang
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	78,5	79,50	Nilai	80,00	20.198.339.689,00	80,25	22.522.168.815,00	80,35	23.062.700.800,00	80,45	23.366.750.100,00	80,55	23.634.085.000,00	80,65	24.010.766.700,00	Kecamatan Sungai Kunjang

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82,25	Indeks	90,00		90,50		91,00		91,50		92,00		92,50		Kecamatan Sungai Kunjang
7.01	**KECAMATAN SAMBUTAN**							**31.068.936.117,00**		**33.032.045.377,00**		**33.497.841.800,00**		**34.096.732.150,00**		**34.499.438.800,00**		**37.634.676.800,00**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	84,25	84,25	%	84,5	2.271.337.750,00	84,5	2.586.000.000,00	84,75	2.648.064.000,00	85	2.686.854.000,00	85,25	2.740.500.000,00	85,25	2.794.800.000,00	Kecamatan Sambutan
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	65	70	%	72	13.381.950.364,00	85	13.623.836.800,00	88	13.623.836.800,00	90	13.956.836.800,00	90,75	13.956.836.800,00	90,75	16.731.836.800,00	Kecamatan Sambutan

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	60,5	81,25	Nilai	62	15.415.648.003,00	62,5	16.822.208.577,00	65	17.225.941.000,00	65,5	17.453.041.350,00	66	17.802.102.000,00	66	18.108.040.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00	92,00	Indeks	88,00		90		90,00		91,00		91,00		91,00		Kecamatan Sambutan
7.01	**KECAMATAN SAMARINDA KOTA**							**31.541.886.738,00**		**32.766.042.460,00**		**33.146.933.200,00**		**33.814.953.900,00**		**34.087.567.746,00**		**37.564.975.900,00**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	90,55	92,30	%	92,50	2.217.077.350,00	92,75	2.430.000.000,00	93,00	2.488.320.000,00	93,25	2.524.770.000,00	93,50	2.575.265.400,00	93,75	2.627.214.000,00	Kecamatan Samarinda Kota

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	75,25	75,50	%	75,75	14.878.779.217,00	85,00	14.812.261.946,00	87,00	14.812.262.000,00	89,00	15.184.261.900,00	90,00	15.184.261.946,00	91,00	18.284.261.900,00	Kecamatan Samarinda Kota
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	45,25	68,00	Nilai	68,15	14.446.030.171,00	68,30	15.523.780.514,00	68,45	15.846.351.200,00	68,60	16.105.922.000,00	68,75	16.328.040.400,00	68,90	16.653.500.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75	86,50	Indeks	90,00		91,60		91,65		91,70		91,75		91,80		Kecamatan Samarinda Kota
7.01	**KECAMATAN SUNGAI PINANG**							**48.460.585.325,00**		**53.702.583.917,00**		**54.243.059.500,00**		**55.373.717.000,00**		**55.780.322.000,00**		**62.455.128.200,00**	

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	80,55	81	%	91,00	2.377.404.125,00	92,00	3.010.000.000,00	93,00	3.082.240.000,00	94,00	3.127.390.000,00	95,00	3.185.937.800,00	96,00	3.253.725.000,00	Kecamatan Sungai Pinang
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	60,00	70,00	%	90,00	28.852.707.148,00	91,00	29.099.434.200,00	92,00	29.099.434.200,00	93,00	29.843.434.200,00	94,00	29.843.434.200,00	95,00	36.043.434.200,00	Kecamatan Sungai Pinang
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	50,45	74,00	Nilai	76,00	17.230.474.052,00	77,35	21.593.149.717,00	77,45	22.061.385.300,00	77,50	22.402.892.800,00	77,65	22.750.950.000,00	77,70	23.157.969.000,00	Kecamatan Sungai Pinang

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	81,00	Indeks	81,55		90,00		90,25		90,50		91,00		91,50		Kecamatan Sungai Pinang
7.01	**KECAMATAN LOA JANAN ILIR**							**34.402.676.428,00**		**36.728.925.768,00**		**37.148.265.500,00**		**37.892.901.200,00**		**38.196.776.500,00**		**42.060.729.500,00**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	-	-	%	92,00	2.894.985.031,00	92,25	3.088.000.000,00	92,50	3.162.112.000,00	92,75	3.208.432.000,00	93,00	3.270.600.000,00	93,25	3.336.012.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100,00	100,00	%	85,00	17.135.398.138,00	90,00	17.173.099.500,00	90,25	17.173.099.500,00	90,50	17.599.099.500,00	90,75	17.599.099.500,00	91,00	21.149.099.500,00	Kecamatan Loa Janan Ilir

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71,00	72,50	Nilai	72,75	14.372.293.259,00	73,00	16.467.826.268,00	73,25	16.813.054.000,00	73,50	17.085.369.700,00	73,75	17.327.077.000,00	74,00	17.575.618.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,80	89,15	Indeks	90,00		90,25		90,50		90,75		91,00		91,25		Kecamatan Loa Janan Ilir
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**21.590.741.530,00**		**21.746.218.214,00**		**24.536.986.500,00**		**23.507.426.750,00**		**25.489.793.050,00**		**46.487.033.050,00**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**21.590.741.530,00**		**21.746.218.214,00**		**24.536.986.500,00**		**23.507.426.750,00**		**25.489.793.050,00**		**46.487.033.050,00**	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan	25,00	100,00	%	100,0	2.280.509.000,00	100,00	3.000.000.000,00	100,00	3.769.000.000,00	100,00	3.117.000.000,00	100,00	3.884.950.600,00	100,00	3.245.649.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Karakter Bangsa	karakter kebangsaan	Karakter Kebangsaan																
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100,00	100,00	%	100,0	4.727.329.905,00	100,00	5.691.501.905,00	100,00	6.618.907.000,00	100,00	5.913.470.450,00	100,00	6.849.970.450,00	100,00	28.122.629.450,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	14,63	100,00	%	100,0	220.130.375,00	100,00	650.000.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	14,63%	100,00	%	100,0	1.139.995.250,00	100,00	1.400.000.000,00	100,00	1.432.200.000,00	100,00	1.432.200.000,00	100,00	1.454.600.000,00	100,00	1.460.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkata	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	20,00	100,00	%	100,0	5.282.330.000,00	100,00	1.950.000.000,00	100,00	2.994.850.000,00	100,00	3.123.125.000,00	100,00	3.190.209.000,00	100,00	3.256.490.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program Pembangunan Daerah	Outcome	Indikator	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	n Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial																		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70,25	50,25	Nilai	80	7.940.447.000,00	80,6	9.054.716.309,00	80,7	9.272.029.500,00	80,8	9.421.631.300,00	80,9	9.610.063.000,00	80,9	9.802.264.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,6	76,7	Indeks	76,8		76,9		88		88		88		88		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								**5.800.536.976.897,00**		**5.385.666.248.564,00**		**5.518.857.537.000,00**		**5.669.535.783.800,00**		**5.832.730.639.618,00**		**6.001.994.130.000,00**	

Sumber: hasil proyeksi, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sekaligus pembangunan daerah, dibutuhkan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai tolok ukur keberhasilan pencapaian target-target pembangunan. Bab ini memuat serangkaian indikator kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Baik IKU maupun IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Adapun IKU pemerintah daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Samarinda Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**INDIKATOR KINERJA TUJUAN**									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,32	82,81	83,25	83,41	83,59	83,79	84,01	84,50
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,62	8,66	6,25-8,00	6,51-8,16	6,79-8,34	7,09-8,54	7,41-8,76	8,00-9,00
3	Rasio Gini	Indeks	0,323	0,330	0,325-0,330	0,310-0,320	0,294-0,312	0,288-0,306	0,282-0,300	0,276-0,285
4	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	104,97	114,69	118,41	130,25	143,27	157,61	173,36	190,70
5	Indeks Kota Layak Huni *(Livable City Index)*	Indeks	NA	NA	73,69	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,94	78,49	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
II	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**									
7	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	10,93	10,94	11,40	11,53	11,66	11,79	11,92	12,05
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,27	75,51	75,63	75,85	76,07	76,29	76,51	76,73
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,40	20,30	20,30	20,00	19,70	19,30	18,80	18,20
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,237	0,237**	0,237	0,236	0,234	0,232	0,231	0,231
11	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	47,88	50,66	51,74	52,83	54,09	54,97	55,60	56,08
12	Indeks Kemandirian Fiskal	%	21,16	18,79	21,19	22,62	22,65	22,99	23,30	23,56

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,97	89,68	89,68-90,68	90,18-91,19	90,68-91,69	91,19-92,19	91,69-92,69	92,19-93,19
14	Tingkat Kemiskinan	%	4,81	4,30	4,25	4,07	3,90	3,73	3,56	3,38
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,92	5,75	5,6 - 5,63	5,40 - 5,50	5,28 - 5,41	5,17 - 5,31	5,05 - 5,22	4,93-5,12
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	59,90	63,28	69,99	70,05	70,10	70,16	70,21	71,07
17	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	98,29	85,20	84,05	83,05	82,05	81,05	80,05	79,05
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	NA	NA	76,24	78,00	80,00	82,00	84,00	85,00
19	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	63,80	64,20	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50
20	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	64,10	65,33	67,50	70,50	73,50	76,00	78,50	80,10
21	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	-	-	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30
22	Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	72,32	73,00	74,50	75,52	76,54	77,56	78,58	79,60
23	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,02	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75

Sumber: hasil analisis, 2025

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan hasil kerja yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. IKD adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

Indikator Kinerja Daerah memuat berbagai indikator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**										
1	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	%	-	-	31,9	45,79	48,52	51,1	53,57	56,07	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	59,90	63,28	69,99	70,05	70,10	70,16	70,21	71,07	
3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	98,29	85,20	84,05	83,05	82,05	81,05	80,05	79,05	
4	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,97	89,68	89,68-90,68	90,18-91,19	90,68-91,69	91,19-92,19	91,69-92,69	92,19-93,19	
5	Persentase luasan wilayah banjir	%			72,51	70,92	68,43	66,77	64,28	62,61	
6	Persentase luas kawasan perkotaan yang terlayani fasilitas dasar	%			18,64	22,03	25,42	28,81	33,90	38,98	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Persentase pertambahan panjang jalan yang dibangun	%			14,80	36,51	54,15	70,75	84,23	100	
8	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	%	90,03	90,31	90,48	90,74	90,95	91,16	91,37	91,58	
9	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman yang layak	%	-	64,85	71,61	77,19	82,89	88,60	94,30	100,00	
10	Penurunan Emisi GRK:										
11	- Kumulatif	%	NA	NA	0,16	0,81	1,53	2,30	3,13	4,03	
	- Tahunan	%	NA	NA	-9,36	9,98	11,98	14,22	16,52	19,18	
12	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	50,00	50,61	68,34	68,44	68,54	68,64	68,74	69,54	
13	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	85,31	90,27	83,17	83,18	83,19	83,20	83,21	84,55	
14	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	29,92	35,13	48,44	48,51	48,58	48,64	48,71	48,78	
15	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	-	-	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Cakupan Layanan Perkotaan terhadap Air Minum Layak	%	89,97	85,5	86,85	88,19	88,94	90,89	92,24	93,58	
17	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	4,74	3,32	11,981	12,952	14,635	17,208	22,036	22,036	
18	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	81,9	78,98	80,00	85,02	90	95,02	100	100	
19	Indeks Kota Layak Huni (Indeks Liveable City)	Indeks	NA	NA	73,69	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00	
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	54,81	57,56	57,50	58,35	59,20	60,05	60,90	61,75	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,32	82,81	83,25	83,41	83,59	83,79	84,01	84,50	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,62	8,66	6,25-8,00	6,51-8,16	6,79-8,34	7,09-8,54	7,41-8,76	8-9	
3	Rasio Gini	Indeks	0,323	0,330	0,325-0,330	0,310-0,320	0,294-0,312	0,288-0,306	0,282-0,300	0,276-0,285	
4	PDRB per kapita	Juta Rupiah	104,97	114,69	118,41	130,25	143,27	157,61	173,36	190,70	
5	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	10,93	10,94	11,40	11,53	11,66	11,79	11,92	12,05	
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,39	15,4	15,73	15,77	15,81	15,85	15,89	15,93	
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD Sederajat	%	105,05	105,81	103,47	100	100	100	100	100	
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP Sederajat	%	106,62	108,34	104,38	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	29,53	31,99	29,03	29,32	29,61	29,90	30,19	30,49	
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Kesetaraan	%	4,17	4,45	3,40	3,43	3,46	3,49	3,52	3,55	
11	Skor Kemampuan Literasi	Nilai	69,35	71,90	73,70	75,50	77,30	79,10	80,90	82,70	
12	Skor Kemampuan Numerasi	Nilai	56,52	61,25	63,45	65,65	67,85	70,05	72,25	74,45	
13	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,27	75,51	75,63	75,85	76,07	76,29	76,51	76,73	
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,40	20,30	20,30	20,00	19,70	19,30	18,80	18,20	
15	Persentase Balita Gizi Kurang yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	79,33	82,75	70,00	73	75	80	85	87	
16	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	7616	7912	80	81	82	83	84	85	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Persentase Deteksi Dini Tuberculosis	%	100	80,45	83	85	90	95	100	100	
18	Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	80	82	83	84	85	86	87	88	
19	Persentase Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	%	43,5	100	2,55	30	40	50	60	65	
20	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,40	20,30	20,30	20,00	19,70	19,30	18,80	18,20	
21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,237	0,237**	0,237	0,236	0,234	0,232	0,231	0,231	
22	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,75	64,29	65,83	67,37	68,91	70,45	71,99	73,53	
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	61,17	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	
25	Tingkat Kemiskinan	%	4,81	4,30	4,25	4,07	3,90	3,73	3,56	3,38	
26	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	NA	51	51	52	52	53	53	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,92	5,75	5,60 - 5,63	5,40 - 5,50	5,28 - 5,41	5,17 - 5,31	5,05 - 5,22	4,93-5,12	
28	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94	94,25	94,42	94,59	94,76	94,93	95,10	95,28	
29	Persentase Ketersediaan Pangan (beras)	%	7,84	9,23	9,63	9,88	10,15	10,45	10,76	11,10	
30	Persentase kelurahan SWASEMBADA	%			3,4	5,1	8,5	13,6	16,9	16,9	
31	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Indeks	65,65	65,66	66,47	67	68	69	70	71	
32	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat	%	3,70	3,96	4,23	4,49	4,76	5,02	5,29	5,29	
33	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	%	4,06	3,97	3,97	4,17	4,37	4,57	4,77	4,77	
34	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	64,10	68,67	68,75	69	69,25	69,50	69,75	70,00	
35	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	0,00	0,00	46,15	47	47,05	47,50	47,95	48,40	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Produksi Perikanan	Ton	15,834.70	16,108.88	16,348.92	16,589.02	16,832.68	17,079.98	17,330.95	17,585.66	
37	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	Ton/Ha	4,41	4,48	4,57	4,66	4,75	4,85	4,94	5,04	
38	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	100	50	80	50	50	50	50	50	
39	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	16,85	17,07	17,23	17,40	17,56	17,73	17,90	18,08	
40	Realisasi Retribusi PAD Pengelolaan pasar Rakyat	Rp	8.561.398.621	6.356.341.821	8.680.160.000	9.407.831.000	10.223.830.000	11.188.514.000	11.874.198.000	12.785.734.000	
41	Rasio Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	4,20	4,35	4,41	4,46	4,72	4,93	5,11	5,11	
42	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	%	5,92	5,75	4,29-4,33	4,28-4,32	4,26-4,30	4,25-4,29	4,24-4,28	4,22-4,26	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	21,16	18,79	21,19	22,62	22,65	22,99	23,30	23,56	
3	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	47,88	50,66	51,74	52,83	54,09	54,97	55,60	56,08	
4	Nilai Investasi	Rupiah (Rp)	0	3.189.856.172.525,-	3,6 T	4,2 T	4,5 T	4,75 T	5 T	5,2T	
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	NA	NA	76,24	78,00	80,00	82,00	84,00	85,00	
6	Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)	Indeks	NA	NA	73,69	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00	
7	Persentase Peningkatan Investasi	%	86,7	-1,65	12,86	16,67	7,14	5,56	5,26	4,00	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
1	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	-	-	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	
2	Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	72,32	73,00	74,50	75,52	76,54	77,56	78,58	79,60	
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,02	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	
4	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	64,10	65,33	67,50	70,50	73,50	76,00	78,50	80,10	
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,94	78,49	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Indeks	87,01	89,07	90,1	91,1	92,5	92,5	93,4	95,5	
7	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	N/A	N/A	50	50	50	50	65	65	
8	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	NA	NA	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	21,28	21,33	22	22,5	23	23,5	24	24,5	
10	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	17,04	17,23	17,45	17,70	17,95	18,20	18,45	18,7	
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,20	3,27	3,30	3,33	3,36	3,39	3,42	3,45	
12	Kapabilitas APIP	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	
13	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	3,31	3,15	3,00	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	
14	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Indeks	3,00	2,96	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	
15	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	-	5,86	5,88	5,90	5,91	5,92	5,93	5,94	
16	Persentase penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	n/a	n/a	59,25	60,75	64,25	67,50	70,25	72,50	

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,58	0,80	0,805	0,810	0,815	0,820	0,825	0,830	
18	Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	80,67	80,78	82,00	82,5	83,00	83,5	84,00	84,50	
20	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	97,62	95,12	96,73	97,40	98,14	99,54	99,84	99,84	
21	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	-	2,22	2,61	2,99	3,32	3,44	3,69	3,90	
22	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	47,91	49,30	49,77	51,01	52,71	53,64	54,26	55,19	

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										
1	Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	Jumlah anak usia 7-12 thn yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan SD dibagi dengan jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan x 100%	98,68	99,30	%	99,70	99,79	99,88	99,97	100,00	100,00
2	Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS)	Jumlah anak usia 13-15 thn yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan SMP dibagi dengan jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan x100 %	98,54	98,76	%	97,52	97,88	98,24	98,60	98,96	99,32
3	Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi dengan jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan x 100%	55,34	57,30	%	60,48	63,66	66,84	70,03	73,06	76,10

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi dengan Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan x100%	39,35	44,04	%	52,25	58,74	65,23	71,72	72,48	73,25
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan yang menyelenggarakan muatan lokal dibagi dengan Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan x100%	60,00	63,16	%	66,49	66,82	67,15	67,48	68,14	68,14
6	Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi Sl/D-IV	Jumlah Guru SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan berkualifikasi SI/D-I dibagi dengan Jumlah Guru SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan x100%	88,96	90,49	%	90,94	91,39	91,84	92,29	93,21	93,21
7	Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	Jumlah Guru SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang memiliki Sertifikat Dibagi dengan Jumlah Guru SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan x100%	37,49	35,15	%	35,50	35,85	36,20	36,56	37,28	37,28

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										
1	Angka Kematian Ibu	(Jumlah Kematian Ibu Akibat Komplikasi Kehamilan, Persalinan, atau masa nifas / Jumlah Kelahiran Hidup) X 100000	109,47	80,68	Per 100.000 KH	122,51	109,04	97,84	86,06	77,97	69,14
2	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah orang terlayani dalam pelayanan kesehatan usia produktif + pelayanan kesehatan orang dengan hipertensi + pelayanan kesehatan orang dengan diabetes mellitus + pelayanan kesehatan ODGJ + pelayanan kesehatan bagi terduga TB + pelayanan kesehatan orang berisiko HIV / jumlah sasaran pelayanan kesehatan usia produktif + pelayanan kesehatan orang dengan hipertensi + pelayanan kesehatan orang dengan diabetes mellitus + pelayanan kesehatan ODGJ + pelayanan kesehatan bagi terduga TB + pelayanan kesehatan orang berisiko HIV x 100 %	87,00	86,60	%	80,00	82,00	81,9	84	86	88
3	Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	Persentase terpenuhinya 40 obat esensial + Persentase pemenuhan alkes + Persentase pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan Puskesmas / 3	86	90	%	81,00	81	82	83	84	84

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	Jumlah PKM, RS, Labkes milik pemkot samarinda yang terakreditasi / Jumlah seluruh PKM, RS, Labkes milik pemkot samarinda x 100 %	100	100	%	100,00	100,00	100	100	100	100
5	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Jumlah SDMK yang mengikuti tugas belajar/uji kompetensi/pelatihan/workshop/bimtek/kursus/seminar sesuai kompetensinya / jumlah target SDMK dalam 1 tahun (391 orang) x 100 %	43,5	100	%	2,55	30,00	40,00	50,00	60,00	65,00
6	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan / jumlah permohonan izin yang masuk x 100 %	100	96	%	85,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
7	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar	Jumlah produk makanan dan minuman yang memenuhi standar / jumlah produk makanan dan minuman yang diperiksa x 100 %	60	80	%	81,00	85,00	88,00	90,00	92,00	93,00
8	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Jumlah kader kesehatan terlatih/ Jumlah kader kesehatan x 100 %	85	95,3	%	25,00	30,00	45,00	60,00	75,00	85,00
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik / rumah tangga di kota Samarinda x 100	70	75	%	80	70	75	80	85	85

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Jumlah infrastuktur persampahan terbangun / jumlah kebutuhan infrastruktur persampahan x 100	55	60	%	65	87	90	95	100	100
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota X 100	78	80	%	85	92,16	93,14	92,16	98,04	100
4	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Jumlah bangunan gedung kondisi baik dan sedang / jumlah gedung di wilayah kabupaten/kota kewenangan Dinas PUPR X 100	47,62	71,57	%	82,35	94,56	95,99	97,42	98,85	98,85
5	Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan / Jumlah PBG yang diproses x 100	90,26	91,69	%	93,12	47.83	52,17	56,52	69,57	69,57
6	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata kewenangan Dinas PUPR / Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata Kabupaten/Kota	13	26,09	%	39	9,76	9,6	10,12	10,65	11,18

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis / jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota X 100	10	16,05	%	8,51	50,44	55,44	60,44	65,44	70,44
8	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan / Luas wilayah kota x 100	0,34	40,45	%	45,44	70,92	68,43	66,77	64,28	62,61
9	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) X 100%	40,13	42,55	%	33,09	35,00	38	40	43	45
10	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) / Luas daerah	82,68	82,96	%	83,64	83,92	84,20	84,47	84,75	84,75

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	Panjang Saluran drainase kondisi baik dan sedang / jumlah total saluran drainase x 100%	58	62	%	65	67	70	73	75	75
12	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) / Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota X 100	86,93	82,22	%	83,22	36,51	54,15	70,75	84,23	100
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**										
1	Persentase perumahan dan permukiman tertata	Luas perumahan dan permukiman tertata dibagi luas permukiman di Kota Samarinda	24,27	27,26	%	27,53	27,79	28,05	28,32	28,58	28,85
2	Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha dibagi luas SK Kawasan kumuh Kota Samarinda	9,54	9,54	%	7,64	5,73	3,82	1,91	0	0
3	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah RTLH Di Kota Samarinda dibagi Jumlah Rumah Di Kota Samarinda	9,97	9,69	%	9,52	9,30	9,09	8,88	8,67	8,46
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah perumahan yang ditangani PSU dibagi Jumlah perumahan yang sudah serah terima Di Kota Samarinda	-	-	%	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN**										

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	(*Jumlah Perda yang memuat sanksi yang ditegakkan*)/(*Jumlah keseluruhan perda yang memuat sanksi*)x 100	n/a	65,50	%	66	66,50	71	75	78	80
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	(*Jumlah pengaduan yang diselesaikan*)/(*Jumlah pengaduan yang masuk*)x 100	n/a	65,50	%	66	66,50	71	75	78	80
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	(Jumlah anggota perlindungan masyarakat yang sudah diberikan peningkatan kapasitas)/(Jumlah seluruh anggota perlindungan masyarakat) x 100	n/a	n/a	%	55	60	65	70	75	80
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	(Jumlah PPNS)/(Jumlah PPNS yang ditingkatkan kompetensinya) x 100	50	50	%	50	50	50	50	50	50
5	Indeks Pra Bencana	Total Prioritas/Fasilitasi x Bobot	0,410	0,530	Indeks	0,533	0,534	0,536	0,537	0,538	0,540
6	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	Total Prioritas/Fasilitasi x Bobot	0,122	0,181	Indeks	0,182	0,183	0,183	0,184	0,185	0,186
7	Indeks Pasca Bencana	Total Prioritas/Fasilitasi x Bobot	0,048	0,089	Indeks	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	0,104
8	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran	Jumlah wilayah titik rawan kebakaran yang sudah menerima informasi dan edukasi DIBAGI Jumlah titik rawan kebakaran DIKALI 100	n/a	n/a	%	17,14	27,71	57.71	73,14	85,71	100

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran yang terlayani dan terselesaikan DIBAGI Jumlah laporan/pengaduan DIKALI 100	n/a	n/a	%	80,00	82	84,00	86,00	88,00	90,00
10	Penurunan luas area yang terbakar	Luas area yang terbakar	45716	25702	M2	23654	19673	15691	11709	7727	3745
11	Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan yang laik DIBAGI Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan yang laik DIKALI 100	n/a	42	%	60	65	70	75	80	85
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										
1	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Jumlah SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dibagi jumlah SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial dikali 100 (Inmendagri)	77	80	%	80	100	100	100	100	100

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti dikali 100	100	100	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan dibagi jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial dikali 100	92	92	%	2	3	5	8	10	15
4	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dibagi jumlah korban bencana alam dikali 100	100	100	%	100%	100	100	100	100	100
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**										
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	(Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD/Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota)×100%	N/A	60	%	64,29	-	71,43	71,43	71,43	71,43

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase Pencari kerja yang bersertifikat Kompetensi	(Jumlah Pencari Kerja yang bersertifikat kompetensi/Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%	32	24,21	%	4	5,6	7,2	8,8	10.4	11,2
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	(Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan /Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%	6,78	5,95	%	16,17	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	(Jumlah Penyelesaian Perselisihan/Jumlah Laporan yang terdaftar) x 100%	50	51,34	%	90	91	92	93	94	95
5	Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(Jumlah Pekerja yang diberikan perlindungan sosial/Jumlah Pekerja terdata) x 100%	N/A	N/A	%	90	91	92	93	94	95
6	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB / Jumlah Tenaga Kerja	N/A	744.136,058	Rupiah	795.826,26	845.484,70	893.543,92	939.968,55	984.730,73	1.027.196,78
7	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Sruktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS)	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan) x 100%	50	51,34	%	50,4	51,71	53,51	54,41	54,41	55,31
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**										

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD dikali 100%	8	9	%	10,5	11,5	12	12,5	13	14
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) dikali 100%	69,57	83,43	%	86,71	89,47	92,26	95,18	97,56	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100.000	95,41 kasus per 100.000 penduduk perempuan	30,43 kasus per 100.000 penduduk perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan per 100.000	28,80 kasus per 100.000 penduduk perempuan	26,93 kasus per 100.000 penduduk perempuan	24,82 kasus per 100.000 penduduk perempuan	23,07 kasus per 100.000 penduduk perempuan	21,37 kasus per 100.000 penduduk perempuan	19,72 kasus per 100.000 penduduk perempuan
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**										

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah stok beras yang dikelola oleh masyarakat	23,45	24,25	Ton	24,37	24,49	24,62	24,74	24,86	24,98
2	PPH Ketersediaan	Nilai Skor PPH Ketersediaan pada tahun n	97,59	98,53	Skor	95	95,5	96	96,5	97	97,5
3	PPH Konsumsi	Nilai Skor PPH Konsumsi pada tahun n	84,8	87,3	Skor	85,60	88,31	89,83	91,04	91,27	91,75
4	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	Jumlah seluruh kelurahan dikurangi jumlah kelurahan/daerah rentan pangan sesuai FSVA tahun n dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100	77,97	83,05	%	84,75	86,44	88,14	89,83	91,53	93,22
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Hasil sample yang aman dikonsumsi dibagi total sample yang diuji dikali 100	96	96	%	97	97	97	98	98	99
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**										
1	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah Luasan tanah penyelesaian ganti kerugian dan santuan tanah untuk pembangunan / Jumlah total luas tanah untuk pembangunan x 100	40	20	%	20	60	60	80	100	100
2	Persentase luas penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat	Jumlah penguasaan tanah (Sertifikat + IMTN) / luas wilayah kota x 100	50	20,54	%	20,68	20,82	21,03	21,10	21,24	21,24
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										
1	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	Nilai IKA Titik pantau	-	-	Indeks	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	Nilai ISPU	-	-	Indeks	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50
3	Tutupan Lahan	Nilai Tutupan Lahan	-	-	Koefisien	≥ 0,20	≥ 0,20	≥ 0,20	≥ 0,20	≥ 0,20	≥ 0,20
4	Persentase RTH	(Luasan Kehati yang dikelola : Total Luasan Kehati) x 100%	-	-	%	5,30	5,55	5,75	5,95	6,15	6,30
5	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan yang wajib disusun	-	-	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Jumlah ketaatan terhadap izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan dibagi Total penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan x 100%	-	-	%	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
7	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyuluh Lingkungan Hidup untuk masyarakat yang Ditingkatkan Kompetensinya dibagi Jumlah Penyuluh Lingkungan Hidup yang mengikuti penyuluhan lingkungan hidup X 100%	-	-	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah partisipasi masyarakat yang dinilai dibagi jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti penghargaan PPLH dikali 100%	-	-	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Persentase Penyelesaian sangketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Jumlah pengaduan/ sengketa lingkungan hidup yang tertangani dibagi jumlah pengaduan/ sengketa lingkungan hidup yang masuk dikali 100%	-	-	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola dibagi Jumlah Limbah B3 Yang Dihasilkan X 100 %	-	-	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
11	Jumlah Sampah terkelola	Aplikasi Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	-	-	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**										
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Jumlah Penduduk yang telah mengaktivasi IKD / Total Penduduk yang wajib memiliki KTP x 100%	N/A	N/A	%	7	10	15,00	20,00	25,00	30,00
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA di Bagi jumlah anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari di kali 100	65	70	%	75	80	85,00	90,00	95,00	95,00
3	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Jumlah Penduduk yang memiliki akta kematian / Total Penduduk yang berstatus meninggal x 100%	N/A	16,6	%	33,3	66	66,60	83,30	100,00	100,00

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Jumlah anak usia 0 - 4 Thn yang memiliki akta kelahiran / Total anak usia 0 - 4 thn x 100%	N/A	95,42	%	96	97	98,00	99,00	100,00	100,00
5	Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Jumlah Penduduk yang memiliki akta perkawinan / Total Penduduk yang berstatus menikah x 100%	N/A	16	%	33,30	63	66,60	83,00	100,00	100,00
6	Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Jumlah Penduduk yang memiliki akta cerai / Total Penduduk yang berstatus cerai x 100%	N/A	16,6	%	33,30	63	66,60	83,00	100,00	100,00
7	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	Jumlah Informasi Kependudukan yang Tersedia dibagi Jumlah Total Informasi Kependudukan yang Tersedia dikali 100	N/A	N/A	%	58,00	60	62,00	64,00	66,00	68,00
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Penerbitan Buku Agregat per semester, Buku Kompilasi adminduk per semester dan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	1	1	Dokumen	3	5	5	5	5	5
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**										
1	Persentase Kelurahan BERKEMBANG	Jumlah kelurahan dengan status BERKEMBANG dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100	-	6	%	20	40	60	80	94	94
2	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dan diberdayakan dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan dikali 100	-	100	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**										
1	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun)	2,01	1,95	Rata-rata Anak per Wanita	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	Jumlah pengguna metode kontrasepsi modern/ Jumlah Pasangan Usia Subur	62,21	70,15	%	70,65	71,15	71,65	72,15	72,65	73,15
3	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB dibagi dengan jumlah PUS	17,32	8,77	%	7,10	6,10	5,30	5,50	5,10	5,00
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**										
1	Konektivitas Darat	Rasio Konektivitas jalan: IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah Trayek Trayek yang dilayani pada kota X Bobot trayek) dibagi (Jumlah Kebutuhan trayek pada kotsamarinda) = (jumlah trayek yang dilayani X 1) Jumlah kebutuhan trayek	0,89	0,34	Nilai	0,58	0,31	0,46	0,62	0,77	1,00

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase Kendaraan Layak Uji	Jumlah Taat Uji/Jumlah Wajib Uji x 100%		52 %	%	53,00	55,00	56,00	58,00	59,00	61,00
3	Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Jumlah kelengkapan jalan terpasang dibagi dengan jumlah kebutuhan kelengkapan jalan di kali 100%	N/A	N/A	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
4	Konektivitas Sungai	Rasio Konektivitas Sungai : IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) = Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Kota SamarindaX Bobot Lintas) dibagi (Jumlah Kebutuhan Lintas Penyebrangan pada Kota Samarinda) = (jumlah Lintas X1) /Jumlah Kebutuhan	1,00	0,57	Rasio	0,57	0,71	0,71	0,86	0,86	1,00
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**										
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Jumlah masyarakat yang puas terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah / Jumlah masyarakat target survei) dikali 100	-	-	%	75,00	81,00	87,00	93,00	99,00	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsitektur SPBE dibagi dengan jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100	-	52,50	%	93,90	95,15	96,14	97,61	98,80	100

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**										
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah KSP,USP / Jumlah koperasi aktif X 100	1,61	2,00	%	2,12	2,12	2,38	2,91	3,44	3,44
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi / Jumlah seluruh koperasi X 100	6,20	17,79	%	19,91	19,91	20,06	20,06	20,06	20,06
3	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi yang dinilai / Jumlah koperasi aktif x 100	4,43	4,43	%	8,47	9,52	10,58	11,64	12,70	12,70
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan / Jumlah seluruh koperasi X 100	12,08	19,32	%	19,84	19,84	19,84	20,11	20,37	20,37
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Jumlah koperasi yang difasilitasi / Jumlah seluruh koperasi X 100	18,50	19,00	%	19,98	19,98	19,98	19,98	20,06	20,06
6	Pertumbuhan Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan / Jumlah seluruh usaha mikro X 100	10,15	10,23	%	20,45	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
7	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi / Jumlah seluruh usaha mikro	0,50	0,78	%	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**										
1	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Jumlah Realisasi Investasi Total terhadap Target Investasi	154,45	106,33	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Jumlah Investor Saat Ini dikurang Jumlah Investor Sebelumnya dibagi Jumlah Investor Sebelumnya dikali 100 %	5	7	%	10	15	20	25	30	35
3	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Jumlah Keseluruhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibagi Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai ketentuan di kali 100 %	60	65	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Jumlah Permasalahan yang diselesaikan dibagi jumlah total permasalahan yang dilaporkan dikali 100 %	100	100	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data/Informasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah Data Informasi yang tersedia dikali 100 %	50	55	%	60	65	70	75	80	85
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Samarinda No. 28 Tahun 2018	86,00	92,00	Indeks	92,50	93,00	93,25	93,50	93,75	94,00
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**										
1	Rasio Wirausaha Pemuda	(Jml Pemuda yang Berwirausaha usia 16-30 Tahun / Jml Total Pemuda Usia 16-30 Tahun) x 100%	0,09	0,31	%	0,31	0,35	0,45	0,50	0,55	0,60

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	(Jml Masyarakat yang Aktif di Kepramukaan / Jml Penduduk Kota Samarinda) x 100%	NA	5,86	%	5,92	5,99	6,06	6,12	6,19	6,26
3	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda	(Jumlah Atlet yang lulus Seleksi / Jumlah atlet yang dikirim) x 100%	NA	NA	%	50	50	51	52	53	54
4	Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	(Jml Cabor PPLP yang Dibina / Jml Cabor yang ditetapkan DBON) x 100	NA	NA	%	58,82	58,82	64,1	70,59		76,47
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIKA**										
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Penghitungan indeks berdasarkan 5 (lima) domain yaitu prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional			Indeks	2,61	2,99	3,32	3,44	3,69	3,90
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**										
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah hasil nilai Indeks KAMI dibagi jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645, dikali 100%	6,37	8,33	%	10,29	12,75	15,20	17,65	20,10	22,55
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**										

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan ---------- ---------- x 100 % Jumlah Total Objek Pemajuan Kebudayaan yang Terdata	50,00	70,00	%	70,00	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal	Jumlah Partisipan dalam tinjauan sejarah lokal ---------- ---------- x 100 % Total Jumlah Populasi yg menjadi sasaran tinjauan sejarah lokal	16,95	17,00	%	17,05	17,10	17,15	17,20	17,25	17,30
3	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan ---------- ---------- x 100 % Total Cagar Budaya yang Terdata	24,40	32,56	%	34,56	37,06	39,56	42,06	44,56	47,06
4	Persentase Wisatawan/ Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas	Jumlah Wisatawan/Pengunjung Usia 10 tahun keatas ---------- ---------- x 100 % Total Wisatawan/Pengunjung Museum	66,00	70,00	%	73,00	75,00	77,00	79,00	80,00	80,00
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**										

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	TGM = 0,3 (TFM+TDM+TJB) + 0,05 (FAI+DAI) TGM = Tingkat Kegemaran Membaca TFM = Tingkat Frekuensi Membaca (per minggu) TDM = Tingkat Durasi Membaca (minimal 4-6 jam per hari) TJB = Tingkat Jumlah Buku (yang dibaca sampai tamat dalam jangka waktu 3 bulan) FAI = Frekuensi Akses Internet (per minggu) DAI = Durasi Akses Internet (per hari)	74,44	84,86	Nilai	85,00	85,25	85,50	85,75	86,00	86,25
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Realisasi pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	0,00	0,00	%	25,00	26,00	27,00	28,00	29.00	30.00
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**										

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	T = (a + i + s + j) / 4 T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,00	0,00	%	32,50	34,38	36,25	38,13	40,00	41,88
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	T = (m + b + g + a + c) / 5 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	0,00	0,00	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK									
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	T = i2/(i1+i2) x 100% T = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK i1 = Jumlah permohonan tidak sesuai prosedur perizinan i2 = Jumlah permohonan sesuai prosedur perizinan	0,00	0,00	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Ikan PUD + Produksi Ikan Laut	15,012 Ton	15,242.0 Ton	Ton	15,475.5	15,709.05	15,946.10	16,186.72	16,430.98	16,678.92
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan (Kolam + KJA)	822.7 Ton	866.88 Ton	Ton	873.4	879.97	886.59	893,26	899,97	906,74
3	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	-	4	Kali	4	4	4	4	4	4
4	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Perbulan dibagi 12 Bulan	-	-	Ton	74.06	76.17	78.35	80.59	82.89	85.26
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**										

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	(Jml Kunjungan Tahun Berjalan - Jml Kunjungan Tahun Lalu) / Jml Kunjungan Tahun Lalu x 100%	NA	NA	%	5	6	7	8	9	10
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	(Jml Media Pemasaran yang digunakan pada Tahun Berjalan - Jml Media Pemasaran yang digunakan pada Tahun Lalu) / Jml Media Pemasaran Tahun Lalu x 100%	NA	NA	%	20	16	14	12	11	10
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	(Jml Pelaku Parekraf yang Aktif dan Tervalidasi / Jml Penduduk Kota Samarinda) x 100%	NA	0,15	%	0,17	0,21	0,24	0,26	0,30	0,33
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	(Jml Pelaku Ekraf yang Memiliki Kekayaan Intelektual / Jml Total Pelaku Ekraf yang terdaftar pada aplikasi) x 100%	NA	17,15	%	18,89	20,93	22,96	25,58	27,91	29,06
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										
1	Jumlah produksi pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan + produksi hortikultura + produksi perkebunan + produksi peternakan	24053,63	24154,55	Ton	21469,78	21955,41	22491,41	22982,19	23500,11	24031,36
2	Jumlah populasi ternak	Populasi ternak (sapi, kambing/domba, babi, ayam buras, aneka ternak)	4617706	1267934	Ekor	1331331	1397898	1467793	1541183	1618557	1699485
3	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi baik dibagi jumlah seluruh prasarana yang tersedia dikali 100	7,41	4,94	%	1,93	2,19	2,45	2,71	2,97	3,23

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Jumlah Wilayah Yang Dikendalikan Dibagi Jumlah Wilayah Seluruhnya (Kecamatan) DiKali 100	20	30	%	20	20	20	20	20	20
5	Persentase Produk Ternak Yang ASUH	Jumlah Produk Ternak ASUH dibagi jumlah semua produk ternak Di Kali 100	57	60	%	65	80	85	85	90	95
6	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	Jumlah luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dibagi luas lahan yang terdampak dikali 100	100	100	%	100	100	100	100	100	100
7	Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	Jumlah luas area penanggulangan	14000	12000	Ha	10000	9000	8000	7000	6000	5000
8	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memperoleh rekomendasi dibagi jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin dikali 100	100	100	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Jumlah SDM penyuluh yang naik Nilai Prestasi Kerja (NPK) dibagi jumlah seluruh SDM penyuluh di tahun n dikali 100	78,57	78,57	%	76,92	78,26	85,00	85,00	85,00	85,00
10	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Poktan yang naik skornya dibagi Jumlah seluruh Poktan dikali 100	68,04	60,16	%	47,81	49,8	53,78	57,77	61,75	65,74
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**										

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan (IKK)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi Jumlah pelaku usaha di wilayah kota samarinda dikali 100 (Pusat perbelanjaan. Toko Swalayan dan Pasar)	37,84	77,3	%	65,85	68,83	72,90	78,59	85,37	88,35
2	Presentase kinerja realisasi pupuk (IKK)	Jumlah Realisasi Pupuk Bersubsidi Yang di salurkan dibagi RDKK dikali 100	46,36	68,36	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku dibagi Jumlah Potensi Alat UTTP (5726) dikali 100	63,52	84,95	%	87,95	90,95	93,17	95,39	97,61	100,00
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**										
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Jumlah Realisasi Investasi IKM Tahun N / Jumlah Target Investasi IKM Tahun N X 100	4,20	4,35	%	4,41	4,46	4,72	4,93	5,11	5,11
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Jumlah IKM yang diawasi / Jumlah NIB RBA Terbit X 100	7,26	7,52	%	8,05	8,19	8,32	8,45	8,71	8,71
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Jumlah IKM yang menyampaikan informasi industri / Jumlah seluruh IKM X 100	0,16	0,16	%	2,64	2,90	3,17	3,43	3,70	3,70
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**										

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai Evaluasi LPPD ditentukan oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,45	3,58	Nilai	3,50	3,52	3,53	3,58	3,6	3,62
2	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi	Persentase = Jumlah Urusan Kesejahteraan Rakyat hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti/Jumlah Urusan Kesejahteraan Rakyat hasil fasilitasi yang seharusnya ditindaklanjuti x 100%	N/A	N/A	%	80	80,00	82,5	85	87,5	90
3	Indeks Reformasi Hukum	Nilai Indeks Reformasi Hukum dari kementrian Hukum dengan formulasi f(x) = Xo + (Xmax - Xo)80%	55,8	80,3	Indeks	80,30	80,3	80,3	83	83	83
4	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Urusan yang berdampak = Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang berdampak pada program prioritas pembangunan daerah / Jumlah Perjanjian Kerja Sama x 100%	51,72	73,69	%	76,92	80,77	86,42	88,46	92,31	96,15
5	Tingkat Inflasi	Nilai diperoleh harus masuk dalam rentang inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	3,0	1,5	%	3	3	3	3	3	3
6	Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	Persentase = Jumlah Program Prioritas yang Mencapai Target / Jumlah Program Prioritas x 100%	N/A	N/A	%	95	95,5	96	96,5	97	97,5
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	ITKP = Jumlah Skor Aspek Penilaian / Skor Maksimal x 100%	61,41	61,28	Indeks	70	70	73	75	78	80

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi	Persentase = Jumlah Urusan SDA hasil fasilitas yang ditindaklanjuti/Jumlah Urusan SDA hasil fasilitasi yang seharusnya ditindaklanjuti x 100%	N/A	75	%	80	85	95	95	95	100
9	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi berdasarkan 11 indikator pada Permendagri 99 Tahun 2018 dengan formulasi: KOD = TNPD/JPD KOD = TNPD/JPD KOD : Kematangan Organisasi Perangkat Daerah TNPD : Total Nilai Kematangan PD JPD : Jumlah Perangkat Daerah	N/A	42,58	Indeks	42,58	42,58	46,1	46,1	46,1	50
10	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja sesuai Permenpan RB No 88 Tahun 2021 dan Perwali Samarinda No 11 Tahun 2024	56,25	73,25	Nilai	73,25	74	74,50	75	75,50	76
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Samarinda No. 28 Tahun 2018	N/A	88,29	Indeks	88,29	89	89,50	89,75	90	90,25

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**										
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Jumlah Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu / Jumlah Perda APBD yang wajib ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan x 100%	NA	NA	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Jumlah Raperda Tahun N yang ditetapkan / Jumlah Raperda dalam Propemperda Tahun N x 100%	NA	NA	%	75,00	82,00	85,00	87,00	89,00	91,00
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pengawasan DPRD terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah / jumlah peraturan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan x 100%	NA	NA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.01	**PERENCANAAN**										
1	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah (Jumlah Capaian Kinerja Perangkat Daerah di bagi dengan target Kinerja Perangkat Daerah dikali 100)	85	88	%	90	95	100	100	100	100
2	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	jumlah program, kegiatan, sub kegiatan,dan indikator yang selaras pada renja perangkat daerah dibagi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator pada rkpd dikali 100	85%	88%	%	90%	91%	92%	93%	94%	95%

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonomian dan SDA	jumlah program, kegiatan, sub kegiatan,dan indikator yang selaras pada renja perangkat daerah dibagi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator pada rkpd dikali 100	85%	88%	%	90%	92%	93%	94%	95%	96%
4	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	jumlah program, kegiatan, sub kegiatan,dan indikator yang selaras pada renja perangkat daerah dibagi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator pada rkpd dikali 100	85%	88%	%	90%	92%	93%	94%	95%	96%
5.02	**KEUANGAN**										
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Total Anggaran TKD untuk Pegawai di Luar Guru dibagi Total Anggaran Belanja Daerah dikali 100	20,05	18,26	%	20,14	21,25	22,35	23,27	24,18	25,63
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Total anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dibagi Total anggaran Belanja Daerah dikali 100	50,16	45,73	%	60,50	61,23	62,32	63,55	64,75	65,83
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Total Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar dibagi Total Anggaran Belanja Daerah dikali 100	91,54	95,65	%	96,10	96,80	97,00	97,20	97,50	97,75
4	Persentase Penurunan SILPA	Silpa Tahun Sebelumnya dikurangi Silpa Tahun Berjalan dibagi Silpa Tahun Sebelumnya dikali 100	41,35	51,33	%	50,56	34,66	30,75	26,42	17,94	10,19

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat Waktu dibagi Total Jumlah Laporan Keuangan dikali 100	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Nilai penambahan aset tetap dibagi Total nilai aset tetap awal periode dikali 100	-2,56	11,15	%	14,15	17,15	20,15	23,15	26,15	29,15
5.03	**KEPEGAWAIAN**										
1	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Jumlah formasi yang disetujui BKN/ Jumlah formasi yang diusulkan *100	94,05	92,11	%	100	100	100,00	100,00	100,00	90,00
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah ASN yang lulus peningkatan kompetensi / Jumlah seluruh ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi *100	100	500 ASN	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan karir/ Jumlah Formasi Jabatan yang belum terisi* 100	100 %	1500 orang	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	Jumlah ASN dengan SKP nilai baik / Jumlah Seluruh ASN yang dinilai SKP nya*100	100	79,30	%	95	95	96,00	97,00	98,00	100,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**										
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang menyelesaikan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional /Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan	100,00	1177 orang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		kompetensi dasar , manajerial dan fungsional*100									
2	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis /Jumlah Rencana ASN yang akan mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100,00	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										
1	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan dikali 100	N/A	N/A	%	79,00	85,29	88,24	91,18	94,12	97,06
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**										
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP	3,20	3,27	Nilai	3,30	3,33	3,36	3,39	3,42	3,45
2	Kapabilitas APIP	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3,00	3,00	Nilai	3,00	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**										
1	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi jumlah target peserta di kalikan 100%	25,00	100,00	%	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Organisasi Kemasyarakatan dibagi jumlah target peserta dikalikan 100%	14,63	100,00	%	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Jumlah Peserta koordinasi yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan didalam Penanganan Konflik Sosial dibagi jumlah target peserta di kalikan 100%	20,00	100,00	%	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: hasil analisis dan proyeksi, 2025

Samarinda
KOTA PUSAT PERADABAN

BAB V

magnificent
SAMARINDA

Bab V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD. RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD setiap tahun dan bagi dokumen perencanaan lainnya.

Dalam upaya menjamin pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai target pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan tahun 2025-2029 yakni “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju (Mandiri, Adil, ber-Jaya, Unggul)”, diperlukan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

5.1. Kaidah pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintah kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 dan Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Wali kota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Wali Kota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

3. Kepala Perangkat Daerah Kota Samarinda berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Perangkat Daerah Kota Samarinda berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
5. Penyusunan RKPD Kota Samarinda pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, yang selanjutkan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda Tahun 2026 sampai dengan 2030 serta Perubahan APBD Tahun 2025.
6. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya, yang selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional.
7. Bapperida melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, yang bersumber dari evaluasi hasil RKPD.
8. Bila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJMD, maka prosesnya mengikuti tahapan dan tatacara perubahan RPJMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan teknisnya.
9. Pemerintah Daerah melakukan manajemen risiko untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan rencana sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan.
10. Pembangunan jangka menengah Kota Samarinda membutuhkan aspek pembiayaan, untuk itu perlu peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan sektor non publik, dengan didukung inovasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan pada saat RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 berakhir, diperlukan adanya pedoman yang menjadi acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2030. Selanjutnya, RKPD 2030 akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2030.

Pemerintah daerah Kota Samarinda akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2030 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kota Samarinda 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034). Penyusunan RKPD Tahun 2030 akan memedomani perencanaan tahun 2030 yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029, selain pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Samarinda 2025-2045, juga mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2030 dan Rancangan RKP Tahun 2030.